



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ketentuan umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp1.060.004.317.566,16 (satu triliun enam puluh miliar empat juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam koma enam belas rupiah);
- b. realisasi anggaran belanja sebesar Rp1.106.346.253.405,06 (satu triliun seratus enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima koma nol enam rupiah);
- c. realisasi defisit sebesar Rp46.341.935.838,90 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah); dan
- d. realisasi pembiayaan terdiri dari:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
 3. pembiayaan neto sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.077.419.643.654,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp1.060.004.317.566,16 (satu triliun enam puluh miliar empat juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam koma enam belas rupiah), menimbulkan selisih lebih sebesar Rp17.415.326.087,84 (tujuh belas miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah);

- b. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.161.000.868.292,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp1.106.346.253.405,06 (satu triliun seratus enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima koma nol enam rupiah) menimbulkan selisih lebih Rp54.654.614.886,94 (lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah);
- c. defisit setelah perubahan sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp46.341.935.838,90 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah) menimbulkan selisih kurang sebesar Rp37.239.288.799,10 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh rupiah); dan
- d. anggaran pembiayaan terdiri atas:
 - 1. penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah) menimbulkan selisih kurang sebesar Rp557.079,31 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah);
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
 - 3. pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah) menimbulkan selisih kurang sebesar Rp557.079,31 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah).

Pasal 5

Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per tanggal 31 Desember Tahun 2024:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp83.581.224.638,64 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma enam puluh empat rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah);
- c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp557.079,95 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah); dan
- d. dengan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp37.238.731.719,79 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Uraian Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per tanggal 31 Desember Tahun 2024:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.897.263.718.217,52 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh dua rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp3.683.539.905,22 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima koma dua puluh dua rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.893.580.178.312,30 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas koma tiga puluh rupiah).

Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. kegiatan operasional, terdiri dari:
 1. pendapatan sebesar Rp931.242.731.469,49 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan koma empat puluh sembilan rupiah);
 2. beban sebesar Rp959.080.703.396,10 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sepuluh rupiah); dan
 3. defisit sebesar Rp29.294.022.826,61 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma enam puluh satu rupiah);
- b. pos Luar Biasa sebesar Rp1.501.050.900,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah); dan
- c. defisit pada laporan operasional sebesar Rp29.294.022.826,61 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma enam puluh satu rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per tanggal 31 Desember tahun 2024, terdiri dari:

- a. saldo kas awal di bendahara umum daerah per tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp83.604.601.384,64 (delapan puluh tiga miliar enam ratus empat juta enam ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat koma enam puluh empat rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp37.929.107.247,10 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh koma sepuluh rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp84.271.043.086,00 (minus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas Transitoris sebesar Rp44.103.355,62 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma enam puluh dua rupiah); dan
- e. saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.306.211.821,41 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh satu rupiah).

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

- a. jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.954.887.228.511,62 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sebelas koma enam puluh dua rupiah);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp29.294.022.826,61 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma enam puluh satu rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar -Rp32.013.027.372,71 (minus tiga puluh dua miliar tiga belas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah); dan
- d. jumlah ekuitas Akhir sebesar Rp1.893.580.178.312,30 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas koma tiga puluh rupiah).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III yang memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V yang memuat neraca;
- f. Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX yang memuat Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah terdiri dari:
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan daerah;
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ABDULLAH MOKOGINTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA (/2025)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Untuk menjamin hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR ...



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	1.077.419.643.654,00	1.060.004.317.566,16	-17.415.326.087,84	98,38
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.172.543.004,00	12.819.636.687,00	-1.352.906.317,00	90,45
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	14.152.543.004,00	12.718.523.413,00	-1.434.019.591,00	89,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	2.152.543.004,00	2.278.812.200,00	126.269.196,00	105,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.152.543.004,00	2.278.812.200,00	126.269.196,00	105,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.152.543.004,00	2.278.812.200,00	126.269.196,00	105,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.152.543.004,00	2.278.812.200,00	126.269.196,00	105,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	12.000.000.000,00	10.439.711.213,00	-1.560.288.787,00	87,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	12.000.000.000,00	10.439.711.213,00	-1.560.288.787,00	87,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.000.000.000,00	10.439.711.213,00	-1.560.288.787,00	87,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	12.000.000.000,00	10.439.711.213,00	-1.560.288.787,00	87,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.124.320.000,00	1.844.504.402,00	-279.815.598,00	86,83
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	173.000.000,00	199.660.500,00	26.660.500,00	115,41
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perdagangan dan ESDM	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.060.949.780.650,00	1.045.140.515.977,16	-15.809.264.672,84	98,51
5.02			KEUANGAN	1.060.949.780.650,00	1.045.140.515.977,16	-15.809.264.672,84	98,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	1.060.949.780.650,00	1.045.140.515.977,16	-15.809.264.672,84	98,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.060.949.780.650,00	1.045.140.515.977,16	-15.809.264.672,84	98,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.669.340.416,00	50.068.115.706,16	-601.224.709,84	98,81
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	41.429.800.000,00	41.777.573.317,00	347.773.317,00	100,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	5.000.000,00	-145.000.000,00	3,33
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.795.118.326,00	3.878.205.042,00	83.086.716,00	102,19
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.294.422.090,00	4.407.337.347,16	-887.084.742,84	83,24
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.878.503.931,00	986.867.418.179,00	-14.011.085.752,00	98,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.055.231.334,00	944.792.802.297,00	-11.262.429.037,00	98,82
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.823.272.597,00	42.074.615.882,00	-2.748.656.715,00	93,87
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	-1.196.954.211,00	87,27

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	-1.196.954.211,00	87,27
		5	Belanja	1.171.630.410.292,00	1.106.346.253.405,06	-65.284.156.886,94	94,43
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	607.610.064.582,00	562.015.379.716,75	-45.594.684.865,59	92,50
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	351.471.692.700,00	321.338.403.296,00	-30.133.289.404,44	91,43
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	351.471.692.700,00	321.338.403.296,00	-30.133.289.404,44	91,43
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	351.471.692.700,00	321.338.403.296,00	-30.133.289.404,44	91,43
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	311.849.183.487,00	285.298.353.369,00	-26.550.830.118,26	91,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	256.145.575.185,00	236.523.971.720,00	-19.621.603.465,44	92,34
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.605.756.599,00	41.917.584.599,00	-6.688.172.000,82	86,24
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	7.097.851.702,00	6.856.797.050,00	-241.054.652,00	96,60
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	39.622.509.213,00	36.040.049.927,00	-3.582.459.286,18	90,96
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.969.550.321,00	5.564.527.000,00	-405.023.321,18	93,22
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.394.840.200,00	27.614.065.927,00	-2.780.774.273,00	90,85
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.061.093.692,00	2.664.432.000,00	-396.661.692,00	87,04
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	197.025.000,00	197.025.000,00	0	100,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	183.081.933.823,00	170.339.039.943,75	-12.742.893.879,25	93,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	104.223.119.797,00	97.867.097.434,00	-6.356.022.363,00	93,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	104.223.119.797,00	97.867.097.434,00	-6.356.022.363,00	93,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	83.612.596.629,00	78.145.074.290,00	-5.467.522.339,00	93,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	58.639.911.532,00	55.124.616.846,00	-3.515.294.686,00	94,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.872.685.097,00	22.920.457.444,00	-1.952.227.653,00	92,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.610.523.168,00	19.722.023.144,00	-888.500.024,00	95,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.200.000,00	0	-25.200.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.325.587.171,00	4.040.506.761,00	-285.080.410,00	93,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.755.298.245,00	7.241.706.758,00	-513.591.487,00	93,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.504.437.752,00	8.439.809.625,00	-64.628.127,00	99,24
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	54.011.820.636,00	53.104.064.310,00	-907.756.326,00	98,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	54.011.820.636,00	53.104.064.310,00	-907.756.326,00	98,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.965.909.248,00	50.274.560.747,00	-691.348.501,20	98,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	31.889.366.233,00	31.567.311.251,00	-322.054.982,00	98,99
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.076.543.015,00	18.707.249.496,00	-369.293.519,20	98,06
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.045.911.387,00	2.829.503.563,00	-216.407.824,80	92,90
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.396.015.483,00	2.250.264.000,00	-145.751.483,80	93,92
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	649.895.904,00	579.239.563,00	-70.656.341,00	89,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Lolak	2.068.300.331,00	1.663.718.107,00	-404.582.224,00	80,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	2.068.300.331,00	1.663.718.107,00	-404.582.224,00	80,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.053.402.577,00	1.649.118.107,00	-404.284.470,00	80,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	42.000.000,00	0	-42.000.000,00	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.402.577,00	1.649.118.107,00	-362.284.470,00	81,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	14.897.754,00	14.600.000,00	-297.754,00	98,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.897.754,00	14.600.000,00	-297.754,00	98,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Pusian	1.474.241.200,00	1.372.168.727,00	-102.072.473,00	93,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.474.241.200,00	1.372.168.727,00	-102.072.473,00	93,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.474.241.200,00	1.372.168.727,00	-102.072.473,00	93,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.474.241.200,00	1.372.168.727,00	-102.072.473,00	93,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Mopuya	1.810.795.400,00	1.536.687.876,00	-274.107.524,00	84,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	1.810.795.400,00	1.536.687.876,00	-274.107.524,00	84,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.810.795.400,00	1.536.687.876,00	-274.107.524,00	84,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	59.500.000,00	0	-59.500.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.295.400,00	1.536.687.876,00	-214.607.524,00	87,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Passi Barat	1.482.591.494,00	1.136.058.414,00	-346.533.080,00	76,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.482.591.494,00	1.136.058.414,00	-346.533.080,00	76,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.454.512.294,00	1.118.202.084,00	-336.310.210,00	76,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	56.000.000,00	0	-56.000.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.398.512.294,00	1.118.202.084,00	-280.310.210,00	79,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	28.079.200,00	17.856.330,00	-10.222.870,00	63,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.079.200,00	17.856.330,00	-10.222.870,00	63,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Pangian	1.421.068.802,00	1.094.687.551,00	-326.381.251,00	77,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.421.068.802,00	1.094.687.551,00	-326.381.251,00	77,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.416.850.802,00	1.090.469.551,00	-326.381.251,00	76,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	56.000.000,00	56.000.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.850.802,00	1.034.469.551,00	-326.381.251,00	76,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.218.000,00	4.218.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.218.000,00	4.218.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Imandi	1.756.794.732,00	1.418.369.455,00	-338.425.277,00	80,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	1.756.794.732,00	1.418.369.455,00	-338.425.277,00	80,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.744.691.958,00	1.406.269.455,00	-338.422.503,00	80,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	59.500.000,00	59.500.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.191.958,00	1.346.769.455,00	-338.422.503,00	79,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	12.102.774,00	12.100.000,00	-2.774,00	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.102.774,00	12.100.000,00	-2.774,00	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Tungoi	1.182.434.065,00	866.706.675,00	-315.727.390,00	73,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	1.182.434.065,00	866.706.675,00	-315.727.390,00	73,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.166.238.291,00	854.612.925,00	-311.625.366,00	73,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	52.500.000,00	48.706.979,00	-3.793.021,00	92,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.738.291,00	805.905.946,00	-307.832.345,00	72,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	16.195.774,00	12.093.750,00	-4.102.024,00	74,67

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.195.774,00	12.093.750,00	-4.102.024,00	74,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Poigar	2.000.381.400,00	1.764.693.969,00	-235.687.431,00	88,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	2.000.381.400,00	1.764.693.969,00	-235.687.431,00	88,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.993.004.819,00	1.757.318.019,00	-235.686.800,00	88,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	64.174.000,00	0	-64.174.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.830.819,00	1.757.318.019,00	-171.512.800,00	91,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	7.376.581,00	7.375.950,00	-631	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.376.581,00	7.375.950,00	-631	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Tanoyan	1.227.437.032,00	1.034.150.263,00	-193.286.769,00	84,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	1.227.437.032,00	1.034.150.263,00	-193.286.769,00	84,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.216.533.632,00	1.023.250.263,00	-193.283.369,00	84,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	52.500.000,00	52.500.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.164.033.632,00	970.750.263,00	-193.283.369,00	83,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	10.903.400,00	10.900.000,00	-3.400,00	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.903.400,00	10.900.000,00	-3.400,00	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Doloduo	1.620.069.000,00	1.117.134.935,00	-502.934.065,00	68,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	1.620.069.000,00	1.117.134.935,00	-502.934.065,00	68,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.616.124.400,00	1.113.190.335,00	-502.934.065,00	68,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	59.500.000,00	46.962.656,00	-12.537.344,00	78,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.556.624.400,00	1.066.227.679,00	-490.396.721,00	68,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	3.944.600,00	3.944.600,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.944.600,00	3.944.600,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Maelang	1.430.962.350,00	1.118.251.306,75	-312.711.043,25	78,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	1.430.962.350,00	1.118.251.306,75	-312.711.043,25	78,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.416.826.944,00	1.104.121.306,75	-312.705.637,25	77,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	0	-45.500.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.371.326.944,00	1.104.121.306,75	-267.205.637,25	80,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	14.135.406,00	14.130.000,00	-5.406,00	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.135.406,00	14.130.000,00	-5.406,00	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Bilalang	1.090.844.787,00	708.462.311,00	-382.382.476,00	64,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	1.090.844.787,00	708.462.311,00	-382.382.476,00	64,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.079.724.837,00	708.462.311,00	-371.262.526,00	65,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	35.923.993,00	-9.576.007,00	78,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.224.837,00	672.538.318,00	-361.686.519,00	65,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	11.119.950,00	0	-11.119.950,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.119.950,00	0	-11.119.950,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Buntalo	792.166.400,00	640.097.433,00	-152.068.967,00	80,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	792.166.400,00	640.097.433,00	-152.068.967,00	80,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	783.409.388,00	631.340.433,00	-152.068.955,00	80,59

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.409.388,00	631.340.433,00	-152.068.955,00	80,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	8.757.012,00	8.757.000,00	-12	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.757.012,00	8.757.000,00	-12	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Inobonto	1.199.651.679,00	1.012.790.261,00	-186.861.418,00	84,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	1.199.651.679,00	1.012.790.261,00	-186.861.418,00	84,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.185.410.509,00	1.009.452.491,00	-175.958.018,00	85,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.410.509,00	1.009.452.491,00	-175.958.018,00	85,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	14.241.170,00	3.337.770,00	-10.903.400,00	23,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.241.170,00	3.337.770,00	-10.903.400,00	23,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Komangaan	718.574.132,00	476.520.751,00	-242.053.381,00	66,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5	BELANJA DAERAH	718.574.132,00	476.520.751,00	-242.053.381,00	66,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	718.574.132,00	476.520.751,00	-242.053.381,00	66,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.574.132,00	476.520.751,00	-242.053.381,00	66,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Tadoy	953.304.382,00	795.588.568,00	-157.715.814,00	83,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5	BELANJA DAERAH	953.304.382,00	795.588.568,00	-157.715.814,00	83,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	953.304.382,00	795.588.568,00	-157.715.814,00	83,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	0	-45.500.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.804.382,00	795.588.568,00	-112.215.814,00	87,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Werdhi Agung	1.103.549.766,00	731.246.195,00	-372.303.571,00	66,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5	BELANJA DAERAH	1.103.549.766,00	731.246.195,00	-372.303.571,00	66,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.084.765.384,00	712.461.813,00	-372.303.571,00	65,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.084.765.384,00	712.461.813,00	-372.303.571,00	65,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	18.784.382,00	18.784.382,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.784.382,00	18.784.382,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Konarom	1.000.000.000,00	513.076.266,00	-486.923.734,00	51,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000,00	513.076.266,00	-486.923.734,00	51,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	513.076.266,00	-486.923.734,00	51,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	0	-45.500.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	954.500.000,00	513.076.266,00	-441.423.734,00	53,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		UPTD Instalasi Farmasi	312.780.268,00	169.721.200,00	-143.059.068,00	54,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5	BELANJA DAERAH	312.780.268,00	169.721.200,00	-143.059.068,00	54,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	312.780.268,00	169.721.200,00	-143.059.068,00	54,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.780.268,00	169.721.200,00	-143.059.068,00	54,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	201.046.170,00	197.747.936,00	-3.298.234,00	98,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5	BELANJA DAERAH	201.046.170,00	197.747.936,00	-3.298.234,00	98,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	201.046.170,00	197.747.936,00	-3.298.234,00	98,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.046.170,00	197.747.936,00	-3.298.234,00	98,36
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.416.652.704,00	37.722.357.192,00	-1.694.295.512,40	95,70
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.416.652.704,00	37.722.357.192,00	-1.694.295.512,40	95,70

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	39.416.652.704,00	37.722.357.192,00	-1.694.295.512,40	95,70
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.354.190.525,00	16.450.745.021,00	-903.445.504,40	94,79
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.238.706.569,00	6.787.494.591,00	-451.211.978,40	93,77
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.463.949.043,00	9.011.715.517,00	-452.233.526,00	95,22
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	651.534.913,00	651.534.913,00	0	100,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.062.462.179,00	21.271.612.171,00	-790.850.008,00	96,42
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.637.700,00	197.969.000,00	-8.668.700,00	95,80
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.855.824.479,00	21.073.643.171,00	-782.181.308,00	96,42
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.412.892.878,00	17.184.229.641,00	-228.663.237,00	98,69
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.412.892.878,00	17.184.229.641,00	-228.663.237,00	98,69
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.412.892.878,00	17.184.229.641,00	-228.663.237,00	98,69
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.389.582.878,00	17.162.229.641,00	-227.353.237,00	98,69
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.066.621.120,00	1.983.996.266,00	-82.624.854,00	96,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.170.461.758,00	14.025.733.375,00	-144.728.383,00	98,98
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.152.500.000,00	1.152.500.000,00	0	100,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.310.000,00	22.000.000,00	-1.310.000,00	94,38
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.310.000,00	22.000.000,00	-1.310.000,00	94,38
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	11.006.389.433,00	10.477.765.819,00	-528.623.614,00	95,20
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.389.829.563,00	4.258.547.379,00	-131.282.184,00	97,01
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	4.389.829.563,00	4.258.547.379,00	-131.282.184,00	97,01
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.389.829.563,00	4.258.547.379,00	-131.282.184,00	97,01
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.137.777.432,00	2.083.884.878,00	-53.892.554,00	97,48
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.252.052.131,00	2.174.662.501,00	-77.389.630,00	96,56
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	6.616.559.870,00	6.219.218.440,00	-397.341.430,00	93,99
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	6.616.559.870,00	6.219.218.440,00	-397.341.430,00	93,99
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.509.036.870,00	6.112.084.310,00	-396.952.560,00	93,90
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.911.751.162,00	2.621.404.690,00	-290.346.472,00	90,03
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.597.285.708,00	3.490.679.620,00	-106.606.088,00	97,04
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	107.523.000,00	107.134.130,00	-388.870,00	99,64
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.523.000,00	32.450.000,00	-73.000,00	99,78
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.684.130,00	-315.870,00	99,58
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.220.503.043,00	4.953.583.825,00	-266.919.218,50	94,89
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	5.220.503.043,00	4.953.583.825,00	-266.919.218,50	94,89
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.220.503.043,00	4.953.583.825,00	-266.919.218,50	94,89
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.133.035.043,00	4.877.523.825,00	-255.511.218,50	95,02
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.334.685.157,00	2.264.812.957,00	-69.872.200,50	97,01
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.787.263.428,00	2.602.183.118,00	-185.080.310,00	93,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.086.458,00	10.527.750,00	-558.708,00	94,96
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	87.468.000,00	76.060.000,00	-11.408.000,00	86,96

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.468.000,00	76.060.000,00	-11.408.000,00	86,96
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	61.942.762.419,00	58.846.439.039,00	-3.096.323.380,84	95,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.148.035.652,00	4.245.983.839,00	-902.051.813,20	82,48
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.148.035.652,00	4.245.983.839,00	-902.051.813,20	82,48
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.148.035.652,00	4.245.983.839,00	-902.051.813,20	82,48
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.126.699.731,00	4.224.933.839,00	-901.765.892,20	82,41
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.285.244.740,00	2.220.091.692,00	-65.153.048,20	97,15
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.841.454.991,00	2.004.842.147,00	-836.612.844,00	70,56
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	21.335.921,00	21.050.000,00	-285.921,00	98,66
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.335.921,00	21.050.000,00	-285.921,00	98,66
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	-363.838.902,90	87,97
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	-363.838.902,90	87,97
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	-363.838.902,90	87,97
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	-363.838.902,90	87,97
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.948.234.159,00	1.836.286.371,00	-111.947.788,90	94,25
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.182.532,00	823.291.418,00	-251.891.114,00	76,57
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.141.656.416,00	4.047.751.636,00	-93.904.780,40	97,73
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan	4.141.656.416,00	4.047.751.636,00	-93.904.780,40	97,73
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.141.656.416,00	4.047.751.636,00	-93.904.780,40	97,73
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.122.531.626,00	4.032.566.636,00	-89.964.990,40	97,82
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.485.758.398,00	2.446.468.160,00	-39.290.238,40	98,42
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.636.773.228,00	1.586.098.476,00	-50.674.752,00	96,90
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.124.790,00	15.185.000,00	-3.939.790,00	79,40
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.124.790,00	15.185.000,00	-3.939.790,00	79,40
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	-59.053.297,90	98,21
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	-59.053.297,90	98,21
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	-59.053.297,90	98,21
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	-59.053.297,90	98,21
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.041.559.766,00	1.998.805.810,00	-42.753.956,90	97,91
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.667.131,00	1.248.367.790,00	-16.299.341,00	98,71
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.507.334.057,00	4.307.014.079,00	-200.319.978,76	95,56
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.507.334.057,00	4.307.014.079,00	-200.319.978,76	95,56
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.507.334.057,00	4.307.014.079,00	-200.319.978,76	95,56
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.342.079.277,00	4.176.414.079,00	-165.665.198,76	96,18
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.110.575.737,00	3.072.931.914,00	-37.643.823,15	98,79
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.231.503.540,00	1.103.482.165,00	-128.021.375,61	89,60
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	165.254.780,00	130.600.000,00	-34.654.780,00	79,03
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.254.780,00	130.600.000,00	-34.654.780,00	79,03
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.164.763.902,00	7.767.576.642,00	-397.187.260,00	95,14

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.164.763.902,00	7.767.576.642,00	-397.187.260,00	95,14
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.164.763.902,00	7.767.576.642,00	-397.187.260,00	95,14
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.965.481.732,00	7.570.096.642,00	-395.385.090,00	95,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.279.197.877,00	2.201.355.636,00	-77.842.241,00	96,58
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.186.283.855,00	4.868.741.006,00	-317.542.849,00	93,88
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	199.282.170,00	197.480.000,00	-1.802.170,00	99,10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.282.170,00	197.480.000,00	-1.802.170,00	99,10
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	-431.325.780,93	94,01
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	-431.325.780,93	94,01
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	-431.325.780,93	94,01
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	-431.325.780,93	94,01
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.149.589.348,00	2.004.948.552,00	-144.640.796,00	93,27
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.054.226.114,00	4.767.541.130,00	-286.684.984,93	94,33
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	-113.033.217,45	97,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	-113.033.217,45	97,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	-113.033.217,45	97,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	-113.033.217,45	97,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.125.920.517,00	3.071.597.503,00	-54.323.014,45	98,26
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.274.049.206,00	2.215.339.003,00	-58.710.203,00	97,42
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.455.204.330,00	8.344.130.158,00	-111.074.172,00	98,69
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.455.204.330,00	8.344.130.158,00	-111.074.172,00	98,69
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.455.204.330,00	8.344.130.158,00	-111.074.172,00	98,69
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.241.544.330,00	8.137.320.158,00	-104.224.172,00	98,74
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.180.528.251,00	2.159.727.564,00	-20.800.687,00	99,05
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.061.016.079,00	5.977.592.594,00	-83.423.485,00	98,62
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	213.660.000,00	206.810.000,00	-6.850.000,00	96,79
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.660.000,00	206.810.000,00	-6.850.000,00	96,79
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	-73.909.788,40	97,52
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		Dinas Koperasi dan UKM	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	-73.909.788,40	97,52
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	-73.909.788,40	97,52
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	-73.909.788,40	97,52
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.949.627.950,00	1.893.840.648,00	-55.787.302,40	97,14
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.027.967.985,00	1.009.845.499,00	-18.122.486,00	98,24
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	-196.084.761,00	95,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	-196.084.761,00	95,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	-196.084.761,00	95,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	-196.084.761,00	95,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.758.778.675,00	2.710.669.194,00	-48.109.481,00	98,26

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.226.161.922,00	1.078.186.642,00	-147.975.280,00	87,93
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,90	96,97
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,90	96,97
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,90	96,97
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,90	96,97
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.774.869.187,00	1.735.789.487,00	-39.079.700,90	97,80
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.085.150,00	995.687.674,00	-49.397.476,00	95,27
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.813.596.353,00	1.772.548.519,00	-41.047.834,00	97,74
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.391.183,00	582.929.313,00	-13.461.870,00	97,74
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41.842.175.099,00	36.922.493.659,00	-4.919.681.440,37	88,24
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,50	74,39
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,50	74,39
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,50	74,39
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,50	74,39
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.459.898.585,00	2.396.554.627,00	-63.343.958,50	97,42
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.494.314,00	800.852.645,00	-1.037.641.669,00	43,56
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.558.791.144,00	2.471.017.364,00	-87.773.780,00	96,57
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.558.791.144,00	2.471.017.364,00	-87.773.780,00	96,57
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.558.791.144,00	2.471.017.364,00	-87.773.780,00	96,57

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.543.622.328,00	2.462.017.364,00	-81.604.964,00	96,79
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.743.948.769,00	1.697.674.773,00	-46.273.996,00	97,35
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.673.559,00	764.342.591,00	-35.330.968,00	95,58
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.168.816,00	9.000.000,00	-6.168.816,00	59,33
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.168.816,00	9.000.000,00	-6.168.816,00	59,33
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	30.763.804.878,00	27.085.877.310,00	-3.677.927.568,00	88,04
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	24.239.472.412,00	21.056.053.063,00	-3.183.419.349,00	86,87
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	24.239.472.412,00	21.056.053.063,00	-3.183.419.349,00	86,87
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.740.060.132,00	20.574.235.113,00	-3.165.825.019,00	86,66
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.733.983.118,00	11.295.870.755,00	-438.112.363,00	96,27
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.006.077.014,00	9.278.364.358,00	-2.727.712.656,00	77,28
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	499.412.280,00	481.817.950,00	-17.594.330,00	96,48
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.420.060,00	125.725.000,00	-13.695.060,00	90,18
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.992.220,00	356.092.950,00	-3.899.270,00	98,92
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000		Dinas Perkebunan	6.524.332.466,00	6.029.824.247,00	-494.508.219,00	92,42
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	6.524.332.466,00	6.029.824.247,00	-494.508.219,00	92,42
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.524.332.466,00	6.029.824.247,00	-494.508.219,00	92,42
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.691.156.103,00	1.656.525.162,00	-34.630.941,00	97,95
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.833.176.363,00	4.373.299.085,00	-459.877.278,00	90,48
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perdagangan dan ESDM	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	-49.034.142,27	98,72
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perdagangan dan ESDM	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	-49.034.142,27	98,72
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	-49.034.142,27	98,72
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	-49.034.142,27	98,72
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.548.569.504,00	2.521.039.846,00	-27.529.658,00	98,92
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.289.558.130,00	1.268.053.646,00	-21.504.484,27	98,33
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	347.940.933,00	345.705.621,00	-2.235.312,60	99,36
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perdagangan dan ESDM	347.940.933,00	345.705.621,00	-2.235.312,60	99,36
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	347.940.933,00	345.705.621,00	-2.235.312,60	99,36
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	347.940.933,00	345.705.621,00	-2.235.312,60	99,36
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.940.933,00	345.705.621,00	-2.235.312,60	99,36
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.774.794.323,00	73.845.043.366,00	-5.929.750.957,79	92,57
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	40.511.586.580,00	38.614.574.065,00	-1.897.012.515,79	95,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	14.487.814.207,00	16.204.626.846,00	1.716.812.638,83	111,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.487.814.207,00	16.204.626.846,00	1.716.812.638,83	111,85

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.487.814.207,00	16.204.626.846,00	1.716.812.638,83	111,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.487.814.207,00	13.956.374.926,00	-531.439.281,17	96,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.248.251.920,00	2.248.251.920,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		Bagian Tata Pemerintahan	750.637.091,00	590.336.020,00	-160.301.071,00	78,64
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	750.637.091,00	590.336.020,00	-160.301.071,00	78,64
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	750.637.091,00	590.336.020,00	-160.301.071,00	78,64
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.637.091,00	590.336.020,00	-160.301.071,00	78,64
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Hukum	1.011.385.157,00	842.737.138,00	-168.648.019,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.011.385.157,00	842.737.138,00	-168.648.019,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.011.385.157,00	842.737.138,00	-168.648.019,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.385.157,00	842.737.138,00	-168.648.019,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Pembangunan	232.305.060,00	181.445.000,00	-50.860.060,00	78,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	232.305.060,00	181.445.000,00	-50.860.060,00	78,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	232.305.060,00	181.445.000,00	-50.860.060,00	78,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.305.060,00	181.445.000,00	-50.860.060,00	78,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	376.759.509,00	285.568.956,00	-91.190.553,00	75,80
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	376.759.509,00	285.568.956,00	-91.190.553,00	75,80
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	376.759.509,00	285.568.956,00	-91.190.553,00	75,80
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.759.509,00	285.568.956,00	-91.190.553,00	75,80
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.415.725.455,00	4.090.212.479,00	-325.512.976,00	92,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	4.415.725.455,00	4.090.212.479,00	-325.512.976,00	92,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.415.725.455,00	4.090.212.479,00	-325.512.976,00	92,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.725.455,00	1.705.212.479,00	-245.512.976,00	87,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	2.465.000.000,00	2.385.000.000,00	-80.000.000,00	96,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		Bagian Organisasi	286.523.166,00	218.032.294,00	-68.490.872,00	76,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	286.523.166,00	218.032.294,00	-68.490.872,00	76,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	286.523.166,00	218.032.294,00	-68.490.872,00	76,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.523.166,00	218.032.294,00	-68.490.872,00	76,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.006.942.633,00	768.417.539,00	-238.525.094,00	76,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	1.006.942.633,00	768.417.539,00	-238.525.094,00	76,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.006.942.633,00	768.417.539,00	-238.525.094,00	76,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	165.880.000,00	141.537.500,00	-24.342.500,00	85,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.062.633,00	626.880.039,00	-214.182.594,00	74,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Umum	14.767.556.670,00	12.737.402.482,00	-2.030.154.188,62	86,25
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	14.767.556.670,00	12.737.402.482,00	-2.030.154.188,62	86,25
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.225.620.387,00	12.227.217.482,00	-1.998.402.905,70	85,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	240.000.000,00	240.000.000,00	0	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.985.620.387,00	11.987.217.482,00	-1.998.402.905,70	85,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	541.936.282,00	510.185.000,00	-31.751.282,92	94,14

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	526.936.282,00	510.185.000,00	-16.751.282,92	96,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0	-15.000.000,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.832.095.271,00	2.427.928.961,00	-404.166.310,00	85,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	2.832.095.271,00	2.427.928.961,00	-404.166.310,00	85,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.832.095.271,00	2.427.928.961,00	-404.166.310,00	85,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.832.095.271,00	2.427.928.961,00	-404.166.310,00	85,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010		Bagian Perekonomian	343.842.361,00	267.866.350,00	-75.976.011,00	77,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	343.842.361,00	267.866.350,00	-75.976.011,00	77,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	343.842.361,00	267.866.350,00	-75.976.011,00	77,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.842.361,00	267.866.350,00	-75.976.011,00	77,90
4.02			SEKRETARIAT DPRD	39.263.207.743,00	35.230.469.301,00	-4.032.738.442,00	89,73
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000		Sekretariat DPRD	39.263.207.743,00	35.230.469.301,00	-4.032.738.442,00	89,73
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	39.263.207.743,00	35.230.469.301,00	-4.032.738.442,00	89,73
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	38.258.823.941,00	34.350.370.141,00	-3.908.453.800,05	89,78
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.061.256.301,00	14.348.890.461,00	-712.365.840,00	95,27
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.197.567.640,00	20.001.479.680,00	-3.196.087.960,05	86,22
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.004.383.801,00	880.099.160,00	-124.284.641,95	87,63
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	616.297.801,00	606.697.090,00	-9.600.711,95	98,44
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	314.160.000,00	199.502.070,00	-114.657.930,00	63,50
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.926.000,00	73.900.000,00	-26.000,00	99,96
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	263.767.343.041,00	261.848.494.777,31	-1.918.848.263,71	99,27
5.01			PERENCANAAN	7.441.459.016,00	7.227.097.470,00	-214.361.546,00	97,12
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.441.459.016,00	7.227.097.470,00	-214.361.546,00	97,12
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.441.459.016,00	7.227.097.470,00	-214.361.546,00	97,12
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.363.699.938,00	7.150.347.470,00	-213.352.468,00	97,10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.879.309.584,00	3.778.805.927,00	-100.503.657,00	97,41
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.484.390.354,00	3.371.541.543,00	-112.848.811,00	96,76
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	77.759.078,00	76.750.000,00	-1.009.078,00	98,70
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.759.078,00	76.750.000,00	-1.009.078,00	98,70
5.02			KEUANGAN	249.818.503.558,00	248.488.558.017,31	-1.329.945.540,71	99,47
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	249.818.503.558,00	248.488.558.017,31	-1.329.945.540,71	99,47
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	249.818.503.558,00	248.488.558.017,31	-1.329.945.540,71	99,47
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.249.107.633,00	15.839.178.770,00	-409.928.863,02	97,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.243.745.413,00	7.987.531.253,00	-256.214.160,60	96,89
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.005.362.219,00	7.851.647.517,00	-153.714.702,42	98,08
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	72.125.024,00	64.300.000,00	-7.825.024,00	89,15
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.125.024,00	64.300.000,00	-7.825.024,00	89,15
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	-720.276.300,00	67,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	-720.276.300,00	67,57

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31	-191.915.353,69	99,92
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.804.966.301,00	5.790.020.356,31	-14.945.944,69	99,74
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.470.977.400,00	225.294.007.991,00	-176.969.409,00	99,92
5.03			KEPEGAWAIAN	6.112.861.473,00	5.783.052.144,00	-329.809.329,00	94,60
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.112.861.473,00	5.783.052.144,00	-329.809.329,00	94,60
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.112.861.473,00	5.783.052.144,00	-329.809.329,00	94,60
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.093.329.152,00	5.764.052.144,00	-329.277.008,00	94,60
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.899.980.795,00	2.812.217.202,00	-87.763.593,00	96,97
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.193.348.357,00	2.951.834.942,00	-241.513.415,00	92,44
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.532.321,00	19.000.000,00	-532.321,00	97,27
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.532.321,00	19.000.000,00	-532.321,00	97,27
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,70	85,99
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,70	85,99
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000		Inspektorat Daerah	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,70	85,99
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,70	85,99
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.766.873.390,00	12.712.388.812,00	-2.054.484.578,70	86,09
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.167.366.653,00	7.067.883.035,00	-99.483.618,70	98,61
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.599.506.737,00	5.644.505.777,00	-1.955.000.960,00	74,27
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.070.990.571,00	906.400.000,00	-164.590.571,00	84,63
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.070.990.571,00	906.400.000,00	-164.590.571,00	84,63
7			UNSUR KEWILAYAHAN	33.893.834.722,00	32.605.697.725,00	-1.288.136.997,72	96,20
7.01			KECAMATAN	33.893.834.722,00	32.605.697.725,00	-1.288.136.997,72	96,20
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000		Kecamatan Lolayan	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	-136.607.068,00	95,76
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	-136.607.068,00	95,76
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	-136.607.068,00	95,76
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.946.941.122,00	2.826.010.160,00	-120.930.962,00	95,90
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.267.561,00	257.591.455,00	-15.676.106,00	94,26
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		Kecamatan Passi Timur	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	-78.343.533,00	97,57
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5	BELANJA DAERAH	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	-78.343.533,00	97,57

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	-78.343.533,00	97,57
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.837.714.035,00	2.762.116.177,00	-75.597.858,00	97,34
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.105.550,00	385.359.875,00	-2.745.675,00	99,29
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000		Kecamatan Passi Barat	3.275.776.618,00	3.182.561.953,00	-93.214.665,00	97,15
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	5	BELANJA DAERAH	3.275.776.618,00	3.182.561.953,00	-93.214.665,00	97,15
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.140.867.884,00	3.048.661.953,00	-92.205.931,00	97,06
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.848.153.068,00	2.780.849.813,00	-67.303.255,00	97,64
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.714.816,00	267.812.140,00	-24.902.676,00	91,49
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	5.2	BELANJA MODAL	134.908.734,00	133.900.000,00	-1.008.734,00	99,25
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.908.734,00	133.900.000,00	-1.008.734,00	99,25
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		Kecamatan Bilalang	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	-61.837.661,00	97,20
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	-61.837.661,00	97,20
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	-61.837.661,00	97,20
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.964.924.668,00	1.924.043.658,00	-40.881.010,00	97,92
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.479.559,00	224.522.908,00	-20.956.651,00	91,46
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Dumoga Barat	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	-72.717.344,90	96,11
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	-72.717.344,90	96,11
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	-72.717.344,90	96,11
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.665.517.808,00	1.601.137.489,00	-64.380.319,90	96,13
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.169.541,00	194.832.516,00	-8.337.025,00	95,90
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000		Kecamatan Dumoga Tengah	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	-59.103.591,50	96,38
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	-59.103.591,50	96,38
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	-59.103.591,50	96,38
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.287.362.530,00	1.242.200.264,00	-45.162.266,50	96,49
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.908.275,00	331.966.950,00	-13.941.325,00	95,97
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000		Kecamatan Dumoga Utara	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	-33.060.938,00	98,28
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	-33.060.938,00	98,28
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	-33.060.938,00	98,28
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.587.479.898,00	1.560.226.754,00	-27.253.144,00	98,28
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.117.164,00	324.309.370,00	-5.807.794,00	98,24
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000		Kecamatan Dumoga Tenggara	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	-58.628.905,20	95,91
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	-58.628.905,20	95,91
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	-58.628.905,20	95,91
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.242.897.058,00	1.192.297.523,00	-50.599.535,20	95,93
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.557.380,00	182.528.010,00	-8.029.370,00	95,79
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Dumoga Timur	2.778.402.942,00	2.715.121.831,00	-63.281.111,00	97,72
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	2.778.402.942,00	2.715.121.831,00	-63.281.111,00	97,72
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.578.402.942,00	2.515.227.881,00	-63.175.061,00	97,55
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.788.987.148,00	1.750.192.556,00	-38.794.592,00	97,83

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.415.794,00	765.035.325,00	-24.380.469,00	96,91
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.893.950,00	-106.050,00	99,95
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.893.950,00	-106.050,00	99,95
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000		Kecamatan Dumoga	1.718.814.955,00	1.623.753.839,00	-95.061.116,90	94,47
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	1.718.814.955,00	1.623.753.839,00	-95.061.116,90	94,47
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.694.949.955,00	1.600.353.839,00	-94.596.116,90	94,42
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.493.461.518,00	1.414.999.524,00	-78.461.994,90	94,75
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.488.437,00	185.354.315,00	-16.134.122,00	91,99
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.865.000,00	23.400.000,00	-465.000,00	98,05
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.865.000,00	23.400.000,00	-465.000,00	98,05
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		Kecamatan Poigar	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	-114.979.594,00	94,60
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	-114.979.594,00	94,60
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	-114.979.594,00	94,60
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.868.421.773,00	1.781.750.171,00	-86.671.602,00	95,36
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.357.105,00	231.049.113,00	-28.307.992,00	89,09
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000		Kecamatan Bolaang	3.313.621.822,00	3.206.542.644,00	-107.079.178,00	96,77
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	3.313.621.822,00	3.206.542.644,00	-107.079.178,00	96,77
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.113.621.822,00	3.014.351.335,00	-99.270.487,00	96,81
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.264.555.426,00	2.188.012.883,00	-76.542.543,00	96,62
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.066.396,00	826.338.452,00	-22.727.944,00	97,32
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	192.191.309,00	-7.808.691,00	96,10
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	192.191.309,00	-7.808.691,00	96,10
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000		Kecamatan Bolaang Timur	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	-64.543.765,90	95,61
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	-64.543.765,90	95,61
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	-64.543.765,90	95,61
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.237.967.006,00	1.183.344.486,00	-54.622.520,90	95,59
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.842.895,00	221.921.650,00	-9.921.245,00	95,72
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000		Kecamatan Lolak	1.775.456.577,00	1.648.389.564,00	-127.067.013,32	92,84
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	1.775.456.577,00	1.648.389.564,00	-127.067.013,32	92,84
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.722.079.772,00	1.596.889.564,00	-125.190.208,00	92,73
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.445.165.762,00	1.326.200.957,00	-118.964.805,00	91,77
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.914.010,00	270.688.607,00	-6.225.403,00	97,75
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	53.376.805,00	51.500.000,00	-1.876.805,32	96,48
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.376.805,00	51.500.000,00	-1.876.805,32	96,48
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Sang Tombolang	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	-122.611.512,00	93,63
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	-122.611.512,00	93,63
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	-122.611.512,00	93,63
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.693.203.079,00	1.589.979.075,00	-103.224.004,00	93,90
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.527.798,00	212.140.290,00	-19.387.508,00	91,63

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	-317.655.831,22	99,53
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	-317.655.831,22	99,53
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	-317.655.831,22	99,53
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	-317.655.831,22	99,53
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	-317.655.831,22	99,53
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.114.061.004,00	2.084.997.356,00	-29.063.648,55	98,63
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.514.839.336,00	4.242.732.154,00	-272.107.182,67	93,97
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	60.332.671.800,00	60.316.186.800,00	-16.485.000,00	99,97
			(SURPLUS/DEFISIT)	-83.581.224.638,00	-46.341.935.838,90	37.239.288.799,10	55,45

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN 1.2
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.077.419.643.654,00	1.060.004.317.566,16	98,38	1.090.269.243.242,91
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	67.139.203.420,00	64.931.917.295,16	96,71	69.847.019.829,91
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	41.429.800.000,00	41.777.573.317,00	100,84	48.618.898.979,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	16.619.863.004,00	14.846.047.915,00	89,33	12.504.563.525,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	3.795.118.326,00	3.878.205.042,00	102,19	2.882.571.278,10
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	5.294.422.090,00	4.430.091.021,16	83,67	5.840.986.047,81
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.000.878.503.931,00	986.867.418.179,00	98,60	1.011.692.757.515,00
Pendapatan Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.2.1	786.609.072.334,00	775.346.643.297,00	98,57	800.144.624.518,00
Bagi Hasil Pajak - LRA		62.941.773.000,00	62.941.773.000,00	100,00	44.240.811.973,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		580.479.971.000,00	572.634.871.063,00	98,65	534.329.126.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		143.187.328.334,00	139.769.999.234,00	97,61	221.574.686.545,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	169.446.159.000,00	169.446.159.000,00	100,00	167.878.910.000,00
Dana Desa - LRA		156.556.803.000,00	156.556.803.000,00	100,00	152.964.788.000,00
Insentif Fiskal		12.889.356.000,00	12.889.356.000,00	100,00	14.914.122.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.1.2.3	44.823.272.597,00	42.074.615.882,00	93,87	43.669.222.997,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		44.823.272.597,00	42.074.615.882,00	93,87	43.669.222.997,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	87,27	8.729.465.898,00
Pendapatan Hibah - LRA		0,00	0,00	0,00	342.325.200,00
Pendapatan Lainnya		9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	87,27	8.387.140.698,00
BELANJA	5.1.2	929.724.924.591,00	875.262.225.057,75	94,14	883.990.784.516,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	837.247.018.064,83	789.445.131.071,75	94,29	709.078.331.784,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	485.931.729.294,56	467.491.412.190,00	96,21	409.574.045.733,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	278.904.643.897,27	249.881.172.368,75	89,59	273.338.916.141,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	211.500.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	72.399.558.415,00	72.062.018.763,00	99,53	25.058.344.460,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	11.086.458,00	10.527.750,00	94,96	895.525.450,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	90.256.579.326,17	84.316.043.086,00	93,42	165.619.436.669,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	16.574.885.834,17	15.409.856.633,00	92,97	41.255.703.219,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	39.564.186.569,00	36.065.291.398,00	91,16	69.553.872.247,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	30.760.262.231,00	29.905.538.055,00	97,22	51.822.906.987,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.135.019.692,00	2.738.332.000,00	87,35	2.771.954.216,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	197.025.000,00	197.025.000,00	100,00	215.000.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	67,57	9.293.016.063,00
Belanja Tak Terduga		2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	67,57	9.293.016.063,00
TRANSFER	5.1.3	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31	99,92	215.630.787.000,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	5.804.966.301,00	5.790.020.356,31	99,74	5.155.999.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		5.804.966.301,00	5.790.020.356,31	99,74	5.155.999.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	225.470.977.400,00	225.294.007.991,00	99,92	210.474.788.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		225.470.977.400,00	225.294.007.991,00	99,92	210.474.788.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.4	(83.581.224.638,00)	(46.341.935.838,90)	55,45	(9.352.328.273,09)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PEMBIAYAAN	5.1.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1	83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00	92.933.552.911,73
Penggunaan SiLPA		83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00	92.933.552.911,73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.6	83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00	92.933.552.911,73
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.7	0,00	37.238.731.719,79	0,00	83.581.224.638,64

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	22.753.674,00	22.753.674,00	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	351.471.692.700,00	321.338.403.296,00	-30.133.289.404,00	91,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.173.734.569,00	233.678.939.780,00	-19.494.794.789,00	92,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.334.850.651,00	232.928.400.748,00	-19.406.449.903,00	92,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252.124.882.885,00	232.741.680.748,00	-19.383.202.137,00	92,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	252.124.882.885,00	232.741.680.748,00	-19.383.202.137,00	92,31	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.010.000,00	140.040.000,00	-15.970.000,00	89,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	155.960.000,00	140.040.000,00	-15.920.000,00	89,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.957.766,00	46.680.000,00	-7.277.766,00	86,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	51.814.800,00	46.680.000,00	-5.134.800,00	90,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.142.966,00	0,00	-2.142.966,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.481.403,00	214.030.200,00	-16.451.203,00	92,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.285.084,00	47.395.000,00	-3.890.084,00	92,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.285.084,00	47.395.000,00	-3.890.084,00	92,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.514.815,00	0,00	-3.514.815,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.514.815,00	0,00	-3.514.815,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.000.080,00	28.362.000,00	-2.638.080,00	91,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.080,00	28.362.000,00	-2.638.080,00	91,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.681.424,00	138.273.200,00	-6.408.224,00	95,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.681.424,00	138.273.200,00	-6.408.224,00	95,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.126.100,00	363.956.500,00	-29.169.600,00	92,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.996.100,00	14.990.000,00	-6.100,00	99,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.996.100,00	14.990.000,00	-6.100,00	99,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.880.000,00	16.716.500,00	-11.163.500,00	59,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.880.000,00	16.716.500,00	-11.163.500,00	59,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.250.000,00	332.250.000,00	-18.000.000,00	94,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.250.000,00	332.250.000,00	-18.000.000,00	94,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.276.415,00	172.552.332,00	-42.724.083,00	80,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.581.695,00	143.785.032,00	-41.796.663,00	77,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.581.695,00	143.785.032,00	-41.796.663,00	77,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.694.720,00	28.767.300,00	-927.420,00	96,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.694.720,00	28.767.300,00	-927.420,00	96,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	96.971.177.855,00	87.019.036.516,00	-9.952.141.339,00	89,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	57.369.329.241,00	52.278.540.520,00	-5.090.788.721,00	91,13	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.629.988.000,00	3.243.848.347,00	-386.139.653,00	89,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.772.000,00	1.151.314.398,00	-39.457.602,00	96,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.439.216.000,00	2.092.533.949,00	-346.682.051,00	85,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.131.632.000,00	1.131.632.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.129.832.000,00	1.129.832.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.974.497.500,00	3.962.141.674,00	-12.355.826,00	99,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.176.500,00	189.571.794,00	-2.604.706,00	98,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.782.321.000,00	3.772.569.880,00	-9.751.120,00	99,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	736.257.672,00	735.063.000,00	-1.194.672,00	99,84	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.544.672,00	1.350.000,00	-1.194.672,00	53,05	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	733.713.000,00	733.713.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.771.309.500,00	2.373.359.818,00	-397.949.682,00	85,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.153.500,00	0,00	-2.153.500,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.769.156.000,00	2.373.359.818,00	-395.796.182,00	85,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.298.268.440,00	2.233.890.000,00	-64.378.440,00	97,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.472,00	0,00	-24.472,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399.983.968,00	367.104.000,00	-32.879.968,00	91,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.898.260.000,00	1.866.786.000,00	-31.474.000,00	98,34	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.900.827.900,00	1.869.815.704,00	-31.012.196,00	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.827.900,00	1.869.815.704,00	-31.012.196,00	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.769.985.500,00	2.860.228.602,00	-909.756.898,00	75,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.605.091.439,00	2.702.513.602,00	-902.577.837,00	74,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.894.061,00	157.715.000,00	-7.179.061,00	95,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	451.500.000,00	403.200.000,00	-48.300.000,00	89,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.500.000,00	403.200.000,00	-48.300.000,00	89,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.181.403.093,00	19.913.441.883,00	-1.267.961.210,00	94,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.01	Belanja Pegawai	2.683.987.500,00	2.513.290.972,00	-170.696.528,00	93,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.759.133.900,00	13.901.693.111,00	-857.440.789,00	94,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	1.748.159.693,00	1.709.536.800,00	-38.622.893,00	97,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.990.122.000,00	1.788.921.000,00	-201.201.000,00	89,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.715.147.000,00	1.715.147.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.711.997.000,00	1.711.997.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.375.156.800,00	1.319.860.000,00	-55.296.800,00	95,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.375.156.800,00	1.319.860.000,00	-55.296.800,00	95,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	562.673.309,00	516.161.950,00	-46.511.359,00	91,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.673.309,00	516.161.950,00	-46.511.359,00	91,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	409.271.400,00	395.422.700,00	-13.848.700,00	96,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.246.400,00	198.397.700,00	-13.848.700,00	93,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	197.025.000,00	197.025.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.284.229.316,00	844.328.334,00	-439.900.982,00	65,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.229.316,00	844.328.334,00	-439.900.982,00	65,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	198.596.900,00	142.823.200,00	-55.773.700,00	71,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.596.900,00	142.823.200,00	-55.773.700,00	71,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	253.265.000,00	253.265.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	252.815.000,00	252.815.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	242.781.231,00	74.417.500,00	-168.363.731,00	30,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.781.231,00	74.417.500,00	-168.363.731,00	30,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.482.538.680,00	8.290.493.808,00	-1.192.044.872,00	87,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.765.980,00	1.014.688.254,00	-186.077.726,00	84,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.281.772.700,00	7.275.805.554,00	-1.005.967.146,00	87,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.228.133.079,00	25.511.375.448,00	-3.716.757.631,00	87,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	281.093.000,00	281.093.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.643.000,00	280.643.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		Pembangunan Laboratorium	2.952.936.000,00	2.952.936.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.012.000,00	987.012.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2		3	4	5	6	7
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.965.924.000,00	1.965.924.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		996.675.000,00	866.762.579,00	-129.912.421,00	86,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		996.675.000,00	866.762.579,00	-129.912.421,00	86,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		289.884.000,00	289.884.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		145.392.000,00	145.392.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		144.492.000,00	144.492.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		2.244.017.500,00	2.052.446.989,00	-191.570.511,00	91,46	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		749.441.500,00	742.871.061,00	-6.570.439,00	99,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.494.576.000,00	1.309.575.928,00	-185.000.072,00	87,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		1.162.833.692,00	797.646.000,00	-365.187.692,00	68,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.162.833.692,00	797.646.000,00	-365.187.692,00	68,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		812.325.000,00	787.008.000,00	-25.317.000,00	96,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		512.446.033,00	511.680.000,00	-766.033,00	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		299.878.967,00	275.328.000,00	-24.550.967,00	91,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.801.412.100,00	1.801.190.000,00	-222.100,00	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.801.412.100,00	1.801.190.000,00	-222.100,00	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.287.056.200,00	642.367.798,00	-644.688.402,00	49,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.287.056.200,00	642.367.798,00	-644.688.402,00	49,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		10.515.328.519,00	10.070.546.760,00	-444.781.759,00	95,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.01	Belanja Pegawai		1.128.930.000,00	1.082.280.000,00	-46.650.000,00	95,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		6.937.336.510,00	6.656.398.760,00	-280.937.750,00	95,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah		1.702.362.009,00	1.613.868.000,00	-88.494.009,00	94,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		746.700.000,00	718.000.000,00	-28.700.000,00	96,16	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		714.631.100,00	684.584.000,00	-30.047.100,00	95,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.268.510,00	0,00	-1.268.510,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		713.362.590,00	684.584.000,00	-28.778.590,00	95,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049		Pengembangan konten digital untuk pendidikan		69.062.800,00	55.943.700,00	-13.119.100,00	81,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		69.062.800,00	55.943.700,00	-13.119.100,00	81,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		97.190.800,00	84.750.900,00	-12.439.900,00	87,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		97.190.800,00	84.750.900,00	-12.439.900,00	87,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1.069.459.840,00	596.759.428,00	-472.700.412,00	55,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		959.060.905,00	512.219.428,00	-446.841.477,00	53,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		110.398.935,00	84.540.000,00	-25.858.935,00	76,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		494.443.528,00	406.092.100,00	-88.351.428,00	82,13	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		494.443.528,00	406.092.100,00	-88.351.428,00	82,13	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		Pembangunan Ruang Kelas Baru		4.439.784.000,00	3.141.364.194,00	-1.298.419.806,00	70,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	916.122.000,00	243.111.686,00	-673.010.314,00	26,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.523.662.000,00	2.898.252.508,00	-625.409.492,00	82,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.349.241.000,00	8.345.460.548,00	-1.003.780.452,00	89,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	686.354.000,00	684.004.000,00	-2.350.000,00	99,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.410.000,00	470.060.000,00	-2.350.000,00	99,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.944.000,00	213.944.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009		Pengadaan Perlengkapan PAUD	169.053.000,00	168.475.000,00	-578.000,00	99,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.053.000,00	168.475.000,00	-578.000,00	99,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.801.567.809,00	1.800.000.000,00	-1.567.809,00	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.801.567.809,00	1.800.000.000,00	-1.567.809,00	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	349.432.500,00	269.355.788,00	-80.076.712,00	77,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.432.500,00	269.355.788,00	-80.076.712,00	77,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	872.940.244,00	367.848.544,00	-505.091.700,00	42,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.940.244,00	367.848.544,00	-505.091.700,00	42,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.693.198.710,00	2.649.732.250,00	-43.466.460,00	98,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.710,00	0,00	-48.710,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.693.150.000,00	2.649.732.250,00	-43.417.750,00	98,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0023		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	999.697.237,00	813.978.947,00	-185.718.290,00	81,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.697.237,00	813.978.947,00	-185.718.290,00	81,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.506.997.500,00	1.322.066.019,00	-184.931.481,00	87,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.896.000,00	730.220.308,00	-102.675.692,00	87,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	674.101.500,00	591.845.711,00	-82.255.789,00	87,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.024.474.535,00	883.660.000,00	-140.814.535,00	86,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	954.306.726,00	883.660.000,00	-70.646.726,00	92,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.726,00	0,00	-126.726,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	954.180.000,00	883.660.000,00	-70.520.000,00	92,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	70.167.809,00	0,00	-70.167.809,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.167.809,00	0,00	-70.167.809,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	570.759.600,00	432.177.000,00	-138.582.600,00	75,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	570.759.600,00	432.177.000,00	-138.582.600,00	75,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	570.759.600,00	432.177.000,00	-138.582.600,00	75,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.759.600,00	432.177.000,00	-138.582.600,00	75,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	21.617.775,00	0,00	-21.617.775,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	21.617.775,00	0,00	-21.617.775,00	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	21.617.775,00	0,00	-21.617.775,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.617.775,00	0,00	-21.617.775,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	734.402.900,00	208.250.000,00	-526.152.900,00	28,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	734.402.900,00	208.250.000,00	-526.152.900,00	28,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0001		Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	287.875.000,00	0,00	-287.875.000,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.875.000,00	0,00	-287.875.000,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0002		Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	157.222.000,00	0,00	-157.222.000,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.222.000,00	0,00	-157.222.000,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0005		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	210.129.900,00	208.250.000,00	-1.879.900,00	99,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.129.900,00	208.250.000,00	-1.879.900,00	99,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	79.176.000,00	0,00	-79.176.000,00	-	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.176.000,00	0,00	-79.176.000,00	-	
				Jumlah	351.471.692.700,00	321.338.403.296,00	-30.133.289.404,00	91,43	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.152.543.004,00	2.278.812.200,00	126.269.196,00	105,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.152.543.004,00	2.278.812.200,00	126.269.196,00	105,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.152.543.004,00	2.278.812.200,00	126.269.196,00	105,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	129.070.113.187,00	117.234.975.633,75	-11.835.137.553,25	90,83	
1.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	129.070.113.187,00	117.234.975.633,75	-11.835.137.553,25	90,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000			Dinas Kesehatan	104.223.119.797,00	97.867.097.434,00	-6.356.022.363,00	93,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.073.229.673,00	56.507.122.684,00	-3.566.106.989,00	94,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.731.894.561,00	55.216.542.346,00	-3.515.352.215,00	94,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.093.191.532,00	54.577.896.846,00	-3.515.294.686,00	93,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	58.093.191.532,00	54.577.896.846,00	-3.515.294.686,00	93,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.040.000,00	410.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	410.040.000,00	410.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.272.605,00	144.217.800,00	-54.805,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	136.680.000,00	136.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.592.605,00	7.537.800,00	-54.805,00	99,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	84.390.424,00	84.387.700,00	-2.724,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.390.424,00	84.387.700,00	-2.724,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	224.986.941,00	221.917.822,00	-3.069.119,00	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	45.815.725,00	45.049.725,00	-766.000,00	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.815.725,00	45.049.725,00	-766.000,00	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.054.500,00	18.054.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.054.500,00	18.054.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.454.000,00	47.496.100,00	-957.900,00	98,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.454.000,00	47.496.100,00	-957.900,00	98,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112.662.716,00	111.317.497,00	-1.345.219,00	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.662.716,00	111.317.497,00	-1.345.219,00	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.820.000,00	22.593.884,00	-8.226.116,00	73,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.820.000,00	22.593.884,00	-8.226.116,00	73,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.820.000,00	22.593.884,00	-8.226.116,00	73,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.872.672,00	354.787.270,00	-1.085.402,00	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.872.672,00	354.787.270,00	-1.085.402,00	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.872.672,00	354.787.270,00	-1.085.402,00	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.682.170,00	197.450.000,00	-25.232.170,00	88,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.482.170,00	197.450.000,00	-32.170,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.482.170,00	197.450.000,00	-32.170,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	25.200.000,00	0,00	-25.200.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0007	5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.200.000,00	0,00	-25.200.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.304.001,00	288.616.342,00	-10.687.659,00	96,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.054.001,00	106.366.342,00	-10.687.659,00	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.054.001,00	106.366.342,00	-10.687.659,00	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.250.000,00	182.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.250.000,00	182.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.669.328,00	205.215.020,00	-2.454.308,00	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.319.328,00	175.925.020,00	-2.394.308,00	98,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.319.328,00	175.925.020,00	-2.394.308,00	98,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.350.000,00	29.290.000,00	-60.000,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	29.290.000,00	-60.000,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36.952.964.224,00	34.401.890.368,00	-2.551.073.856,00	93,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.796.229.142,00	21.889.637.476,00	-906.591.666,00	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas	8.764.865.500,00	8.490.300.423,00	-274.565.077,00	96,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	833.801.000,00	609.299.979,00	-224.501.021,00	73,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.531.464.500,00	1.521.000.144,00	-10.464.356,00	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.399.600.000,00	6.360.000.300,00	-39.599.700,00	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.239.705.500,00	7.711.517.837,00	-528.187.663,00	93,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	749.034.003,00	745.440.036,00	-3.593.967,00	99,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.385.833.745,00	4.886.268.476,00	-499.565.269,00	90,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.104.837.752,00	2.079.809.325,00	-25.028.427,00	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	838.000.000,00	834.438.138,00	-3.561.862,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	838.000.000,00	834.438.138,00	-3.561.862,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	732.581.352,00	732.531.402,00	-49.950,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	732.581.352,00	732.531.402,00	-49.950,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.255.000,00	28.412.000,00	-19.843.000,00	58,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.255.000,00	28.412.000,00	-19.843.000,00	58,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.172.821.790,00	4.092.437.676,00	-80.384.114,00	98,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.172.821.790,00	4.092.437.676,00	-80.384.114,00	98,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.485.252.882,00	10.899.941.558,00	-1.585.311.324,00	87,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.887.300,00	98.830.900,00	-56.400,00	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.887.300,00	98.830.900,00	-56.400,00	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	134.920.740,00	66.582.000,00	-68.338.740,00	49,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.920.740,00	66.582.000,00	-68.338.740,00	49,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	82.880.800,00	81.951.364,00	-929.436,00	98,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.880.800,00	81.951.364,00	-929.436,00	98,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	419.954.214,00	419.954.214,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.954.214,00	419.954.214,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.568.645,00	46.884.245,00	-684.400,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.568.645,00	46.884.245,00	-684.400,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.323.698,00	22.323.698,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.323.698,00	22.323.698,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	719.167.350,00	719.087.850,00	-79.500,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.167.350,00	719.087.850,00	-79.500,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	117.778.800,00	117.000.120,00	-778.680,00	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.778.800,00	117.000.120,00	-778.680,00	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	604.936.909,00	603.098.628,00	-1.838.281,00	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.161.909,00	595.798.628,00	-1.363.281,00	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.775.000,00	7.300.000,00	-475.000,00	93,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.686.000,00	4.588.800,00	-97.200,00	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.686.000,00	4.588.800,00	-97.200,00	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	104.628.500,00	102.722.200,00	-1.906.300,00	98,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.628.500,00	102.722.200,00	-1.906.300,00	98,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	79.844.736,00	78.664.900,00	-1.179.836,00	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.844.736,00	78.664.900,00	-1.179.836,00	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.450.000,00	35.000.000,00	-5.450.000,00	86,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.450.000,00	35.000.000,00	-5.450.000,00	86,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	777.550,00	0,00	-777.550,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	777.550,00	0,00	-777.550,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	440.484.342,00	417.321.869,00	-23.162.473,00	94,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.456.400,00	173.321.669,00	-23.134.731,00	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.027.942,00	244.000.200,00	-27.742,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	297.171.960,00	255.630.000,00	-41.541.960,00	86,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.171.960,00	255.630.000,00	-41.541.960,00	86,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	165.918.100,00	150.050.000,00	-15.868.100,00	90,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.918.100,00	150.050.000,00	-15.868.100,00	90,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	42.000.000,00	13.845.000,00	-28.155.000,00	32,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	13.845.000,00	-28.155.000,00	32,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	378.422.000,00	324.117.000,00	-54.305.000,00	85,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.422.000,00	324.117.000,00	-54.305.000,00	85,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.501.200.000,00	4.309.534.315,00	-1.191.665.685,00	78,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.501.200.000,00	4.309.534.315,00	-1.191.665.685,00	78,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	41.600.000,00	12.295.100,00	-29.304.900,00	29,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	12.295.100,00	-29.304.900,00	29,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	998.424.944,00	997.999.944,00	-425.000,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.475.000,00	455.050.000,00	-425.000,00	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	542.949.944,00	542.949.944,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	837.413.978,00	808.794.657,00	-28.619.321,00	96,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.648.853,00	435.029.532,00	-28.619.321,00	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.765.125,00	373.765.125,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	561.057.082,00	557.976.650,00	-3.080.432,00	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.298.702,00	293.706.650,00	407.948,00	100,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.758.380,00	264.270.000,00	-3.488.380,00	98,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	89.277.000,00	9.260.000,00	-80.017.000,00	10,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.277.000,00	9.260.000,00	-80.017.000,00	10,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	22.500.000,00	20.550.000,00	-1.950.000,00	91,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	20.550.000,00	-1.950.000,00	91,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	374.061.384,00	373.580.134,00	-481.250,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.061.384,00	373.580.134,00	-481.250,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	177.730.850,00	177.730.850,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.730.850,00	177.730.850,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	54.686.000,00	54.686.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.686.000,00	54.686.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	20.400.000,00	19.881.120,00	-518.880,00	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	19.881.120,00	-518.880,00	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	988.120.205,00	931.374.875,00	-56.745.330,00	94,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	988.120.205,00	931.374.875,00	-56.745.330,00	94,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.294.000,00	633.474.800,00	-4.819.200,00	99,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.826.205,00	297.900.075,00	-51.926.130,00	85,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	683.361.995,00	680.936.459,00	-2.425.536,00	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	583.361.995,00	580.936.459,00	-2.425.536,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.361.995,00	580.936.459,00	-2.425.536,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.392.482.457,00	6.207.761.211,00	-184.721.246,00	97,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	254.533.362,00	253.149.650,00	-1.383.712,00	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	96.994.350,00	96.691.550,00	-302.800,00	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.994.350,00	96.691.550,00	-302.800,00	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	157.539.012,00	156.458.100,00	-1.080.912,00	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.539.012,00	156.458.100,00	-1.080.912,00	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.271.289.275,00	5.127.545.841,00	-143.743.434,00	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	195.913.888,00	195.657.891,00	-255.997,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.913.888,00	195.657.891,00	-255.997,00	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.982.930.667,00	4.905.310.950,00	-77.619.717,00	98,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.982.930.667,00	4.905.310.950,00	-77.619.717,00	98,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	92.444.720,00	26.577.000,00	-65.867.720,00	28,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.444.720,00	26.577.000,00	-65.867.720,00	28,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	866.659.820,00	827.065.720,00	-39.594.100,00	95,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	866.659.820,00	827.065.720,00	-39.594.100,00	95,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.851.320,00	801.465.720,00	-39.385.600,00	95,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.808.500,00	25.600.000,00	-208.500,00	99,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	323.491.900,00	318.322.228,00	-5.169.672,00	98,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.955.850,00	81.927.768,00	-28.082,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.955.850,00	81.927.768,00	-28.082,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.955.850,00	81.927.768,00	-28.082,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	29.990.500,00	25.809.900,00	-4.180.600,00	86,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	29.990.500,00	25.809.900,00	-4.180.600,00	86,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.990.500,00	25.809.900,00	-4.180.600,00	86,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	102.838.200,00	101.889.300,00	-948.900,00	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	102.838.200,00	101.889.300,00	-948.900,00	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.838.200,00	101.889.300,00	-948.900,00	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	22.518.800,00	22.518.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	22.518.800,00	22.518.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.518.800,00	22.518.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	86.188.550,00	86.176.460,00	-12.090,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	86.188.550,00	86.176.460,00	-12.090,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.188.550,00	86.176.460,00	-12.090,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	480.951.543,00	432.000.943,00	-48.950.600,00	89,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.648.250,00	242.037.650,00	-610.600,00	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	242.648.250,00	242.037.650,00	-610.600,00	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.648.250,00	242.037.650,00	-610.600,00	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.253.293,00	149.253.293,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	84.690.393,00	84.690.393,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.690.393,00	84.690.393,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0002		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	64.562.900,00	64.562.900,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.562.900,00	64.562.900,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.050.000,00	40.710.000,00	-48.340.000,00	45,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	89.050.000,00	40.710.000,00	-48.340.000,00	45,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.050.000,00	40.710.000,00	-48.340.000,00	45,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002			Puskesmas Lolak	2.068.300.331,00	1.663.718.107,00	-404.582.224,00	80,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.031.900.331,00	1.663.718.107,00	-368.182.224,00	81,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.929.013.331,00	1.648.402.007,00	-280.611.324,00	85,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	338.630.000,00	178.751.000,00	-159.879.000,00	52,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.630.000,00	178.751.000,00	-159.879.000,00	52,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	61.540.000,00	51.600.000,00	-9.940.000,00	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.540.000,00	51.600.000,00	-9.940.000,00	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	166.035.000,00	191.716.200,00	25.681.200,00	115,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.035.000,00	191.716.200,00	25.681.200,00	115,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	894.798.331,00	874.532.807,00	-20.265.524,00	97,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.900.577,00	859.932.807,00	-19.967.770,00	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.897.754,00	14.600.000,00	-297.754,00	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	102.370.000,00	30.212.000,00	-72.158.000,00	29,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	42.000.000,00	0,00	-42.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.370.000,00	30.212.000,00	-30.158.000,00	50,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.900.000,00	12.000.000,00	-4.900.000,00	71,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	12.000.000,00	-4.900.000,00	71,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	53.200.000,00	14.050.000,00	-39.150.000,00	26,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.200.000,00	14.050.000,00	-39.150.000,00	26,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	102.887.000,00	15.316.100,00	-87.570.900,00	14,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	102.887.000,00	15.316.100,00	-87.570.900,00	14,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.887.000,00	15.316.100,00	-87.570.900,00	14,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.400.000,00	0,00	-36.400.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.400.000,00	0,00	-36.400.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36.400.000,00	0,00	-36.400.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	0,00	-36.400.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003			Puskesmas Pusian	1.474.241.200,00	1.372.168.727,00	-102.072.473,00	93,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.461.281.200,00	1.363.168.727,00	-98.112.473,00	93,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.448.480.200,00	1.353.978.727,00	-94.501.473,00	93,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.700.000,00	31.200.000,00	-10.500.000,00	74,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	31.200.000,00	-10.500.000,00	74,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.200.000,00	10.200.000,00	-7.000.000,00	59,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	10.200.000,00	-7.000.000,00	59,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	242.709.000,00	204.560.000,00	-38.149.000,00	84,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.709.000,00	204.560.000,00	-38.149.000,00	84,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.996.000,00	23.996.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.996.000,00	23.996.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	613.975.200,00	610.735.898,00	-3.239.302,00	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.975.200,00	610.735.898,00	-3.239.302,00	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	87.000.000,00	82.136.829,00	-4.863.171,00	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	82.136.829,00	-4.863.171,00	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.200.000,00	0,00	-13.200.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	0,00	-13.200.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	119.700.000,00	102.150.000,00	-17.550.000,00	85,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.700.000,00	102.150.000,00	-17.550.000,00	85,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.801.000,00	9.190.000,00	-3.611.000,00	71,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.801.000,00	9.190.000,00	-3.611.000,00	71,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.801.000,00	9.190.000,00	-3.611.000,00	71,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.960.000,00	9.000.000,00	-3.960.000,00	69,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.960.000,00	9.000.000,00	-3.960.000,00	69,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.960.000,00	9.000.000,00	-3.960.000,00	69,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	9.000.000,00	-3.960.000,00	69,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004			Puskesmas Mopuya	1.810.795.400,00	1.536.687.876,00	-274.107.524,00	84,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.789.195.400,00	1.515.087.876,00	-274.107.524,00	84,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.771.560.400,00	1.503.687.876,00	-267.872.524,00	84,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.560.000,00	161.820.000,00	-7.740.000,00	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.560.000,00	161.820.000,00	-7.740.000,00	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57.940.000,00	57.940.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.940.000,00	57.940.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.200.000,00	120.250.000,00	-21.950.000,00	84,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.200.000,00	120.250.000,00	-21.950.000,00	84,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	711.800.400,00	652.176.876,00	-59.623.524,00	91,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.800.400,00	652.176.876,00	-59.623.524,00	91,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	122.000.000,00	21.441.000,00	-100.559.000,00	17,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	59.500.000,00	0,00	-59.500.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	21.441.000,00	-41.059.000,00	34,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	109.500.000,00	31.500.000,00	-78.000.000,00	28,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.500.000,00	31.500.000,00	-78.000.000,00	28,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	17.635.000,00	11.400.000,00	-6.235.000,00	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17.635.000,00	11.400.000,00	-6.235.000,00	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.635.000,00	11.400.000,00	-6.235.000,00	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005			Puskesmas Passi Barat	1.482.591.494,00	1.136.058.414,00	-346.533.080,00	76,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.465.691.494,00	1.128.258.414,00	-337.433.080,00	76,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.453.046.494,00	1.116.878.414,00	-336.168.080,00	76,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.340.000,00	21.616.000,00	-2.724.000,00	88,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.340.000,00	21.616.000,00	-2.724.000,00	88,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	213.517.000,00	99.132.000,00	-114.385.000,00	46,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.517.000,00	99.132.000,00	-114.385.000,00	46,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	51.530.000,00	47.400.000,00	-4.130.000,00	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.530.000,00	47.400.000,00	-4.130.000,00	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	660.619.494,00	643.680.414,00	-16.939.080,00	97,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.540.294,00	625.824.084,00	-6.716.210,00	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.079.200,00	17.856.330,00	-10.222.870,00	63,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	110.000.000,00	7.300.000,00	-102.700.000,00	6,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	56.000.000,00	0,00	-56.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	7.300.000,00	-46.700.000,00	13,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.720.000,00	2.600.000,00	-1.120.000,00	69,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	2.600.000,00	-1.120.000,00	69,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	110.220.000,00	16.050.000,00	-94.170.000,00	14,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.220.000,00	16.050.000,00	-94.170.000,00	14,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.645.000,00	11.380.000,00	-1.265.000,00	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.645.000,00	11.380.000,00	-1.265.000,00	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.645.000,00	11.380.000,00	-1.265.000,00	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.900.000,00	7.800.000,00	-9.100.000,00	46,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.900.000,00	7.800.000,00	-9.100.000,00	46,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.900.000,00	7.800.000,00	-9.100.000,00	46,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	7.800.000,00	-9.100.000,00	46,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006			Puskesmas Pangian	1.421.068.802,00	1.094.687.551,00	-326.381.251,00	77,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.408.568.802,00	1.084.287.551,00	-324.281.251,00	76,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.396.568.802,00	1.072.890.516,00	-323.678.286,00	76,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.500.000,00	14.400.000,00	-2.100.000,00	87,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	14.400.000,00	-2.100.000,00	87,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	143.400.000,00	38.610.500,00	-104.789.500,00	26,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.400.000,00	38.610.500,00	-104.789.500,00	26,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	148.000.002,00	54.465.200,00	-93.534.802,00	36,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.000.002,00	54.465.200,00	-93.534.802,00	36,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	554.068.800,00	537.320.173,00	-16.748.627,00	96,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.850.800,00	533.102.173,00	-16.748.627,00	96,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	110.000.000,00	84.944.643,00	-25.055.357,00	77,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	28.944.643,00	-25.055.357,00	53,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.700.000,00	8.650.000,00	-10.050.000,00	46,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	8.650.000,00	-10.050.000,00	46,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.600.000,00	15.200.000,00	-71.400.000,00	17,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	15.200.000,00	-71.400.000,00	17,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	11.397.035,00	-602.965,00	94,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	11.397.035,00	-602.965,00	94,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.397.035,00	-602.965,00	94,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.500.000,00	10.400.000,00	-2.100.000,00	83,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000,00	10.400.000,00	-2.100.000,00	83,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.500.000,00	10.400.000,00	-2.100.000,00	83,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.400.000,00	-2.100.000,00	83,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007			Puskesmas Imandi	1.756.794.732,00	1.418.369.455,00	-338.425.277,00	80,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.749.594.732,00	1.411.644.455,00	-337.950.277,00	80,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.737.594.732,00	1.400.244.455,00	-337.350.277,00	80,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.800.000,00	38.400.000,00	-8.400.000,00	82,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	38.400.000,00	-8.400.000,00	82,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	243.868.000,00	116.104.000,00	-127.764.000,00	47,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.868.000,00	116.104.000,00	-127.764.000,00	47,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	54.600.000,00	51.100.000,00	-3.500.000,00	93,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	51.100.000,00	-3.500.000,00	93,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.400.000,00	142.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.400.000,00	142.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	102.000.000,00	49.253.900,00	-52.746.100,00	48,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	49.253.900,00	-52.746.100,00	48,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	689.806.732,00	676.433.980,00	-13.372.752,00	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.703.958,00	664.333.980,00	-13.369.978,00	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.102.774,00	12.100.000,00	-2.774,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	122.000.000,00	107.852.575,00	-14.147.425,00	88,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	48.352.575,00	-14.147.425,00	77,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	19.200.000,00	0,00	-19.200.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	0,00	-19.200.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	10.000.000,00	-3.500.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	10.000.000,00	-3.500.000,00	74,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	124.020.000,00	35.700.000,00	-88.320.000,00	28,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.020.000,00	35.700.000,00	-88.320.000,00	28,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	11.400.000,00	-600.000,00	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	11.400.000,00	-600.000,00	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.400.000,00	-600.000,00	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.200.000,00	6.725.000,00	-475.000,00	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.200.000,00	6.725.000,00	-475.000,00	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.200.000,00	6.725.000,00	-475.000,00	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.725.000,00	-475.000,00	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008			Puskesmas Tungoi	1.182.434.065,00	866.706.675,00	-315.727.390,00	73,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.182.434.065,00	866.706.675,00	-315.727.390,00	73,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.182.434.065,00	866.706.675,00	-315.727.390,00	73,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	264.535.000,00	96.630.450,00	-167.904.550,00	36,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.535.000,00	96.630.450,00	-167.904.550,00	36,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.860.000,00	38.860.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.860.000,00	38.860.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.615.000,00	71.615.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.615.000,00	71.615.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	490.684.065,00	449.065.647,00	-41.618.418,00	91,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.488.291,00	436.971.897,00	-37.516.394,00	92,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.195.774,00	12.093.750,00	-4.102.024,00	74,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	109.625.000,00	82.229.578,00	-27.395.422,00	75,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	52.500.000,00	48.706.979,00	-3.793.021,00	92,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.125.000,00	33.522.599,00	-23.602.401,00	58,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	65.550.000,00	16.741.000,00	-48.809.000,00	25,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.550.000,00	16.741.000,00	-48.809.000,00	25,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009			Puskesmas Poigar	2.000.381.400,00	1.764.693.969,00	-235.687.431,00	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.992.481.400,00	1.758.893.969,00	-233.587.431,00	88,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.979.191.400,00	1.747.493.969,00	-231.697.431,00	88,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.550.000,00	8.850.000,00	-700.000,00	92,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	8.850.000,00	-700.000,00	92,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	256.395.000,00	230.330.000,00	-26.065.000,00	89,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.395.000,00	230.330.000,00	-26.065.000,00	89,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	61.450.000,00	59.700.000,00	-1.750.000,00	97,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.450.000,00	59.700.000,00	-1.750.000,00	97,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	715.720.400,00	646.317.969,00	-69.402.431,00	90,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.343.819,00	638.942.019,00	-69.401.800,00	90,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.376.581,00	7.375.950,00	-631,00	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.676.000,00	46.596.000,00	-94.080.000,00	33,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	64.174.000,00	0,00	-64.174.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.502.000,00	46.596.000,00	-29.906.000,00	60,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	169.200.000,00	129.500.000,00	-39.700.000,00	76,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.200.000,00	129.500.000,00	-39.700.000,00	76,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.290.000,00	11.400.000,00	-1.890.000,00	85,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.290.000,00	11.400.000,00	-1.890.000,00	85,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	11.400.000,00	-1.890.000,00	85,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.900.000,00	5.800.000,00	-2.100.000,00	73,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.900.000,00	5.800.000,00	-2.100.000,00	73,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.900.000,00	5.800.000,00	-2.100.000,00	73,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	5.800.000,00	-2.100.000,00	73,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010			Puskesmas Tanoyan	1.227.437.032,00	1.034.150.263,00	-193.286.769,00	84,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.220.957.032,00	1.028.244.263,00	-192.712.769,00	84,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.207.667.032,00	1.016.844.263,00	-190.822.769,00	84,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.280.000,00	115.830.000,00	-80.450.000,00	59,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.280.000,00	115.830.000,00	-80.450.000,00	59,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	150.000.000,00	73.608.100,00	-76.391.900,00	49,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	73.608.100,00	-76.391.900,00	49,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	472.137.032,00	463.986.163,00	-8.150.869,00	98,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.233.632,00	453.086.163,00	-8.147.469,00	98,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.903.400,00	10.900.000,00	-3.400,00	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	97.000.000,00	94.020.000,00	-2.980.000,00	96,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	41.520.000,00	-2.980.000,00	93,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	43.500.000,00	20.650.000,00	-22.850.000,00	47,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	20.650.000,00	-22.850.000,00	47,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.290.000,00	11.400.000,00	-1.890.000,00	85,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.290.000,00	11.400.000,00	-1.890.000,00	85,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	11.400.000,00	-1.890.000,00	85,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.480.000,00	5.906.000,00	-574.000,00	91,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.480.000,00	5.906.000,00	-574.000,00	91,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.480.000,00	5.906.000,00	-574.000,00	91,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	5.906.000,00	-574.000,00	91,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011			Puskesmas Doloduo	1.620.069.000,00	1.117.134.935,00	-502.934.065,00	68,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.596.169.000,00	1.099.534.935,00	-496.634.065,00	68,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.583.313.000,00	1.087.726.935,00	-495.586.065,00	68,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	308.500.000,00	77.348.000,00	-231.152.000,00	25,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.500.000,00	77.348.000,00	-231.152.000,00	25,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.400.000,00	37.400.000,00	-7.000.000,00	84,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	37.400.000,00	-7.000.000,00	84,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134.600.000,00	134.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.600.000,00	134.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100.008.000,00	91.468.100,00	-8.539.900,00	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.008.000,00	91.468.100,00	-8.539.900,00	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	627.960.000,00	502.478.616,00	-125.481.384,00	80,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.015.400,00	498.534.016,00	-125.481.384,00	79,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.944.600,00	3.944.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	121.665.000,00	89.312.219,00	-32.352.781,00	73,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	59.500.000,00	46.962.656,00	-12.537.344,00	78,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.165.000,00	42.349.563,00	-19.815.437,00	68,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.360.000,00	1.600.000,00	-11.760.000,00	11,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.360.000,00	1.600.000,00	-11.760.000,00	11,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	123.720.000,00	44.420.000,00	-79.300.000,00	35,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.720.000,00	44.420.000,00	-79.300.000,00	35,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.856.000,00	11.808.000,00	-1.048.000,00	91,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.856.000,00	11.808.000,00	-1.048.000,00	91,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.856.000,00	11.808.000,00	-1.048.000,00	91,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.900.000,00	17.600.000,00	-6.300.000,00	73,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.900.000,00	17.600.000,00	-6.300.000,00	73,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.900.000,00	17.600.000,00	-6.300.000,00	73,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	17.600.000,00	-6.300.000,00	73,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012			Puskesmas Maelang	1.430.962.350,00	1.118.251.306,75	-312.711.043,25	78,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.412.562.350,00	1.100.796.306,75	-311.766.043,25	77,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.400.562.350,00	1.090.101.306,75	-310.461.043,25	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.280.000,00	4.800.000,00	-18.480.000,00	20,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	4.800.000,00	-18.480.000,00	20,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162.395.000,00	81.583.000,00	-80.812.000,00	50,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.395.000,00	81.583.000,00	-80.812.000,00	50,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.200.000,00	45.450.000,00	-59.750.000,00	43,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.200.000,00	45.450.000,00	-59.750.000,00	43,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220.008.000,00	220.008.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.008.000,00	220.008.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	499.499.350,00	437.093.306,75	-62.406.043,25	87,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.363.944,00	422.963.306,75	-62.400.637,25	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.135.406,00	14.130.000,00	-5.406,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	91.980.000,00	14.167.000,00	-77.813.000,00	15,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	0,00	-45.500.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.480.000,00	14.167.000,00	-32.313.000,00	30,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	80.000.000,00	68.800.000,00	-11.200.000,00	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	68.800.000,00	-11.200.000,00	86,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	10.695.000,00	-1.305.000,00	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	10.695.000,00	-1.305.000,00	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.695.000,00	-1.305.000,00	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.400.000,00	17.455.000,00	-945.000,00	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.400.000,00	17.455.000,00	-945.000,00	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.400.000,00	17.455.000,00	-945.000,00	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	17.455.000,00	-945.000,00	94,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013			Puskesmas Bilalang	1.090.844.787,00	708.462.311,00	-382.382.476,00	64,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.078.544.787,00	696.162.311,00	-382.382.476,00	64,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.066.144.787,00	686.362.311,00	-379.782.476,00	64,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.050.000,00	10.700.000,00	-350.000,00	96,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	10.700.000,00	-350.000,00	96,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	157.065.000,00	45.755.000,00	-111.310.000,00	29,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.065.000,00	45.755.000,00	-111.310.000,00	29,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	85.800.000,00	52.750.000,00	-33.050.000,00	61,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.800.000,00	52.750.000,00	-33.050.000,00	61,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	537.149.787,00	367.231.318,00	-169.918.469,00	68,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.029.837,00	367.231.318,00	-158.798.519,00	69,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.119.950,00	0,00	-11.119.950,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	83.800.000,00	52.495.993,00	-31.304.007,00	62,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	35.923.993,00	-9.576.007,00	78,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	16.572.000,00	-21.728.000,00	43,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.850.000,00	2.000.000,00	-3.850.000,00	34,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	2.000.000,00	-3.850.000,00	34,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.400.000,00	9.800.000,00	-2.600.000,00	79,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.400.000,00	9.800.000,00	-2.600.000,00	79,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	9.800.000,00	-2.600.000,00	79,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014			Puskesmas Buntalo	792.166.400,00	640.097.433,00	-152.068.967,00	80,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	777.346.400,00	625.447.433,00	-151.898.967,00	80,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	720.841.400,00	616.543.028,00	-104.298.372,00	85,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.445.000,00	5.500.000,00	-945.000,00	85,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.445.000,00	5.500.000,00	-945.000,00	85,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.155.000,00	77.235.000,00	-3.920.000,00	95,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.155.000,00	77.235.000,00	-3.920.000,00	95,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.355.000,00	16.935.000,00	-420.000,00	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.355.000,00	16.935.000,00	-420.000,00	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	320.306.400,00	289.843.028,00	-30.463.372,00	90,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.549.388,00	281.086.028,00	-30.463.360,00	90,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.757.012,00	8.757.000,00	-12,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	74.720.000,00	12.320.000,00	-62.400.000,00	16,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.720.000,00	12.320.000,00	-62.400.000,00	16,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.690.000,00	1.200.000,00	-490.000,00	71,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	1.200.000,00	-490.000,00	71,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	72.750.000,00	67.090.000,00	-5.660.000,00	92,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.750.000,00	67.090.000,00	-5.660.000,00	92,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	56.505.000,00	8.904.405,00	-47.600.595,00	15,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	56.505.000,00	8.904.405,00	-47.600.595,00	15,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.505.000,00	8.904.405,00	-47.600.595,00	15,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.820.000,00	14.650.000,00	-170.000,00	98,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.820.000,00	14.650.000,00	-170.000,00	98,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.820.000,00	14.650.000,00	-170.000,00	98,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	14.650.000,00	-170.000,00	98,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015			Puskesmas Inobonto	1.199.651.679,00	1.012.790.261,00	-186.861.418,00	84,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.180.751.679,00	993.890.261,00	-186.861.418,00	84,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.168.673.679,00	983.890.261,00	-184.783.418,00	84,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	136.212.000,00	45.620.000,00	-90.592.000,00	33,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.212.000,00	45.620.000,00	-90.592.000,00	33,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.200.000,00	23.623.000,00	-1.577.000,00	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	23.623.000,00	-1.577.000,00	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.900.000,00	38.380.000,00	-20.520.000,00	65,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	38.380.000,00	-20.520.000,00	65,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	180.004.002,00	180.004.002,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.004.002,00	180.004.002,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	599.452.677,00	539.394.676,00	-60.058.001,00	89,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.211.507,00	536.056.906,00	-49.154.601,00	91,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.241.170,00	3.337.770,00	-10.903.400,00	23,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	65.400.000,00	56.322.083,00	-9.077.917,00	86,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	56.322.083,00	-9.077.917,00	86,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.500.000,00	43.541.500,00	-2.958.500,00	93,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	43.541.500,00	-2.958.500,00	93,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.078.000,00	10.000.000,00	-2.078.000,00	82,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.078.000,00	10.000.000,00	-2.078.000,00	82,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.078.000,00	10.000.000,00	-2.078.000,00	82,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016			Puskesmas Komangan	718.574.132,00	476.520.751,00	-242.053.381,00	66,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	713.174.132,00	472.520.751,00	-240.653.381,00	66,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.529.132,00	472.520.751,00	-228.008.381,00	67,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.100.000,00	11.960.000,00	-140.000,00	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	11.960.000,00	-140.000,00	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130.720.000,00	18.916.000,00	-111.804.000,00	14,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.720.000,00	18.916.000,00	-111.804.000,00	14,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	26.090.313,00	-3.909.687,00	86,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.090.313,00	-3.909.687,00	86,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	279.589.132,00	240.388.438,00	-39.200.694,00	85,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.589.132,00	240.388.438,00	-39.200.694,00	85,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	63.000.000,00	15.472.000,00	-47.528.000,00	24,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	15.472.000,00	-47.528.000,00	24,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.360.000,00	4.000.000,00	-3.360.000,00	54,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	4.000.000,00	-3.360.000,00	54,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	60.480.000,00	38.414.000,00	-22.066.000,00	63,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.480.000,00	38.414.000,00	-22.066.000,00	63,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.645.000,00	0,00	-12.645.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.645.000,00	0,00	-12.645.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.645.000,00	0,00	-12.645.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.400.000,00	4.000.000,00	-1.400.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.400.000,00	4.000.000,00	-1.400.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.400.000,00	4.000.000,00	-1.400.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	4.000.000,00	-1.400.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017			Puskesmas Tadoy	953.304.382,00	795.588.568,00	-157.715.814,00	83,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	929.004.382,00	777.588.568,00	-151.415.814,00	83,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	915.069.382,00	768.575.568,00	-146.493.814,00	83,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.500.000,00	7.200.000,00	-6.300.000,00	53,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	7.200.000,00	-6.300.000,00	53,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.370.000,00	27.300.000,00	-70.000,00	99,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.370.000,00	27.300.000,00	-70.000,00	99,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	154.954.000,00	128.145.875,00	-26.808.125,00	82,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.954.000,00	128.145.875,00	-26.808.125,00	82,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.060.000,00	12.400.000,00	-2.660.000,00	82,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.060.000,00	12.400.000,00	-2.660.000,00	82,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	86.300.000,00	64.050.000,00	-22.250.000,00	74,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.300.000,00	64.050.000,00	-22.250.000,00	74,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.992.000,00	103.108.398,00	-883.602,00	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.992.000,00	103.108.398,00	-883.602,00	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	295.348.382,00	288.471.295,00	-6.877.087,00	97,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.348.382,00	288.471.295,00	-6.877.087,00	97,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	83.500.000,00	18.500.000,00	-65.000.000,00	22,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	0,00	-45.500.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	18.500.000,00	-19.500.000,00	48,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.765.000,00	1.200.000,00	-5.565.000,00	17,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	1.200.000,00	-5.565.000,00	17,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	47.880.000,00	37.800.000,00	-10.080.000,00	78,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.880.000,00	37.800.000,00	-10.080.000,00	78,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.935.000,00	9.013.000,00	-4.922.000,00	64,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.935.000,00	9.013.000,00	-4.922.000,00	64,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.935.000,00	9.013.000,00	-4.922.000,00	64,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.300.000,00	18.000.000,00	-6.300.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.300.000,00	18.000.000,00	-6.300.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.300.000,00	18.000.000,00	-6.300.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	18.000.000,00	-6.300.000,00	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018			Puskesmas Werdhi Agung	1.103.549.766,00	731.246.195,00	-372.303.571,00	66,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.069.169.766,00	711.630.195,00	-357.539.571,00	66,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.056.797.766,00	702.630.195,00	-354.167.571,00	66,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.920.000,00	6.000.000,00	-10.920.000,00	35,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	6.000.000,00	-10.920.000,00	35,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.945.000,00	18.945.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.945.000,00	18.945.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.000.000,00	32.000.000,00	-40.000.000,00	44,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	32.000.000,00	-40.000.000,00	44,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
					2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.246.000,00	89.944.000,00	-110.302.000,00	44,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.246.000,00	89.944.000,00	-110.302.000,00	44,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.400.000,00	45.237.248,00	-63.162.752,00	41,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.400.000,00	45.237.248,00	-63.162.752,00	41,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.500.000,00	35.950.741,00	-1.549.259,00	95,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	35.950.741,00	-1.549.259,00	95,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	405.486.766,00	402.733.206,00	-2.753.560,00	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.702.384,00	383.948.824,00	-2.753.560,00	99,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.784.382,00	18.784.382,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	96.440.000,00	2.660.000,00	-93.780.000,00	2,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.440.000,00	2.660.000,00	-93.780.000,00	2,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	53,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	53,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	42.300.000,00	17.600.000,00	-24.700.000,00	41,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	17.600.000,00	-24.700.000,00	41,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.372.000,00	9.000.000,00	-3.372.000,00	72,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.372.000,00	9.000.000,00	-3.372.000,00	72,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.372.000,00	9.000.000,00	-3.372.000,00	72,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.380.000,00	19.616.000,00	-14.764.000,00	57,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.380.000,00	19.616.000,00	-14.764.000,00	57,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.380.000,00	19.616.000,00	-14.764.000,00	57,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.380.000,00	19.616.000,00	-14.764.000,00	57,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019			Puskesmas Konarom	1.000.000.000,00	513.076.266,00	-486.923.734,00	51,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.000.000.000,00	513.076.266,00	-486.923.734,00	51,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	987.178.000,00	504.076.266,00	-483.101.734,00	51,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.373.000,00	110.498.000,00	-64.875.000,00	63,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.373.000,00	110.498.000,00	-64.875.000,00	63,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	435.455.000,00	97.568.266,00	-337.886.734,00	22,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.455.000,00	97.568.266,00	-337.886.734,00	22,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.000.000,00	18.660.000,00	-65.340.000,00	22,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	45.500.000,00	0,00	-45.500.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	18.660.000,00	-19.840.000,00	48,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.230.000,00	40.230.000,00	-15.000.000,00	72,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.230.000,00	40.230.000,00	-15.000.000,00	72,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.822.000,00	9.000.000,00	-3.822.000,00	70,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.822.000,00	9.000.000,00	-3.822.000,00	70,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.822.000,00	9.000.000,00	-3.822.000,00	70,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020			UPTD Instalasi Farmasi	312.780.268,00	169.721.200,00	-143.059.068,00	54,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.627.122,00	52.858.000,00	-9.769.122,00	84,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.627.122,00	52.858.000,00	-9.769.122,00	84,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.627.122,00	52.858.000,00	-9.769.122,00	84,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.627.122,00	52.858.000,00	-9.769.122,00	84,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.153.146,00	116.863.200,00	-133.289.946,00	46,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	226.108.270,00	98.397.000,00	-127.711.270,00	43,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	40.000.000,00	38.709.000,00	-1.291.000,00	96,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.709.000,00	-1.291.000,00	96,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	186.108.270,00	59.688.000,00	-126.420.270,00	32,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.108.270,00	59.688.000,00	-126.420.270,00	32,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.044.876,00	18.466.200,00	-5.578.676,00	76,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24.044.876,00	18.466.200,00	-5.578.676,00	76,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.044.876,00	18.466.200,00	-5.578.676,00	76,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021			UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	201.046.170,00	197.747.936,00	-3.298.234,00	98,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	201.046.170,00	197.747.936,00	-3.298.234,00	98,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.359.200,00	33.359.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	33.359.200,00	33.359.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.359.200,00	33.359.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.686.970,00	164.388.736,00	-3.298.234,00	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	82.989.250,00	82.639.361,00	-349.889,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.989.250,00	82.639.361,00	-349.889,00	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.697.720,00	81.749.375,00	-2.948.345,00	96,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.697.720,00	81.749.375,00	-2.948.345,00	96,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
				Jumlah	129.070.113.187,00	117.234.975.633,75	-11.835.137.553,25	90,83	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	12.000.000.000,00	10.439.711.213,00	-1.560.288.787,00	87,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.000.000.000,00	10.439.711.213,00	-1.560.288.787,00	87,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	12.000.000.000,00	10.439.711.213,00	-1.560.288.787,00	87,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	54.011.820.635,00	53.104.064.310,00	-907.756.325,00	98,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.647.266.766,00	35.208.510.394,00	-438.756.372,00	98,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.889.416.233,00	31.567.311.251,00	-322.104.982,00	98,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.752.326.233,00	31.430.751.251,00	-321.574.982,00	98,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	31.752.326.233,00	31.430.751.251,00	-321.574.982,00	98,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.830.000,00	102.420.000,00	-410.000,00	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	102.780.000,00	102.420.000,00	-360.000,00	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.260.000,00	34.140.000,00	-120.000,00	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	34.260.000,00	34.140.000,00	-120.000,00	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.372.350,00	682.511.155,00	-7.861.195,00	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.107.873,00	167.612.216,00	-3.495.657,00	97,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.107.873,00	167.612.216,00	-3.495.657,00	97,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519.264.477,00	514.898.939,00	-4.365.538,00	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.264.477,00	514.898.939,00	-4.365.538,00	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.354.622,00	305.300.000,00	-2.054.622,00	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.332.311,00	185.300.000,00	-2.032.311,00	98,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.311,00	0,00	-32.311,00	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.300.000,00	185.300.000,00	-2.000.000,00	98,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.022.311,00	120.000.000,00	-22.311,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.022.311,00	120.000.000,00	-22.311,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.364.578.204,00	2.337.402.850,00	-27.175.354,00	98,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.072.249.727,00	1.071.852.850,00	-396.877,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.249.727,00	1.071.852.850,00	-396.877,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.292.328.477,00	1.265.550.000,00	-26.778.477,00	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.292.328.477,00	1.265.550.000,00	-26.778.477,00	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.545.357,00	315.985.138,00	-79.560.219,00	79,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395.545.357,00	315.985.138,00	-79.560.219,00	79,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.545.357,00	315.985.138,00	-79.560.219,00	79,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.378.504.438,00	14.000.094.819,00	-378.409.619,00	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.925.005.393,00	7.696.534.228,00	-228.471.165,00	97,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.500.000.000,00	1.460.000.000,00	-40.000.000,00	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000,00	1.460.000.000,00	-40.000.000,00	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	649.974.614,00	579.239.563,00	-70.735.051,00	89,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.710,00	0,00	-78.710,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	649.895.904,00	579.239.563,00	-70.656.341,00	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	670.662.000,00	574.786.000,00	-95.876.000,00	85,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.000,00	37.422.000,00	-54.000,00	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.186.000,00	537.364.000,00	-95.822.000,00	84,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.385.473.361,00	1.371.429.380,00	-14.043.981,00	98,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.473.361,00	1.371.429.380,00	-14.043.981,00	98,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.265.000.269,00	2.257.206.808,00	-7.793.461,00	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000.269,00	2.257.206.808,00	-7.793.461,00	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.453.895.149,00	1.453.872.477,00	-22.672,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.453.895.149,00	1.453.872.477,00	-22.672,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.609.235.621,00	5.491.784.791,00	-117.450.830,00	97,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.009.329.350,00	5.002.277.536,00	-7.051.814,00	99,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.009.329.350,00	5.002.277.536,00	-7.051.814,00	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	599.906.271,00	489.507.255,00	-110.399.016,00	81,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.906.271,00	489.507.255,00	-110.399.016,00	81,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	344.182.724,00	311.775.900,00	-32.406.824,00	90,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	344.182.724,00	311.775.900,00	-32.406.824,00	90,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.653.241,00	244.175.900,00	-24.477.341,00	90,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.529.483,00	67.600.000,00	-7.929.483,00	89,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.080.700,00	499.999.900,00	-80.800,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.080.700,00	499.999.900,00	-80.800,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.080.700,00	499.999.900,00	-80.800,00	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.986.049.431,00	3.895.459.097,00	-90.590.334,00	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.188.235.431,00	3.151.000.000,00	-37.235.431,00	98,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3.188.235.431,00	3.151.000.000,00	-37.235.431,00	98,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.188.235.431,00	3.151.000.000,00	-37.235.431,00	98,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.814.000,00	744.459.097,00	-53.354.903,00	93,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.814.000,00	744.459.097,00	-53.354.903,00	93,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.814.000,00	744.459.097,00	-53.354.903,00	93,31	
				Jumlah	54.011.820.635,00	53.104.064.310,00	-907.756.325,00	98,32	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	78.359.600,00	58.359.600,00	391,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	39.416.652.704,00	37.722.357.192,00	- 1.694.295.512,00	95,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.868.469.772,00	8.234.713.979,00	- 633.755.793,00	92,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.262.643.276,00	6.810.320.931,00	- 452.322.345,00	93,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.973.746.569,00	6.522.534.591,00	- 451.211.978,00	93,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.973.746.569,00	6.522.534.591,00	- 451.211.978,00	93,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.770.000,00	198.720.000,00	- 50.000,00	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	198.720.000,00	198.720.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	-	- 50.000,00	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.024.380,00	68.808.500,00	- 215.880,00	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	66.240.000,00	66.240.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.784.380,00	2.568.500,00	- 215.880,00	92,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.102.327,00	20.257.840,00	- 844.487,00	96,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.102.327,00	20.257.840,00	- 844.487,00	96,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.898.683,00	604.207.824,00	- 1.690.859,00	99,72	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.085.120,00	15.890.400,00	- 1.194.720,00	93,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.085.120,00	15.890.400,00	- 1.194.720,00	93,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588.813.563,00	588.317.424,00	- 496.139,00	99,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.813.563,00	588.317.424,00	- 496.139,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.637.700,00	197.969.000,00	- 8.668.700,00	95,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	22.744.000,00	22.619.000,00	- 125.000,00	99,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.744.000,00	22.619.000,00	- 125.000,00	99,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.893.700,00	175.350.000,00	- 8.543.700,00	95,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.893.700,00	175.350.000,00	- 8.543.700,00	95,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.474.561,00	298.065.000,00	- 2.409.561,00	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.711.777,00	27.565.000,00	- 2.146.777,00	92,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.711.777,00	27.565.000,00	- 2.146.777,00	92,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.762.784,00	270.500.000,00	- 262.784,00	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.762.784,00	270.500.000,00	- 262.784,00	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.815.552,00	324.151.224,00	- 168.664.328,00	65,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.037.075,00	179.128.300,00	- 17.908.775,00	90,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.037.075,00	179.128.300,00	- 17.908.775,00	90,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.600.000,00	134.507.924,00	- 92.076,00	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.600.000,00	134.507.924,00	- 92.076,00	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.178.477,00	10.515.000,00	- 150.663.477,00	6,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.178.477,00	10.515.000,00	- 150.663.477,00	6,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.999.697.955,00	2.977.704.124,00	- 21.993.831,00	99,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	447.273.948,00	446.361.527,00	- 912.421,00	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	447.273.948,00	446.361.527,00	- 912.421,00	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.042.596,00	12.130.175,00	- 912.421,00	93,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	434.231.352,00	434.231.352,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.552.424.007,00	2.531.342.597,00	- 21.081.410,00	99,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015		Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.046.156.387,00	1.045.367.200,00	- 789.187,00	99,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.985.387,00	34.196.200,00	- 789.187,00	97,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.011.171.000,00	1.011.171.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	424.444.102,00	411.712.549,00	- 12.731.553,00	97,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.444.102,00	411.712.549,00	- 12.731.553,00	97,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	858.571.865,00	858.387.350,00	- 184.515,00	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	858.571.865,00	858.387.350,00	- 184.515,00	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0035		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	223.251.653,00	215.875.498,00	- 7.376.155,00	96,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.251.653,00	215.875.498,00	- 7.376.155,00	96,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	780.481.429,00	779.956.002,00	- 525.427,00	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	780.481.429,00	779.956.002,00	- 525.427,00	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	780.481.429,00	779.956.002,00	- 525.427,00	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.946.516,00	128.421.089,00	- 525.427,00	99,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.05	Belanja Hibah	651.534.913,00	651.534.913,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.775.049.735,00	3.774.094.608,00	- 955.127,00	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.775.049.735,00	3.774.094.608,00	- 955.127,00	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.762.904.658,00	3.762.094.608,00	- 810.050,00	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.762.904.658,00	3.762.094.608,00	- 810.050,00	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12.145.077,00	12.000.000,00	- 145.077,00	98,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.145.077,00	12.000.000,00	- 145.077,00	98,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	624.703.543,00	622.419.700,00	- 2.283.843,00	99,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	624.703.543,00	622.419.700,00	- 2.283.843,00	99,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	432.053.544,00	430.050.100,00	- 2.003.444,00	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.731.360,00	70.150.100,00	- 581.260,00	99,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	361.322.184,00	359.900.000,00	- 1.422.184,00	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020		Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	192.649.999,00	192.369.600,00	- 280.399,00	99,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.199.999,00	7.919.600,00	- 280.399,00	96,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.450.000,00	184.450.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.645.077,00	32.500.000,00	- 145.077,00	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	32.645.077,00	32.500.000,00	- 145.077,00	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	32.645.077,00	32.500.000,00	- 145.077,00	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.645.077,00	32.500.000,00	- 145.077,00	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	22.161.301.309,00	21.165.662.529,00	- 995.638.780,00	95,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	22.161.301.309,00	21.165.662.529,00	- 995.638.780,00	95,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	247.931.100,00	225.036.330,00	- 22.894.770,00	90,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.414.600,00	130.771.800,00	- 22.642.800,00	85,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.516.500,00	94.264.530,00	- 251.970,00	99,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	1.469.761.776,00	1.466.717.000,00	- 3.044.776,00	99,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.661.776,00	33.617.050,00	- 3.044.726,00	91,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.433.100.000,00	1.433.099.950,00	- 50,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	2.307.164.723,00	2.264.998.780,00	- 42.165.943,00	98,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.500.000,00	- 500.000,00	90,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.302.164.723,00	2.260.498.780,00	- 41.665.943,00	98,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037		Pelebaran Jalan Menuju Standar	13.129.044.400,00	12.282.894.519,00	- 846.149.881,00	93,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.122.750,00	369.159.060,00	- 132.963.690,00	73,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.626.921.650,00	11.913.735.459,00	- 713.186.191,00	94,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	385.000.000,00	381.075.000,00	- 3.925.000,00	98,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.200.000,00	- 800.000,00	84,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	380.000.000,00	376.875.000,00	- 3.125.000,00	99,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	718.258.387,00	699.851.810,00	- 18.406.577,00	97,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.077,00	-	- 145.077,00	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	718.113.310,00	699.851.810,00	- 18.261.500,00	97,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	391.927.837,00	387.514.290,00	- 4.413.547,00	98,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.077,00	-	- 145.077,00	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	391.782.760,00	387.514.290,00	- 4.268.470,00	98,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044		Rehabilitasi Jalan	1.966.112.776,00	1.945.821.800,00	- 20.290.976,00	98,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.061.776,00	27.770.800,00	- 20.290.976,00	57,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.918.051.000,00	1.918.051.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.546.100.310,00	1.511.753.000,00	- 34.347.310,00	97,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.546.100.310,00	1.511.753.000,00	- 34.347.310,00	97,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	23.352.919,00	22.363.700,00	- 989.219,00	95,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	23.352.919,00	22.363.700,00	- 989.219,00	95,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	23.352.919,00	22.363.700,00	- 989.219,00	95,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.352.919,00	22.363.700,00	- 989.219,00	95,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	150.950.965,00	112.942.550,00	- 38.008.415,00	74,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	150.950.965,00	112.942.550,00	- 38.008.415,00	74,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	150.950.965,00	112.942.550,00	- 38.008.415,00	74,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.950.965,00	112.942.550,00	- 38.008.415,00	74,82	
				Jumlah	39.416.652.704,00	37.722.357.192,00	- 1.694.295.512,00	95,70	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.412.892.878,00	17.184.229.641,00	-228.663.237,00	98,69	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.327.576.755,00	7.118.135.687,00	-209.441.068,00	97,14	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.102.225.246,00	2.019.598.142,00	-82.627.104,00	96,07	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.026.201.120,00	1.943.916.266,00	-82.284.854,00	95,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.026.201.120,00	1.943.916.266,00	-82.284.854,00	95,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.400.000,00	30.060.000,00	-340.000,00	98,88	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	30.400.000,00	30.060.000,00	-340.000,00	98,88	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.285.385,00	12.283.350,00	-2.035,00	99,98	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.265.385,00	2.263.350,00	-2.035,00	99,91	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.338.741,00	33.338.526,00	-215,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.338.741,00	33.338.526,00	-215,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.154.249,00	436.852.350,00	-301.899,00	99,93	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.145.848,00	6.022.900,00	-122.948,00	98,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.145.848,00	6.022.900,00	-122.948,00	98,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.276.749,00	7.276.150,00	-599,00	99,99	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.276.749,00	7.276.150,00	-599,00	99,99	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.114.745,00	5.938.950,00	-175.795,00	97,13	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.114.745,00	5.938.950,00	-175.795,00	97,13	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.616.907,00	417.614.350,00	-2.557,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.616.907,00	417.614.350,00	-2.557,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.310.000,00	22.000.000,00	-1.310.000,00	94,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.310.000,00	22.000.000,00	-1.310.000,00	94,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.310.000,00	22.000.000,00	-1.310.000,00	94,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.601.269.603,00	4.487.771.702,00	-113.497.901,00	97,53	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.719.812,00	8.694.500,00	-25.312,00	99,71	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.719.812,00	8.694.500,00	-25.312,00	99,71	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.477.799.791,00	4.366.827.202,00	-110.972.589,00	97,52	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.477.799.791,00	4.366.827.202,00	-110.972.589,00	97,52	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.750.000,00	112.250.000,00	-2.500.000,00	97,82	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.750.000,00	112.250.000,00	-2.500.000,00	97,82	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.617.657,00	151.913.493,00	-11.704.164,00	92,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.372.657,00	84.712.093,00	-11.660.564,00	87,90	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.372.657,00	84.712.093,00	-11.660.564,00	87,90	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000,00	1.656.400,00	-43.600,00	97,44	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.656.400,00	-43.600,00	97,44	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.545.000,00	10.545.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.545.000,00	10.545.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	190.859.667,00	178.193.700,00	-12.665.967,00	93,36	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.360.139,00	48.945.300,00	-1.414.839,00	97,19	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0003		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	20.355.087,00	20.074.750,00	-280.337,00	98,62	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.355.087,00	20.074.750,00	-280.337,00	98,62	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0004		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	6.736.716,00	6.707.200,00	-29.516,00	99,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.736.716,00	6.707.200,00	-29.516,00	99,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0007		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.938.169,00	9.399.250,00	-538.919,00	94,58	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.938.169,00	9.399.250,00	-538.919,00	94,58	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0008		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	13.330.167,00	12.764.100,00	-566.067,00	95,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.330.167,00	12.764.100,00	-566.067,00	95,75	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	39.240.279,00	28.938.500,00	-10.301.779,00	73,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	14.998.317,00	12.117.000,00	-2.881.317,00	80,79	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.317,00	12.117.000,00	-2.881.317,00	80,79	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0008		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.715.311,00	2.547.400,00	-1.167.911,00	68,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.715.311,00	2.547.400,00	-1.167.911,00	68,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0009		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	10.196.106,00	5.943.900,00	-4.252.206,00	58,30	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.196.106,00	5.943.900,00	-4.252.206,00	58,30	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0010		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	10.330.545,00	8.330.200,00	-2.000.345,00	80,64	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.330.545,00	8.330.200,00	-2.000.345,00	80,64	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	91.221.217,00	90.820.850,00	-400.367,00	99,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	16.853.478,00	16.755.000,00	-98.478,00	99,42	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.478,00	1.755.000,00	-98.478,00	94,69	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	74.367.739,00	74.065.850,00	-301.889,00	99,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.867.739,00	36.565.850,00	-301.889,00	99,18	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.05	Belanja Hibah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5.708.585,00	5.238.950,00	-469.635,00	91,77	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5.708.585,00	5.238.950,00	-469.635,00	91,77	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.708.585,00	5.238.950,00	-469.635,00	91,77	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.329.447,00	4.250.100,00	-79.347,00	98,17	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.329.447,00	4.250.100,00	-79.347,00	98,17	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.329.447,00	4.250.100,00	-79.347,00	98,17	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.246.914.915,00	1.245.854.563,00	-1.060.352,00	99,91	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.681.925,00	11.088.800,00	-593.125,00	94,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0014		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	11.681.925,00	11.088.800,00	-593.125,00	94,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.681.925,00	11.088.800,00	-593.125,00	94,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.235.232.990,00	1.234.765.763,00	-467.227,00	99,96	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	613.232.990,00	612.765.763,00	-467.227,00	99,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.232.990,00	112.765.763,00	-467.227,00	99,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	622.000.000,00	622.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.640.649.269,00	8.635.496.591,00	-5.152.678,00	99,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.640.649.269,00	8.635.496.591,00	-5.152.678,00	99,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10.076.742,00	9.701.742,00	-375.000,00	96,28	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.076.742,00	9.701.742,00	-375.000,00	96,28	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.630.572.527,00	8.625.794.849,00	-4.777.678,00	99,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.630.572.527,00	8.625.794.849,00	-4.777.678,00	99,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.892.272,00	6.549.100,00	-343.172,00	95,02	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.06.2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	6.892.272,00	6.549.100,00	-343.172,00	95,02	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.06.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	6.892.272,00	6.549.100,00	-343.172,00	95,02	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.892.272,00	6.549.100,00	-343.172,00	95,02	
				Jumlah	17.412.892.878,00	17.184.229.641,00	-228.663.237,00	98,69	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	6.616.559.870,00	6.219.218.440,00	-397.341.430,00	93,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.337.669.922,00	5.947.708.065,00	-389.961.857,00	93,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.136.291.878,00	4.844.288.915,00	-292.002.963,00	94,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.877.551.162,00	2.587.204.690,00	-290.346.472,00	89,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.877.551.162,00	2.587.204.690,00	-290.346.472,00	89,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.226.150.000,00	2.224.650.000,00	-1.500.000,00	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.500.000,00	2.199.000.000,00	-1.500.000,00	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.867.570,00	9.848.550,00	-19.020,00	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.317.570,00	1.298.550,00	-19.020,00	98,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.723.146,00	22.585.675,00	-137.471,00	99,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.723.146,00	22.585.675,00	-137.471,00	99,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.498.000,00	55.700.000,00	-1.798.000,00	96,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.498.000,00	55.700.000,00	-1.798.000,00	96,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.498.000,00	55.700.000,00	-1.798.000,00	96,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	726.798.364,00	681.212.411,00	-45.585.953,00	93,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	456.691.740,00	411.430.300,00	-45.261.440,00	90,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.691.740,00	411.430.300,00	-45.261.440,00	90,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.106.624,00	269.782.111,00	-324.513,00	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.106.624,00	269.782.111,00	-324.513,00	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.523.000,00	107.134.130,00	-388.870,00	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.523.000,00	32.450.000,00	-73.000,00	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.523.000,00	32.450.000,00	-73.000,00	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	74.684.130,00	-315.870,00	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.684.130,00	-315.870,00	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.558.680,00	259.372.609,00	-50.186.071,00	83,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.835.524,00	250.223.684,00	-49.611.840,00	83,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.835.524,00	250.223.684,00	-49.611.840,00	83,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.723.156,00	9.148.925,00	-574.231,00	94,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.723.156,00	9.148.925,00	-574.231,00	94,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.644.929,00	134.666.700,00	-6.978.229,00	95,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.260.509,00	90.067.350,00	-6.193.159,00	93,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	31.672.768,00	31.597.350,00	-75.418,00	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.672.768,00	31.597.350,00	-75.418,00	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	64.587.741,00	58.470.000,00	-6.117.741,00	90,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.587.741,00	58.470.000,00	-6.117.741,00	90,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.384.420,00	44.599.350,00	-785.070,00	98,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	45.384.420,00	44.599.350,00	-785.070,00	98,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.384.420,00	44.599.350,00	-785.070,00	98,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	137.245.019,00	136.843.675,00	-401.344,00	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	137.245.019,00	136.843.675,00	-401.344,00	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	137.245.019,00	136.843.675,00	-401.344,00	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.245.019,00	136.843.675,00	-401.344,00	99,71	
				Jumlah	6.616.559.870,00	6.219.218.440,00	-397.341.430,00	93,99	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
							ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1					2		3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		5		BELANJA DAERAH		4.389.829.563,00	4.258.547.379,00	-131.282.184,00	97,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.839.323.462,00	2.754.659.224,00	-84.664.238,00	97,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.153.086.761,00	2.096.748.278,00	-56.338.483,00	97,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.079.577.432,00	2.028.084.878,00	-51.492.554,00	97,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai		2.079.577.432,00	2.028.084.878,00	-51.492.554,00	97,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		43.650.000,00	41.850.000,00	-1.800.000,00	95,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.01		Belanja Pegawai		43.650.000,00	41.850.000,00	-1.800.000,00	95,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		15.440.480,00	13.950.000,00	-1.490.480,00	90,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.01		Belanja Pegawai		14.550.000,00	13.950.000,00	-600.000,00	95,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		890.480,00	0,00	-890.480,00	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		14.418.849,00	12.863.400,00	-1.555.449,00	89,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		14.418.849,00	12.863.400,00	-1.555.449,00	89,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		284.921.249,00	271.740.367,00	-13.180.882,00	95,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.244.202,00	3.558.875,00	-685.327,00	83,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		4.244.202,00	3.558.875,00	-685.327,00	83,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		280.677.046,00	268.181.492,00	-12.495.554,00	95,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		280.677.046,00	268.181.492,00	-12.495.554,00	95,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.836.573,00	99.550.000,00	-286.573,00	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		37.586.573,00	37.300.000,00	-286.573,00	99,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		37.586.573,00	37.300.000,00	-286.573,00	99,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.478.879,00	286.620.579,00	-14.858.300,00	95,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.269.000,00	100.333.629,00	-8.935.371,00	91,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.269.000,00	100.333.629,00	-8.935.371,00	91,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.316.440,00	94.271.950,00	-5.044.490,00	94,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.316.440,00	94.271.950,00	-5.044.490,00	94,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.201.354,00	6.515.000,00	-686.354,00	90,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.201.354,00	6.515.000,00	-686.354,00	90,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.692.085,00	85.500.000,00	-192.085,00	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.692.085,00	85.500.000,00	-192.085,00	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.550.506.101,00	1.503.888.155,00	-46.617.946,00	96,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	478.254.976,00	471.508.744,00	-6.746.232,00	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	332.952.391,00	326.335.244,00	-6.617.147,00	98,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.952.391,00	326.335.244,00	-6.617.147,00	98,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	145.302.585,00	145.173.500,00	-129.085,00	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.302.585,00	145.173.500,00	-129.085,00	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	604.290.984,00	589.231.070,00	-15.059.914,00	97,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	529.061.395,00	520.198.950,00	-8.862.445,00	98,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.061.395,00	520.198.950,00	-8.862.445,00	98,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.333.000,00	300.000,00	-1.033.000,00	22,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.333.000,00	300.000,00	-1.033.000,00	22,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.859.971,00	24.416.120,00	-4.443.851,00	84,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.859.971,00	24.416.120,00	-4.443.851,00	84,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0011		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	45.036.618,00	44.316.000,00	-720.618,00	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.036.618,00	44.316.000,00	-720.618,00	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	467.960.141,00	443.148.341,00	-24.811.800,00	94,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	65.373.444,00	57.810.240,00	-7.563.204,00	88,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.373.444,00	57.810.240,00	-7.563.204,00	88,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04.0013		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	402.586.697,00	385.338.101,00	-17.248.596,00	95,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.586.697,00	385.338.101,00	-17.248.596,00	95,72	
				Jumlah	4.389.829.563,00	4.258.547.379,00	-131.282.184,00	97,01	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.220.503.043,00	4.953.583.825,00	-266.919.218,00	94,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.345.231.151,00	3.235.820.175,00	-109.410.976,00	96,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.026.400,00	24.267.250,00	-759.150,00	96,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.026.400,00	24.267.250,00	-759.150,00	96,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.026.400,00	24.267.250,00	-759.150,00	96,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.362.461.739,00	2.292.451.457,00	-70.010.282,00	97,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.303.485.157,00	2.233.612.957,00	-69.872.200,00	96,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.303.485.157,00	2.233.612.957,00	-69.872.200,00	96,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.450.000,00	23.400.000,00	-50.000,00	99,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.479.930,00	9.471.000,00	-8.930,00	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.679.930,00	1.671.000,00	-8.930,00	99,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.046.652,00	25.967.500,00	-79.152,00	99,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.046.652,00	25.967.500,00	-79.152,00	99,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	655.043.848,00	650.705.818,00	-4.338.030,00	99,34	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.451.545,00	2.625.000,00	-826.545,00	76,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.451.545,00	2.625.000,00	-826.545,00	76,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.223.429,00	1.020.000,00	-1.203.429,00	45,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.223.429,00	1.020.000,00	-1.203.429,00	45,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.695.953,00	16.734.000,00	-961.953,00	94,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.695.953,00	16.734.000,00	-961.953,00	94,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.717.591,00	7.043.200,00	-674.391,00	91,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.717.591,00	7.043.200,00	-674.391,00	91,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	623.955.330,00	623.283.618,00	-671.712,00	99,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.955.330,00	623.283.618,00	-671.712,00	99,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.939.669,00	48.462.000,00	-9.477.669,00	83,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.939.669,00	48.462.000,00	-9.477.669,00	83,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.439.669,00	2.402.000,00	-37.669,00	98,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.500.000,00	46.060.000,00	-9.440.000,00	82,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.684.024,00	105.119.750,00	-1.564.274,00	98,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.326.912,00	10.574.750,00	-752.162,00	93,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.326.912,00	10.574.750,00	-752.162,00	93,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.357.112,00	94.545.000,00	-812.112,00	99,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.357.112,00	94.545.000,00	-812.112,00	99,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.075.471,00	114.813.900,00	-23.261.571,00	83,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.124.760,00	73.285.300,00	-19.839.460,00	78,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.124.760,00	73.285.300,00	-19.839.460,00	78,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.231.912,00	6.929.900,00	-302.012,00	95,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.231.912,00	6.929.900,00	-302.012,00	95,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.718.799,00	34.598.700,00	-3.120.099,00	91,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.799,00	4.598.700,00	-1.152.099,00	79,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.968.000,00	30.000.000,00	-1.968.000,00	93,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	410.184.503,00	372.055.900,00	-38.128.603,00	90,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.600.396,00	4.200.000,00	-11.400.396,00	26,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15.600.396,00	4.200.000,00	-11.400.396,00	26,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.396,00	4.200.000,00	-11.400.396,00	26,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	394.584.107,00	367.855.900,00	-26.728.207,00	93,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.095.555,00	114.389.600,00	-4.705.955,00	96,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.095.555,00	114.389.600,00	-4.705.955,00	96,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90.250.140,00	84.499.000,00	-5.751.140,00	93,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.250.140,00	84.499.000,00	-5.751.140,00	93,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	185.238.412,00	168.967.300,00	-16.271.112,00	91,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.238.412,00	168.967.300,00	-16.271.112,00	91,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	361.180.967,00	358.354.000,00	-2.826.967,00	99,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	37.184.500,00	35.960.450,00	-1.224.050,00	96,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakanan	12.686.634,00	12.341.850,00	-344.784,00	97,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.176,00	4.649.600,00	-280.576,00	94,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.756.458,00	7.692.250,00	-64.208,00	99,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002		Penyediaan Sandang	24.497.866,00	23.618.600,00	-879.266,00	96,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.167.866,00	20.783.100,00	-384.766,00	98,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.330.000,00	2.835.500,00	-494.500,00	85,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	323.996.467,00	322.393.550,00	-1.602.917,00	99,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0003		Penyediaan Permakanan	265.261.466,00	264.844.450,00	-417.016,00	99,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.261.466,00	264.844.450,00	-417.016,00	99,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004		Penyediaan Sandang	26.770.106,00	26.129.100,00	-641.006,00	97,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.770.106,00	26.129.100,00	-641.006,00	97,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0005		Penyediaan Alat Bantu	31.964.895,00	31.420.000,00	-544.895,00	98,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.964.895,00	31.420.000,00	-544.895,00	98,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	845.120.333,00	734.469.000,00	-110.651.333,00	86,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	845.120.333,00	734.469.000,00	-110.651.333,00	86,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	240.644.586,00	192.981.000,00	-47.663.586,00	80,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.644.586,00	192.981.000,00	-47.663.586,00	80,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.533.320,00	5.775.000,00	-7.758.320,00	42,67	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.533.320,00	5.775.000,00	-7.758.320,00	42,67	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	590.942.427,00	535.713.000,00	-55.229.427,00	90,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.942.427,00	535.713.000,00	-55.229.427,00	90,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	258.786.089,00	252.884.750,00	-5.901.339,00	97,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	168.276.399,00	162.449.950,00	-5.826.449,00	96,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	85.008.756,00	81.756.400,00	-3.252.356,00	96,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.008.756,00	81.756.400,00	-3.252.356,00	96,17	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002		Penyediaan Sandang	70.034.634,00	68.209.800,00	-1.824.834,00	97,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.034.634,00	68.209.800,00	-1.824.834,00	97,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.997.868,00	7.683.000,00	-314.868,00	96,06	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.997.868,00	7.683.000,00	-314.868,00	96,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	5.235.141,00	4.800.750,00	-434.391,00	91,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.235.141,00	4.800.750,00	-434.391,00	91,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90.509.690,00	90.434.800,00	-74.890,00	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.509.690,00	90.434.800,00	-74.890,00	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.509.690,00	90.434.800,00	-74.890,00	99,92	
				Jumlah	5.220.503.043,00	4.953.583.825,00	-266.919.218,00	94,89	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	831.949.986,00	-268.050.014,00	75,63	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.148.035.652,00	4.245.983.839,00	-902.051.813,00	82,48	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.379.978.126,00	3.297.582.927,00	-82.395.199,00	97,56	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.681.165.347,00	2.615.081.367,00	-66.083.980,00	97,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.985.540,00	2.558.832.492,00	-65.153.048,00	97,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.248.404.740,00	2.183.251.692,00	-65.153.048,00	97,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.580.800,00	375.580.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.680.000,00	27.630.000,00	-50.000,00	99,82	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.500.154,00	9.210.000,00	-290.154,00	96,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.154,00	0,00	-290.154,00	-	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.999.653,00	19.408.875,00	-590.778,00	97,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.653,00	19.408.875,00	-590.778,00	97,05	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.351.354,00	337.935.602,00	-415.752,00	99,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.351.354,00	337.935.602,00	-415.752,00	99,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.351.354,00	337.935.602,00	-415.752,00	99,88	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.335.921,00	21.050.000,00	-285.921,00	98,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.335.921,00	21.050.000,00	-285.921,00	98,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.335.921,00	21.050.000,00	-285.921,00	98,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.249.435,00	143.378.265,00	-2.871.170,00	98,04	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.999.435,00	9.128.265,00	-2.871.170,00	76,07	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.999.435,00	9.128.265,00	-2.871.170,00	76,07	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.250.000,00	134.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.250.000,00	134.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.876.069,00	180.137.693,00	-12.738.376,00	93,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.299.396,00	96.887.693,00	-12.411.703,00	88,64	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.299.396,00	96.887.693,00	-12.411.703,00	88,64	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.576.673,00	83.250.000,00	-326.673,00	99,61	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.576.673,00	83.250.000,00	-326.673,00	99,61	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	449.996.726,00	448.382.512,00	-1.614.214,00	99,64	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	449.996.726,00	448.382.512,00	-1.614.214,00	99,64	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	449.996.726,00	448.382.512,00	-1.614.214,00	99,64	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.996.726,00	448.382.512,00	-1.614.214,00	99,64	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.318.060.800,00	500.018.400,00	-818.042.400,00	37,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.318.060.800,00	500.018.400,00	-818.042.400,00	37,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.318.060.800,00	500.018.400,00	-818.042.400,00	37,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.060.800,00	500.018.400,00	-818.042.400,00	37,94	
				Jumlah	5.148.035.652,00	4.245.983.839,00	-902.051.813,00	82,48	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000			BELANJA DAERAH	3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	-363.838.902,00	87,97	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.367.749.502,00	2.225.881.289,00	-141.868.213,00	94,01	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.968.691.472,00	1.854.982.871,00	-113.708.601,00	94,22	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.921.954.159,00	1.810.006.371,00	-111.947.788,00	94,18	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.921.954.159,00	1.810.006.371,00	-111.947.788,00	94,18	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	-50.000,00	99,75	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.282.100,00	7.280.000,00	-2.100,00	99,97	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	712.100,00	710.000,00	-2.100,00	99,71	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.695.213,00	17.986.500,00	-1.708.713,00	91,32	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.695.213,00	17.986.500,00	-1.708.713,00	91,32	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.996.058,00	160.125.200,00	-4.870.858,00	97,05	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.907.900,00	4.366.000,00	-4.541.900,00	49,01	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.907.900,00	4.366.000,00	-4.541.900,00	49,01	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.088.158,00	155.759.200,00	-328.958,00	99,79	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.088.158,00	155.759.200,00	-328.958,00	99,79	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.404.080,00	124.753.718,00	-11.650.362,00	91,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.537.910,00	5.240.918,00	-1.296.992,00	80,16	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.537.910,00	5.240.918,00	-1.296.992,00	80,16	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.402.384,00	55.110.000,00	-292.384,00	99,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.402.384,00	55.110.000,00	-292.384,00	99,47	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.463.786,00	64.402.800,00	-10.060.986,00	86,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.463.786,00	64.402.800,00	-10.060.986,00	86,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.657.892,00	86.019.500,00	-11.638.392,00	88,08	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.657.892,00	86.019.500,00	-11.638.392,00	88,08	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.657.892,00	86.019.500,00	-11.638.392,00	88,08	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	355.915.639,00	278.207.100,00	-77.708.539,00	78,17	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.031.000,00	12.585.000,00	-36.446.000,00	25,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.031.000,00	12.585.000,00	-36.446.000,00	25,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.031.000,00	12.585.000,00	-36.446.000,00	25,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.050.000,00	92.000.000,00	-7.050.000,00	92,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.050.000,00	92.000.000,00	-7.050.000,00	92,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.050.000,00	92.000.000,00	-7.050.000,00	92,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.834.639,00	173.622.100,00	-34.212.539,00	83,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.080.000,00	0,00	-34.080.000,00	-	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.080.000,00	0,00	-34.080.000,00	-	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0004		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	173.754.639,00	173.622.100,00	-132.539,00	99,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.754.639,00	173.622.100,00	-132.539,00	99,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.916.350,00	74.810.000,00	-1.106.350,00	98,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.916.350,00	74.810.000,00	-1.106.350,00	98,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75.916.350,00	74.810.000,00	-1.106.350,00	98,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.916.350,00	74.810.000,00	-1.106.350,00	98,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	223.835.200,00	80.679.400,00	-143.155.800,00	36,04	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	48.786.200,00	2.381.000,00	-46.405.200,00	4,88	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2		3	4	5	6	7
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		48.786.200,00	2.381.000,00	-46.405.200,00	4,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		48.786.200,00	2.381.000,00	-46.405.200,00	4,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		134.199.000,00	78.298.400,00	-55.900.600,00	58,34	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		134.199.000,00	78.298.400,00	-55.900.600,00	58,34	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		134.199.000,00	78.298.400,00	-55.900.600,00	58,34	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		40.850.000,00	0,00	-40.850.000,00	-	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		40.850.000,00	0,00	-40.850.000,00	-	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		40.850.000,00	0,00	-40.850.000,00	-	
				Jumlah		3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	-363.838.902,00	87,97	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan

KODE REKENING					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1					3	4	5	6	7
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.141.656.416,00	4.047.751.636,00	-93.904.780,00	97,73	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.972.813.769,00	2.917.940.657,00	-54.873.112,00	98,15	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.549.792.358,00	2.510.109.586,00	-39.682.772,00	98,44	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.958.398,00	2.417.668.160,00	-39.290.238,00	98,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.456.958.398,00	2.417.668.160,00	-39.290.238,00	98,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.246.730,00	9.205.000,00	-41.730,00	99,55	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.046.730,00	2.005.000,00	-41.730,00	97,96	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.987.230,00	13.636.426,00	-350.804,00	97,49	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.987.230,00	13.636.426,00	-350.804,00	97,49	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.282.368,00	267.607.700,00	-674.668,00	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.092.460,00	2.763.500,00	-328.960,00	89,36	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.092.460,00	2.763.500,00	-328.960,00	89,36	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.189.908,00	264.844.200,00	-345.708,00	99,87	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.189.908,00	264.844.200,00	-345.708,00	99,87	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.124.790,00	15.185.000,00	-3.939.790,00	79,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.124.790,00	15.185.000,00	-3.939.790,00	79,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.124.790,00	15.185.000,00	-3.939.790,00	79,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.068.636,00	13.068.500,00	-136,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.068.636,00	13.068.500,00	-136,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.068.636,00	13.068.500,00	-136,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.545.617,00	111.969.871,00	-10.575.746,00	91,37	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.296.867,00	75.096.971,00	-10.199.896,00	88,04	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.296.867,00	75.096.971,00	-10.199.896,00	88,04	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.394.050,00	6.113.100,00	-280.950,00	95,61	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.394.050,00	6.113.100,00	-280.950,00	95,61	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.854.700,00	30.759.800,00	-94.900,00	99,69	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.854.700,00	30.759.800,00	-94.900,00	99,69	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.093.775.067,00	1.083.943.279,00	-9.831.788,00	99,10	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	494.495.628,00	493.251.979,00	-1.243.649,00	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	403.481.854,00	403.288.054,00	-193.800,00	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.481.854,00	403.288.054,00	-193.800,00	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0006		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.976.332,00	29.755.825,00	-220.507,00	99,26	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.976.332,00	29.755.825,00	-220.507,00	99,26	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	17.021.568,00	16.523.800,00	-497.768,00	97,08	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.021.568,00	16.523.800,00	-497.768,00	97,08	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	44.015.874,00	43.684.300,00	-331.574,00	99,25	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.015.874,00	43.684.300,00	-331.574,00	99,25	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	375.232.377,00	375.144.000,00	-88.377,00	99,98	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	375.232.377,00	375.144.000,00	-88.377,00	99,98	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.232.377,00	375.144.000,00	-88.377,00	99,98	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	224.047.062,00	215.547.300,00	-8.499.762,00	96,21	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	224.047.062,00	215.547.300,00	-8.499.762,00	96,21	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.047.062,00	215.547.300,00	-8.499.762,00	96,21	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	14.442.630,00	11.921.800,00	-2.520.830,00	82,55	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.064.245,00	7.200.000,00	-1.864.245,00	79,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.064.245,00	7.200.000,00	-1.864.245,00	79,43	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.064.245,00	7.200.000,00	-1.864.245,00	79,43	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.378.385,00	4.721.800,00	-656.585,00	87,79	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5.378.385,00	4.721.800,00	-656.585,00	87,79	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.378.385,00	4.721.800,00	-656.585,00	87,79	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	60.624.950,00	33.945.900,00	-26.679.050,00	55,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	60.624.950,00	33.945.900,00	-26.679.050,00	55,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3.209.046,00	2.934.000,00	-275.046,00	91,43	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.209.046,00	2.934.000,00	-275.046,00	91,43	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0006		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3.014.274,00	1.420.000,00	-1.594.274,00	47,11	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.014.274,00	1.420.000,00	-1.594.274,00	47,11	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	49.998.728,00	25.651.200,00	-24.347.528,00	51,30	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.998.728,00	25.651.200,00	-24.347.528,00	51,30	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0009		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4.402.902,00	3.940.700,00	-462.202,00	89,50	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.402.902,00	3.940.700,00	-462.202,00	89,50	
				Jumlah	4.141.656.416,00	4.047.751.636,00	-93.904.780,00	97,73	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	-59.053.297,00	98,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.693.476.863,00	2.643.379.632,00	-50.097.231,00	98,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.131.366.209,00	2.088.259.210,00	-43.106.999,00	97,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.009.759.766,00	1.967.005.810,00	-42.753.956,00	97,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.009.759.766,00	1.967.005.810,00	-42.753.956,00	97,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.850.000,00	95.850.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.705.909,00	9.572.000,00	-133.909,00	98,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.755.909,00	1.622.000,00	-133.909,00	92,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.050.534,00	15.831.400,00	-219.134,00	98,63	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.050.534,00	15.831.400,00	-219.134,00	98,63	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.650.000,00	15.000.000,00	-1.650.000,00	90,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.650.000,00	15.000.000,00	-1.650.000,00	90,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	15.000.000,00	-1.650.000,00	90,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.407.200,00	287.870.175,00	-537.025,00	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.407.200,00	287.870.175,00	-537.025,00	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.407.200,00	287.870.175,00	-537.025,00	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.397.666,00	6.128.000,00	-269.666,00	95,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.397.666,00	6.128.000,00	-269.666,00	95,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.397.666,00	6.128.000,00	-269.666,00	95,78	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2		3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250.655.788,00	246.122.247,00	-4.533.541,00	98,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		174.421.288,00	173.646.747,00	-774.541,00	99,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		174.421.288,00	173.646.747,00	-774.541,00	99,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.634.500,00	6.475.500,00	-159.000,00	97,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		6.634.500,00	6.475.500,00	-159.000,00	97,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		69.600.000,00	66.000.000,00	-3.600.000,00	94,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		69.600.000,00	66.000.000,00	-3.600.000,00	94,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		67.503.640,00	66.998.768,00	-504.872,00	99,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		67.503.640,00	66.998.768,00	-504.872,00	99,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		67.503.640,00	66.998.768,00	-504.872,00	99,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		67.503.640,00	66.998.768,00	-504.872,00	99,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		278.500.000,00	273.095.000,00	-5.405.000,00	98,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		278.500.000,00	273.095.000,00	-5.405.000,00	98,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		278.500.000,00	273.095.000,00	-5.405.000,00	98,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		278.500.000,00	273.095.000,00	-5.405.000,00	98,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		266.746.394,00	263.700.200,00	-3.046.194,00	98,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah		266.746.394,00	263.700.200,00	-3.046.194,00	98,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		266.746.394,00	263.700.200,00	-3.046.194,00	98,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		266.746.394,00	263.700.200,00	-3.046.194,00	98,86	
				Jumlah		3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	-59.053.297,00	98,21	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.518.493.356,00	4.341.668.859,00	-4.176.824.497,00	50,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.793.727.285,00	4.006.528.059,00	-3.787.199.226,00	51,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.228.313.578,00	3.092.097.614,00	-3.136.215.964,00	49,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.125.907.651,00	3.044.131.914,00	-3.081.775.737,00	49,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.125.907.651,00	3.044.131.914,00	-3.081.775.737,00	49,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.250.000,00	21.600.000,00	-21.650.000,00	49,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	21.600.000,00	-21.600.000,00	50,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.889.002,00	10.592.500,00	-12.296.502,00	46,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	50,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.489.002,00	3.392.500,00	-5.096.502,00	39,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.266.925,00	15.773.200,00	-20.493.725,00	43,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.266.925,00	15.773.200,00	-20.493.725,00	43,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.670.055,00	553.746.004,00	-231.924.051,00	70,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	165.254.780,00	165.254.780,00	#DIV/0!	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	165.254.780,00	165.254.780,00	#DIV/0!	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.530.009,00	2.345.650,00	-3.184.359,00	42,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.530.009,00	2.345.650,00	-3.184.359,00	42,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.378.040,00	4.315.000,00	-7.063.040,00	37,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.378.040,00	4.315.000,00	-7.063.040,00	37,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.005.678,00	18.633.200,00	-23.372.478,00	44,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.005.678,00	18.633.200,00	-23.372.478,00	44,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	726.756.328,00	363.197.374,00	-363.558.954,00	49,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.756.328,00	363.197.374,00	-363.558.954,00	49,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.117.345,00	159.468.491,00	-164.648.854,00	49,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.158.954,00	1.400.000,00	-1.758.954,00	44,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.158.954,00	1.400.000,00	-1.758.954,00	44,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.458.391,00	53.818.491,00	-58.639.900,00	47,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.458.391,00	53.818.491,00	-58.639.900,00	47,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.500.000,00	104.250.000,00	-104.250.000,00	50,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.500.000,00	104.250.000,00	-104.250.000,00	50,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.626.307,00	201.215.950,00	-254.410.357,00	44,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	424.631.107,00	190.585.950,00	-234.045.157,00	44,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.631.107,00	190.585.950,00	-234.045.157,00	44,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.995.200,00	10.630.000,00	-20.365.200,00	34,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.995.200,00	10.630.000,00	-20.365.200,00	34,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	653.634.384,00	300.436.000,00	-353.198.384,00	45,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	518.675.430,00	233.836.000,00	-284.839.430,00	45,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	518.675.430,00	233.836.000,00	-284.839.430,00	45,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.675.430,00	233.836.000,00	-284.839.430,00	45,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	134.958.954,00	66.600.000,00	-68.358.954,00	49,35	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	134.958.954,00	66.600.000,00	-68.358.954,00	49,35	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.958.954,00	66.600.000,00	-68.358.954,00	49,35	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	49.758.954,00	24.750.000,00	-25.008.954,00	49,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	49.758.954,00	24.750.000,00	-25.008.954,00	49,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	49.758.954,00	24.750.000,00	-25.008.954,00	49,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.758.954,00	24.750.000,00	-25.008.954,00	49,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	21.372.733,00	9.954.800,00	-11.417.933,00	46,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	21.372.733,00	9.954.800,00	-11.417.933,00	46,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	21.372.733,00	9.954.800,00	-11.417.933,00	46,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.372.733,00	9.954.800,00	-11.417.933,00	46,58	
				Jumlah	8.518.493.356,00	4.341.668.859,00	-4.176.824.497,00	50,97	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000			BELANJA DAERAH	8.164.763.902,00	7.767.576.642,00	-397.187.260,00	95,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.379.884.039,00	6.020.614.350,00	-359.269.689,00	94,37	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.774.330.233,00	5.436.653.696,00	-337.676.537,00	94,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.709.681.329,00	5.382.137.896,00	-327.543.433,00	94,26	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.244.997.877,00	2.169.515.636,00	-75.482.241,00	96,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.464.683.452,00	3.212.622.260,00	-252.061.192,00	92,72	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.700.000,00	24.040.000,00	-1.660.000,00	93,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	25.650.000,00	24.040.000,00	-1.610.000,00	93,72	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.515.688,00	16.732.500,00	-4.783.188,00	77,77	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	7.800.000,00	-750.000,00	91,23	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.965.688,00	8.932.500,00	-4.033.188,00	68,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.433.216,00	13.743.300,00	-3.689.916,00	78,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.433.216,00	13.743.300,00	-3.689.916,00	78,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.513.571,00	210.368.754,00	-12.144.817,00	94,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.946.494,00	3.672.000,00	-274.494,00	93,04	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.946.494,00	3.672.000,00	-274.494,00	93,04	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.567.077,00	206.696.754,00	-11.870.323,00	94,57	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.567.077,00	206.696.754,00	-11.870.323,00	94,57	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.282.170,00	197.480.000,00	-1.802.170,00	99,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.282.170,00	197.480.000,00	-1.802.170,00	99,10	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2		3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		199.282.170,00	197.480.000,00	-1.802.170,00	99,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		116.242.122,00	115.650.000,00	-592.122,00	99,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.492.622,00	3.400.000,00	-92.622,00	97,35	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.492.622,00	3.400.000,00	-92.622,00	97,35	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		499.500,00	0,00	-499.500,00	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		499.500,00	0,00	-499.500,00	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		67.515.943,00	60.461.900,00	-7.054.043,00	89,55	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		65.599.861,00	58.852.000,00	-6.747.861,00	89,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		65.599.861,00	58.852.000,00	-6.747.861,00	89,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.916.082,00	1.609.900,00	-306.182,00	84,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.916.082,00	1.609.900,00	-306.182,00	84,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		80.065.748,00	78.824.050,00	-1.241.698,00	98,45	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		80.065.748,00	78.824.050,00	-1.241.698,00	98,45	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0001		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		59.787.486,00	59.015.800,00	-771.686,00	98,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		59.787.486,00	59.015.800,00	-771.686,00	98,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		20.278.262,00	19.808.250,00	-470.012,00	97,68	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		20.278.262,00	19.808.250,00	-470.012,00	97,68	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		601.560.654,00	587.543.997,00	-14.016.657,00	97,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		601.560.654,00	587.543.997,00	-14.016.657,00	97,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		26.971.323,00	25.771.500,00	-1.199.823,00	95,55	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		26.971.323,00	25.771.500,00	-1.199.823,00	95,55	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		188.475.994,00	182.239.750,00	-6.236.244,00	96,69	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		188.475.994,00	182.239.750,00	-6.236.244,00	96,69	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		114.416.110,00	113.350.700,00	-1.065.410,00	99,07	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		114.416.110,00	113.350.700,00	-1.065.410,00	99,07	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		51.448.793,00	50.433.700,00	-1.015.093,00	98,03	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		51.448.793,00	50.433.700,00	-1.015.093,00	98,03	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		62.256.363,00	60.590.753,00	-1.665.610,00	97,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		62.256.363,00	60.590.753,00	-1.665.610,00	97,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		157.992.071,00	155.157.594,00	-2.834.477,00	98,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		157.992.071,00	155.157.594,00	-2.834.477,00	98,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.103.253.461,00	1.080.594.245,00	-22.659.216,00	97,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.103.253.461,00	1.080.594.245,00	-22.659.216,00	97,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	166.983.557,00	149.060.500,00	-17.923.057,00	89,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.983.557,00	149.060.500,00	-17.923.057,00	89,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	936.269.904,00	931.533.745,00	-4.736.159,00	99,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.269.904,00	431.533.745,00	-4.736.159,00	98,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
				Jumlah	8.164.763.902,00	7.767.576.642,00	-397.187.260,00	95,14	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000			BELANJA DAERAH	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	-431.325.780,00	94,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.488.389.269,00	2.311.280.971,00	-177.108.298,00	92,88	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.159.726.768,00	2.013.236.752,00	-146.490.016,00	93,22	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.115.389.348,00	1.970.748.552,00	-144.640.796,00	93,16	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.115.389.348,00	1.970.748.552,00	-144.640.796,00	93,16	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.700.000,00	25.650.000,00	-50.000,00	99,81	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.437.000,00	10.141.500,00	-295.500,00	97,17	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.887.000,00	1.591.500,00	-295.500,00	84,34	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.200.420,00	6.696.700,00	-1.503.720,00	81,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.420,00	6.696.700,00	-1.503.720,00	81,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.251.999,00	168.026.950,00	-225.049,00	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.251.999,00	168.026.950,00	-225.049,00	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.251.999,00	168.026.950,00	-225.049,00	99,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.160.502,00	81.767.269,00	-30.393.233,00	72,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.160.502,00	81.767.269,00	-30.393.233,00	72,90	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.160.502,00	81.767.269,00	-30.393.233,00	72,90	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.200.000,00	298.427.400,00	-2.772.600,00	99,08	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	301.200.000,00	298.427.400,00	-2.772.600,00	99,08	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000,00	89.000.000,00	-1.000.000,00	98,89	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.000.000,00	-1.000.000,00	98,89	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	60.000.000,00	58.227.400,00	-1.772.600,00	97,05	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.227.400,00	-1.772.600,00	97,05	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.841.626.193,00	2.593.715.911,00	-247.910.282,00	91,28	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.424.000.000,00	1.352.409.250,00	-71.590.750,00	94,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	76.005.000,00	-3.995.000,00	95,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	76.005.000,00	-3.995.000,00	95,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	819.000.000,00	788.484.250,00	-30.515.750,00	96,27	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.000.000,00	788.484.250,00	-30.515.750,00	96,27	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	225.000.000,00	224.580.000,00	-420.000,00	99,81	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	224.580.000,00	-420.000,00	99,81	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	82.555.000,00	82.080.000,00	-475.000,00	99,42	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.555.000,00	82.080.000,00	-475.000,00	99,42	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0013		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	17.445.000,00	8.120.000,00	-9.325.000,00	46,55	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.445.000,00	8.120.000,00	-9.325.000,00	46,55	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	173.140.000,00	-26.860.000,00	86,57	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	173.140.000,00	-26.860.000,00	86,57	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	606.000.000,00	579.960.000,00	-26.040.000,00	95,70	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	606.000.000,00	579.960.000,00	-26.040.000,00	95,70	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.000.000,00	579.960.000,00	-26.040.000,00	95,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	459.876.193,00	318.997.161,00	-140.879.032,00	69,37	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000,00	22.498.661,00	-1.339,00	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.498.661,00	-1.339,00	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0005		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	415.453.000,00	278.142.000,00	-137.311.000,00	66,95	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.453.000,00	278.142.000,00	-137.311.000,00	66,95	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0006		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.673.193,00	0,00	-1.673.193,00	-	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.673.193,00	0,00	-1.673.193,00	-	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.250.000,00	18.356.500,00	-1.893.500,00	90,65	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	18.356.500,00	-1.893.500,00	90,65	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	351.750.000,00	342.349.500,00	-9.400.500,00	97,33	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	10.750.000,00	6.965.000,00	-3.785.000,00	64,79	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	6.965.000,00	-3.785.000,00	64,79	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	341.000.000,00	335.384.500,00	-5.615.500,00	98,35	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.000.000,00	335.384.500,00	-5.615.500,00	98,35	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.572.600.000,00	1.569.065.400,00	-3.534.600,00	99,78	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.572.600.000,00	1.569.065.400,00	-3.534.600,00	99,78	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	296.465.400,00	-3.534.600,00	98,82	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	296.465.400,00	-3.534.600,00	98,82	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00	0,00	100,00	
				Jumlah	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	-431.325.780,00	94,01	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	124.320.000,00	138.626.000,00	14.306.000,00	111,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	-113.033.217,00	97,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.331.757.723,00	5.236.650.006,00	-95.107.717,00	98,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.153.561.195,00	3.098.322.272,00	-55.238.923,00	98,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.086.080.517,00	3.031.787.503,00	-54.293.014,00	98,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.086.080.517,00	3.031.787.503,00	-54.293.014,00	98,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.880.000,00	29.850.000,00	-30.000,00	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	29.880.000,00	29.850.000,00	-30.000,00	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.326.872,00	20.577.000,00	-749.872,00	96,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.366.872,00	10.617.000,00	-749.872,00	93,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.273.806,00	16.107.769,00	-166.037,00	98,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.273.806,00	16.107.769,00	-166.037,00	98,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.456.538,00	255.796.600,00	-6.659.938,00	97,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.707.800,00	16.030.000,00	-4.677.800,00	77,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.707.800,00	16.030.000,00	-4.677.800,00	77,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.748.738,00	239.766.600,00	-1.982.138,00	99,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.748.738,00	239.766.600,00	-1.982.138,00	99,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	987.184.200,00	972.963.250,00	-14.220.950,00	98,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.651.400,00	14.063.250,00	-4.588.150,00	75,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.651.400,00	14.063.250,00	-4.588.150,00	75,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	968.532.800,00	958.900.000,00	-9.632.800,00	99,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.532.800,00	958.900.000,00	-9.632.800,00	99,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.555.789,00	909.567.884,00	-18.987.905,00	97,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.247.911,00	69.236.700,00	-11.011.211,00	86,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.247.911,00	69.236.700,00	-11.011.211,00	86,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	848.307.878,00	840.331.184,00	-7.976.694,00	99,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.307.878,00	840.331.184,00	-7.976.694,00	99,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	68.212.000,00	50.286.500,00	-17.925.500,00	73,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68.212.000,00	50.286.500,00	-17.925.500,00	73,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68.212.000,00	50.286.500,00	-17.925.500,00	73,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.212.000,00	50.286.500,00	-17.925.500,00	73,72	
				Jumlah	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	-113.033.217,00	97,91	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.556.912.191,00	8.444.609.558,00	-112.302.633,00	98,69	
2.16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.455.204.330,00	8.344.130.158,00	-111.074.172,00	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.080.085.531,00	3.007.599.408,00	-72.486.123,00	97,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.217.052.806,00	2.195.008.314,00	-22.044.492,00	99,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.146.328.251,00	2.125.527.564,00	-20.800.687,00	99,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.146.328.251,00	2.125.527.564,00	-20.800.687,00	99,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.358.735,00	25.650.000,00	-708.735,00	97,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.735,00	0,00	-708.735,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.360.004,00	29.826.600,00	-533.404,00	98,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.810.004,00	21.276.600,00	-533.404,00	97,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.005.816,00	14.004.150,00	-1.666,00	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.005.816,00	14.004.150,00	-1.666,00	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.969.011,00	447.639.275,00	-2.329.736,00	99,48	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.778.581,00	11.220.000,00	-1.558.581,00	87,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.778.581,00	11.220.000,00	-1.558.581,00	87,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.190.430,00	436.419.275,00	-771.155,00	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.190.430,00	436.419.275,00	-771.155,00	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.100.903,00	273.069.005,00	-26.031.898,00	91,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.142.168,00	79.319.005,00	-18.823.163,00	80,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.142.168,00	79.319.005,00	-18.823.163,00	80,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.958.735,00	193.750.000,00	-7.208.735,00	96,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.958.735,00	193.750.000,00	-7.208.735,00	96,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.962.811,00	91.882.814,00	-22.079.997,00	80,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.962.811,00	81.882.814,00	-22.079.997,00	78,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.962.811,00	81.882.814,00	-22.079.997,00	78,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.120.738.696,00	3.105.220.750,00	-15.517.946,00	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.120.738.696,00	3.105.220.750,00	-15.517.946,00	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.000.999.318,00	2.987.591.250,00	-13.408.068,00	99,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.999.318,00	2.987.591.250,00	-13.408.068,00	99,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik	58.670.000,00	57.848.100,00	-821.900,00	98,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.670.000,00	57.848.100,00	-821.900,00	98,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007		Layanan Hubungan Media	61.069.378,00	59.781.400,00	-1.287.978,00	97,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.069.378,00	59.781.400,00	-1.287.978,00	97,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.254.380.103,00	2.231.310.000,00	-23.070.103,00	98,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.500.277.056,00	1.500.000.000,00	-277.056,00	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.500.277.056,00	1.500.000.000,00	-277.056,00	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.277.056,00	1.500.000.000,00	-277.056,00	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	754.103.047,00	731.310.000,00	-22.793.047,00	96,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0003		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4.482.735,00	0,00	-4.482.735,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.482.735,00	0,00	-4.482.735,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	218.411.577,00	209.310.000,00	-9.101.577,00	95,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.751.577,00	2.500.000,00	-2.251.577,00	52,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.660.000,00	206.810.000,00	-6.850.000,00	96,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	531.208.735,00	522.000.000,00	-9.208.735,00	98,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.208.735,00	522.000.000,00	-9.208.735,00	98,27	
2.20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.592.615,00	39.814.900,00	-777.715,00	98,08	
2.21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02.0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.115.246,00	60.664.500,00	-450.746,00	99,26	
				Jumlah	8.556.912.191,00	8.444.609.558,00	-112.302.633,00	98,69	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Koperasi dan UKM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000			BELANJA DAERAH	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	-73.909.788,00	97,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.335.964.309,00	2.272.287.097,00	-63.677.212,00	97,27	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.631.344,00	13.199.925,00	-431.419,00	96,84	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.631.344,00	13.199.925,00	-431.419,00	96,84	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.631.344,00	13.199.925,00	-431.419,00	96,84	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.003.106.359,00	1.947.076.848,00	-56.029.511,00	97,20	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.923.347.950,00	1.867.560.648,00	-55.787.302,00	97,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.923.347.950,00	1.867.560.648,00	-55.787.302,00	97,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.710.000,00	71.710.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.048.409,00	7.806.200,00	-242.209,00	96,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.478.409,00	1.236.200,00	-242.209,00	83,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	784.785,00	726.050,00	-58.735,00	92,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	784.785,00	726.050,00	-58.735,00	92,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.785,00	726.050,00	-58.735,00	92,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.133.526,00	218.069.174,00	-4.064.352,00	98,17	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.008.748,00	2.385.838,00	-622.910,00	79,30	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.008.748,00	2.385.838,00	-622.910,00	79,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.738.208,00	2.604.711,00	-133.497,00	95,12	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.738.208,00	2.604.711,00	-133.497,00	95,12	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.680.132,00	14.097.600,00	-582.532,00	96,03	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.680.132,00	14.097.600,00	-582.532,00	96,03	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.216.660,00	10.030.425,00	-2.186.235,00	82,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.216.660,00	10.030.425,00	-2.186.235,00	82,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.489.778,00	188.950.600,00	-539.178,00	99,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.489.778,00	188.950.600,00	-539.178,00	99,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	591.630,00	536.500,00	-55.130,00	90,68	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	591.630,00	536.500,00	-55.130,00	90,68	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.630,00	536.500,00	-55.130,00	90,68	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.629.657,00	6.584.500,00	-45.157,00	99,32	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.629.657,00	6.584.500,00	-45.157,00	99,32	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.629.657,00	6.584.500,00	-45.157,00	99,32	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.087.008,00	86.094.100,00	-2.992.908,00	96,64	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.685.542,00	81.085.400,00	-2.600.142,00	96,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.685.542,00	81.085.400,00	-2.600.142,00	96,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.401.466,00	5.008.700,00	-392.766,00	92,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.401.466,00	5.008.700,00	-392.766,00	92,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	15.278.969,00	13.748.850,00	-1.530.119,00	89,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.278.969,00	13.748.850,00	-1.530.119,00	89,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.278.969,00	13.748.850,00	-1.530.119,00	89,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.278.969,00	13.748.850,00	-1.530.119,00	89,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	9.783.822,00	8.924.300,00	-859.522,00	91,21	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.783.822,00	8.924.300,00	-859.522,00	91,21	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0001		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.783.822,00	8.924.300,00	-859.522,00	91,21	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.783.822,00	8.924.300,00	-859.522,00	91,21	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.567.414,00	9.612.600,00	-954.814,00	90,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.567.414,00	9.612.600,00	-954.814,00	90,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	10.567.414,00	9.612.600,00	-954.814,00	90,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.567.414,00	9.612.600,00	-954.814,00	90,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	606.001.421,00	599.113.300,00	-6.888.121,00	98,86	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	606.001.421,00	599.113.300,00	-6.888.121,00	98,86	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	508.636.421,00	502.243.300,00	-6.393.121,00	98,74	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.636.421,00	502.243.300,00	-6.393.121,00	98,74	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	97.365.000,00	96.870.000,00	-495.000,00	99,49	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.365.000,00	96.870.000,00	-495.000,00	99,49	
				Jumlah	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	-73.909.788,00	97,52	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	750.000.000,00	680.095.915,00	-69.904.085,00	90,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	-196.084.761,00	95,08	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.338.624.679,00	3.239.715.952,00	-98.908.727,00	97,04	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.800.541.722,00	2.741.429.444,00	-59.112.278,00	97,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.720.138.675,00	2.672.029.194,00	-48.109.481,00	98,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.138.675,00	2.672.029.194,00	-48.109.481,00	98,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.030.000,00	28.980.000,00	-50.000,00	99,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.978.145,00	9.660.000,00	-318.145,00	96,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.145,00	0,00	-318.145,00	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.394.902,00	30.760.250,00	-10.634.652,00	74,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.394.902,00	30.760.250,00	-10.634.652,00	74,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.430.473,00	20.420.220,00	-1.010.253,00	95,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.430.473,00	20.420.220,00	-1.010.253,00	95,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.430.473,00	20.420.220,00	-1.010.253,00	95,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.993.932,00	156.410.743,00	-2.583.189,00	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.956.954,00	0,00	-1.956.954,00	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.956.954,00	0,00	-1.956.954,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.036.978,00	156.410.743,00	-626.235,00	99,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.036.978,00	156.410.743,00	-626.235,00	99,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.006.145,00	181.801.305,00	-11.204.840,00	94,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.465.991,00	39.676.305,00	-10.789.686,00	78,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.465.991,00	39.676.305,00	-10.789.686,00	78,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.540.154,00	142.125.000,00	-415.154,00	99,71	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.540.154,00	142.125.000,00	-415.154,00	99,71	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.652.407,00	139.654.240,00	-24.998.167,00	84,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.315.980,00	132.211.340,00	-24.104.640,00	84,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.315.980,00	132.211.340,00	-24.104.640,00	84,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.368.631,00	5.819.900,00	-548.731,00	91,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.368.631,00	5.819.900,00	-548.731,00	91,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.967.796,00	1.623.000,00	-344.796,00	82,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.967.796,00	1.623.000,00	-344.796,00	82,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	21.731.931,00	21.215.700,00	-516.231,00	97,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.731.931,00	21.215.700,00	-516.231,00	97,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	21.731.931,00	21.215.700,00	-516.231,00	97,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.731.931,00	21.215.700,00	-516.231,00	97,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	83.761.290,00	83.041.879,00	-719.411,00	99,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83.761.290,00	83.041.879,00	-719.411,00	99,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	83.761.290,00	83.041.879,00	-719.411,00	99,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.761.290,00	83.041.879,00	-719.411,00	99,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	140.505.697,00	130.497.750,00	-10.007.947,00	92,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	140.505.697,00	130.497.750,00	-10.007.947,00	92,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	39.426.000,00	32.212.800,00	-7.213.200,00	81,70	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.426.000,00	32.212.800,00	-7.213.200,00	81,70	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	101.079.697,00	98.284.950,00	-2.794.747,00	97,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.079.697,00	98.284.950,00	-2.794.747,00	97,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	400.317.000,00	314.384.555,00	-85.932.445,00	78,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.317.000,00	314.384.555,00	-85.932.445,00	78,53	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60.047.000,00	1.200.000,00	-58.847.000,00	2,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.047.000,00	1.200.000,00	-58.847.000,00	2,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	220.175.000,00	217.786.625,00	-2.388.375,00	98,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.175.000,00	217.786.625,00	-2.388.375,00	98,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	120.095.000,00	95.397.930,00	-24.697.070,00	79,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.095.000,00	95.397.930,00	-24.697.070,00	79,44	
				Jumlah	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	-196.084.761,00	95,08	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Pemuda dan Olah Raga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.19			5	BELANJA DAERAH	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,00	96,97	
2.19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,00	96,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000			Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,00	96,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.308.187.553,00	2.240.321.719,00	-67.865.834,00	97,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.038.576,00	1.791.833.487,00	-41.205.089,00	97,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.746.069.187,00	1.706.989.487,00	-39.079.700,00	97,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.746.069.187,00	1.706.989.487,00	-39.079.700,00	97,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.900.000,00	53.850.000,00	-50.000,00	99,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	32.250.000,00	-50.000,00	99,85	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.836.167,00	10.559.350,00	-276.817,00	97,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.636.167,00	3.359.350,00	-276.817,00	92,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.233.221,00	20.434.650,00	-1.798.571,00	91,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.233.221,00	20.434.650,00	-1.798.571,00	91,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.509.298,00	299.310.900,00	-2.198.398,00	99,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.049.274,00	21.106.600,00	-942.674,00	95,72	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.049.274,00	21.106.600,00	-942.674,00	95,72	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.460.024,00	278.204.300,00	-1.255.724,00	99,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.460.024,00	278.204.300,00	-1.255.724,00	99,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.837.262,00	10.890.050,00	-2.947.212,00	78,70	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.769.392,00	4.613.050,00	-2.156.342,00	68,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.769.392,00	4.613.050,00	-2.156.342,00	68,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.067.870,00	6.277.000,00	-790.870,00	88,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.067.870,00	6.277.000,00	-790.870,00	88,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.802.417,00	138.287.282,00	-21.515.135,00	86,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.602.020,00	79.463.892,00	-20.138.128,00	79,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.602.020,00	79.463.892,00	-20.138.128,00	79,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.200.397,00	58.823.390,00	-1.377.007,00	97,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.200.397,00	58.823.390,00	-1.377.007,00	97,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	215.876.146,00	211.008.142,00	-4.868.004,00	97,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	215.876.146,00	211.008.142,00	-4.868.004,00	97,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	215.876.146,00	211.008.142,00	-4.868.004,00	97,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.876.146,00	211.008.142,00	-4.868.004,00	97,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	195.890.638,00	188.184.000,00	-7.706.638,00	96,07	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	121.761.011,00	118.030.000,00	-3.731.011,00	96,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	121.761.011,00	118.030.000,00	-3.731.011,00	96,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.761.011,00	118.030.000,00	-3.731.011,00	96,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.129.627,00	70.154.000,00	-3.975.627,00	94,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	74.129.627,00	70.154.000,00	-3.975.627,00	94,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.129.627,00	70.154.000,00	-3.975.627,00	94,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	191.963.300,00	-8.036.700,00	95,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	191.963.300,00	-8.036.700,00	95,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	200.000.000,00	191.963.300,00	-8.036.700,00	95,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.963.300,00	-8.036.700,00	91,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
				Jumlah	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	-88.477.176,00	96,97	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2			5	BELANJA DAERAH	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74	
2.23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.399.937.536,00	2.345.477.832,00	-54.459.704,00	97,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.850.986.729,00	1.809.543.619,00	-41.443.110,00	97,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.785.811.553,00	1.746.268.519,00	-39.543.034,00	97,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.785.811.553,00	1.746.268.519,00	-39.543.034,00	97,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.336.395,00	19.710.000,00	-1.626.395,00	92,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	21.214.800,00	19.710.000,00	-1.504.800,00	92,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.595,00	0,00	-121.595,00	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.635.490,00	6.570.000,00	-65.490,00	99,01	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.490,00	0,00	-65.490,00	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.203.291,00	36.995.100,00	-208.191,00	99,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.203.291,00	36.995.100,00	-208.191,00	99,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.450.403,00	215.097.370,00	-353.033,00	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.450.403,00	215.097.370,00	-353.033,00	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.450.403,00	215.097.370,00	-353.033,00	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.741.620,00	183.401.043,00	-9.340.577,00	95,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.858.420,00	23.651.043,00	-9.207.377,00	71,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.858.420,00	23.651.043,00	-9.207.377,00	71,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.883.200,00	159.750.000,00	-133.200,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.883.200,00	159.750.000,00	-133.200,00	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.758.784,00	137.435.800,00	-3.322.984,00	97,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.943.500,00	125.845.800,00	-3.097.700,00	97,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.943.500,00	125.845.800,00	-3.097.700,00	97,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.815.284,00	11.590.000,00	-225.284,00	98,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.815.284,00	11.590.000,00	-225.284,00	98,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.050.000,00	10.000.000,00	-50.000,00	99,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.050.000,00	10.000.000,00	-50.000,00	99,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	10.050.000,00	10.000.000,00	-50.000,00	99,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.000.000,00	-50.000,00	99,50	
				Jumlah	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	-54.509.704,00	97,74	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Pilihan
Organisasi : Dinas Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	40.010.000,00	10.000,00	100,03	
3	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,00	74,39	
3.25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,00	74,39	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000			Dinas Perikanan	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,00	74,39	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.404.218,00	3.002.020.527,00	-99.383.691,00	96,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.489.577.595,00	2.424.705.777,00	-64.871.818,00	97,39	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.418.618.585,00	2.355.274.627,00	-63.343.958,00	97,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.418.618.585,00	2.355.274.627,00	-63.343.958,00	97,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.010.000,00	30.960.000,00	-50.000,00	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	30.960.000,00	30.960.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.951.534,00	11.695.000,00	-256.534,00	97,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.631.534,00	1.375.000,00	-256.534,00	84,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.997.476,00	26.776.150,00	-1.221.326,00	95,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.997.476,00	26.776.150,00	-1.221.326,00	95,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.178.000,00	305.810.950,00	-367.050,00	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.400.000,00	1.360.000,00	-40.000,00	97,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.360.000,00	-40.000,00	97,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.778.000,00	304.450.950,00	-327.050,00	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.778.000,00	304.450.950,00	-327.050,00	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.130.284,00	163.832.100,00	-4.298.184,00	97,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.610.000,00	4.515.300,00	-4.094.700,00	52,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	4.515.300,00	-4.094.700,00	52,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.520.284,00	159.316.800,00	-203.484,00	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.520.284,00	159.316.800,00	-203.484,00	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.518.339,00	107.671.700,00	-29.846.639,00	78,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.518.339,00	107.671.700,00	-29.846.639,00	78,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.518.339,00	107.671.700,00	-29.846.639,00	78,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	868.050.000,00	6.600.000,00	-861.450.000,00	0,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	868.050.000,00	6.600.000,00	-861.450.000,00	0,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	868.050.000,00	6.600.000,00	-861.450.000,00	0,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.050.000,00	6.600.000,00	-861.450.000,00	0,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	325.237.500,00	185.359.245,00	-139.878.255,00	56,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	325.237.500,00	185.359.245,00	-139.878.255,00	56,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	143.050.000,00	3.300.000,00	-139.750.000,00	2,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.050.000,00	3.300.000,00	-139.750.000,00	2,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	182.187.500,00	182.059.245,00	-128.255,00	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.187.500,00	182.059.245,00	-128.255,00	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.701.181,00	3.427.500,00	-273.681,00	92,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.701.181,00	3.427.500,00	-273.681,00	92,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.701.181,00	3.427.500,00	-273.681,00	92,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.701.181,00	3.427.500,00	-273.681,00	92,61	
				Jumlah	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	-1.100.985.627,00	74,39	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1. Unsur Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2. Urusan Pemerintahan Pilihan
Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	193.832.501,00	43.832.501,00	129,22	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.756.944.162,00	2.658.846.096,00	-98.098.066,00	96,44	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79	
2.22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	198.153.018,00	187.828.732,00	-10.324.286,00	94,79	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	133.152.418,00	132.828.732,00	-323.686,00	99,76	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	133.152.418,00	132.828.732,00	-323.686,00	99,76	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.152.418,00	132.828.732,00	-323.686,00	99,76	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.000.600,00	55.000.000,00	-10.000.600,00	84,61	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	65.000.600,00	55.000.000,00	-10.000.600,00	84,61	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.600,00	55.000.000,00	-10.000.600,00	84,61	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.558.791.144,00	2.471.017.364,00	-87.773.780,00	96,57	
3.26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.558.791.144,00	2.471.017.364,00	-87.773.780,00	96,57	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.558.791.144,00	2.471.017.364,00	-87.773.780,00	96,57	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.471.398.890,00	2.384.457.250,00	-86.941.640,00	96,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.790.538.496,00	1.740.348.510,00	-50.189.986,00	97,20	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.702.908.769,00	1.656.634.773,00	-46.273.996,00	97,28	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.702.908.769,00	1.656.634.773,00	-46.273.996,00	97,28	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.338.358,00	15.834.300,00	-2.504.058,00	86,35	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.078.358,00	5.574.300,00	-2.504.058,00	69,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.511.369,00	37.099.437,00	-1.411.932,00	96,33	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.511.369,00	37.099.437,00	-1.411.932,00	96,33	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.429.648,00	413.617.800,00	-8.811.848,00	97,91	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.888.770,00	4.450.000,00	-3.438.770,00	56,41	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.888.770,00	4.450.000,00	-3.438.770,00	56,41	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.280.046,00	4.550.000,00	-2.730.046,00	62,50	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.280.046,00	4.550.000,00	-2.730.046,00	62,50	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.454.832,00	10.983.000,00	-2.471.832,00	81,63	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.454.832,00	10.983.000,00	-2.471.832,00	81,63	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.806.000,00	393.634.800,00	-171.200,00	99,96	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.806.000,00	393.634.800,00	-171.200,00	99,96	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.667.500,00	133.677.250,00	-990.250,00	99,26	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.417.500,00	17.427.250,00	-990.250,00	94,62	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.417.500,00	17.427.250,00	-990.250,00	94,62	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.250.000,00	116.250.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.250.000,00	116.250.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.763.246,00	96.813.690,00	-26.949.556,00	78,22	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.399.460,00	71.319.640,00	-23.079.820,00	75,55	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.399.460,00	71.319.640,00	-23.079.820,00	75,55	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.635.000,00	-365.000,00	96,35	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.635.000,00	-365.000,00	96,35	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.363.786,00	15.859.050,00	-3.504.736,00	81,90	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.363.786,00	15.859.050,00	-3.504.736,00	81,90	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	87.392.254,00	86.560.114,00	-832.140,00	99,05	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12.015.900,00	12.000.000,00	-15.900,00	99,87	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12.015.900,00	12.000.000,00	-15.900,00	99,87	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.015.900,00	12.000.000,00	-15.900,00	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.376.354,00	74.560.114,00	-816.240,00	98,92	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.376.354,00	74.560.114,00	-816.240,00	98,92	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.376.354,00	74.560.114,00	-816.240,00	98,92	
				Jumlah	2.756.944.162,00	2.658.846.096,00	-98.098.066,00	96,44	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Pilihan
Organisasi : Dinas Pertanian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3			5	BELANJA DAERAH	24.239.472.412,00	21.056.053.063,00	-3.183.419.349,00	86,87	
3.27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	24.239.472.412,00	21.056.053.063,00	-3.183.419.349,00	86,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000			Dinas Pertanian	24.239.472.412,00	21.056.053.063,00	-3.183.419.349,00	86,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.711.931.793,00	13.119.124.975,00	-592.806.818,00	95,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.815.129.526,00	11.360.628.055,00	-454.501.471,00	96,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.675.903.118,00	11.237.790.755,00	-438.112.363,00	96,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.675.903.118,00	11.237.790.755,00	-438.112.363,00	96,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.610.000,00	43.560.000,00	-50.000,00	99,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.877.325,00	15.020.000,00	-10.857.325,00	58,04	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.357.325,00	500.000,00	-10.857.325,00	4,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.739.083,00	64.257.300,00	-5.481.783,00	92,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.739.083,00	64.257.300,00	-5.481.783,00	92,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.189.379,00	432.937.198,00	-56.252.181,00	88,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.088.502,00	0,00	-5.088.502,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.088.502,00	0,00	-5.088.502,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.534.477,00	708.000,00	-826.477,00	46,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.534.477,00	708.000,00	-826.477,00	46,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.280.293,00	7.657.750,00	-14.622.543,00	34,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.280.293,00	7.657.750,00	-14.622.543,00	34,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.286.107,00	424.571.448,00	-35.714.659,00	92,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.286.107,00	424.571.448,00	-35.714.659,00	92,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.523.200,00	465.412.150,00	-17.111.050,00	96,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.373.660,00	66.825.000,00	-10.548.660,00	86,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.373.660,00	66.825.000,00	-10.548.660,00	86,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.798.660,00	267.258.400,00	-1.540.260,00	99,43	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	268.798.660,00	267.258.400,00	-1.540.260,00	99,43	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.350.880,00	131.328.750,00	-5.022.130,00	96,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.046.400,00	58.900.000,00	-3.146.400,00	94,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.304.480,00	72.428.750,00	-1.875.730,00	97,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.086.954,00	620.168.667,00	-11.918.287,00	98,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.608.477,00	34.918.667,00	-689.810,00	98,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.608.477,00	34.918.667,00	-689.810,00	98,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.478.477,00	585.250.000,00	-11.228.477,00	98,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.478.477,00	585.250.000,00	-11.228.477,00	98,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.002.734,00	239.978.905,00	-53.023.829,00	81,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.002.816,00	63.898.490,00	-11.104.326,00	85,19	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.002.816,00	63.898.490,00	-11.104.326,00	85,19	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.932.361,00	135.784.615,00	-9.147.746,00	93,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.932.361,00	135.784.615,00	-9.147.746,00	93,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.178.477,00	23.890.000,00	-32.288.477,00	42,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.178.477,00	23.890.000,00	-32.288.477,00	42,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.889.080,00	16.405.800,00	-483.280,00	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.889.080,00	16.405.800,00	-483.280,00	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.088.845.474,00	1.919.432.783,00	-169.412.691,00	91,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.037.490.873,00	942.600.752,00	-94.890.121,00	90,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.037.490.873,00	942.600.752,00	-94.890.121,00	90,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.490.873,00	942.600.752,00	-94.890.121,00	90,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.016.563.825,00	950.532.031,00	-66.031.794,00	93,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	808.530.000,00	791.832.131,00	-16.697.869,00	97,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.530.000,00	791.832.131,00	-16.697.869,00	97,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0004		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	92.393.825,00	57.385.000,00	-35.008.825,00	62,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.393.825,00	57.385.000,00	-35.008.825,00	62,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0005		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	115.640.000,00	101.314.900,00	-14.325.100,00	87,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.640.000,00	101.314.900,00	-14.325.100,00	87,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.790.776,00	26.300.000,00	-8.490.776,00	75,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0006		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	34.790.776,00	26.300.000,00	-8.490.776,00	75,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.790.776,00	26.300.000,00	-8.490.776,00	75,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.443.910.336,00	3.233.195.046,00	-1.210.715.290,00	72,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	91.108.000,00	76.430.300,00	-14.677.700,00	83,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	91.108.000,00	76.430.300,00	-14.677.700,00	83,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.108.000,00	76.430.300,00	-14.677.700,00	83,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	4.352.802.336,00	3.156.764.746,00	-1.196.037.590,00	72,52	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.247.853.528,00	2.579.420.252,00	-668.433.276,00	79,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.247.853.528,00	2.579.420.252,00	-668.433.276,00	79,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.104.948.808,00	577.344.494,00	-527.604.314,00	52,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.104.948.808,00	577.344.494,00	-527.604.314,00	52,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	41.788.000,00	30.154.400,00	-11.633.600,00	72,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	41.788.000,00	30.154.400,00	-11.633.600,00	72,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.788.000,00	30.154.400,00	-11.633.600,00	72,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.788.000,00	30.154.400,00	-11.633.600,00	72,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.951.793.849,00	1.913.516.085,00	-1.038.277.764,00	64,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2.951.793.849,00	1.913.516.085,00	-1.038.277.764,00	64,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	248.038.099,00	61.203.585,00	-186.834.514,00	24,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.038.099,00	61.203.585,00	-186.834.514,00	24,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0006		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2.703.755.750,00	1.852.312.500,00	-851.443.250,00	68,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.703.755.750,00	1.852.312.500,00	-851.443.250,00	68,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.001.202.960,00	840.629.774,00	-160.573.186,00	83,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.001.202.960,00	840.629.774,00	-160.573.186,00	83,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	836.506.103,00	682.416.774,00	-154.089.329,00	81,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.506.103,00	682.416.774,00	-154.089.329,00	81,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	164.696.857,00	158.213.000,00	-6.483.857,00	96,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.696.857,00	158.213.000,00	-6.483.857,00	96,06	
				Jumlah	24.239.472.412,00	21.056.053.063,00	-3.183.419.349,00	86,87	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Pilihan
Organisasi : Dinas Perkebunan

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
							ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1					2		3	4	5	6	7
3			5		BELANJA DAERAH		6.524.332.466,00	6.029.824.247,00	-494.508.219,00	92,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.516.821.948,00	2.407.745.033,00	-109.076.915,00	95,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.929.013.414,00	1.884.640.062,00	-44.373.352,00	97,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.659.956.103,00	1.625.325.162,00	-34.630.941,00	97,91	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai		1.659.956.103,00	1.625.325.162,00	-34.630.941,00	97,91	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		201.400.000,00	199.400.000,00	-2.000.000,00	99,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.01		Belanja Pegawai		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		178.000.000,00	176.000.000,00	-2.000.000,00	98,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.632.000,00	10.300.000,00	-332.000,00	96,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.01		Belanja Pegawai		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		2.832.000,00	2.500.000,00	-332.000,00	88,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		57.025.311,00	49.614.900,00	-7.410.411,00	87,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		57.025.311,00	49.614.900,00	-7.410.411,00	87,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		189.699,00	151.250,00	-38.449,00	79,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		189.699,00	151.250,00	-38.449,00	79,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		189.699,00	151.250,00	-38.449,00	79,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		397.002.119,00	384.025.670,00	-12.976.449,00	96,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.974.996,00	9.127.100,00	-1.847.896,00	83,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		10.974.996,00	9.127.100,00	-1.847.896,00	83,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu		14.011.320,00	4.250.000,00	-9.761.320,00	30,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		14.011.320,00	4.250.000,00	-9.761.320,00	30,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		372.015.803,00	370.648.570,00	-1.367.233,00	99,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.015.803,00	370.648.570,00	-1.367.233,00	99,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.905.727,00	12.664.000,00	-241.727,00	98,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.905.727,00	12.664.000,00	-241.727,00	98,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.905.727,00	12.664.000,00	-241.727,00	98,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.710.989,00	126.264.051,00	-51.446.938,00	71,05	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.495.107,00	114.727.051,00	-49.768.056,00	69,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.495.107,00	114.727.051,00	-49.768.056,00	69,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.215.882,00	11.537.000,00	-1.678.882,00	87,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.215.882,00	11.537.000,00	-1.678.882,00	87,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.088.768.300,00	1.051.433.900,00	-37.334.400,00	96,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	232.477.800,00	223.505.800,00	-8.972.000,00	96,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	232.477.800,00	223.505.800,00	-8.972.000,00	96,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.477.800,00	223.505.800,00	-8.972.000,00	96,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	856.290.500,00	827.928.100,00	-28.362.400,00	96,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	856.290.500,00	827.928.100,00	-28.362.400,00	96,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.290.500,00	827.928.100,00	-28.362.400,00	96,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00	-137.527.680,00	91,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00	-137.527.680,00	91,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00	-137.527.680,00	91,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00	-137.527.680,00	91,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	223.665.916,00	189.592.000,00	-34.073.916,00	84,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	223.665.916,00	189.592.000,00	-34.073.916,00	84,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.05.2.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	223.665.916,00	189.592.000,00	-34.073.916,00	84,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.665.916,00	189.592.000,00	-34.073.916,00	84,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.096.283.208,00	919.787.900,00	-176.495.308,00	83,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.096.283.208,00	919.787.900,00	-176.495.308,00	83,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.096.283.208,00	919.787.900,00	-176.495.308,00	83,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.096.283.208,00	919.787.900,00	-176.495.308,00	83,90	
				Jumlah	6.524.332.466,00	6.029.824.247,00	-494.508.219,00	92,42	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Pilihan
Organisasi : Dinas Perdagangan dan ESDM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	133.000.000,00	159.650.500,00	26.650.500,00	120,04	
3	3.29.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.221.186.177,00	4.168.191.713,00	-52.994.464,00	98,74	
3.29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000			Dinas Perdagangan dan ESDM	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.117.610,00	33.392.600,00	-1.725.010,00	95,09	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01.0001		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.487.265,00	17.591.350,00	-895.915,00	95,15	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.487.265,00	17.591.350,00	-895.915,00	95,15	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.630.345,00	15.801.250,00	-829.095,00	95,01	
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.630.345,00	15.801.250,00	-829.095,00	95,01	
3.30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	-49.034.142,00	98,72	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000			Dinas Perdagangan dan ESDM	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	-49.034.142,00	98,72	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.381.995.782,00	3.344.192.587,00	-37.803.195,00	98,88	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.019.556,00	2.540.659.446,00	-28.360.110,00	98,90	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.487.729.504,00	2.460.199.846,00	-27.529.658,00	98,89	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.487.729.504,00	2.460.199.846,00	-27.529.658,00	98,89	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.640.000,00	45.630.000,00	-10.000,00	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	45.630.000,00	45.630.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.677.319,00	17.300.000,00	-377.319,00	97,87	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.467.319,00	2.090.000,00	-377.319,00	84,71	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.972.733,00	17.529.600,00	-443.133,00	97,53	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.972.733,00	17.529.600,00	-443.133,00	97,53	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.559.888,00	241.443.649,00	-1.116.239,00	99,54	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.552.663,00	6.187.500,00	-365.163,00	94,43	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.552.663,00	6.187.500,00	-365.163,00	94,43	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.837.418,00	17.375.850,00	-461.568,00	97,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.837.418,00	17.375.850,00	-461.568,00	97,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.169.807,00	217.880.299,00	-289.508,00	99,87	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.169.807,00	217.880.299,00	-289.508,00	99,87	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.145.366,00	463.899.192,00	-7.246.174,00	98,46	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.546.680,00	21.455.576,00	-3.091.104,00	87,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.546.680,00	21.455.576,00	-3.091.104,00	87,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	446.598.686,00	442.443.616,00	-4.155.070,00	99,07	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.598.686,00	442.443.616,00	-4.155.070,00	99,07	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.270.972,00	98.190.300,00	-1.080.672,00	98,91	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.270.972,00	98.190.300,00	-1.080.672,00	98,91	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.270.972,00	98.190.300,00	-1.080.672,00	98,91	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.063.937,00	33.520.200,00	-1.543.737,00	95,60	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	15.791.919,00	15.009.200,00	-782.719,00	95,04	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.791.919,00	15.009.200,00	-782.719,00	95,04	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.791.919,00	15.009.200,00	-782.719,00	95,04	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.785.927,00	7.625.000,00	-160.927,00	97,93	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.02.0001		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.785.927,00	7.625.000,00	-160.927,00	97,93	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.785.927,00	7.625.000,00	-160.927,00	97,93	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	2.707.269,00	2.510.000,00	-197.269,00	92,71	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.03.0001		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	2.707.269,00	2.510.000,00	-197.269,00	92,71	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.707.269,00	2.510.000,00	-197.269,00	92,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8.778.822,00	8.376.000,00	-402.822,00	95,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0001		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8.778.822,00	8.376.000,00	-402.822,00	95,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.778.822,00	8.376.000,00	-402.822,00	95,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	8.551.000,00	8.465.800,00	-85.200,00	99,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	8.551.000,00	8.465.800,00	-85.200,00	99,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.551.000,00	8.465.800,00	-85.200,00	99,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.551.000,00	8.465.800,00	-85.200,00	99,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	77.209.347,00	76.857.700,00	-351.647,00	99,54	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.834.010,00	2.783.300,00	-50.710,00	98,21	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2.834.010,00	2.783.300,00	-50.710,00	98,21	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.834.010,00	2.783.300,00	-50.710,00	98,21	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	65.358.957,00	65.226.400,00	-132.557,00	99,80	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	65.358.957,00	65.226.400,00	-132.557,00	99,80	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.358.957,00	65.226.400,00	-132.557,00	99,80	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.016.380,00	8.848.000,00	-168.380,00	98,13	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0003		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.016.380,00	8.848.000,00	-168.380,00	98,13	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.016.380,00	8.848.000,00	-168.380,00	98,13	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	200.731.788,00	193.869.788,00	-6.862.000,00	96,58	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.731.788,00	193.869.788,00	-6.862.000,00	96,58	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0002		Pameran Dagang Nasional	116.525.285,00	115.770.000,00	-755.285,00	99,35	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.525.285,00	115.770.000,00	-755.285,00	99,35	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0003		Pameran Dagang Lokal	79.228.503,00	73.213.688,00	-6.014.815,00	92,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.228.503,00	73.213.688,00	-6.014.815,00	92,41	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0004		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2.414.000,00	2.322.100,00	-91.900,00	96,19	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.414.000,00	2.322.100,00	-91.900,00	96,19	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0005		Peningkatan Citra Produk Ekspor	2.564.000,00	2.564.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.564.000,00	2.564.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	127.423.826,00	125.251.417,00	-2.172.409,00	98,30	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127.423.826,00	125.251.417,00	-2.172.409,00	98,30	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59.451.068,00	57.580.167,00	-1.870.901,00	96,85	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.451.068,00	57.580.167,00	-1.870.901,00	96,85	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	67.972.758,00	67.671.250,00	-301.508,00	99,56	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.972.758,00	67.671.250,00	-301.508,00	99,56	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	7.151.954,00	6.936.000,00	-215.954,00	96,98	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7.151.954,00	6.936.000,00	-215.954,00	96,98	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7.151.954,00	6.936.000,00	-215.954,00	96,98	
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.151.954,00	6.936.000,00	-215.954,00	96,98	
3.31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	347.940.933,00	345.705.621,00	-2.235.312,00	99,36	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000			Dinas Perdagangan dan ESDM	347.940.933,00	345.705.621,00	-2.235.312,00	99,36	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	308.410.439,00	307.918.082,00	-492.357,00	99,84	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	308.410.439,00	307.918.082,00	-492.357,00	99,84	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	32.865.480,00	32.827.179,00	-38.301,00	99,88	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.865.480,00	32.827.179,00	-38.301,00	99,88	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	275.544.959,00	275.090.903,00	-454.056,00	99,84	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.544.959,00	275.090.903,00	-454.056,00	99,84	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	39.530.494,00	37.787.539,00	-1.742.955,00	95,59	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	39.530.494,00	37.787.539,00	-1.742.955,00	95,59	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	39.530.494,00	37.787.539,00	-1.742.955,00	95,59	
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.530.494,00	37.787.539,00	-1.742.955,00	95,59	
				Jumlah	4.221.186.177,00	4.168.191.713,00	-52.994.464,00	98,74	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4			5	BELANJA DAERAH	40.511.586.579,00	38.614.574.065,00	-1.897.012.514,00	95,32	
4.01				SEKRETARIAT DAERAH	40.511.586.579,00	38.614.574.065,00	-1.897.012.514,00	95,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000			Sekretariat Daerah	14.487.814.207,00	13.940.614.926,00	-547.199.281,00	96,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.487.814.207,00	13.940.614.926,00	-547.199.281,00	96,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.325.907.145,00	13.940.614.926,00	-385.292.219,00	97,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.325.907.145,00	13.940.614.926,00	-385.292.219,00	97,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.325.907.145,00	13.940.614.926,00	-385.292.219,00	97,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	161.907.062,00	0,00	-161.907.062,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	161.907.062,00	0,00	-161.907.062,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	161.907.062,00	0,00	-161.907.062,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001			Bagian Tata Pemerintahan	750.637.091,00	747.061.100,00	-3.575.991,00	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	750.637.091,00	747.061.100,00	-3.575.991,00	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	704.456.611,00	702.004.000,00	-2.452.611,00	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	23.052.667,00	22.736.050,00	-316.617,00	98,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.052.667,00	22.736.050,00	-316.617,00	98,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	331.015.409,00	330.322.159,00	-693.250,00	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.015.409,00	330.322.159,00	-693.250,00	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	350.388.535,00	348.945.791,00	-1.442.744,00	99,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.388.535,00	348.945.791,00	-1.442.744,00	99,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	46.180.480,00	45.057.100,00	-1.123.380,00	97,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	21.823.658,00	21.301.900,00	-521.758,00	97,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.823.658,00	21.301.900,00	-521.758,00	97,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	24.356.822,00	23.755.200,00	-601.622,00	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.356.822,00	23.755.200,00	-601.622,00	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002			Bagian Hukum	1.011.385.157,00	999.580.815,00	-11.804.342,00	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.011.385.157,00	999.580.815,00	-11.804.342,00	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.011.385.157,00	999.580.815,00	-11.804.342,00	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	406.472.360,00	400.822.600,00	-5.649.760,00	98,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.472.360,00	400.822.600,00	-5.649.760,00	98,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	429.366.687,00	424.338.791,00	-5.027.896,00	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.366.687,00	424.338.791,00	-5.027.896,00	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	175.546.110,00	174.419.424,00	-1.126.686,00	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.546.110,00	174.419.424,00	-1.126.686,00	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003			Bagian Pembangunan	232.305.060,00	231.882.600,00	-422.460,00	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	232.305.060,00	231.882.600,00	-422.460,00	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	232.305.060,00	231.882.600,00	-422.460,00	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	57.837.029,00	57.749.200,00	-87.829,00	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.837.029,00	57.749.200,00	-87.829,00	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	122.090.071,00	121.941.400,00	-148.671,00	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.090.071,00	121.941.400,00	-148.671,00	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.377.960,00	52.192.000,00	-185.960,00	99,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.377.960,00	52.192.000,00	-185.960,00	99,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	376.759.509,00	371.302.456,00	-5.457.053,00	98,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	376.759.509,00	371.302.456,00	-5.457.053,00	98,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	376.759.509,00	371.302.456,00	-5.457.053,00	98,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	233.849.981,00	231.117.756,00	-2.732.225,00	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.849.981,00	231.117.756,00	-2.732.225,00	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	123.815.708,00	122.032.900,00	-1.782.808,00	98,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.815.708,00	122.032.900,00	-1.782.808,00	98,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	19.093.820,00	18.151.800,00	-942.020,00	95,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.093.820,00	18.151.800,00	-942.020,00	95,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005			Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.415.725.455,00	4.194.437.379,00	-221.288.076,00	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.415.725.455,00	4.194.437.379,00	-221.288.076,00	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.415.725.455,00	4.194.437.379,00	-221.288.076,00	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	715.068.328,00	642.018.450,00	-73.049.878,00	89,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.068.328,00	642.018.450,00	-73.049.878,00	89,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.957.725.280,00	2.855.647.910,00	-102.077.370,00	96,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.725.280,00	470.647.910,00	-22.077.370,00	95,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.465.000.000,00	2.385.000.000,00	-80.000.000,00	96,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	742.931.847,00	696.771.019,00	-46.160.828,00	93,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.931.847,00	696.771.019,00	-46.160.828,00	93,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006			Bagian Organisasi	286.523.166,00	280.292.275,00	-6.230.891,00	97,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	286.523.166,00	280.292.275,00	-6.230.891,00	97,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	286.523.166,00	280.292.275,00	-6.230.891,00	97,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	83.366.616,00	81.580.102,00	-1.786.514,00	97,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.366.616,00	81.580.102,00	-1.786.514,00	97,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	53.803.195,00	51.792.000,00	-2.011.195,00	96,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.803.195,00	51.792.000,00	-2.011.195,00	96,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	60.967.030,00	60.650.619,00	-316.411,00	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.967.030,00	60.650.619,00	-316.411,00	99,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0004		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.457.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.457.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	86.929.325,00	86.269.554,00	-659.771,00	99,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.929.325,00	86.269.554,00	-659.771,00	99,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007			Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.006.942.633,00	944.640.439,00	-62.302.194,00	93,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.006.942.633,00	944.640.439,00	-62.302.194,00	93,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.497.969,00	64.512.150,00	-8.985.819,00	87,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.733.381,00	19.165.100,00	-1.568.281,00	92,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.733.381,00	19.165.100,00	-1.568.281,00	92,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.830.194,00	18.699.200,00	-5.130.994,00	78,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.830.194,00	18.699.200,00	-5.130.994,00	78,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.538.020,00	20.149.150,00	-1.388.870,00	93,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.538.020,00	20.149.150,00	-1.388.870,00	93,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.106.889,00	3.478.200,00	-628.689,00	84,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.106.889,00	3.478.200,00	-628.689,00	84,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.289.485,00	3.020.500,00	-268.985,00	91,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.289.485,00	3.020.500,00	-268.985,00	91,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	351.606.280,00	319.866.566,00	-31.739.714,00	90,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.818.251,00	118.594.500,00	-8.223.751,00	93,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	126.070.000,00	117.907.500,00	-8.162.500,00	93,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.251,00	687.000,00	-61.251,00	91,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.537.647,00	153.288.866,00	-7.248.781,00	95,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	39.810.000,00	39.390.000,00	-420.000,00	98,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.727.647,00	113.898.866,00	-6.828.781,00	94,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.228.060,00	40.456.100,00	-5.771.960,00	87,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.228.060,00	40.456.100,00	-5.771.960,00	87,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.022.322,00	7.527.100,00	-10.495.222,00	41,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.022.322,00	7.527.100,00	-10.495.222,00	41,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	581.838.384,00	560.261.723,00	-21.576.661,00	96,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.256.431,00	3.037.900,00	-218.531,00	93,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.256.431,00	3.037.900,00	-218.531,00	93,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	382.043.650,00	362.979.292,00	-19.064.358,00	95,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.043.650,00	362.979.292,00	-19.064.358,00	95,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	71.789.953,00	71.478.431,00	-311.522,00	99,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.789.953,00	71.478.431,00	-311.522,00	99,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.248.482,00	79.510.700,00	-737.782,00	99,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.248.482,00	79.510.700,00	-737.782,00	99,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.732.748,00	41.572.100,00	-1.160.648,00	97,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.732.748,00	41.572.100,00	-1.160.648,00	97,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.767.120,00	1.683.300,00	-83.820,00	95,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.767.120,00	1.683.300,00	-83.820,00	95,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008			Bagian Umum	14.767.556.669,00	13.787.835.124,00	-979.721.545,00	93,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.767.556.669,00	13.787.835.124,00	-979.721.545,00	93,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.999.000,00	126.430.000,00	-13.569.000,00	90,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	117.049.500,00	104.160.000,00	-12.889.500,00	88,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.049.500,00	104.160.000,00	-12.889.500,00	88,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.949.500,00	22.270.000,00	-679.500,00	97,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.949.500,00	22.270.000,00	-679.500,00	97,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.439.871.688,00	2.033.792.455,00	-406.079.233,00	83,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156.836.347,00	156.702.500,00	-133.847,00	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.836.347,00	156.702.500,00	-133.847,00	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.669.741,00	232.913.050,00	-22.756.691,00	91,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.669.741,00	232.913.050,00	-22.756.691,00	91,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.666.000,00	5.750.000,00	-916.000,00	86,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.666.000,00	5.750.000,00	-916.000,00	86,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.146.469.600,00	775.170.763,00	-371.298.837,00	67,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.469.600,00	775.170.763,00	-371.298.837,00	67,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	874.230.000,00	863.256.142,00	-10.973.858,00	98,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.230.000,00	863.256.142,00	-10.973.858,00	98,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.981.282,00	577.165.000,00	-15.816.282,00	97,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	306.604.200,00	304.755.000,00	-1.849.200,00	99,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.155.000,00	66.980.000,00	-175.000,00	99,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.449.200,00	237.775.000,00	-1.674.200,00	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.377.082,00	272.410.000,00	-13.967.082,00	95,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.377.082,00	272.410.000,00	-13.967.082,00	95,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.550.610.000,00	7.277.027.950,00	-273.582.050,00	96,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	10.000.000,00	-1.000.000,00	90,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.000.000,00	-1.000.000,00	90,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	702.960.000,00	592.497.950,00	-110.462.050,00	84,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.960.000,00	592.497.950,00	-110.462.050,00	84,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.400.000,00	124.030.000,00	-33.370.000,00	78,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.400.000,00	124.030.000,00	-33.370.000,00	78,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.679.250.000,00	6.550.500.000,00	-128.750.000,00	98,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.679.250.000,00	6.550.500.000,00	-128.750.000,00	98,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.398.460.339,00	2.214.439.331,00	-184.021.008,00	92,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	751.362.500,00	638.462.122,00	-112.900.378,00	84,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.362.500,00	638.462.122,00	-112.900.378,00	84,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	987.042.949,00	955.066.052,00	-31.976.897,00	96,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.042.949,00	955.066.052,00	-31.976.897,00	96,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.074.240,00	98.074.500,00	-10.999.740,00	89,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.074.240,00	98.074.500,00	-10.999.740,00	89,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.980.650,00	522.836.657,00	-28.143.993,00	94,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.980.650,00	522.836.657,00	-13.143.993,00	97,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	413.493.500,00	386.431.400,00	-27.062.100,00	93,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	145.909.500,00	143.630.000,00	-2.279.500,00	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.909.500,00	143.630.000,00	-2.279.500,00	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27.584.000,00	2.801.400,00	-24.782.600,00	10,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.584.000,00	2.801.400,00	-24.782.600,00	10,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.232.140.860,00	1.172.548.988,00	-59.591.872,00	95,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.232.140.860,00	1.172.548.988,00	-59.591.872,00	95,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.231.030.860,00	1.172.548.988,00	-58.481.872,00	95,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.832.095.271,00	2.774.184.901,00	-57.910.370,00	97,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.832.095.271,00	2.774.184.901,00	-57.910.370,00	97,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.832.095.271,00	2.774.184.901,00	-57.910.370,00	97,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	532.296.742,00	516.220.365,00	-16.076.377,00	96,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.296.742,00	516.220.365,00	-16.076.377,00	96,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.104.745.255,00	2.102.072.536,00	-2.672.719,00	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.104.745.255,00	2.102.072.536,00	-2.672.719,00	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	195.053.274,00	155.892.000,00	-39.161.274,00	79,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.053.274,00	155.892.000,00	-39.161.274,00	79,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010			Bagian Perekonomian	343.842.361,00	342.742.050,00	-1.100.311,00	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	343.842.361,00	342.742.050,00	-1.100.311,00	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	286.343.128,00	285.639.450,00	-703.678,00	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	32.725.339,00	32.663.710,00	-61.629,00	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.725.339,00	32.663.710,00	-61.629,00	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	54.735.740,00	54.309.500,00	-426.240,00	99,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.735.740,00	54.309.500,00	-426.240,00	99,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	62.230.000,00	62.230.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.230.000,00	62.230.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	136.652.049,00	136.436.240,00	-215.809,00	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.652.049,00	136.436.240,00	-215.809,00	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	57.499.233,00	57.102.600,00	-396.633,00	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	17.176.192,00	17.170.200,00	-5.992,00	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.176.192,00	17.170.200,00	-5.992,00	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	28.833.984,00	28.816.000,00	-17.984,00	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.833.984,00	28.816.000,00	-17.984,00	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	11.489.057,00	11.116.400,00	-372.657,00	96,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.489.057,00	11.116.400,00	-372.657,00	96,76	
				Jumlah	40.511.586.579,00	38.614.574.065,00	-1.897.012.514,00	95,32	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4			5	BELANJA DAERAH	39.263.207.742,00	35.230.469.301,00	-4.032.738.441,00	89,73	
4.02				SEKRETARIAT DPRD	39.263.207.742,00	35.230.469.301,00	-4.032.738.441,00	89,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000			Sekretariat DPRD	39.263.207.742,00	35.230.469.301,00	-4.032.738.441,00	89,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.580.841.118,00	20.636.877.626,00	-1.943.963.492,00	91,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.258.379.667,00	3.992.058.575,00	-266.321.092,00	93,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.043.481.769,00	2.910.803.557,00	-132.678.212,00	95,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.043.481.769,00	2.910.803.557,00	-132.678.212,00	95,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	943.560.000,00	840.560.000,00	-103.000.000,00	89,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	797.000.000,00	-103.000.000,00	88,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.244.466,00	14.520.000,00	-4.724.466,00	75,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.724.466,00	0,00	-4.724.466,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	252.093.432,00	226.175.018,00	-25.918.414,00	89,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.093.432,00	226.175.018,00	-25.918.414,00	89,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	487.222.534,00	395.488.520,00	-91.734.014,00	81,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	487.222.534,00	395.488.520,00	-91.734.014,00	81,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.222.534,00	395.488.520,00	-91.734.014,00	81,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	851.569.381,00	687.180.775,00	-164.388.606,00	80,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	215.785.110,00	193.026.785,00	-22.758.325,00	89,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.785.110,00	193.026.785,00	-22.758.325,00	89,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.784.271,00	494.153.990,00	-141.630.281,00	77,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.784.271,00	494.153.990,00	-141.630.281,00	77,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.084.470.301,00	959.649.160,00	-124.821.141,00	88,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	80.086.500,00	79.550.000,00	-536.500,00	99,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.086.500,00	79.550.000,00	-536.500,00	99,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	690.223.801,00	680.597.090,00	-9.626.711,00	98,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	616.297.801,00	606.697.090,00	-9.600.711,00	98,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.926.000,00	73.900.000,00	-26.000,00	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	314.160.000,00	199.502.070,00	-114.657.930,00	63,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	314.160.000,00	199.502.070,00	-114.657.930,00	63,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.742.828,00	142.606.629,00	-35.136.199,00	80,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	6.600.000,00	-1.400.000,00	82,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.600.000,00	-1.400.000,00	82,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.742.828,00	136.006.629,00	-33.736.199,00	80,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.742.828,00	136.006.629,00	-33.736.199,00	80,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.236.561.874,00	1.057.944.563,00	-178.617.311,00	85,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	797.936.299,00	669.887.463,00	-128.048.836,00	83,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.936.299,00	669.887.463,00	-128.048.836,00	83,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.855.000,00	32.892.000,00	-963.000,00	97,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.855.000,00	32.892.000,00	-963.000,00	97,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	404.770.575,00	355.165.100,00	-49.605.475,00	87,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.770.575,00	355.165.100,00	-49.605.475,00	87,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.013.594.532,00	12.232.406.904,00	-781.187.628,00	94,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.959.694.532,00	11.380.006.904,00	-579.687.628,00	95,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.959.694.532,00	11.380.006.904,00	-579.687.628,00	95,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	858.900.000,00	852.400.000,00	-6.500.000,00	99,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	858.900.000,00	852.400.000,00	-6.500.000,00	99,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	195.000.000,00	0,00	-195.000.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	0,00	-195.000.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.471.300.000,00	1.169.542.500,00	-301.757.500,00	79,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16.0002		Fasilitasi Fraksi DPRD	780.000.000,00	525.000.000,00	-255.000.000,00	67,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	525.000.000,00	-255.000.000,00	67,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	691.300.000,00	644.542.500,00	-46.757.500,00	93,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.300.000,00	644.542.500,00	-46.757.500,00	93,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.682.366.624,00	14.593.591.675,00	-2.088.774.949,00	87,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.485.789.929,00	1.235.670.737,00	-250.119.192,00	83,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.485.789.929,00	1.235.670.737,00	-250.119.192,00	83,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.485.789.929,00	1.235.670.737,00	-250.119.192,00	83,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.087.798.363,00	3.615.507.498,00	-472.290.865,00	88,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0001		Orientasi DPRD	734.060.613,00	576.484.900,00	-157.575.713,00	78,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.060.613,00	576.484.900,00	-157.575.713,00	78,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD	2.399.245.000,00	2.127.432.698,00	-271.812.302,00	88,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.399.245.000,00	2.127.432.698,00	-271.812.302,00	88,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0004		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	540.000.000,00	510.000.000,00	-30.000.000,00	94,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	510.000.000,00	-30.000.000,00	94,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0006		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	176.364.000,00	170.505.900,00	-5.858.100,00	96,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.364.000,00	170.505.900,00	-5.858.100,00	96,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	238.128.750,00	231.084.000,00	-7.044.750,00	97,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.128.750,00	231.084.000,00	-7.044.750,00	97,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	11.108.778.332,00	9.742.413.440,00	-1.366.364.892,00	87,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.108.778.332,00	9.742.413.440,00	-1.366.364.892,00	87,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.108.778.332,00	9.742.413.440,00	-1.366.364.892,00	87,70	
				Jumlah	39.263.207.742,00	35.230.469.301,00	-4.032.738.441,00	89,73	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Bilalang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	-61.837.661,00	97,20	
7.01				KECAMATAN	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	-61.837.661,00	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000			Kecamatan Bilalang	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	-61.837.661,00	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.191.600.227,00	2.129.846.566,00	-61.753.661,00	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.983.262.576,00	1.937.071.358,00	-46.191.218,00	97,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.938.644.668,00	1.897.763.658,00	-40.881.010,00	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.938.644.668,00	1.897.763.658,00	-40.881.010,00	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	-50.000,00	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.681.222,00	6.570.000,00	-111.222,00	98,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.222,00	0,00	-111.222,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.176.686,00	13.027.700,00	-5.148.986,00	71,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.176.686,00	13.027.700,00	-5.148.986,00	71,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.640.151,00	105.305.908,00	-8.334.243,00	92,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.284.681,00	5.398.700,00	-885.981,00	85,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.284.681,00	5.398.700,00	-885.981,00	85,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.182.720,00	0,00	-6.182.720,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.182.720,00	0,00	-6.182.720,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.172.750,00	99.907.208,00	-1.265.542,00	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.172.750,00	99.907.208,00	-1.265.542,00	98,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.147.500,00	7.200.000,00	-1.947.500,00	78,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.147.500,00	7.200.000,00	-1.947.500,00	78,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.147.500,00	7.200.000,00	-1.947.500,00	78,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.550.000,00	80.269.300,00	-5.280.700,00	93,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.510.000,00	50.269.300,00	-5.240.700,00	90,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.510.000,00	50.269.300,00	-5.240.700,00	90,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.040.000,00	30.000.000,00	-40.000,00	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.040.000,00	30.000.000,00	-40.000,00	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.804.000,00	18.720.000,00	-84.000,00	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.804.000,00	18.720.000,00	-84.000,00	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.804.000,00	18.720.000,00	-84.000,00	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.804.000,00	18.720.000,00	-84.000,00	99,55	
				Jumlah	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	-61.837.661,00	97,20	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Bolaang Timur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	-64.543.765,00	95,61	
7.01				KECAMATAN	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	-64.543.765,00	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000			Kecamatan Bolaang Timur	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	-64.543.765,00	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.458.407.901,00	1.394.966.136,00	-63.441.765,00	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.256.780.011,00	1.201.669.586,00	-55.110.425,00	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.209.437.006,00	1.157.064.486,00	-52.372.520,00	95,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.209.437.006,00	1.157.064.486,00	-52.372.520,00	95,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.980.298,00	19.710.000,00	-2.270.298,00	89,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	21.960.000,00	19.710.000,00	-2.250.000,00	89,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.298,00	0,00	-20.298,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.773.400,00	13.621.075,00	-152.325,00	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.203.400,00	7.051.075,00	-152.325,00	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.589.307,00	11.274.025,00	-315.282,00	97,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.589.307,00	11.274.025,00	-315.282,00	97,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.472.249,00	101.259.200,00	-5.213.049,00	95,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.281.977,00	3.163.500,00	-118.477,00	96,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.281.977,00	3.163.500,00	-118.477,00	96,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.098.235,00	0,00	-2.098.235,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.098.235,00	0,00	-2.098.235,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.065.245,00	9.166.000,00	-2.899.245,00	75,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.065.245,00	9.166.000,00	-2.899.245,00	75,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.026.792,00	88.929.700,00	-97.092,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.026.792,00	88.929.700,00	-97.092,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.785.379,00	8.194.150,00	-1.591.229,00	83,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.785.379,00	8.194.150,00	-1.591.229,00	83,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.785.379,00	8.194.150,00	-1.591.229,00	83,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.370.262,00	83.843.200,00	-1.527.062,00	98,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.208.162,00	53.843.200,00	-1.364.962,00	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.208.162,00	53.843.200,00	-1.364.962,00	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.162.100,00	30.000.000,00	-162.100,00	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.162.100,00	30.000.000,00	-162.100,00	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.402.000,00	10.300.000,00	-1.102.000,00	90,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.402.000,00	10.300.000,00	-1.102.000,00	90,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.402.000,00	10.300.000,00	-1.102.000,00	90,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.402.000,00	10.300.000,00	-1.102.000,00	90,34	
				Jumlah	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	-64.543.765,00	95,61	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Dumoga Utara

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	-33.060.938,00	98,28	
7.01				KECAMATAN	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	-33.060.938,00	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000			Kecamatan Dumoga Utara	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	-33.060.938,00	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.900.272.890,00	1.867.701.924,00	-32.570.966,00	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.643.284.526,00	1.613.246.274,00	-30.038.252,00	98,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.561.199.898,00	1.533.946.754,00	-27.253.144,00	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.561.199.898,00	1.533.946.754,00	-27.253.144,00	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	-50.000,00	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.093.471,00	12.435.250,00	-658.221,00	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.523.471,00	5.865.250,00	-658.221,00	89,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.231.157,00	47.154.270,00	-2.076.887,00	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.231.157,00	47.154.270,00	-2.076.887,00	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.195.290,00	149.957.000,00	-238.290,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.118.426,00	34.905.000,00	-213.426,00	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.118.426,00	34.905.000,00	-213.426,00	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.076.864,00	115.052.000,00	-24.864,00	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.076.864,00	115.052.000,00	-24.864,00	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	10.899.150,00	-1.100.850,00	90,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	10.899.150,00	-1.100.850,00	90,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.899.150,00	-1.100.850,00	90,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.793.074,00	93.599.500,00	-1.193.574,00	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.746.350,00	64.002.500,00	-743.850,00	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.746.350,00	64.002.500,00	-743.850,00	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.567.760,00	5.435.000,00	-132.760,00	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.567.760,00	5.435.000,00	-132.760,00	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.478.964,00	24.162.000,00	-316.964,00	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.478.964,00	24.162.000,00	-316.964,00	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.324.172,00	16.834.200,00	-489.972,00	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.324.172,00	16.834.200,00	-489.972,00	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.324.172,00	16.834.200,00	-489.972,00	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.324.172,00	16.834.200,00	-489.972,00	97,17	
				Jumlah	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	-33.060.938,00	98,28	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Dumoga Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	-72.717.344,00	96,11	
7.01				KECAMATAN	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	-72.717.344,00	96,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000			Kecamatan Dumoga Barat	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	-72.717.344,00	96,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.858.952.640,00	1.786.570.005,00	-72.382.635,00	96,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.678.103.373,00	1.612.433.994,00	-65.669.379,00	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.237.808,00	1.574.857.489,00	-64.380.319,00	96,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.639.237.808,00	1.574.857.489,00	-64.380.319,00	96,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.013.993,00	8.963.933,00	-50.060,00	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.443.993,00	2.393.933,00	-50.060,00	97,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.141.572,00	8.902.572,00	-1.239.000,00	87,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.141.572,00	8.902.572,00	-1.239.000,00	87,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.828.983,00	78.552.000,00	-1.276.983,00	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.766.983,00	2.500.000,00	-1.266.983,00	66,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.766.983,00	2.500.000,00	-1.266.983,00	66,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.062.000,00	76.052.000,00	-10.000,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.062.000,00	76.052.000,00	-10.000,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.499.020,00	7.080.811,00	-418.209,00	94,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.499.020,00	7.080.811,00	-418.209,00	94,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.499.020,00	7.080.811,00	-418.209,00	94,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.521.264,00	88.503.200,00	-5.018.064,00	94,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.508.166,00	58.503.200,00	-5.004.966,00	92,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.508.166,00	58.503.200,00	-5.004.966,00	92,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.013.098,00	30.000.000,00	-13.098,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.013.098,00	30.000.000,00	-13.098,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.734.709,00	9.400.000,00	-334.709,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.734.709,00	9.400.000,00	-334.709,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.734.709,00	9.400.000,00	-334.709,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.734.709,00	9.400.000,00	-334.709,00	96,56	
				Jumlah	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	-72.717.344,00	96,11	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Dumoga Timur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	2.778.402.942,00	2.715.121.831,00	-63.281.111,00	97,72	
7.01				KECAMATAN	2.778.402.942,00	2.715.121.831,00	-63.281.111,00	97,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000			Kecamatan Dumoga Timur	2.778.402.942,00	2.715.121.831,00	-63.281.111,00	97,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.027.889.720,00	1.966.703.219,00	-61.186.501,00	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.198.552,00	1.767.697.031,00	-41.501.521,00	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.758.267.148,00	1.719.472.556,00	-38.794.592,00	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.758.267.148,00	1.719.472.556,00	-38.794.592,00	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.090.000,00	23.090.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.604.000,00	7.680.000,00	-1.924.000,00	79,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.924.000,00	0,00	-1.924.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.237.404,00	17.454.475,00	-782.929,00	95,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.237.404,00	17.454.475,00	-782.929,00	95,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.269.000,00	101.234.098,00	-1.034.902,00	98,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.965.000,00	4.337.000,00	-628.000,00	87,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	4.337.000,00	-628.000,00	87,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.304.000,00	96.897.098,00	-406.902,00	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.304.000,00	96.897.098,00	-406.902,00	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.002.000,00	5.953.940,00	-10.048.060,00	37,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.002.000,00	5.953.940,00	-10.048.060,00	37,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.002.000,00	5.953.940,00	-10.048.060,00	37,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.420.168,00	91.818.150,00	-8.602.018,00	91,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.556.000,00	53.401.650,00	-7.154.350,00	88,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.556.000,00	53.401.650,00	-7.154.350,00	88,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.120.000,00	4.920.000,00	-1.200.000,00	80,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	4.920.000,00	-1.200.000,00	80,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.744.168,00	33.496.500,00	-247.668,00	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.744.168,00	33.496.500,00	-247.668,00	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	750.513.222,00	748.418.612,00	-2.094.610,00	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.587.880,00	9.451.500,00	-1.136.380,00	89,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.587.880,00	9.451.500,00	-1.136.380,00	89,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.587.880,00	9.451.500,00	-1.136.380,00	89,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	739.925.342,00	738.967.112,00	-958.230,00	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	199.893.950,00	-106.050,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.893.950,00	-106.050,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	539.925.342,00	539.073.162,00	-852.180,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.925.342,00	539.073.162,00	-852.180,00	99,84	
				Jumlah	2.778.402.942,00	2.715.121.831,00	-63.281.111,00	97,72	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Lolak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	1.775.456.577,00	1.648.389.564,00	-127.067.013,00	92,84	
7.01				KECAMATAN	1.775.456.577,00	1.648.389.564,00	-127.067.013,00	92,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000			Kecamatan Lolak	1.775.456.577,00	1.648.389.564,00	-127.067.013,00	92,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.758.789.372,00	1.631.769.564,00	-127.019.808,00	92,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.463.202.606,00	1.343.304.157,00	-119.898.449,00	91,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.885.762,00	1.299.920.957,00	-118.964.805,00	91,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.418.885.762,00	1.299.920.957,00	-118.964.805,00	91,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	-50.000,00	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.830.857,00	11.170.000,00	-660.857,00	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.260.857,00	4.600.000,00	-660.857,00	87,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.725.987,00	12.503.200,00	-222.787,00	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.725.987,00	12.503.200,00	-222.787,00	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.460.762,00	156.031.600,00	-429.162,00	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.667.882,00	5.611.000,00	-56.882,00	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.667.882,00	5.611.000,00	-56.882,00	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.438.875,00	19.176.000,00	-262.875,00	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.438.875,00	19.176.000,00	-262.875,00	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.354.005,00	131.244.600,00	-109.405,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.354.005,00	131.244.600,00	-109.405,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.376.805,00	51.500.000,00	-1.876.805,00	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.376.805,00	51.500.000,00	-1.876.805,00	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.376.805,00	51.500.000,00	-1.876.805,00	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.771.699,00	46.354.682,00	-2.417.017,00	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.759.139,00	4.354.682,00	-2.404.457,00	64,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.759.139,00	4.354.682,00	-2.404.457,00	64,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.012.560,00	42.000.000,00	-12.560,00	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.012.560,00	42.000.000,00	-12.560,00	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.977.500,00	34.579.125,00	-2.398.375,00	93,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.977.500,00	34.579.125,00	-2.398.375,00	93,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.977.500,00	34.579.125,00	-2.398.375,00	93,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.667.205,00	16.620.000,00	-47.205,00	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.667.205,00	16.620.000,00	-47.205,00	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.667.205,00	16.620.000,00	-47.205,00	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.667.205,00	16.620.000,00	-47.205,00	99,72	
				Jumlah	1.775.456.577,00	1.648.389.564,00	-127.067.013,00	92,84	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Poigar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	-114.979.594,00	94,60	
7.01				KECAMATAN	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	-114.979.594,00	94,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000			Kecamatan Poigar	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	-114.979.594,00	94,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.114.173.608,00	2.001.574.514,00	-112.599.094,00	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.888.555.158,00	1.794.577.671,00	-93.977.487,00	95,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.541.773,00	1.757.870.171,00	-86.671.602,00	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.844.541.773,00	1.757.870.171,00	-86.671.602,00	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.957.200,00	17.910.000,00	-47.200,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	17.910.000,00	17.910.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.200,00	0,00	-47.200,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.684.129,00	8.960.000,00	-724.129,00	92,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.714.129,00	2.990.000,00	-724.129,00	80,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.372.056,00	9.837.500,00	-6.534.556,00	60,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.372.056,00	9.837.500,00	-6.534.556,00	60,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.697.757,00	120.387.678,00	-3.310.079,00	97,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.359.757,00	7.350.000,00	-3.009.757,00	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.359.757,00	7.350.000,00	-3.009.757,00	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.338.000,00	113.037.678,00	-300.322,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.338.000,00	113.037.678,00	-300.322,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.851.915,00	4.448.725,00	-5.403.190,00	45,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.851.915,00	4.448.725,00	-5.403.190,00	45,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.851.915,00	4.448.725,00	-5.403.190,00	45,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.068.778,00	82.160.440,00	-9.908.338,00	89,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.744.808,00	57.810.640,00	-6.934.168,00	89,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.744.808,00	57.810.640,00	-6.934.168,00	89,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.729.125,00	4.405.000,00	-324.125,00	93,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.729.125,00	4.405.000,00	-324.125,00	93,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.594.845,00	19.944.800,00	-2.650.045,00	88,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.594.845,00	19.944.800,00	-2.650.045,00	88,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.605.270,00	11.224.770,00	-2.380.500,00	82,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.605.270,00	11.224.770,00	-2.380.500,00	82,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.605.270,00	11.224.770,00	-2.380.500,00	82,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.605.270,00	11.224.770,00	-2.380.500,00	82,50	
				Jumlah	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	-114.979.594,00	94,60	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Sang Tombolang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	-122.611.512,00	93,63	
7.01				KECAMATAN	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	-122.611.512,00	93,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000			Kecamatan Sang Tombolang	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	-122.611.512,00	93,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.906.998.277,00	1.785.256.365,00	-121.741.912,00	93,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.715.951.785,00	1.608.041.175,00	-107.910.610,00	93,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.923.079,00	1.563.699.075,00	-103.224.004,00	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.666.923.079,00	1.563.699.075,00	-103.224.004,00	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.784.140,00	19.782.000,00	-2.140,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.140,00	72.000,00	-2.140,00	97,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.604.000,00	8.336.200,00	-267.800,00	96,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.000,00	1.766.200,00	-267.800,00	86,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.640.566,00	16.223.900,00	-4.416.666,00	78,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.640.566,00	16.223.900,00	-4.416.666,00	78,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.176.898,00	81.480.900,00	-12.695.998,00	86,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.700.000,00	6.800.000,00	-900.000,00	88,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	6.800.000,00	-900.000,00	88,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.476.898,00	74.680.900,00	-11.795.998,00	86,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.476.898,00	74.680.900,00	-11.795.998,00	86,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.424.000,00	5.288.490,00	-135.510,00	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.424.000,00	5.288.490,00	-135.510,00	97,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.424.000,00	5.288.490,00	-135.510,00	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.445.594,00	90.445.800,00	-999.794,00	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.025.594,00	71.046.200,00	-979.394,00	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.025.594,00	71.046.200,00	-979.394,00	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.420.000,00	19.399.600,00	-20.400,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.420.000,00	19.399.600,00	-20.400,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.732.600,00	16.863.000,00	-869.600,00	95,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.732.600,00	16.863.000,00	-869.600,00	95,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.732.600,00	16.863.000,00	-869.600,00	95,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.732.600,00	16.863.000,00	-869.600,00	95,10	
				Jumlah	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	-122.611.512,00	93,63	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Lolayan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	-136.607.068,00	95,76	
7.01				KECAMATAN	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	-136.607.068,00	95,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000			Kecamatan Lolayan	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	-136.607.068,00	95,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.206.393.983,00	3.070.404.115,00	-135.989.868,00	95,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.960.873.860,00	2.837.659.260,00	-123.214.600,00	95,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.861.122,00	2.800.930.160,00	-120.930.962,00	95,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.921.861.122,00	2.800.930.160,00	-120.930.962,00	95,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.860.000,00	18.810.000,00	-50.000,00	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.005.122,00	7.175.000,00	-830.122,00	89,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.735.122,00	905.000,00	-830.122,00	52,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.147.616,00	10.744.100,00	-1.403.516,00	88,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.147.616,00	10.744.100,00	-1.403.516,00	88,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.598.235,00	97.345.100,00	-2.253.135,00	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.658.235,00	13.430.000,00	-228.235,00	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.658.235,00	13.430.000,00	-228.235,00	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.940.000,00	83.915.100,00	-2.024.900,00	97,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.940.000,00	83.915.100,00	-2.024.900,00	97,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.050.735,00	83.035.115,00	-2.015.620,00	97,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.710.735,00	8.785.115,00	-1.925.620,00	82,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.710.735,00	8.785.115,00	-1.925.620,00	82,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.340.000,00	74.250.000,00	-90.000,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.340.000,00	74.250.000,00	-90.000,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.871.153,00	52.364.640,00	-8.506.513,00	86,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.857.399,00	47.199.540,00	-7.657.859,00	86,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.857.399,00	47.199.540,00	-7.657.859,00	86,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.933.312,00	2.310.000,00	-623.312,00	78,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.933.312,00	2.310.000,00	-623.312,00	78,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.080.442,00	2.855.100,00	-225.342,00	92,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.080.442,00	2.855.100,00	-225.342,00	92,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.814.700,00	13.197.500,00	-617.200,00	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.814.700,00	13.197.500,00	-617.200,00	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.814.700,00	13.197.500,00	-617.200,00	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.814.700,00	13.197.500,00	-617.200,00	95,53	
				Jumlah	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	-136.607.068,00	95,76	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Passi Timur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000			BELANJA DAERAH	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	-78.343.533,00	97,57	
7.01				KECAMATAN	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	-78.343.533,00	97,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000			Kecamatan Passi Timur	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	-78.343.533,00	97,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.197.301.485,00	3.119.770.452,00	-77.531.033,00	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.843.980.459,00	2.768.110.577,00	-75.869.882,00	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.812.634.035,00	2.737.036.177,00	-75.597.858,00	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.812.634.035,00	2.737.036.177,00	-75.597.858,00	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.464.521,00	7.393.000,00	-71.521,00	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.194.521,00	1.123.000,00	-71.521,00	94,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.071.903,00	4.871.400,00	-200.503,00	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.071.903,00	4.871.400,00	-200.503,00	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.323.662,00	136.313.000,00	-10.662,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.199.662,00	9.191.600,00	-8.062,00	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.199.662,00	9.191.600,00	-8.062,00	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.124.000,00	127.121.400,00	-2.600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.124.000,00	127.121.400,00	-2.600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.700.527,00	106.812.975,00	-887.552,00	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.790.000,00	6.910.375,00	-879.625,00	88,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.790.000,00	6.910.375,00	-879.625,00	88,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.910.527,00	99.902.600,00	-7.927,00	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.910.527,00	99.902.600,00	-7.927,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.296.837,00	108.533.900,00	-762.937,00	99,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.727.404,00	58.721.900,00	-5.504,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.727.404,00	58.721.900,00	-5.504,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.180.662,00	15.693.100,00	-487.562,00	96,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.180.662,00	15.693.100,00	-487.562,00	96,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.388.771,00	34.118.900,00	-269.871,00	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.388.771,00	34.118.900,00	-269.871,00	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.518.100,00	27.705.600,00	-812.500,00	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.518.100,00	27.705.600,00	-812.500,00	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.518.100,00	27.705.600,00	-812.500,00	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.518.100,00	27.705.600,00	-812.500,00	97,15	
				Jumlah	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	-78.343.533,00	97,57	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Passi Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000		5	BELANJA DAERAH	3.275.776.618,00	3.182.561.953,00	-93.214.665,00	97,15	
7.01				KECAMATAN	3.275.776.618,00	3.182.561.953,00	-93.214.665,00	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000			Kecamatan Passi Barat	3.275.776.618,00	3.182.561.953,00	-93.214.665,00	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.249.916.618,00	3.156.701.953,00	-93.214.665,00	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.969.070,00	2.794.634.813,00	-68.334.257,00	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.819.353.068,00	2.752.049.813,00	-67.303.255,00	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.819.353.068,00	2.752.049.813,00	-67.303.255,00	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.499.697,00	9.557.000,00	-942.697,00	91,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.299.697,00	2.357.000,00	-942.697,00	71,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.516.305,00	11.428.000,00	-88.305,00	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.516.305,00	11.428.000,00	-88.305,00	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.036.918,00	108.102.700,00	-6.934.218,00	93,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.444.918,00	1.054.000,00	-3.390.918,00	23,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.444.918,00	1.054.000,00	-3.390.918,00	23,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	2.040.000,00	-2.460.000,00	45,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.040.000,00	-2.460.000,00	45,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.092.000,00	105.008.700,00	-1.083.300,00	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.092.000,00	105.008.700,00	-1.083.300,00	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.908.734,00	133.900.000,00	-1.008.734,00	99,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	12.577.965,00	12.500.000,00	-77.965,00	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.577.965,00	12.500.000,00	-77.965,00	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.330.769,00	121.400.000,00	-930.769,00	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.330.769,00	121.400.000,00	-930.769,00	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.694.000,00	48.604.280,00	-4.089.720,00	92,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.416.500,00	1.400.000,00	-16.500,00	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.500,00	1.400.000,00	-16.500,00	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.027.500,00	8.954.280,00	-4.073.220,00	68,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.027.500,00	8.954.280,00	-4.073.220,00	68,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.307.896,00	71.460.160,00	-12.847.736,00	84,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.536.710,00	50.598.500,00	-10.938.210,00	82,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.536.710,00	50.598.500,00	-10.938.210,00	82,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.787.400,00	1.770.000,00	-1.017.400,00	63,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.787.400,00	1.770.000,00	-1.017.400,00	63,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.983.786,00	19.091.660,00	-892.126,00	95,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.983.786,00	19.091.660,00	-892.126,00	95,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	
				Jumlah	3.275.776.618,00	3.182.561.953,00	-93.214.665,00	97,15	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Bolaang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	3.313.621.822,00	3.206.542.644,00	-107.079.178,00	96,77	
7.01				KECAMATAN	3.313.621.822,00	3.206.542.644,00	-107.079.178,00	96,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000			Kecamatan Bolaang	3.313.621.822,00	3.206.542.644,00	-107.079.178,00	96,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.595.582.063,00	2.513.051.135,00	-82.530.928,00	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.281.361.187,00	2.203.561.533,00	-77.799.654,00	96,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.229.845.426,00	2.154.052.883,00	-75.792.543,00	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.229.845.426,00	2.154.052.883,00	-75.792.543,00	96,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.270.000,00	25.470.000,00	-800.000,00	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	26.220.000,00	25.470.000,00	-750.000,00	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.768.477,00	8.690.000,00	-78.477,00	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.477,00	200.000,00	-78.477,00	71,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.477.284,00	15.348.650,00	-1.128.634,00	93,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.477.284,00	15.348.650,00	-1.128.634,00	93,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.858.324,00	134.773.400,00	-1.084.924,00	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.092.227,00	3.500.000,00	-592.227,00	85,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.092.227,00	3.500.000,00	-592.227,00	85,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.878.477,00	15.745.000,00	-133.477,00	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.878.477,00	15.745.000,00	-133.477,00	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.887.620,00	115.528.400,00	-359.220,00	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.887.620,00	115.528.400,00	-359.220,00	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.159.454,00	115.836.902,00	-322.552,00	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.780.977,00	11.586.902,00	-194.075,00	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.780.977,00	11.586.902,00	-194.075,00	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.378.477,00	104.250.000,00	-128.477,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.378.477,00	104.250.000,00	-128.477,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.203.098,00	58.879.300,00	-3.323.798,00	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.640.000,00	50.034.300,00	-605.700,00	98,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.640.000,00	50.034.300,00	-605.700,00	98,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.563.098,00	8.845.000,00	-2.718.098,00	76,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.563.098,00	8.845.000,00	-2.718.098,00	76,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	702.549.840,00	678.968.609,00	-23.581.231,00	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	702.549.840,00	678.968.609,00	-23.581.231,00	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	207.752.600,00	192.191.309,00	-15.561.291,00	92,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.752.600,00	0,00	-7.752.600,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	192.191.309,00	-7.808.691,00	96,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	494.797.240,00	486.777.300,00	-8.019.940,00	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.797.240,00	486.777.300,00	-8.019.940,00	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.489.919,00	14.522.900,00	-967.019,00	93,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.489.919,00	14.522.900,00	-967.019,00	93,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.489.919,00	14.522.900,00	-967.019,00	93,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.489.919,00	14.522.900,00	-967.019,00	93,76	
				Jumlah	3.313.621.822,00	3.206.542.644,00	-107.079.178,00	96,77	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Dumoga Tenggara

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	-58.628.905,00	95,91	
7.01				KECAMATAN	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	-58.628.905,00	95,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000			Kecamatan Dumoga Tenggara	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	-58.628.905,00	95,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.422.978.738,00	1.364.615.533,00	-58.363.205,00	95,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.237.362.738,00	1.183.646.823,00	-53.715.915,00	95,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.217.937.058,00	1.167.337.523,00	-50.599.535,00	95,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.217.937.058,00	1.167.337.523,00	-50.599.535,00	95,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.652.385,00	6.240.000,00	-412.385,00	93,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.385,00	0,00	-412.385,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.773.295,00	10.069.300,00	-2.703.995,00	78,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.773.295,00	10.069.300,00	-2.703.995,00	78,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.566.000,00	65.425.400,00	-140.600,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.566.000,00	65.425.400,00	-140.600,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.566.000,00	65.425.400,00	-140.600,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.750.000,00	35.291.000,00	-3.459.000,00	91,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.730.000,00	8.321.000,00	-3.409.000,00	70,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.730.000,00	8.321.000,00	-3.409.000,00	70,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.020.000,00	26.970.000,00	-50.000,00	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.250.000,00	-50.000,00	99,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.300.000,00	80.252.310,00	-1.047.690,00	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000,00	50.252.310,00	-987.690,00	98,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.240.000,00	50.252.310,00	-987.690,00	98,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.060.000,00	30.000.000,00	-60.000,00	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.060.000,00	30.000.000,00	-60.000,00	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.475.700,00	10.210.000,00	-265.700,00	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.475.700,00	10.210.000,00	-265.700,00	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.475.700,00	10.210.000,00	-265.700,00	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.475.700,00	10.210.000,00	-265.700,00	97,46	
				Jumlah	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	-58.628.905,00	95,91	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Dumoga Tengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	-59.103.591,00	96,38	
7.01				KECAMATAN	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	-59.103.591,00	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000			Kecamatan Dumoga Tengah	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	-59.103.591,00	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.620.713.788,00	1.561.643.014,00	-59.070.774,00	96,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.340.501.724,00	1.291.245.164,00	-49.256.560,00	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.261.082.530,00	1.215.920.264,00	-45.162.266,00	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.261.082.530,00	1.215.920.264,00	-45.162.266,00	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	-50.000,00	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.971.639,00	10.912.200,00	-59.439,00	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.401.639,00	4.342.200,00	-59.439,00	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.687.555,00	44.702.700,00	-3.984.855,00	91,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.687.555,00	44.702.700,00	-3.984.855,00	91,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.295.670,00	160.840.000,00	-3.455.670,00	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.505.405,00	938.000,00	-567.405,00	62,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.505.405,00	938.000,00	-567.405,00	62,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.772.556,00	3.903.600,00	-868.956,00	81,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.772.556,00	3.903.600,00	-868.956,00	81,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.405.000,00	15.645.000,00	-1.760.000,00	89,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.405.000,00	15.645.000,00	-1.760.000,00	89,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.612.709,00	140.353.400,00	-259.309,00	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.612.709,00	140.353.400,00	-259.309,00	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.150.000,00	11.421.000,00	-729.000,00	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.150.000,00	11.421.000,00	-729.000,00	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	11.421.000,00	-729.000,00	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.766.394,00	98.136.850,00	-5.629.544,00	94,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.594.994,00	67.461.850,00	-3.133.144,00	95,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.594.994,00	67.461.850,00	-3.133.144,00	95,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.700,00	675.000,00	-2.425.700,00	21,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.700,00	675.000,00	-2.425.700,00	21,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.070.700,00	30.000.000,00	-70.700,00	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.070.700,00	30.000.000,00	-70.700,00	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.557.017,00	12.524.200,00	-32.817,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.557.017,00	12.524.200,00	-32.817,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.557.017,00	12.524.200,00	-32.817,00	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.557.017,00	12.524.200,00	-32.817,00	99,74	
				Jumlah	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	-59.103.591,00	96,38	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
Organisasi : Kecamatan Dumoga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	1.718.814.955,00	1.623.753.839,00	-95.061.116,00	94,47	
7.01				KECAMATAN	1.718.814.955,00	1.623.753.839,00	-95.061.116,00	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000			Kecamatan Dumoga	1.718.814.955,00	1.623.753.839,00	-95.061.116,00	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.704.474.199,00	1.609.413.083,00	-95.061.116,00	94,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.504.123.723,00	1.425.272.274,00	-78.851.449,00	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.467.001.518,00	1.388.719.524,00	-78.281.994,00	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.467.001.518,00	1.388.719.524,00	-78.281.994,00	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.940.000,00	19.710.000,00	-230.000,00	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	19.890.000,00	19.710.000,00	-180.000,00	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.808.477,00	6.570.000,00	-238.477,00	96,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.477,00	0,00	-238.477,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.373.728,00	10.272.750,00	-100.978,00	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.373.728,00	10.272.750,00	-100.978,00	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.571.077,00	83.090.500,00	-2.480.577,00	97,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.645.077,00	4.500.000,00	-145.077,00	96,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.645.077,00	4.500.000,00	-145.077,00	96,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.926.000,00	78.590.500,00	-2.335.500,00	97,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.926.000,00	78.590.500,00	-2.335.500,00	97,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.865.000,00	23.400.000,00	-465.000,00	98,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.865.000,00	23.400.000,00	-465.000,00	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.865.000,00	23.400.000,00	-465.000,00	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.471.312,00	6.673.000,00	-798.312,00	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.471.312,00	6.673.000,00	-798.312,00	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.471.312,00	6.673.000,00	-798.312,00	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.443.087,00	70.977.309,00	-12.465.778,00	85,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.312.761,00	47.096.309,00	-10.216.452,00	82,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.312.761,00	47.096.309,00	-10.216.452,00	82,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.981.812,00	2.825.000,00	-1.156.812,00	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.981.812,00	2.825.000,00	-1.156.812,00	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.148.514,00	21.056.000,00	-1.092.514,00	95,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.148.514,00	21.056.000,00	-1.092.514,00	95,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.340.756,00	14.340.756,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.340.756,00	14.340.756,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.340.756,00	14.340.756,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.340.756,00	14.340.756,00	0,00	100,00	
				Jumlah	1.718.814.955,00	1.623.753.839,00	-95.061.116,00	94,47	

LAMPIRAN 1.3
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Organisasi : Inspektorat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,00	85,99	
6.01				INSPEKTORAT DAERAH	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,00	85,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000			Inspektorat Daerah	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,00	85,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.464.709.165,00	10.722.741.823,00	-741.967.342,00	93,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.168.316.653,00	7.067.883.035,00	-100.433.618,00	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.130.286.653,00	7.030.803.035,00	-99.483.618,00	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.130.286.653,00	7.030.803.035,00	-99.483.618,00	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.860.000,00	27.810.000,00	-50.000,00	99,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.170.000,00	9.270.000,00	-900.000,00	91,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.638.200.198,00	1.518.567.044,00	-119.633.154,00	92,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.638.200.198,00	1.518.567.044,00	-119.633.154,00	92,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.638.200.198,00	1.518.567.044,00	-119.633.154,00	92,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.228.539,00	731.661.133,00	-195.567.406,00	78,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.342.600,00	43.200.000,00	-2.142.600,00	95,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.342.600,00	43.200.000,00	-2.142.600,00	95,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.886.925,00	4.048.900,00	-15.838.025,00	20,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.886.925,00	4.048.900,00	-15.838.025,00	20,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	119.396.262,00	115.954.600,00	-3.441.662,00	97,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.396.262,00	115.954.600,00	-3.441.662,00	97,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.528.641,00	49.626.000,00	-27.902.641,00	64,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.528.641,00	49.626.000,00	-27.902.641,00	64,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665.074.111,00	518.831.633,00	-146.242.478,00	78,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.074.111,00	518.831.633,00	-146.242.478,00	78,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.070.990.571,00	906.400.000,00	-164.590.571,00	84,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	818.625.000,00	662.900.000,00	-155.725.000,00	80,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	818.625.000,00	662.900.000,00	-155.725.000,00	80,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.365.571,00	243.500.000,00	-8.865.571,00	96,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.365.571,00	243.500.000,00	-8.865.571,00	96,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.831.872,00	189.460.500,00	-40.371.372,00	82,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.831.872,00	33.460.500,00	-7.371.372,00	81,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.831.872,00	33.460.500,00	-7.371.372,00	81,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.000.000,00	156.000.000,00	-33.000.000,00	82,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.000.000,00	156.000.000,00	-33.000.000,00	82,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.141.332,00	308.770.111,00	-121.371.221,00	71,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.315.622,00	96.444.040,00	-118.871.582,00	44,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.315.622,00	96.444.040,00	-118.871.582,00	44,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.556.110,00	23.522.500,00	-2.033.610,00	92,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.556.110,00	23.522.500,00	-2.033.610,00	92,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.269.600,00	188.803.571,00	-466.029,00	99,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.269.600,00	188.803.571,00	-466.029,00	99,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.871.215.270,00	2.516.067.689,00	-1.355.147.581,00	64,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.334.775.944,00	2.222.868.689,00	-1.111.907.255,00	66,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	666.501.000,00	373.839.939,00	-292.661.061,00	56,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.501.000,00	373.839.939,00	-292.661.061,00	56,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	219.500.000,00	212.725.000,00	-6.775.000,00	96,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.500.000,00	212.725.000,00	-6.775.000,00	96,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	482.100.000,00	417.850.000,00	-64.250.000,00	86,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.100.000,00	417.850.000,00	-64.250.000,00	86,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	205.212.000,00	46.892.800,00	-158.319.200,00	22,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.212.000,00	46.892.800,00	-158.319.200,00	22,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	221.741.686,00	1.000.000,00	-220.741.686,00	0,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.741.686,00	1.000.000,00	-220.741.686,00	0,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0006		Kerja Sama Pengawasan Internal	1.241.533.632,00	903.555.000,00	-337.978.632,00	72,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.533.632,00	903.555.000,00	-337.978.632,00	72,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	298.187.626,00	267.005.950,00	-31.181.676,00	89,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.187.626,00	267.005.950,00	-31.181.676,00	89,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	536.439.326,00	293.199.000,00	-243.240.326,00	54,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	9.861.326,00	2.202.000,00	-7.659.326,00	22,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.861.326,00	2.202.000,00	-7.659.326,00	22,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	526.578.000,00	290.997.000,00	-235.581.000,00	55,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.578.000,00	290.997.000,00	-235.581.000,00	55,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	501.939.526,00	379.979.300,00	-121.960.226,00	75,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	501.939.526,00	379.979.300,00	-121.960.226,00	75,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	501.939.526,00	379.979.300,00	-121.960.226,00	75,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.939.526,00	379.979.300,00	-121.960.226,00	75,70	
				Jumlah	15.837.863.961,00	13.618.788.812,00	-2.219.075.149,00	85,99	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.785.481.545,00	7.534.541.034,00	-250.940.511,00	96,78	
5.01				PERENCANAAN	7.441.459.016,00	7.227.097.470,00	-214.361.546,00	97,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.441.459.016,00	7.227.097.470,00	-214.361.546,00	97,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.145.749.270,00	5.031.724.417,00	-114.024.853,00	97,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.935.352.107,00	3.834.420.227,00	-100.931.880,00	97,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.845.109.584,00	3.744.605.927,00	-100.503.657,00	97,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.845.109.584,00	3.744.605.927,00	-100.503.657,00	97,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.700.000,00	25.650.000,00	-50.000,00	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.279.759,00	22.003.600,00	-276.159,00	98,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.729.759,00	13.453.600,00	-276.159,00	97,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.262.764,00	42.160.700,00	-102.064,00	99,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.262.764,00	42.160.700,00	-102.064,00	99,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.192.224,00	776.855.890,00	-2.336.334,00	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.268.181,00	10.802.500,00	-465.681,00	95,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.268.181,00	10.802.500,00	-465.681,00	95,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.972.137,00	22.545.000,00	-1.427.137,00	94,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.972.137,00	22.545.000,00	-1.427.137,00	94,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.951.906,00	743.508.390,00	-443.516,00	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.951.906,00	743.508.390,00	-443.516,00	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.759.078,00	76.750.000,00	-1.009.078,00	98,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.759.078,00	76.750.000,00	-1.009.078,00	98,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.759.078,00	76.750.000,00	-1.009.078,00	98,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.775.000,00	16.174.500,00	-1.600.500,00	91,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.775.000,00	16.174.500,00	-1.600.500,00	91,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.775.000,00	16.174.500,00	-1.600.500,00	91,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.670.861,00	327.523.800,00	-8.147.061,00	97,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.527.344,00	202.953.300,00	-7.574.044,00	96,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.527.344,00	202.953.300,00	-7.574.044,00	96,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00	22.520.000,00	-480.000,00	97,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	22.520.000,00	-480.000,00	97,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.143.517,00	102.050.500,00	-93.017,00	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.143.517,00	102.050.500,00	-93.017,00	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.055.957.019,00	992.432.024,00	-63.524.995,00	93,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	605.748.705,00	556.103.678,00	-49.645.027,00	91,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0002		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	289.465.740,00	275.183.600,00	-14.282.140,00	95,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.465.740,00	275.183.600,00	-14.282.140,00	95,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.656.556,00	35.018.700,00	-637.856,00	98,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.656.556,00	35.018.700,00	-637.856,00	98,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	16.886.430,00	16.551.500,00	-334.930,00	98,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.886.430,00	16.551.500,00	-334.930,00	98,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	83.241.417,00	82.048.200,00	-1.193.217,00	98,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.241.417,00	82.048.200,00	-1.193.217,00	98,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	33.305.550,00	33.016.900,00	-288.650,00	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.305.550,00	33.016.900,00	-288.650,00	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	147.193.012,00	114.284.778,00	-32.908.234,00	77,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.193.012,00	114.284.778,00	-32.908.234,00	77,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37.263.737,00	33.110.400,00	-4.153.337,00	88,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	37.263.737,00	33.110.400,00	-4.153.337,00	88,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.263.737,00	33.110.400,00	-4.153.337,00	88,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	412.944.577,00	403.217.946,00	-9.726.631,00	97,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	256.073.494,00	251.635.126,00	-4.438.368,00	98,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.073.494,00	251.635.126,00	-4.438.368,00	98,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	156.871.083,00	151.582.820,00	-5.288.263,00	96,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.871.083,00	151.582.820,00	-5.288.263,00	96,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.239.752.727,00	1.202.941.029,00	-36.811.698,00	97,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	481.981.333,00	457.577.709,00	-24.403.624,00	94,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	286.522.827,00	266.698.190,00	-19.824.637,00	93,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.522.827,00	266.698.190,00	-19.824.637,00	93,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.273.908,00	94.138.340,00	-1.135.568,00	98,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.273.908,00	94.138.340,00	-1.135.568,00	98,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	29.272.083,00	28.919.780,00	-352.303,00	98,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.272.083,00	28.919.780,00	-352.303,00	98,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.912.515,00	67.821.399,00	-3.091.116,00	95,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.912.515,00	67.821.399,00	-3.091.116,00	95,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	388.931.283,00	381.325.890,00	-7.605.393,00	98,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	129.253.375,00	128.004.200,00	-1.249.175,00	99,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.253.375,00	128.004.200,00	-1.249.175,00	99,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	46.217.103,00	45.810.800,00	-406.303,00	99,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.217.103,00	45.810.800,00	-406.303,00	99,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.030.956,00	120.832.840,00	-2.198.116,00	98,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.030.956,00	120.832.840,00	-2.198.116,00	98,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	90.429.849,00	86.678.050,00	-3.751.799,00	95,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.429.849,00	86.678.050,00	-3.751.799,00	95,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	368.840.111,00	364.037.430,00	-4.802.681,00	98,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.138.472,00	68.532.300,00	-1.606.172,00	97,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.138.472,00	68.532.300,00	-1.606.172,00	97,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	130.594.586,00	128.197.340,00	-2.397.246,00	98,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.594.586,00	128.197.340,00	-2.397.246,00	98,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	168.107.053,00	167.307.790,00	-799.263,00	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.107.053,00	167.307.790,00	-799.263,00	99,52	
5.05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	344.022.529,00	307.443.564,00	-36.578.965,00	89,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	116.817.180,00	112.471.300,00	-4.345.880,00	96,28	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0012		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116.817.180,00	112.471.300,00	-4.345.880,00	96,28	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.817.180,00	112.471.300,00	-4.345.880,00	96,28	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	227.205.349,00	194.972.264,00	-32.233.085,00	85,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	145.946.101,00	129.527.964,00	-16.418.137,00	88,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.946.101,00	129.527.964,00	-16.418.137,00	88,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	81.259.248,00	65.444.300,00	-15.814.948,00	80,54	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.259.248,00	65.444.300,00	-15.814.948,00	80,54	
				Jumlah	7.785.481.545,00	7.534.541.034,00	-250.940.511,00	96,78	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi : Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.060.949.780.650,00	1.045.140.515.977,16	-15.809.264.672,84	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.669.340.416,00	50.068.115.706,16	-601.224.709,84	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	41.429.800.000,00	41.777.573.317,00	347.773.317,00	100,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	5.000.000,00	-145.000.000,00	3,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.795.118.326,00	3.878.205.042,00	83.086.716,00	102,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.294.422.090,00	4.407.337.347,16	-887.084.742,84	83,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.878.503.931,00	986.867.418.179,00	-14.011.085.752,00	98,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.055.231.334,00	944.792.802.297,00	-11.262.429.037,00	98,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.823.272.597,00	42.074.615.882,00	-2.748.656.715,00	93,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	-1.196.954.211,00	87,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	-1.196.954.211,00	87,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	249.818.503.558,00	248.488.558.017,31	-1.329.945.540,69	99,47	
5.02				KEUANGAN	249.818.503.558,00	248.488.558.017,31	-1.329.945.540,69	99,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000			Badan Keuangan Daerah	249.818.503.558,00	248.488.558.017,31	-1.329.945.540,69	99,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.527.243.531,00	10.190.868.905,00	-336.374.626,00	96,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.336.404.630,00	8.077.828.653,00	-258.575.977,00	96,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.135.505.413,00	7.892.371.253,00	-243.134.160,00	97,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.135.505.413,00	7.892.371.253,00	-243.134.160,00	97,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.180.000,00	71.370.000,00	-9.810.000,00	87,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	81.180.000,00	71.370.000,00	-9.810.000,00	87,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.739.582,00	33.140.000,00	-4.599.582,00	87,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	27.060.000,00	23.790.000,00	-3.270.000,00	87,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.679.582,00	9.350.000,00	-1.329.582,00	87,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	81.979.635,00	80.947.400,00	-1.032.235,00	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.979.635,00	80.947.400,00	-1.032.235,00	98,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	490.990.322,00	479.332.900,00	-11.657.422,00	97,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	101.232.000,00	97.250.000,00	-3.982.000,00	96,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.232.000,00	97.250.000,00	-3.982.000,00	96,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	389.758.322,00	382.082.900,00	-7.675.422,00	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.758.322,00	382.082.900,00	-7.675.422,00	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	858.677.223,00	853.901.862,00	-4.775.361,00	99,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.333.109,00	1.425.000,00	-908.109,00	61,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.333.109,00	1.425.000,00	-908.109,00	61,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.419.745,00	102.195.115,00	-3.224.630,00	96,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.419.745,00	102.195.115,00	-3.224.630,00	96,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.924.369,00	750.281.747,00	-642.622,00	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.924.369,00	750.281.747,00	-642.622,00	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.125.024,00	64.300.000,00	-7.825.024,00	89,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	6.424.680,00	5.650.000,00	-774.680,00	87,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.424.680,00	5.650.000,00	-774.680,00	87,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.700.344,00	58.650.000,00	-7.050.344,00	89,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.700.344,00	58.650.000,00	-7.050.344,00	89,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.906.954,00	211.291.500,00	-615.454,00	99,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.528.477,00	57.041.500,00	-486.977,00	99,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.528.477,00	57.041.500,00	-486.977,00	99,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.378.477,00	154.250.000,00	-128.477,00	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.378.477,00	154.250.000,00	-128.477,00	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.139.378,00	504.213.990,00	-52.925.388,00	90,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.832.395,00	77.957.154,00	-18.875.241,00	80,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.832.395,00	77.957.154,00	-18.875.241,00	80,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.483.594,00	270.472.086,00	-24.011.508,00	91,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.483.594,00	270.472.086,00	-24.011.508,00	91,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.656.250,00	129.460.000,00	-9.196.250,00	93,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.656.250,00	129.460.000,00	-9.196.250,00	93,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.167.139,00	26.324.750,00	-842.389,00	96,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.167.139,00	26.324.750,00	-842.389,00	96,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	236.661.624.795,00	235.701.859.930,31	-959.764.864,69	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.596.695.263,00	1.563.383.500,00	-33.311.763,00	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	323.503.561,00	317.109.250,00	-6.394.311,00	98,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.503.561,00	317.109.250,00	-6.394.311,00	98,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	179.494.391,00	177.822.030,00	-1.672.361,00	99,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.494.391,00	177.822.030,00	-1.672.361,00	99,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	715.183.203,00	691.024.320,00	-24.158.883,00	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.183.203,00	691.024.320,00	-24.158.883,00	96,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	378.514.108,00	377.427.900,00	-1.086.208,00	99,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.514.108,00	377.427.900,00	-1.086.208,00	99,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	737.534.064,00	728.791.399,00	-8.742.665,00	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47.905.658,00	43.894.950,00	-4.010.708,00	91,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.905.658,00	43.894.950,00	-4.010.708,00	91,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	299.972.019,00	298.793.396,00	-1.178.623,00	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.972.019,00	298.793.396,00	-1.178.623,00	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	389.656.387,00	386.103.053,00	-3.553.334,00	99,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.656.387,00	386.103.053,00	-3.553.334,00	99,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	829.748.904,00	824.605.784,00	-5.143.120,00	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	210.086.481,00	209.447.600,00	-638.881,00	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.086.481,00	209.447.600,00	-638.881,00	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	482.975.785,00	482.065.670,00	-910.115,00	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.975.785,00	482.065.670,00	-910.115,00	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	136.686.638,00	133.092.514,00	-3.594.124,00	97,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.686.638,00	133.092.514,00	-3.594.124,00	97,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	233.497.646.564,00	232.585.079.247,31	-912.567.316,69	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	225.471.105.877,00	225.294.007.991,00	-177.097.886,00	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.477,00	0,00	-128.477,00	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.470.977.400,00	225.294.007.991,00	-176.969.409,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.221.445.909,00	1.501.050.900,00	-720.395.009,00	67,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.709,00	0,00	-118.709,00	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	-720.276.300,00	67,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.805.094.778,00	5.790.020.356,31	-15.074.421,69	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.477,00	0,00	-128.477,00	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.804.966.301,00	5.790.020.356,31	-14.945.944,69	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.346.051.316,00	1.344.152.080,00	-1.899.236,00	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.346.051.316,00	1.344.152.080,00	-1.899.236,00	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga	24.633.302,00	24.208.625,00	-424.677,00	98,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.633.302,00	24.208.625,00	-424.677,00	98,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	14.671.710,00	14.641.710,00	-30.000,00	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.671.710,00	14.641.710,00	-30.000,00	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	396.073.690,00	395.972.890,00	-100.800,00	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.073.690,00	395.972.890,00	-100.800,00	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	845.085.846,00	844.426.405,00	-659.441,00	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	845.085.846,00	844.426.405,00	-659.441,00	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	65.586.768,00	64.902.450,00	-684.318,00	98,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.586.768,00	64.902.450,00	-684.318,00	98,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.283.583.915,00	1.251.677.102,00	-31.906.813,00	97,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.283.583.915,00	1.251.677.102,00	-31.906.813,00	97,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	395.854.364,00	393.975.400,00	-1.878.964,00	99,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.854.364,00	393.975.400,00	-1.878.964,00	99,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69.357.716,00	67.467.800,00	-1.889.916,00	97,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.357.716,00	67.467.800,00	-1.889.916,00	97,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	642.806.635,00	628.273.714,00	-14.532.921,00	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.806.635,00	628.273.714,00	-14.532.921,00	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	175.565.200,00	161.960.188,00	-13.605.012,00	92,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.565.200,00	161.960.188,00	-13.605.012,00	92,25	
				Jumlah	811.131.277.092,00	796.651.957.959,85	-14.479.319.132,15	98,21	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.163.357.938,00	5.825.395.726,00	-337.962.212,00	94,52	
5.03				KEPEGAWAIAN	6.112.861.473,00	5.783.052.144,00	-329.809.329,00	94,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.112.861.473,00	5.783.052.144,00	-329.809.329,00	94,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.254.025.008,00	4.028.855.173,00	-225.169.835,00	94,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.187.985.484,00	3.005.388.981,00	-182.596.503,00	94,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.108.129.610,00	2.931.679.031,00	-176.450.579,00	94,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.865.780.795,00	2.778.017.202,00	-87.763.593,00	96,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.348.815,00	153.661.829,00	-88.686.986,00	63,41	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.512.483,00	20.713.450,00	-799.033,00	96,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.962.483,00	12.163.450,00	-799.033,00	93,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.693.391,00	27.346.500,00	-5.346.891,00	83,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.693.391,00	27.346.500,00	-5.346.891,00	83,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.013.155,00	61.322.433,00	-2.690.722,00	95,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.013.155,00	61.322.433,00	-2.690.722,00	95,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.013.155,00	61.322.433,00	-2.690.722,00	95,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.346.088,00	632.017.680,00	-7.328.408,00	98,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.458.960,00	6.361.100,00	-4.097.860,00	60,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.458.960,00	6.361.100,00	-4.097.860,00	60,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.887.128,00	625.656.580,00	-3.230.548,00	99,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.887.128,00	625.656.580,00	-3.230.548,00	99,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.532.321,00	19.000.000,00	-532.321,00	97,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.532.321,00	19.000.000,00	-532.321,00	97,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.532.321,00	19.000.000,00	-532.321,00	97,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.112.170,00	147.781.902,00	-330.268,00	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.362.170,00	38.031.902,00	-330.268,00	99,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.362.170,00	38.031.902,00	-330.268,00	99,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.750.000,00	109.750.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.750.000,00	109.750.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.035.790,00	163.344.177,00	-31.691.613,00	83,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.999.002,00	154.515.714,00	-30.483.288,00	83,52	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.999.002,00	154.515.714,00	-30.483.288,00	83,52	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.036.788,00	8.828.463,00	-1.208.325,00	87,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.036.788,00	8.828.463,00	-1.208.325,00	87,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.858.836.465,00	1.754.196.971,00	-104.639.494,00	94,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	879.090.410,00	810.417.465,00	-68.672.945,00	92,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	204.763.294,00	199.072.253,00	-5.691.041,00	97,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.763.294,00	199.072.253,00	-5.691.041,00	97,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	299.735.900,00	274.627.339,00	-25.108.561,00	91,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.735.900,00	274.627.339,00	-25.108.561,00	91,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0007		Evaluasi Pemberhentian ASN	46.363.281,00	46.163.391,00	-199.890,00	99,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.363.281,00	46.163.391,00	-199.890,00	99,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	85.258.399,00	71.550.477,00	-13.707.922,00	83,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.258.399,00	71.550.477,00	-13.707.922,00	83,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	141.596.536,00	126.057.905,00	-15.538.631,00	89,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.596.536,00	126.057.905,00	-15.538.631,00	89,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	101.373.000,00	92.946.100,00	-8.426.900,00	91,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.373.000,00	92.946.100,00	-8.426.900,00	91,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	379.523.038,00	376.340.119,00	-3.182.919,00	99,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	37.992.566,00	37.376.700,00	-615.866,00	98,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.992.566,00	37.376.700,00	-615.866,00	98,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN	341.530.472,00	338.963.419,00	-2.567.053,00	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.530.472,00	338.963.419,00	-2.567.053,00	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	470.915.885,00	468.717.220,00	-2.198.665,00	99,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.043.091,00	169.755.475,00	-1.287.616,00	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.043.091,00	169.755.475,00	-1.287.616,00	99,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	299.872.794,00	298.961.745,00	-911.049,00	99,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.872.794,00	298.961.745,00	-911.049,00	99,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	129.307.132,00	98.722.167,00	-30.584.965,00	76,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	65.420.430,00	64.084.040,00	-1.336.390,00	97,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.420.430,00	64.084.040,00	-1.336.390,00	97,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	63.886.702,00	34.638.127,00	-29.248.575,00	54,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.886.702,00	34.638.127,00	-29.248.575,00	54,22	
5.04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.496.465,00	42.343.582,00	-8.152.883,00	83,85	
				Jumlah	6.163.357.938,00	5.825.395.726,00	-337.962.212,00	94,52	

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Umum
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	-317.655.831,00	99,53	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.876.691.120,00	2.812.033.419,00	-64.657.701,00	97,75	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.144.745.064,00	2.111.354.519,00	-33.390.545,00	98,44	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.053.771.004,00	2.030.037.356,00	-23.733.648,00	98,84	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.053.771.004,00	2.030.037.356,00	-23.733.648,00	98,84	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.850.000,00	41.220.000,00	-4.630.000,00	89,90	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	45.800.000,00	41.220.000,00	-4.580.000,00	90,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.980.999,00	17.445.100,00	-1.535.899,00	91,91	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	14.490.000,00	13.740.000,00	-750.000,00	94,82	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.490.999,00	3.705.100,00	-785.899,00	82,50	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.143.060,00	22.652.063,00	-3.490.997,00	86,65	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.143.060,00	22.652.063,00	-3.490.997,00	86,65	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.657.000,00	533.431.660,00	-225.340,00	99,96	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.657.000,00	533.431.660,00	-225.340,00	99,96	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.657.000,00	533.431.660,00	-225.340,00	99,96	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.250.000,00	96.750.000,00	-7.500.000,00	92,81	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.250.000,00	96.750.000,00	-7.500.000,00	92,81	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.250.000,00	96.750.000,00	-7.500.000,00	92,81	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.039.056,00	70.497.240,00	-23.541.816,00	74,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.039.056,00	70.497.240,00	-23.541.816,00	74,97	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.039.056,00	70.497.240,00	-23.541.816,00	74,97	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.474.538.326,00	1.428.154.258,00	-46.384.068,00	96,85	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.474.538.326,00	1.428.154.258,00	-46.384.068,00	96,85	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.416.945.826,00	1.392.966.258,00	-23.979.568,00	98,31	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.945.826,00	1.392.966.258,00	-23.979.568,00	98,31	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.592.500,00	35.188.000,00	-22.404.500,00	61,10	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.592.500,00	35.188.000,00	-22.404.500,00	61,10	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.793.171.800,00	61.729.203.633,00	-63.968.167,00	99,90	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	61.793.171.800,00	61.729.203.633,00	-63.968.167,00	99,90	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	61.769.546.800,00	61.706.853.633,00	-62.693.167,00	99,90	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.436.875.000,00	1.390.666.833,00	-46.208.167,00	96,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	60.332.671.800,00	60.316.186.800,00	-16.485.000,00	99,97	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23.625.000,00	22.350.000,00	-1.275.000,00	94,60	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.625.000,00	22.350.000,00	-1.275.000,00	94,60	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	817.170.895,00	674.525.000,00	-142.645.895,00	82,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	817.170.895,00	674.525.000,00	-142.645.895,00	82,54	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	208.600.000,00	117.130.000,00	-91.470.000,00	56,15	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.600.000,00	117.130.000,00	-91.470.000,00	56,15	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	608.570.895,00	557.395.000,00	-51.175.895,00	91,59	
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.570.895,00	557.395.000,00	-51.175.895,00	91,59	
				Jumlah	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	-317.655.831,00	99,53	

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	521.885.601.631,00	481.818.898.999,75	85.724.462.950,00	80.196.480.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	311.849.183.487,00	285.298.353.369,00	39.622.509.213,00	36.040.049.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	311.849.183.487,00	285.298.353.369,00	39.622.509.213,00	36.040.049.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.173.734.569,00	233.678.939.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.334.850.651,00	232.928.400.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252.124.882.885,00	232.741.680.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.010.000,00	140.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.957.766,00	46.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.481.403,00	214.030.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.285.084,00	47.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.514.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	31.000.080,00	28.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.681.424,00	138.273.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.126.100,00	363.956.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.996.100,00	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.880.000,00	16.716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.250.000,00	332.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.276.415,00	172.552.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.581.695,00	143.785.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.694.720,00	28.767.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	57.348.668.642,00	50.978.986.589,00	39.622.509.213,00	36.040.049.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.243.064.712,00	27.238.503.319,00	27.126.264.529,00	25.040.037.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.190.772.000,00	1.151.314.398,00	2.439.216.000,00	2.092.533.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.129.832.000,00	1.129.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	192.176.500,00	189.571.794,00	3.782.321.000,00	3.772.569.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.544.672,00	1.350.000,00	733.713.000,00	733.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.153.500,00	0,00	2.769.156.000,00	2.373.359.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	24.472,00	0,00	2.298.243.968,00	2.233.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.900.827.900,00	1.869.815.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.605.091.439,00	2.702.513.602,00	164.894.061,00	157.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	451.500.000,00	403.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.191.281.093,00	18.124.520.883,00	1.990.122.000,00	1.788.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.150.000,00	3.150.000,00	1.711.997.000,00	1.711.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	0,00	1.375.156.800,00	1.319.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	562.673.309,00	516.161.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	212.246.400,00	198.397.700,00	197.025.000,00	197.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.284.229.316,00	844.328.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	198.596.900,00	142.823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	450.000,00	450.000,00	252.815.000,00	252.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	242.781.231,00	74.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.200.765.980,00	1.014.688.254,00	8.281.772.700,00	7.275.805.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.788.986.895,00	15.485.627.433,00	11.439.146.184,00	10.025.748.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	450.000,00	450.000,00	280.643.000,00	280.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	987.012.000,00	987.012.000,00	1.965.924.000,00	1.965.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	996.675.000,00	866.762.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	145.392.000,00	145.392.000,00	144.492.000,00	144.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	749.441.500,00	742.871.061,00	1.494.576.000,00	1.309.575.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	1.162.833.692,00	797.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	512.446.033,00	511.680.000,00	299.878.967,00	275.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.801.412.100,00	1.801.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.287.056.200,00	642.367.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.768.628.519,00	9.352.546.760,00	746.700.000,00	718.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.268.510,00	0,00	713.362.590,00	684.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	69.062.800,00	55.943.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	97.190.800,00	84.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	959.060.905,00	512.219.428,00	110.398.935,00	84.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	494.443.528,00	406.092.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	916.122.000,00	243.111.686,00	3.523.662.000,00	2.898.252.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.292.142.500,00	7.371.195.837,00	1.057.098.500,00	974.264.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	472.410.000,00	470.060.000,00	213.944.000,00	213.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0,00	0,00	169.053.000,00	168.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.801.567.809,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	349.432.500,00	269.355.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	872.940.244,00	367.848.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.693.198.710,00	2.649.732.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	999.697.237,00	813.978.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	832.896.000,00	730.220.308,00	674.101.500,00	591.845.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.024.474.535,00	883.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	954.306.726,00	883.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	70.167.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	570.759.600,00	432.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	570.759.600,00	432.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	570.759.600,00	432.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	21.617.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	21.617.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	21.617.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	734.402.900,00	208.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	734.402.900,00	208.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	287.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	157.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	210.129.900,00	208.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	79.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	159.260.743.264,00	147.659.415.454,75	23.821.190.558,00	22.679.624.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	83.612.596.629,00	78.145.074.290,00	20.610.523.168,00	19.722.023.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.850.547.503,00	56.309.672.684,00	222.682.170,00	197.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.731.894.561,00	55.216.542.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.093.191.532,00	54.577.896.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.040.000,00	410.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.272.605,00	144.217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	84.390.424,00	84.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	224.986.941,00	221.917.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	45.815.725,00	45.049.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.054.500,00	18.054.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.454.000,00	47.496.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112.662.716,00	111.317.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.820.000,00	22.593.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.820.000,00	22.593.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.872.672,00	354.787.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.872.672,00	354.787.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	222.682.170,00	197.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	197.482.170,00	197.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.304.001,00	288.616.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.054.001,00	106.366.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.250.000,00	182.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.669.328,00	205.215.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.319.328,00	175.925.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.350.000,00	29.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	16.590.931.726,00	14.902.917.224,00	20.362.032.498,00	19.498.973.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.221.076.790,00	4.120.849.676,00	18.575.152.352,00	17.768.787.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	0,00	0,00	8.764.865.500,00	8.490.300.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	8.239.705.500,00	7.711.517.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00	838.000.000,00	834.438.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	732.581.352,00	732.531.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.255.000,00	28.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.172.821.790,00	4.092.437.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.048.198.941,00	9.467.656.289,00	1.437.053.941,00	1.432.285.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.887.300,00	98.830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	134.920.740,00	66.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	82.880.800,00	81.951.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	419.954.214,00	419.954.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.568.645,00	46.884.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.323.698,00	22.323.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	719.167.350,00	719.087.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	117.778.800,00	117.000.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	597.161.909,00	595.798.628,00	7.775.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.686.000,00	4.588.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	104.628.500,00	102.722.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	79.844.736,00	78.664.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.450.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	777.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	196.456.400,00	173.321.669,00	244.027.942,00	244.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	297.171.960,00	255.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	165.918.100,00	150.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	42.000.000,00	13.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	378.422.000,00	324.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.501.200.000,00	4.309.534.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	41.600.000,00	12.295.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	455.475.000,00	455.050.000,00	542.949.944,00	542.949.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	463.648.853,00	435.029.532,00	373.765.125,00	373.765.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	293.298.702,00	293.706.650,00	267.758.380,00	264.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	89.277.000,00	9.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	22.500.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	374.061.384,00	373.580.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	177.730.850,00	177.730.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	54.686.000,00	54.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	20.400.000,00	19.881.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	638.294.000,00	633.474.800,00	349.826.205,00	297.900.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	638.294.000,00	633.474.800,00	349.826.205,00	297.900.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	683.361.995,00	680.936.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	583.361.995,00	580.936.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.366.673.957,00	6.182.161.211,00	25.808.500,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	254.533.362,00	253.149.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	96.994.350,00	96.691.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	157.539.012,00	156.458.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.271.289.275,00	5.127.545.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	195.913.888,00	195.657.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.982.930.667,00	4.905.310.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	92.444.720,00	26.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.851.320,00	801.465.720,00	25.808.500,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.851.320,00	801.465.720,00	25.808.500,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	323.491.900,00	318.322.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.955.850,00	81.927.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.955.850,00	81.927.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	29.990.500,00	25.809.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	29.990.500,00	25.809.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	102.838.200,00	101.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	102.838.200,00	101.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	22.518.800,00	22.518.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	22.518.800,00	22.518.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	86.188.550,00	86.176.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	86.188.550,00	86.176.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	480.951.543,00	432.000.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.648.250,00	242.037.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	242.648.250,00	242.037.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.253.293,00	149.253.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	84.690.393,00	84.690.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	64.562.900,00	64.562.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.050.000,00	40.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	89.050.000,00	40.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Lolak	2.053.402.577,00	1.649.118.107,00	14.897.754,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.017.002.577,00	1.649.118.107,00	14.897.754,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.914.115.577,00	1.633.802.007,00	14.897.754,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	338.630.000,00	178.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	61.540.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	166.035.000,00	191.716.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	879.900.577,00	859.932.807,00	14.897.754,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	102.370.000,00	30.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.900.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	53.200.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	102.887.000,00	15.316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	102.887.000,00	15.316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Pusian	1.474.241.200,00	1.372.168.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.461.281.200,00	1.363.168.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.448.480.200,00	1.353.978.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.700.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	242.709.000,00	204.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.996.000,00	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	613.975.200,00	610.735.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	87.000.000,00	82.136.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	119.700.000,00	102.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.801.000,00	9.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.801.000,00	9.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.960.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.960.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.960.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Mopuya	1.810.795.400,00	1.536.687.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.789.195.400,00	1.515.087.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.771.560.400,00	1.503.687.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.560.000,00	161.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57.940.000,00	57.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.200.000,00	120.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	711.800.400,00	652.176.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	122.000.000,00	21.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	109.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	17.635.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17.635.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Passi Barat	1.454.512.294,00	1.118.202.084,00	28.079.200,00	17.856.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.437.612.294,00	1.110.402.084,00	28.079.200,00	17.856.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.424.967.294,00	1.099.022.084,00	28.079.200,00	17.856.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.340.000,00	21.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	213.517.000,00	99.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	51.530.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	632.540.294,00	625.824.084,00	28.079.200,00	17.856.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	110.000.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.720.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	110.220.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.645.000,00	11.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.645.000,00	11.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.900.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.900.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.900.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Pangian	1.416.850.802,00	1.090.469.551,00	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.404.350.802,00	1.080.069.551,00	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.392.350.802,00	1.068.672.516,00	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.500.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	143.400.000,00	38.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	148.000.002,00	54.465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Puskesmas	549.850.800,00	533.102.173,00	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	110.000.000,00	84.944.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.700.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.600.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	11.397.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	11.397.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.500.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.500.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Imandi	1.744.691.958,00	1.406.269.455,00	12.102.774,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.737.491.958,00	1.399.544.455,00	12.102.774,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.725.491.958,00	1.388.144.455,00	12.102.774,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.800.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	243.868.000,00	116.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	54.600.000,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.400.000,00	142.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	102.000.000,00	49.253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	677.703.958,00	664.333.980,00	12.102.774,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	122.000.000,00	107.852.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	124.020.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.200.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.200.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.200.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Tungoi	1.166.238.291,00	854.612.925,00	16.195.774,00	12.093.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.166.238.291,00	854.612.925,00	16.195.774,00	12.093.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.166.238.291,00	854.612.925,00	16.195.774,00	12.093.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	264.535.000,00	96.630.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.860.000,00	38.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.615.000,00	71.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	474.488.291,00	436.971.897,00	16.195.774,00	12.093.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	109.625.000,00	82.229.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	65.550.000,00	16.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Poigar	1.993.004.819,00	1.757.318.019,00	7.376.581,00	7.375.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.985.104.819,00	1.751.518.019,00	7.376.581,00	7.375.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.971.814.819,00	1.740.118.019,00	7.376.581,00	7.375.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.550.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	256.395.000,00	230.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	61.450.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	708.343.819,00	638.942.019,00	7.376.581,00	7.375.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.676.000,00	46.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	169.200.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.290.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.290.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.900.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.900.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.900.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Tanoyan	1.216.533.632,00	1.023.250.263,00	10.903.400,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.210.053.632,00	1.017.344.263,00	10.903.400,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.196.763.632,00	1.005.944.263,00	10.903.400,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.280.000,00	115.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	150.000.000,00	73.608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	461.233.632,00	453.086.163,00	10.903.400,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	97.000.000,00	94.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	43.500.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.290.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.290.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.480.000,00	5.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.480.000,00	5.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.480.000,00	5.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Doloduo	1.616.124.400,00	1.113.190.335,00	3.944.600,00	3.944.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.592.224.400,00	1.095.590.335,00	3.944.600,00	3.944.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.579.368.400,00	1.083.782.335,00	3.944.600,00	3.944.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	308.500.000,00	77.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134.600.000,00	134.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100.008.000,00	91.468.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	624.015.400,00	498.534.016,00	3.944.600,00	3.944.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	121.665.000,00	89.312.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.360.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	123.720.000,00	44.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.856.000,00	11.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.856.000,00	11.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.900.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.900.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.900.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Maelang	1.416.826.944,00	1.104.121.306,75	14.135.406,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.398.426.944,00	1.086.666.306,75	14.135.406,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.386.426.944,00	1.075.971.306,75	14.135.406,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.280.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162.395.000,00	81.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.200.000,00	45.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220.008.000,00	220.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	485.363.944,00	422.963.306,75	14.135.406,00	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	91.980.000,00	14.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	80.000.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	10.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	10.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.400.000,00	17.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.400.000,00	17.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.400.000,00	17.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Bilalang	1.079.724.837,00	708.462.311,00	11.119.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.067.424.837,00	696.162.311,00	11.119.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.055.024.837,00	686.362.311,00	11.119.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.050.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	157.065.000,00	45.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	85.800.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	526.029.837,00	367.231.318,00	11.119.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	83.800.000,00	52.495.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.850.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.400.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.400.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Buntalo	783.409.388,00	631.340.433,00	8.757.012,00	8.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	768.589.388,00	616.690.433,00	8.757.012,00	8.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	712.084.388,00	607.786.028,00	8.757.012,00	8.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.445.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.155.000,00	77.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.355.000,00	16.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	311.549.388,00	281.086.028,00	8.757.012,00	8.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	74.720.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.690.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	72.750.000,00	67.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	56.505.000,00	8.904.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	56.505.000,00	8.904.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.820.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.820.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.820.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Inobonto	1.185.410.509,00	1.009.452.491,00	14.241.170,00	3.337.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.166.510.509,00	990.552.491,00	14.241.170,00	3.337.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.154.432.509,00	980.552.491,00	14.241.170,00	3.337.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	136.212.000,00	45.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.200.000,00	23.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.900.000,00	38.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	180.004.002,00	180.004.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	585.211.507,00	536.056.906,00	14.241.170,00	3.337.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	65.400.000,00	56.322.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.500.000,00	43.541.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.078.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.078.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Komangaan	718.574.132,00	476.520.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	713.174.132,00	472.520.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.529.132,00	472.520.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.100.000,00	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130.720.000,00	18.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	26.090.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	279.589.132,00	240.388.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	63.000.000,00	15.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.360.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	60.480.000,00	38.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Tadoy	953.304.382,00	795.588.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	929.004.382,00	777.588.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	915.069.382,00	768.575.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.500.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.370.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	154.954.000,00	128.145.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.060.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	86.300.000,00	64.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.992.000,00	103.108.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	295.348.382,00	288.471.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	83.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.765.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	47.880.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.935.000,00	9.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.935.000,00	9.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.300.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.300.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.300.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Werdhi Agung	1.084.765.384,00	712.461.813,00	18.784.382,00	18.784.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.050.385.384,00	692.845.813,00	18.784.382,00	18.784.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.038.013.384,00	683.845.813,00	18.784.382,00	18.784.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.920.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.945.000,00	18.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.246.000,00	89.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.400.000,00	45.237.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.500.000,00	35.950.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	386.702.384,00	383.948.824,00	18.784.382,00	18.784.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	96.440.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	42.300.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.372.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.372.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.380.000,00	19.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.380.000,00	19.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.380.000,00	19.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Konarom	1.000.000.000,00	513.076.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.000.000.000,00	513.076.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	987.178.000,00	504.076.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.373.000,00	110.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	435.455.000,00	97.568.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.000.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.230.000,00	40.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.822.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.822.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		UPTD Instalasi Farmasi	312.780.268,00	169.721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.627.122,00	52.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.627.122,00	52.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.627.122,00	52.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.153.146,00	116.863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	226.108.270,00	98.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	40.000.000,00	38.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	186.108.270,00	59.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.044.876,00	18.466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24.044.876,00	18.466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	201.046.170,00	197.747.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	201.046.170,00	197.747.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.359.200,00	33.359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	33.359.200,00	33.359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.686.970,00	164.388.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	82.989.250,00	82.639.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.697.720,00	81.749.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	50.965.909.248,00	50.274.560.747,00	3.045.911.387,00	2.829.503.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.459.966.766,00	35.023.210.394,00	187.300.000,00	185.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.889.416.233,00	31.567.311.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.752.326.233,00	31.430.751.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.830.000,00	102.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.260.000,00	34.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.372.350,00	682.511.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.107.873,00	167.612.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519.264.477,00	514.898.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.054.622,00	120.000.000,00	187.300.000,00	185.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.311,00	0,00	187.300.000,00	185.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.022.311,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.364.578.204,00	2.337.402.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.072.249.727,00	1.071.852.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.292.328.477,00	1.265.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.545.357,00	315.985.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395.545.357,00	315.985.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.519.893.051,00	11.355.891.256,00	2.858.611.387,00	2.644.203.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.141.923.489,00	5.119.930.665,00	2.783.081.904,00	2.576.603.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	78.710,00	0,00	649.895.904,00	579.239.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	37.476.000,00	37.422.000,00	633.186.000,00	537.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.385.473.361,00	1.371.429.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.265.000.269,00	2.257.206.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.453.895.149,00	1.453.872.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.609.235.621,00	5.491.784.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.009.329.350,00	5.002.277.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	599.906.271,00	489.507.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	268.653.241,00	244.175.900,00	75.529.483,00	67.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	268.653.241,00	244.175.900,00	75.529.483,00	67.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.080.700,00	499.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.080.700,00	499.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.986.049.431,00	3.895.459.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.188.235.431,00	3.151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3.188.235.431,00	3.151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.814.000,00	744.459.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.814.000,00	744.459.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.354.190.525,00	16.450.745.021,00	22.062.462.179,00	21.271.612.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.354.190.525,00	16.450.745.021,00	22.062.462.179,00	21.271.612.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.661.832.072,00	8.036.744.979,00	206.637.700,00	197.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.262.643.276,00	6.810.320.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.973.746.569,00	6.522.534.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.770.000,00	198.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.024.380,00	68.808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.102.327,00	20.257.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.898.683,00	604.207.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.085.120,00	15.890.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588.813.563,00	588.317.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	206.637.700,00	197.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	22.744.000,00	22.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	183.893.700,00	175.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.474.561,00	298.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.711.777,00	27.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.762.784,00	270.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.815.552,00	324.151.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.037.075,00	179.128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.600.000,00	134.507.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.178.477,00	10.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.554.295.603,00	1.532.301.772,00	1.445.402.352,00	1.445.402.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.042.596,00	12.130.175,00	434.231.352,00	434.231.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	13.042.596,00	12.130.175,00	434.231.352,00	434.231.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.541.253.007,00	1.520.171.597,00	1.011.171.000,00	1.011.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	34.985.387,00	34.196.200,00	1.011.171.000,00	1.011.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	424.444.102,00	411.712.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	858.571.865,00	858.387.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	223.251.653,00	215.875.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	780.481.429,00	779.956.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	780.481.429,00	779.956.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	780.481.429,00	779.956.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.775.049.735,00	3.774.094.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.775.049.735,00	3.774.094.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.762.904.658,00	3.762.094.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12.145.077,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	78.931.359,00	78.069.700,00	545.772.184,00	544.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.931.359,00	78.069.700,00	545.772.184,00	544.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	70.731.360,00	70.150.100,00	361.322.184,00	359.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	8.199.999,00	7.919.600,00	184.450.000,00	184.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.645.077,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	32.645.077,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	32.645.077,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.296.651.366,00	2.081.771.710,00	19.864.649.943,00	19.083.890.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.296.651.366,00	2.081.771.710,00	19.864.649.943,00	19.083.890.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	153.414.600,00	130.771.800,00	94.516.500,00	94.264.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	36.661.776,00	33.617.050,00	1.433.100.000,00	1.433.099.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.000.000,00	4.500.000,00	2.302.164.723,00	2.260.498.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	502.122.750,00	369.159.060,00	12.626.921.650,00	11.913.735.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5.000.000,00	4.200.000,00	380.000.000,00	376.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	145.077,00	0,00	718.113.310,00	699.851.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	145.077,00	0,00	391.782.760,00	387.514.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	48.061.776,00	27.770.800,00	1.918.051.000,00	1.918.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.546.100.310,00	1.511.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	23.352.919,00	22.363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	23.352.919,00	22.363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	23.352.919,00	22.363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	150.950.965,00	112.942.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	150.950.965,00	112.942.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	150.950.965,00	112.942.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.389.582.878,00	17.162.229.641,00	23.310.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.389.582.878,00	17.162.229.641,00	23.310.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.304.266.755,00	7.096.135.687,00	23.310.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.102.225.246,00	2.019.598.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.026.201.120,00	1.943.916.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.400.000,00	30.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.285.385,00	12.283.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.338.741,00	33.338.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.154.249,00	436.852.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.145.848,00	6.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.276.749,00	7.276.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.114.745,00	5.938.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.616.907,00	417.614.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	23.310.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	23.310.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.601.269.603,00	4.487.771.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.719.812,00	8.694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.477.799.791,00	4.366.827.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.750.000,00	112.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.617.657,00	151.913.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.372.657,00	84.712.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000,00	1.656.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.545.000,00	10.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	190.859.667,00	178.193.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.360.139,00	48.945.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	20.355.087,00	20.074.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	6.736.716,00	6.707.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.938.169,00	9.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	13.330.167,00	12.764.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	39.240.279,00	28.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	14.998.317,00	12.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.715.311,00	2.547.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	10.196.106,00	5.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	10.330.545,00	8.330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	91.221.217,00	90.820.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	16.853.478,00	16.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	74.367.739,00	74.065.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5.708.585,00	5.238.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5.708.585,00	5.238.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.329.447,00	4.250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.329.447,00	4.250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.246.914.915,00	1.245.854.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.681.925,00	11.088.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	11.681.925,00	11.088.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.235.232.990,00	1.234.765.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	613.232.990,00	612.765.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	622.000.000,00	622.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.640.649.269,00	8.635.496.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.640.649.269,00	8.635.496.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10.076.742,00	9.701.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.630.572.527,00	8.625.794.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.892.272,00	6.549.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	6.892.272,00	6.549.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	6.892.272,00	6.549.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.898.866.433,00	10.370.631.689,00	107.523.000,00	107.134.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	6.509.036.870,00	6.112.084.310,00	107.523.000,00	107.134.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.230.146.922,00	5.840.573.935,00	107.523.000,00	107.134.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.136.291.878,00	4.844.288.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.877.551.162,00	2.587.204.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.226.150.000,00	2.224.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.867.570,00	9.848.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.723.146,00	22.585.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.498.000,00	55.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.498.000,00	55.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	726.798.364,00	681.212.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	456.691.740,00	411.430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.106.624,00	269.782.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	107.523.000,00	107.134.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	32.523.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	75.000.000,00	74.684.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.558.680,00	259.372.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.835.524,00	250.223.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.723.156,00	9.148.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.644.929,00	134.666.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.260.509,00	90.067.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	31.672.768,00	31.597.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	64.587.741,00	58.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.384.420,00	44.599.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	45.384.420,00	44.599.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	137.245.019,00	136.843.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	137.245.019,00	136.843.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	137.245.019,00	136.843.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.389.829.563,00	4.258.547.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.839.323.462,00	2.754.659.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.153.086.761,00	2.096.748.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.079.577.432,00	2.028.084.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.650.000,00	41.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.440.480,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.418.849,00	12.863.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.921.249,00	271.740.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.244.202,00	3.558.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.677.046,00	268.181.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.836.573,00	99.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.586.573,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.478.879,00	286.620.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.269.000,00	100.333.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.316.440,00	94.271.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.201.354,00	6.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.692.085,00	85.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.550.506.101,00	1.503.888.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	478.254.976,00	471.508.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	332.952.391,00	326.335.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	145.302.585,00	145.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	604.290.984,00	589.231.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	529.061.395,00	520.198.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.333.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.859.971,00	24.416.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	45.036.618,00	44.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	467.960.141,00	443.148.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	65.373.444,00	57.810.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	402.586.697,00	385.338.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.133.035.043,00	4.877.523.825,00	87.468.000,00	76.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	5.133.035.043,00	4.877.523.825,00	87.468.000,00	76.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.257.763.151,00	3.159.760.175,00	87.468.000,00	76.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.026.400,00	24.267.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.026.400,00	24.267.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.362.461.739,00	2.292.451.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.303.485.157,00	2.233.612.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.450.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.479.930,00	9.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.046.652,00	25.967.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	655.043.848,00	650.705.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.451.545,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.223.429,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.695.953,00	16.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.717.591,00	7.043.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	623.955.330,00	623.283.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.439.669,00	2.402.000,00	55.500.000,00	46.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.439.669,00	2.402.000,00	55.500.000,00	46.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.684.024,00	105.119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.326.912,00	10.574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.357.112,00	94.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.107.471,00	84.813.900,00	31.968.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.124.760,00	73.285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.231.912,00	6.929.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.750.799,00	4.598.700,00	31.968.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	410.184.503,00	372.055.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.600.396,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15.600.396,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	394.584.107,00	367.855.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.095.555,00	114.389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90.250.140,00	84.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	185.238.412,00	168.967.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	361.180.967,00	358.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	37.184.500,00	35.960.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	12.686.634,00	12.341.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	24.497.866,00	23.618.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	323.996.467,00	322.393.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	265.261.466,00	264.844.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	26.770.106,00	26.129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	31.964.895,00	31.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	845.120.333,00	734.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	845.120.333,00	734.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	240.644.586,00	192.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.533.320,00	5.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	590.942.427,00	535.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	258.786.089,00	252.884.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	168.276.399,00	162.449.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	85.008.756,00	81.756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	70.034.634,00	68.209.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.997.868,00	7.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.235.141,00	4.800.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90.509.690,00	90.434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.509.690,00	90.434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	61.324.104.758,00	58.275.314.039,00	618.657.661,00	571.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.126.699.731,00	4.224.933.839,00	21.335.921,00	21.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.126.699.731,00	4.224.933.839,00	21.335.921,00	21.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.358.642.205,00	3.276.532.927,00	21.335.921,00	21.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.681.165.347,00	2.615.081.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.985.540,00	2.558.832.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.680.000,00	27.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.500.154,00	9.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.999.653,00	19.408.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.351.354,00	337.935.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.351.354,00	337.935.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	21.335.921,00	21.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	21.335.921,00	21.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.249.435,00	143.378.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.999.435,00	9.128.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.250.000,00	134.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.876.069,00	180.137.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.299.396,00	96.887.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.576.673,00	83.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	449.996.726,00	448.382.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	449.996.726,00	448.382.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	449.996.726,00	448.382.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.318.060.800,00	500.018.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.318.060.800,00	500.018.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.318.060.800,00	500.018.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.023.416.691,00	2.659.577.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.367.749.502,00	2.225.881.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.968.691.472,00	1.854.982.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.921.954.159,00	1.810.006.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.282.100,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.695.213,00	17.986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.996.058,00	160.125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.907.900,00	4.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.088.158,00	155.759.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.404.080,00	124.753.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.537.910,00	5.240.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.402.384,00	55.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.463.786,00	64.402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.657.892,00	86.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.657.892,00	86.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	355.915.639,00	278.207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.031.000,00	12.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.031.000,00	12.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.050.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.050.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.834.639,00	173.622.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	173.754.639,00	173.622.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.916.350,00	74.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.916.350,00	74.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75.916.350,00	74.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	223.835.200,00	80.679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	48.786.200,00	2.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	48.786.200,00	2.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	134.199.000,00	78.298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	134.199.000,00	78.298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	40.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.122.531.626,00	4.032.566.636,00	19.124.790,00	15.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan	4.122.531.626,00	4.032.566.636,00	19.124.790,00	15.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.953.688.979,00	2.902.755.657,00	19.124.790,00	15.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.549.792.358,00	2.510.109.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.958.398,00	2.417.668.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.246.730,00	9.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.987.230,00	13.636.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.282.368,00	267.607.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.092.460,00	2.763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.189.908,00	264.844.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	19.124.790,00	15.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	19.124.790,00	15.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.068.636,00	13.068.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.068.636,00	13.068.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.545.617,00	111.969.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.296.867,00	75.096.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.394.050,00	6.113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.854.700,00	30.759.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.093.775.067,00	1.083.943.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	494.495.628,00	493.251.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	403.481.854,00	403.288.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.976.332,00	29.755.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	17.021.568,00	16.523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	44.015.874,00	43.684.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	375.232.377,00	375.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	375.232.377,00	375.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	224.047.062,00	215.547.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	224.047.062,00	215.547.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	14.442.630,00	11.921.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.064.245,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.064.245,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.378.385,00	4.721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5.378.385,00	4.721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	60.624.950,00	33.945.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	60.624.950,00	33.945.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3.209.046,00	2.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3.014.274,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	49.998.728,00	25.651.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4.402.902,00	3.940.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	3.306.226.897,00	3.247.173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.693.476.863,00	2.643.379.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.131.366.209,00	2.088.259.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.009.759.766,00	1.967.005.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.850.000,00	95.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.705.909,00	9.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.050.534,00	15.831.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.650.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.650.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.407.200,00	287.870.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.407.200,00	287.870.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.397.666,00	6.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.397.666,00	6.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.655.788,00	246.122.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.421.288,00	173.646.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.634.500,00	6.475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.600.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	67.503.640,00	66.998.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	67.503.640,00	66.998.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	67.503.640,00	66.998.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	278.500.000,00	273.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	278.500.000,00	273.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	278.500.000,00	273.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	266.746.394,00	263.700.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	266.746.394,00	263.700.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	266.746.394,00	263.700.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.342.079.277,00	4.176.414.079,00	165.254.780,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.342.079.277,00	4.176.414.079,00	165.254.780,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.952.454.006,00	3.841.273.279,00	165.254.780,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.136.215.964,00	3.092.097.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.081.775.737,00	3.044.131.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.650.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.296.502,00	10.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.493.725,00	15.773.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.178.831,00	388.491.224,00	165.254.780,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	165.254.780,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.184.359,00	2.345.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.063.040,00	4.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	23.372.478,00	18.633.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.558.954,00	363.197.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.648.854,00	159.468.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.758.954,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.639.900,00	53.818.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.250.000,00	104.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.410.357,00	201.215.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.045.157,00	190.585.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.365.200,00	10.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	353.198.384,00	300.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	284.839.430,00	233.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	284.839.430,00	233.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	68.358.954,00	66.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	68.358.954,00	66.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	25.008.954,00	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	25.008.954,00	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	25.008.954,00	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11.417.933,00	9.954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	11.417.933,00	9.954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.417.933,00	9.954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.965.481.732,00	7.570.096.642,00	199.282.170,00	197.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.965.481.732,00	7.570.096.642,00	199.282.170,00	197.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.180.601.869,00	5.823.134.350,00	199.282.170,00	197.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.774.330.233,00	5.436.653.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.709.681.329,00	5.382.137.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.700.000,00	24.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.515.688,00	16.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.433.216,00	13.743.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.513.571,00	210.368.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.946.494,00	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.567.077,00	206.696.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	199.282.170,00	197.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	199.282.170,00	197.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.242.122,00	115.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.492.622,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.515.943,00	60.461.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.599.861,00	58.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.916.082,00	1.609.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	80.065.748,00	78.824.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	80.065.748,00	78.824.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	59.787.486,00	59.015.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.278.262,00	19.808.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	601.560.654,00	587.543.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	601.560.654,00	587.543.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	26.971.323,00	25.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	188.475.994,00	182.239.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	114.416.110,00	113.350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	51.448.793,00	50.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	62.256.363,00	60.590.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	157.992.071,00	155.157.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.103.253.461,00	1.080.594.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.103.253.461,00	1.080.594.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	166.983.557,00	149.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	936.269.904,00	931.533.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.203.815.462,00	6.772.489.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.488.389.269,00	2.311.280.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.159.726.768,00	2.013.236.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.115.389.348,00	1.970.748.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.700.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.437.000,00	10.141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.200.420,00	6.696.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.251.999,00	168.026.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.251.999,00	168.026.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.160.502,00	81.767.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.160.502,00	81.767.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.200.000,00	298.427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	301.200.000,00	298.427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	60.000.000,00	58.227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.841.626.193,00	2.593.715.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.424.000.000,00	1.352.409.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	76.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	819.000.000,00	788.484.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	225.000.000,00	224.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	82.555.000,00	82.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	17.445.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	173.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	606.000.000,00	579.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	606.000.000,00	579.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	459.876.193,00	318.997.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000,00	22.498.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	415.453.000,00	278.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.673.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.250.000,00	18.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	351.750.000,00	342.349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	10.750.000,00	6.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	341.000.000,00	335.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.572.600.000,00	1.569.065.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.572.600.000,00	1.569.065.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	296.465.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	5.399.969.723,00	5.286.936.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.331.757.723,00	5.236.650.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.153.561.195,00	3.098.322.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.086.080.517,00	3.031.787.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.880.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.326.872,00	20.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.273.806,00	16.107.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.456.538,00	255.796.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.707.800,00	16.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.748.738,00	239.766.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	987.184.200,00	972.963.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.651.400,00	14.063.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	968.532.800,00	958.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.555.789,00	909.567.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.247.911,00	69.236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	848.307.878,00	840.331.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	68.212.000,00	50.286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68.212.000,00	50.286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68.212.000,00	50.286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.241.544.330,00	8.137.320.158,00	213.660.000,00	206.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.241.544.330,00	8.137.320.158,00	213.660.000,00	206.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.080.085.531,00	3.007.599.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.217.052.806,00	2.195.008.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.146.328.251,00	2.125.527.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.358.735,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.360.004,00	29.826.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.005.816,00	14.004.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.969.011,00	447.639.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.778.581,00	11.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.190.430,00	436.419.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.100.903,00	273.069.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.142.168,00	79.319.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.958.735,00	193.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.962.811,00	91.882.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.962.811,00	81.882.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.120.738.696,00	3.105.220.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.120.738.696,00	3.105.220.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.000.999.318,00	2.987.591.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	58.670.000,00	57.848.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	61.069.378,00	59.781.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.040.720.103,00	2.024.500.000,00	213.660.000,00	206.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.500.277.056,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.500.277.056,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	540.443.047,00	524.500.000,00	213.660.000,00	206.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4.482.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.751.577,00	2.500.000,00	213.660.000,00	206.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	531.208.735,00	522.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		Dinas Koperasi dan UKM	2.977.595.935,00	2.903.686.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.335.964.309,00	2.272.287.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.631.344,00	13.199.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.631.344,00	13.199.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.003.106.359,00	1.947.076.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.923.347.950,00	1.867.560.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.710.000,00	71.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.048.409,00	7.806.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	784.785,00	726.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	784.785,00	726.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.133.526,00	218.069.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.008.748,00	2.385.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.738.208,00	2.604.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.680.132,00	14.097.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.216.660,00	10.030.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.489.778,00	188.950.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	591.630,00	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	591.630,00	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.629.657,00	6.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.629.657,00	6.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.087.008,00	86.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.685.542,00	81.085.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.401.466,00	5.008.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	15.278.969,00	13.748.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.278.969,00	13.748.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.278.969,00	13.748.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	9.783.822,00	8.924.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.783.822,00	8.924.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.783.822,00	8.924.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.567.414,00	9.612.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.567.414,00	9.612.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	10.567.414,00	9.612.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	606.001.421,00	599.113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	606.001.421,00	599.113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	508.636.421,00	502.243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	97.365.000,00	96.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.984.940.597,00	3.788.855.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.338.624.679,00	3.239.715.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.800.541.722,00	2.741.429.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.720.138.675,00	2.672.029.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.030.000,00	28.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.978.145,00	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.394.902,00	30.760.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.430.473,00	20.420.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.430.473,00	20.420.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.993.932,00	156.410.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.956.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.036.978,00	156.410.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.006.145,00	181.801.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.465.991,00	39.676.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.540.154,00	142.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.652.407,00	139.654.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.315.980,00	132.211.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.368.631,00	5.819.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.967.796,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	21.731.931,00	21.215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.731.931,00	21.215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	21.731.931,00	21.215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	83.761.290,00	83.041.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83.761.290,00	83.041.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	83.761.290,00	83.041.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	140.505.697,00	130.497.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	140.505.697,00	130.497.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	39.426.000,00	32.212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	101.079.697,00	98.284.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	400.317.000,00	314.384.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.317.000,00	314.384.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60.047.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	220.175.000,00	217.786.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	120.095.000,00	95.397.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.919.954.337,00	2.831.477.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.308.187.553,00	2.240.321.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.038.576,00	1.791.833.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.746.069.187,00	1.706.989.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.900.000,00	53.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.836.167,00	10.559.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.233.221,00	20.434.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.509.298,00	299.310.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.049.274,00	21.106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.460.024,00	278.204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.837.262,00	10.890.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.769.392,00	4.613.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.067.870,00	6.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.802.417,00	138.287.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.602.020,00	79.463.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.200.397,00	58.823.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	215.876.146,00	211.008.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	215.876.146,00	211.008.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	215.876.146,00	211.008.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	195.890.638,00	188.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	121.761.011,00	118.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	121.761.011,00	118.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.129.627,00	70.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	74.129.627,00	70.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	191.963.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	191.963.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	200.000.000,00	191.963.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.592.615,00	39.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	40.592.615,00	39.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	40.592.615,00	39.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.592.615,00	39.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.592.615,00	39.814.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	61.115.246,00	60.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	61.115.246,00	60.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	61.115.246,00	60.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	61.115.246,00	60.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.115.246,00	60.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	198.153.018,00	187.828.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	198.153.018,00	187.828.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	198.153.018,00	187.828.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	133.152.418,00	132.828.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	133.152.418,00	132.828.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.000.600,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	65.000.600,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.409.987.536,00	2.355.477.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.399.937.536,00	2.345.477.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.850.986.729,00	1.809.543.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.785.811.553,00	1.746.268.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.336.395,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.635.490,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.203.291,00	36.995.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.450.403,00	215.097.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.450.403,00	215.097.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.741.620,00	183.401.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.858.420,00	23.651.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.883.200,00	159.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.758.784,00	137.435.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.943.500,00	125.845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.815.284,00	11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.050.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.050.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	10.050.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41.327.594.003,00	36.431.675.709,00	514.581.096,00	490.817.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	4.298.392.899,00	3.197.407.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.404.218,00	3.002.020.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.489.577.595,00	2.424.705.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.418.618.585,00	2.355.274.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.010.000,00	30.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.951.534,00	11.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.997.476,00	26.776.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.178.000,00	305.810.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.400.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.778.000,00	304.450.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.130.284,00	163.832.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.610.000,00	4.515.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.520.284,00	159.316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.518.339,00	107.671.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.518.339,00	107.671.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	868.050.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	868.050.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	868.050.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	325.237.500,00	185.359.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	325.237.500,00	185.359.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	143.050.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	182.187.500,00	182.059.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.701.181,00	3.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.701.181,00	3.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.701.181,00	3.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.543.622.328,00	2.462.017.364,00	15.168.816,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.543.622.328,00	2.462.017.364,00	15.168.816,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.456.230.074,00	2.375.457.250,00	15.168.816,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.790.538.496,00	1.740.348.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.702.908.769,00	1.656.634.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.338.358,00	15.834.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.511.369,00	37.099.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.260.832,00	404.617.800,00	15.168.816,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	7.888.770,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	7.280.046,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.454.832,00	10.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.806.000,00	393.634.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.667.500,00	133.677.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.417.500,00	17.427.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.250.000,00	116.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.763.246,00	96.813.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.399.460,00	71.319.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.363.786,00	15.859.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	87.392.254,00	86.560.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12.015.900,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12.015.900,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.376.354,00	74.560.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.376.354,00	74.560.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	30.264.392.598,00	26.604.059.360,00	499.412.280,00	481.817.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	23.740.060.132,00	20.574.235.113,00	499.412.280,00	481.817.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.212.519.513,00	12.637.307.025,00	499.412.280,00	481.817.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.815.129.526,00	11.360.628.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.675.903.118,00	11.237.790.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.610.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.877.325,00	15.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.739.083,00	64.257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.189.379,00	432.937.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.088.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.534.477,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.280.293,00	7.657.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.286.107,00	424.571.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	482.523.200,00	465.412.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	77.373.660,00	66.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	268.798.660,00	267.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	136.350.880,00	131.328.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.086.954,00	620.168.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.608.477,00	34.918.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.478.477,00	585.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.113.654,00	223.573.105,00	16.889.080,00	16.405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.002.816,00	63.898.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.932.361,00	135.784.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.178.477,00	23.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	16.889.080,00	16.405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.088.845.474,00	1.919.432.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.037.490.873,00	942.600.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.037.490.873,00	942.600.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.016.563.825,00	950.532.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	808.530.000,00	791.832.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	92.393.825,00	57.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	115.640.000,00	101.314.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.790.776,00	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	34.790.776,00	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.443.910.336,00	3.233.195.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	91.108.000,00	76.430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	91.108.000,00	76.430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.352.802.336,00	3.156.764.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.247.853.528,00	2.579.420.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.104.948.808,00	577.344.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	41.788.000,00	30.154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	41.788.000,00	30.154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.788.000,00	30.154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.951.793.849,00	1.913.516.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2.951.793.849,00	1.913.516.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	248.038.099,00	61.203.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2.703.755.750,00	1.852.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.001.202.960,00	840.629.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.001.202.960,00	840.629.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	836.506.103,00	682.416.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	164.696.857,00	158.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000		Dinas Perkebunan	6.524.332.466,00	6.029.824.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.516.821.948,00	2.407.745.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.929.013.414,00	1.884.640.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.956.103,00	1.625.325.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.400.000,00	199.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.632.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.025.311,00	49.614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.699,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	189.699,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.002.119,00	384.025.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.974.996,00	9.127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.011.320,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.015.803,00	370.648.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.905.727,00	12.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.905.727,00	12.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.710.989,00	126.264.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.495.107,00	114.727.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.215.882,00	11.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.088.768.300,00	1.051.433.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	232.477.800,00	223.505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	232.477.800,00	223.505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	856.290.500,00	827.928.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	856.290.500,00	827.928.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	223.665.916,00	189.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	223.665.916,00	189.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	223.665.916,00	189.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.096.283.208,00	919.787.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.096.283.208,00	919.787.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.096.283.208,00	919.787.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	35.117.610,00	33.392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perdagangan dan ESDM	35.117.610,00	33.392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	35.117.610,00	33.392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.117.610,00	33.392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.487.265,00	17.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.630.345,00	15.801.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perdagangan dan ESDM	3.838.127.634,00	3.789.093.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.381.995.782,00	3.344.192.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.019.556,00	2.540.659.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.487.729.504,00	2.460.199.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.640.000,00	45.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.677.319,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.972.733,00	17.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.559.888,00	241.443.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.552.663,00	6.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.837.418,00	17.375.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.169.807,00	217.880.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.145.366,00	463.899.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.546.680,00	21.455.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	446.598.686,00	442.443.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.270.972,00	98.190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.270.972,00	98.190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.063.937,00	33.520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	15.791.919,00	15.009.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.791.919,00	15.009.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.785.927,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.785.927,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	2.707.269,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	2.707.269,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8.778.822,00	8.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8.778.822,00	8.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	8.551.000,00	8.465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	8.551.000,00	8.465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.551.000,00	8.465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	77.209.347,00	76.857.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.834.010,00	2.783.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2.834.010,00	2.783.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	65.358.957,00	65.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	65.358.957,00	65.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.016.380,00	8.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.016.380,00	8.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	200.731.788,00	193.869.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.731.788,00	193.869.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	116.525.285,00	115.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	79.228.503,00	73.213.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2.414.000,00	2.322.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	2.564.000,00	2.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	127.423.826,00	125.251.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127.423.826,00	125.251.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59.451.068,00	57.580.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	67.972.758,00	67.671.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	7.151.954,00	6.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7.151.954,00	6.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7.151.954,00	6.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	347.940.933,00	345.705.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000		Dinas Perdagangan dan ESDM	347.940.933,00	345.705.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	308.410.439,00	307.918.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	308.410.439,00	307.918.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	32.865.480,00	32.827.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	275.544.959,00	275.090.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	39.530.494,00	37.787.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	39.530.494,00	37.787.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.29.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	39.530.494,00	37.787.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	78.228.474.238,00	72.454.759.206,00	1.546.320.084,00	1.390.284.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	39.969.650.297,00	38.104.389.065,00	541.936.282,00	510.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	14.487.814.207,00	13.940.614.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.487.814.207,00	13.940.614.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.325.907.145,00	13.940.614.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.325.907.145,00	13.940.614.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	161.907.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	161.907.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		Bagian Tata Pemerintahan	750.637.091,00	747.061.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	750.637.091,00	747.061.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	704.456.611,00	702.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	23.052.667,00	22.736.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	331.015.409,00	330.322.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	350.388.535,00	348.945.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	46.180.480,00	45.057.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	21.823.658,00	21.301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	24.356.822,00	23.755.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Hukum	1.011.385.157,00	999.580.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.011.385.157,00	999.580.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.011.385.157,00	999.580.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	406.472.360,00	400.822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	429.366.687,00	424.338.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	175.546.110,00	174.419.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Pembangunan	232.305.060,00	231.882.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	232.305.060,00	231.882.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	232.305.060,00	231.882.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	57.837.029,00	57.749.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	122.090.071,00	121.941.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.377.960,00	52.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	376.759.509,00	371.302.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	376.759.509,00	371.302.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	376.759.509,00	371.302.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	233.849.981,00	231.117.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	123.815.708,00	122.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	19.093.820,00	18.151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.415.725.455,00	4.194.437.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.415.725.455,00	4.194.437.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.415.725.455,00	4.194.437.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	715.068.328,00	642.018.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.957.725.280,00	2.855.647.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	742.931.847,00	696.771.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		Bagian Organisasi	286.523.166,00	280.292.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	286.523.166,00	280.292.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	286.523.166,00	280.292.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	83.366.616,00	81.580.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	53.803.195,00	51.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	60.967.030,00	60.650.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	86.929.325,00	86.269.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.006.942.633,00	944.640.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.006.942.633,00	944.640.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.497.969,00	64.512.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.733.381,00	19.165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.830.194,00	18.699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.538.020,00	20.149.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.106.889,00	3.478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.289.485,00	3.020.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	351.606.280,00	319.866.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.818.251,00	118.594.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.537.647,00	153.288.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.228.060,00	40.456.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.022.322,00	7.527.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	581.838.384,00	560.261.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.256.431,00	3.037.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	382.043.650,00	362.979.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	71.789.953,00	71.478.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.248.482,00	79.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.732.748,00	41.572.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.767.120,00	1.683.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Umum	14.225.620.387,00	13.277.650.124,00	541.936.282,00	510.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.225.620.387,00	13.277.650.124,00	541.936.282,00	510.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.999.000,00	126.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	117.049.500,00	104.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.949.500,00	22.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.439.871.688,00	2.033.792.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156.836.347,00	156.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.669.741,00	232.913.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.666.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.146.469.600,00	775.170.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	874.230.000,00	863.256.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.155.000,00	66.980.000,00	525.826.282,00	510.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	67.155.000,00	66.980.000,00	239.449.200,00	237.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	286.377.082,00	272.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.550.610.000,00	7.277.027.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	702.960.000,00	592.497.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.400.000,00	124.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.679.250.000,00	6.550.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.383.460.339,00	2.214.439.331,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	751.362.500,00	638.462.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	987.042.949,00	955.066.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.074.240,00	98.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.980.650,00	522.836.657,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	413.493.500,00	386.431.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	145.909.500,00	143.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27.584.000,00	2.801.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.231.030.860,00	1.172.548.988,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.231.030.860,00	1.172.548.988,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.832.095.271,00	2.774.184.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.832.095.271,00	2.774.184.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.832.095.271,00	2.774.184.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	532.296.742,00	516.220.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.104.745.255,00	2.102.072.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	195.053.274,00	155.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010		Bagian Perekonomian	343.842.361,00	342.742.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	343.842.361,00	342.742.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	286.343.128,00	285.639.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	32.725.339,00	32.663.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	54.735.740,00	54.309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	62.230.000,00	62.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	136.652.049,00	136.436.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	57.499.233,00	57.102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	17.176.192,00	17.170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	28.833.984,00	28.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	11.489.057,00	11.116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	38.258.823.941,00	34.350.370.141,00	1.004.383.801,00	880.099.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000		Sekretariat DPRD	38.258.823.941,00	34.350.370.141,00	1.004.383.801,00	880.099.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.576.457.317,00	19.756.778.466,00	1.004.383.801,00	880.099.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.258.379.667,00	3.992.058.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.043.481.769,00	2.910.803.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	943.560.000,00	840.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.244.466,00	14.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	252.093.432,00	226.175.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	487.222.534,00	395.488.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	487.222.534,00	395.488.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	851.569.381,00	687.180.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	215.785.110,00	193.026.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.784.271,00	494.153.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.086.500,00	79.550.000,00	1.004.383.801,00	880.099.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	80.086.500,00	79.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	690.223.801,00	680.597.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	314.160.000,00	199.502.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.742.828,00	142.606.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.742.828,00	136.006.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.236.561.874,00	1.057.944.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	797.936.299,00	669.887.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.855.000,00	32.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	404.770.575,00	355.165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.013.594.532,00	12.232.406.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.959.694.532,00	11.380.006.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	858.900.000,00	852.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.471.300.000,00	1.169.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16.0002	Fasilitas Fraksi DPRD	780.000.000,00	525.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	691.300.000,00	644.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.682.366.624,00	14.593.591.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.485.789.929,00	1.235.670.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.485.789.929,00	1.235.670.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.087.798.363,00	3.615.507.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	734.060.613,00	576.484.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.399.245.000,00	2.127.432.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	540.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	176.364.000,00	170.505.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	238.128.750,00	231.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	11.108.778.332,00	9.742.413.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.04.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.108.778.332,00	9.742.413.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	30.100.655.717,00	29.103.365.530,00	169.416.423,00	160.050.000,00	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31
5.01			PERENCANAAN	7.363.699.938,00	7.150.347.470,00	77.759.078,00	76.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.363.699.938,00	7.150.347.470,00	77.759.078,00	76.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.067.990.192,00	4.954.974.417,00	77.759.078,00	76.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.935.352.107,00	3.834.420.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.845.109.584,00	3.744.605.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.700.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.279.759,00	22.003.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.262.764,00	42.160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.192.224,00	776.855.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.268.181,00	10.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	23.972.137,00	22.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.951.906,00	743.508.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	77.759.078,00	76.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	77.759.078,00	76.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.775.000,00	16.174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.775.000,00	16.174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.670.861,00	327.523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.527.344,00	202.953.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00	22.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.143.517,00	102.050.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.055.957.019,00	992.432.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	605.748.705,00	556.103.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	289.465.740,00	275.183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.656.556,00	35.018.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	16.886.430,00	16.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	83.241.417,00	82.048.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	33.305.550,00	33.016.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	147.193.012,00	114.284.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37.263.737,00	33.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	37.263.737,00	33.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	412.944.577,00	403.217.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	256.073.494,00	251.635.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	156.871.083,00	151.582.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.239.752.727,00	1.202.941.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	481.981.333,00	457.577.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	286.522.827,00	266.698.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.273.908,00	94.138.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	29.272.083,00	28.919.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.912.515,00	67.821.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	388.931.283,00	381.325.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	129.253.375,00	128.004.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	46.217.103,00	45.810.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.030.956,00	120.832.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	90.429.849,00	86.678.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	368.840.111,00	364.037.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.138.472,00	68.532.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	130.594.586,00	128.197.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	168.107.053,00	167.307.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	16.249.107.633,00	15.839.178.770,00	72.125.024,00	64.300.000,00	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	16.249.107.633,00	15.839.178.770,00	72.125.024,00	64.300.000,00	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.455.118.507,00	10.126.568.905,00	72.125.024,00	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.336.404.630,00	8.077.828.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.135.505.413,00	7.892.371.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.180.000,00	71.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.739.582,00	33.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	81.979.635,00	80.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	490.990.322,00	479.332.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	101.232.000,00	97.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	389.758.322,00	382.082.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	858.677.223,00	853.901.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.333.109,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.419.745,00	102.195.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.924.369,00	750.281.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	72.125.024,00	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	6.424.680,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	65.700.344,00	58.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.906.954,00	211.291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.528.477,00	57.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.378.477,00	154.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.139.378,00	504.213.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.832.395,00	77.957.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.483.594,00	270.472.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.656.250,00	129.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.167.139,00	26.324.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.164.353.894,00	3.116.780.683,00	0,00	0,00	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.596.695.263,00	1.563.383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	323.503.561,00	317.109.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	179.494.391,00	177.822.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	715.183.203,00	691.024.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	378.514.108,00	377.427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	737.534.064,00	728.791.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47.905.658,00	43.894.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	299.972.019,00	298.793.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	389.656.387,00	386.103.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	829.748.904,00	824.605.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	210.086.481,00	209.447.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	482.975.785,00	482.065.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	136.686.638,00	133.092.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	375.663,00	0,00	0,00	0,00	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	128.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.470.977.400,00	225.294.007.991,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	118.709,00	0,00	0,00	0,00	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	128.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.966.301,00	5.790.020.356,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.346.051.316,00	1.344.152.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.346.051.316,00	1.344.152.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	24.633.302,00	24.208.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	14.671.710,00	14.641.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	396.073.690,00	395.972.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	845.085.846,00	844.426.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	65.586.768,00	64.902.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.283.583.915,00	1.251.677.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.283.583.915,00	1.251.677.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	395.854.364,00	393.975.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69.357.716,00	67.467.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	642.806.635,00	628.273.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	175.565.200,00	161.960.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	6.093.329.152,00	5.764.052.144,00	19.532.321,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.093.329.152,00	5.764.052.144,00	19.532.321,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.234.492.687,00	4.009.855.173,00	19.532.321,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.187.985.484,00	3.005.388.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.108.129.610,00	2.931.679.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.512.483,00	20.713.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.693.391,00	27.346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.013.155,00	61.322.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.013.155,00	61.322.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.346.088,00	632.017.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.458.960,00	6.361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.887.128,00	625.656.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	19.532.321,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	19.532.321,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.112.170,00	147.781.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.362.170,00	38.031.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.750.000,00	109.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.035.790,00	163.344.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.999.002,00	154.515.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.036.788,00	8.828.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.858.836.465,00	1.754.196.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	879.090.410,00	810.417.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	204.763.294,00	199.072.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	299.735.900,00	274.627.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	46.363.281,00	46.163.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	85.258.399,00	71.550.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	141.596.536,00	126.057.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	101.373.000,00	92.946.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	379.523.038,00	376.340.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	37.992.566,00	37.376.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	341.530.472,00	338.963.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	470.915.885,00	468.717.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.043.091,00	169.755.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	299.872.794,00	298.961.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	129.307.132,00	98.722.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	65.420.430,00	64.084.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	63.886.702,00	34.638.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	50.496.465,00	42.343.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50.496.465,00	42.343.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.496.465,00	42.343.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	50.496.465,00	42.343.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	50.496.465,00	42.343.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	344.022.529,00	307.443.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	344.022.529,00	307.443.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	344.022.529,00	307.443.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	116.817.180,00	112.471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	116.817.180,00	112.471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	227.205.349,00	194.972.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	145.946.101,00	129.527.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	81.259.248,00	65.444.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.766.873.390,00	12.712.388.812,00	1.070.990.571,00	906.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	14.766.873.390,00	12.712.388.812,00	1.070.990.571,00	906.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000		Inspektorat Daerah	14.766.873.390,00	12.712.388.812,00	1.070.990.571,00	906.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.393.718.594,00	9.816.341.823,00	1.070.990.571,00	906.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.168.316.653,00	7.067.883.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.130.286.653,00	7.030.803.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.860.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.170.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.638.200.198,00	1.518.567.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.638.200.198,00	1.518.567.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.228.539,00	731.661.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.342.600,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.886.925,00	4.048.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	119.396.262,00	115.954.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.528.641,00	49.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665.074.111,00	518.831.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.070.990.571,00	906.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	818.625.000,00	662.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	252.365.571,00	243.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.831.872,00	189.460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.831.872,00	33.460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.141.332,00	308.770.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.315.622,00	96.444.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.556.110,00	23.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.269.600,00	188.803.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.871.215.270,00	2.516.067.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.334.775.944,00	2.222.868.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	666.501.000,00	373.839.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	219.500.000,00	212.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	482.100.000,00	417.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	205.212.000,00	46.892.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	221.741.686,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.241.533.632,00	903.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	298.187.626,00	267.005.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	536.439.326,00	293.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	9.861.326,00	2.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	526.578.000,00	290.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	501.939.526,00	379.979.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	501.939.526,00	379.979.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.06.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	501.939.526,00	379.979.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	33.281.684.183,00	32.004.812.466,00	612.150.539,00	600.885.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	33.281.684.183,00	32.004.812.466,00	612.150.539,00	600.885.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Sang Tombolang	1.924.730.877,00	1.802.119.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.906.998.277,00	1.785.256.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.715.951.785,00	1.608.041.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.923.079,00	1.563.699.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.784.140,00	19.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.604.000,00	8.336.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.640.566,00	16.223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.176.898,00	81.480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.700.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.476.898,00	74.680.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.424.000,00	5.288.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.424.000,00	5.288.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.445.594,00	90.445.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.025.594,00	71.046.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.420.000,00	19.399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.732.600,00	16.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.732.600,00	16.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.732.600,00	16.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Dumoga Timur	2.578.402.942,00	2.515.227.881,00	200.000.000,00	199.893.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.027.889.720,00	1.966.703.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.198.552,00	1.767.697.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.758.267.148,00	1.719.472.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.090.000,00	23.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.604.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.237.404,00	17.454.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.269.000,00	101.234.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.965.000,00	4.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.304.000,00	96.897.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.002.000,00	5.953.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.002.000,00	5.953.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.420.168,00	91.818.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.556.000,00	53.401.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.120.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.744.168,00	33.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	550.513.222,00	548.524.662,00	200.000.000,00	199.893.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.587.880,00	9.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.587.880,00	9.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	539.925.342,00	539.073.162,00	200.000.000,00	199.893.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	200.000.000,00	199.893.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	539.925.342,00	539.073.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Dumoga Barat	1.868.687.349,00	1.795.970.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.858.952.640,00	1.786.570.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.678.103.373,00	1.612.433.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.237.808,00	1.574.857.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.013.993,00	8.963.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.141.572,00	8.902.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.828.983,00	78.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.766.983,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
				76.062.000,00	76.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.499.020,00	7.080.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.499.020,00	7.080.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.521.264,00	88.503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.508.166,00	58.503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.013.098,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.734.709,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.734.709,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.734.709,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		Kecamatan Bilalang	2.210.404.227,00	2.148.566.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.191.600.227,00	2.129.846.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.983.262.576,00	1.937.071.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.938.644.668,00	1.897.763.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.681.222,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.176.686,00	13.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.640.151,00	105.305.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.284.681,00	5.398.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.182.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
				101.172.750,00	99.907.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.147.500,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.147.500,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.550.000,00	80.269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.510.000,00	50.269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.040.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.804.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.804.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.804.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000		Kecamatan Dumoga	1.694.949.955,00	1.600.353.839,00	23.865.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.680.609.199,00	1.586.013.083,00	23.865.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.504.123.723,00	1.425.272.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.467.001.518,00	1.388.719.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.940.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.808.477,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.373.728,00	10.272.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.571.077,00	83.090.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.645.077,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.926.000,00	78.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	23.865.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	23.865.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.471.312,00	6.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.471.312,00	6.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.443.087,00	70.977.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.312.761,00	47.096.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.981.812,00	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.148.514,00	21.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.340.756,00	14.340.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.340.756,00	14.340.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.340.756,00	14.340.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000		Kecamatan Dumoga Tengah	1.633.270.805,00	1.574.167.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.620.713.788,00	1.561.643.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.340.501.724,00	1.291.245.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.261.082.530,00	1.215.920.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.971.639,00	10.912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.687.555,00	44.702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.295.670,00	160.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.505.405,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.772.556,00	3.903.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.405.000,00	15.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.612.709,00	140.353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.150.000,00	11.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.150.000,00	11.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.766.394,00	98.136.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.594.994,00	67.461.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.700,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.070.700,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.557.017,00	12.524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.557.017,00	12.524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.557.017,00	12.524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000		Kecamatan Dumoga Tenggara	1.433.454.438,00	1.374.825.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.422.978.738,00	1.364.615.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.237.362.738,00	1.183.646.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.217.937.058,00	1.167.337.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.652.385,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.773.295,00	10.069.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.566.000,00	65.425.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.566.000,00	65.425.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.750.000,00	35.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.730.000,00	8.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.020.000,00	26.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.300.000,00	80.252.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000,00	50.252.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.060.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.475.700,00	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.475.700,00	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.475.700,00	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000		Kecamatan Bolaang Timur	1.469.809.901,00	1.405.266.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.458.407.901,00	1.394.966.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.256.780.011,00	1.201.669.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.209.437.006,00	1.157.064.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.980.298,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.773.400,00	13.621.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.589.307,00	11.274.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.472.249,00	101.259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.281.977,00	3.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.098.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.065.245,00	9.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.026.792,00	88.929.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.785.379,00	8.194.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.785.379,00	8.194.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.370.262,00	83.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.208.162,00	53.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.162.100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.402.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.402.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.402.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		Kecamatan Poigar	2.127.778.878,00	2.012.799.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.114.173.608,00	2.001.574.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.888.555.158,00	1.794.577.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.541.773,00	1.757.870.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.957.200,00	17.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.684.129,00	8.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.372.056,00	9.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.697.757,00	120.387.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.359.757,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.338.000,00	113.037.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.851.915,00	4.448.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.851.915,00	4.448.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.068.778,00	82.160.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.744.808,00	57.810.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.729.125,00	4.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.594.845,00	19.944.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.605.270,00	11.224.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.605.270,00	11.224.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.605.270,00	11.224.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000		Kecamatan Lolayan	3.220.208.683,00	3.083.601.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.206.393.983,00	3.070.404.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.960.873.860,00	2.837.659.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.861.122,00	2.800.930.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.860.000,00	18.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.005.122,00	7.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.147.616,00	10.744.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.598.235,00	97.345.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.658.235,00	13.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.940.000,00	83.915.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.050.735,00	83.035.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.710.735,00	8.785.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.340.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.871.153,00	52.364.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.857.399,00	47.199.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.933.312,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.080.442,00	2.855.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.814.700,00	13.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.814.700,00	13.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.814.700,00	13.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000		Kecamatan Bolaang	3.113.621.822,00	3.014.351.335,00	200.000.000,00	192.191.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.595.582.063,00	2.513.051.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.281.361.187,00	2.203.561.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.229.845.426,00	2.154.052.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.270.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.768.477,00	8.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.477.284,00	15.348.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.858.324,00	134.773.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.092.227,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.878.477,00	15.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.887.620,00	115.528.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.159.454,00	115.836.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.780.977,00	11.586.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.378.477,00	104.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.203.098,00	58.879.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.640.000,00	50.034.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.563.098,00	8.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	502.549.840,00	486.777.300,00	200.000.000,00	192.191.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502.549.840,00	486.777.300,00	200.000.000,00	192.191.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.752.600,00	0,00	200.000.000,00	192.191.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	494.797.240,00	486.777.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.489.919,00	14.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.489.919,00	14.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.25.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.489.919,00	14.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000		Kecamatan Dumoga Utara	1.917.597.062,00	1.884.536.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.900.272.890,00	1.867.701.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.643.284.526,00	1.613.246.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.561.199.898,00	1.533.946.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.093.471,00	12.435.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.231.157,00	47.154.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.195.290,00	149.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.118.426,00	34.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.076.864,00	115.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	10.899.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	10.899.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.793.074,00	93.599.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.746.350,00	64.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.567.760,00	5.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.478.964,00	24.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.324.172,00	16.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.324.172,00	16.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.26.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.324.172,00	16.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000		Kecamatan Lolak	1.722.079.772,00	1.596.889.564,00	53.376.805,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.705.412.567,00	1.580.269.564,00	53.376.805,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.463.202.606,00	1.343.304.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.885.762,00	1.299.920.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.760.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.830.857,00	11.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.725.987,00	12.503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.460.762,00	156.031.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.667.882,00	5.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.438.875,00	19.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.354.005,00	131.244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	53.376.805,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	53.376.805,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.771.699,00	46.354.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.759.139,00	4.354.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.012.560,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.977.500,00	34.579.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.977.500,00	34.579.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.667.205,00	16.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.667.205,00	16.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.27.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.667.205,00	16.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		Kecamatan Passi Timur	3.225.819.585,00	3.147.476.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.197.301.485,00	3.119.770.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.843.980.459,00	2.768.110.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.812.634.035,00	2.737.036.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.464.521,00	7.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.071.903,00	4.871.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.323.662,00	136.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.199.662,00	9.191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.124.000,00	127.121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.700.527,00	106.812.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.790.000,00	6.910.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.910.527,00	99.902.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.296.837,00	108.533.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.727.404,00	58.721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.180.662,00	15.693.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.388.771,00	34.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.518.100,00	27.705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.518.100,00	27.705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.518.100,00	27.705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000		Kecamatan Passi Barat	3.140.867.884,00	3.048.661.953,00	134.908.734,00	133.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.115.007.884,00	3.022.801.953,00	134.908.734,00	133.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.969.070,00	2.794.634.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.819.353.068,00	2.752.049.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.499.697,00	9.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.516.305,00	11.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.036.918,00	108.102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.444.918,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.092.000,00	105.008.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	134.908.734,00	133.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	12.577.965,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	122.330.769,00	121.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.694.000,00	48.604.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.416.500,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.027.500,00	8.954.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.307.896,00	71.460.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.536.710,00	50.598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.787.400,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.983.786,00	19.091.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.60.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.961.572.141,00	66.643.916.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.876.691.120,00	2.812.033.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.144.745.064,00	2.111.354.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.053.771.004,00	2.030.037.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.850.000,00	41.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.980.999,00	17.445.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.143.060,00	22.652.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.657.000,00	533.431.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.657.000,00	533.431.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.250.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.250.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.039.056,00	70.497.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.039.056,00	70.497.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.474.538.326,00	1.428.154.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.474.538.326,00	1.428.154.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.416.945.826,00	1.392.966.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.592.500,00	35.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.793.171.800,00	61.729.203.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	61.793.171.800,00	61.729.203.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	61.769.546.800,00	61.706.853.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23.625.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	817.170.895,00	674.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	817.170.895,00	674.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	208.600.000,00	117.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	608.570.895,00	557.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	847.876.560.064,00	789.445.131.071,75	90.256.579.326,00	84.316.043.086,00	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2024



(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	83.581.224.638,64	94.240.934.188,73
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	83.580.667.558,69	92.933.552.911,73
SUBTOTAL (1-2)	557.079,95	1.307.381.277,00
SILPA/(SiKPA)	37.238.731.719,79	83.581.224.638,63
SUBTOTAL (3+4)	37.239.288.799,74	84.888.605.915,64
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(557.079,95)	(1.307.381.277,00)
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	37.238.731.719,79	83.581.224.638,64

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	931.242.731.469,49	964.193.809.311,42	-32.951.077.841,93	- 3,42
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	68.816.625.193,49	70.057.767.107,95	-1.241.141.914,46	- 1,77
7.1.01	Pajak Daerah-LO	42.208.444.873,00	48.797.560.361,00	-6.589.115.488,00	- 13,50
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	14.885.668.418,33	12.607.339.661,00	2.278.328.757,33	18,07
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.341.420.881,00	2.882.571.278,10	4.458.849.602,90	154,68
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	4.381.091.021,16	5.770.295.807,85	-1.389.204.786,69	- 24,08
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	68.816.625.193,49	70.057.767.107,95	-1.241.141.914,46	- 1,77
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	826.849.510.405,00	862.380.150.838,47	-35.530.640.433,47	- 4,12
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	780.611.376.297,00	820.459.631.545,00	-39.848.255.248,00	- 4,86
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	767.722.020.297,00	805.545.509.545,00	-37.823.489.248,00	- 4,70
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	55.317.150.000,00	49.641.697.000,00	5.675.453.000,00	11,43
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	572.634.871.063,00	534.329.126.000,00	38.305.745.063,00	7,17
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	35.123.482.574,00	113.708.772.524,00	-78.585.289.950,00	- 69,11
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	104.646.516.660,00	107.865.914.021,00	-3.219.397.361,00	- 2,98
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.02.01	DID-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	12.889.356.000,00	14.914.122.000,00	-2.024.766.000,00	- 13,58
7.2.01.06.01	Insentif Fiskal-LO	12.889.356.000,00	14.914.122.000,00	-2.024.766.000,00	- 13,58

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	820.459.631.545,00	820.459.631.545,00	20.928.224.152,00	2,55
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	46.238.134.108,00	41.920.519.293,47	4.317.614.814,53	10,30
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	46.238.134.108,00	41.920.519.293,47	4.317.614.814,53	10,30
7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	46.238.134.108,00	41.920.519.293,47	4.317.614.814,53	10,30
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	46.238.134.108,00	41.920.519.293,47	4.317.614.814,53	10,30
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	826.849.510.405,00	862.380.150.838,47	-35.530.640.433,47	- 4,12
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	35.576.595.871,00	31.755.891.365,00	3.820.704.506,00	12,03
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	27.371.613.779,00	23.368.750.667,00	4.002.863.112,00	17,13
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	8.204.982.092,00	8.387.140.698,00	-182.158.606,00	- 2,17
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	35.576.595.871,00	31.755.891.365,00	3.820.704.506,00	12,03
	JUMLAH PENDAPATAN	931.242.731.469,49	964.193.809.311,42	-32.951.077.841,93	- 3,42
8	BEBAN	960.581.754.296,10	876.407.950.424,20	84.173.803.871,90	9,60
8.1	BEBAN OPERASI	803.276.481.224,56	731.437.660.413,53	71.838.820.811,03	9,82
8.1.01	Beban Pegawai	465.637.665.924,00	411.700.345.933,00	53.937.319.991,00	13,10
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	256.497.658.479,22	276.586.816.567,67	-20.089.158.088,45	- 7,26
8.1.04	Beban Subsidi	0,00	211.500.000,00	-211.500.000,00	- 100,00
8.1.05	Beban Hibah	80.195.067.747,00	41.588.850.633,00	38.606.217.114,00	92,83
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	297.306.250,00	895.525.450,00	-598.219.200,00	- 66,80
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	648.782.824,34	454.621.829,86	194.160.994,48	42,71
	JUMLAH BEBAN OPERASI	803.276.481.224,56	731.437.660.413,53	71.838.820.811,03	9,82
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	81.276.996.824,23	73.011.274.947,67	8.265.721.876,56	11,32
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.271.196.400,23	36.570.454.970,67	3.700.741.429,56	10,12
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.345.765.905,00	11.178.046.709,00	5.167.719.196,00	46,23
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.512.240.019,00	25.049.297.008,00	-537.056.989,00	- 2,14
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	147.794.500,00	213.476.260,00	-65.681.760,00	- 30,77
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	81.276.996.824,23	73.011.274.947,67	8.265.721.876,56	11,32
8.3	BEBAN TRANSFER	74.527.225.347,31	62.665.999.000,00	11.861.226.347,31	18,93
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.790.020.356,31	5.155.999.000,00	634.021.356,31	12,30
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	68.737.204.991,00	57.510.000.000,00	11.227.204.991,00	19,52

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	74.527.225.347,31	62.665.999.000,00	11.861.226.347,31	18,93
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	1.501.050.900,00	9.293.016.063,00	-7.791.965.163,00	- 83,85
8.2.01	Beban Tidak Terduga	1.501.050.900,00	9.293.016.063,00	-7.791.965.163,00	- 83,85
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	1.501.050.900,00	9.293.016.063,00	-7.791.965.163,00	- 83,85
	JUMLAH BEBAN	960.581.754.296,10	876.407.950.424,20	84.173.803.871,90	9,60
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-29.339.022.826,61	87.785.858.887,22	-117.124.881.713,83	- 133,42
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-29.294.022.826,61	87.785.858.887,22	-117.079.881.713,83	- 133,37
	POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-29.294.022.826,61	87.785.858.887,22	-117.079.881.713,83	- 133,37

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF CALK	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.954.887.228.511,62	54.617.692.987,93
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(29.294.022.826,61)	87.785.858.887,22
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Ekuitas - Persediaan	5.6.3.1	5.860.369.491,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset tetap	5.6.3.2	6.748.553.796,00	(2.141.171.640,00)
Koreksi Ekuitas - Piutang	5.6.3.3	94.139.872,53	114.692.721,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.4	(95.631.965,04)	12,09
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.5	(60.257.019.287,58)	(70.734.664.786,04)
Koreksi Ekuitas - Kas	5.6.3.6	1.824,05	(1.307.381.277,00)
Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.7	2.158.904.884,00	(161.652.646,00)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.8	11.739.568.208,33	3.546.853.828,35
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.6.3.9	1.738.085.804,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Koreksi Nilai Pendapatan		0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Penyisihan Piutang Pajak		0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Penyisihan Piutang TGR		0,00	0,00
Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.893.580.178.312,30	71.720.228.087,55

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	9	10
1	Piutang Pajak	6.095.954.129,00	829.277.969,70	5.266.676.159,30
2	Piutang Retribusi	357.390.932,00	324.476.829,50	32.914.102,50
3	Piutang Dana Bagi Hasil	22.498.045.328,00	112.490.226,00	22.385.555.102,00
4	Piutang Lain - Lain	-		-
JUMLAH		28.951.390.389,00	1.266.245.025,20	27.685.145.363,80

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	33.640.976.672,49	79.423.136.035,64
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	4.410.000,00	25.000.000,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	0,00	10.197.500,00
6	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.4	95.518.613,25	402.016.014,00
7	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	343.133.769,67	106.449.978,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas		3.194.215.366,00	0,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.6	27.957.400,00	3.637.801.857,00
10	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
11	Piutang Pendapatan	5.3.1.1.7	2.632.738.290,00	2.247.099.368,00
12	Piutang Retribusi	5.3.1.1.8	357.390.932,00	335.519.432,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.3.1.1.9	3.463.215.839,00	0,00
14	Piutang Transfer	5.3.1.1.10	22.498.045.328,00	18.334.527.102,47
15	Piutang Lainnya	5.3.1.1.11	-	133.100.000,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(1.266.245.025,70)	(756.834.708,36)
17	Beban di bayar dimuka	5.3.1.1.13	121.396.174,86	119.395.833,33
18	Persediaan	5.3.1.1.14	13.373.782.838,74	21.663.898.743,00
19	Jumlah Aset Lancar		78.486.536.198,31	125.681.307.155,08
20				
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
22	Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
23	Pinjaman jangka panjang		0,00	0,00
24	Investasi dalam surat utang negara		0,00	0,00
25	Investasi dalam proyek pembangunan		0,00	0,00
26	Investasi non permanen lainnya		0,00	0,00
27	Jumlah Investasi nonpermanen		0,00	0,00
28				
29	Investasi permanen pemerintah daerah	5.3.1.2.1	49.745.447.752,00	47.586.542.868,00
30	Investasi Permanen lainnya		0,00	0,00
31	Jumlah Investasi Permanen		49.745.447.752,00	47.586.542.868,00
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang		49.745.447.752,00	47.586.542.868,00
33				
34	ASET TETAP	5.3.1.3		
35	Tanah	5.3.1.3.1	76.728.751.561,75	71.683.940.561,75
36	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	367.101.253.068,56	359.376.040.745,56
37	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	587.292.166.090,89	527.746.785.632,37
38	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.006.171.104.729,78	1.012.680.382.914,52
39	Aset tetap lainnya	5.3.1.3.5	6.455.204.169,00	3.666.859.669,00
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	18.872.671.146,53	12.328.445.117,73
41	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.4	(470.049.709.531,55)	(414.104.420.237,65)
42	Jumlah Aset Tetap		1.592.571.441.234,96	1.573.378.034.403,28
43				
44	DANA CADANGAN			
45	Dana Cadangan		0,00	0,00
46	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00

NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023
47				
48	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
49	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	746.252.521,00	617.152.521,00
50	Kemitraan dengan pihak ketiga		0,00	0,00
51	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	483.543.000,00	408.036.500,00
52	Aset lain-lain	5.3.1.5.3	171.954.966.511,25	201.842.334.219,26
53	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.4	3.275.531.000,00	10.900.154.000,00
54	Jumlah Aset lainnya		176.460.293.032,25	213.767.677.240,26
55				
56	JUMLAH ASET		1.897.263.718.217,52	1.960.413.561.666,62
57				
58	KEWAJIBAN	5.3.2		
59				
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	67.480.101,62	23.376.746,00
62	Utang Bunga		0,00	0,00
63	Bagian lancar utang jangka panjang		0,00	0,00
64	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.2	77.346.729,71	0,00
65	Utang Belanja	5.3.2.1.3	3.538.713.073,89	5.502.956.409,00
66	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.683.539.905,22	5.526.333.155,00
68				
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
70	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
71	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
72	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
73	JUMLAH KEWAJIBAN		3.683.539.905,22	5.526.333.155,00
74				
75	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	1.893.580.178.312,30	1.954.887.228.511,62
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.897.263.718.217,52	1.960.413.561.666,62

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 METODE LANGSUNG (Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF CALK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		572.634.871.063,00	48.618.898.979,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		139.769.999.234,00	12.504.563.525,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		169.446.159.000,00	2.882.571.278,10
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		156.511.803.000,00	5.785.099.647,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		42.074.615.882,00	800.144.624.518,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		8.204.982.092,00	167.878.910.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		789.445.131.071,75	43.669.222.997,00
Bantuan Keuangan - LRA		0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA		0,00	342.325.200,00
Dana Darurat - LRA		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA		72.062.018.763,00	8.387.140.698,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.950.149.580.105,75	1.090.213.356.842,91
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		15.409.856.633,00	409.574.045.733,00
Belanja Barang dan Jasa		36.065.291.398,00	273.338.916.141,00
Belanja Subsidi		29.905.538.055,00	211.500.000,00
Belanja Hibah		2.738.332.000,00	25.058.344.460,00
Belanja Bantuan Sosial		197.025.000,00	895.525.450,00
Belanja Tak Terduga		(46.341.935.838,90)	9.293.016.063,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		83.580.667.558,69	5.155.999.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	210.474.788.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		121.554.774.805,79	934.002.134.847,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		1.828.594.805.299,96	156.211.221.995,91
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		45.000.000,00	55.886.400,00
Jumlah Arus Kas Masuk		45.000.000,00	55.886.400,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	41.255.703.219,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		231.084.028.347,31	69.553.872.247,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.790.020.356,31	51.822.906.987,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.790.020.356,31	2.771.954.216,00
Belanja Modal Aset Lainnya		225.294.007.991,00	215.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		467.958.077.050,93	165.619.436.669,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(467.913.077.050,93)	(165.563.550.269,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	0,00

URAIAN	REF CALK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		64.146.871.045,67	58.317.848.645,00
Jumlah Arus Kas Masuk		64.146.871.045,67	58.317.848.645,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		64.102.767.690,05	58.411.866.050,00
Jumlah Arus Kas Keluar		64.102.767.690,05	58.411.866.050,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		44.103.355,62	(94.017.405,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	1.360.725.831.604,65	(9.446.345.678,09)
Saldo Awal Kas		83.604.601.384,64	94.358.328.339,73
Koreksi Silpa		(557.079,95)	(1.307.381.277,00)
Saldo Akhir Kas		1.444.329.875.909,34	83.604.601.384,64
Kas di Bendahara FKTP			
Kas Dana BOSP			
Saldo Akhir Kas	5.5.6	1.444.329.875.909,34	83.604.601.384,64

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan diperlukan informasi akuntansi. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya.

Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dan disajikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipahami oleh para pengguna, disamping itu laporan keuangan dalam penyajiannya berpedoman pada:

- **Standar Akuntansi Pemerintahan**, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP;
- **SAP Berbasis Akrua**, adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD;
- **SAP Berbasis Kas Menuju Akrua**, adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual;
- **Sistem Akuntansi Pemerintahan**, adalah rangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah;
- **Akuntabilitas**, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- **Manajemen**, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

- **Transparansi**, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan; dan
- **Keseimbangan Antargenerasi**, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan kerangka Konseptual PSAP, laporan keuangan secara umum disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas *desentralisasi* dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara spesifik tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- i. Pendapatan – LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.05/2020 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- s. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- u. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- v. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- y. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- z. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- â. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan Kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Secara umum sistematika penyusunan laporan keuangan terdiri dari:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang gambaran umum penyusunan laporan keuangan berdasarkan kerangka PSAP serta memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas dan terjadi dalam satu periode tertentu. Di samping itu memberikan gambaran umum tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

b. **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Memuat tentang beberapa kebijakan fiskal yang digunakan serta beberapa asumsi mengenai ekonomi makro dan pencapaian target hingga pada Perda APBD Perubahan.

c. **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan beserta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

d. **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN**

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

e. **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Di samping itu disajikan pula laporan keuangan dana-dana non APBD yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selang Tahun 2024.

f. **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

g. **BAB VII PENUTUP**



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang timbul.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator ekonomi makro Tahun 2024 berdasarkan Bolmong Dalam Angka yang dikeluarkan Februari 2025 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,74%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,48%
- c. Gini Ratio Sebesar 0,32%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,29%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,33%; dan
- f. Tingkat Inflasi 0,87%.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan *trend* persentase penduduk miskin dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2024 untuk tingkat nasional dan tingkat provinsi belum bisa disajikan sampai pada saat pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode 2021 sampai dengan 2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Bolaang Mongondow (ribu)	19,08	17,96	19,02	20,19
2	Bolaang Mongondow (Rp/Kapita/Bulan)	343.302	355.639	394.032	415.628
3	Provinsi (ribu)	196,35	185,14	189,00	186,86
4	Nasional (ribu)	27.542,77	26.161,16	25.898,55	Data level Nasional
5	Peringkat Provinsi	9	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow, 2024 (diolah)

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar 20,19% dari total penduduk. Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp415.628,00 perbulan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,10% dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,25% di Tahun 2024 ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,24% dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,11%.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow
(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow	1,24	0,55	0,79
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,15	1,09	1,10
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59	1,53	Data level Nasional
4	Peringkat Provinsi	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional
5	Peringkat Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow, 2024 (diolah)

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow
(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow	0,31	0,11	0,15



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,26	0,26	0,24
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,40	0,38	Data level Nasional
4	Peringkat Provinsi	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional
5	Peringkat Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Bolaang Mongondow, 2023 (diolah)

Khusus penyajian Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow di Tahun 2024 dengan nilai 0,15% dan Tingkat Nasional di Tahun 2024 belum bisa disajikan dikarenakan saat pembuatan Laporan ini data tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan *trend* TPT Kabupaten Bolaang Mongondow selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami (peningkatan/penurunan/fluktuasi) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	4,96	4,83	4,48
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	6,61	6,10	BPS Prov
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,86	5,32	4,91
4	Peringkat Provinsi	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional
5	Peringkat Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024, (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun 2024 dengan nilai 4,48% lebih rendah dibandingkan angka TPT Tahun 2023 dengan nilai 4,83%. Jika dibandingkan TPT tingkat provinsi menunjukkan bahwa angka TPT kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan TPT provinsi untuk Tahun 2024 dengan nilai 4,48% dan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka peringkat Provinsi dan peringkat Nasional untuk Kabupaten belum bisa



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

disajikan dikarenakan saat pembuatan Laporan ini data tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini ratio*)

Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di University College London, *gini ratio* menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan tersebut. *Gini ratio* dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem. *Gini ratio* Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 0,370% sedangkan *Gini ratio* Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 sebesar 0,360%.

Tabel 2.5
Gini ratio Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2024
(dalam presentase)

No	Uraian	Gini Ration		
		2022	2023	2024
1	Bolaang Mongondow	0,317	0,311	0,320
2	Minahasa	0,308	0,327	0,341
3	Kepulauan Sangihe	0,323	0,356	0,321
4	Kepulauan Talaud	0,356	0,339	0,289
5	Minahasa Selatan	0,382	0,350	0,324
6	Minahasa Utara	0,385	0,408	0,338
7	Bolaang Mongondow Utara	0,351	0,380	0,374
8	Kepulauan Sitaro	0,323	0,366	0,354
9	Minahasa Tenggara	0,351	0,320	0,302
10	Bolaang Mongondow Selatan	0,307	0,310	0,296
11	Bolaang Mongondow Timur	0,370	0,324	0,335
12	Kota Manado	0,373	0,406	0,382
13	Bitung	0,346	0,371	0,374
14	Kota Tomohon	0,374	0,339	0,336
15	Kota Kotamobagu	0,404	0,375	0,357
16	Sulawesi Utara	0,365	0,370	0,360

Sumber Dokumen :BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024, (diolah)

Distribusi pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bolaang Mongondow melalui pendekatan *gini ratio* mengalami ketimpangan dan distribusi pendapatan rumah tangga pada posisi rendah. Pada Tahun 2023 *gini ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 0,311% dan Tahun 2024 sebesar 0,320%.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. Rendah (<60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (>80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diketahui tingkat capaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar 70,29% poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia

(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten/Kota (%)	68,16	68,95	69,62	70,29
2	Provinsi (%)	73,30	73,81	74,36	75,03
3	Indonesia/Nasional (%)	72,29	72,91	73,55	74,20
4	Peringkat Provinsi	11	11	12	Data level Nasional
5	Peringkat Nasional	343	343	323	Data level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan adanya *trend* yang fluktuatif atas pencapaian IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow. IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat ini berada pada urutan 12 (dua belas) dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan berada pada urutan ke 343 (tiga ratus empat puluh tiga) untuk peringkat nasional dari 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 adalah sebesar 69,62%, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 68,95% dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 70,29%. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/ menurunnya Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita dengan rincian disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 2.7
IPM Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan wilayah
Kabupetan/Kota Periode Tahun 2021-2024

(dalam presentase)

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia			
		2021	2022	2023	2024
1	Bolaang Mongondow	68,16	68,95	69,62	70,29
2	Minahasa	75,73	76,18	76,96	77,74
3	Kepulauan Sangihe	71,07	71,63	72,22	72,71
4	Kepulauan Talaud	69,83	70,43	71,14	71,77
5	Minahasa Selatan	72,32	72,89	73,66	74,17
6	Minahasa Utara	74,11	74,69	75,31	75,89
7	Bolaang Mongondow Utara	67,39	68,06	68,64	69,32
8	Kepulauan Sitaro	68,05	68,94	69,57	70,31
9	Minahasa Tenggara	71,06	71,48	71,93	72,66



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia			
		2021	2022	2023	2024
10	Bolaang Mongondow Selatan	65,42	65,90	66,40	67,14
11	Bolaang Mongondow Timur	66,55	67,21	67,95	68,53
12	Kota Manado	79,20	79,66	80,14	80,63
13	Kota Bitung	74,20	74,70	75,11	75,71
14	Kota Tomohon	76,86	77,44	78,10	78,89
15	Kota Kotamobagu	73,47	73,96	74,43	75,27
16	Provinsi Sulawesi Utara	73,30	73,81	74,36	75,03

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 (diolah)

Pada Tahun 2023 Kota Manado menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menduduki peringkat terendah. Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 berada di peringkat ke 13 dari 15 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut disajikan *trend* laju pertumbuhan ekonomi dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 s/d 2024

(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Bolaang Mongondow (ribu)	19,08	17,96	19,02	20,19
2	Bolaang Mongondow (Rp/Kapita/Bulan)	343.302	355.639	394.032	415.628
3	Provinsi (ribu)	196,35	185,14	189,00	186,86
4	Nasional (ribu)	27.542,77	26.161,16	25.898,55	Data level Nasional
5	Peringkat Provinsi	9	Data level Nasional	Data level Nasional	Data level Nasional

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023 (diolah)

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tahun dasar 2021 menunjukkan kecenderungan positif pada waktu 2021-2024. Perekonomian menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow turun sebesar 17,96%, dan pendapatan perkapita sebesar 355.639 perkapita perbulan sedangkan untuk tingkat provinsi 185,14 ribu



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

perkapita perbulan dan di Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 19,02% dan di tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 20,19%. Sedangkan pada tingkat provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2024 pertumbuhan kabupaten/kota belum bisa disajikan dikarenakan saat pembuatan Laporan ini data tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow.

Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yaitu:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi sedang (*galloping Inflation*) sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi berat (*high inflation*) mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*hyper inflation*) sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diketahui bahwa *trend* perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Tingkat Inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota (%)	1,45	0,68	0,94	0,67

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow, 2023 (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dari tabel diatas Tingkat Inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi secara fluktuatif. Penyebab naik dan turunnya inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang maka daya beli masyarakat akan turun contohnya kenaikan minyak goreng, dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Pendapatan Daerah

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan, kondisi perkembangan perekonomian dan mengoptimalkan potensi yang belum tergali serta pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah, maka penggalan potensi perlu mendapatkan dukungan penyediaan anggaran dari *stakeholder* terkait dan dibingkai dalam sistem tata kelola yang baik.

Upaya-upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang lebih konkrit melalui *law enforcement* dengan melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Berdasarkan proyeksi dan analisis kondisi yang ada, kebijakan pendapatan pada Tahun 2024 antara lain adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi tentang pentingnya membayar pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk mendanai program pembangunan infrastruktur masyarakat dan untuk mendanai program perbaikan peningkatan layanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu mendorong peran pemerintah desa untuk turut serta melaksanakan proses pemengutan pajak daerah khususnya pada jenis-jenis pajak tertentu misalnya PBB-P2;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Meningkatkan kualitas layanan, transparansi pengelolaan dan informasi di bidang pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak dengan pelayanan melalui sistem *online*;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dengan turun langsung melaksanakan pelayanan pajak daerah di 15 kecamatan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu proses pendataan atau pendaftaran objek pajak baru. Selain itu melaksanakan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam memperbaiki administrasi data objek dan subjek pajak daerah. Selain itu guna peningkatan kompetensi maka mengikutsertakan ASN yang bertugas pada proses pemungutan pajak daerah dalam kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis maupun diklat di bidang perpeajakan khususnya Bimtek atau diklat yang terkait dengan pajak daerah;
- d. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui perbaikan sistem pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga setiap pelayanan kepada wajib pajak daerah terukur dengan baik;
- e. Peningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi melalui proses integrasi sistem perpajakan daerah dengan *stakeholder* misalnya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Lembaga perbankan (BPD);
- f. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga, peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara berkelanjutan dengan optimalisasi data, penyempurnaan peraturan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
- g. Optimalisasi Intensifikasi peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap subjek dan objek pajak yang telah terdaftar dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan pendataan terhadap wajib pajak yang baru.

2.2.2. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp1.161.000.868.292,00. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), dan sektor jasa.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan,



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024-2026.

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi, yaitu:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun 2024 - 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

e. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus anggaran.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 terdapat penerimaan pembiayaan Penggunaan SiLPA yang di anggarkan sebesar Rp83.581.224.638,00. Terkait dengan aspek pembiayaan pengeluaran daerah ini, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara umum capaian target dan realisasi APBD/Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Tahun Anggaran 2024 dapat kami gambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Pencapaian Target APBD Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi APBD
1	Pendapatan	1.077.419.643.654,00	1.060.004.317.566,16
2	Belanja	929.724.924.591,00	875.262.225.057,75
3	Transfer	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31
4	Surplus/(Defisit)	(83.581.224.638,00)	(46.341.935.838,90)
5	Penerimaan Pembiayaan	83.581.224.638,00	83.580.667.558,69
6	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
7	SILPA	0,00	37.238.731.719,79

2.4. Mandatory Spending

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjalankan tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Di sisi lain, pengelolaan anggaran APBN yang sehat disamping harus memberikan prioritas pembangunan bagi tercapainya kemakmuran, juga harus memberikan ruang atau fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi stabilitasi untuk mengantisipasi fluktuasi kondisi perekonomian nasional dan global. Fleksibilitas anggaran sangat dipengaruhi oleh adanya anggaran yang dimandatkan (*mandatory spending*) dan alokasi belanja mengikat (*non mandatory spending*).

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program dan kegiatan tertentu yang harus dialokasikan pemerintah karena telah dimandatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN);
- d. Surat Edaran Nomor 903/7325/SJ Tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diamanatkan dalam lampiran bagian V angka 54 Permendagri 33 Tahun 2019 dengan klasifikasi bahwa Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,90% (nol koma Sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; dan
- e. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Realisasi *Mandatory spending* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 2.11
Realisasi Mandatory Spending

(dalam rupiah)

No	Bidang Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Kesehatan	183.144.933.824,00	150.971.161.744,00	82,43
2	Bidang Pendidikan	343.451.480.048,00	323.204.849.015,00	94,10
3	Bidang Infrastruktur	397.576.540.360,37	391.120.936.351,00	98,38
4	Bidang Sumber Daya Manusia	6.152.857.938,00	5.783.052.144,00	93,99
5	Bidang Pengawasan	15.799.863.962,00	13.618.788.812,00	86,20
Jumlah		946.125.676.132,37	884.698.788.066,00	93,51

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Tabel 2.12
Mandatory Spending pada Bidang Sasaran

(dalam rupiah)

No	Bidang Sasaran	Ketentuan Regulasi	Pagu APBD	Penganggaran			
				Ketentuan	%	Teranggarkan	%
1	Bidang Kesehatan	Undang-undang 36 Tahun 2009 Mandatory Spending Minimal 10% dari APBD	1.161.000.868.292,00	116.100.086.829,20	10,00	183.144.933.824,00	22,33
2	Bidang Pendidikan	Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);	1.161.000.868.292,00	232.200.173.658,40	20,00	343.451.480.048,00	29,58
3	Bidang Infrastruktur	Alokasi anggaran yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keugn antara pusat dan Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah Harus mengalokasikan 40% dari total Belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer	929.724.924.591,00	371.889.969.836,40	40,00	397.576.540.360,37	42,76
4	Bidang Sumber Daya Manusia	Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah provinsi dan - 147 - paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota.	1.161.000.868.292,00	1.857.601.389,27	0,16	6.152.857.938,00	0,53
5	Bidang Pengawasan	Surat Edaran Nomor 903/7325/SJ Tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diamanatkan dalam lampiran bagian V angka 54 Permendagri 33 Tahun 2019 dengan klasifikasi bahwa Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,90% (nol koma Sembilan puluh persen) dari Total Belanja daerah.	1.161.000.868.292,00	11.610.008.682,92	1,00	15.799.863.962,00	1,36

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.5. Program Prioritas Pembangunan Nasional

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2024 menjabarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dalam Program Kegiatan Pemerintah Daerah yang tersebar pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan penganggaran sebesar Rp1.090.665.251.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13
Penjabaran Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam rupiah)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Pemerataan Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.028.266.234,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	920.537.355,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.369.764.599,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	672.053.544,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.645.077,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.866.513.191,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	178.109.667,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	624.914.915,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.589.231.663,00
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.892.272,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	410.184.503,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	337.245.871,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	1.149.320.333,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	259.481.203,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	815.119.461,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	299.507.900,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.594.145.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.820.738.696,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.069.580.103,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.592.615,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	61.115.246,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	452.458.367,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	182.341.299,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	74.020.515,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sang Tombolang	17.732.600,00
			Kecamatan Bilalang	20.474.228,00
			Kecamatan Sang Tombolang	17.732.600,00
			Kecamatan Bolaang	637.197.240,00
			Kecamatan Dumoga Tenggara	10.475.700,00
			Kecamatan Dumoga Timur	10.587.880,00
			Kecamatan Dumoga Tenggara	10.475.700,00
			Kecamatan Dumoga Timur	689.525.342,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lolak	16.667.205,00
			Kecamatan Lolayan	13.814.700,00
			Kecamatan Bolaang Timur	11.402.000,00
			Kecamatan Lolayan	13.814.700,00
			Kecamatan Poigar	13.605.270,00
			Kecamatan Dumoga Tengah	18.176.744,00
			Kecamatan Dumoga	14.340.756,00
			Kecamatan Bolaang	15.489.919,00
			Kecamatan Dumoga Barat	9.734.709,00
			Kecamatan Passi Barat	27.133.000,00
			Kecamatan Dumoga Utara	17.324.172,00
			Kecamatan Passi Timur	28.518.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Poigar	2.168.204.859,00
			Kecamatan Sang Tombolang	1.791.795.880,00
			Kecamatan Poigar	17.221.615,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
			Kecamatan Poigar	2.150.983.244,00
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.250.000,00
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.807.985.619,00
			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.153.664.215,00
			Dinas Sosial	61.690.399,00
			Kecamatan Bolaang Timur	1.170.452.852,00
			Kecamatan Bolaang Timur	106.472.249,00
			Kecamatan Lolayan	3.013.337.396,00
			Kecamatan Bilalang	2.098.746.990,00
			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.177.154.823,00
			Kecamatan Sang Tombolang	1.695.584.982,00
			Kecamatan Dumoga Tengah	154.175.670,00
			Kecamatan Bolaang	2.343.941.006,00
			Kecamatan Dumoga Tenggara	89.550.000,00
			Kecamatan Dumoga Barat	76.450.983,00
			Kecamatan Dumoga Timur	1.659.436.265,00
			Kecamatan Passi Barat	2.984.644.894,00
			Kecamatan Dumoga	1.949.311.693,00
			Kecamatan Dumoga Tenggara	1.079.735.691,00
			Dinas Komunikasi dan Informatika	2.782.731.937,00
			Kecamatan Dumoga Barat	1.802.837.263,00
			Kecamatan Dumoga Tengah	1.118.112.450,00
			Kecamatan Dumoga Utara	1.772.345.521,00
			Kecamatan Lolak	281.406.203,00
			Kecamatan Passi Timur	2.801.266.028,00
			Kecamatan Dumoga Barat	76.450.983,00
2	Pemetaan potensi investasi dan promosi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	260.500.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.731.931,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
3	Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.506.462,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	140.505.697,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.317.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	154.152.860,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	87.392.523,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	27.683.767,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.368.993.132,00
			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	159.547.502,00
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.127.235.665,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	67.503.640,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	244.964.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	2.510.034.829,00
	Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima		Dinas Komunikasi dan Informatika	132.708.735,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	40.628.562.063,00
			Dinas Kesehatan	1.378.059.183,00
			Dinas Kesehatan	19.952.576.421,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	753.489.177,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	475.581.398,00
			Dinas Kesehatan	48.596.210,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	224.004.761,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83.591.275,00
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.245.913.976,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	406.000.106,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	437.180.588,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.008.954,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.424.285,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.552.554,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.064.768,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	653.662.732,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	247.500.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.272.600.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	94.725.400,00
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.765.364.004,00
			Dinas Perhubungan	4.917.149.401,00
			Dinas Kesehatan	57.370.308.446,00
			Sekretariat Daerah	90.964.500,00
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.804.944.077,00
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.251.516.670,00
			Dinas Kesehatan	63.627.122,00
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	127.952.700,00
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	327.116.420,00
5	Penguatan koperasi, UMKM dan industri pengolahan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	449.996.726,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	455.231.180,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	14.442.630,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	60.624.950,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi dan UKM	15.278.969,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi dan UKM	9.783.822,00
			Dinas Koperasi dan UKM	9.783.822,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi dan UKM	10.567.414,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM	32.556.353,00
			Dinas Koperasi dan UKM	32.556.353,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	187.812.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	1.088.768.300,00
			Dinas Pertanian	1.476.783.516,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	1.213.793.094,00
			Dinas Pertanian	4.008.469.766,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	109.998.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	223.665.916,00
			Dinas Pertanian	248.038.099,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian	838.696.034,00
			Dinas Perkebunan	268.283.208,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Perdagangan dan ESDM	35.117.610,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan dan ESDM	35.063.937,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan ESDM	15.730.200,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan ESDM	70.137.347,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan ESDM	50.299.788,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan ESDM	96.643.826,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan ESDM	7.151.954,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan ESDM	113.487.591,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan dan ESDM	34.346.154,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perkebunan	2.601.352.235,00
			Dinas Koperasi dan UKM	4.999.064.334,00
			Dinas Perdagangan dan ESDM	2.543.513.597,00
			Dinas Pertanian	492.078.477,00
			Dinas Perikanan	2.983.978.614,00
			Dinas Ketahanan Pangan	2.590.153.591,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
			Dinas Perdagangan dan ESDM	737.843.109,00
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.307.261.221,00
6	Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan		Dinas Pemuda dan Olah Raga	215.876.146,00
7	Peningkatan kualitas pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.104.567.011,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	910.841.851,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	881.407.785,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.847.132.011,00
			Dinas Pemuda dan Olah Raga	502.437.187,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	79.161.730.897,00
			Dinas Pendidikan	10.327.939.528,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan	353.121.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	49.667.775,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Dinas Pendidikan	698.896.900,00
8	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	13.806.336.719,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	3.610.941.431,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	31.632.638.089,00
			Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	5.968.807.408,00
			Dinas Pendidikan	228.226.190.718,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	294.351.090,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	57.503.242,00
			Sekretariat Daerah	77.360.671,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	9.480.469.588,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan Daerah	241.768.127.969,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan Daerah	946.051.316,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.268.781,00
			Dinas Koperasi dan UKM	13.631.344,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
9	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan		Sekretariat DPRD	1.132.231.790,00
			Dinas Sosial	2.921.556.243,00
			Dinas Lingkungan Hidup	12.849.666,00
			Sekretariat DPRD	1.132.231.790,00
			Sekretariat DPRD	1.132.231.790,00
			Dinas Pertanian	12.871.251.564,00
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.528.255.990,00
			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	14.743.761,00
			Badan Keuangan Daerah	27.358.384.829,00
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.492.622,00
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	302.986.711,00
			Sekretariat Daerah	2.064.514.521,00
			Sekretariat DPRD	18.315.021.860,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	127.238.756,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	122.245.020,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.916.350,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	8.289.866.123,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	326.767.407,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	349.912.649,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah	3.927.833.270,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah	501.939.526,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.369.400.264,00
	Stabilitas daerah yang terjamin dalam		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	408.542.861,00
			Inspektorat Daerah	9.704.014.025,00
			Kecamatan Lolak	1.360.734.696,00
			Sekretariat Daerah	14.055.318.102,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	4	5
10	rangka pelaksanaan pemilihan umum serentak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Keuangan Daerah	652.904.915,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	238.310.007,00
			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.063.200.303,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	46.997.155,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.052.708.326,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.009.451.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	817.170.895,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.401.645.480,00
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.680.708.116,00
JUMLAH TOTAL				1.093.485.989.715,00

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

2.6. Program Penanggulangan dan Pencegahan *Stunting*

Program Penanggulangan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow bersumber Dana APBD/DAK Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow

(Dalam Rupiah)

No	Organisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Dinas Perkim	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	11.681.925,00	11.088.800,00
2.	Dinas Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota	394.584.107,00	367.855.900,00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 590Daerah Kab/Kota	942.427,00	535.713.000,00
3	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/Kota	96.481.407.154,00	21.889.637.476,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan hidup	67.503.640,00	66.998.768,00
		Pengelolaan sampah	244.216.000,00	263.700.200,00
5	Dinas Perkebunan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	856.290.500,00	827.928.100,00
		Pengawasan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.598.793.094,00	1.461.265.414,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Organisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
6	Dinas PUPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kab/Kota	3.775.049.735,00	3.774.094.608,00
7	Dinas Ketahanan pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga pangan	494.495.628,00	493.251.979,00
		Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	224.047.062,00	215.547.300,00
8	Dinas Pertanian	Pengawasan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.088.845.474,00	1.919.432.783,00
		Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kab/Kota	784.190.000,00	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	91.108.000,00	76.430.300,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.000.999.318,00	2.987.591.250,00
10	Dinas Koperasi	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	606.001.421,00	599.113.300,00
11	Dinas Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	451.500.000,00	403.200.000,00
Jumlah			110.315.364.985,00	35.892.849.178,00

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pencapaian kinerja keuangan berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dan tujuan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai salah satu indikator pencapaian baik untuk target maupun realisasi guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024.

Dapat dirumuskan isu strategis Perubahan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- e. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
- h. Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup; dan
- i. Peningkatan ekonomi dan daya saing.

Analisis tingkat likuiditas, berdasarkan rasio perhitungan sebagai berikut :

- a. *Current Ratio*, adalah rasio modal kerja atau rasio likuiditas yaitu perbandingan antara jumlah seluruh aktiva lancar dengan jumlah seluruh utang lancar dengan rasio perbandingan 2:1, artinya setiap jumlah hutang Rp1,00 dijamin dengan aset lancar Rp2,00; dan
- b. *Quick Ratio*, adalah perbandingan antara aktiva paling lancar berbanding hutang lancar dengan rasio perbandingan 2:1 artinya bahwa utang lancar sebesar Rp1,00 dijamin dengan ketersediaan kas sebesar Rp2,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Untuk capaian kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	1.077.419.643.654,00	1.060.004.317.566,16	98,38
1.1	Pendapatan Asli Daerah	67.139.203.420,00	64.931.917.295,16	96,71
1.2	Pendapatan Transfer	1.000.878.503.931,00	986.867.418.179,00	98,60
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	87,27
2	Belanja	929.724.924.591,00	875.262.225.057,75	94,14
2.1	Belanja Operasi	837.247.018.064,83	789.445.131.071,75	94,29
2.2	Belanja Modal	90.256.579.326,17	84.316.043.086,00	93,42
2.3	Belanja Tak Terduga	2.221.327.200,00	1.501.050.900,00	67,57
3	Transfer	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31	99,92
3.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.804.966.301,00	5.790.020.356,31	99,74
3.2	Transfer Bantuan Keuangan	225.470.977.400,00	225.294.007.991,00	99,92
4	Surplus / (Defisit)	(83.581.224.638,00)	(46.341.935.838,90)	55,45
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	
5	Pembiayaan Netto	83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00
6	SILPA	0,00	37.238.731.719,79	0,00

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan

3.2.1. Pendapatan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang); dan
- b. Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara pemerintah daerah tidak diinformasikan berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan hukum masyarakat, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kualitas pelayanan dengan biaya yang murah.

3.2.2. Belanja

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan anggaran belanja belum dilakukan secara maksimal karena terdapat belanja daerah yang direalisasikan menjelang akhir tahun anggaran, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak merata pada setiap triwulan; dan
- b. Terdapat belanja daerah yang dilakukan melalui proses lelang/tender sering mengalami gagal lelang, sehingga pemerintah daerah harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian *output*.

Guna mengatasi permasalahan diatas maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dan kebutuhan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Indikator Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dilakukan kualifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut:

1. Opini dengan predikat “Tidak Wajar” (TW);
2. Opini dengan predikat “Disclaimer”;
3. Opini dengan predikat “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP); dan
4. Opini dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini *Disclaimer* diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP atau TW.

Opini WDP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Hasil Pemeriksaan keuangan disajikan dalam dua bagian yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2024 terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 memperoleh predikat WTP, hal ini tentunya kembali menjadi target bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 untuk tetap mempertahankan opini terbaik atas pengelolaan keuangan daerah Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana dibidang teknis, pengelolaan keuangan, administrasi dan tenaga auditor. Peningkatan kapasitas ini dilaksanakan secara rutin dengan mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Secara internal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus meningkatkan daya saing aparatur pelaksana dengan membangun iklim persaingan sehat baik melalui pemberian *reward* langsung



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

bagi yang berprestasi seperti promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, pemberian motivasi melalui peningkatan penerimaan tunjangan kinerja secara bertahap melalui sistem dan mekanisme perhitungan pencapaian target kinerja secara personal. Kegiatan ini menjadikan aparatur pelaksana disetiap SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kapasitas yang mampu menyelesaikan beban tugas yang padat sehingga realiasi kinerja yang ditargetkan di RPJMD dapat tercapai secara maksimal.

Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu masih kurangnya jumlah tenaga fungsional umum atau pelaksana di setiap Perangkat Daerah dan prasarana penunjang dalam menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Kebijakan pimpinan dalam hal transparansi pengelolaan keuangan;
2. Penelusuran Barang Milik Daerah;
3. Peningkatan kapasitas penunjang penyusunan laporan keuangan daerah;
4. Pendampingan dari Badan Keuangan Daerah bagi SKPD dalam Penyusunan Laporan SKPD; dan
5. Pemerintah melakukan kebijakan bidang fiskal yang dibahas bersama eksekutif dan legislatif dan ditetapkan oleh legislatif, dan kebijakan bidang kawasan dan kebijakan bidang regulasi dan kelembagaan. Kedua jenis kebijakan (kawasan, regulasi dan kelembagaan), kedua aspek kebijakan ini relevan dan signifikan mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek secara spesifik dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan bertujuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum agar dapat diperbandingkan antara laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode anggaran tersebut.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban serta pengakuan aset, kewajiban dan ekuitasnya. Sedangkan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Bupati Bolaang Mongondow telah menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundangan-perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan entitas pelaporan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan entitas akuntansi, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan laporan konsolidasi dari seluruh SKPD.

Entitas yang menyusun Laporan Keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis entitas yakni Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

- a. **Entitas Pelaporan** adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Keuangan Daerah). Laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

- b. **Entitas Akuntansi** adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan SKPD sesuai tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD atau Entitas Akuntansi terdiri atas; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- c. **Laporan Keuangan** yang dihasilkan oleh PPKD sebagai Entitas Pelaporan berupa; Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA), Neraca PPKD, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun entitas akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

No	SKPD	NAMA PIMPINAN
1	Dinas Pendidikan	Hj. Farida Mooduto, S.Pd.,MM
2	Dinas Kesehatan	Drs. Ketut Kolak M.Kes
3	Dinas PU Dan Penataan Ruang	Soehendra Hamin, ST.,ME
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Yarlis Awaludin Hatam, ST.,ME
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Drs. Cristoffel Titov Kamasaan, MM
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Zulfadli Binol, SE.,MM
7	Dinas Sosial	Ernie CH. Mokoginta, SH
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ir. Sugih Arto Banteng,MT.
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Renti Mokoginta,S.Pd.MAP.
10	Dinas PP Dan Perlindungan Anak	Sumarni B. Bonde, SE.
11	Dinas Ketahanan Pangan	I Wayan Mudiayasa, S.Pd. M.MPd
12	Dinas Lingkungan Hidup	Yani Pudul, S.kom (Plt)
13	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Irlansyah Mokodompit,SP
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Deker Rompas. SE, MM (Plt)
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Yulin Ester Papuling,SKM.,M.Kes
16	Dinas Perhubungan	Achmad Yani Damopolii, SH
17	Dinas Komunikasi Dan Informasi	Ma'rif Mokodompit, S.Kom.
18	Dinas Koperasi Dan UKM	Ofir Ratu, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	NAMA PIMPINAN
19	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Fyfiannie Ismayanty, SE., M.Si.
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hj. Linda Mashoeri, SE
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Remon Yidala Ratoe, SP., MM
22	Dinas Perpustakaan (Kearsipan)	Syafrudin A. Mashanafi, S.Sos
23	Dinas Perikanan	Ir. Syahril Mokoagow, MM
24	Dinas Pertanian	Tonny Susanto Toligaga, S.Pt., MP
25	Dinas Perkebunan	Ir. Abdul Latif, M.Si
26	Dinas Perdagangan, Dan ESDM	Seriyanto, ST
27	Sekretariat Daerah	Abdullah Mokoginta, SE, M.Si
28	Sekretariat DPRD	Parman Ginano, S.Pi
29	Kecamatan Bilalang	Sitti S. Mokoginta, SP
30	Kecamatan Bolaang Timur	Supriadi Dilapanga, SE
31	Kecamatan Dumoga Utara	Junfi Komaling, SH.
32	Kecamatan Dumoga Barat	Sukardi Bonde, S.Pd
33	Kecamatan Dumoga Timur	Maria Magdalena Untu, S.Pd
34	Kecamatan Lolak	Rapih Dilapanga, SE (Plt)
35	Kecamatan Poigar	Alfina Sumenda, SIP., MM
36	Kecamatan Sang Tombolang	Mansur Paputungan, S.sos
37	Kecamatan Lolayan	Faisal Marthen Manoppo, S.Pd
38	Kecamatan Passi Timur	Irwan Sugeha, S.Sos
39	Kecamatan Passi Barat	Liem Ginoga, SP., MM
40	Kecamatan Bolaang	Harry Damopolii, S.STP.
41	Kecamatan Dumoga Tenggara	Herwinda Rampan, SIP
42	Kecamatan Dumoga Tengah	Heri Mokodompit, S.Pd
43	Kecamatan Dumoga	Sandri Willem Karundeng, S.Pd
44	Inspektorat Daerah	Rio A. Lombone, S.STP., MH.CGCAE, QGIA, CRMO, CRGP, CFA
45	BAPPEDA	DR. Mutu Bulan Mokoginta, SE., Msi
46	Badan Keuangan Daerah	Drs. Ashari Sugeha
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Drs. Umarudin Raisji Ambah

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 berdasarkan asumsi bahwa:

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan; dan
- Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010), Penerapan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019), Kebijakan Akuntansi (Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019), Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014) dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penerapan peraturan kebijakan akuntansinya masih terdapat ketentuan yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terbaru tahun 2021. Pemutakhiran atas Peraturan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bolaang Mongondow saat tengah dalam perampungan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2021 untuk selanjutnya diajukan untuk penetapan sebagai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sedangkan dalam penyusunan Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada beberapa prinsip dasar antara lain :

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Subtansi dan Realitas;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- e. Prinsip Periodisitas;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrua tercermin pada pendapatan LO dan beban pada Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.

Basis Akrua untuk Laporan Operasional bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.

Apabila penyusunan Anggaran berdasarkan Basis Kas, maka penyusunan LRA berdasarkan Basis Kas. Artinya bahwa penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan, demikian pula untuk belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrua untuk Neraca, bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

b. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)

Penerapan Nilai Historis karena lebih objektif, dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar. Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.

c. Prinsip Realisasi

Anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Pendapatan atau belanja diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan menambah atau mengurangi kas. Penyajian pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi tersusun dalam LRA.

d. Prinsip Substansi dan Realitas (Mengungguli Bentuk Formal)

Penyajian Laporan Keuangan diupayakan penyajiannya secara wajar, dimana transaksi atau peristiwa lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita yang terjadi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Bilamana terdapat substansi transaksi lain yang tidak konsisten, maka akan diungkapkan secara realitas pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dibuat menjadi beberapa periode. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan, semester dan triwulan. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Neraca dan Arus Kas (PPKD) tahunan untuk LRA, LP SAL/SAK, Neraca, LO, LPE, LAK dan CaLK.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama metode yang dipergunakan dapat memberikan informasi yang lebih baik. Untuk Tahun Pelaporan Keuangan 2024, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan metode Basis Kas dan Basis Akrua. Basis Kas untuk pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan metode Basis Akrua diterapkan untuk pendapatan diakui pada saat hak telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat disajikan di lembar depan Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan Pemerintah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja terlalu tinggi yang menyebabkan laporan keuangan tidak netral dan tidak handal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*Historical Cost*) tanpa memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka-angka disajikan sampai dengan dua digit belakang koma.

4.3.1. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Ketentuan-Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan utama maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaporan ini disusun secara *double entry* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (Klasifikasi Ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada bagian lampiran penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (*Cash Basis*) di mana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang seharusnya diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

diakui dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

Pendapatan LRA adalah semua Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayarkan kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan pendapatan LRA, dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan, meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan; dan
- b. Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Timbulnya hak atas pendapatan LO adalah setelah pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak untuk menagih atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi parkir, timbulnya hak untuk menagih pajak reklame, retribusi IMB maupun HO sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Dalam hal pendapatan hibah yang berasal dari mata uang asing, diukur dan dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan dilakukan dengan menggunakan nilai rupiah (setelah dikonversi) berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya pendapatan.

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Atas Belanja dan Beban

Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menyebabkan penurunan pada ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran kas;
- b. Pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban terhadap belanja tersebut melalui fungsi perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU atau SP2D TU Nihil; dan
- c. Dalam hal pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), misalnya tagihan atas rekening listrik, tagihan atas rekening telepon yang belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Pengeluaran Kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh bendahara pengeluaran SKPD misalnya untuk pembayaran gaji pegawai atau untuk membiayai suatu kegiatan pada suatu periode pelaporan. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran Belanja Non Modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang atau nilai kas yang akan dikeluarkan.

Pengukuran Belanja Modal adalah menggunakan dasar pengukuran yang digunakan pada aset tetap. Belanja yang menggunakan mata uang asing, harus dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pengakuan pada belanja. Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Kewajiban timbul setelah adanya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya adalah pengelompokan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan/amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sedangkan klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri atas beban pegawai, beban barang, beban bunga beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas ke pihak lain yang tidak didahului oleh kewajiban dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau jasa sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan (proses waktu) seperti penyusutan aset atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan yang dikeluarkan kas atau yang akan dikeluarkan kas. Apabila beban diukur dengan mata uang asing, maka pencatatannya dilakukan setelah dikonversikan dengan mata uang rupiah pada saat pengakuan beban.

Penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud yang nilainya diatas kapitalisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang.

Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah metode garis lurus, di mana penyusutan sehubungan penurunan nilai kapasitas dan manfaat aset bukan alokasi biaya.

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi terhadap beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Apabila mengakibatkan penambahan beban maka dilakukan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow baik itu penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggarnya peruntukan utamanya untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pinjaman, dan hasil perusahaan daerah .

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah seperti, pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/bunga atau untuk pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Perlakuan akuntansi untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan asas bruto artinya bahwa pembukuan dilakukan dengan melihat jumlah bruto tidak mencatat jumlah netto.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi pelayanan umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan serta Surat Berharga yang mudah diperjualbelikan. Termasuk investasi jangka pendek adalah deposito yang berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, sedangkan Aset Tetap meliputi:

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- d. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- e. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
- g. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Lainnya meliputi :

- a. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi;
- b. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Kas Daerah; dan
- c. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).

4.3.5.1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai pembangunannya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau waktu pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu tersebut bisa kurang atau melebihi satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan melalui swakelola atau pihak lain melalui kontrak konstruksi. Perlakuan akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah dengan mencantumkan jumlah realisasi anggaran sampai dengan tanggal neraca, bukan besaran nilai kontrak. Pencatatannya adalah



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

nilai realisasi keuangan sampai tanggal akhir neraca dengan tidak melihat besaran nilai kontrak atau pagu dana yang tersedia maupun kemajuan fisik pembangunan.

4.3.5.2. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Berwujud

Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Methode*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang.

Penyusutan per Periode = Nilai Perolehan/Penilaian

Masa Manfaat

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Bilamana terjadi kondisi yang memungkinkan diadakan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap termuat dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan, sedangkan pelaporannya disajikan secara semesteran. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.3. Kapitalisasi

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) didasarkan pada Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi perbaikan atau



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

renovasi. Nilai Satuan Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset lainnya adalah nilai per unitnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000,00 ke atas;
- b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.000.000,00 ke atas;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp30.000.000,00 ke atas; dan
- d. Aset Tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman, buku-buku dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap dari pembelian terdiri atas harga belinya, atau konstruksinya termasuk bea import serta semua biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam memperoleh aset tersebut, seperti biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya profesi dan biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya termasuk seluruh biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh hak atas tanah tersebut. Untuk Peralatan dan Mesin biaya perolehannya sudah termasuk seluruh biaya sampai peralatan/mesin tersebut siap pakai. Untuk Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan, biaya perolehannya mencakup seluruh biaya perolehan sampai pada pajak. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup seluruh biaya sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan, dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, atau didasarkan pada dokumen penyerahan atau dokumen serah terima. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk upah kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lain yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Dicatat seluruhnya sebagai biaya perolehan aset tetap tersebut.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Atas LRA dan Neraca

4.3.6.1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan ditangguhkan;
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rincian lebih lanjut pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6.2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah;
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.3. Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- b. Transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sedangkan transfer keluar merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota pemekaran; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan dan transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4.3.6.4. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan; dan
- b. Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4.3.6.5. Pembiayaan

- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran;
- b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjual obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan;
- d. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu;
- e. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- f. Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

4.3.6.6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- a. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan; dan
- b. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.6.7. Kas

Kas adalah jumlah uang tunai dan saldo simpanan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

4.3.6.8. Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.6.9. Kas di Kas Daerah

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah, terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, Setara Kas seperti Surat Utang Negara dan Deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah;
- b. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara;
- c. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Taperum dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetor ke Kas Negara; dan
- d. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.10. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetor ke Kas Daerah;
- b. Kas dicatat sebesar nilai nominal, kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember; dan
- c. Kas yang ada di bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

4.3.6.11. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember;
- c. Tidak termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Taperum dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetor ke Kas Negara; dan
- d. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.12. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b. Terdapat surat ketetapan penagihan yang telah ditagih namun belum dilunasi.

Untuk piutang Dana Bagi Hasil, DAK, DAU, Piutang Transfer dan DBH Provinsi diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah yang menurut ketentuan adalah menjadi hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan atau ditransfer.

Terhadap pengakuan awal piutang, disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang yang tak tertagih. Bila terjadi kondisi yang tak memungkinkan, maka piutang dapat saja dihapus. Penghapusan piutang dapat dilakukan dengan penghapusan tagihan (*write off*) dan penghapusan pembukuan (*write down*) dari masing-masing jenis piutang tersebut.

Penghapusan tagihan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penagihan piutang gagal, maka penagihannya dapat dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) namun tetap dicatat di neraca dengan disertai catatan bahwa piutang tersebut telah dilimpahkan ke KPKNL. Apabila melalui proses KPKNL gagal, maka dokumen atau surat keputusan KPKNL dijadikan dasar untuk penghapusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sebagaimana telah diubah menjadi PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Kewenangan Penghapusan Piutang sampai dengan Lima Miliar Rupiah oleh Bupati, sedangkan diatas Lima Miliar Rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kualifikasi yakni :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Kualitas Piutang Lancar (Kurang dari 1 Tahun);
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar (Lebih dari 1 s/d 2 Tahun);
- c. Kualitas Piutang diragukan (Umur piutang lebih dari 2 s/d 5 Tahun); dan
- d. Kualitas Piutang Macet (di atas 5 Tahun).

Piutang yang timbul akibat Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) harus didukung dengan bukti dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau yang dipersamakan dengan itu. Untuk Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pengakuan diatas, disajikan sebagai aset lancar apabila jatuh tempo kurang dari 12 bulan, dan disajikan sebagai aset lainnya apabila jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

Apabila penyelesaian TP-TGR dilaksanakan melalui proses hukum, maka pengakuan piutang dilakukan penetapan setelah ada Ketetapan Pengadilan dan disajikan sebagai aset lainnya.

Piutang digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yakni :

- a. Piutang Non Pajak; dan
- b. Piutang Pajak.

Penggolongan Piutang Pajak dan Non Pajak proses pengukurannya dan penggolongannya sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan :

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:
 - 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap surat tagihan yang ditetapkan atau kurang bayar ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan untuk wajib pajak yang melakukan banding; dan
 - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan bagi semua nilai tagihan yang masih dalam proses banding.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan dilakukan dengan:
 - 1) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai dari jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau apabila berupa barang dilakukan dengan penilaian wajar sampai pada tanggal pelaporan. Bila dalam naskah pinjaman terdapat beban bunga, denda atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui sebagai utang yang belum dibayar; dan
 - 2) Piutang yang berasal dari penjualan, diakui sebesar nilai penjualan sesuai naskah penjualan pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang dicatat nilai bersihnya.

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai umur piutang tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
1	Kualitas Lancar (Kurang dari 1 Tahun)	0,5 %
2	Kualitas Kurang Lancar (1 s/d 2 Tahun)	10 %
3	Kualitas Diragukan (2 s/d 5 Tahun)	50 %
4	Kualitas Macet (Lebih dari 5 Tahun)	101 %

4.3.6.13. Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah;
- Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik; dan
- Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6.14. Investasi Permanen

- Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan;
- Bentuk investasi permanen antara lain : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas;
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendala yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan atau metode biaya;
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendala yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Keuangan Perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan (metode ekuitas);

- d. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut; dan
- e. Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah berupa penyertaan modal pada :
 - 1) Perusahaan Daerah GADASERA;
 - 2) Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - 3) PT Bank SulutGo.

4.3.6.15. Investasi Non Permanen

- a. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk Investasi Non Permanen antara lain Investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan; dan
- b. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

4.3.6.16. Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; dan
- b. Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukan dana cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.17. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dapat dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Kewajiban ini mencakup utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember; dan
- e. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.3.6.18. Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
- b. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri perbankan dan utang jangka panjang lainnya; dan
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi, Kewajiban, dan Ekuitas

4.3.7.1 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.3.7.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ke pihak lain.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang bilamana tahun pembayarannya melebihi 12 (dua belas) bulan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

Nilai nominal kewajiban adalah pada saat transaksi berlangsung sebagaimana yang tertera dalam surat pengakuan utang Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jangka waktunya, apakah berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan atau lebih untuk penggolongan kewajiban guna mempermudah proses pencatatannya.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah daerah, harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan harus dibayar. Utang pemerintah daerah tersebut dapat berupa utang pada pihak ketiga yang harus dibayar pada akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban.

Pengukuran dan penyajian utang bunga dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sedangkan untuk utang jangka panjang yang akan jatuh tempo setelah tanggal pelaporan dicatat sebagai bagian lancar utang jangka panjang.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetor ke pihak lain dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetor.

4.3.7.3 Saldo Ekuitas di Neraca

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris. Penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan dalam arus kas termasuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Termasuk dalam kriteria tersebut adalah Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Entitas Pelaporan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah BKD selaku BUD.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang menggabungkan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya, serta merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji menjadi entitas tunggal.

Prosedur Konsolidasian dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan semua akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Akun-akun yang dieliminasi adalah Rekening Koran (RK) Dinas, dieliminasi menjadi Rekening Koran Kasda dan Rekening Koran Aset Dinas dieliminasi menjadi Rekening Koran Aset Kas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, pemerintah daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran harus disesuaikan dengan lampiran atau format yang diatur dalam ketentuan dimaksud.

Dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan, pemerintah daerah juga memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sesuai dengan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 komposisi pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan format pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Antar Daerah, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komposisi belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memisahkan belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan ke dalam kelompok belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 disajikan dengan menggunakan basis kas, yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas.

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.060.004.317.566,16 yang meliputi :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Pendapatan Asli Daerah - LRA sebesar Rp64.931.917.295,16;
- b. Pendapatan Transfer - LRA Rp986.867.418.179; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA Rp8.204.982.092.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp875.262.225.057,75 yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp789.445.131.071,75;
- b. Belanja Modal sebesar Rp84.316.043.086,00; dan
- c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.501.050.900,00.

Transfer Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp231.084.028.347,31 yang terdiri dari :

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp5.790.020.356,31; dan
- b. Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp225.294.007.991,00.

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 adalah perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah, dengan rincian :

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.060.004.317.566,16;
- b. Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp1.106.346.253.405,06; dan
- c. Surplus/defisit sebesar Rp(46.341.935.838,90).

Realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2024 merupakan selisih dari pembiayaan penerimaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah dengan rincian:

- (a) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp83.580.667.558,69; dan
- (b) Pembiayaan Netto sebesar Rp83.580.667.558,69.

5.1.1. Pendapatan Daerah - LRA

Total anggaran pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.077.419.643.654,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Realisasi pendapatan daerah yang dapat dicapai adalah sebesar Rp1.060.004.317.566,16 atau 98,38% dari target yang ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Selanjutnya, jenis anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah -LRA

Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp67.139.203.420,00 terealisasi sebesar Rp64.931.917.295,16 atau penyerapan anggaran mencapai 96,71%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp69.847.019.829,91 mengalami penurunan sebesar Rp4.915.102.534,75 atau turun sebesar 7,04%. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri atas komponen Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.429.800.000,00	41.777.573.317,00	100,84	48.618.898.979,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.619.863.004,00	14.891.047.915,00	89,60	12.504.563.525,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.795.118.326,00	3.878.205.042,00	102,19	2.882.571.278,10
4	Lain-lain PAD yang Sah	5.294.422.090,00	4.385.091.021,16	82,82	5.840.986.047,81
	Jumlah	67.139.203.420,00	64.931.917.295,16	96,71	69.847.019.829,91

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp64.931.917.295,16 meliputi:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan pajak daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp41.429.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.777.573.317,00 atau 100,84%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp48.618.898.979,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.841.325.662,00 atau turun sebesar 14,07%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel	40.000.000,00	57.426.072,00	143,57	62.783.493,00
2	Pajak Restoran	800.000.000,00	761.666.863,00	95,21	906.326.123,00
3	Pajak Hiburan	3.300.000,00	6.600.000,00	200,00	12.000.000,00
4	Pajak Reklame	1.522.661.451,00	2.377.627.039,00	156,15	1.814.396.731,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
5	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	10.602.145.105,00	117,80	9.384.841.439,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	36.500.000,00	38.500.000,00	105,48	13.000.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.200.000.000,00	23.436.184.745,00	93,00	27.457.065.900,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.327.338.549,00	3.989.066.271,00	92,18	3.999.692.532,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000,00	508.357.222,00	101,67	4.968.792.761,00
	Jumlah	41.429.800.000,00	41.777.573.317,00	100,84	48.618.898.979,00

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Realisasi Pendapatan Pajak LRA yang disajikan pada tabel diatas merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, meliputi penerimaan tahun berjalan dan penerimaan piutang. Penerimaan tersebut terdiri dari:

- a. Realisasi Pajak Hotel pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp57.426.072,00 atau terealisasi sebesar 143,57% dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp40.000.000,00 dikarenakan adanya Penerimaan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp9.027.972,00. Realisasi pajak hotel tersebut merupakan pembayaran Pajak Hotel dan Kos-Kosan di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat tiga wajib pajak yang telah dipasang Alat Rekam Pajak yaitu hotel kendys, hotel atlantik dan penginapan mulia.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp62.783.493,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.357.421,00 atau turun sebesar 8,53% hal ini dikarenakan adanya pengurangan obyek pajak berupa kos-kosan yang mana pada Tahun 2023 objek pajak kos-kosan masih bisa dipungut pajak, namun sejak implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk objek pajak kos-kosan sudah tidak ditetapkan sebagai wajib pajak;

- b. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp761.666.863,00 atau terealisasi sebesar 95,21% dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp800.000.000,00 dipungut dari potongan pajak 10% dari setiap makanan dan minuman yang terjual di restoran wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan makan dan minum pada Kegiatan Perangkat Daerah yang disediakan oleh pihak penyedia Restoran di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Di Tahun 2024 Pajak Restoran tidak mencapai target yang ditetapkan karena adanya penurunan daya kunjung dan daya beli masyarakat terhadap restoran di Kabupaten Bolaang Mongondow;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp6.600.000,00 atau terealisasi sebesar 200% dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp3.300.000,00. Pajak Hiburan melebihi target dikarenakan pada Tahun 2024 pihak pemilik hiburan yakni Wahana Drembulen banyak beroperasi di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Namun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp12.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.400.000,00 atau turun sebesar 45%, hal ini dikarenakan karena objek pajak Drembulen hanya bersifat insidental yakni beroperasi hanya dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu saja dan untuk Tahun 2024 Drembulen yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow hanya sedikit;

- d. Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp2.377.627.039,00 atau terealisasi sebesar 156,15% dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.522.661.451,00 merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang disetorkan wajib pajak ke rekening Kas Umum Daerah. Mekanisme pemungutan pajak reklame dimulai dengan mendata terlebih dahulu atas objek pajak reklame, selanjutnya dibuat penetapan kemudian dilakukan penagihan kepada wajib pajak dan wajib pajak melakukan penyetoran pajak reklame melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Realisasi pajak reklame mengalami pelampauan dari target yang telah dianggarkan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya objek pajak reklame baru dan pemasangan reklame jenis kain. Realisasi pajak reklame Tahun 2024 sebesar Rp2.377.627.039,00 berasal dari pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp789.725.252,00, pajak reklame kain sebesar Rp1.501.033.637,00, pajak reklame melekat/stiker sebesar Rp24.908.150,00 dan pajak reklame berjalan sebesar Rp61.960.000,00;

- e. Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 10.602.145.105,00 terealisasi sebesar 117,80% dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00, merupakan pajak yang atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.384.841.439,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.217.303.666,00 atau naik sebesar 12,97%. Realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar Rp10.602.145.105,00 diperoleh dari PT. PLN (Persero) Cabang Kotamobagu sebesar Rp7.690.777.693,00 dan Pajak Penerangan Jalan diperoleh dari PT. Conch North Sulawesi Cement sebesar Rp2.911.367.412,00;
- f. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp38.500.000,00 terealisasi sebesar 105,48% dari target yang telah dianggarkan yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar Rp36.500.000,00. Pajak Burung Walet dipungut dari setiap kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak sarang burung walet mengalami pelampauan dikarenakan adanya pelaporan wajib pajak sarang burung walet atas kegiatan pengambilan sarang burung walet;

- g. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp23.436.184.745,00 terealisasi sebesar 93,00% dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp25.200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp27.457.065.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.020.881.155,00 atau turun sebesar 14,64%.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sumber dari pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan-perusahaan, pekerjaan atau kegiatan Fisik di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa-desa berkurang;

- h. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.989.066.271,00 terealisasi sebesar 92,18% dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp4.327.338.549,00. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.999.692.532,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.626.261,00 atau turun sebesar 0,27%, hal ini dikarenakan terdapat pajak PBB-P2 yang tidak terbayarkan di Tahun 2024 sebesar Rp371.253.178,00;

Pajak PBB-P2 Tahun 2024 ini tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak PBB-P2; dan

- i. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp508.357.222,00 terealisasi sebesar 101,67% dari target yang telah dianggarkan yaitu Rp500.000.000,00, merupakan akumulasi dari BPHTB-Pemindahan Hak Rp127.003.576,00 dan BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp381.353.646,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.968.792.761,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.460.435.539,00 atau turun sebesar 89,77%, hal ini dikarenakan sejak Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 bahwa NPOPTKP yang menjadi dasar Pengurangan pada Penghitungan BPHTB sebesar Rp80.000.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp60.000.000,00, selain itu wajib pajak yang mengurus BPHTB di Tahun 2024 tidak sebanyak Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp16.619.863.004,00 dan terealisasi sebesar Rp14.846.047.915,00 atau 89,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp12.504.563.525,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.341.484.390,00 atau naik sebesar 18,73%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Jasa Umum	14.355.623.004,00	12.968.499.913,00	90,34	12.224.122.775,00
2	Retribusi Jasa Usaha	414.240.000,00	365.502.101,00	88,23	220.992.450,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.850.000.000,00	1.512.045.901,00	81,73	59.448.300,00
	JUMLAH	16.619.863.004,00	14.846.047.915,00	89,33	12.504.563.525,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

a. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp14.355.623.004,00 dan terealisasi sebesar Rp12.968.499.913,00 atau 90,34%. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.224.122.775,00 atau naik sebesar 6,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan– LRA	14.152.543.004,00	12.718.523.413,00	89,87	11.964.300.775,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum– LRA	70.080.000,00	90.326.000,00	128,89	60.840.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar– LRA	133.000.000,00	159.650.500,00	120,04	120.684.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor– LRA	0,00	0,00	0,00	61.665.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang– LRA	0,00	0,00	0,00	16.633.000,00
	JUMLAH	14.355.623.004,00	12.968.499.913,00	90,34	12.224.122.775,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan belum mencapai target dari yang dianggarkan atau hanya sebesar 89,87% namun mengalami kenaikan sebesar Rp754.222.638,00 dari Tahun 2023 sebesar 6,30%. Hal tersebut terjadi karena Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Tahun 2024 terdapat penambahan 4 Puskesmas Rawat Inap yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Puskesmas Pangian, Puskesmas Tanoyan, Puskesmas Pusian dan Puskesmas Doloduo sehingga total Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi 10 yang menambah peningkatan penerimaan Dana Non Kapitasi.

Retribusi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah mengalami penurunan karena pada Tahun 2024 RSUD mengalami penurunan kelas dari tipe C ke tipe D yang menyebabkan tarif BPJS juga ikut menurun. Hampir semua pasien yang datang ke RSUD sudah menggunakan kartu BPJS dan RSUD juga Tahun 2024 sudah menggunakan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melebihi target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya lonjakan pengunjung di pasar paska memasuki lebaran dan tahun baru, sehingga jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum bertambah;
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari retribusi pelataran sebesar Rp50.750.000,00, retribusi los sebesar Rp28.400.000,00 dan retribusi kios sebesar Rp80.500.500,00 dengan keseluruhan total realisasi sebesar Rp159.650.500,00 atau sekitar 120,04% dari anggaran Rp133.000.000,00 yang ditargetkan dan mengalami peningkatan sebesar 32,29% dari Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp120.684.000,00.

Pada Tahun 2024 retribusi pelataran mengalami penurunan karena para pedagang tidak rutin berjualan di pelataran sedangkan untuk Retribusi los dan retribusi kios mengalami pelampauan karena adanya penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Tahun 2024 ada Penerimaan Piutang Retribusi kios Tahun 2021 sebesar Rp4.245.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp6.963.000,00;

- 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan pada Tahun 2024 karena sudah tidak dipungut lagi PAD (digratiskan) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 5 Januari 2022; dan
- 5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Telah dicabut dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya tidak lagi termasuk jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masa transisi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pelaksanaan amanat Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan akhir Tahun 2023.

Realisasi Retribusi Jasa Umum yang disajikan di atas merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh beberapa OPD dan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.5
Rincian Retribusi Jasa Umum PerOPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Realisasi
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LRA	Dinas Kesehatan	2.278.812.200,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD – LRA	RSUD Datoe Binangkang	10.439.711.213,00
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LRA	Dinas Perhubungan	90.326.000,00
4.	Retribusi Pelataran – LRA	Dinas Perdagangan dan ESDM	50.750.000,00
5.	Retribusi Los– LRA	Dinas Perdagangan dan ESDM	28.400.000,00
6.	Retribusi Kios – LRA	Dinas Perdagangan dan ESDM	80.500.500,00
7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor –LRA	Dinas Perhubungan	0,00
8.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya –LRA	Dinas Perdagangan dan ESDM	0,00
	JUMLAH		12.968.499.913,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pendapatan Retribusi LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan tahun berjalan pada masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp414.240.000,00 dan terealisasi sebesar Rp365.502.101,00 atau 88,23%. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp220.992.450,00 atau naik sebesar 65,39% dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.6
Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah– LRA	201.200.000,00	110.009.600,00	54,68	18.448.950,00
2.	Retribusi Terminal– LRA	0,00	0,00	0,00	30.796.000,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	23.040.000,00	21.650.000,00	93,97	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga– LRA	150.000.000,00	193.832.501,00	129,22	150.242.500,00
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah– LRA	40.000.000,00	40.010.000,00	100,03	21.505.000,00
	JUMLAH	414.240.000,00	365.502.101,00	88,23	220.992.450,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp110.009.600,00 atau sebesar 54,68% dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp18.448.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp91.560.650,00 atau naik sebesar 496,29% dengan rincian sebagai berikut :

- a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp5.000.000,00 merupakan hasil sewa usaha kantin di kompleks kantor dinas pendidikan;
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu pengelola retribusi di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pemakaian Laboratorium adalah Sumber PAD Dinas PUPR dimana LRA Bulan Oktober Tahun 2024 pada akuntansi pelaporan aplikasi SIPD Sudah tercantum target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah sebesar Rp20.000.000,00 sesuai jumlah Usulan Target PAD 2024. Besarnya usulan target Tahun 2024 mengacu pada PAD (Retribusi Pemakaian Laboratorium) Tahun 2023 sebesar Rp18.448.950,00 dimana Tahun 2023 masih Menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 31 Tahun 2001. Pada bulan desember Tahun 2024 jumlah setoran Retribusi Pemakaian Laboraturium melebihi Target sebesar Rp78.359.600,00 berasal dari Retribusi Hasil Uji LPA, ACWC, Kuat Tekan Paving Block K-300, Sand Cone dan Core Drill;
- c) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sampai dengan akhir Tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan kurangnya penyewa kendaraan Bus sehingga target yang di tetapkan tidak tercapai atau hanya terealisasi sebesar Rp26.650.000,00;

- 2) Retribusi Terminal di Tahun 2024 sudah tidak lagi di pungut PAD (digratiskan) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tanggal 5 Januari 2022;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp21.650.000,00 atau hanya sebesar 93,97% tidak mencapai target dikarenakan adanya penertiban pedagang di lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan (Lapangan Daagon);
- 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp193.832.501,00 atau sebesar 129,22% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya lonjakan pengunjung di wisata pemandian air panas bakan. Pemandian air panas bakan telah menyediakan gazebo untuk para pengunjung dan menyediakan juga tempat ibadah berupa mushola dan aula bangunan untuk tempat beribadah umat kristiani. Pada tahun 2024 tarif karcis mengalami kenaikan harga sesuai dengan Perda No 04 Tahun 2018 ke Perda No 1 Tahun 2024, tarif karcis masuk untuk dewasa harga Rp4.000,00/org naik menjadi Rp6.000,00/org sedangkan untuk anak-anak harga Rp3.500,00/org naik menjadi Rp4.000,00/org; dan
- 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih ikan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp40.010.000,00 atau sebesar 100,03%, mencapai target karena pada Tahun 2024 terdapat penambahan sarana dan prasarana pendukung pembenihan budidaya ikan.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha yang disajikan di atas merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh beberapa OPD dan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.7
Rincian Retribusi Jasa Usaha PerOPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Realisasi
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan –LRA	Badan Keuangan Daerah	5.000.000,00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium –LRA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.359.600,00
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor –LRA	Dinas Perhubungan	26.650.000,00
4	Retrsibusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LRA	Dinas Perhubungan	21.650.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga- LRA	Dinas Pariwisata	193.832.501,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Atau Benih Ikan– LRA	Dinas Perikanan	40.010.000,00
JUMLAH			365.502.101,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pendapatan Retribusi LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan tahun berjalan pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.512.045.901,00 atau 81,73%. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.448.300,00 atau naik sebesar 2.443,46% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan– LRA	0,00	0,00	0,00	59.448.300,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung– LRA	750.000.000,00	680.095.915,00	90,68	0,00
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LRA	1.100.000.000,00	831.949.986,00	75,63	0,00
	JUMLAH	1.850.000.000,00	1.512.045.901,00	81,73	59.448.300,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

- 1) Sejak berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja serta berdasarkan PP 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak diberikan dan diganti dengan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga retribusi yang dipungut adalah Retribusi PBG. Pemungutan retribusi PBG berdasarkan ketentuan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp680.095.915,00 atau 90,68% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp750.000.000,00, tidak mencapai target disebabkan karena adanya perbaikan aplikasi perizinan untuk penerbitan persetujuan bangunan gedung yaitu aplikasi SIMBG oleh Kementerian PU. Sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai pada akhir Desember 2024 banyak permohonan persetujuan bangunan gedung yang sudah di input di SIMBG tidak bisa diterbitkan sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
- 3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak mencapai target dikarenakan berdasarkan penetapan PAD pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.100.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp831.949.986,00 dengan asumsi jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 72 orang. Pada Tahun 2024 Tenaga Kerja Asing (TKA) telah berkurang sebanyak 9 orang sehingga total Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi 63 orang. Setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada bulan Januari sampai dengan bulan April ada sebanyak 16



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melakukan izin perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing Daerah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember ada sebanyak 47 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melakukan izin perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing Daerah melalui Daerah berdasarkan Perda No 1 Tahun 2024.

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melakukan perpanjangan penggunaan izin TKA merupakan tenaga kerja asing yang bekerja pada PT Conch North Sulawesi Cement yang beroperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu yang disajikan di atas merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh beberapa OPD dan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.9
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Per OPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Realisasi
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung– LRA	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	680.095.915,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LRA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	831.949.986,00
	JUMLAH		1.512.045.901,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pendapatan Retribusi LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan tahun berjalan pada masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp3.795.118.326,00 dan terealisasi sebesar Rp3.878.205.042,00 atau mencapai 102,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.882.571.278,10 mengalami kenaikan sebesar Rp995.633.763,90 atau naik sebesar 34,54%.

Pendapatan tersebut meliputi penyeteroran PAD dari PDAM yang totalnya sebesar Rp158.086.716,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Setoran ke Kas Daerah pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp75.000.000,00;
- Setoran ke Kas Daerah pada tanggal 01 November 2024 sebesar Rp45.000.000,00; dan
- Setoran ke Kas Daerah pada tanggal 29 November 2024 sebesar Rp38.086.716,00.

Selain itu terdapat Pendapatan dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada PT. Bank SulutGo



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Buku 2024 berdasarkan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 10 Tahun 2023 yang disetorkan pada 19 Februari 2024 sebesar Rp3.720.118.326,00.

Pada Tahun 2024 pendapatan deviden yang bersumber dari PDAM belum dianggarkan, karena pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 belum ada informasi atau dokumen resmi dari pihak PDAM yang disampaikan kepada TAPD bahwa akan menyetorkan deviden sebagai dasar penganggaran pendapatan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2024. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	PDAM	0,00	158.086.716,00	0,00	78.700.701,10
2	Bank SulutGo	3.795.118.326,00	3.720.118.326,00	98,02	2.803.870.577,00
	Jumlah	3.795.118.326,00	3.878.205.042,00	102,19	2.882.571.278,10

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp5.294.422.090,00 dan terealisasi sebesar Rp4.430.091.021,16 atau mencapai 83,67%. Sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp5.840.986.047,81 atau mengalami penurunan sebesar 24,16%.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11
Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	45.000.000,00	0,00	55.886.400,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00	103.350.001,00
3	Jasa Giro – LRA	2.600.000.000,00	1.743.692.913,00	67,07	2.567.532.799,25
4	Pendapatan Bunga – LRA	0,00	123.087.861,00	0,00	135.692.865,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LRA	1.999.096.333,00	1.251.012.729,67	62,58	1.176.664.422,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	344.516.873,00	629.656.889,49	182,77	1.197.897.285,81



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Pekerjaan – LRA				
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	2.584.972,00	371.160,00	14,36	88.379.210,75
8	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	348.223.912,00	637.269.468,00	180,34	515.583.064,00
	JUMLAH	5.294.422.090,00	4.430.091.021,16	83,67	5.840.986.047,81

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain PAD yang Sah -LRA adalah sebagai berikut :

- a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan aset berupa barang scrub/limbah padat sebesar Rp45.000.000,00;
- b) Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 sebesar Rp1.743.692.913,00 atau terealisasi sebesar 67,07% dari anggaran sebesar Rp2.600.000.000,00. Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan atas rekening giro Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2024 yaitu giro pada Rekening Kas Umum Daerah. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.567.532.799,25 mengalami penurunan sebesar Rp823.839.886,25 atau turun sebesar 32,09% yang disebabkan oleh penempatan dana selama Tahun Anggaran 2024 dipengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4.915.102.534,00 atau sekitar 7,04% dan terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sektor belanja daerah sebesar Rp6.724.681.889,00 atau sekitar 0,61%;
- c) Realisasi Pendapatan Bunga yaitu sebesar Rp123.087.861,00 merupakan remunerasi dana TDF pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bank Indonesia (BI) yang disalurkan langsung pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 12 Juni 2024;
- d) Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.251.012.729,67 merupakan penerimaan atas kerugian daerah yang terdiri dari Penyetoran atas temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 serta penyetoran atas terbitnya SKTJM Tahun 2023.

Penerimaan melalui penyetoran Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) tidak mencapai target karena Tahun 2024 Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) tidak melaksanakan Sidang. Tim Inspektorat telah melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut baik yang sudah terbit SKTJM maupun yang belum. Selain itu Inspektorat mengeluarkan Surat Bebas TGR kepada Aparatur Sipil Negara yang akan mengurus Kenaikan Pangkat, Pensiun maupun yang akan pindah tugas ke daerah lain. Agar lebih memaksimalkan pengembalian TGR,



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sekretariat MPPKD telah melakukan upaya menghubungi perangkat daerah terkait agar menghubungi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian daerah ke Kas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menjadi temuan Finansial oleh Tim Pemeriksa BPK. Namun di tahun 2024 terjadi kendala karena masa transisi Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak sehingga memengaruhi penerimaan dari penyetoran ganti kerugian (TGR) dan tidak memenuhi target;

- e) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp629.656.889,49 atau terealisasi sebesar 182,77% dari anggaran sebesar Rp344.516.873,00. Terjadi pelampauan karena terdapat beberapa pengadaan fisik yang tidak selesai hingga batas waktu pengerjaan dan kemudian melakukan permintaan perpanjangan waktu tambahan dan menyelesaikan penyetoran penyetoran denda keterlambatan atas pengerjaan fisik yang tidak selesai hingga berakhirnya batas waktu pengerjaan oleh pihak ketiga;
- f) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp371.160,00 atau terealisasi sebesar 14,36% dari anggaran sebesar Rp2.584.972,00 yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) dan Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Realisasi pendapatan denda pajak daerah Tahun 2024 berasal dari pembayaran denda pajak bumi dan bangunan PBB-P2 yaitu Penetapan Pajak Tahun 2023 tapi dibayarkan pada Tahun 2024; dan
- g) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp637.269.468,00 merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp71.070.750,00, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp566.198.718,00. Meningkatnya pendapatan dari pengembalian dikarenakan adanya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan proses pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga dilakukan penetapan tuntutan ganti rugi ataupun penyetoran pengembalian atas pembayaran yang melebihi dan atau tidak sesuai dengan ketentuan.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi celah fiskal. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan -LRA;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA; dan
- c. Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.000.878.503.931,00 dan terealisasi sebesar Rp986.867.418.179,00 atau mencapai 98,60%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.011.692.757.515,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.825.339.336,00 atau turun sebesar 2,45%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12
Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Dana Perimbangan– LRA	786.609.072.334,00	775.346.643.297,00	98,57	800.144.624.518,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	169.446.159.000,00	169.446.159.000,00	100,00	167.878.910.000,00
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	44.823.272.597,00	42.074.615.882,00	93,87	43.669.222.997,00
	JUMLAH	1.000.878.503.931,00	986.867.418.179,00	98,60	1.011.692.757.515,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

Rincian pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Dana Perimbangan – LRA

Pendapatan Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp797.238.614.334,00 dan terealisasi sebesar Rp775.346.643.297,00 atau mencapai 98,57% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Bagi Hasil (DBH) –LRA	62.941.773.000,00	62.941.773.000,00	100,00	44.240.811.973,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	580.479.971.000,00	572.634.871.063,00	98,65	534.329.126.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) –LRA	143.187.328.334,00	139.769.999.234,00	97,61	221.574.686.545,00
	JUMLAH	786.609.072.334,00	775.346.643.297,00	98,57	800.144.624.518,00

Sumber data :Aplikasi SIPD RI (diolah)

a. Dana Transfer Umum –Dana Bagi Hasil (DBH) –LRA

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu jenis Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai Dana Perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 3



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp62.941.773.000,00 dan realisasi sebesar Rp62.941.773.000,00 atau mencapai 100,00%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.700.961.027,00 atau naik sebesar 42,27% dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	8.770.454.000,00	8.770.454.000,00	100,00	9.688.184.423,00
2	DBH PPh Pasal 21-LRA	3.696.637.000,00	3.696.637.000,00	100,00	3.941.627.375,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WP Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA	201.775.000,00	201.775.000,00	100,00	312.298.892,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi- LRA	1.369.384.000,00	1.369.384.000,00	100,00	1.665.806.018,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	509.438.000,00	509.438.000,00	100,00	543.783.378,00
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	46.786.522.000,00	46.786.522.000,00	100,00	26.027.067.710,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.755.000,00	14.755.000,00	100,00	19.236.966,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.592.808.000,00	1.592.808.000,00	100,00	2.042.807.211,00
	JUMLAH	62.941.773.000,00	62.941.773.000,00	100,00	44.240.811.973,00

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

b. Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp580.479.971.000,00 dan realisasi sebesar Rp572.634.871.063,00 atau mencapai 98,65%. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp534.329.126.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.305.745.063,00 atau naik sebesar 7,17%. Adapun penjelasan lebih rinci terkait Transfer Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

- 1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp435.679.925.000,00 dengan realisasi sebesar Rp446.309.467.000,00 atau mencapai 102,44%;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) DAU Tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp400.000.000,00 atau mencapai 100%;
- 3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dianggarkan sebesar Rp33.701.463.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.226.821.063,00 atau mencapai 45,18 % disebabkan karena pembayaran gaji yang berdasarkan SPMT yaitu mulai dibayarkan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2024;
- 4) DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp61.310.644.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.310.644.000,00 atau mencapai 100%;
- 5) DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp36.359.796.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.359.796.000,00 atau mencapai 100%; dan
- 6) DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang PU sebesar Rp13.028.143.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.028.143.000,00 atau mencapai 100%.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) –LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp143.187.328.334,00 dan realisasi sebesar Rp139.769.999.234,00 atau mencapai 97,61%. Dana alokasi khusus terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) fisik Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp35.628.907.000,00 dan realisasi sebesar Rp35.123.482.574,00 atau mencapai 98,58% dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp107.558.421.334,00 dan realisasi sebesar Rp104.646.516.660,00 atau mencapai 97,29%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Paud	686.354.000,00	685.354.000,00	99,85	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.235.107.000,00	4.202.211.000,00	99,22	7.800.600.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.336.238.000,00	4.310.921.000,00	99,42	11.917.364.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.388.240.300,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	6.514.271.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	768.778.006,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	5.870.805.300,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.628.649.910,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.866.637.000,00	7.767.494.839,00	98,74	48.336.398.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.394.961.559,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	536.726.494,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	18.504.571.000,00	18.157.501.735,00	98,12	16.551.976.995,00
	Jumlah	35.628.907.000,00	35.123.482.574,00	98,58	113.708.772.524,00

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

- 1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD realisasi tidak mencapai 100% karena dana yang di transfer adalah sebesar nilai kontrak yang diinput pada Aplikasi Omspan sebagai syarat penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD;
- 2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD realisasi tidak mencapai 100% karena dana yang di transfer adalah sebesar nilai kontrak yang diinput pada Aplikasi Omspan sebagai syarat penyaluran DAK fisik dari RKUN ke RKUD;
- 3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP realisasi tidak mencapai 100% karena dana yang di transfer adalah sebesar nilai kontrak yang diinput pada Aplikasi Omspan sebagai syarat penyaluran DAK fisik dari RKUN ke RKUD;
- 4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah pada tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak mendapatkan DAK Fisik;
- 5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting pada tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak mendapatkan DAK Fisik;
- 6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB Tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak mendapatkan DAK Fisik;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 7) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak mendapatkan DAK Fisik;
- 8) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan Tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak mendapatkan DAK Fisik;
- 9) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan realisasi tidak mencapai 100% karena dana yang ditransfer adalah sebesar nilai kontrak yang diinput pada aplikasi Omspan sebagai syarat penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD;
- 10) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak mendapatkan DAK Fisik;
- 11) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak mendapatkan DAK Fisik; dan
- 12) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan realisasi tidak mencapai 100% karena dana yang ditransfer adalah sebesar nilai kontrak yang diinput pada aplikasi Omspan sebagai syarat penyaluran DAK fisik dari RKUN ke RKUD.

Tabel 5.16

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.217.730.000,00	28.759.883.986,00	95,18	30.736.888.814,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00	100,00	1.665.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	51.030.397.000,00	50.050.720.000,00	98,08	48.114.150.920,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.054.535.000,00	2.054.535.000,00	100,00	1.044.750.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	965.080.000,00	1.006.204.000,00	104,26	992.638.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	2.880.761.600,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	918.910.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	17.410.639.629,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.278.106.658,00	4.278.106.658,00	100,00	3.349.988.708,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	389.506.950,00	389.506.950,00	100,00	500.511.350,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	203.000.000,00	50,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	251.675.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.693.150.000,00	2.649.732.250,00	98,39	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	864.180.000,00	793.660.000,00	91,84	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.121.672.058,00	4.121.672.058,00	100,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.053.063.668,00	8.854.495.758,00	97,81	0,00
	JUMLAH	107.558.421.334,00	104.646.516.660,00	97,29	107.865.914.021,00

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

- 1) DAK Non Fisik-BOS Reguler pada Tahun 2024 ada 22 sekolah yang dana tahap II tidak masuk di rekening karena sekolah tidak melaporkan dana bos Tahun 2023 di Aplikasi ARKAS. Ada beberapa sekolah juga di Tahun 2024 di potong dana tahap II karena terlambat melapor dana bos tahap I di tahun 2024 sehingga realisasi tidak tercapai;
- 2) DAK Non Fisik-BOS Kinerja realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan;
- 3) DAK Non Fisik-TPG PNSD pada saat penganggaran sesuai dengan TKDD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp51.030.397.000,00 tetapi ada KMK 423 Tahun 2024 tentang perubahan rincian DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Tahun 2024 sehingga untuk pagu Anggaran DAK Non Fisik-TPG PNSD berubah menjadi sebesar Rp50.050.720.000,00 sehingga untuk realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD mencapai 100% sesuai dengan dana yang di transfer dari RKUN ke RKUD;
- 4) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan;
- 5) DAK Non Fisik-TKG PNSD sama halnya dengan DAK Non Fisik - TPG PNSD pada saat penganggaran sesuai dengan TKDD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp965.080.000,00 tetapi ada perubahan rincian sesuai KMK 423 Tahun 2024 sehingga pagu untuk DAK Non Fisik-TKG PNSD berubah menjadi Rp1.006.204.000,00 sehingga untuk realisasi mencapai 104,26% sesuai dengan dana yang di transfer dari RKUN ke RKUD;
- 6) DAK Non Fisik-BOP PAUD pada Tahun 2024 tidak ada realisasi karena terjadi kekeliruan dalam penginputan SIPD yang seharusnya di input pada rekening barang dan jasa tetapi di input pada rekening hibah;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 7) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan pada Tahun 2024 tidak ada realisasi karena terjadi kekeliruan dalam penginputan SIPD yang seharusnya di input pada rekening barang dan jasa tetapi di input pada rekening hibah;
- 8) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK tidak dianggarkan karena sudah pindah rekening ke DAK Non Fisik BOK-BOK Dinas/BOK Kabupaten;
- 9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan;
- 10) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan;
- 11) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Realisasi tidak mencapai 100% karena dana tahap ke II tidak disalurkan akibat keterlambatan dari OPD pengelola dalam menyampaikan syarat salur tahap ke II;
- 12) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian pada Tahun 2024 tidak ada realisasi karena tidak mendapatkan DAK Non fisik;
- 13) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler Realisasi tidak mencapai 100% Karena beberapa lembaga swasta ada keterlambatan pelaporan di BKU sehingga untuk dana tahap II tidak direalisasikan dari pihak kementerian;
- 14) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Realisasi tidak mencapai 100% karena ada pengurangan dari kementerian dikarenakan ada kekeliruan penarikan data Cut Off BOP Tahun 2023 sehingga dana Tahun 2024 diadakan pengurangan realisasi;
- 15) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran telah sesuai dengan ketentuan pelaporan dan penyaluran; dan
- 16) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Tahun 2024 tidak mencapai 100% karena Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita gizi kurang di puskesmas tidak dapat terealisasi seluruhnya, disebabkan karena Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berdasarkan jumlah kasus yang ada di setiap wilayah kerja puskesmas.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LRA pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp169.446.159.000,00 dan terealisasi sebesar Rp169.446.159.000,00 atau realisasi sebesar 100,00%. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp167.878.910.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.567.249.000,00 atau naik sebesar 0,93%.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LRA terbagi atas Dana Desa dan Insentif Fiskal dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp156.556.803.000,00 dan terealisasi sebesar Rp156.556.803.000,00 atau mencapai 100,00%. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp152.964.788.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.592.015.000,00 atau naik sebesar 2,35%. Dana desa ditransfer dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp75.901.984.800,00 dan tahap kedua sebesar Rp74.874.178.200,00 sehingga total sebesar Rp150.776.163.000,00.

Pagu Dana Desa Tahun 2024 berdasarkan pagu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp150.776.163.000,00, pada bulan September terdapat penambahan dana desa sebesar Rp5.780.640.000,00 untuk 40 desa dengan masing masing desa mendapat dana sebesar Rp144.516.000,00 sehingga total keseluruhan Dana Desa dan Dana Tambahan Dana Desa Tahun 2024 yang diterima oleh Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebesar Rp156.556.803.000,00 atau terealisasi 100%.

b. Insentif Fiskal

DID (Dana Insentif Daerah) merupakan salah satu dana transfer umum dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan /percapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.889.356.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.889.356.000,00 atau mencapai sebesar 100,00%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp14.914.122.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.024.766.000,00 atau turun sebesar 13,58%.

Adapun DID Tahun 2024 untuk Kabupaten Bolaang Mongondow dialokasikan dan direalisasikan oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.17
Rincian Dana Insentif Fiskal

dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Dinas Sosial	1.004.424.848,00	933.457.000,00	70.967.848,00
2	Dinas Pertanian	4.653.678.058,00	3.699.527.503,00	954.150.555,00
3	Dinas Perkebunan	2.008.784.094,00	1.794.583.214,00	214.200.880,00
4	Dinas Kesehatan	1.872.469.000,00	1.872.469.000,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000,00	1.474.930.390,00	25.069.610,00
6	Dinas koperasi dan UKM	500.000.000,00	499.633.200,00	366.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Sisa
7	Kecamatan Passi Barat	150.000.000,00	148.844.760,00	1.155.240,00
8	Dinas Perikanan	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
9	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil	200.000.000,00	159.850.000,00	40.150.000,00
Jumlah		12.889.356.000,00	10.583.295.067,00	2.306.060.933,00

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp44.823.272.597,00 dan terealisasi sebesar Rp42.074.615.882,00 atau mencapai 93,87%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp43.669.222.997,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.594.607.115,00 atau turun sebesar 3,65%.

Pendapatan transfer antar daerah merupakan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135 Tahun 2023 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.18
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bagi Hasil-Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	5.809.905.745,00	5.046.475.447,00	86,86	6.040.043.052,00
2	Pendapatan Bagi Hasil-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	4.223.829.664,00	4.415.679.511,00	104,54	4.903.983.030,00
3	Pendapatan Bagi Hasil-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	19.794.625.913,00	19.111.264.078,00	96,55	21.049.351.928,00
4	Pendapatan Bagi Hasil-Pajak Air Permukaan – LRA	325.128.383,00	216.954.792,00	66,73	252.875.196,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok– LRA	14.669.782.892,00	13.284.242.054,00	90,56	11.422.969.791,00
JUMLAH		44.823.272.597,00	42.074.615.882,00	93,87	43.669.222.997,00

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Penyaluran atas Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow hanya menerima penyaluran sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 115 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.2.4. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.401.936.303,00 dan terealisasi sebesar Rp8.204.982.092,00 atau mencapai 87,27% dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.729.465.898,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp524.483.806,00 atau 6,01%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.19
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	342.325.200,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	87,27	8.387.140.698,00
	JUMLAH	9.401.936.303,00	8.204.982.092,00	87,27	8.729.465.898,00

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tabel di atas berasal dari pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 sudah tidak dianggarkan lagi sehingga realisasi 0,00% hal itu disebabkan karena pada Tahun 2023 saat kegiatan IPDMIP sedang berjalan, kegiatan tersebut telah dihentikan oleh Pemerintah Pusat karena tidak akan lagi mengalami proses reimbursement; dan
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp8.204.982.092,00 merupakan Transfer dari BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah kepesertaan yang terdaftar pada setiap FKTP. Adapun realisasi pendapatan tidak mencapai 100,00% karena pada Tahun 2021 terdapat temuan BPK tentang peserta BPJS yang sudah tidak aktif tapi masih terdaftar dan di bayar oleh BPJS, sehingga kompensasinya pada Tahun 2024 pihak BPJS memotong transferan ke FKTP.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.161.000.868.292,00 dan realisasi sebesar Rp1.106.346.253.405,06 atau mencapai 95,29%, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.099.621.571.516,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.724.681.889,06 atau 0,61%.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 meliputi belanja operasi dianggarkan sebesar Rp837.247.018.064,83, belanja modal dianggarkan sebesar Rp90.256.579.326,17, belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp2.221.327.200,00 dan belanja transfer dianggarkan sebesar Rp231.275.943.701,00. Uraian belanja sebagai berikut :

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp837.247.018.064,83 dan realisasi sebesar Rp789.445.131.071,75 atau mencapai 94,29%, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp709.078.331.784,00, mengalami kenaikan sebesar Rp80.366.799.287,75 atau 11,33%. Rincian belanja operasi Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut :

Tabel 5.20
Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Pegawai	485.931.729.294,56	467.491.412.190,00	96,21	409.574.045.733,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	278.904.643.897,27	249.881.172.368,75	89,59	273.338.916.141,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	211.500.000,00
4.	Belanja Hibah	72.399.558.415,00	72.062.018.763,00	99,53	25.058.344.460,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.086.458,00	10.527.750,00	94,96	895.525.450,00
	JUMLAH	837.247.018.064,83	789.445.131.071,75	94,29	709.078.331.784,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Realisasi Belanja operasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp485.931.729.294,56 dengan realisasi sebesar Rp467.491.412.190,00 atau mencapai 96,21%. Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp409.574.045.733,00, mengalami kenaikan sebesar
Rp57.917.366.457,00 atau 14,14%. Rinciannya pada tabel berikut :

Tabel 5.21
Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	340.796.117.420,39	327.902.308.534,00	96,22	277.937.862.540,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	67.127.987.216,00	65.529.051.133,00	97,62	58.944.111.185,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN	61.833.105.564,00	58.844.474.647,00	95,17	57.122.939.388,00
4	Belanja gaji dan Tunjangan DPRD	11.848.814.532,00	11.302.390.904,00	95,39	11.392.321.572,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	161.907.062,17	0,00	0,00	21.452.048,00
6	Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	350.880.000,00	317.616.000,00	90,52	330.552.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	3.812.917.500,00	3.595.570.972,00	94,30	3.824.807.000,00
	JUMLAH	485.931.729.294,56	467.491.412.190,00	96,21	409.574.045.733,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Masing-masing akun belanja pegawai diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja gaji dan tunjangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp340.796.117.420,39 dan realisasi sebesar Rp327.902.629.034,00 atau mencapai 96,22%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp277.937.862.540,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.964.766.494,00 atau 17,98% dengan rincian pada tabel:

Tabel 5.22
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji Pokok ASN	258.998.502.649,94	252.586.693.853,00	97,52	209.312.136.587,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.019.836.782,80	21.289.100.827,00	88,63	18.374.644.341,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.484.451.550,00	5.356.234.800,00	97,66	6.081.504.070,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.837.236.950,00	14.505.556.000,00	97,76	13.674.918.650,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.355.553.250,00	4.807.957.000,00	89,78	3.873.930.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.442.849.550,00	12.183.976.894,00	90,64	11.267.921.969,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.088.819.769,70	545.916.912,00	50,14	289.843.542,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.336.252,65	3.531.783,00	55,74	2.889.498,00
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	15.075.771.854,05	14.617.986.260,00	96,96	13.043.136.098,00
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	621.865.071,80	501.420.041,00	80,63	540.326.663,00
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.864.893.739,45	1.504.254.664,00	80,66	1.476.611.122,00
	JUMLAH	340.796.117.420,39	327.902.629.034,00	96,22	277.937.862.540,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Gaji Pokok ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja gaji pokok PNS dan belanja gaji pokok PPPK. Dianggarkan Rp258.998.502.649,94 terealisasi sebesar Rp252.586.693.853,00 atau 97,52%. Sementara untuk realisasi TA 2023 sebesar Rp209.312.136.587,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp43.274.557.266,00 atau 20,67%.

Realisasi belanja gaji pokok ASN tidak mencapai 100%, karena serapan anggaran pada belanja gaji pokok PPPK hanya 76,98% atau sebesar Rp45.173.652.502,00, dari anggaran sebesar Rp58.679.713.507,00. Diketahui, anggarannya bersumber dari DAU Spesifik Grant (SG), yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan di daerah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, salah satunya pembayaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahun 2024, PPPK Kabupaten Bolaang Mongondow menerima SK Bupati dan SPMT pada triwulan III, sehingga anggaran tidak terserap 100 persen.

Secara umum untuk belanja gaji dan tunjangan ASN setiap tahun tidak akan terealisasi 100 persen. Misalnya TPG/ TKG di Dinas Pendidikan tidak terserap semua sehingga menjadi SILPA. Demikian juga, TPP itu dianggarkan secara bruto, tapi dalam proses realisasi disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp67.127.987.216,00 dan terealisasi sebesar Rp65.529.051.133,00 atau mencapai 96,91%, sedangkan Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

terrealisasi sebesar Rp58.944.111.185,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.584.939.948,00 atau 11,17%.

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp61.833.105.564,00 dan realisasi sebesar Rp58.844.474.647,00 atau mencapai 95,17%. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp57.122.939.388,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.721,535.259,00 atau 3,01%. Rincian belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.23

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	521.402.784,00	425.424.927,00	81,59	519.005.205,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	33.690.000,00	27.344.992,00	81,17	24.322.263,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	54.547.121.880,00	52.195.839.400,00	95,69	51.044.622.620,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD	1.118.567.300,00	1.026.074.200,00	91,73	861.335.700,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.055.360.000,00	2.055.250.000,00	99,99	1.044.750.000,00
6	Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	683.674.000,00	299.593.628,00	43,82	0,00
7	Belanja Honorarium	1.677.647.100,00	1.645.550.000,00	98,09	2.473.153.600,00
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.195.642.500,00	1.169.397.500,00	97,80	1.155.750.000,00
	JUMLAH	61.833.105.564,00	58.844.474.647,00	95,17	57.122.939.388,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

1) Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp521.402.784,00 dan realisasi sebesar Rp 425.424.927,00 atau mencapai 81,59%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp519.005.205,00, mengalami penurunan sebesar Rp93.580.278,00 atau 18,03%.

Rincian belanja sebagaimana tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.24
Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	750.000,00	750.000,00	100,00	749.700,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	12.000.000,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	57.000.000,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	306.000.000,00	229.500.000,00	75,00	306.000.000,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan	86.252.784,00	75.624.927,00	87,68	83.855.505,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan BPHTB	23.400.000,00	17.550.000,00	75,00	23.400.000,00
	JUMLAH	521.402.784,00	425.424.927,00	81,59	519.005.205,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Ada tiga pos belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah, yakni pos belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran, pos belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, pos belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, realisasinya hanya sebesar 75%. Hal ini disebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target, sehingga tidak bisa direalisasikan 100%.

2) Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp33.690.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.344.992,00 atau mencapai 81,17%. Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp24.322.263,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.022.729,00 atau 12,43%.

Tabel 5.25
Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	13.499.992,00	74,99	13.499.763,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Tepi Jalan Umum				
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.990.000,00	3.990.000,00	100,00	2.992.500,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	675.000,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	600.000,00	450.000,00	75,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	3.375.000,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.200.000,00	480.000,00	40,00	480.000,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	1.800.000,00	1.350.000,00	75,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.100.000,00	1.575.000,00	75,00	0,00
	JUMLAH	33.690.000,00	27.344.992,00	81,17	24.322.263,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Khusus untuk belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor, belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/ tera ulang dan belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal TA 2024 sudah tidak dianggarkan lagi. Hal ini berdasarkan regulasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lagi diberlakukan pada ketiga pos pendapatan tersebut. Dengan tidak adanya penarikan PAD, insentif tidak lagi dianggarkan.

Sementara, ada lima pos belanja yang realisasi tidak mencapai 100%. Yakni belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan capaian realisasi 75,00% dari anggaran sebesar Rp 18.000.000,00, belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan capaian hanya 40% atau terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp 480.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.200.000,00, belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung dianggarkan Rp1.800.000,00 terealisasi Rp1.350.000,00 atau sebesar 75,00% dan belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dianggarkan Rp2.100.000,00, terealisasi Rp1.575.000,00 atau sebesar Rp75,00%. Hal ini karena penerimaan retribusi tidak mencapai target sehingga insentif bagi pemungut retribusi tidak bisa direalisasikan 100,00%.

3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Belanja tunjangan profesi guru PNSD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp54.547.121.880,00 dan terealisasi sebesar Rp52.195.839.400,00 atau mencapai 95,69%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp51.044.622.620,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.151.216.780,00 atau 2,26%.

4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

Belanja tunjangan khusus guru PNSD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.118.567.300,00 dan realisasi sebesar Rp1.026.074.200,00 atau mencapai 91,73%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp861.335.700,00, mengalami kenaikan sebesar Rp164,738.500,00 atau 19,13%.

5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.055.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.055.250.000,00 atau mencapai 99,99%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.044.750.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.010.500.000,00 atau 96,72%.

6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN baru dianggarkan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp683.674.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.593.628,00 atau 43,82%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp0,00. Rendahnya capaian realisasi karena penerimaan retribusi tidak mencapai target sehingga insentif bagi pemungut pajak tidak bisa direalisasikan 100,00%.

7) Belanja Honorarium

Belanja honorarium Tahun Anggaran 2024 meliputi belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Dianggarkan Rp1.677.647.100,00 dengan realiasi Rp1.645.550.000,00 atau sebesar 98,09%. Sementara TA 2023 realisasi sebesar Rp2.473.153.600,00, mengalami penurunan sebesar Rp827.603.600,00 atau 33,46%

Akan halnya pos belanja honorarium pengadaan barang/jasa dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tidak dianggarkan lagi. Pejabat pengadaan barang dan jasa TA 2024 telah menerima tunjangan penghasilan sebagaimana tertata dalam rekening belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS.

8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Belanja Jasa Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.195.642.500,00 dan realisasi Rp1.169.397.500,00 atau sebesar 97,80% adalah pos belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan. Sedangkan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.155.750.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.647.500,00 atau 1,18%.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja gaji dan tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp11.848.814.532,00 dan terealisasi sebesar Rp11.302.390.904,00 atau mencapai 95,39%. Sedangkan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp11.392.321.572,00, mengalami penurunan sebesar Rp89.930.668,00 atau 0,79%.

Tabel 5.26
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	667.170.000,00	99,31	668.640.000,00
2	Belanja Tunjangan keluarga DPRD	91.840.000,00	57.760.500,00	62,89	53.913.300,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.061.600,00	71.840.640,00	78,89	68.002.380,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	57.120.000,00	85,03	57.267.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.093.033.200,00	1.041.877.200,00	95,32	1.056.706.350,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	21.878.400,00	11.357.850,00	51,91	13.154.400,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.255.400.000,00	99,44	2.255.400.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0,00	0,00	0,00	359.100.000,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	678.188,00	387.536,00	57,14	581.304,00
10	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.694.154.144,00	2.576.374.698,00	95,63	2.610.514.068,00
11	Belanja Tunjangan Transportasi	4.471.200.000,00	4.328.217.480,00	96,80	4.249.042.770,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	DPRD				
12	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	378.000.000,00	234.885.000,00	62,14	0,00
	JUMLAH	11.848.814.532,00	11.302.390.904,00	95,39	11.392.321.572,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja tunjangan keluarga DPRD Tahun Anggaran 2024, realisasi tidak mencapai 100% karena belanja tunjangan keluarga dihitung berdasarkan jumlah jiwa, dimana setiap anggota DPRD bertanggung empat jiwa. Namun, dalam realisasi beberapa pimpinan dan anggota DPRD hanya memiliki tanggungan 1, 2, 3 jiwa, bahkan tidak memiliki tanggungan atau K/0.

Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, dari anggaran sebesar Rp21.878.400,00 terealisasi Rp11.357.850,00 atau serapan hanya mencapai 51,91%. Kegiatan Badan Pembentukan Perda ini, berupa penyediaan gaji bagi anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD, dimana jumlah personil yang dianggarkan, tidak sama dengan realisasi.

Belanja Tunjangan Reses DPRD tidak dianggarkan TA 2024 karena masa jabatan masa bakti 2019-2024 sudah berakhir, sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan reses.

Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD juga hanya terserap sebesar 57,14% dari anggaran sebesar Rp678.188,00. Hal ini karena belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan untuk 30 anggota DPRD. Tapi pada realisasi, hanya dua anggota yang dikenakan PPh 21 sesuai perhitungan gaji oleh PT. Taspen.

Demikian juga belanja uang jasa pengabdian DPRD dari anggaran Rp378.000.000,00 realisasi hanya mencapai Rp234.885.000,00 atau 62,14%. Penyebabnya ada tiga anggota DPRD yang tidak dibayarkan uang jasa pengabdian DPRD.

Tabel 5.27
Rincian Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi DPRD	126.354.144,00	54.121.418,00	42,83	57.476.916,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.000.000,00	1.363.320,00	68,17	1.359.288,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000,00	4.089.960,00	81,80	4.077.864,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.560.800.000,00	2.516.800.000,00	98,28	2.547.600.000,00
	JUMLAH	2.694.154.144,00	2.576.374.698,00	95,63	2.610.514.068,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp161.907.062,17 realisasi Rp0,00 atau penyerapan anggaran 0,00%. Sedangkan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp21.452.048,00. Hal ini disebabkan sepanjang Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dipimpin dua Penjabat Bupati yang berstatus ASN Provinsi dan Pejabat Bupati berstatus ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menerima belanja gaji dan tunjangan dari Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel 5.28
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	21.452.048,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	152.075.812,17	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	9.831.250,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		161.907.062,17	0,00	0,00	21.452.048,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Pos belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH Tahun 2024 tidak dianggarkan lagi, karena Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selang Tahun 2024 dipimpin dua Penjabat Bupati yang berstatus ASN Provinsi dan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana fasilitas iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH tertata dalam APBD Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sementara belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah dan belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH realisasi 0,00%. Hal ini dikarenakan Penjabat Bupati yang memimpin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berstatus ASN Provinsi dan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga tidak menerima tunjangan dari Pemerintah Bolaang Mongondow, tapi menerima tunjangan Eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Eselon II Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dan posisi WKDH tidak ada.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.29
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	218.750,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	16.625.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	89.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.157.062,17	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	152.075.812,17	0,00	0,00	0,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Tabel 5.30
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	437.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.163.750,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	525.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-	612.500,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
	JUMLAH	9.831.250,00	0,00	0,00	0,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Tak berbeda dengan belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah, delapan pos belanja yang tertata di belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH dengan anggaran Rp152.075.812,17, realisasi adalah 0,00%. Hal ini dikarenakan dua pejabat bupati yang memimpin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berstatus ASN Provinsi Sulawesi Utara dan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga tidak menerima tunjangan dari Pemerintah Bolaang Mongondow, tapi menerima tunjangan Eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Eselon II Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dan posisi WKDH tidak ada.

Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp9.831.250,00 dengan realisasi 0,00%, tidak berbeda dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00%,. Hal ini dikarenakan dua pejabat bupati yang memimpin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berstatus ASN Provinsi dan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga tidak menerima tunjangan dari Pemerintah Bolaang Mongondow, tapi menerima tunjangan Eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Eselon II Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dan posisi WKDH tidak ada.

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp350.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp317.616.000,00 atau mencapai 90,52%. Sementara realisasi Tahun 2023 sebesar Rp330.552.000,00.

Tabel 5.31
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	77.616.000,00	70,00	90.552.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	240.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	JUMLAH	350.880.000,00	317.616.000,00	90,52	330.552.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja dana operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp9.240.000,00 setiap bulan, atau sebagaimana pagu selama 12 bulan sebesar Rp110.880.000,00. Dalam realisasinya, Belanja dana operasional dibayarkan bervariasi sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Jika SPJ DOP bulan sebelumnya dipertanggungjawabkan, maka dana operasional dibayarkan 100%. Tetapi jika tidak, hanya dibayarkan 80%. Hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Bab 3 Pasal 22, dinyatakan bahwa pemberian operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 80,00% diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan 20,00% diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

g. Belanja Pegawai BOS

Belanja pegawai BOS Tahun 2024 adalah Surat Pengesahan Belanja (SPB) pegawai BOS sekolah negeri dan swasta. Dianggarkan sebesar Rp3.812.917.500,00, terealisasi sebesar Rp3.595.570.972,00 atau serapan anggaran mencapai 94,30%. Tahun 2023 realisasi SPB pegawai BOS SD Negeri dan BOS SMP Negeri sebesar Rp3.824.807.000,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dimaksudkan pengeluaran pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial.

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp278.904.643.897,27 dan realisasi sebesar Rp249.881.172.368,75 atau mencapai tingkat serapan 89,59%. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp273.338.916.141,00, mengalami penurunan sebesar Rp23.457.743.772,25 atau 8,58 %. Berikut rincian belanja barang dan jasa:

Tabel 5.32
Rincian Belanja Barang Dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang	78.271.100.174,68	67.080.964.016,75	85,70	92.776.809.531,00
2	Belanja Jasa	96.228.989.007,96	87.523.823.576,00	90,95	93.521.003.377,00
3	Belanja	9.438.338.761,20	8.388.402.166,00	88,88	4.764.186.926,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Pemeliharaan				
4	Belanja Perjalanan Dinas	72.334.850.543,43	65.581.040.739,00	90,66	57.713.824.578,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	934.895.000,00	748.850.000,00	80,10	2.161.491.700,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.696.470.410,00	20.558.091.871,00	94,75	22.401.600.029,00
JUMLAH		278.904.643.897,27	249.881.172.368,75	89,59	273.338.916.141,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

a. Belanja Barang

Belanja barang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp78.271.100.174,68 dan realisasi sebesar Rp67.080.964.016,75 atau mencapai tingkat serapan 85,70%, dan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp92.776.809.531,00, mengalami penurunan sebesar Rp25.695.845.514,25 atau 27,70%. Rincian belanja barang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.33
Rincian Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang Pakai Habis	78.103.965.174,68	66.915.214.016,75	85,67	92.769.173.455,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	7.636.076,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	167.135.000,00	165.750.000,00	99,17	0,00
JUMLAH		78.271.100.174,68	67.080.964.016,75	85,70	92.776.809.531,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Akun Belanja Barang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1) Belanja Barang Pakai Habis

Belanja barang pakai habis Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp78.103.965.174,68 dan terealisasi sebesar Rp66.915.214.016,75 atau 85,67%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp92.769.173.455,00, mengalami penurunan sebesar Rp25.853.959.438,25 atau 27,87%. Adapun rincian belanja barang pakai habis sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Belanja Barang Pakai Habis

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan	69.432.346,40	67.391.390,00	97,06	37.067.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Konstruksi				
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	590.384.779,50	562.521.120,00	95,28	485.552.162,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	354.759.418,00	278.321.321,00	78,45	4.974.413.174,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	459.507.255,00	459.507.255,00	100,00	945.002.500,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	44.510.500,00	30.474.500,00	68,47	0,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	30.525.000,00	30.000.000,00	98,28	0,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.250.000,00	56.250.000,00	100,00	140.240.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.535.992.949,00	3.302.979.274,00	93,41	3.125.486.591,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.215.406.920,00	1.959.223.024,00	88,44	2.107.279.978,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	550.377.393,00	546.121.796,00	99,23	549.229.892,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.640.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.724.662.412,00	3.267.506.067,00	87,73	2.778.834.403,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.889.541,90	1.540.000,00	81,50	0,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.423.479,68	2.525.546.195,00	70,15	3.314.516.370,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	270.134.572,32	240.740.000,00	89,12	206.692.846,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	28.174.400,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	441.469.442,20	433.050.188,00	98,09	355.037.975,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	274.055.670,00	273.036.611,00	99,63	195.039.500,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	155.688.600,00	149.200.000,00	95,83	9.540.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	729.441.084,00	660.202.116,00	90,51	553.121.720,00
21	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.062.871.051,00	5.839.616.256,00	96,32	5.863.736.844,00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.017.359.189,68	4.766.891.428,75	95,01	10.372.614.790,00
23	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.088.113.021,00	30.295.383.079,00	86,34	42.847.144.424,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
24	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.436.875.000,00	1.390.666.833,00	96,78	3.235.437.740,00
26	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.026.479.310,00	3.029.079.600,00	75,23	4.239.855.200,00
27	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.876.116.700,00	3.128.109.338,00	80,70	3.235.426.056,00
28	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	371.744.500,00
29	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.839.880.750,00	2.030.900.625,00	52,89	915.439.450,00
31	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	442.500.000,00	441.000.000,00	99,66	0,00
32	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000,00	145.000.000,00	96,67	74.625.000,00
33	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36.630.000,00	36.612.500,00	99,95	16.300.000,00
34	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	205.072.500,00	189.047.500,00	92,19	725.376.150,00
35	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	316.072.500,00	309.565.000,00	97,94	254.918.000,00
36	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	26.085.000,00	26.070.000,00	99,94	38.650.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.095.000,00	16.050.000,00	99,72	18.755.000,00
38	Belanja Pakaian KORPRI	3.829.500,00	3.100.000,00	80,95	253.617.540,00
39	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.545.000,00	8.500.000,00	80,61	29.350.000,00
40	Belanja Pakaian Batik Tradisional	106.824.000,00	97.720.000,00	91,48	94.250.000,00
41	Belanja Pakaian Olahraga	96.300.000,00	85.340.000,00	88,62	348.063.500,00
42	Belanja Pakaian Paskibraka	236.155.290,00	232.951.000,00	98,64	0,00
	JUMLAH	78.103.965.174,68	66.915.214.016,75	85,67	92.769.173.455,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

- a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas belanja tidak terealisasi 100% karena umumnya realisasi bahan bakar dan pelumas dibayarkan riil sesuai nota pengisian BBM. Di Dinas Perhubungan, realisasi kurang karena terdapat selisih penurunan harga BBM. Dan di beberapa SKPD, seperti Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja, realisasi BBM disesuaikan pada rekening jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan belanja pemeliharaan alat angkutan dan belanja suku cadang kendaraan dinas. Sementara realisasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, disesuaikan pada rekening belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor Perorangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman terdapat pada Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan. Pada Dinas Pertanian, realisasi dicapai hanya sebesar 68,47% atau sebesar Rp30.474.500,00 dari anggaran Rp44.510.500,00, disebabkan proses penawaran dan negosiasi pada e-katalog. Harga di RKA sebagaimana dalam Standar Biaya Umum (SBU) harus mengikuti harga terendah di e-katalog;
- c. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya tidak dianggarkan, karena belanja ini tidak dibutuhkan untuk TA 2024;
- d. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dianggarkan Rp3.600.423.479,68 dengan realisasi Rp2.525.546.195,00 atau 70,15% terjadi karena pencairan melewati proses e-katalog. Dimana, harga penawaran e-katalog tidak sesuai harga RKA sehingga terjadi selisih kurang;
- e. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, tidak dianggarkan pada TA 2024, karena menyesuaikan dengan perubahan kodefikasi/rekening belanja. Pos belanja ini telah disesuaikan pada rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
- f. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan Pendukung Olahraga dianggarkan di Dinas Pemuda Dan Olahraga sejumlah Rp155.688.600,00, dengan realisasi sebesar Rp149.200.000,00 atau 95,83%. Belanja ini didasarkan pada Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Perlengkapan Pendukung Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 Maret 2024. Meliputi, perlengkapan pendukung olahraga senilai Rp114.240.000,00 berupa bola kaki, bola volly, kostum pertandingan yang dibagikan kepada 16 Desa. Juga perlengkapan olahraga papan catur dan jam catur sebesar Rp8.700.000,00 yang digunakan dalam *tournament* catur Bupati Cup se Bolaang Mongondow dan Bupati Cup se Bolaang Mongondow Raya. Dan, direalisasikan pengadaan kaos olahraga sebesar Rp26.260.000,00. (Rincian atas belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga dapat dilihat pada **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini);
- g. Belanja Obat-Obatan-Obat Tahun 2024 sebesar Rp6.062.871.051 dengan realisasi Rp5.839.616.256,00 atau sebesar 93,32%. Belanja ini teranggarkan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang dan 18 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM);
- h. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp5.017.359.189,68 dengan realisasi Rp4.766.891.428,75 atau sebesar 95,01%. Belanja ini tertata pada



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang dan 18 PKM; dan

- i. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat guna mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp35.088.113.021,00 dan realisasinya sebesar Rp30.295.383.079,00 atau 86,34%. Sementara Tahun 2023 realisasi sebesar Rp 42.847.144.424,00, mengalami penurunan sebesar Rp12.551.761.345,00 atau 29,29%. (*Rincian atas belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dapat dilihat pada Lampiran 14 Laporan Keuangan ini*).

Realisasi belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat untuk beberapa pos belanja didasarkan pada Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tanggal 8 September 2024;
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Bidang Pendidikan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 427 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Makanan Tambahan Susu Intervensi Gizi Spesifik Dalam Percepatan Penurunan Dan Penanganan Stunting Dan Perbaikan Status Gizi Buruk/Kurang Pada Balita Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bantuan Pengisian Beras Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 November 2024;
5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bantuan Pengisian Pangan Beras Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Juni 2024;
6. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 4 Januari 2024;
7. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 239 Tentang Penetapan Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Mengembangkan Pangan Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Mei 2024;
 8. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Salinan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah Tanggal 6 Juli 2023;
 9. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Di Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024;
 10. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan, Bantuan Peralatan dan Mesin Pertanian/Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 4 Januari 2024;
 11. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Dan Bantuan Pupuk Nitrogen, Phospat dan Kalium Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 4 Januari 2024;
 12. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 417 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Dan Pupuk Nitrogen, Phospat Dan Kalium Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 14 Oktober 2024;
 13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian Benih Padi Inbrida Dan Pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 November 2024;
 14. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Juni 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

15. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024 Tanggal 8 Maret 2024;
16. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian Benih Jagung Hibrida Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 21 Maret 2024;
17. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 427 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Makanan Tambahan Susu Intervensi Gizi Spesifik Dalam Percepatan Penurunan Dan Penanganan Stunting Dan Perbaikan Status Gizi Buruk/Kurang Pada Balita Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
18. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 November 2024;
19. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024 Tanggal 11 November 2024;
20. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 339 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Penerima Gazebo Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 Agustus 2024;
21. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panitia, Juri, Dewan Hakim Dan Panitera, Serta Pemberian Uang Pembinaan Juara Pada Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXX Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 Februari 2024;
22. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Lomba Monuntul Dan Besaran Hadiah Lomba Monuntul Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 22 Maret 2024;
23. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penilai Dan Besaran Hadiah Pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 November 2024;
24. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 386 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Penerima



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
25. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 Maret 2024;
 26. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 234 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar dan Jenis Barang Bantuan Sosial Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Mei 2024;
 27. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar dan Jenis Barang Bantuan Alat Bantu Bagi Para Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Mei 2024;
 28. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 365 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar dan Jenis Barang Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 23 Agustus 2024;
 29. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar dan Jenis Barang Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas Terlantar, Dan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
 30. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 424 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar dan Jenis Barang Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar Bagi Gelandangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
 31. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 425 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar dan Jenis Barang Bantuan Sosial Sandang Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Dan Gelandangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 32. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 481 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pembawa Acara, Pembaca Doa, Wasit Kabupaten dan Penerima Hadiah/Uang Pembinaan Peserta Perlombaan Kegiatan *Tournament* Catur Bupati Bolaang Mongondow Cup I Tahun Anggaran 2024 Tanggal 20 November 2024; dan
 33. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 247 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juara Lomba Perlombaan Desa Dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2024 Tanggal 3 Juni 2024.

Tabel 5.35
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No	OPD	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan	6.810.262.000,00	5.570.291.501,00	81,79	11.582.599.639,00
2	Dinas Kesehatan	388.751.850,00	388.751.850,00	100,00	1.246.932.708,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.384.493.707,00	3.384.493.707,00	100,00	2.376.895.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.318.808.000,00	8.315.585.500,00	99,96	4.293.064.200,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	390.932.428,00	377.479.586,00	96,56	2.974.000.436,00
6	Dinas Sosial	1.018.900.358,00	947.386.500,00	92,98	371.962.400,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	891.182.377,00	891.094.000,00	99,99	2.364.295.720,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.885.000,00	3.750.000,00	96,53	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00	296.465.400,00	98,82	352.200.000,00
10	Dinas Koperasi dan UKM	500.000.000,00	494.799.500,00	98,96	200.320.000,00
11	Dinas Pemuda Dan Olahraga	36.075.000,00	32.900.000,00	91,20	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00
12	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	45.560.000,00	45.371.314,00	99,59	90.720.341,00
13	Dinas Pertanian	8.344.942.195,00	6.250.052.507,00	74,90	9.339.333.580,00
14	Dinas Perkebunan	3.583.280.106,00	3.226.861.714,00	90,05	5.578.347.900,00
15	Bagian Kesejahteraan Rakyat	67.155.000,00	66.250.000,00	98,65	0,00
	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	20.980.000,00
16	Sekretariat DPRD	3.885.000,00	3.850.000,00	99,10	0,00
17	Dinas Perikanan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.051.607.500,00
JUMLAH		35.088.113.021,00	30.295.383.079,00	86,34	42.847.144.424,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja ini dianggarkan pada 17 OPD. Lima OPD dengan anggaran dan realisasi terbesar yakni :

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman realisasi sebesar Rp8.315.585.500,00, adalah kegiatan pembangunan saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan penerangan jalan lingkungan dan peningkatan kualitas jalan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- lingkungan di 14 lokasi (desa). Atas belanja ini, tidak dibuatkan Keputusan Bupati, tapi dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST);
- Dinas Pertanian realisasi sebesar Rp6.250.052.507,00 berupa kegiatan pengadaan benih jagung hibrida pada kegiatan pemanfaatan sandang hewan tanaman, pengadaan alat tanam jagung, pengadaan mesin pangkas rumput, pengadaan hand traktor, dan pengadaan combine harvester kepada 71 kelompok tani;
 - Dinas Pendidikan realisasi sebesar Rp5.570.291.501,00 adalah kegiatan fisik berupa pembangunan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan RKB, pembangunan laboratorium komputer, pembangunan ruang PAUD, pembangunan area bermain, pembangunan ruang kepala sekolah/ ruang guru, pembangunan ruang UKS, dan pembangunan jamban pada 15 sekolah swasta. Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang tidak terealisasi di Dinas Pendidikan yakni pekerjaan fisik pembangunan RKB SMP Nusa Alam Cendekia Muntoi di Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat, karena pemutusan kontrak. Pemutusan pekerjaan konstruksi paket pembangunan RKB SMP Nusa Alam Cendekia Muntoi berdasarkan kontrak Nomor 049/DIKNAS/SP-PPL/FISIK.SMP/VIII/2024 yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2024, dengan durasi waktu 120 kalender atau sampai 30 November 2024 oleh pihak penyedia CV Cahaya Karunia karena beberapa sebab. Yakni keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang signifikan dan tidak dapat diterima, melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan; tidak adanya upaya yang memadai untuk mempercepat pekerjaan ketika terjadi keterlambatan; pengabaian terhadap permintaan PPK untuk membuat rencana percepatan pekerjaan berupa surat teguran I, surat teguran II dan *show cause meeting* pertama dan kedua dan surat pemberitahuan kontrak kritis; tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam periode waktu tertentu; dan, kelalaian penyedia dalam mobilisasi pekerja dan bahan di lapangan sehingga terjadi kontrak kritis mengakibatkan progres rencana tidak mungkin lagi dapat dikejar dan waktu kontrak sudah selesai;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasi Rp3.384.493.707,00 adalah pekerjaan fisik paket pembangunan SPALD-S Tangki Septik Skala di 14 desa;
 - Dan realisasi Dinas Perkebunan Rp3.226.861.714,00 terbagi dalam beberapa kegiatan yang diserahkan ke desa dan kelompok tani. Yakni, program penyediaan dan pengembangan sarana pendukung pertanian, yakni mesin pangkas rumput,



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

hand sprayer, corn sheller, kendaraan Viar R-3, kegiatan pemanfaatan sandang hewan/tanaman berupa bantuan kakao sambung pucuk, bibit kelapa genjah, dan bibit pala, kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usana tani berupa pembangunan jalan produksi perkebunan, kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berupa bantuan fungisida, herbisida, dan insektisida dan kegiatan penyuluhan pertanian berupa bantuan bibit kakao sambung pucuk dan pupuk NPK;

- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Kesehatan adalah belanja pemberian makanan tambahan (PMT) susu balita status gizi kurang usia 12-59 bulan dan PMT susu balita *stunting* usia 12-59 Bulan. Rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.36
PMT Susu Balita Gizi Kurang Usia 12-59 Bulan
Susu Nestle DanGro Gain& Grow1+ @400 gram

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Barang (Dos)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Dumoga Barat	12	540	46.413.000,00
2	Kecamatan Lolayan	10	390	33.520.500,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	9	170	14.611.500,00
4	Kecamatan Dumoga Tenggara	7	210	18.049.500,00
5	Kecamatan Lolak	15	390	33.520.500,00
6	Kecamatan Dumoga	9	210	18.049.500,00
7	Kecamatan Dumoga Utara	10	210	18.049.500,00
8	Kecamatan Poigar	12	270	23.206.500,00
9	Kecamatan Sang Tombolang	6	140	12.033.000,00
10	Kecamatan Dumoga Tengah	7	140	12.033.000,00
11	Kecamatan Bilalang	4	90	7.735.500,00
12	Kecamatan Passi Timur	11	380	32.661.000,00
13	Kecamatan Bolaang	7	170	14.611.500,00
14	Kecamatan Bolaang Timur	8	620	53.289.000,00
	JUMLAH	127	3.930	337.783.500,00

Sumber data: Dinas Kesehatan (diolah)

Tabel 5.37
PMT Susu Balita *Stunting* 12-59 Bulan
Susu Nestle DanGro Gain& Grow1+ @400 gram

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Barang (Dos)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Sang Tombolang	5	60	5.157.000,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	7	102	8.766.900,00
3	Kecamatan Dumoga Utara	5	50	4.297.500,00
4	Kecamatan Lolayan	8	90	7.735.500,00
5	Kecamatan Lolak	4	69	5.930.550,00
6	Kecamatan Dumoga Tenggara	2	20	1.719.000,00
7	Kecamatan Bolaang	5	60	5.157.000,00
8	Kecamatan Dumoga Tenggara	3	30	2.578.500,00
9	Kecamatan Dumoga	1	12	1.031.400,00
10	Kecamatan Dumoga Timur	2	20	1.719.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Barang (Dos)	Realisasi (Rp)
11	Kecamatan Poigar	1	10	859.500,00
12	Kecamatan Bilalang	1	10	859.500,00
13	Kecamatan Passi Barat	2	50	4.297.500,00
14	Kecamatan Bolaang Timur	1	10	859.500,00
	JUMLAH	47	593	50.968.350,00

Sumber data: Dinas Kesehatan (diolah)

- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Ketahanan Pangan adalah belanja pengisian lumbung pangan beras kepada dua Gapoktan Desa Nonapan II Kecamatan Poigar dan Gapoktan Desa Mopugad Utara II Kecamatan Dumoga Utara, masing masing 2.959 kilogram atau total 5.918 kilogram, pengisian lumbung pangan beras kepada Gapoktan Gogaluman Desa Konarom, Gapoktan Koyayang Desa Solimandungan Baru, dan Gapoktan Maesa Desa Ibolian Satu, masing-masing 7.000 kilogram atau total 21.000 kilogram beras. Juga, penyaluran benih tanaman, alat pertanian dan pupuk organik kepada 10 kelompok wanita tani (KWT) masing-masing sebesar Rp14.545.000,00 atau total realisasi Rp145.450.000,00. Yakni KWT Motobatu Desa Konarom, KWT Mawar Desa Werdhi Agung Selatan, KWT Beringin Kelurahan Imandi, KWT Mandiri Desa Matali Baru, KWT Bersatu Desa Solimandungan Baru, KWT Gaharu Desa Solimandungan Baru, KWT Walet Desa Langagon, KWT Mosobatu Desa Mongkoinit, KWT Miracle Desa Nonapan dan KWT Matuari Desa Nonapan;
- Sementara belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat khusus cadangan pangan pemerintah daerah sudah direalisasikan sebesar Rp375.144.000,00 atau sebanyak 25.520 kilogram beras, masih tersimpan di gudang Bulog dan belum didistribusikan bersifat *force mayor*, atau menunggu data keluarga penerima manfaat (KPM) dari wilayah yang terdampak kerawanan/kerentanan pangan;

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Barang Diserahkan di Dinas Ketahanan Pangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Persediaan Untuk dijual/ diserahkan-Persediaan untuk dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengisian Lumbung Pangan)	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
2	Belanja Persediaan Untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengisian Lumbung Pangan)	283.500.000,00	283.500.000,00	100,00
3	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat (Penyaluran Benih tanaman, alat pertanian dan Pupuk organik	145.450.000,00	145.450.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	Belanja Persediaan Untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah)	375.232.377,00	375.144.000,00	99,98
JUMLAH		891.182.377,00	891.094.000,78	99,99

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Koperasi dan UKM adalah belanja bantuan barang kepada 19 kelompok usaha kecil menengah yakni usaha *catering*, usaha kue, perbengkelan, usaha menjahit dan pertukangan di Kecamatan Lolak, Lolayan, Bolaang Timur, Bolaang, Bilalang dan Sang Tombolang;
- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pariwisata Tahun 2024 adalah belanja pembuatan satu unit gazebo di lokasi air terjun Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat dengan realisasi sebesar Rp45.371.314,00;
- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah belanja paket Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting* kepada 31 Desa, yang masing-masing mendapatkan satu paket senilai Rp9.563.400,00;
- Untuk belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 476/D.16/DPPKB/15/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024;
- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dengan realisasi Rp377.479.586,00 adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, berupa rekonstruksi tebing dan saluran sungai Desa Solimandungan Dua dan Desa Mongkoinit, jasa konsultansi pengawasan serta belanja bahan logistik;
- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan Dinas Sosial adalah kegiatan bantuan sosial kepada 31 Kelompok Usaha Bersama (Kube) berupa bantuan peralatan pertukangan, *catering*, ternak ayam dan pakan ayam, perbengkelan, dan perlengkapan kanopi. Juga bantuan sosial sandang kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia, bantuan sosial sandang bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar, bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

alat bantu bagi para penyandang disabilitas (kursi roda, alat bantu dengar) bantuan sosial kebutuhan dasar bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas (beras, biskuit kaleng, gula, ikan, mi instan, minyak kelapa, susu kaleng, telur) dan bantuan sosial sandang kepada penyandang disabilitas, lanjut usia dan gelandangan berupa handuk, pakaian dalam, kain sarung, sabun mandi batangan, sabun deterjen bubuk dan selimut;

- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Sekretariat Daerah adalah belanja trofi kegiatan Monuntul, trofi Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Hadits (STQH), dan trofi lomba UKS dan honor panitia lomba/kegiatan;
- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah belanja trofi/hadiah lomba desa tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow;

Tabel 5.39
Realisasi Belanja Trofi Hadiah Lomba Desa

No	Penerima	Peringkat	Hadiah	Keterangan
1	Desa Doloduo Dua	Juara I	Trofi	Paket Trofi Rp Rp3.750.000
2	Desa Mopuya Selatan	Juara II	Trofi	
3	Desa Modomang	Juara III	Trofi	

Sumber data: DPMD (diolah)

- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat di Dinas Pemuda Dan Olahraga, adalah belanja piala/trofi yang diserahkan ke Kwarcab Bolaang Mongondow sebanyak 75 set dengan total sebesar Rp25.500.000,00 dan belanja piala/trofi lomba catur sebanyak 2 paket @Rp3.700.000,00, sebagai hadiah pemenang lomba catur tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow dan pemenang lomba catur tingkat Bolaang Mongondow Raya;
- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat di Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.850.000,00. Namun realisasinya sebagai belanja peralatan rumah tangga berupa piring, dll. Hal ini karena terjadi kesalahan penginputan rekening saat APBD-P. Seharusnya anggaran tersebut untuk belanja piring ceper di rekening belanja bahan-bahan lainnya;
- Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat di Dinas Perikanan dianggarkan Rp1.000.000.000,00 namun realisasi Rp0,00. Anggaran belanja ini adalah pengadaan mesin tempel 6 PK Rp860.250.000,00, pengadaan bibit ikan nila dan pellet



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp46.125.000,00 dan pengadaan calon induk ikan nila, ikan mas dan pelet Rp93.625.000,00, yang diperoleh dari pengangggaran dana insentif fiskal pada APBD-P 2024. Anggaran ini tidak terserap karena perhitungan tidak akan selesai tepat waktu dan Dinas Perikanan tidak bisa memenuhi syarat permintaan realisasi keuangan sebagaimana tahapan yang ada; dan

- Akun belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya Tahun 2024 dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.390.666.831,81 dengan realisasi 100,00%. Ini adalah belanja pembangunan pagar Kepolisian Sektor (Polsek) Passi di Kecamatan Passi Barat dan pembangunan pagar Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Kotamobagu, belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan pagar Polsek Passi, jasa konsultansi pengawasan pembangunan pagar Polsek Passi, dan jasa konsultansi pengawasan pembangunan pagar kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Belanja pembangunan pagar Polsek Passi sebesar Rp452.560.000,00 berdasarkan pada Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kepolisian Sektor Passi Kepolisian Resor Kotamobagu Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024. Sementara belanja pembangunan pagar Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebesar Rp984.315.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024. Rinciannya seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.40
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan
untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa Pembayaran Kontrak	%
1	Jasa Konsultansi perencanaan pembangunan pagar Polsek Passi	29.847.622,50	29.847.622,50	0,00	100,00
2	Jasa Konsultansi pengawasan pembangunan pagar Polsek Passi	34.584.159,00	34.584.159,00	0,00	100,00
3	Pembangunan pagar kantor Polsek Passi	356.313.550,31	356.313.550,31	0,00	100,00
4	Jasa konsultansi pengawasan pembangunan	79.254.000,00	79.254.000,00	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa Pembayaran Kontrak	%
	pagar kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu				
5	Pembangunan pagar kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu	890.667.500,00	890.667.500,00	0,00	100,00
	JUMLAH	1.390.666.831,81	1.390.666.831,81	0,00	100,00

Sumber data: Kesbangpol (diolah)

- j. Belanja makanan dan minuman rapat, dianggarkan Rp4.026.479.310,00, realisasi sebesar Rp3.084.740.218,00 atau 76,60% tidak tercapainya realisasi makanan dan minuman rapat seluruhnya disebabkan beberapa alasan, antara lain, kegiatan rapat terbanyak dilaksanakan di hotel dan kurangnya kunjungan tamu selang TA 2024. Khusus Dinas Pertanian, rapat Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pada Januari hingga Mei 2024 tidak dilaksanakan karena pengurus KTNA belum terkonsolidasi dengan baik. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, belanja ini kurang terserap sebab rencana *update* acara sinkronisasi revisi RTRW kabupaten dengan RTRW provinsi tidak dilaksanakan. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan makan minum rapat Triwulan 1 dan Triwulan 2 tidak ada kegiatan, jadi tidak ada dokumentasi. Yang dipertanggungjawabkan adalah anggaran yang tertata di triwulan tiga dan triwulan empat. Sementara Dinas Kesehatan pelaksanaan kegiatan makan dan minuman rapat melalui dana alokasi khusus (BOK Kabupaten dan Puskesmas), sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin di antaranya konsumsi rapat untuk audit kasus kematian dan pembentukan jejaring layak hamil dan ANC disesuaikan dengan kebutuhan. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan TA 2024 tidak dianggarkan karena belum dibutuhkan.

Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial, realisasi 0,00% dari anggaran sebesar Rp5.250.000,00. Belanja ini dianggarkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota, namun kegiatan layanan di rumah perlindungan tidak dilaksanakan karena tidak ada korban yang terlayani 24 jam.

Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan dianggarkan Rp3.839.880.750,00, realisasinya Rp2.020.736.125,00 atau sebesar 52,62%. Realisasi rendah ini adalah anggaran yang tertata pada PKM Lolak (39,83%), PKM Pusian (67,55%), PKM Passi Barat (39,99%), PKM Pangian (6,48%), PKM Imandi (33%), PKM



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tungoi (30,15), PKM Tanoyan (53,46%), PKM Doloduo (13,54%), PKM Maelang (37,72%), PKM Bilalang (19%), PKM Inobonto (27,78%), PKM Komangaan (7,8%), PKM Tadoy (70,59%), PKM Werdhi Agung (41,17%), dan PKM Konarom (53,87%).

Belanja ini adalah kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita gizi kurang dan ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis). Serapan anggaran tidak maksimal sebab jumlah sasaran yang terpasang di RKA berbeda dengan kasus yang ditemui petugas gizi di lapangan. Misalnya PKM Bilalang, teranggarkan dalam RKA jumlah balita gizi kurang berjumlah 25 balita. Namun yang bisa petugas intervensi di lapangan hanya 17 balita. Demikian pula sasaran ibu hamil KEK. Tertata dalam RKA sebanyak 35 ibu, namun yang ditemui di lapangan hanya 5 ibu. Sebab lain juga, adalah waktu pemberian makanan tambahan ini. Yang seharusnya 120 hari, terealisasi sampai akhir Desember 2024 hanya 114 hari.

Sementara di PKM Pusian, balita yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah balita gizi kurang dan *stunting*. Sementara PMT ibu hamil KEK yang seharusnya teranggarkan 120 hari, karena keterbatasan waktu hanya terealisasi 56 hari, seperti juga intervensi yang dilakukan terhadap balita gizi kurang. Selain itu, realisasi kurang karena saat pelaksanaan PMT ibu hamil, sebagian besar sudah melahirkan. Tersisa 2 (dua) ibu hamil berbeda desa yang belum melahirkan, sehingga kader tidak bersedia memasak sampai 120 hari.

Di sisi lain, beberapa PKM, seperti PKM Inobonto tidak maksimal dalam penyerapan belanja ini, sebab terkendala pada ketidaktahuan petugas atau penanggung jawab program gizi Puskesmas dalam pembuatan dan penyajian SPJ belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan.

2) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja barang tak habis pakai Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan atau realisasi 0,00%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp7.636.076,00.

3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp167.135.000,00 dan realisasi Rp165.750.000,00 atau sebesar 99,17%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Rp0,00. Rincian akun belanja sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.41

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.885.000,00	2.500.000,00	64,35	0,00
2	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	163.250.000,00	163.250.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		167.135.000,00	165.750.000,00	99,17	0,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan, teranggarkan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun realisasi hanya sebesar 64,35% dari anggaran Rp3.885.000,00, karena anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan peralatan jaringan.

b. Belanja Jasa

Belanja jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp96.228.989.007,96 dan realisasi sebesar Rp87.523.823.576,00 atau mencapai tingkat serapan 90,95%, dan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp93.521.003.377,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.997.179.801,00 atau 6,41%. Rincian belanja jasa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.42
Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Kantor	76.035.104.084,96	71.178.688.948,00	93,61	75.447.769.610,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.901.873.867,00	8.551.417.604,00	78,44	9.167.546.183,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	834.639.940,00	743.438.050,00	89,07	552.681.000,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.472.677.416,00	4.323.584.000,00	79,00	3.663.899.750,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	83.559.024,00	83,56	1.848.388.364,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	98.284.950,00	98,28	144.428.000,00
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	35.000.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis,	2.588.693.700,00	2.350.851.000,00	90,81	2.540.290.470,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	serta Pendidikan dan Pelatihan				
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	96.000.000,00	94.000.000,00	97,92	96.000.000,00
JUMLAH		96.228.989.007,96	87.523.823.576,00	90,95	93.521.003.377,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja sewa aset tetap lainnya Tahun 2024 tidak dianggarkan karena tidak dibutuhkan, sementara realisasi Tahun 2023 sebesar Rp25.000.000,00.

1) Belanja Jasa Kantor

Belanja jasa kantor Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp76.035.104.084,96 dan terealisasi sebesar Rp71.178.688.948,00 atau mencapai 93,61%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp75.447.769.610,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.269.080.662,00 atau 5,66%. Rincian sebagai berikut :

Tabel 5.43
Belanja Jasa Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.564.856.000,00	1.641.268.600,00	63,99	2.681.450.875,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.472.600.000,00	2.280.960.000,00	92,25	1.896.370.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	109.800.000,00	99.000.000,00	90,16	225.000.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	545.000.000,00	536.000.000,00	98,35	2.047.600.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	3.000.000,00	250.000,00	8,33	4.168.300.000,00
6	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	53.850.000,00	5.400.000,00	10,03	106.881.250,00
7	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	421.200.000,00	397.600.000,00	94,40	410.700.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00	4.804.000.000
9	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.739.921.620,00	18.614.853.075,00	94,30	19.847.355.558,00
10	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	60.000.000,00	40.000.000,00	66,67	63.480.500,00
11	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	84.150.000,00	83.850.000,00	99,64	2.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
12	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	748.800.000,00	748.800.000,00	100,00	748.500.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	480.000.000,00	471.926.500,00	98,32	465.548.050,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	846.000.000,00	846.000.000,00	100,00	846.000.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	35.000.000,00	30.000.000,00	85,71	18.000.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.206.348.686,00	5.082.511.949,00	97,62	5.847.339.033,00
19	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	189.000.000,00	187.000.000,00	98,94	194.100.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.797.308.270,00	5.714.760.000,00	98,58	3.642.125.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.941.380.000,00	2.376.105.604,00	80,78	2.370.700.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.587.850.000,00	3.503.866.667,00	97,66	3.382.438.025,00
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.472.300.000,00	3.422.600.000,00	98,57	3.319.200.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.848.722.500,00	3.742.811.900,00	97,25	3.802.600.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	558.000.000,00	519.500.000,00	93,10	518.000.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.550.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
27	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	79,59	22.200.000,00
28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	94.349.000,00	75.100.000,00	79,60	88.700.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	271.500.000,00	244.950.000,00	90,22	210.303.400,00
30	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	16.497.600,00	5.950.000,00	36,07	38.043.218,00
31	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	407.000.000,00	407.000.000,00	100,00	144.473.600,00
32	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.774.000,00	0,00	0,00	9.840.000,00
33	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	223.264.000,00	217.250.000,00	97,31	197.213.939,00
34	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	376.500.000,00	323.235.739,00	85,85	238.357.654,00
35	Belanja Jasa Kalibrasi	56.939.600,00	28.412.000,00	49,90	153.090.000,00
36	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	56.428.000,00	56.332.500,00	99,83	132.700.500,00
37	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	961.400,00	40,06	1.113.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
38	Belanja Tagihan Air	61.020.000,00	21.831.272,00	35,78	12.350.000,00
39	Belanja Tagihan Listrik	6.848.658.963,36	6.469.445.840,00	94,46	6.637.435.309,00
40	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.490.567.565,00	4.438.408.000,00	98,84	3.784.464.000,00
41	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	2.944.872.280,00	2.708.341.790,00	91,97	1.929.093.454,00
42	Belanja Penambahan Daya	30.000.000,00	27.643.432,00	92,14	0,00
43	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	357.110.000,00	217.011.900,00	60,77	223.952.445,00
44	Belanja Medical Check Up	222.584.000,00	2.801.400,00	1,26	195.000.000,00
45	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	293.002.000,00	80.949.380,00	27,63	0,00
JUMLAH		76.035.104.084,96	71.178.688.948,00	93,61	75.447.769.610,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

- Belanja jasa kantor honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia pada TA 2024 penyerapan anggaran hanya sebesar 63,99%. Realisasi kurang karena honorarium kegiatan yang narasumbernya dari OPD pelaksana kegiatan, hanya bisa dibayarkan setengah dari anggaran. Demikian pula honorarium panitia sebagaimana tertuang dalam SK Panitia tidak diproses/tidak dibayarkan. Di Dinas Pendidikan, anggaran tidak terserap karena kegiatan bimbingan teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (Arkas) BOP dan Kesetaraan tidak dilaksanakan, juga terjadi kesalahan dalam perencanaan, dimana kegiatan yang seharusnya *fullboard*, tapi diinput *fullday*. Sementara di Dinas Pertanian, Surat Keputusan tidak diproses sebab tidak ada narasumber yang memenuhi syarat sehingga anggaran kurang terserap;
- Anggaran belanja jasa kantor pos honorarium rohaniawan hanya terserap 8,33% atau sebesar Rp250.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 sebab semisal di Sekretariat DPRD, realisasi disesuaikan dengan jumlah Propemperda;
- Anggaran belanja jasa tenaga laboratorium dianggarkan di Dinas Lingkungan Hidup. Anggaran terserap sebesar 66,67% atau Rp40.000.000,00 dari pagu Rp60.000.000,00. Hal ini disebabkan jasa ini dibayarkan sesuai kebutuhan;
- Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan, Tahun 2024 tidak dianggarkan karena belanja ini tidak dibutuhkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Sementara realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp16.000.000,00;
- e) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00 namun realisasi 0,00 %. Belanja ini dianggarkan untuk penambahan daya listrik kantor namun tidak ada penambahan daya listrik sehingga tidak direalisasikan;
 - f) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Tahun 2024 tidak dianggarkan, karena belum dibutuhkan;
 - g) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik, salah satunya tertata di Dinas Kesehatan. Belanja ini dialokasinya untuk perbaikan instalasi listrik. Kegiatan terlaksana namun pembayaran disesuaikan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Di lain pihak, kegiatan pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sudah tertata sekaligus dalam kontrak belanja modal gedung. Khusus belanja perencanaan dianggarkan menggunakan rekening belanja modal karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana menyatakan penganggaran belanja modal menggunakan metode perolehan yakni baik belanja perencanaan dan pengawasan dikapitalisasi ke belanja induknya;
 - h) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi tidak direalisasikan, karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - i) Belanja jasa kalibrasi dianggarkan Rp56.939.600,00 dengan realisasi Rp28.412.000,00 atau serapan anggaran hanya 49,90%. Hal ini disebabkan layanan jasa kalibrasi alat dibayarkan sesuai dengan jumlah alat dan instrumen yang diajukan;
 - j) Belanja tagihan air dianggarkan Rp61.020.000,00 realiasi Rp21.831.272,00 atau terserap 35,78%. Penyerapan anggaran kurang karena pemakaian air di dinas, badan dan kantor umumnya menggunakan air sumur dengan mesin pengisap menggunakan daya listrik. Di sisi lain, belanja tagihan air di Sekretariat Daerah, kurang terserap karena PDAM Lolak aktif beroperasi kembali terhitung Juli 2024, atau pembayaran tagihan rekening air mulai dibayarkan Agustus 2024 sesuai dengan pemakaian;
 - k) Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan realisasi hanya 60,77% atau sebesar Rp217.011.900,00 dari pagu anggaran Rp357.110.000,00. Hal ini dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional dibayarkan sebagaimana tagihan;
 - l) Belanja medical check up Tahun 2024 terserap hanya 1,25% atau sebesar Rp2.801.400,00 dari anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp222.584.000,00. Hal ini disebabkan, Penjabat Bupati Ir. Limi Mokodompit, MM hanya sekali melakukan *check up* dan Penjabat Bupati dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS tidak pernah melakukan *medical check up*. Sementara di Sekretariat DPRD, belanja ini realiasi 0,00% karena pimpinan dan anggota DPRD tidak melaksanakan *medical check up*; dan

m) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN terserap hanya 27,63% atau sebesar Rp80.949.380,00 dari anggaran Rp293.002.000,00. Hal ini disebabkan pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN (sopir, *cleaning service* ataupun *security*) sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang ada.

2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja iuran asuransi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.901.873.867,00 dan terealisasi sebesar Rp8.551.417.604,00 atau mencapai 78,44%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 belanja premi asuransi terealisasi sebesar Rp9.167.546.183,00, mengalami penurunan sebesar Rp616.128.579,00 atau 6,72%. Rinciannya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.44
Belanja iuran Jaminan/Asuransi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.062.880.000,00	2.885.204.600,00	94,20	2.877.634.200,00
2	Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI	4.829.200.000,00	3.672.579.115,00	76,05	4.267.921.285,00
3	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP Kelas 3	672.000.000,00	636.955.200,00	94,78	781.124.400,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	178.571.820,00	145.518.960,00	81,49	707.337.110,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	223.231.632,00	181.898.700,00	81,48	533.529.188,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.108.120.000,00	589.484.147,00	53,20	0,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	827.870.415,00	439.776.882,00	53,12	0,00
JUMLAH		10.901.873.867,00	8.551.417.604,00	78,44	9.167.546.183,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah iuran jaminan kesehatan BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa yang besaran tagihan sebesar 4% dari gaji per bulan dan 1,00% dibayar oleh peserta.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PBI merupakan peserta jaminan kesehatan yang iurannya juga dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Iuran PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga jaminan kesehatan untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3.

Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi non ASN adalah belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 terserap maksimal. Dimana adanya subsidi atau bantuan iuran sebesar Rp2.800,00/orang x 23.248 peserta x 12 bulan. Adapun besaran penganggaran kurang tepat karena didasarkan pada jumlah kepesertaan kelas 3 secara keseluruhan, baik peserta aktif maupun tidak.

Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI realisasi mencapai 76,05% disebabkan kontribusi JKN bagi PBI dibayar sesuai pengajuan pembayaran dari BPJS sampai dengan Desember 2024.

Sementara belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan, hanya terealisasi Rp589.484.147,00 atau 53,20% dari anggaran sebesar Rp1.108.120.000,00. Demikian pula belanja iuran jaminan kematian bagi pekerja rentan, terealisasi Rp439.776.882,00 atau 53,12% dari anggaran sebesar Rp827.870.415,00.

Serapan anggaran rendah dua pos belanja ini di OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker). Diketahui, sejak Tahun 2024 belanja ini dikelola Distransnaker. Maka dilakukan proses verifikasi dan validasi data peserta program perlindungan pekerja rentan secara terkoordinasi antara Distransnaker, Disdukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasar hasil verifikasi dan validasi data peserta, maka BPJS ketenagakerjaan melakukan penagihan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Hanya saja, selang bulan Januari-Mei 2024, penagihan belum dilakukan karena belum terverifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Capil. Sehingga surat penagihannya nanti dimulai Juni 2024. Itu sebabnya, anggaran yang tersedia untuk 12 bulan, hanya dibayarkan untuk enam bulan.

3) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Belanja sewa peralatan mesin Tahun 2024 dianggarkan Rp834.639.940,00 dan terealisasi sebesar Rp743.438.050,00 atau penyerapan anggaran mencapai 89,07%. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp552.681.000,00,



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

mengalami kenaikan sebesar Rp190.757.050,00 atau 34,51% Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.45
Belanja Sewa Peralatan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	71.815.000,00	61.800.000,00	86,05	78.620.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00	34.050.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.550.000,00	5.000.000,00	90,09	5.550.000,00
4	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	288.310.840,00	218.839.450,00	75,90	268.548.500,00
5	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.662.500,00	5.000.000,00	75,05	12.912.500,00
6	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	392.000.000,00	388.500.000,00	99,11	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan Umum	60.751.600,00	54.748.600,00	90,12	153.000.000,00
JUMLAH		834.639.940,00	743.438.050,00	89,07	552.681.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya tidak terserap maksimal di OPD Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Disebabkan kurangnya kegiatan kantor yang membutuhkan sewa alat tidak seperti tahun sebelumnya. Permintaan atas peralatan untuk disewa kepada penyedia masih dilakukan penawaran oleh pejabat pengadaan sehingga harga penyewaan lebih murah dari HPS yang membuat anggaran tidak terserap. Juga disebabkan adanya kegiatan organisasi eksternal yang biasa dilaksanakan pada Tahun 2024 tidak dilaksanakan.

Belanja Sewa Peralatan Studio Audio tidak mencapai realisasi 100% di OPD Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Passi Barat untuk alokasi kegiatan Musrembang yang disebabkan karena tahun ini kegiatan Musrembang tidak banya seperti tahun sebelumnya yang membutuhkan sewa peralatan studio audio. Tapi pembayaran sewa alat studio audio dibayarkan sesuai tagihan dan realisasi tidak mencapai 100%.

4) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja sewa gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp5.472.677.416,00 dan terealisasi sebesar Rp4.323.584.000,00 atau mencapai 79,00%. Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.663.899.750,00, mengalami kenaikan sebesar Rp659.684.250,00 atau 18%. Rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.46
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	343.250.000,00	343.250.000,00	100,00	343.250.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	29.442.000,00	29.442.000,00	100,00	29.442.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.151.930.416,00	3.016.502.000,00	72,65	3.113.263.250,00
4	Belanja Sewa Hotel	948.055.000,00	934.390.000,00	98,56	177.944.500,00
JUMLAH		5.472.677.416,00	4.323.584.000,00	79,00	3.663.899.750,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan kurang terserap khususnya anggaran yang tertata di OPD Dinas Pendidikan. Penyebabnya, terjadi kesalahan dalam perencanaan, pada pelaksanaan teknis kegiatan tidak melakukan penyewaan atas bangunan gedung tempat pertemuan. Sementara di Sekretariat DPRD tidak terserap 100% karena pada waktu penyewaan gedung pelaksanaan rapat, mendapatkan potongan harga.

5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja sewa aset tetap lainnya Tahun 2024 yang biasanya dianggarkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak dianggarkan karena belum dibutuhkan. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 berupa belanja sewa naskah (manuskrip)/asli.

6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Belanja jasa konsultasi konstruksi Tahun 2024 dianggarkan Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.559.024,00 atau 83,56%. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.848.388.364,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.764.829.340,00 atau 95,48%. Belanja jasa konsultasi konstruksi Tahun 2024 rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.47
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	57.797.500,00,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	46.762.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	3.907.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	7.969.600,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	860.380.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	93.340.028,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00	83.559.024,00	83,55	99.375.636,00
	JUMLAH	100.000.000,00	83.559.024,00	83,56	1.848.388.364,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Rekening belanja jasa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air, Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan, karena tidak dibutuhkan.

7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Belanja jasa konsultasi non konstruksi Tahun 2024 dianggarkan Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp98.284.950,00 atau 98,28%, sedangkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.428.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp46.143.050,00 atau 31,95%. Rincian belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagai berikut:

Tabel 5.48
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Konsultasi berorientasi layanan –jasa survei	100.000.000,00	98.284.950,00	98,28	144.428.000,00
JUMLAH		100.000.000,00	98.284.950,00	98,28	144.428.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja beasiswa pendidikan PNS Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau mencapai 100%. Sementara Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp35.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp65.000.000,00 atau 185,71 %.

Belanja beasiswa pendidikan PNS merupakan beasiswa bagi PNS yang dianggarkan di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Tanggal 1 April 2024. Bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud, diberikan dalam bentuk uang tunai dimana untuk Tahun 2024 penerima adalah mahasiswa jenjang pendidikan dokter spesialis dan strata dua. Belanja beasiswa pendidikan PNS rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.49
Daftar Penerima Bantuan Tugas Belajar Bagi PNS

(dalam rupiah)

No	Penerima	Perangkat Daerah Asal	Tujuan	Besaran Bantuan
1	Dr. I Wayan Satriadi	Dokter Umum Ahli Pertama pada RSUD Kab. Bolaang Mongondow	Prodi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Fakultas Kedokteran Unsrat Mandado	Rp50.000.000/ 2 Semester
2	Sitty R. Mokobombang, ST	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow	Prog. Pendidikan Magister S-2 Linkage Jepang Perencanaan Wilayah dan Kota ITB	Rp25.000.000/ 2 Semester
3	Aldiansyah, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Bolaang Mongondow	Pascasarjana Prodi Magister Manajemen Pembangunan	Rp25.000.000/ 2 Semester



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penerima	Perangkat Daerah Asal	Tujuan	Besaran Bantuan
			Daerah Fakultas Ekonomi dan Manajemen ITB	

Sumber data: Aplikasi SIPD dan OPD (diolah)

9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.588.693.700,00 dan terealisasi sebesar Rp2.350.851.000,00 atau mencapai 90,81%. Sedangkan Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp2.540.290.470,00, mengalami penurunan sebesar Rp189.439.470,00 atau 7,46%. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.717.907.000,00	1.546.128.000,00	90,00	476.555.470,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	722.896.700,00	656.833.000,00	90,86	1.909.900.000,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	147.890.000,00	147.890.000,00	100,00	153.835.000,00
	JUMLAH	2.588.693.700,00	2.350.851.000,00	90,81	2.540.290.470,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

- a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.717.907.000,00 dan realisasi Rp1.546.128.000,00 atau serapan anggaran hanya sebesar 90,00% di OPD Dinas Kesehatan, adalah pelatihan tenaga kesehatan/petugas Puskesmas sesuai layanan kluster siklus hidup. Belanja yang bersumber dari dana DAK Non Fisik ini sudah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan tidak tersedianya pemateri;
- b) Belanja Bimbingan Teknis Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp722.896.700,00 dan terealisasi sebesar Rp656.833.000,00 atau mencapai 90,86%, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.909.900.000,00. Realisasi belanja ini tidak mendekati 100% di OPD Sekretariat DPRD. Belanja Bimbingan Teknis di OPD Sekretariat DPRD yang dianggarkan Rp720.000.000,00 dan realisasi Rp553.000.000,00 atau 76,81%, karena beberapa jadwal Bimtek tidak bisa dilaksanakan sebab bertabrakan dengan agenda DPRD lainnya; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c) Belanja Diklat Kepemimpinan Tahun 2024, dianggarkan Rp147.890.000,00 dengan realisasi Rp147.890.000,00 atau serapan 100%. Anggaran yang tertata di OPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Diklat Kepemimpinan Tahun 2024, terdiri dari Diklat Kepemimpinan Nasional II (PKN II) yang diikuti dua pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai peserta di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Manado dan Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diikuti enam pejabat administrator sebagai peserta di Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Dalam pelaksanaan PKN II atau PIM II peserta diklat memberikan kontribusi Rp22.945.000,00. Akan halnya kontribusi PKA atau PIM III sebesar Rp17.000.000,00 per peserta.

10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp96.000.000,00 dengan realisasi Rp94.000.000,00 atau 97,92%. Sementara realisasi Tahun 2023 sebesar Rp96.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000,00 atau 2,08%. Ini adalah belanja honor mandor di delapan pasar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Yakni Pasar Lolak, Inobonto, Poigar, Imandi, Ibolian, Mopuya, Pusian, dan Doloduo. Delapan mandor mendapat pembayaran honor sebesar Rp1.000.000,00 per orang per bulan. Namun, mandor Pasar Ibolian meninggal dunia, sehingga insentif mandor Pasar Ibolian hanya dibayarkan selama 10 bulan, karena menyesuaikan turunnya SK penggantian mandor.

c). Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp9.438.338.761,20 dan terealisasi sebesar Rp8.388.402.166,00 atau mencapai 88,88%, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.764.186.926,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.624.215.240,00 atau 76,07%. Belanja pemeliharaan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	10.864.208,00	43,46	8.400.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.935.294.179,20	6.069.828.204,00	87,52	1.832.205.516,00
3	Belanja Pemeliharaan	491.549.248,00	340.756.255,00	69,32	906.281.410,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Gedung dan Bangunan				
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.892.839.084,00	1.882.453.499,00	99,45	2.017.300.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	93.656.250,00	84.500.000,00	90,22	0,00
	JUMLAH	9.438.338.761,20	8.388.402.166,00	88,88	4.764.186.926,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

1) Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja pemeliharaan tanah Tahun 2024 dianggarkan Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.864.208,00 atau 43,46%. Sedangkan Tahun 2023 realisasi Rp8.400.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.464.208,00 atau 29,34%.

Belanja pemeliharaan tanah teranggarkan di Sekretariat Daerah, dimana dialokasikan untuk belanja pengurusan dokumen dan pajak atas mess dan asrama milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di luar daerah. Anggaran tidak terserap maksimal karena masih ada sisa tagihan PBB atas asrama/ mess Pemda yang tidak memungkinkan dibayarkan karena sistem pembayaran tidak bisa online antar provinsi, mengingat pembayaran harus melalui bank daerah di mana obyek tanah lokasi asrama/mess berada.

2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp6.935.294.179,20 dan terealisasi sebesar Rp6.069.828.204,00 atau mencapai 87,52%, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.832.205.516,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.237.622.688,00 atau 231,29%. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.827.456.170,27	4.115.115.269,00	85,24	744.170.160,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	839.338.458,93	754.943.155,00	89,95	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	44.400.000,00	44.000.000,00	99,10	44.355.600,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	11.655.000,00	11.590.000,00	99,44	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	549.278.000,00	486.230.900,00	88,52	465.934.890,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.105.000,00	13.200.000,00	87,39	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.364.300,00	0,00	0,00	10.357.640,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	627.872.250,00	627.871.880,00	100,00	533.487.226,00
9	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	7.775.000,00	7.172.000,00	92,24	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	10.050.000,00	9.705.000,00	96,57	33.900.000,00
	JUMLAH	6.935.294.179,20	6.069.828.204,00	87,52	1.832.205.516,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp2.364.300,00 realisasi 0,00%, sementara realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.357.640,00. Hal ini disebabkan penyesuaian kodifikasi rekening belanja. Belanja ini disesuaikan pada rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya.

3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp491.549.248,00 dan terealisasi sebesar Rp340.756.255,00 atau mencapai 69,32%. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp906.281.410,00, mengalami penurunan sebesar Rp565.525.155,00 atau 62,40%. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	491.549.248,00	340.756.255,00	69,32	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	693.105.500,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	0,00	0,00	0,00	213.175.910,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	491.549.248,00	340.756.255,00	69,32	0,00
	Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I				
	JUMLAH	491.549.248,00	340.756.255,00	69,32	906.281.410,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor, tidak dianggarkan lagi dalam pos belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Tahun 2024, sebab biaya pemeliharaan gedung-bangunan yang menambah volume disesuaikan ke rekening belanja modal.

4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.892.839.084,00 dan terealisasi sebesar Rp1.882.453.499,00 atau mencapai 99,45%. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.017.300.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp134.846.501,00 atau 6,68%. Penganggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi di Tahun 2024 disebabkan terdapat penambahan volume aset jalan pada belanja modal jalan yang perlu diadakan pemeliharaan, sebagaimana juga tahun sebelumnya pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi menjadi prioritas untuk pemeliharaan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.497.038.331,00	1.493.153.000,00	99,74	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	6.500.000,00	0,00	0,00	1.464.350.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	389.300.753,00	389.300.499,00	100,00	552.950.000,00
	JUMLAH	1.892.839.084,00	1.882.453.499,00	99,45	2.017.300.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

d. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp72.334.850.543,43 dan terealisasi sebesar Rp65.581.040.739,00 atau mencapai 90,66%. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp57.713.824.578,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.867.216.161,00 atau 13,63%. Rincian akun belanja perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel 5.55
Rincian Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.334.850.543,43	65.581.040.739,00	90,66	57.713.824.578,00
	JUMLAH	72.334.850.543,43	65.581.040.739,00	90,66	57.713.824.578,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp934.895.000,00 dan terealisasi sebesar Rp748.850.000,00 atau 80,10%. Sedangkan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp2.161.491.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.412.641.700,00 atau 65,35%.

Akun belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.56
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	934.895.000,00	748.850.000,00	80,10	1.822.585.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	338.906.700,00
	JUMLAH	934.895.000,00	748.850.000,00	80,10	2.161.491.700,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

1) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp934.895.500,00 dengan realisasi Rp748.850.000,00 atau 80,10% sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp2.161.491.700,00, mengalami penurunan sebesar
Rp1.412.641.700,00 atau 65,35%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.57
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	483.395.000,00	345.650.000,00	71,50	1.772.585.000,00
2	Belanja Beasiswa	451.500.000,00	403.200.000,00	89,30	50.000.000,00
	JUMLAH	934.895.000,00	748.850.000,00	80,10	1.822.585.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja hadiah yang bersifat perlombaan direalisasikan berdasarkan pada:

- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Juri, Pembawa Acara dan Hadiah Lomba Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Mei 2024;
- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 289 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juri dan Panitia Kegiatan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Dan Olimpiade Sains Nasional, Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024 Tanggal 2 Juli 2024;
- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 290 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juri dan Panitia Kegiatan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Gala Siswa Indonesia, dan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024 Tanggal 2 Juli 2024;
- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Lomba Monuntul Dan Besaran Hadiah Lomba Monuntul Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 22 Maret 2024;
- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 109 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia, Juri Dewan Hakim Dan Panitia, Serta Pemberian Uang Pembinaan Juara ada Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXX Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 Februari 2024;
- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penilai Dan Besaran Hadiah Pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 November 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 247 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Juni 2024; dan
- Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 481 Tahun 2024 Tentaang Penetapan Pembawa Acara, Pembaca Doa, Wasit Kabupaten Dan Penerima Hadiah/Uang Pembinaan Peserta Perlombaan Kegiatan *Tournament* Catur Bupati Bolaang Mongondow Cup I Tahun Anggaran 2024, Tanggal 20 November 2024.

Rincian belanja hadiah yang bersifat perlombaan terdapat pada :

- a) Dinas Pendidikan anggaran Rp 198.645.000,00 realisasi Rp60.900.000,00 atau 30,65% terserap pada kegiatan Gebyar PAUD 2024, Olimpiade Sains Jenjang Sekolah Dasar dan Olimpiade Jenjang SMP se Bolaang Mongondow. Realisasi tidak mencapai 100,00% karena belanja hadiah menyesuaikan dengan pemenang lomba;
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat anggaran 199.250.000,00 terealisasi 100,00%. Belanja tersebut terserap dalam kegiatan lomba Monuntul, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), seleksi Tilawatil Qurán ke-XXX se Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c) Dinas Pemuda dan Olahraga anggaran Rp25.500.000,00 terealisasi 100,00% terserap dalam kegiatan *Tournament* Catur Bupati Bolaang Mongondow *Cup I* Tahun 2024; dan
- d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) anggaran Rp60.000.000,00 dengan realisasi Rp60.000.000,00 atau 100,00% terserap pada kegiatan lomba desa/kelurahan se-Bolaang Mongondow. (*Rincian atas belanja bersifat perlombaan dapat dilihat pada Lampiran 2 Laporan Keuangan ini*).

Berikut rincian belanja hadiah yang bersifat perlombaan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

Tabel 5.58
Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan di OPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan	198.645.000,00	60.900.000,00	30,65	74.750.000,00
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	199.250.000,00	199.250.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	1.496.585.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
5	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	141.250.000,00
	JUMLAH	483.395.000,00	345.650.000,00	71,51	1.772.585.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Sementara belanja beasiswa Tahun 2024 dianggarkan Rp451.500.000,00 dan realisasi Rp403.200.000,00 atau 89,30%. Sedangkan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp50.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp353.200.000,00 atau 706,40% Belanja beasiswa tertata di Dinas Pendidikan dan didasarkan pada:

- a) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Program Studi Strata Dua Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 November 2024;
- b) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Program Studi Strata Satu Tahun Anggaran 2024 Tanggal 1 November 2024; dan
- c) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Untuk Studi Mahasiswa Pada *Nanjing Polytechnic Institute* Wuhu China Bagi Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

Belanja beasiswa diberikan kepada 74 mahasiswa. Terdiri dari 12 mahasiswa yang studi S1 di *Nanjing Polytechnic Institute* Wuhu China, 59 mahasiswa studi S1 dalam negeri dan tiga mahasiswa studi S2 dalam negeri. (Rincian atas belanja beasiswa dalam negeri dan luar negeri dapat dilihat pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini).

- 2) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2024 tidak dianggarkan karena belum dibutuhkan. Tahun 2023 dianggarkan di Dinas Pertanian dengan realisasi sebesar Rp338.906.700,00.

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp21.696.470.410,00 dan realisasi sebesar Rp20.558.091.871,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atau mencapai tingkat serapan 94,75%, dan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp22.401.600.029,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.843.508.158,00 atau 8,23%.

Belanja ini merupakan belanja barang dan jasa yang terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja. BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian.

Belanja barang dan jasa BOS direalisasikan kepada 206 SD Negeri sebesar Rp13.901.693.111,00 dan 49 SMP Negeri sebesar Rp6.656.398.760,00.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Tahun 2024 belanja subsidi tidak dianggarkan karena belum dibutuhkan. Tahun 2023, belanja ini tertata pada Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi Rp211.500.000,00, yang merupakan kegiatan penanganan kerawanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan laju inflasi daerah atas kenaikan harga bahan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di 15 Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Hibah pemerintah daerah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada instansi, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menganggarkan belanja hibah sebesar Rp72.399.588.415,00 dan realisasi Rp72.062.018.763,00 atau serapan anggaran mencapai 99,53%. Sementara realisasi Tahun 2023 sebesar Rp25.058.344.460,00, mengalami kenaikan sebesar Rp47.003.674.303,00 atau 187,58%. (Rincian atas belanja hibah dapat dilihat pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini)

Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban hibah oleh penerima dana hibah dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Hibah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 148 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 Maret 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 Maret 2024;
3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 242 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 3 Mei 2024;
4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Kepolisian Resor Kotamobagu Tahun 2024, Tanggal 3 Mei 2024;
5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Komando Distrik Militer 1303 Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 3 Mei 2024;
6. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 389 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Palang Merah Indonesia Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 Maret 2024;
10. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Jaringan Pendidikan Pilih Untuk Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 4 Januari 2024;
11. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 146 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bantuan Pemerintah Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 22 Maret 2024;
12. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 462 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 1 November 2024;
13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Rekening Penerima Dana Alokasi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Rekening Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B Dan Paket C Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 Tanggal 1 November 2024;
 15. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Bidang Pendidikan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Tanggal 2 Mei 2024;
 16. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 223 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Masyarakat Pada Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Mei 2024;
 17. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 224 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Masyarakat Pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Dalam Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Tanggal 3 Mei 2024;
 18. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah Sepuluh Hektar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Tanggal 3 September 2024;
 19. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Keagamaan Dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
 20. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 306 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2024, Tanggal 7 September 2024; dan
 21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 462/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2024, Tanggal 28 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Akun belanja hibah Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.59
Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	58.966.561.800,00	58.966.561.800,00	100,00	11.756.113.600,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.966.364.913,00	8.772.427.163,00	97,84	8.607.862.360,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	3.675.103.500,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.016.110.000,00	999.625.000,00	98,38	1.019.265.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	3.450.521.702,00	3.323.404.800,00	96,32	0,00
JUMLAH		72.399.558.415,00	72.062.018.763,00	99,53	25.058.344.460,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat dianggarkan pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) dengan penerima hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow, Polres Bolaang Mongondow, Polres Kota Kotamobagu, dan Komando Distrik Militer 1303 Kabupaten Bolaang Mongondow. Belanja ini realisasi 100,00%, dari anggaran sebesar Rp58.966.561.800,00. Rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.60
Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	OPD	Penerima	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Badan Kesbangpol	KPU Bolaang Mongondow	37.144.509.800,00	5.500.000.000,00
2	Badan Kesbangpol	Bawaslu Bolaang Mongondow	12.895.080.000,00	2.500.000.000,00
3	Badan Kesbangpol	Polres Bolaang Mongondow	6.623.972.000,00	2.300.000.000,00
4	Badan Kesbangpol	Polres Kotamobagu	912.000.000,00	1.000.000.000,00
5	Badan Kesbangpol	Kodim 1303/BM	1.391.000.000,00	261.313.600,00
JUMLAH			58.966.561.800,00	1.1561.313.600,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Baik KPU dan Bawaslu belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati dibebankan pada APBD Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bolaang Mongondow pada tahun 2024 menerima hibah sebesar Rp50.039.589.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. KPU sebesar Rp37.144.509.800,00 berdasarkan SP2D No. 0036/LS tanggal 29 April 2024 sebesar Rp11.557.803.920,00 dan SP2D No. 0071/LS tanggal 12 Juli 2024 sebesar Rp25.586.705.880,00; dan
2. Bawaslu sebesar Rp12.895.080.000,00 berdasarkan SP2D No. 0041/LS tanggal 3 Mei 2024 sebesar Rp3.658.032.000,00 dan SP2D No. 0070/LS tanggal 12 Juli 2024 sebesar Rp9.237.048.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, laporan penggunaan hibah kegiatan pemilihan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 baik KPU dan Bawaslu belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah.

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Tahun 2024, anggaran Rp8.966.364.913,00, realisasi Rp8.772.427.163,00 atau mencapai 97,83%. Sementara Tahun 2023 realisasi sebesar Rp8.607.862.360,00, mengalami kenaikan sebesar Rp164.564.803,00 atau 1,91% Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.61
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.545.420.000,00	1.543.600.000,00	99,88	2.198.280.760,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.960.000,00	140.060.000,00	637,80	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.148.984.913,00	6.838.767.163,00	95,66	6.229.581.600,00
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	180.000.000,00
JUMLAH		8.966.364.913,00	8.772.427.163,00	97,84	8.607.862.360,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp1.545.420.000,00 dengan realiasi Rp1.543.600.000,00 atau mencapai 99,88%. Sementara realisasi Tahun 2023 Rp2.198.280.760,00, mengalami penurunan sebesar Rp654.680.760,00 atau 29,78%.

Belanja ini adalah hibah uang yang tertata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kepada PKK Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp500.000.000,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada FKUB Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp100.000.000,00, Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Pramuka Kwartir Bolaang Mongondow sebesar Rp100.000.000,00, Dinas Kesehatan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp100.000.000,00 dan OPD Dinas Pendidikan berupa hibah dana BOP Reguler dan BOP Kinerja kepada 12 PKBM di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp743.600.000,00. Rinciannya, belanja barang jasa BOP Reguler 12 PKM sebesar Rp698.600.000,00 dan BOP Kinerja PKBM An-Nissa sebesar Rp45.000.000,00.

Realisasi belanja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.62
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN BELANJA/ PENERIMA	REALISASI
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	Hibah PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	500.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah FKUB Kabupaten Bolaang Mongondow	100.000.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Pramuka Kwartir Bolaang Mongondow	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	OPD	URAIAN BELANJA/ PENERIMA	REALISASI
4	Dinas Kesehatan	Hibah Palang Merah Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow	100.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	Dana BOP Reguler dan Kinerja 12 PKBM	743.600.000,00
	JUMLAH		1.543.600.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan pada OPD Dinas Pendidikan. Terealisasi sebagai belanja dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOP) Sekolah Nonformal/BOP Kesetaraan SKB Bolaang Mongondow sebesar Rp140.060.000,00, atau terjadi pelampauan 637,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.960.000,00. Hal ini karena kesalahan penginputan pada Aplikasi SIPD Tahun 2024. Seharusnya, anggaran tersebut diinput pada rekening belanja modal (5.2.02.89.01.0001), rekening belanja barang dan jasa (5.1.02.89.02.0001), dan rekening belanja pegawai (5.1.01.89.03.0001) karena SKB-SPNF merupakan sekolah negeri. Namun, terjadi kesalahan teknis dalam penginputan Dana BOP SKB-SPNF terinput pada rekening belanja hibah yang diserahkan ke masyarakat (5.1.05.05.03.0001).

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, adalah belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. Dianggarkan Rp7.148.984.913,00, realisasi Rp6.838.767.163,00 atau mencapai 95,66%. Sementara Tahun 2023 realisasi sebesar Rp6.229.581.600,00.

Belanja ini yang tertata di beberapa OPD. Yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.649.732.250,00 adalah realisasi hibah uang dana BOP kepada 15 PAUD Negeri dan 223 PAUD Swasta.

Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas di Desa Tungoi II dengan realisasi sebesar Rp301.534.913,00 dan Desa Mopugat Utara II realisasi Rp350.000.000,00, atau total realisasi Rp651.534.913,00. Rinciannya seperti dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.63
Daftar Desa Penerima Program Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pelaksana	Anggaran	Realisasi
1	Pamsimas Desa Tungoi II	KKM Desa Tungoi II	301.534.913,00	301.534.913,00
2	Pamsimas Desa Mopugad Utara II	KKM Desa Mopugad Utara II	350.000.000,00	350.000.000,00
	JUMLAH		651.534.913,00	651.534.913,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah hibah uang kepada 25 masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di dalam kawasan permukiman kumuh, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 atau total realisasi Rp500.000.000,00. Dan, belanja hibah uang kepada masyarakat penerima bantuan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di dalam kawasan permukiman kumuh, kepada 10 masyarakat masing-masing Rp60.000.000,00 atau total realisasi Rp600.000.000,00, Dan belanja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi sebesar Rp2.385.000.000,00 adalah belanja hibah uang kepada rumah-rumah ibadah dan organisasi keagamaan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi Rp250.000.000,00 atau serapan anggaran mencapai 100,00%. Belanja ini dianggarkan pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa hibah kepada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Bolaang Mongondow.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS Tahun 2024 tidak dianggarkan karena terjadi perubahan kodefikasi atau penyesuaian rekening belanja. Pos belanja ini telah disesuaikan pada rekening belanja hibah dana BOSP. Tahun 2023 lalu, realiasi belanja hibah dana BOS sebesar Rp3.675.103.500,00.

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik tertata di OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.016.110.000,00 dan realisasi Rp 999.625.000,00 atau serapan anggaran mencapai 98,38%. Sementara Tahun 2023 realisasi sebesar Rp1.019.265.000,00.

Belanja hibah bantuan keuangan ini diberikan kepada partai politik yang mempunyai perolehan kursi di DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberian hibah diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Tahun 2024, hak partai atas bantuan keuangan partai politik ini dikenakan perhitungan berdasarkan periode kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, periode 2019-2024 dan periode 2024-2029.

Periode 2019-2024, perhitungan besaran 1 (satu) suara adalah jumlah Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2024 dibagi jumlah suara sah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan perhitungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019. Yakni $\text{Rp}1.019.265.000,00 : 135.902 = \text{Rp}7.500,00$ per suara.

Sementara atas hak partai politik untuk periode 2024-2029, perhitungan besaran 1 (satu) suara adalah jumlah alokasi dana bantuan keuangan partai politik Tahun 2024, dibagi jumlah suara sah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Bolaang Mongondow berdasarkan perhitungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Yakni $\text{Rp}351.865.000,00 = 140.746 \times 7.500 : 12 \times 4$ Bulan per suara. Rincian belanja hibah bantuan keuangan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.64
Perhitungan hak politik yang memperoleh kursi
di DPRD Bolaang Mongondow Periode 2019-2024

(dalam rupiah)

No	Nama Partai Politik	Jlh Kursi	Suara Sah KPU	Hak Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	19.842	148.815.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7	36.322	272.415.000,00
3	Partai Golkar	5	18.125	135.937.500,00
4	Partai Nasional Demokrat	7	33.218	249.135.000,00
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	10.757	80.677.500,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	2	5.426	40.695.000,00
7	Partai Amanat Nasional	1	4.396	32.970.000,00
8	Partai Demokrat	1	7.816	58.620.000,00
	JUMLAH	30	135.902	1.019.265.000,00

Sumber data: OPD (diolah)

Tabel 5.65
Perhitungan hak politik yang memperoleh kursi
di DPRD Bolaang Mongondow Periode 2024-2029

(dalam rupiah)

No	Nama Partai Politik	Jlh Kursi	Jumlah Suara Sah KPU dan Harga Per Suara (Rp)	Hak Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	$(21.190 \times 7.500) : 12 \times 4$ Bulan	52.975.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Partai Politik	Jlh Kursi	Jumlah Suara Sah KPU dan Harga Per Suara (Rp)	Hak Partai
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9	(42.834x7.500):12x4 Bulan	107.085.000,00
3	Partai Golkar	6	(25.350x7.500):12x4 Bulan	63.375.000,00
4	Partai Nasional Demokrat	6	(26.405x7.500):12x4 Bulan	66.012.500,00
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	(14.655x7.500):12x4 Bulan	36.637.500,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	1	(5.277 x7.500):12x4 Bulan	13.192.500,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	(5.085x7.500):12x4 Bulan	12.712.500,00
	JUMLAH	30	140.746	351.990.000,00

Sumber data: OPD (diolah)

Tabel 5.66
Daftar Realiasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Partai Politik	Total Realisasi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	288.695.000,00
2	Partai Keadilan Sejahtera	90.422.500,00
3	Partai Golkar	154.000.000,00
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	232.102.500,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa	152.185.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	40.197.500,00
7	Partai Demokrat	29.310.000,00
8	Partai Gerindra	12.712.500,00
	Jumlah	999.625.000,00

Sumber data: Aplikasi SIPD & OPD (diolah)

e. Belanja hibah dana BOSP

Belanja hibah dana BOSP Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.450.521.702,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.323.404.800,00 atau penyerapan anggaran sebesar 96,32%. Sementara realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Belanja pada Dinas Pendidikan ini adalah hibah uang dana BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) swasta dan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Satdikmen). Untuk hibah BOS Sekolah Dasar swasta sebesar Rp1.709.536.800,00 diterima 20 SD Swasta dan hibah BOS SMP Swasta sebesar Rp1.613.868,00 diterima 20 SMP swasta di Kabupaten Bolaang Mongondow. Belanja hibah dana BOSP sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.67
Belanja Hibah Dana BOSP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerima	Realisasi
1	BOS Sekolah Dasar Swasta	20 SD Swasta	1.709.536.800,00
2	BOS SMP Swasta	20 SMP swasta	1.613.868.000,00
JUMLAH			3.323.404.800,00

Sumber data: Aplikasi SIPD dan OPD (diolah)

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 direalisasikan berdasarkan SK Bupati Bolaang Mongondow sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow No. 366 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar Serta Jenis Barang Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024; dan
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Besar Serta Jenis Barang Bantuan Sosial Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Mei 2024.

Belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dianggarkan pada Dinas Sosial sebesar Rp11.086.458,00 realisasi Rp10.527.750,00 atau penyerapan anggaran mencapai 94,96%. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp895.525.450,00, mengalami penurunan sebesar Rp884.997.700,00 atau 98,82%.

Untuk Tahun Anggaran 2024 belanja bantuan sosial terbagi atas belanja bantuan sosial kepada individu, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya). Realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.68
Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	0,00	0,00	0,00	403.250.000,00
2	Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu	11.086.458,00	10.527.750,00	94,96	222.247.900,00
3	Belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	190.722.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	kepada kelompok masyarakat				
4	Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya)	0,00	0,00	0,00	79.305.000,00
	JUMLAH	11.086.458,00	10.527.750,00	94,96	625.497.900,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu

Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu Tahun 2024 tidak dianggarkan karena belum dibutuhkan. Sementara, Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp403.250.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu Tahun 2024 dianggarkan di Dinas Sosial sebesar Rp11.086.458,00 dengan realisasi Rp10.527.750,00 atau penyerapan anggaran mencapai 94,96%. Sementara Tahun 2023 realisasi Rp222.247.900,00, mengalami penurunan sebesar Rp211.720.150,00 atau 95,26%.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu, adalah kegiatan penyediaan sandang terlantar sebesar Rp2.835.500,00 dan penyediaan permakanan sebesar Rp7.692.250,00.

Jenis bantuan sandang terlantar seperti handuk, selimut, sabun mandi batangan, pakaian dalam, daster, tikar. Dan jenis bantuan penyediaan permakanan seperti beras, biskuit, gula putih, susu kaleng, minyak kelapa, mie instan, ikan kaleng dan telur ayam. (Rincian atas Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini).

c. Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Tahun 2024 tidak dianggarkan, karena belum dibutuhkan. Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp190.722.550,00.

d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Tahun 2024 tidak dianggarkan, karena belum dibutuhkan. Sementara Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp79.305.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal diklasifikasikan menjadi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.316.043.086,00 atau 93,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.256.579.326,17, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp165.619.436.669,00. Anggaran dan realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk pengeluaran investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69
Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.574.885.834,17	15.409.856.633,00	92,97	41.255.703.219,00
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	39.564.186.569,00	36.065.291.398,00	91,16	69.553.872.247,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.760.262.231,00	29.905.538.055,00	97,22	51.822.906.987,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.135.019.692,00	2.738.332.000,00	87,35	2.771.954.216,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	197.025.000,00	197.025.000,00	100,00	215.000.000,00
	JUMLAH	90.256.579.326,17	84.316.043.086,00	93,42	165.619.436.669,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah di Tahun 2024 dianggarkan Rp25.200.000,00 pada Dinas Kesehatan untuk pembelian tanah penggantian lahan pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Apado namun tidak terealisasi atau mencapai 0,00% dikarenakan bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu sertifikatnya masih menjadi jaminan pinjaman oleh pihak keluarga pemilik sertifikat sehingga dari Dinas Kesehatan tidak dapat merealisasikannya di Tahun 2024. Pada Tahun 2023 juga tidak terdapat realisasi atas belanja modal tanah atau sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp16.574.885.834,17 dan terealisasi sebesar Rp15.409.856.633,00 atau mencapai 92,97%, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp41.255.703.219,00. Rincian belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 5.70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Besar	751.534.003,00	747.640.036,00	99,48	2.775.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.774.691.944,00	2.298.649.923,00	82,84	4.521.953.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	74.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.532.893.819,24	2.433.494.540,00	96,08	6.327.514.851,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	119.264.172,00	117.350.000,00	98,40	187.425.000,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.503.537.112,00	2.462.731.820,00	98,37	24.709.683.199,00
7	Belanja Modal Komputer	5.149.482.783,93	4.836.409.314,00	93,92	5.384.602.169,00
8	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	47.750.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.736.822.000,00	2.506.921.000,00	91,60	0,00
	JUMLAH	16.574.885.834,17	15.409.856.633,00	92,97	41.255.703.219,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

a. Belanja Modal Alat Besar

Belanja modal alat besar Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp751.534.003,00 dan terealisasi sebesar Rp747.640.036,00 atau mencapai 99,48% yang direalisasikan pada belanja modal alat bantu, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar Rp2.775.000,00. Belanja modal peralatan dan mesin alat besar pada belanja modal alat bantu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.71
Belanja Modal Alat Bantu

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Bantu – <i>Electric Generating Set</i>	749.034.003,00	745.440.036,00	99,52	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu – Pompa	2.500.000,00	2.200.000,00	88,00	2.775.000,00
	JUMLAH	751.534.003,00	747.640.036,00	99,48	2.775.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Penjelasan untuk belanja modal alat bantu dalam pengadaan *Electric Generating Set* pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp749.034.003,00 teralisasi sebesar Rp745.440.036,00 atau mencapai 99,52% pada Dinas Kesehatan, sedangkan pada Tahun 2023 tidak terealisasi. Untuk pengadaan pompa Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.200.000,00 atau mencapai 88,00% pada RSUD Datoe



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Binangkang, sedangkan pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp2.775.000,00.

b. Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja modal alat angkutan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.298.649.923,00 pada alat angkutan darat bermotor yang dianggarkan sebesar Rp2.774.691.944,00 atau mencapai 82,84%, sedangkan di Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.521.953.000,00. Belanja modal alat angkutan darat bermotor dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.72
Alat Angkuran Darat Bermotor

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor -Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.329.891.000,00	1.194.900.000,00	89,85	657.030.000,00
2	Belanja Modal Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.104.450.944,00	1.103.749.923,00	99,94	3.795.000.000,00
3	Belanja Modal Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	340.350.000,00	0,00	0,00	21.280.000,00
4	Belanja Modal Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	48.643.000,00
	JUMLAH	2.774.691.944,00	2.298.649.923,00	82,84	4.521.953.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

- 1) Tahun 2024 anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.329.891.000,00 terealisasi sebesar Rp1.194.900.000,00 atau mencapai 89,85% pada Inspektorat Daerah dan RSUD Datoe Binangkang, sedangkan pada Tahun 2023;
- 2) Kendaraan dinas bermotor penumpang yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.104.450.944,00 terealisasi sebesar Rp1.103.749.923,00 atau mencapai 99,94%, dimana pengadaan kendaraan dinas ini direalisasikan pada Dinas Kesehatan. Tahun Anggaran 2023 teralisasi sebesar Rp3.795.000.000,00;
- 3) Pengadaan kendaraan dinas bermotor beroda dua yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp340.350.000,00 dan tidak terealisasi atau mencapai 0,00%, dimana teranggarkan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp223.800.000,00 dan Inspektorat Daerah sebesar Rp116.500.000,00. Tidak terealisasi pada Dinas Kesehatan karena



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sampai tanggal 15 Desember 2024 yang merupakan akhir tahun pelaporan. Omspan kendaraan belum diterima, sedangkan pada Inspektorat Daerah tidak terealisasi pengadaan kendaraan beroda dua dikarenakan tidak ada kesepahaman antar pihak dealer yang mengharuskan adanya uang muka dan dari pihak Inspektorat menginginkan adanya pengadaan kendaraan terlebih dulu kemudian melakukan pembayaran. Pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp21.280.000,00; dan

- 4) Pengadaan kendaraan dinas beroda tiga yang Tahun Anggaran 2024 tidak lagi dianggarkan disebabkan belum ada penambahan BMD kendaraan tersebut tapi pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp48.643.000,00.

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.660.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp74.000.000,00. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.73
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	4.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
	JUMLAH	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	74.000.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Penjelasan tabel adalah sebagai berikut :

1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja modal pengadaan alat bengkel bermesin Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.660.000,00 atau mencapai 100,00% yang digunakan untuk pengadaan alat bengkel bermesin lainnya pada Sekretariat DPRD, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00; dan

2) Belanja Modal Alat Ukur

Belanja modal pengadaan alat ukur Tahun Anggaran 2024 tidak lagi dianggarkan karena belum menjadi kebutuhan tapi pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp70.000.000,00.

d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja modal pengadaan alat kantor dan rumah tangga Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.433.494.540,00 dari yang



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dianggarkan sebesar Rp2.532.893.819,24 atau mencapai 96,08%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp6.327.514.851,00. Berikut rincian belanja modal alat kantor dan rumah tangga:

Tabel 5.74
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Kantor	289.343.803,24	266.141.250,00	91,98	488.911.452,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga	1.619.830.146,00	1.549.556.290,00	95,66	4.877.033.400,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	623.719.870,00	617.797.000,00	99,05	961.569.999,00
	JUMLAH	2.532.893.819,24	2.433.494.540,00	96,08	6.327.514.851,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Penjelasan terhadap tabel diatas adalah sebagai berikut :

1) Belanja Modal Alat Kantor

Belanja modal pengadaan alat kantor Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp289.343.803,24 dan terealisasi sebesar Rp266.141.250,00 atau mencapai 91,98% dimana realisasinya untuk pengadaan alat kantor lainnya yang direalisasikan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian, Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Lolak, Dinas Kesehatan Puskesmas Passi Barat dan Puskesmas Maelang, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp488.911.452,00;

2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja modal pengadaan alat rumah tangga di Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.619.830.146,00 dan terealisasi sebesar Rp1.549.556.290,00 atau mencapai 95,66%, sedangkan di Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.877.033.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.75
Belanja Modal Alat Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Mebel	261.173.226,00	255.950.000,00	98,00	3.437.315.500,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Pembersih	42.534.090,00	42.534.090,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Pendingin	401.191.830,00	344.683.200,00	85,91	345.804.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Dapur	17.316.000,00	17.000.000,00	98,18	5.554.900,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	897.615.000,00	889.389.000,00	99,08	1.074.909.000,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00
	JUMLAH	1.619.830.146,00	1.549.556.290,00	95,66	4.877.033.400,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa Tahun 2024 pengadaan mebel terealisasi sebesar Rp255.950.000,00 dari anggaran Rp261.173.226,00 atau mencapai 98,00% pengadaan mebel di Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023 yang realisasinya sebesar Rp3.437.315.500,00. Pengadaan alat pembersih untuk Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp42.534.090,00 terealisasi sebesar Rp42.534.090,00 atau mencapai 100,00% dimana pada Tahun 2023 tidak teranggarkan. Pengadaan alat pendingin Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp344.683.200,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp401.191.830,00 atau mencapai 85,91% lebih kecil dari Tahun 2023 yang realisasinya sebesar Rp345.804.000,00. Untuk pengadaan alat dapur realisasinya sebesar Rp17.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp17.316.000,00 atau 98,18% dimana pada Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp5.554.900,00. Pengadaan alat rumah tangga lainnya (*home use*) di Tahun 2023 sebesar Rp1.107.326.949,00 tetapi untuk Tahun 2024 mengalami penurunan dimana realisasinya sebesar Rp889.389.000,00 dari anggaran Rp897.615.000,00 atau mencapai 99,08% dan untuk realisasi pengadaan alat pemadam kebakaran Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp0,00 atau mencapai 0,00% sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp13.450.000,00;

3) Belanja Modal dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp623.719.870,00 dan terealisasi sebesar Rp617.797.000,00 atau mencapai 99,05%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp961.569.999,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.76
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Pengadaan	179.580.000,00	177.390.000,00	98,78	239.621.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	Meja Kerja Pejabat				
2	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	41.431.860,00	40.125.000,00	96,85	5.225.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	96.240.330,00	95.638.000,00	99,37	140.424.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat	306.467.680,00	304.644.000,00	99,40	558.799.999,00
	JUMLAH	623.719.870,00	617.797.000,00	99,05	961.569.999,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Penjelasan untuk tabel diatas bahwa Tahun 2024 pengadaan meja kerja pejabat terealisasi sebesar Rp177.390.000,00 dari anggaran Rp179.580.000,00 atau mencapai 98,78% mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang realisasinya sebesar Rp239.621.000,00. Tahun 2024 pengadaan meja kerja pejabat tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi dan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp17.500.000,00. Untuk pengadaan kursi kerja pejabat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp41.431.860,00 dan realisasi sebesar Rp40.125.000,00 atau sebesar 96,85% sedangkan pada Tahun 2023 realisasinya Rp5.225.000,00. Pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat di Tahun 2023 sebesar Rp140.424.000,00 tapi untuk Tahun 2024 realisasinya sebesar Rp95.638.000,00 dari anggaran Rp96.240.330,00 atau mencapai 99,37% dan untuk realisasi pengadaan lemari dan arsip pejabat sebesar Rp304.644.000,00 dari anggaran Rp306.467.680,00 atau mencapai 99,40% sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp558.799.999,00.

e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Belanja modal pengadaan alat studio, komunikasi dan pemancar Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp119.264.172,00 dan terealisasi sebesar Rp117.350.000,00 pada belanja modal alat studio yang mencapai 98,40%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp187.425.000,00. Realisasi belanja modal pengadaan alat studio, komunikasi dan pemancar khusus pengadaan alat studio dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.77
Belanja Modal Alat Studio

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -Pengadaan Peralatan Studio Audio	54.001.500,00	53.750.000,00	99,53	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	26.534.772,00	26.400.000,00	99,49	187.425.000,00
3	Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -Pengadaan Peralatan Alat Studio Lainnya	38.727.900,00	37.200.000,00	96,05	0,00
	JUMLAH	119.264.172,00	117.350.000,00	98,40	187.425.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pengadaan peralatan studio audio pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp54.001.500,00 dengan realisasi sebesar Rp53.750.000,00 atau mencapai 99,53% dimana pengadaan ini direalisasikan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum, sedangkan pada Tahun 2023 tidak terealisasi. Untuk pengadaan peralatan studio video dan film yang dianggarkan sebesar Rp26.534.772,00 dan terealisasi sebesar Rp26.400.000,00 atau mencapai 99,49% dimana pengadaan ini direalisasikan pada Sekretariat DPRD, sedangkan pada Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp187.425.000,00. Pengadaan alat studio lainnya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp38.727.900,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp37.200.000,00 atau 96,05% yang direalisasikan pada Inspektorat Daerah, sedangkan Tahun 2023 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasinya.

f. Belanja Modal Kedokteran dan Kesehatan

Belanja modal pengadaan alat kedokteran dan kesehatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.503.537.112,00 dan terealisasi sebesar Rp2.462.731.820,00 atau mencapai 98,37%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp24.709.683.199,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.78
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran	1.500.000.000,00	1.460.000.000,00	97,33	1.118.341.960,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	1.003.537.112,00	1.002.731.820,00	99,92	23.591.341.239,00
	JUMLAH	2.503.537.112,00	2.462.731.820,00	98,37	24.709.683.199,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1) Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja modal pengadaan alat kedokteran Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.460.000.000,00 atau mencapai 97,33%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.118.341.960,00. Belanja modal alat kedokteran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.79
Belanja Modal Alat Kedokteran

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	349.890.000,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	1.500.000.000,00	1.460.000.000,00	97,33	0,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	768.451.960,00
	JUMLAH	1.500.000.000,00	1.460.000.000,00	97,33	1.118.341.960,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Pada tabel ini dapat dijelaskan untuk pengadaan alat kedokteran keluarga berencana Tahun 2024 tidak dianggarkan lagi karena tidak menjadi kebutuhan tapi pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp349.890.000,00. Pengadaan alat kedokteran bedah di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.460.000.000,00 dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau mencapai 97,33%. Alat kedokteran bedah ini direalisasikan pada RSUD Datoe Binangkang untuk kebutuhan pelayanan. Pada pengadaan alat kedokteran lainnya juga tidak teranggarkan di Tahun 2024 karena kebutuhan alat ini belum menjadi prioritas dalam penambahan BMD dan Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp768.451.960,00.

2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja modal pengadaan alat kesehatan umum pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.003.537.112,00 dan terealisasi sebesar Rp1.002.731.820,00 atau mencapai 99,92% yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan umum lainnya pada Dinas Kesehatan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp23.591.341.239,00.

g. Belanja Modal Komputer

Belanja modal pengadaan komputer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.149.482.783,93 dan terealisasi sebesar Rp4.836.409.314,00 atau mencapai 93,92%, sedangkan Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.384.602.169,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Belanja Modal Komputer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit	4.623.671.739,75	4.413.938.814,00	95,46	1.665.034.170,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	525.811.044,18	422.470.500,00	80,35	3.719.567.999,00
	JUMLAH	5.149.482.783,93	4.836.409.314,00	93,92	5.384.602.169,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

1) Belanja Modal Komputer Unit

Belanja modal pengadaan komputer unit Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.623.671.739,75 dan terealisasi sebesar Rp4.413.938.814,00 atau mencapai 95,46% dimana pengadaan *personal computer* untuk menunjang kegiatan di kantor pada beberapa OPD yang ada, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp1.665.034.170,00.

2) Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja modal pengadaan peralatan komputer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp525.811.044,18 dan terealisasi sebesar Rp422.470.500,00 atau mencapai 80,35%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp3.719.567.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81
Belanja Modal Peralatan Komputer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Komputer - Pengadaan Peralatan <i>Personal Computer</i>	381.537.616,00	345.178.000,00	90,47	3.044.654.500,00
2	Belanja Modal Komputer – Pengadaan Peralatan Jaringan	28.860.000,00	23.610.000,00	81,81	214.085.000,00
3	Belanja Modal Komputer - Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	115.413.428,18	53.682.500,00	46,51	460.828.499,00
	JUMLAH	525.811.044,18	422.470.500,00	80,35	3.719.567.999,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Pada tabel ini dapat dijelaskan untuk pengadaan peralatan *personal computer* Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp381.537.616,00 dan direalisasikan sebesar Rp345.178.000,00 atau mencapai 90,47%, pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp3.044.654.500,00, sedangkan pengadaan peralatan jaringan dianggarkan sebesar Rp28.860.000,00 dan direalisasikan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar Rp23.610.000,00 atau mencapai 81,81%, dan untuk Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp214.085.000,00. Pada pengadaan peralatan komputer lainnya teranggarkan sebesar Rp115.413.428,18 dan terealisasi sebesar Rp53.682.500,00 atau mencapai 46,51% pada Kecamatan Passi Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan dimana realisasi terkecil ada pada Dinas Pendidikan dimana terkendala pada proses pemesanan karena barang yang dipesan tidak memenuhi standar TKDN. Untuk Tahun Anggaran 2023 capaian realisasinya sebesar Rp460.828.499,00.

h. Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja modal alat eksplorasi Tahun Anggaran 2024 tidak lagi dianggarkan karena belum menjadi kebutuhan mendesak pengadaan BMD di Tahun 2024 ini, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp47.750.000,00.

i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin BOS Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.736.822.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.506.921.000,00 atau mencapai 91,60%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp39.564.186.569,00 dan terealisasi sebesar Rp36.065.291.398,00 atau mencapai 91,16%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp69.553.872.247,00. Berikut rincian belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 5.82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung	39.541.476.569,00	36.043.124.698,00	91,15	68.690.568.447,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.710.000,00	22.166.700,00	97,60	863.303.800,00
	JUMLAH	39.564.186.569,00	36.065.291.398,00	91,16	69.553.872.247,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Realisasi belanja modal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja modal pengadaan bangunan gedung Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp39.541.476.569,00 dan terealisasi sebesar Rp36.043.124.698,00 atau mencapai 91,15%, dibandingkan pada Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

terrealisasi sebesar Rp68.690.568.447,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	741.442.220,00	608.112.450,00	82,02	409.698.944,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gudang	229.000.000,00	227.584.659,00	99,38	465.481.207,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	199.585.938,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Laboratorium	5.334.783.745,00	4.836.633.817,00	90,66	0,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.829.360.404,00	2.745.748.482,00	97,04	14.209.099.158,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.216.890.200,00	27.436.115.927,00	90,80	41.101.758.133,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	9.742.033.000,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Peternakan /Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.392.002.410,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	246.298.700,00
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	96.000.249,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	393.666.147,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Taman	190.000.000,00	188.929.363,00	99,44	0,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	434.944.561,00
	JUMLAH	39.541.476.569,00	36.043.124.698,00	9,75	68.690.568.447,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp741.442.220,00 dan terealisasi sebesar Rp608.112.450,00 atau mencapai 82,02%, dimana belanja modal ini direalisasikan pada Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp409.698.944,00.

2) Belanja Modal Bangunan Gudang

Belanja modal pengadaan bangunan gudang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp229.000.000,00 dan terealisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp227.584.659,00 atau mencapai 99,38%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp465.481.207,00.

3) Belanja Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar

Belanja modal pengadaan bangunan gedung untuk bengkel/hanggar Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi atau mencapai 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp199.585.938,00.

4) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium

Belanja modal pengadaan bangunan Gedung laboratorium Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.334.783.745,00 dan terealisasi sebesar Rp4.836.633.817 00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan atau mencapai 90,66%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi atau mencapai 0,00%.

5) Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Belanja modal pengadaan bangunan kesehatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.829.360.404,00 dan terealisasi sebesar Rp2.745.748.482,00 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang atau mencapai 97,04%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp14.209.099.158,00.

6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp30.216.890.200,00 pada Dinas Pendidikan dan terealisasi sebesar Rp27.436.115.927,00 atau mencapai 90,80%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp41.101.758.133,00.

7) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan

Belanja modal pengadaan bangunan gedung perpustakaan Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan lagi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dikarenakan sudah diadakan pada Tahun 2023 dimana realisasinya sebesar Rp9.742.033.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

8) Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan

Belanja modal pengadaan bangunan peternakan/perikanan tidak lagi dianggarkan di Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perikanan atau sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasinya sebesar Rp1.392.002.410,00.

9) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya tidak lagi dianggarkan di Tahun Anggaran 2024 karena belum ada penambahan belanja modal, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp246.298.700,00.

10) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum

Belanja modal pengadaan bangunan gedung untuk fasilitas umum Tahun Anggaran 2024 tidak lagi dianggarkan yang pada Tahun Anggaran 2023 terelisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp96.000.249,00, hal itu disebabkan Tahun 2024 belum ada pengadaan fisik.

11) Belanja Modal Parkir

Belanja modal pengadaan parkir Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan lagi karena pengadaan parkir belum menjadi prioritas, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp393.666.147,00.

12) Belanja Modal Taman

Belanja modal pengadaan taman Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp188.929.363,00 atau mencapai 99,44%, dimana pengadaan taman ini direalisasikan pada Dinas Kesehatan. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00.

13) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya tidak teranggarkan di Tahun Anggaran 2024 karena untuk Tahun 2024 belum ada penambahan bangunan BMD, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp434.944.561,00.

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja modal pengadaan bangunan tugu titik kontrol/pasti Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp22.710.000,00 dan terealisasi pada pengadaan pagar di Dinas Pertanian sebesar Rp22.166.700,00 atau mencapai 97,61%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp863.303.800,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.84
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

(dalam rupiah)

No	Uraian OPD	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	654.637.000,00
3	Dinas Pertanian	22.710.000,00	22.166.700,00	97,61	202.066.800,00
	Jumlah	22.710.000,00	22.166.700,00	97,61	863.303.800,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp30.760.262.231,00 dan terealisasi sebesar Rp29.905.538.055,00 atau mencapai 97,22%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp51.822.906.987,00. Berikut rincian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Tahun Anggaran 2024:

Tabel 5.85
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Pengadaan Jalan dan Jembatan	19.864.649.943,00	19.083.890.819,00	96,07	48.009.403.550,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Pengadaan Bangunan Air	3.385.467.976,00	3.374.020.580,00	99,66	3.708.071.437,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Pengadaan Instalasi	7.000.300.000,00	6.938.626.656,00	99,12	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jaringan	509.844.312,00	509.000.000,00	99,83	105.432.000,00
	Jumlah	30.760.262.231,00	29.905.538.055,00	97,22	51.822.906.987,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja modal pengadaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp19.864.649.943,00 dan terealisasi sebesar Rp19.083.890.819,00 atau mencapai 96,07%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp48.009.403.550,00. Berikut rincian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi – pengadaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2024 :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.86
Belanja Modal Jalan dan Jembatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jalan	18.668.003.633,00	17.912.899.479,00	95,96	47.706.316.310,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Pengadaan Jembatan	1.196.646.310,00	1.170.991.340,00	97,86	303.087.240,00
	JUMLAH	19.864.649.943,00	19.083.890.819,00	96,07	48.009.403.550,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Belanja Modal tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan

Belanja modal pengadaan jalan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp18.668.003.633,00 dan terealisasi sebesar Rp17.912.899.479,00 atau mencapai 95,96%, yang digunakan untuk pengadaan jalan kabupaten yang dianggarkan sebesar Rp18.668.003.633,00 dan realisasinya sebesar Rp17.912.899.479,00 pada Dinas Pekerjaan Umum. Tahun Anggaran 2023 belanja modal pengadaan jalan kabupaten terealisasi sebesar Rp47.287.022.610,00.

Untuk pengadaan jalan lainnya tidak lagi dianggarkan di Tahun Anggaran 2024 karena belum ada pengadaan jalan *paving block* di tahun ini. Tahun Anggaran 2023 belanja modal pengadaan jalan lainnya sebesar Rp419.293.700,00.

2) Belanja Modal Jembatan

Belanja modal pengadaan jembatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.196.646.310,00 dan terealisasi sebesar Rp1.170.991.340,00 atau mencapai 97,86% yang digunakan untuk pengadaan jembatan pada jalan kabupaten yang dianggarkan sebesar Rp1.196.646.310,00 dengan realisasi Rp1.170.991.340,00 atau mencapai 97,24% yang direalisasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp303.087.240,00. Digunakan juga untuk pengadaan jembatan penyeberangan yang dianggarkan sebesar Rp380.000.000,00 dimana terealisasi sebesar Rp376.875.000 atau mencapai 99,18% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasinya atau sebesar Rp0,00.

b. Belanja Modal Bangunan Air

Belanja modal pengadaan bangunan air Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.385.467.976,00 dan terealisasi sebesar Rp3.374.020.580,00 atau mencapai 99,66%, sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp3.708.071.437,00.
Berikut rincian belanja modal pengadaan bangunan air:

Tabel 5.87
Pengadaan Bangunan Air

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.845.402.352,00	1.837.487.611,00	99,57	2.424.201.437,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	994.293.440,00	992.182.969,00	99,79	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Kotor	545.772.184,00	544.350.000,00	99,74	1.283.870.000,00
	JUMLAH	3.385.467.976,00	3.374.020.580,00	99,66	3.708.071.437,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pengadaan pembangunan air irigasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.845.402.352,00 dan terealisasi sebesar Rp1.837.487.611,00 pada bangunan air irigasi lainnya atau mencapai 99,57% yang realisasinya pada Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Bolaang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.424.201.437,00.

2) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku

Belanja modal pengadaan bangunan air bersih/air baku untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp994.293.440,00 dan terealisasi pada pengadaan bangunan air bersih/air baku lainnya sebesar Rp992.182.969,00 atau mencapai 99,79% di Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi atau sebesar Rp0,00.

3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Kotor

Belanja modal pengadaan bangunan air kotor untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp545.772.184,00 dan terealisasi pada pembangunan bangunan pembuang air kotor sebesar Rp544.350.000,00 atau mencapai 99,74% di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.283.870.000,00.

c. Belanja Modal Instalasi

Belanja modal pengadaan instalasi untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.000.300.000,00 dan terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar Rp6.938.626.656,00 atau mencapai 99,12%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi atau sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal instalasi rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.88
Pengadaan Instalasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	600.700.000,00	578.626.356,00	96,33	0,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	6.399.600.000,00	6.360.000.300,00	99,38	0,00
	JUMLAH	7.000.300.000,00	6.938.626.656,00	99,12	0,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pengadaan instalasi pengolahan sampah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp600.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp578.626.356,00 atau mencapai 96,33%, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi pengadaan instalasi pengolahan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.89
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	450.000.000,00	428.176.290,00	95,15	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	150.700.000,00	150.450.066,00	99,83	0,00
	JUMLAH	600.700.000,00	578.626.356,00	96,32	0,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa belanja modal pengadaan bangunan penampung sampah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp428.176.290,00 atau mencapai 95,15% yang direalisasikan pada Dinas Kesehatan, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp0,00. Digunakan juga untuk pengadaan instalasi pengolahan sampah lainnya yang dianggarkan sebesar Rp150.700.000,00 dimana terealisasi sebesar Rp150.450.066,00 atau mencapai 99,83% pada Dinas Kesehatan dan Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasinya atau sebesar Rp0,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pengadaan instalasi pembangkit listrik Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.399.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.360.000.300,00 atau mencapai 99,38% pada pengadaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Kesehatan, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

d. Belanja Belanja Modal Jaringan

Belanja modal pengadaan jaringan untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp509.844.312,00 dan terealisasi pada pengadaan jaringan listrik sebesar Rp509.000.000,00 atau mencapai 99,83%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp105.432.000,00. Realisasi belanja modal jaringan listrik khusus jaringan listrik lainnya terealisasi pada Dinas Kesehatan.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.135.019.692,00 dan terealisasi sebesar Rp2.738.332.000,00 atau mencapai 87,35%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.771.954.216,00. Berikut rincian belanja modal aset tetap lainnya :

Tabel 5.90
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan	3.135.019.692,00	2.738.332.000,00	87,35	81.165.600,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.690.788.616,00
	JUMLAH	3.135.019.692,00	2.738.332.000,00	87,35	2.771.954.216,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja modal bahan perpustakaan untuk Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.135.019.692,00 dengan realisasinya sebesar Rp2.738.332.000,00 atau mencapai 87,35%, sedangkan untuk Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp81.165.600,00. Berikut rincian belanja modal bahan perpustakaan :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.91
Belanja Modal bahan perpustakaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan Tercetak	3.061.093.692,00	2.664.432.000,00	87,04	44.702.600,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	73.926.000,00	73.900.000,00	99,96	36.463.000,00
	JUMLAH	3.135.019.692,00	2.738.332.000,00	87,35	81.165.600,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2024 belanja modal bahan perpustakaan tercetak dianggarkan pada belanja modal buku umum di Dinas Pendidikan sebesar Rp3.061.093.692,00 dan terealisasi sebesar Rp2.664.432.000,00 atau mencapai 87,04% sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp44.702.600,00. Untuk belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro dianggarkan pada pengadaan audio visual di Sekretariat DPRD dengan anggaran di Tahun 2024 sebesar Rp73.926.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.900.000,00 atau mencapai 99,96% dimana pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp36.463.000,00.

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja modal aset tetap lainnya BOS Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan pada Dinas Pendidikan atau mencapai 0,00%. Untuk Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp2.690.788.616,00.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp197.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.025.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp215.000.000,00. Belanja modal aset lainnya terealisasi pada Dinas Pendidikan untuk pengadaan belanja modal aset tidak berwujud berupa *software* PPDB *Online* yang digunakan untuk proses penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta kegiatan lainnya yang membutuhkan penanggulangan secepatnya tapi tidak teranggarkan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga dimana dianggarkan sebesar Rp2.221.327.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.501.050.900,00 atau mencapai 67,57%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp9.293.016.063,00. Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.92
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi
1	1. Pembayaran bantuan anggaran dalam rangka penetapan status tanggap bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow di Kecamatan Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Lolayan, Kecamatan Dumoga Utara dan Kecamatan Dumoga Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Pembayaran bantuan anggaran dalam rangka aktivasi pos komando tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Pembayaran bantuan anggaran dalam rangka penetapan anggaran kegiatan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	628.345.200,00
2	1. Pembayaran bantuan anggaran dalam rangka penetapan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu banjir dan tanah longsor di Kecamatan Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Lolayan, Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Passi Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Pembayaran bantuan anggaran dalam rangka penetapan anggaran kegiatan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	785.205.700,00
3	1. Pembayaran bantuan anggaran dalam rangka penetapan status siaga darurat pencegahan bencana social / konflik social di wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Pembayaran bantuan anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan pencegahan bencana social/konflik social di wilayah Dumoga kabupaten Bolaang Mongondow	87.500.000,00
JUMLAH		1.501.050.900,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi sebesar Rp1.501.050.900,00 sebagai berikut :

- a. Untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Dumoga, Dumoga Timur, Lolayan, Dumoga Utara dan Dumoga Barat, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 281 Tahun 2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow, Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 282 Tahun 2024 tentang Aktivasi Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 288 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Anggaran Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow, di mana pelaksanaannya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024. Pemberian bantuan keuangan ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp628.345.200,00 sesuai Surat Permohonan mengenai bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Nomor 100/B05/BPBD/210/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang realisasinya dibuktikan dengan SP2D Nomor 71.01/04.0/000665/LS/3.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024 Tanggal 10 Juli 2024;

- b. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Dumoga, Dumoga Timur, Lolayan, Bolaang dan Passi Barat perlu penanganan dari Pemerintah maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 364 Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Anggaran Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow, di mana pelaksanaannya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024. Pemberian bantuan keuangan ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp792.982.000,00, sesuai Surat Permohonan mengenai bantuan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Nomor 100/B.05/BPBD/297/VII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan dibuktikan dengan SP2D Nomor 71.01/04.0/000969/LS/3.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2024 Tanggal 2 September 2024. Penggunaan bantuan kegiatan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor hanya sebesar Rp785.205.700,00 dari anggaran yang dicairkan sehingga ada pengembalian sisa Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp7.776.300,00 yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 71.01/07.0/000008/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/2/2024 Tanggal 27 Desember 2024; dan
- c. Pencegahan dan pengamanan konflik sosial (tawuran antar kampung) karena adanya bentrok kelompok massa Lorong



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tombasian dengan kelompok massa Kompleks Lapangan Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur dibenarkan dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 483 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan status Sosial Darurat Pencegahan Bencana Sosial/Konflik Sosial di Wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 484 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Bantuan Anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Bencana Sosial/Konflik Sosial di Wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp87.500.000,00 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberian bantuan keuangan ini sesuai Surat Permohonan Mengenai Kebutuhan Anggaran Pencegahan Konflik Sosial di Wilayah Dumoga Nomor 100/B.05/BPBD/578/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang akan digunakan untuk biaya makan minum, uang transportasi personil/anggota yang melaksanakan pengamanan dan itu dibuktikan dengan SP2D Nomor 71.01/04.0/001533/LS/3.02.0.00.0.00.01.0000 /PPR1/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer keluar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 40 adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan transfer bantuan keuangan seperti bantuan keuangan ke desa. Realisasi transfer Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp231.084.028.347,31 atau 99,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp231.275.943.701,00, sementara itu realisasi belanja transfer Tahun 2023 mencapai Rp215.630.787.000,00. Belanja transfer Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.93
Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil	5.804.966.301,00	5.790.020.356,31	99,74	5.155.999.000,00
2	Belanja Transfer - Belanja Bantuan Keuangan	225.470.977.400,00	225.294.007.991,00	99,92	210.474.788.000,00
	JUMLAH	231.275.943.701,00	231.084.028.347,31	99,92	215.630.787.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.4.1 Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.804.966.301,00 sementara realisasi terhadap anggaran belanja tersebut sebesar Rp5.790.020.356,31 atau mencapai 99,74%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp5.155.999.000,00. Realisasi belanja transfer bagi hasil Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.94
Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Desa	4.142.980.000,00	4.132.395.234,31	99,74	5.155.999.000,00
2	Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.661.986.301,00	1.657.625.122,00	99,74	0,00
	JUMLAH	5.804.966.301,00	5.790.020.356,31	99,74	5.155.999.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

1) **Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.142.980.000,00 sementara realisasinya sebesar Rp4.132.395.234,31 atau mencapai 99,74%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp5.155.999.000,00. Realisasi belanja transfer bagi hasil pajak daerah merupakan transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa yang dialokasikan kepada 200 desa di 15 (lima belas) kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow dan pada Tahun Anggaran 2024 rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.95
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2024		%	Realisasi 2023
			Anggaran	Realisasi		
1	Kecamatan Sangtombolang	12	219.557.253,00	219.557.254,00	100,00	266.043.800,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	12	269.848.905,00	264.447.747,00	98,00	322.333.000,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	15	347.207.701,00	347.207.702,00	100,00	424.068.000,00
4	Kecamatan Dumoga Utara	16	365.218.018,00	365.218.017,00	100,00	460.617.000,00
5	Kecamatan Lolak	26	595.472.153,00	590.288.540,00	99,13	694.360.200,00
6	Kecamatan Bolaang	10	193.643.038,00	193.643.039,31	100,00	235.201.000,00
7	Kecamatan Lolayan	14	333.757.902,00	333.757.902,00	100,00	433.769.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2024		%	Realisasi 2023
			Anggaran	Realisasi		
8	Kecamatan Passi Barat	13	237.317.110,00	237.317.114,00	100,00	292.860.000,00
9	Kecamatan Poigar	20	385.742.526,00	385.742.524,00	100,00	504.363.000,00
10	Kecamatan Passi Timur	13	208.189.327,00	208.189.327,00	100,00	266.466.000,00
11	Kecamatan Bolaang Timur	9	158.942.064,00	158.942.064,00	100,00	201.448.000,00
12	Kecamatan Bilalang	8	123.345.879,00	123.345.880,00	100,00	148.505.000,00
13	Kecamatan Dumoga	12	283.687.894,00	283.687.894,00	100,00	356.603.000,00
14	Kecamatan Dumoga Tenggara	10	221.465.566,00	221.465.565,00	100,00	283.235.000,00
15	Kecamatan Dumoga Tengah	10	199.584.664,00	199.584.665,00	100,00	266.127.000,00
	JUMLAH	200	4.142.980.000,00	4.132.395.234,31	99,74	5.155.999.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel belanja bagi hasil pajak daerah tidak mencapai 100% dapat dijelaskan bahwa Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat dan Desa Pinogaluman Kecamatan Lolak tidak membuat APBD Perubahan sehingga tidak dapat melakukan realisasi pada tahap III. Ikhtisar belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini.

2) Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.661.986.301,00 sementara realisasinya sebesar Rp1.657.625.122,00 atau mencapai 99,74%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp0,00. Realisasi belanja transfer bagi hasil retribusi daerah dialokasikan kepada 200 desa pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.96
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2024		%	Realisasi 2023
			Anggaran	Realisasi		
1	Kecamatan Sangtombolang	12	88.185.181,00	88.185.181,00	100,00	0,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	12	108.172.529,00	105.948.717,00	97,94	0,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	15	139.148.842,00	139.148.837,00	100,00	0,00
4	Kecamatan Dumoga Utara	16	146.383.895,00	146.383.894,00	100,00	0,00
5	Kecamatan Lolak	26	238.665.854,00	236.528.494,00	99,10	0,00
6	Kecamatan Bolaang	10	77.731.658,00	77.731.656,00	100,00	0,00
7	Kecamatan Lolayan	14	133.726.271,00	133.726.271,00	100,00	0,00
8	Kecamatan Passi Barat	13	95.320.694,00	95.320.693,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2024		%	Realisasi 2023
			Anggaran	Realisasi		
9	Kecamatan Poigar	20	154.849.864,00	154.849.869,00	100,00	0,00
10	Kecamatan Passi Timur	13	83.744.476,00	83.744.474,00	100,00	0,00
11	Kecamatan Bolaang Timur	9	63.863.259,00	63.863.260,00	100,00	0,00
12	Kecamatan Bilalang	8	49.639.077,00	49.639.076,00	100,00	0,00
13	Kecamatan Dumoga	12	113.672.541,00	113.672.540,00	100,00	0,00
14	Kecamatan Dumoga Tenggara	10	88.789.130,00	88.789.130,00	100,00	0,00
15	Kecamatan Dumoga Tengah	10	80.093.031,00	80.093.030,00	100,00	0,00
	JUMLAH	200	1.661.986.301,00	1.657.625.122,00	99,74	0,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

Dari tabel belanja bagi hasil retribusi daerah tidak mencapai 100% dapat dijelaskan bahwa pada Desa Ikwan Kecamatan Dumoga Barat dan Desa Pinogaluman Kecamatan Lolak tidak membuat APBD Perubahan sehingga untuk 2 Desa ini tidak dapat melakukan realisasi pada tahap III. Ikhtisar belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini.

5.1.2.4.2 Belanja Transfer - Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp225.470.977.400,00 dan terealisasi sebesar Rp225.294.007.991,00 kepada bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa atau mencapai 99,92%. Transfer bantuan keuangan ini realisasinya untuk 200 desa yang tersebar pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.97
Belanja Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	210.474.788.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa	156.556.803.000,00	156.556.803.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa	68.914.174.400,00	68.737.204.991,00	99,74	0,00
	JUMLAH	225.470.977.400,00	225.294.007.991,00	99,92	210.474.788.000,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tidak lagi dianggarkan karena sudah berpindah ke 2 rekening ke belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp210.474.788.000,00;
- b. Belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa di tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp156.556.803.000,00 dan direalisasikan pada 200 Desa sebesar Rp156.556.803.000,00 atau mencapai 100,00% sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena ada pada rekening belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Ikhtisar belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dapat dilihat pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini. Sedangkan untuk lebih jelas realisasi bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.98
Dana Desa (DD)

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2024		%	Realisasi 2023
			Anggaran	Realisasi		
1	Kecamatan Sangtombolang	12	9.008.008.000,00	9.008.008.000,00	100,00	0,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	12	10.534.944.000,00	10.534.944.000,00	100,00	0,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	15	11.424.120.000,00	11.424.120.000,00	100,00	0,00
4	Kecamatan Dumoga Utara	16	12.543.812.000,00	12.543.812.000,00	100,00	0,00
5	Kecamatan Lolak	26	20.561.406.000,00	20.561.406.000,00	100,00	0,00
6	Kecamatan Bolaang	10	7.562.645.000,00	7.562.645.000,00	100,00	0,00
7	Kecamatan Lolayan	14	11.956.307.000,00	11.956.307.000,00	100,00	0,00
8	Kecamatan Passi Barat	13	9.885.850.000,00	9.885.850.000,00	100,00	0,00
9	Kecamatan Poigar	20	14.951.452.000,00	14.951.452.000,00	100,00	0,00
10	Kecamatan Passi Timur	13	9.822.211.000,00	9.822.211.000,00	100,00	0,00
11	Kecamatan Bolaang Timur	9	7.552.377.000,00	7.552.377.000,00	100,00	0,00
12	Kecamatan Bilalang	8	5.514.458.000,00	5.514.458.000,00	100,00	0,00
13	Kecamatan Dumoga	12	9.375.344.000,00	9.375.344.000,00	100,00	0,00
14	Kecamatan Dumoga Tenggara	10	7.973.408.000,00	7.973.408.000,00	100,00	0,00
15	Kecamatan Dumoga Tengah	10	7.890.461.000,00	7.890.461.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	200	156.556.803.000,00	156.556.803.000,00	100,00	0,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

- c. Belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa di tahun 2024 dianggarkan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar Rp68.914.174.400,00 yang direalisasikan sebesar Rp68.737.204.991,00 atau mencapai 99,74% sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena ada pada rekening belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai 100,00% karena ada 2 desa yang tidak membuat APBD Perubahan yaitu Desa Pinogaluman Kecamatan Lolak sebesar Rp69.369.200,00 dan Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp104.392.800,00 sehingga tidak bisa direalisasikan pada tahap III. Jumlah realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Rp68.740.412.300,00 dikurangi koreksi atas kelebihan pencatatan nilai tagihan IWP 1% Alokasi Dana Desa sebesar Rp3.207.309,00 sehingga realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.737.204.991,00.

Ikhtisar belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini. Sedangkan untuk lebih jelas realisasi bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.99
Alokasi Dana Desa (ADD)

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2024		%	Realisasi 2023
			Anggaran	Realisasi		
1	Kecamatan Sangtombolang	12	4.074.645.000,00	4.074.645.000,00	100,00	0,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	12	4.594.667.000,00	4.490.274.200,00	97,73	0,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	15	5.092.173.000,00	5.092.173.000,00	100,00	0,00
4	Kecamatan Dumoga Utara	16	5.311.091.000,00	5.311.091.000,00	100,00	0,00
5	Kecamatan Lolak	26	8.365.201.000,00	8.295.831.800,00	99,17	0,00
6	Kecamatan Bolaang	10	3.308.862.000,00	3.308.862.000,00	100,00	0,00
7	Kecamatan Lolayan	14	5.116.219.400,00	5.116.219.400,00	100,00	0,00
8	Kecamatan Passi Barat	13	4.557.133.000,00	4.557.133.000,00	100,00	0,00
9	Kecamatan Poigar	20	6.880.622.000,00	6.880.622.000,00	100,00	0,00
10	Kecamatan Passi Timur	13	4.614.777.000,00	4.614.777.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2024		%	Realisasi 2023
			Anggaran	Realisasi		
11	Kecamatan Bolaang Timur	9	3.329.464.000,00	3.329.464.000,00	100,00	0,00
12	Kecamatan Bilalang	8	2.792.598.000,00	2.792.598.000,00	100,00	0,00
13	Kecamatan Dumoga	12	4.149.558.000,00	4.149.558.000,00	100,00	0,00
14	Kecamatan Dumoga Tenggara	10	3.058.115.000,00	3.058.115.000,00	100,00	0,00
15	Kecamatan Dumoga Tengah	10	3.669.049.000,00	3.669.048.900,00	100,00	0,00
JUMLAH		200	68.914.174.400,00	68.740.412.300,00	99,75	0,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

5.1.3 Surplus/Defisit - LRA

Surplus/Defisit-LRA merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja. Surplus/Defisit-LRA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp46.341.935.838,90) merupakan selisih total pendapatan dikurangi total belanja dan transfer (Rp1.060.004.317.566,16 dikurangi Rp1.106.346.253.405,06). Surplus/Defisit-LRA diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.100
Surplus / Defisit - LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Total Pendapatan	1.077.419.643.654,00	1.060.004.317.566,16
2	Total Belanja Daerah	1.161.000.868.292,00	1.106.346.253.405,06
	Surplus/ Defisit	(83.581.224.638,00)	(46.341.935.838,90)

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Informasi pembiayaan sangat penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

Struktur pembiayaan pemerintah daerah juga bisa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah terhadap tingkat risiko likuiditas kas daerah. Pembiayaan daerah dikategorikan menjadi dua bagian yakni: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut ini



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

gambaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp83.581.224.638,00 dan terealisasi sebesar Rp83.580.667.558,69 atau sebesar 100,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp92.933.552.911,73. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya yang dapat diurai pada tabel berikut:

Tabel 5.101
Penerimaan Pembiayaan – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pelampauan Penerimaan PAD	9.572.719.053,00	9.572.719.053,64	100,00	10.098.205.725,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	2.161.433.000,00	2.161.433.000,00	100,00	34.262.555.960,73
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.764.019.522,00	1.764.019.522,00	100,00	0,00
4	Penghematan Belanja	44.285.515.784,00	44.285.515.784,00	100,00	30.569.054.326,00
5	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapinya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.797.537.279,00	25.796.980.199,05	100,00	18.003.736.900,00
	JUMLAH	83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00	92.933.552.911,73

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

a. Pelampauan Penerimaan PAD

Pelampauan penerimaan PAD pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.572.719.053,00 dengan realisasi sebesar Rp9.572.719.053,64 atau mencapai 100,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp10.098.205.725,00. Pelampauan penerimaan PAD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.102
Pelampauan Penerimaan PAD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Daerah	9.454.506.919,00	9.454.506.919,00	100,00	10.098.205.725,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD -Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82.307.258,00	82.307.258,00	100,00	0,00
3	Pelampauan Penerimaan	35.904.876,00	35.904.876,64	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	PAD – lain-lain PAD yang Sah				
	JUMLAH	9.572.719.053,00	9.572.719.053,64	100,00	10.098.205.725,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

1) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

Pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.454.506.919,00 dengan realisasi sebesar Rp9.454.506.919,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp10.098.205.725,00. Pelampauan penerimaan PAD yang diterima dari penerimaan PAD-Pajak Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.103
Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Hotel	22.783.493,00	22.783.493,00	100,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Restoran	506.326.123,00	506.326.123,00	100,00	0,00
3	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Hiburan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
4	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Reklame	514.396.731,00	514.396.731,00	100,00	0,00
5	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Penerangan Jalan	1.759.841.439,00	1.759.841.439,00	100,00	10.098.205.725,00
6	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
7	Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.257.866.372,00	2.257.866.372,00	100,00	0,00
8	Pelampauan Penerimaan PAD – Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.388.792.761,00	4.388.792.761,00	100,00	0,00
	JUMLAH	9.454.506.919,00	9.454.506.919,00	100,00	10.098.205.725,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

2) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp82.307.258,00 dengan realisasi sebesar Rp82.307.258,00 atau mencapai 100,00% pada pelampauan penerimaan PAD - bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3) Pelampauan Penerimaan PAD – Lain-lain PAD yang Sah

Pelampauan penerimaan PAD - lain-lain PAD yang sah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp35.904.876,00 dengan realisasi sebesar Rp35.904.876,64 atau mencapai 100,00% pada pelampauan penerimaan PAD – jasa giro, sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp0,00.

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

Pelampauan penerimaan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp35.904.876,00 dan terealisasi sebesar Rp35.904.876,64 atau mencapai 100,00%, dimana pelampauan penerimaan transfer diterima dari transfer Pemerintah Pusat yaitu dana perimbangan, dana transfer umum dan dana alokasi umum. Untuk Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp34.262.555.960,73 pada pelampauan penerimaan tranfer Pemerintah Pusat yaitu dan perimbangan, dana tranfer umum, dana bagi hasil, DBH Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.764.019.522,00 dan terealisasi sebesar Rp1.764.019.522,00 atau mencapai 100,00%, dimana pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diterima dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan. Untuk Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp0,00.

d. Penghematan Belanja

Penghematan belanja pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp44.285.515.784,00 dan terealisasi sebesar Rp44.285.515.784,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp30.569.054.326,00. Penghematan belanja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.104
Penghematan Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	39.830.614.990,00	39.830.614.990,00	100,00	30.569.054.326,00
2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	4.454.900.794,00	4.454.900.794,00	100,00	0,00
	Jumlah	44.285.515.784,00	44.285.515.784,00	100,00	30.569.054.326,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

1) Penghematan Belanja-Belanja Operasi

Penghematan belanja-belanja operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp39.830.614.990,00 dan terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp39.830.614.990,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp30.569.054.326,00. Penghematan belanja-belanja operasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.105
Penghematan Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Penghematan Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan ASN	31.554.922.990,00	31.554.922.990,00	100,00	30.569.054.326,00
2	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	8.275.692.000,00	8.275.692.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	39.830.614.990,00	39.830.614.990,00	100,00	30.569.054.326,00

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

2) Penghematan Belanja-Belanja Modal

Penghematan belanja-belanja modal Tahun Anggaran 2024 teranggarkan sebesar Rp4.454.900.794,00 dan realisasinya sebesar Rp4.454.900.794,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00.

- e. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp25.797.537.279,00 dan terealisasi sebesar Rp25.796.980.199,05 atau mencapai 100,00%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp18.003.736.900,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi.

5.1.4.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp83.581.224.638,00 dan terealisasi sebesar Rp83.580.667.558,69 atau 100,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 pembiayaan netto sebesar Rp92.933.552.911,73. Berikut ini rincian pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.106
Pembiayaan Netto

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		(%)	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Penerimaan Pembiayaan	83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00	92.933.552.911,73
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan netto		83.581.224.638,00	83.580.667.558,69	100,00	92.933.522.911,73

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan tapi terealisasi sebesar Rp37.238.731.719,79 dan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp83.581.224.638,64. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ini merupakan selisih Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto dimana rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.107
Selisih Surplus/ Defisit dan Pembiayaan Netto

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan	1.060.004.317.566,16
2	Belanja	1.106.346.253.405,06
3	Surplus/ Defisit	(46.341.935.838,90)
4	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	83.580.667.558,69
5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6	Pembiayaan Netto	83.580.667.558,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		37.238.731.719,79

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)

SiLPA sebesar Rp37.238.731.719,79 meliputi SiLPA tidak mengikat dan SiLPA mengikat yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian SiLPA Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
A	SILPA TIDAK MENGIKAT	15.492.008.075,49
	Penghematan Belanja	15.492.008.075,49
B	SILPA MENGIKAT	21.746.723.644,30
1	DAU SG Penggajian PPPK	0,00
2	DAU SG BIDANG PU	101.609.199,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah
3	DAU SG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023	761.753.285,00
4	DAU SG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2024	7.851.302.220,00
5	DAU SG BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)	1.467.369.684,00
6	DAU SG RSUD	426.447.992,00
7	DAU SG BIDANG KELURAHAN	8.036.782,00
8	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2022	365.290.029,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD	319.572,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB	840.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting	450.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	267.758.380,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Kefarmian	59.294.766,00
	DAK Fisik Bidang PU Sub Bidang Jalan Reguler	1.606.356,00
	DAK Fisik Bidang PU Sub Bidang Irigasi	27.773.100,00
	DAK Fisik Bidang PU Sub Bidang Air Minum Reguler	8.155,00
	DAK Fisik Bidang PU Sub Bidang Sanitasi Reguler	199.600,00
	DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	6.650.000,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	240.000,00
	DAK Fisik Sub Bidang Perkim	150.100,00
9	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2023	980.238.049,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD	17.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	1,00
	DAK Bidang Kesehatan Sub Bidang Keluarga Berencana	9.999,00
	DAK Fisik Bidang PU Sub Bidang Jalan	10.155.400,00
	DAK Fisik PU Sub Bidang Jalan Tematik	791.991.790,00
	DAK Fisik Bidang PU Sub Bidang Irigasi	16.650.559,00
	DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	158.403.300,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan	3.010.000,00
10	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024	507.403.775,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	0,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD	0,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	495.683.475,00
	DAK Fisik Bidang PU Sub Bidang Jalan	11.720.300,00
11	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK TAHUN 2024	2.549.972.388,00
	Tunjangan Profesi Guru	1.289.098.680,00
	Tunjangan Khusus Guru	133.617.100,00
	Tambahan Penghasilan Guru	110.000,00
	BOK Kesehatan Dinas Kabupaten	688.425.424,00
	BOKB (Dinas PP dan KB)	255.470.339,00
	Dana Fasilitas Penanaman Modal	85.932.445,00
	PP dan PA	97.318.400,00
12	DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAHUN ANGGARAN 2022	3.162.848.152,00
	SILPA DID Tahun 2023 yang kurang terinput	20.000,00
	Dana Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat	5.464.712,00
	Dana Insentif Fiskal Kinerja Inflasi	851.302.327,00
	Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	1.161.819.283,00
	Dana Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024	1.144.241.830,00
13	KAS DI BENDAHARA FKTP	95.518.613,25
1	PUSKESMAS PASSI BARAT	0,00
2	PUSKESMAS KOMANGAAN	10.452.156,00
3	PUSKESMAS PANGIAN	41.559,00
4	PUSKESMAS INOBONTO	2.419.730,00
5	PUSKESMAS IMANDI	958.629,00
6	PUSKESMAS TANOYAN	0,00
7	PUSKESMAS TUNGOI	0,00
8	PUSKESMAS MOPUYA	114.100,00
9	PUSKESMAS BILALANG	201.505,00
10	PUSKESMAS TADOY	16.136.069,00
11	PUSKESMAS LOLAK	2.894,00
12	PUSKESMAS BUNTALO	967,00
13	PUSKESMAS POIGAR	0,00
14	PUSKESMAS MAELANG	0,25



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah
15	PUSKESMAS DOLODUO	21.523.261,00
16	PUSKESMAS PUSIAN	15.946.642,00
17	PUSKESMAS WERDHI AGUNG	27.636.465,00
18	PUSKESMAS KONAROM	84.636,00
14	KAS DI BENDAHARA BOS	274.718.110,05
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri	236.058.441,21
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	38.659.668,84
15	SISA KAS BOK	3.194.215.366,00
1	PUSKESMAS PASSI BARAT	263.747.579,00
2	PUSKESMAS KOMANGAAN	172.452.687,00
3	PUSKESMAS PANGIAN	202.777.772,00
4	PUSKESMAS INOBONTO	117.726.615,00
5	PUSKESMAS IMANDI	272.306.425,00
6	PUSKESMAS TANOYAN	108.745.040,00
7	PUSKESMAS TUNGOI	244.108.972,00
8	PUSKESMAS MOPUYA	140.222.727,00
9	PUSKESMAS BILALANG	182.464.007,00
10	PUSKESMAS TADOY	86.035.127,00
11	PUSKESMAS LOLAK	356.314.000,00
12	PUSKESMAS BUNTALO	69.947.249,00
13	PUSKESMAS POIGAR	82.095.183,00
14	PUSKESMAS DOLODUO	368.912.781,00
15	PUSKESMAS MAELANG	200.695.816,00
16	PUSKESMAS PUSIAN	98.833.171,00
17	PUSKESMAS WERDHI AGUNG	141.875.311,00
18	PUSKESMAS KONAROM	84.954.904,00
	JUMLAH SILPA TAHUN 2024	37.238.731.719,79

Sumber data : Aplikasi SIPD-RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2 Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun berdasarkan basis kas. Berikut Postur Laporan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024:

Tabel 5.109
Rincian Laporan Perubahan SAL

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	83.581.224.638,64	94.240.934.188,73
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	83.580.667.558,69	92.933.552.911,73
3	Sub Total (3 = 1 - 2)	557.079,95	1.307.381.277,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	37.238.731.719,79	83.581.224.638,64
5	Sub Total (5 = 3 + 4)	37.239.288.799,74	84.888.605.915,64
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(557.079,95)	(1.307.381.277,00)
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (8 = 5 + 6 + 7)	37.238.731.719,79	83.581.224.638,64

Sumber Data : SIPD (diolah)

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp83.581.224.638,64 berasal dari SiLPA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

5.2.2 Pengunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp83.580.667.558,69 tidak sama dengan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp83.581.224.638,64 yang disebabkan adanya koreksi kesalahan saldo awal tahun sebelumnya sebesar Rp557.079,95 disebabkan karena adanya koreksi saldo awal dana BOS sebesar minus Rp1.824,05 dan koreksi saldo awal kas dana JKN pada FKTP sebesar Rp558.904,00 akibat kelebihan catat saldo JKN sebesar Rp653.273,00 yang merupakan utang PFK yang belum terbayarkan tahun 2023 dan lebih catat utang PFK pada Kas JKN sebesar minus Rp94.369,00 atas utang PFK yang sudah terbayarkan tahun sebelumnya.

5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp37.238.731.719,79 terdiri dari :

- Kas di Kas Daerah Rp 33.640.976.672,49
- Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 4.410.000,00
- Kas Dana BOSP Rp 342.744.334,67



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

• Kas Dana kapitasi pada FKTP	Rp 95.518.613,25
• Kas Dana BOK Puskesmas	Rp 3.194.215.366,00
• Kas Lainnya	Rp 27.957.400,00 +
Jumlah	Rp 37.305.822.386,41
• Utang PFK	Rp 67.090.666,62 -
Saldo Akhir	Rp 37.238.731.719,79

Terdiri dari SiLPA mengikat sebesar Rp21.746.723.644,30 dan SiLPA tidak mengikat sebesar Rp15.492.008.075,49

5.3 NERACA

Neraca (*statement of financial performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas, karena postur Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi posisi aset, kewajiban dan ekuitas.

Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Neraca yang disajikan Pemerintah Kabupaten merupakan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 yang terdiri dari aset sebesar Rp1.897.263.718.217,52, kewajiban sebesar Rp3.683.539.905,56 dan ekuitas sebesar Rp1.893.580.178.312,30. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow:

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.897.263.718.217,52 dan Rp1.960.413.561.666,62 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.110
Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1.	Aset Lancar	78.486.536.198,31	125.681.307.155,08	(37,55)
2.	Investasi Jangka Panjang	49.745.447.752,00	47.586.542.868,00	4,54
3.	Aset Tetap	1.592.571.441.234,96	1.573.378.034.403,28	1,22
4.	Aset Lainnya	176.460.293.032,25	213.767.677.240,26	(17,45)
	Jumlah	1.897.263.718.217,52	1.960.413.561.666,62	(3,22)

Sumber Data : SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan sejak tanggal neraca.

Aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.486.536.198,31 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.681.307.155,08 atau mengalami penurunan sebesar 37,55%, aset lancar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.111
Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Kas dan Kas Lainnya	37.306.211.821,41	83.604.601.384,64	(55,38)
2	Piutang Pendapatan	2.632.738.290,00	2.247.099.368,00	17,16
3	Piutang Retribusi Daerah	357.390.932,00	335.519.432,00	6,52
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.463.215.839,00	0,00	100,00
5	Piutang Transfer	22.498.045.328,00	18.334.527.102,47	22,71
6	Piutang Lainnya	0,00	133.100.000,00	(100,00)
7	Penyisihan Piutang	(1.266.245.025,70)	(756.834.708,36)	67,31
8	Beban Dibayar Dimuka	121.396.174,86	119.395.833,33	1,68
9	Persediaan	13.373.782.838,74	21.663.898.743,00	(38,27)
	Jumlah	78.486.536.198,31	125.681.307.155,08	(37,55)

Sumber Data : SIPD (diolah)

Masing-masing akun aset lancar diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas dan Kas Lainnya

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.640.976.672,49 dan tahun 2023 sebesar Rp79.423.136.035,64. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bank Pemerintah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.112
Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	PT. Bank Sulut Cabang Lolak (Penampung PBB) No Rek : 031.01.12.000004-9	0,00	0,00	0,00
2	PT Bank Sulutgo Cabang Lolak (RKUD) No Rek : 031.01.12.000008-6	33.640.976.672,49	79.423.136.035,64	(15,37)
	JUMLAH	33.640.976.672,49	79.423.136.035,64	(57,64)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sumber Data : SIPD (diolah)

Dasar hukum penetapan rekening diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.113
Dasar Hukum Penetapan Kas Daerah

No	Nama Bank / Rekening	Dasar Hukum	Tentang
1	PT. Bank Sulut Cabang Lolak (Penampung PBB) No Rek : 031.01.12.000004-9	SK Bupati No. 09 Thn 2024 Tgl 04-01-2024	Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Penerimaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024
2	PT Bank Sulutgo Cab Lolak (RKUD) No Rek : 031.01.12.000008-6	SK Bupati No. 6 Thn 2024 Tgl 04-01-2024	Penunjukan / Penetapan Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024

Sumber Dokumen : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Penerimaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.410.000,00 dan 2023 sebesar Rp25.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 82,36%. Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 terdapat pada Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp1.800.000,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.610.000,00 yang merupakan sisa uang persediaan yang tidak di pertanggungjawabkan dan belum dikembalikan ke kas daerah per 31 Desember 2024.

Adapun penyetoran sisa kas tersebut nanti disetorkan pada tanggal 24 Januari 2025. Untuk rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.114
Kas Di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Dinas Perdagangan dan ESDM	1.800.000,00	25.000.000,00	(92,80)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.610.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH	4.410.000,00	25.000.000,00	(82,36)

Sumber Data : SIPD (diolah)

3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Penerimaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp10.197.500,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.

4. Kas di Bendahara FKTP

Sesuai Peraturan Presiden nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Penetapan rekening Dana Kapitasi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Penerimaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak.

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.518.613,25 dan 2023 sebesar Rp402.016.014,00. Kas Dana Kapitasi pada FKTP



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.115
Kas Dana kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Kas JKN Puskesmas Passi Barat	0,00	30.346.398,00	(100,00)
2	Kas JKN Puskesmas Komangaan	10.452.156,00	5.998.603,00	74,24
3	Kas JKN Puskesmas Pangian	41.559,00	26.978.405,00	(99,85)
4	Kas JKN Puskesmas Inobonto	2.419.730,00	40.142.900,00	(93,97)
5	Kas JKN Puskesmas Imandi	958.629,00	3.659.332,00	(73,80)
6	Kas JKN Puskesmas Tanoyan	0,00	506.336,00	(100,00)
7	Kas JKN Puskesmas Tungoi	0,00	24.335.206,00	(100,00)
8	Kas JKN Puskesmas Mopuya	114.100,00	114.100,00	0,00
9	Kas JKN Puskesmas Bilalang	201.505,00	70.835.969,00	(99,72)
10	Kas JKN Puskesmas Tadoy	16.136.069,00	90.182,00	17.792,78
11	Kas JKN Puskesmas Lolak	2.894,00	31.497.840,00	(99,99)
12	Kas JKN Puskesmas Buntalo	967,00	31.767.364,00	(100,00)
13	Kas JKN Puskesmas Poigar	0,00	673.089,00	(100,00)
14	Kas JKN Puskesmas Maelang	0,25	54.409.524,00	(100,00)
15	Kas JKN Puskesmas Doloduo	21.523.261,00	0,00	100,00
16	Kas JKN Puskesmas Pusian	15.946.642,00	25.518.799,00	(37,51)
17	Kas JKN Puskesmas Werdhi Agung	27.636.465,00	55.033.813,00	(49,78)
18	Kas JKN Puskesmas Konarom	84.636,00	108.154,00	(21,74)
	JUMLAH	95.518.613,25	402.016.014,00	(76,24)

Sumber Data : SIPD (diolah)

Saldo kas dana kapitasi pada FKTP sebesar Rp95.518.613,25 terdiri dari saldo kas di bank sebesar Rp92.759.681,25 dan saldo tunai sebesar Rp2.758.932,00. Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kas Tunai	Kas Bank	Jumlah
1	Kas JKN Puskesmas Passi Barat	0,00	0,00	0,00
2	Kas JKN Puskesmas Komangaan	10.098.954,00	353.202,00	10.452.156,00
3	Kas JKN Puskesmas Pangian	41.559,00	0,00	41.559,00
4	Kas JKN Puskesmas Inobonto	98.636,00	2.321.094,00	2.419.730,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Kas Tunai	Kas Bank	Jumlah
5	Kas JKN Puskesmas Imandi	958.629,00	0,00	958.629,00
6	Kas JKN Puskesmas Tanoyan	0,00	0,00	0,00
7	Kas JKN Puskesmas Tungoi	0,00	0,00	0,00
8	Kas JKN Puskesmas Mopuya	114.100,00	0,00	114.100,00
9	Kas JKN Puskesmas Bilalang	201.505,00	0,00	201.505,00
10	Kas JKN Puskesmas Tadoy	16.136.069,00	0,00	16.136.069,00
11	Kas JKN Puskesmas Lolak	2.894,00	0,00	2.894,00
12	Kas JKN Puskesmas Buntalo	967,00	0,00	967,00
13	Kas JKN Puskesmas Poigar	0,00	0,00	0,00
14	Kas JKN Puskesmas Maelang	0,25	0,00	0,25
15	Kas JKN Puskesmas Doloduo	21.523.261,00	0,00	21.523.261,00
16	Kas JKN Puskesmas Pusian	15.946.642,00	0,00	15.946.642,00
17	Kas JKN Puskesmas Werdhi Agung	27.636.465,00	0,00	27.636.465,00
18	Kas JKN Puskesmas Konarom	0,00	84.636,00	84.636,00
	JUMLAH	92.759.681,25	2.758.932,00	95.518.613,25

Sumber Data : SIPD (diolah)

Rincian dana kapitasi FKTP dapat dilihat pada **Lampiran 8** Laporan Keuangan ini

5. Kas Dana BOSP

Rekening Kas Dana BOSP ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp343.133.769,67 dan Tahun 2023 sebesar Rp106.449.978,00, atau mengalami kenaikan sebesar 222,34%.

Tabel 5.117
Kas Dana BOSP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	PENDAPATAN			Belanja	Setoran PAD /PFK/Kas	Saldo Akhir
				Pendapatan	Pendapatan Pengembalian	PAD/PFK yang dipotong			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8=3+4+5+6-7-8
1	SD Negeri	76.498.536,00	1.561.068,58	18.371.314.386,00	7.887.000,00	637.573.162,00	18.203.905.083,00	599.728.204,00	291.200.865,58
2	SD Swasta	0,00	0,00	1.709.536.800,00	0,00	0,00	1.709.536.800,00	0,00	0,00
3	SMP Negeri	29.776.006,00	2.123,09	8.460.164.800,00	14.866.674,00	359.737.455,00	8.456.678.760,00	356.110.830,00	51.757.468,09
4	SMP Swasta	0,00	0,00	1.613.868.000,00	0,00	0,00	1.613.868.000,00	0,00	0,00
5	TK Negeri	48.710,00	0,00	213.500.000,00	0,00	0,00	213.500.000,00	0,00	48.710,00
6	TK /PAUD Swasta	0,00	0,00	2.436.232.250,00	0,00	0,00	2.436.232.250,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	PENDAPATAN			Belanja	Setoran PAD /PFK/Kas	Saldo Akhir
				Pendapatan	Pendapatan Pengembalian	PAD/PFK yang dipotong			
7	BOP Kesetaraan Negeri	126.726,00	0,00	140.060.000,00	0,00	0,00	140.060.000,00	0,00	126.726,00
8	BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00	743.600.000,00	0,00	0,00	743.600.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		106.449.978,00	1.563.191,67	33.688.276.236,00	22.753.674,00	997.310.617,00	33.517.380.893,00	955.839.034,00	343.133.769,67

Sumber Data : SIPD (diolah)

Saldo akhir Kas Dana BOSP sebesar Rp343.133.769,67 berasal dari sisa kas dana BOSP yang masih berada di Bank pada rekening sekolah sebesar Rp290.187.671,67 dan uang tunai sebesar Rp52.946.098,00. Saldo tersebut didalamnya sudah termasuk utang PFK sebesar Rp65.946.356,62 dan pajak restoran dan rumah makan sebesar Rp2.469.303,00 yang belum disetorkan.

Saldo Kas Dana BOSP Tahun 2024 berasal dari Dana BOS sebesar Rp342.958.333,67 dan Dana BOP Sebesar Rp175.436,00.

Untuk rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran 9** Laporan Keuangan ini.

6. Kas Dana BOK Puskesmas

Penetapan rekening Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Penerimaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak.

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.194.215.366,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%. Pencatatan sisa kas dana BOK Puskesmas pada tahun 2023 dicatat pada Kas Lainnya. Kas Dana BOK Puskesmas dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.118
Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Kas JKN Puskesmas Passi Barat	263.747.579,00	0,00	100,00
2	Kas JKN Puskesmas Komangaan	172.452.687,00	0,00	100,00
3	Kas JKN Puskesmas Pangian	202.777.772,00	0,00	100,00
4	Kas JKN Puskesmas Inobonto	117.726.615,00	0,00	100,00
5	Kas JKN Puskesmas Imandi	272.306.425,00	0,00	100,00
6	Kas JKN Puskesmas Tanoyan	108.745.040,00	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
7	Kas JKN Puskesmas Tungoi	244.108.972,00	0,00	100,00
8	Kas JKN Puskesmas Mopuya	140.222.727,00	0,00	100,00
9	Kas JKN Puskesmas Bilalang	182.464.007,00	0,00	100,00
10	Kas JKN Puskesmas Tadoy	86.035.127,00	0,00	100,00
11	Kas JKN Puskesmas Lolak	356.314.000,00	0,00	100,00
12	Kas JKN Puskesmas Buntalo	69.947.249,00	0,00	100,00
13	Kas JKN Puskesmas Poigar	82.095.183,00	0,00	100,00
14	Kas JKN Puskesmas Maelang	200.695.816,00	0,00	100,00
15	Kas JKN Puskesmas Doloduo	368.912.781,00	0,00	100,00
16	Kas JKN Puskesmas Pusian	98.833.171,00	0,00	100,00
17	Kas JKN Puskesmas Werdhi Agung	141.875.311,00	0,00	100,00
18	Kas JKN Puskesmas Konarom	84.954.904,00	0,00	100,00
	JUMLAH	3.194.215.366,00	0,00	100,00

Sumber Data : SIPD (diolah)

Saldo kas dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.194.215.366,00 terdiri dari saldo kas di bank sebesar Rp3.194.212.326,00 dan saldo tunai sebesar Rp3.040,00 pada Puskesmas Tanoyan sebesar Rp1.040,00 dan Puskesmas Mopuya sebesar Rp2.000,00.

Untuk rincian Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 10** Laporan Keuangan ini

7. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank selain yang ada di Kas Daerah, Kas Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP, dan Kas di Bendahara Dana BOSP milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kas lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.957.400,00 terdapat pada :

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp24.778.000,00 yang diakibatkan oleh karena kelebihan pengeluaran pada RKUD atas :
 - a. Transaksi *double* bayar atas SP2D No.615 yang dilakukan oleh pihak bank sebesar Rp13.500.000,00 dan telah disetorkan kembali ke RKUD pada tanggal 12 Maret 2025 sesuai dengan jumlah tersebut diatas;
 - b. Bank lebih bayar SP2D No.888 sebesar Rp2.000.000,00 dari nilai sp2d yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp93.511.200,00 namun yang terbayarkan adalah sebesar Rp95.511.200,00 atas kelebihan tersebut telah disetorkan kembali ke RKUD pada tanggal 12 Maret 2025; dan
 - c. Dana TPG THR Tahun 2023 yang dicairkan Tahun 2024 atas



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

SP2D No. 0020 namun tidak bisa disalurkan lagi sehingga dikembalikan ke RKUD pada tanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp9.278.000,00.

2. Inspektorat Daerah sebesar Rp507.000,00 atas SP2D No.00213 yang berasal dari kelebihan pembayaran gaji Bulan November 2024 oleh pihak Bank. Nilai bersih diluar potongan pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp195.872.400,00 namun yang dibayarkan oleh pihak bank sebesar Rp196.379.400,00 atas kelebihan tersebut telah dikembalikan ke RKUD pada tanggal 23 Januari 2024.
3. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.672.400,00 merupakan Pajak Makan Minum tahun 2024 yang belum disetorkan tahun 2024 dan disetorkan pada tahun 2025.

Untuk rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 11** Laporan Keuangan ini.

Sisa Kas Lainnya per 31 Desember 2023 pada Dinas Kesehatan berasal dari Sisa Kas Dana BOK Puskesmas yang masih tercatat pada Kas Lainnya sedangkan per 31 Desember 2024 pencatatannya telah dipindahkan ke Kas Dana BOK Puskesmas. Rincian dana BOK per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.119
Kas lainnya dari Dana BOK

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Kas JKN Puskesmas Passi Barat	0,00	268.038.440,00	(100,00)
2	Kas JKN Puskesmas Komangaan	0,00	98.265.073,00	(100,00)
3	Kas JKN Puskesmas Pangian	0,00	154.991.815,00	(100,00)
4	Kas JKN Puskesmas Inobonto	0,00	148.149.900,00	(100,00)
5	Kas JKN Puskesmas Imandi	0,00	337.094.992,00	(100,00)
6	Kas JKN Puskesmas Tanoyan	0,00	193.254.596,00	(100,00)
7	Kas JKN Puskesmas Tungoi	0,00	238.003.116,00	(100,00)
8	Kas JKN Puskesmas Mopuya	0,00	315.833.441,00	(100,00)
9	Kas JKN Puskesmas Bilalang	0,00	111.290.659,00	(100,00)
10	Kas JKN Puskesmas Tadoy	0,00	196.497.970,00	(100,00)
11	Kas JKN Puskesmas Lolak	0,00	35.341.660,00	(100,00)
12	Kas JKN Puskesmas Buntalo	0,00	106.787.542,00	(100,00)
13	Kas JKN Puskesmas Poigar	0,00	190.234.687,00	(100,00)
14	Kas JKN Puskesmas Maelang	0,00	138.847.654,00	(100,00)
15	Kas JKN Puskesmas Doloduo	0,00	425.070.785,00	(100,00)
16	Kas JKN Puskesmas Pusian	0,00	217.281.934,00	(100,00)
17	Kas JKN Puskesmas Werdhi Agung	0,00	262.047.189,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
18	Kas JKN Puskesmas Konarom	0,00	186.670.879,00	(100,00)
	JUMLAH	0,00	3.623.702.332,00	(100,00)

Sumber Data : SIPD (diolah)

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang lain-lain PAD yang sah. Untuk Tahun Anggaran 2024 Piutang Pendapatan sebesar Rp2.632.738.290,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.247.099.368,00 atau mengalami kenaikan sebesar 17,16%. Piutang pendapatan dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.120
Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Piutang Pajak Hotel	23.190.000,00	32.217.972,00	(28,02)
2	Piutang Pajak Restoran	122.727.660,00	129.627.660,00	(5,32)
3	Piutang Pajak Reklame	264.826.063,00	268.627.250,00	(1,42)
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	881.442.051,00	877.974.231,00	0,39
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	176.214.990,00	141.932.093,00	24,15
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.077.672.281,00	722.539.061,00	49,15
7	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	86.665.245,00	70.181.101,00	23,49
8	Denda Pajak	0,00	4.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	2.632.738.290,00	2.247.099.368,00	17,16

Sumber Data : SIPD (diolah)

Rincian piutang pendapatan dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.121
Rincian Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	(7 = 3+4+5-6)
1	Pajak Hotel	32.217.972,00	0,00	48.396.100,00	57.424.072,00	23.190.000,00
2	Pajak Restoran	129.627.660,00	0,00	761.666.863,00	768.566.863,00	122.727.660,00
3	Pajak Reklame	268.627.250,00	0,00	2.373.818.839,00	2.377.620.026,00	264.826.063,00
4	Pajak Penerangan Jalan	877.974.231,00	0,00	10.605.612.925,00	10.602.145.105,00	881.442.051,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	(7 = 3+4+5-6)
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	141.932.093,00	(38.732.634,00)	23.508.369.796,00	23.435.354.265,00	176.214.990,00
6	Pajak PBB P2	722.539.061,00	0,00	4.327.338.549,00	3.972.205.329,00	1.077.672.281,00
7	Pajak BPHTB	70.181.101,00	(2.500.000,00)	523.879.616,00	504.895.472,00	86.665.245,00
8	Denda Pajak	4.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Pendapatan	2.247.099.368,00	(45.232.634,00)	42.149.082.688,00	41.718.211.132,00	2.632.738.290,00

Sumber Data : SIPD (diolah)

Masing-masing akun piutang diuraikan sebagai berikut :

1) Piutang Pajak Hotel

Piutang pajak hotel sebesar Rp23.190.000,00 berasal dari pajak hotel Tahun 2021 yang belum di bayarkan oleh wajib pajak Hotel Totabuan sebesar Rp8.190.000,00 dan Hotel Brenda sebesar Rp15.000.000,00. Tidak ada penambahan piutang pajak hotel tahun 2024

2) Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran sebesar Rp122.727.660,00 berasal dari piutang pajak Tahun 2021 wajib pajak Restoran RM. Jelita sebesar Rp38.727.860,00, Restoran RM dan Lamongan sebesar Rp17.520.000,00, Restoran RM Inaton sebesar Rp4.589.500,00, Restoran RM Lamongan Adya Putra sebesar Rp13.700.000,00, Restoran RM Nor Wahyu sebesar Rp275.000,00 dan Restoran RM Ajeng Lestari sebesar Rp16.775.000,00 serta piutang pajak Tahun 2023 wajib pajak Cafe Tampa Bakudapa sebesar Rp31.140.300,00. Tidak ada penambahan piutang pajak restoran tahun 2024

3) Piutang Pajak Reklame

Piutang pajak reklame Tahun 2024 sebesar Rp264.826.063,00 berasal dari piutang pajak pada PT. Gudang Garam Tbk atas pemasangan reklame *shop sign non pole* produk Gudang Garam di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 sebesar Rp39.827.500,00, dan penambahan piutang pajak reklame Tahun 2024 dari PT. Anugerah Setia sebesar Rp2.940.000,00, Hellen Elty Pandeiroi sebesar Rp2.940.000,00, CV. Karya Wenang sebesar Rp2.575.000,00, PT. Surya Molosindo sebesar Rp2.940.000,00, PT. Mudi Utama Indonesia (Alfamidi) sebesar Rp17.526.000,00, PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) sebesar Rp63.921.000,00, Sam Kandoli sebesar Rp2.940.000,00, PT. Indosat IM3 sebesar Rp10.619.375,00, PT. Indosat Oredo 3 sebesar Rp5.941.938,00, PT. Ayam Singapore sebesar Rp3.129.000,00, PT. Tridjaya Motor sebesar Rp1.725.000,00, PT. Indomart Prisma (Indomart) sebesar Rp107.801.250,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang penerangan jalan merupakan pajak penerangan jalan Bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan oleh PT PLN (Persero) Cabang Kotamobagu dan PT Conch North Sulawesi Cement sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Total piutang pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp881.442.051,00 yang berasal dari piutang pajak penerangan jalan Bulan Desember 2024 pada PT. PLN (Persero) sebesar Rp683.786.904,00 yang disetorkan pada tanggal 13 Januari 2025 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember 2024 pada PT. Conch North Sulawesi Cement sebesar Rp197.655.147,00 yang disetorkan pada tanggal 22 Januari 2025.

5) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp176.214.990,00 merupakan piutang pajak yang dapat ditagih pada:

Tabel 5.122
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

No	Nama Wajib Pajak	Tahun	Kegiatan	Jumlah
1	CV. Rajawali Tritunggal	2021	Pajak Galian C	59.856.000,00
2	PT. Tonggara Batu Perkasa	2021	Pajak Galian C	32.130.000,00
3	CV. Rajawali Tri Tunggal	2024	Pengambilan dan Pemanfaatan Material	20.193.000,00
4	CV. Rajawali Tri Tunggal	2024	Pengambilan dan Pemanfaatan Material	15.200.000,00
5	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2024	Pembangunan Menara Telekomunikasi Desa Muntoi Timur Kec Passi Barat	1.146.560,00
6	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2024	Pembangunan Menara Telekomunikasi Desa Pusian Kec Dumoga	1.146.560,00
7	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2024	Pembangunan Menara Telekomunikasi Desa Tadoy Timur Kec Bolaang Timur	1.146.560,00
8	PT. Marga Dwitaguna	2024	Pembangunan dan Pemanfaatan Minerba Bulan April – Juli 2024	24.475.700,00
9	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2024	Pembangunan Menara Telekomunikasi Desa Poopo Kec Passi Timur	479.300,00
10	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2024	Pembangunan Menara Telekomunikasi Desa Ambang II Kec Bolaang Timur	606.550,00
11	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2024	Pembangunan Menara Telekomunikasi RSUD Datoe Binangkang Desa Lolak II Kec Lolak	40.520,00
12	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2024	Pembangunan Menara Telekomunikasi Desa Dumoga II Kec Dumoga Timur	546.790,00
13	Desa Pangian Barat	2024	Pekerjaan Jalan Sirtu, Pembangunan Drainase, Jalan Paving Block Tahap II TA. 2024	6.012.000,00
14	Desa Insil Baru	2024	Pembangunan Pavin Block 15,5 M dan Paving Block Segmen 1 Tahap II TA. 2024	492.750,00
15	Desa Lolanan	2024	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga/Penimbunan Lapangan Olahraga Desa	12.740.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Wajib Pajak	Tahun	Kegiatan	Jumlah
			Lolanan Kec. Sangtombolang TA. 2024	
16	Desa Tapadaka 1	2024	Pembangunan Gedung TK/PAUD, Saluran Irigasi 133 M, Peningkatan jalan Usaha Tani 246 M, Talud JUT 16 M Tahap I TA. 2024	100,00
17	CV. Prima Sakti	2024	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Werdhi Agung Timur Kec. Dumoga Tengah TA. 2024	2.600,00
JUMLAH				176.214.990,00

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Pada Tahun 2024 terdapat koreksi saldo awal piutang pajak mineral bukan logam atas :

- Piutang Pajak pada PT. Adikarya Jaya Abadi sebesar Rp29.415.334,00, merupakan piutang pada kegiatan pengambilan air tanah dan air baku yang ditetapkan tahun 2019 oleh Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp38.985.334,00 namun yang bayarkan hanya sebesar Rp9.570.000,00 pada tanggal 1 Desember 2021, setelah dilakukan konfirmasi pada wajib pajak dan Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow dan didapati bahwa adanya kesalahan penetapan pajak oleh Dinas Perdagangan dan ESDM yang seharusnya adalah Rp9.570.000,00 sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan oleh wajib pajak sehingga nilai tersebut dikoreksi mengurangi nilai piutang pajak.
- Piutang Pajak pada Desa Mopuya Selatan II sebesar Rp3.728.000,00 atas kegiatan Pembuatan tembok penahan tanah tipe C panjang 398 M dan jalan lingkungan (rabat beton) panjang 57,25 M lebar 2 M tahap III tahun 2020 yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan ESDM tanggal 16 Februari 2021. Setelah dilakukan penagihan atas piutang tersebut diatas didapati bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh wajib pajak, setelah dilakukan konfirmasi kepada Dinas Perdagangan dan ESDM sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan SKPD pajak mineral tersebut didapati bahwa SKPD dimaksud diatas tidak ada dan itu merupakan SKPD Desa Singsingon Timur yang salah dalam penulisan nama desa, dan terhadap SKPD Pajak tersebut telah dibayarkan oleh Desa Singsingon Timur pada tahun 2020 sehingga harus dikoreksi mengurangi saldo awal piutang pajak.
- Piutang pajak Desa Dumoga 3 sebesar Rp5.589.300,00 atas kegiatan Pembangunan gorong-gorong, perkerasan jalan ekonomi 312,5 M dan talud 28 M tahap III TA. 2023 telah dibayarkan tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp5.925.580,00 berdasarkan bukti bayar dan RC Bank Bulan Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Saldo akhir piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp1.077.672.281,00 berasal dari saldo awal piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp722.539.061,00 ditambah penetapan pada Tahun 2024 dikategorikan sebagai penambahan ketetapan pajak bumi dan bangunan adalah sejumlah Rp4.327.338.549,00 dikurangi dengan penerimaan OPD atas penetapan pajak Tahun 2024 sebesar Rp3.956.085.371,00 dan dikurangi pembayaran piutang pajak Tahun 2023 sebesar Rp16.119.958,00 sehingga total saldo akhir piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2024 setelah dilakukan penambahan maupun pengurangan adalah senilai Rp1.077.672.281,00.

7) Piutang Pajak BPHTB

Piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp86.665.245,00 merupakan sisa pajak BPHTB Tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,00 yang belum di bayarkan oleh wajib pajak dan ditambah dengan penambahan piutang pajak Tahun 2023 sebesar Rp55.776.200,00 serta penambahan piutang pajak Tahun 2024 sebesar Rp27.288.445,00. Terdapat koreksi saldo awal Piutang Pajak BPHTB sebesar Rp2.500.000,00 atas Pajak BPHTB yang telah dibayarkan tahun 2023 oleh wajib pajak.

8) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp0,00. Terdapat koreksi saldo awal nilai piutang pajak sebesar Rp4.000.000,00 hal ini dilakukan oleh karena adanya kesalahan pencatatan piutang denda keterlambatan pelaporan pembuatan akta tanah atau risalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan penagihan dan konfirmasi terhadap wajib pajak tersebut dan didapati adanya kesalahan dalam pembukuan tanggal pelaporan pada buku register penerimaan laporan bulanan berdasarkan bukti pengiriman email dan pengiriman melalui kantor pos oleh wajib pajak serta bukti penyetoran atas denda tersebut yang sudah dibayarkan pada tahun sebelumnya.

Rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp357.390.932,00 dan tahun 2023 sebesar Rp335.519.432,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,52%. Piutang retribusi daerah sebesar Rp357.390.932,00 merupakan piutang jasa umum pelayanan pasar Tahun 2021 sebesar Rp93.991.760,00, Tahun 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp133.877.536,00, Tahun 2023 sebesar Rp96.442.136,00 dan penambahan Tahun 2024 sebesar Rp33.079.500,00. Piutang retribusi pasar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.123
Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Nama Pasar	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Jumlah
1	Pasar Lolak	61.783.520,00	75.774.820,00	60.227.820,00	8.835.000,00	206.621.160,00
2	Pasar Inobonto	1.624.440,00	7.111.816,00	3.652.316,00	7.795.000,00	20.183.572,00
3	Pasar Poigar	1.248.400,00	2.016.000,00	0,00	0,00	3.264.400,00
4	Pasar Pusian	2.834.000,00	4.964.000,00	7.344.000,00	1.800.000,00	16.942.000,00
5	Pasar Imandi	5.980.200,00	5.098.200,00	1.142.800,00	592.800,00	12.814.000,00
6	Pasar Ibolian	20.521.200,00	27.911.000,00	18.999.200,00	12.553.500,00	79.984.900,00
7	Pasar Mopuya	0,00	11.001.700,00	5.076.000,00	1.503.200,00	17.580.900,00
JUMLAH		93.991.760,00	133.877.536,00	96.442.136,00	33.079.500,00	357.390.932,00

Sumber Data : SIPD (diolah)

Rincian perhitungan piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.463.215.839,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%. Nilai piutang tersebut merupakan deviden dari PT. Bank Sulutgo tahun 2024 berdasarkan hasil RUPS Nomor 01 tahun 2025 tanggal 9 April 2025 yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang transfer antar daerah atau piutang bagi hasil provinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.498.045.328,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp18.334.527.102,47 atau mengalami kenaikan sebesar 22,71%.

Piutang transfer antar daerah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.124
Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	(7 = 3+4+5-6)
1	PKB	3.218.216.702,30	(1,30)	6.003.592.810,00	5.046.475.447,00	4.175.334.064,00
2	BBN-KB	2.727.925.190,60	(0,60)	5.725.250.597,00	4.415.679.511,00	4.037.496.276,00
3	PBB – KB	12.249.146.587,90	0,10	20.952.844.304,00	19.111.264.078,00	14.090.726.814,00
4	PAP	139.238.621,67	1,33	272.204.343,00	216.954.792,00	194.488.174,00
5	Pajak Rokok	0,00	0,00	13.284.242.054,00	13.284.242.054,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	(7 = 3+4+5-6)
	Jumlah Piutang Transfer	18.334.527.102,47	(0,47)	46.238.134.108,00	42.074.615.882,00	22.498.045.328,00

Sumber Data : SIPD (diolah)

Masing-masing jenis piutang Transfer antar daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Piutang Transfer DBH-PKB

Piutang transfer DBH-PKB sebesar Rp4.175.334.064,00 merupakan DBH-PKB Bulan Mei sebesar Rp448.849.037,00, Bulan Juni sebesar Rp434.591.967,00, Bulan Juli sebesar Rp497.551.147,00, Bulan Agustus sebesar Rp536.862.750,00, Bulan September sebesar Rp582.515.452,00, Bulan Oktober sebesar Rp524.513.153,00, Bulan November sebesar Rp457.332.379,00 dan Bulan Desember sebesar Rp693.118.179,00 yang belum diterima sampai 31 Desember 2024.

2) Piutang Transfer BDH-BBN-KB

Piutang transfer DBH-BBN-KB sebesar Rp4.037.496.276,00 merupakan DBH-BBN-KB Bulan Mei sebesar Rp516.380.153,00, Bulan Juni sebesar Rp443.286.865,00, Bulan Juli sebesar Rp495.164.301,00, Bulan Agustus sebesar Rp410.368.730,00, Bulan September sebesar Rp513.006.888,00, Bulan Oktober sebesar Rp613.744.716,00, Bulan November sebesar Rp467.547.115,00 dan Bulan Desember sebesar Rp577.997.508,00 yang belum diterima sampai 31 Desember 2024.

3) Piutang Transfer DBH-PBB-KB

Piutang transfer DBH-PBB-KB sebesar Rp14.090.726.814,00 merupakan DBH-PBB-PKB Bulan Mei sebesar Rp1.609.582.908,00, Bulan Juni sebesar Rp1.581.489.086,00, Bulan Juli sebesar Rp1.814.869.090,00, Bulan Agustus sebesar Rp1.791.663.496,00, Bulan September sebesar Rp1.879.991.779,00, Bulan Oktober sebesar Rp1.772.124.870,00, Bulan November sebesar Rp1.941.094.697,00 dan Bulan Desember sebesar Rp1.699.910.888,00 yang belum diterima sampai 31 Desember 2024.

4) Piutang Transfer DBH-PAP

Piutang transfer DBH-PAP sebesar Rp194.488.174,00 merupakan DBH-PAP Bulan Mei sebesar Rp17.825.124,00, Bulan Juni sebesar Rp19.865.805,00, Bulan Juli sebesar Rp17.540.570,00, Bulan Agustus sebesar Rp16.757.570,00, Bulan September sebesar Rp16.698.234,00, Bulan Oktober sebesar Rp39.527.619,00, Bulan November sebesar Rp41.554.430,00 dan Bulan Desember sebesar Rp24.718.822,00 yang belum diterima



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sampai 31 Desember 2024.

5) **Piutang Transfer DBH-Pajak Rokok**

Piutang transfer DBH - Pajak rokok sebesar Rp0,00 nilai tersebut merupakan piutang transfer DBH - pajak rokok Tahun 2024.

Rincian piutang transfer antar daerah dapat dilihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.6 **Piutang Lainnya**

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan saldo piutang 2023 sebesar Rp133.100.000,00 atau turun 100,00%, Piutang lainnya berasal dari piutang TGR yang telah memiliki SKTJM. Penurunan piutang lainnya ini disebabkan oleh adanya pembayaran pengurangan piutang pada tahun 2024 sebesar Rp4.000.000,00 atas nama Jackly Makarawung sedangkan sisanya sebesar Rp129.100.000,00 masing-masing atas nama Mokhamad Sinyo Mokoginta (Eks Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika) sebesar Rp74.000.000,00, Gian Limbanadi (Jasa Advetorial pada Dinas Kominfo) sebesar Rp15.400.000,00, dan Jackly Makarawung (Jasa Advetorial pada Dinas Kominfo) sebesar Rp39.700.000,00 di reklasifikasikan ke tagihan jangka panjang oleh karena jatuh tempo SKTJMnya telah kadaluarsa. Rincian piutang lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.7 **Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp1.266.245.025,70 sedangkan tahun 2023 sebesar minus Rp756.834.708,36 atau mengalami kenaikan sebesar 67,31%.

Penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.125
Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(811.961.891,00)	(598.523.616,36)	35,66
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(324.476.829,50)	(23.728.456,00)	1.267,46
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(17.316.079,20)	0,00	100,00
4	Penyisihan Piutang Transfer	(112.490.226,00)	(91.672.636,00)	22,71
5	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(42.910.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	(1.266.245.025,70)	(756.834.708,36)	67,31

Sumber Data : SIPD (diolah)

Penyisihan piutang Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.126
Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
1	2	3	4	5 (3+4)
I	Penyisihan Piutang Pendapatan	2.632.738.290,00	(811.961.891,00)	1.820.776.399,00
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	23.190.000,00	(11.595.000,00)	11.595.000,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	122.727.660,00	(48.907.710,00)	73.819.950,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	264.826.063,00	(40.952.493,00)	223.873.570,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	881.442.051,00	(4.407.210,00)	877.034.841,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	176.214.990,00	(46.414.145,00)	129.800.845,00
6	Penyisihan Piutang PBB P2	1.077.672.281,00	(646.593.351,00)	431.078.930,00
7	Penyisihan Piutang BPHTB	86.665.245,00	(13.091.982,00)	73.573.263,00
8	Penyisihan Piutang Denda Pajak	0,00	0,00	0,00
II	Penyisihan Piutang Retribusi	357.390.932,00	(324.476.829,50)	32.914.102,50
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	357.390.932,00	(324.476.829,50)	32.914.102,50
III	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.463.215.839,00	(17.316.079,20)	3.445.899.759,80
1	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.463.215.839,00	(17.316.079,20)	3.445.899.759,80
IV	Penyisihan Piutang Transfer	22.498.045.328,00	(112.490.226,00)	22.385.555.102,00
1	PKB	4.175.334.064,00	(20.876.670,00)	4.154.457.394,00
2	BBN-KB	4.037.496.276,00	(20.187.481,00)	4.017.308.795,00
3	PBB – KB	14.090.726.814,00	(70.453.634,00)	14.020.273.180,00
4	PAP	194.488.174,00	(972.441,00)	193.515.733,00
5	Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
V	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
1	Piutang TGR	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang	28.951.390.389,00	(1.266.245.025,70)	27.685.145.363,30

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.8 Beban di Bayar di Muka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp121.396.174,86 dan Tahun 2023 sebesar Rp119.395.833,33 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.341,53 atau 1,68%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya koreksi perhitungan nilai beban dibayar dimuka dimana pada tahun sebelumnya perhitungannya memperhitungkan jumlah bulan sedangkan di tahun 2024 perhitungannya memperhatikan jumlah hari yang di bebaskan. Beban di bayar dimuka per 31 Desember 2023 merupakan beban di bayar di muka berupa sewa gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor. Rincian beban di bayar dimuka dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.127
Beban di Bayar di Muka

(dalam rupiah)

No	OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3	4
1	BPBD	74.084.699,45	70.833.333,33
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	47.311.475,41	48.562.500,00
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	121.396.174,86	119.395.833,33

Sumber Data : SIPD (diolah)

Perhitungan beban jasa di bayar di muka dapat dilihat pada
Lampiran 13 Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.9 Persediaan

Saldo persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.373.782.838,74 dan Tahun 2023 sebesar Rp21.663.898.743,00 atau mengalami penurunan sebesar 38,27%. Persediaan Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 merupakan persediaan barang pakai habis, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.128
Persediaan (Barang Pakai Habis)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
I	Bahan	3.754.200,00	5.249.400,00	(28,48)
1	Bahan Lainnya	3.754.200,00	5.249.400,00	(28,48)
II	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	225.829.803,00	548.802.522,00	(58,85)
1	Alat Tulis Kantor	15.612.615,00	33.158.142,00	(52,91)
2	Bahan Cetak	202.156.888,00	509.772.450,00	(60,34)
3	Benda Pos	5.210.000,00	120.000,00	4.241,67
4	Alat listrik	0,00	992.500,00	(100,00)
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.850.300,00	4.759.430,00	(40,11)
III	Obat-Obatan	9.369.971.732,00	4.772.088.645,00	96,35
1	Obat	9.357.526.472,00	4.681.677.717,00	99,88
2	Obat-Obatan Lainnya	12.445.260,00	90.410.928,00	(86,23)
IV	Persediaan untuk	3.774.227.103,74	16.337.758.176,00	(76,90)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
	Dijual/Diserahkan			
1	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	3.774.227.103,74	16.337.758.176,00	(76,90)
	Total	13.373.782.838,74	21.663.898.743,00	(38,27)

Sumber Data : SIPD (diolah)

- Persediaan Bahan lainnya sebesar Rp3.754.200,00 merupakan persediaan bahan logistik kantor pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.584.200,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.170.000,00;
- Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp225.829.803,00 berupa:
 - a. Alat tulis kantor yang merupakan sisa alat tulis kantor sebesar Rp15.612.615,00 berada pada:
 - 1. Dinas Sosial sebesar Rp3.647.500,00;
 - 2. Dinas PP dan PA sebesar Rp376.700,00;
 - 3. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.104.700,00;
 - 4. Dinas PMD sebesar Rp1.804.000,00;
 - 5. Dinas PP dan KB sebesar Rp71.115,00;
 - 6. Dinas Kominfo sebesar Rp210.000,00;
 - 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp2.501.000,00;
 - 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp973.900,00;
 - 9. Dinas Perikanan sebesar Rp111.800,00;
 - 10. Dinas Perkebunan sebesar Rp370.000,00;
 - 11. Sekretariat DPRD sebesar Rp1.401.200,00;
 - 12. Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp1.217.500,00;
 - 13. Inspektorat Daerah sebesar Rp828.000,00;
 - 14. Bappeda sebesar Rp64.800,00; dan
 - 15. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp930.400,00.
 - b. Persediaan bahan cetak sebesar Rp202.156.888,00 merupakan persediaan blanko pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp170.502.988,00 dan sisa karcis sebesar Rp31.653.900,00 yang berada pada:
 - 1. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.452.500,00;
 - 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.304.300,00; dan
 - 3. Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp25.897.100,00
- Persediaan benda pos merupakan persediaan materai sebesar Rp5.210.000,00 yang berada pada:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.500.000,00;
 - b. RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp2.000.000,00;
 - c. Dinas Sosial sebesar Rp20.000,00;
 - b. Dinas PP dan PA sebesar Rp100.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Dinas PMD sebesar Rp160.000,00;
- d. Dinas PP dan KB sebesar Rp30.000,00;
- e. Dinas Perkebunan sebesar Rp200.000,00;
- f. Bappeda sebesar Rp50.000,00, dan
- g. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp150.000,00.
- Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp2.850.300,00 merupakan persediaan makan ringan tamu yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.458.800,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp1.356.500,00 dan Persediaan peralatan kebersihan pada Bappeda sebesar Rp35.000,00.
- Persediaan obat sebesar Rp9.357.526.472,00 merupakan persediaan obat-obatan yang berada di Dinas Kesehatan yang didalamnya sudah termasuk persediaan obat-obatan yang berada di Gudang Farmasi dan Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow, jumlah tersebut sudah termasuk persediaan obat yang telah kadaluarsa namun belum dihapuskan karena belum memiliki Berita Acara Penghapusan sebesar Rp929.755.195,00. Selain persediaan obat pada Dinas Kesehatan terdapat juga persediaan obat pada RSUD Datoe Binangkang yang belum dapat dicatat sebagai persediaan karena sampai dengan tanggal pelaporan nilai persediaannya belum dilaporkan hal ini disebabkan proses pemetaan stok obat dari belanja dan opname stok yang belum selesai sehingga belum bisa diyakini penyajiannya.
- Persediaan obat-obatan lainnya sebesar Rp12.445.260,00 berasal dari persediaan alat kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB.
- Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3.774.227.103,74 merupakan persediaan yang berada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp343.162.103,74, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.030.020.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp25.901.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp375.144.000,00.

Hal – hal yang perlu diungkapkan:

Selama tahun 2024 terdapat hibah obat *buffer* dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Dinas Kesehatan sebesar Rp706.342.883,00 sedangkan yang menjadi persediaan atas obat *buffer* tersebut adalah sebesar Rp238.754.277,00.

Perhitungan persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 14** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.745.447.752,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp47.586.542.868,00 atau mengalami kenaikan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar 4,54%. Investasi ini merupakan Investasi Permanen pemerintah daerah berupa penyertaan modal pada lembaga perbankan, PDAM, dan Perusahaan Daerah Gadasera dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.129
Investasi Jangka Panjang Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	PT Bank SulutGo	23.441.100.000,00	23.441.100.000,00	0,00
2	PDAM	26.304.347.752,00	24.145.442.868,00	8,94
3	PD Gadasera	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		49.745.447.752,00	47.586.542.868,00	4,54

Sumber Data : SIPD (diolah)

Investasi Jangka Panjang berupa Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut :

1) Penyertaan Modal kepada PT Bank SulutGo

Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi salah satu pemegang saham minoritas di perusahaan PT Bank SulutGo, berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank SulutGo nomor 02 tanggal 9 April 2025, maka komposisi persentase kepemilikan akhir saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 adalah 1,67% atau sebesar Rp23.441.100.000,00 atau 234.411 lembar saham yang merupakan nilai investasi permanen akhir.

2) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)

Investasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan dalam rangka penguatan pelayanan air minum dan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberian investasi dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016. Jumlah Investasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp26.304.347.752,00 sehingga persentase kepemilikan sahamnya adalah sebesar 64,17%. Perhitungan investasi pada PDAM menggunakan metode ekuitas dimana berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 mencatat nilai modal Pemerintah Daerah sebesar Rp61.131.176.277,00 ditambah dana cadangan sebesar Rp283.409.586,00 dan saldo laba (rugi) sebesar (Rp35.110.238.111,00) sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp24.145.442.868,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.158.904.884,00 atau naik 8,94% kenaikan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

investasi pada PDAM tersebut disebabkan karena adanya perubahan status penyertaan modal yang sebelumnya tidak terdapat penetapan dikarenakan belum diserahkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp2.011.555.650,00 dan di Tahun 2024 telah ditetapkan sehingga menambah nilai penyertaan modal pemerintah kepada PDAM karena telah memiliki berita acara penyerahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan diserahkan ke PDAM.

Terdapat penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM berupa pembiayaan untuk proyek-proyek PDAM yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan atau pinjaman yang harus dikembalikan sehingga penyertaan modal tersebut diabaikan dalam perhitungan kepemilikan penyertaan modal ke PDAM. Dengan demikian laba/rugi perusahaan berhubungan langsung dengan pengurangan investasi Pemerintah Daerah tanpa pembagian presentasi kepemilikan modal. Rincian penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan dapat dilihat pada **Lampiran 15.2**

Hal – Hal yang perlu diungkapkan :

- a. Perhitungan Investasi berdasarkan Laporan Keuangan PDAM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib & Yunus berdasarkan Surat Laporan nomor 00020/2.1059/AU.2/04/0596-2/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025
- b. Laporan keuangan *Audited* yang disampaikan oleh PDAM mencantumkan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp61.131.176.277,00, penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp34.138.500.100,00, cadangan sebesar Rp283.409.586,00 dan saldo kerugian sebesar minus Rp35.110.238.11100 sehingga ekuitas akhir laporan keuangan Audited PDAM menjadi Rp60.442.847.852,00. Perhitungan nilai investasi dapat dilihat pada **Lampiran 15.1** dalam Laporan Keuangan ini.

3) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Gadasera

Perusahaan Daerah Gadasera dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera.

Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah (PD) sebesar Rp1.827.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada PD Gadasera yang telah direklasifikasikan pada aset lainnya pada Tahun 2010 karena jumlah investasi tersebut belum dapat ditelusuri jenisnya, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (5) huruf c, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar propemperda karena alasan mengatasi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah akan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tahun sebelumnya maka Pemerintah Daerah telah membentuk tim Investasi pada PD. Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow dan didapati bahwa sejak Tahun 2002 PD. Gadasera tidak beroperasi dengan stabil yang ujungnya pada Tahun 2014 maka PD. Gadasera sudah tidak beroperasi lagi sehingga tidak ada lagi kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bolaang Mongondow sementara itu berdasarkan hasil investigasi penguasaan aset berdasarkan konfirmasi kepada eks pegawai PD. Gadasera didapati terdapat 4 (empat) lahan HGU yang telah berakhir izinnnya sejak tahun 2012 sementara HGU lainnya telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah telah mengajukan permohonan pembahasan kepada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk pembubaran perusahaan Perusahaan Daerah Gadasera, melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:900/Setdakab/02/163/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019. Terkait tindaklanjut dari surat yang telah disampaikan, Pemerintah Daerah namun hingga saat ini belum ada pembahasan tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.592.571.441.234,96 dan Rp1.573.378.034.403,28 atau mengalami kenaikan 1,22%, yang merupakan nilai netto aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar minus Rp470.049.709.531,55 dan sebesar minus Rp414.104.420.237,65. Aset tetap per 31 Desember 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.130
Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1.	Tanah	76.728.751.561,75	71.683.940.561,75	7,04
2.	Peralatan dan Mesin	367.101.253.068,56	359.376.040.745,56	2,15
3.	Gedung dan Bangunan	587.292.166.090,89	527.746.785.632,37	11,28
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.006.171.104.729,78	1.012.680.382.914,52	(0,64)
5.	Aset tetap lainnya	6.455.204.169,00	3.666.859.669,00	76,04



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	18.872.671.146,53	12.328.445.117,73	53,08
7.	Akumulasi Penyusutan	(470.049.709.531,55)	(414.104.420.237,65)	13,51
	JUMLAH	1.592.571.441.234,96	1.573.378.034.403,28	1,22

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Selama Tahun 2024, dalam penyelesaian tindak lanjut sisa hasil temuan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023 dan pengungkapan barang milik daerah sesuai rekomendasi LHP BPK RI Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekonsiliasi tindak lanjut temuan bersama Inspektorat Daerah, dengan hasil:
 - a. Untuk tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 sudah dilakukan tindak lanjut untuk:
 - Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp309.319.010,00 terindikasi tercatat pada Buku Inventaris SKPD tidak tepat jumlah. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen SK Penghapusan atas kendaraan dinas yang dimaksud.
 - Tanah sebanyak 14 Bidang tidak tercatat di LBMD dan 7 Bidang tercatat tidak dengan nilai dan luas sebenarnya. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan atas 12 bidang tanah yang belum dicatat berdasarkan dokumen SKT dan Sertifikat. Sementara ada 2 bidang tanah yang tidak dilakukan pencatatan karena sudah bukan milik Pemda Bolaang Mongondow, yaitu Tanah Polsek Dumoga Barat (kewenangan Polres Bolaang Mongondow) dan Tanah Pertanian (Ladang) di Desa Bungko, yang sudah diserahkan ke Kota Kotamobagu.
 - Aset Tetap senilai Rp406.010.136,00 yang berasal dari Hibah PT Bank Sulut belum tercatat sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan atas 2 unit kendaraan dinas jenis Ambulance pada Puskesmas Buntalo dan Puskesmas Imandi.
 - Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Senilai Rp1.017.536.343,00 terbengkalai yaitu tidak dilakukan Pengamanan serta pemeliharaan dan diantaranya berpotensi merugikan keuangan daerah. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengamanan aset.
 - Tanah senilai Rp1.405.729.930,00 tidak diketahui keberadaannya dan tanah beserta bangunan diatasnya serta peralatan kesehatan seluruhnya senilai Rp1.733.033.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dikuasai Pihak Lain. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan inventarisasi atas tanah yang tidak diketahui pada Dinas Pariwisata, yakni atas tanah Wisata Air Panas, di Desa Bakan Kec. Lolayan, dan sudah melakukan penghapusan atas aset Tanah yang tidak diketahui karena double pencatatan. Untuk tanah dan bangunan yang diduga dikuasai pihak lain, sudah dilakukan tindak lanjut dan melampirkan Surat Keterangan bahwa tanah Puskesmas Bilalang (lama) sudah tidak ada persoalan dengan pihak lain.

- Penggunaan kendaraan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen berupa SK Penghapusan atas kendaraan yang dimaksud.
 - Empat unit kendaraan roda empat dikuasai oleh Pihak Ketiga dan dua unit kendaraan roda empat dikuasai oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa melalui prosedur yang benar. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan SK Penghapusan atas 6 unit kendaraan dinas dimaksud.
 - Penertiban kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dilaksanakan melalui perencanaan yang baik dan benar sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan SK Penghapusan atas 5 unit kendaraan dinas dimaksud.
 - Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa alat berat dengan harga wajar minimal senilai Rp310.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terindikasi hilang. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penjelasan atas pencatatan aset berupa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Bukti kepemilikan berupa sertifikat atas 41 bidang tanah Tidak Diketahui Keberadaannya dan Pemanfaatan Satu Bidang Tanah Tidak Sesuai Ketentuan. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen sertifikat yang sudah dikuasai oleh Bidang Pengelolaan Barang Daerah.
- b. Untuk tindak lanjut temuan pada Laporan Keuangan Tahun 2019, atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Belum Tertib, sudah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen:
- Penetapan Status Pengguna Barang;
 - Hasil Inventarisasi Aset Tetap Induk Dan Aset Tetap Pemeliharaan;
 - POS Pengamanan meliputi Penyimpanan, Penyaluran, dan Penerimaan Aset Tetap;
 - Hasil Evaluasi Usulan Penghapusan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Laporan Inventarisasi Aset Tetap dan BA Rekonsiliasi Aset Tetap.
- c. Untuk tindak lanjut temuan pada Laporan Keuangan Tahun 2011, atas Penatausahaan, Pencatatan, Penyajian dan Pengamanan Aset Tetap Tidak Memadai, sudah dilakukan tindak lanjut atas:
 - Kendaraan dinas ex. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dengan memberikan penjelasan atas kondisi aset tersebut; dan
 - Kendaraan dinas gagal lelang tahun 2011, sudah dilakukan penjelasan atas kondisi aset tersebut.

Selama Tahun 2024 aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami mutasi akibat adanya penambahan dan pengurangan dan penyusutan Aset Tetap yang dapat dilihat pada **Lampiran 16** Laporan Keuangan ini. Mutasi tersebut dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.131
Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	71.683.940.561,75	5.210.428.000,00	165.617.000,00	76.728.751.561,75
Peralatan dan Mesin	359.376.040.745,56	20.858.416.068,00	13.133.203.745,00	367.101.253.068,56
Gedung dan Bangunan	527.746.785.632,37	63.157.847.612,49	3.612.467.153,97	587.292.166.090,89
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.012.680.382.914,52	39.258.210.943,66	45.767.489.128,40	1.006.171.104.729,78
Aset Tetap Lainnya	3.666.859.669,00	3.178.695.500,00	390.351.000,00	6.455.204.169,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.328.445.117,73	10.907.149.786,15	4.362.923.757,35	18.872.671.146,53
Akumulasi Penyusutan	(414.104.420.237,65)	(81.330.883.373,23)	(25.385.594.079,33)	(470.049.709.531,55)
Jumlah Aset Tetap	1.573.378.034.403,28	61.239.864.537,07	42.046.457.705,39	1.592.571.441.234,96

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan masing-masing aset tetap sebagai berikut :

5.3.1.3.1 Tanah

Tabel 5.132
Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Tanah	76.728.751.561,75	71.683.940.561,75	7,04

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.728.751.561,75



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.044.811.000,00 atau naik 7,04% jika dibandingkan dengan nilai tanah Tahun 2023 sebesar Rp71.683.940.561,75. Perubahan nilai aset tanah berasal dari mutasi tambah sebesar Rp5.210.428.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp165.617.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.133
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	71.683.940.561,75
II	MUTASI TAMBAH	
1	Belanja Modal Tahun 2024	0,00
2	Pencatatan aset tetap tanah yang belum dibukukan	4.563.000,00
3	Mutasi Antar OPD	101.492.000,00
4	Koreksi kesalahan perhitungan	5.104.373.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	5.210.428.000,00
III	MUTASI KURANG	
1	Mutasi antar OPD	101.492.000,00
2	Dihibahkan	64.125.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	165.617.000,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	76.728.751.561,75

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Dari mutasi masuk keluar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Pencatatan aset tetap tanah yang belum dibukukan sebesar Rp4.563.000,00 pada Dinas Kesehatan atas tanah Polindes Bilalang 3 Utara yang telah memiliki dokumen sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan nomor sertifikat 00002 tanggal 19 Desember 2019.
- Mutasi masuk antar OPD selama Tahun 2024 sebesar Rp101.492.000,00, merupakan pemindahbukuan pencatatan aset tetap tanah antar OPD yang secara keseluruhan tidak mempengaruhi nilai aset tetap yakni mutasi masuk ke Pengelola Barang sebesar Rp101.492.000,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 atas tanah SDN Bumbungon yang *double* pencatatan, dari Dinas Kesehatan sebesar Rp84.492.000,00 atas tanah Puskesmas Bumbung sebesar Rp25.000.000,00, tanah Polindes Padang sebesar Rp882.000,00, tanah Puskesmas Pusian sebesar Rp38.250.000,00, tanah Polindes Kosio Barat Rp5.000.000,00 dan tanah Polindes Doloduo 2 sebesar Rp15.360.000,00 tanah-tanah tersebut dipindahkan ke Pengelola BMD karena tanah tersebut milik desa dan dari Dinas Perhubungan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp15.000.000,00 atas tanah pelataran Terminal Lolak yang sudah tercatat bersama-sama dengan tanah Pasar Lolak pada Dinas Perdagangan.

- Koreksi nilai pencatatan saldo awal aset tetap tanah sebesar Rp5.104.373.000,00 berasal dari koreksi nilai aset tetap tanah Asrama Mahasiswa Bogani di Kota Yogyakarta pada Sekretariat Daerah sesuai buku penilaian KPKNL Yogyakarta.

Mutasi Keluar :

- Mutasi keluar antar OPD sebesar Rp101.492.000,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 atas tanah SDN Bumbung yang *double* pencatatan, dari Dinas Kesehatan sebesar Rp84.492.000,00 atas tanah Puskesmas Bumbung sebesar Rp25.000.000,00, tanah Polindes Padang sebesar Rp882.000,00, tanah Puskesmas Pusian sebesar Rp38.250.000,00, tanah Polindes Kosio Barat Rp5.000.000,00 dan tanah Polindes Doloduo 2 sebesar Rp15.360.000,00 dan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp15.000.000,00 atas tanah pelataran Terminal Lolak yang semuanya pencatatannya dimutasikan ke Pengelola BMD.
- Hibah keluar aset tetap tanah sebesar Rp64.125.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas tanah jalan Mesjid Desa Poyuyan yang dihibahkan ke Desa Poyuyan sebesar Rp11.500.000,00, jalan AKD – Nonapan 1 yang dihibahkan ke Desa Nonapan 1 sebesar Rp50.735.000,00 dan pada Dinas Perdagangan dan ESDM atas jalan Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang dihibahkan ke Kantor Kejaksaan sebesar Rp1.890.000,00.

Hal yang perlu diungkapkan:

- Per 31 Desember 2024, total sertifikat Pemda Bolaang Mongondow yang terbit adalah sebanyak 326 sertifikat, dari total tanah milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 86 bidang tanah (81 Bidang per 31 Desember 2023 dan ketambahan 5 bidang pada tahun 2024). Sehingga, total tanah yang belum bersertifikat per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 560 bidang tanah, terdiri dari 335 bidang tanah bawah jalan dan 225 bidang tanah atas jalan.
- Per 31 Desember 2024, masih terdapat permasalahan atas beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, antara lain:
 1. Tanah eks. HGU PT. Mongondow Indah (lokasi perkantoran Pemda Bolaang Mongondow), dimana dari luas sebesar 99 hektar yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, ternyata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak lagi sebesar 99 hektar. Bidang Pengelolaan Barang Daerah telah melakukan upaya untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

menerbitkan sertifikat melalui BPN atas bidang tanah perkantoran yang ada di Desa Lalow, Desa Padang dan Desa Lolak 2, Kecamatan Lolak. Namun, hingga tahun 2024, belum semua bisa diterbitkan sertifikat, sebagian masih berupa dokumen SKT.

2. Tanah eks. HGUPD. Gadasera di Desa Ambang, Desa Dulangon, Desa Lalow dan Desa Langagon. Tahun 2024, telah dibentuk tim oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow yang melibatkan unsur BPN, Pemda Bolaang Mongondow dan Aparat Desa, untuk melakukan inventarisasi atas 4 bidang tanah eks. HGU Gadasera. Hasil inventarisasi sudah disampaikan ke Bupati Bolaang Mongondow, dan akan segera dilakukan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan Tanah eks. HGU Gadasera.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tabel 5.134
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Peralatan dan Mesin	367.101.253.068,56	359.376.040.745,56	2,15

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp367.101.253.068,56 mengalami kenaikan sebesar Rp7.725.212.323,00 atau naik 2,15% jika dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp359.376.040.745,56. Perubahan nilai aset tetap peralatan dan mesin berasal dari mutasi tambah sebesar Rp20.858.416.068,00 dan mutasi kurang sebesar Rp13.133.203.745,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.135
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	359.376.040.745,56
II	MUTASI TAMBAH	
1	Belanja Modal Tahun 2024	15.409.856.633,00
2	Dari Aset Yang Belum Dicatat	92.900.000,00
3	Mutasi aset tetap Antar OPD	1.156.800.900,00
4	Mutasi aset tetap Antar OPD dari aset lain-lain	639.057.171,00
5	Hibah	2.260.276.500,00
6	Reklas dari aset tetap lain	1.294.424.864,00
7	Reklas dari Barang dan Jasa	5.100.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	20.858.416.068,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
III	MUTASI KURANG	
1	Mutasi keluar antar OPD	1.156.800.900,00
2	Reklas ke aset lain – lain	9.270.768.635,00
3	Penghapusan	2.205.633.938,00
4	Dihibahkan	214.400.000,00
5	Diserahkan Ke Masyarakat	24.530.000,00
6	Barang Ekstrakom	261.070.272,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	13.133.203.745,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	367.101.253.068,56

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Mutasi masuk atas belanja modal Tahun 2024 sebesar Rp15.409.856.633,00 yakni pada OPD:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp5.564.527.000,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp4.168.604.543,00;
 - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp2.250.264.000,00;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp197.969.000,00;
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp22.000.000,00;
 - Dinas Satpol PP sebesar Rp32.450.000,000;
 - Dinas Sosial sebesar Rp76.060.000,00;
 - Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp21.050.000,00;
 - Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp15.185.000,00;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp130.600.000,00;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp197.480.000,00;
 - Dinas Kominfo sebesar Rp206.810.000,00;
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp9.000.000,00;
 - Dinas Pertanian sebesar Rp125.725.000,00;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp510.185.000,00;
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp606.697.090,00;
 - Kecamatan Lolak sebesar Rp51.500.000,00;
 - Kecamatan Passi Barat sebesar Rp133.900.000,00;
 - Kecamatan Dumoga sebesar Rp23.400.000,00;
 - Inspektorat Daerah sebesar Rp906.400.000,00;
 - BAPPEDA sebesar Rp76.750.000,00;
 - Badan Keuangan Daerah sebesar Rp64.300.000,00; dan
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp19.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dari total belanja modal Tahun 2024 sebesar Rp15.409.856.633,00, pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dari belanja modal adalah sebesar Rp15.148.786.361,00. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi keluar sebesar Rp261.070.272,00 yakni mutasi keluar atas belanja modal yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap.

- Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum tercatat Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp92.900.000,00 yaitu aset tetap berupa *cromebook* pada SDN 1 Imandi tahun 2021 sesuai dokumen berita acara serah terima barang nomor 4092/BAST/AMX/2021, yang dokumennya baru diserahkan saat pelaksanaan rekonsiliasi aset triwulan I tahun 2024 antara sekolah dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah.
- Mutasi masuk antar OPD selama Tahun 2024 sebesar Rp1.156.800.900,00 merupakan pemindahbukuan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin antar OPD yang secara keseluruhan tidak mempengaruhi nilai aset tetap yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Mutasi masuk ke Pengelola BMD sebesar Rp1.156.800.900,00 dari:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp34.589.800 atas 2 (dua) buah sepeda motor Jupiter masing-masing dengan nomor polisi DB 2118 D sebesar Rp17.139.800,00 dan DB 2292 D sebesar Rp17.450.000,00;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp12.900.000,00 atas 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi DB 5369 D;
 - ✓ Badan Kesbangpol sebesar Rp39.550.000,00 atas 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha MX King dengan nomor polisi DB 2240 D sebesar Rp22.450.000,00 dan DB 2239 D sebesar Rp17.100.000,00;
 - ✓ Dinas PP dan PA sebesar Rp16.830.000,00 atas 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul dengan nomor polisi DB 5667 D;
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp587.500.000,00 atas 1 (satu) buah mobil Toyota Camry dengan nomor polisi DB 6 D ex DB 1181 D;
 - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp413.206.100,00 atas 1 (satu) buah mobil Toyota Hilux dengan nomor polisi DB 8139 D; dan
 - ✓ Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp52.225.000,00 atas 3 (tiga) buah kendaraan sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi masing-masing Mio Soul DB 2038 D sebesar Rp15.225.000,00, Yamaha Xeon DB 2040 D sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp17.600.000,00 dan Yamaha All New DB 2450 D sebesar Rp19.400.000,00.

- Mutasi aset tetap antar OPD dari aset lain-lain sebesar Rp639.057.171,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari aset lain-lain Pengelola BMD atas 1 (satu) buah mobil minibus DB 7043 DM, yang sebelumnya merupakan kendaraan dinas tercatat pada Dinas PP dan KB yang sudah tidak digunakan lagi dan dimutasikan ke Pengelola Barang tahun 2023, selanjutnya atas permohonan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimutasikan dari Pengelola Barang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan digunakan sebagai kendaraan operasional lapangan dalam rangka pelayanan KTP kepada masyarakat Bolaang Mongondow.
- Hibah masuk Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.260.276.500,00 yakni pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp17.990.000,00 yang berasal dari Belanja Hibah BOP Paud pada sekolah TK Negeri yang merupakan kesalahan penganggaran, yang seharusnya merupakan belanja modal tahun 2024 tapi dianggarkan lewat belanja hibah; dan
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.242.286.500,00 yang berasal dari Hibah CSR PT. Bank SulutGo Tahun 2024 sesuai dokumen Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan CRS nomor 020a/BA-LLK/IV/2024, tanggal 4 April 2024 sebesar Rp44.450.000,00 dan Hibah Barang Milik Negara dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR berupa alat berat *escavator* berdasarkan BAST BMN NO. 842..1/BA/DC/2023 dan No. 800/D.23/DLH/66/X/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp2.197.836.500,00.
- Reklas aset tetap lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.294.424.864,00 yakni pada OPD:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp1.148.096.114,00 yaitu reklas dari aset tetap gedung dan bangunan atas belanja modal tahun 2024 yang didalamnya terdapat *mebeleur*, yakni pada SDN 2 Kosinggolan atas pembangunan RKB, SDN 2 Kosio atas pembangunan laboratorium komputer, SDN 2 Kosio atas pembangunan perpustakaan, SDN 1 Bolaang atas pembangunan laboratorium komputer, SDN 1 Bolaang atas pembangunan perpustakaan, SDN 2 Uuwan atas pembangunan perpustakaan, SDN 2 Uuwan atas pembangunan laboratorium komputer, SDN 1 Mongkoinit atas pembangunan laboratorium komputer, SDN 1 Mongkoinit atas pembangunan RKB, SDN 5 Mopuya atas pembangunan laboratorium komputer, SDN 1 Tonom atas



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pembangunan laboratorium komputer, SDN Bantik atas pembangunan perpustakaan, SDN Bantik atas pembangunan laboratorium komputer, SDN 3 Reset Mopuya atas pembangunan RKB, SDN Bangomolunow atas pembangunan ruang guru, SDN Tonom atas pembangunan RKB, SDN 2 Komangaan atas pembangunan RKB, SDN 1 Pangi atas pembangunan RKB, SDN Amerta Sari atas pembangunan RKB, SDN 2 Ibolian atas pembangunan RKB, SDN Mondatong atas pembangunan RKB, SDN 1 Bolangat atas pembangunan RKB, SMPN 13 Dumoga atas pembangunan laboratorium komputer, SMPN 14 Dumoga atas pembangunan laboratorium komputer, SMPN 5 Passi atas pembangunan RKB, SMPN 4 Lolayan atas pembangunan RKB, SMPN 5 Lolak atas pembangunan RKB;

- ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp72.428.750,00 yaitu reklas dari aset tetap gedung dan bangunan atas belanja modal tahun 2024 yang merupakan meja *reseptionis* beserta *backdrop* yang bisa dipindahkan dan tidak melekat secara permanen pada gedung bangunan; dan
- ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp73.900.000,00 yaitu reklas dari aset tetap lainnya atas belanja modal tahun 2024 yang didalamnya terdapat pengadaan *sound system*, yang merupakan kesalahan dalam penganggaran, seharusnya belanja modal peralatan dan mesin, tetapi dibelanjakan melalui belanja modal aset tetap lainnya.
- Mutasi masuk dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 yang merupakan Aset Tetap sebesar Rp5.100.000,00 pada Dinas Pendidikan atas barang jasa BOS pada SDN 1 Langagon berupa 3 (tiga) buah meja guru kelas masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 dan 1 (satu) buah lemari file sebesar Rp1.500.000,00 yang merupakan kesalahan penganggaran pada Arkas, dimana seharusnya belanja modal tapi dibelanjakan melalui barang jasa.

Mutasi Keluar :

- Mutasi keluar antar OPD selama Tahun 2024 sebesar Rp1.156.800.900,00 merupakan pemindahbukan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin antar OPD yang secara keseluruhan tidak mempengaruhi nilai aset tetap yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Mutasi keluar dan dicatat ke Pengelola BMD sebesar Rp1.156.800.900,00 dari :
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp34.589.800 atas 2 (dua) buah sepeda motor Jupiter masing-masing dengan nomor polisi



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- DB 2118 D sebesar Rp17.139.800,00 dan DB 2292 D sebesar Rp17.450.000,00;
- ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp12.900.000,00 atas 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi DB 5369 D;
 - ✓ Badan Kesbangpol sebesar Rp39.550.000,00 atas 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha MX King dengan nomor polisi DB 2240 D sebesar Rp22.450.000,00 dan DB 2239 D sebesar Rp17.100.000,00;
 - ✓ Dinas PP dan PA sebesar Rp16.830.000,00 atas 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul dengan nomor polisi DB 5667 D;
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp587.500.000,00 atas 1 (satu) buah mobil Toyota Camry dengan nomor polisi DB 6 D ex DB 1181 D;
 - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp413.206.100,00 atas 1 (satu) buah mobil Toyota Hilux dengan nomor polisi DB 8139 D;
 - ✓ Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp52.225.000,00 atas 3 (tiga) buah kendaraan sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi masing-masing Mio Soul DB 2038 D sebesar Rp15.225.000,00, Yamaha Xeon DB 2040 D sebesar Rp17.600.000,00 dan Yamaha All New DB 2450 D sebesar Rp19.400.000,00.
- Mutasi keluar dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain sebesar Rp9.270.768.635,00 karena:
- Kondisi rusak berat sebesar Rp8.513.887.945,00 yakni pada OPD:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp1.225.414.694,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp2.112.477.822,00;
 - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp1.644.435.500,00;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp131.976.327,00
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp69.063.500,00;
 - Badan Kesbangpol sebesar Rp103.804.000,00;
 - Dinas Sosial sebesar Rp63.683.100,00;
 - BPBD sebesar Rp70.837.408,00;
 - Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp60.564.000,00
 - Dinas PP dan PA sebesar Rp14.499.800,00;
 - Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp47.561.800,00;
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.406.241,00;
 - Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp23.724.250,00;
 - Dinas PP dan KB sebesar Rp177.394.031,00;
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp108.755.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Dinas Kominfo sebesar Rp119.361.500,00;
 - Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp35.535.275,00;
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp26.551.336,00;
 - Dinas Perpustakaan sebesar Rp8.600.000,00;
 - Dinas Perikanan sebesar Rp108.885.025,00;
 - Dinas Pertanian sebesar Rp70.950.500,00;
 - Dinas Perkebunan sebesar Rp29.684.375,00;
 - Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp90.537.000,00;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp305.624.567,00;
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp1.007.971.300,00;
 - Kecamatan Bilalang sebesar Rp8.300.000,00;
 - Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp12.254.583,00;
 - Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp13.000.000,00;
 - Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp14.685.496,00;
 - Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp26.911.520,00;
 - Kecamatan Lolak sebesar Rp21.078.420,00;
 - Kecamatan Poigar sebesar Rp20.557.900,00;
 - Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp18.930.200,00;
 - Kecamatan Lolayan sebesar Rp17.560.100,00;
 - Kecamatan Passi Timur sebesar Rp5.230.000,00;
 - Kecamatan Passi Barat sebesar Rp116.193.000,00;
 - Kecamatan Bolaang sebesar Rp28.845.000,00;
 - Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp12.407.511,00;
 - Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp7.313.900,00;
 - Inspektorat Daerah sebesar Rp159.425.590,00;
 - BAPPEDA sebesar Rp152.651.874,00;
 - Badan Keuangan Daerah sebesar Rp59.405.500,00; dan
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp91.838.400,00.
- Kondisi tidak ditemukan sebesar Rp564.611.894,00 pada:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp32.749.000,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp515.401.894,00;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp10.400.000,00; dan
 - Dinas Kominfo sebesar Rp6.061.000,00.
 - Kondisi Lainnya sebesar Rp191.587.796,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp174.487.796,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp17.100.000,00.
 - Bersifat Barang Habis Pakai sebesar Rp681.000,00 pada Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Mutasi keluar karena penghapusan BMD atas aset tetap yang nilai bukunya sudah Rp0,00 dan dilakukan melalui proses lelang limbah padat/scrub sebesar Rp2.205.633.938,00, yakni pada OPD:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp66.153.000,00, atas aset tetap yang di TGR kan dan sudah lunas dibayarkan dan dihapuskan berdasarkan SK penghapusan No. 444 tahun 2024 tanggal 1 November 2024 walaupun tidak melalui SKTJM karena ditemukan saat pelaksanaan rekonsiliasi aset pada Dinas Pendidikan, yakni pada SDN Babo, SDN 1 Mongkoinit, SDN 1 Tanoyan, SDN 2 Poopo, SDN 2 Werdhi Agung, SDN Mokintob, SDN 1 Reset Mopuya, SDN 3 Mopugad, SDN Tumokang Baru, SMPN 5 Passi;
 - Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp140.500.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat DB 4054 D berdasarkan SK Bupati No. 387 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024, dikarenakan kondisi kendaraan rusak berat dan tinggal body mobil tanpa mesin tapi tidak pernah diinformasikan kepada Pengelola Barang dengan alasan supaya bisa diklaim BBM dan service, dimana Kepala Dinas Ketahanan Pangan sampai tahun 2024 tidak memiliki kendaraan dinas operasional yang layak untuk digunakan;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp309.015.500,00 berupa kendaraan dinas roda empat DB 1190 D berdasarkan SK Bupati No. 387 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024, dimana kondisi kendaraan sudah rusak berat dan tinggal body mobil tanpa mesin tapi tidak pernah diinformasikan kepada Pengelola Barang.
 - Pengelola Barang sebesar Rp1.689.965.438,00, berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang sudah ada SK penghapusan tahun 2023 dengan Nomor 454 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 namun belum dikeluarkan dari pencatatan aset sebesar Rp376.294.000,00 dikarenakan kelalaian Bidang Pengelolaan Barang Daerah dalam melakukan penyesuaian pencatatan pada LKPD tahun anggaran 2023 dan penghapusan tahun 2024 berdasarkan SK Bupati Nomor 387 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024, dikarenakan kendaraan yang ada pada Pengelola Barang dalam kondisi rusak berat dan tinggal body mobil tanpa mesin.
- Aset tetap yang dihibahkan sebesar Rp214.400.000,00 pada Sekretariat Daerah atas barang yang dihibahkan ke POM TNI berupa 1 (satu) buah kendaraan dinas roda empat DB 1185 D berdasarkan SK Bupati No. 388 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Aset tetap yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp24.530.000,00 pada Dinas Perikanan berupa *coolbox* dan timbangan gantung yang diserahkan ke Koperasi Serba Usaha Mototanoban Desa Tadoy 1 Kecamatan Bolaang Timur berdasarkan BAST No. D.07/Perikanan/BAST/92/IV/2022 tanggal 7 April 2022; dan
- Beban Ekstrakomtabel sebesar Rp261.070.272,00 merupakan belanja modal Tahun 2024 yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp244.977.048,00 atas belanja modal BOS peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp26.045.000,00 dan belanja modal gedung yang didalamnya terdapat meubeleurnya yang direklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp218.932.048,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.093.224,00 atas belanja alat kesehatan berupa *Thermometer Digital* yang tersebar pada 18 puskesmas.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Tabel 5.136
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Gedung dan Bangunan	587.292.166.090,89	527.746.785.632,37	11,28

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp587.292.166.090,89 mengalami kenaikan sebesar Rp59.545.380.458,52 atau naik 11,28% jika dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan Tahun 2023 sebesar Rp527.746.785.632,37. Perubahan nilai aset tetap gedung dan bangunan berasal dari mutasi tambah sebesar Rp63.157.847.612,49 dan mutasi kurang sebesar Rp3.612.467.153,97 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.137
Mutasi Masuk Kelur Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	527.746.785.632,37
II	MUTASI TAMBAH	
1	Belanja Modal Tahun 2024	36.065.291.398,00
2	Pengakuan Utang	819.574.947,49
3	Hibah	23.237.731.696,00
4	Reklas dari Aset Tetap KDP	0,00
5	Reklas dari aset lain-lain	367.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
6	Reklas dari Beban Barang dan Jasa	188.803.571,00
7	Pencatatan Aset yang belum tercatat	2.479.146.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	63.157.847.612,49
III	MUTASI KURANG	
1	Reklas ke aset tetap lain	3.383.156.513,49
2	Reklas ke aset lain-lain	80.000.000,00
3	Reklas ke aset lain-lain kondisi lainnya	138.258.037,48
4	Ke Barang dan Jasa	11.052.603,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	3.612.467.153,97
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	587.292.166.090,89

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp36.065.291.398,00 pada:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp27.614.065.927,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp7.241.706.758,00;
 - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp579.239.563,00;
 - Dinas Satpol PP sebesar Rp74.684.130,00;
 - Dinas Pertanian sebesar Rp356.092.950,00; dan
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp199.502.070,00.
- Penambahan aset tetap yang berasal dari utang tahun 2024 sebesar Rp819.574.947,49 atas belanja modal yang pengadaannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan pada :
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp323.891.472,49 atas pengadaan jamban pada SMPN 1 Lolak sebesar Rp91.267.445,00, pengadaan jamban SMPN 2 Lolak sebesar Rp63.973.129,00, rehab ruang kelas SDN 2 Toruakat sebesar Rp62.520.216,95 dan pembangunan ruang kelas SMPN 4 Lolak sebesar Rp106.130.681,54; dan
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp495.683.475,00 atas pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah BSL-2.
- Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp23.237.731.696,00 pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp8.132.781.696,00 yaitu hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR Republik Indonesia berdasarkan dokumen hibah No. 527.4/BA/BC/2024 dan No. 024/B.01/BKD/887/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 berupa pembangunan ruang kelas belajar pada SDN 2 Tonom sebesar Rp3.990.363.393,00 dan SDN 2 Bolaang sebesar Rp4.142.418.303,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp15.104.950.000,00 yaitu hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR Republik Indonesia berdasarkan dokumen hibah No. 527.4/BA/BC/2024 dan No. 024/B.01/BKD/887/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 berupa Pembangunan TPA Kabupaten Bolaang Mongondow di Desa Inuai.
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap lain – lain sebesar Rp367.300.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa rumah dinas pemerintah yang berada di Kota Kotamobagu.
- Bertambah aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari beban barang dan jasa Tahun 2024 sebesar Rp188.803.571,00 pada Inspektorat Daerah atas belanja pemeliharaan gedung yang menambah nilai aset tetap.
- Pengakuan aset tetap gedung yang belum tercatat sebesar Rp2.479.146.000,00 pada Sekretariat Daerah yang dicatat berdasarkan penilaian dari KPKNL berupa:
 - Gedung asrama bogani putra di Makasar sebesar Rp474.087.000,00;
 - Pagar asrama bogani putra di Makasar sebesar Rp7.520.000,00;
 - Gedung asrama bogani putri di Makasar sebesar Rp378.337.000,00;
 - Pagar asrama bogani putri di Makasar sebesar Rp6.429.000,00;
 - Halaman asrama bogani putri di Makasar sebesar Rp1.802.000,00;
 - Gedung asrama bogani putri di Gorontalo sebesar Rp257.255.000,00;
 - Pagar asrama bogani putri di Gorontalo sebesar Rp4.651.000,00;
 - Gedung asrama bogani putra di Gorontalo sebesar Rp131.035.000,00;
 - Pagar asrama mahasiswa bogani putra di Gorontalo sebesar Rp149.388.000,00; dan
 - Gedung asrama mahasiswa bogani di Yogyakarta sebesar Rp1.068.642.000,00.

Mutasi Keluar :

- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Aset Tetap lain sebesar Rp3.383.156.513,49, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - ✓ Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.148.096.114,00 atas pengadaan *mebeleur*.
 - ✓ Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.175.689.098,49 atas pembangunan rehab ruangan kelas SDN 2 Toruakat sebesar Rp925.257.764,95 dan SMPN 4 Lolak sebesar Rp250.431.333,54;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP pada Dinas Satpol PP sebesar Rp74.684.130,00 atas jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kantor;
- ✓ Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP pada Dinas Pertanian sebesar Rp267.258.400,00 atas jasa konsultasi perencanaan pagar kawat duri keliling kantor UPTD Langagon, BPP Passi Barat, BPP Dumoga sebesar Rp22.166.700,00 dan Pembangunan gedung BPP Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp245.091.700,00;
- ✓ Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian sebesar Rp72.428.750,00 atas meja *reseptionis* beserta *backdrop* yang bisa dipindahkan dan tidak melekat secara permanen pada gedung bangunan; dan
- ✓ Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp645.000.021,00 atas pengadaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Puskesmas Komangaan.
- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lain-lain atas gedung yang rusak berat sebesar Rp80.000.000,00, pada Dinas Kesehatan berupa gedung pustu Mopugad Utara.
- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lain-lain atas gedung kondisi lainnya sebesar Rp138.258.037,48 merupakan koreksi yang dilakukan oleh adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada :
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp123.720.475,64 atas pekerjaan :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Nonapan 1 sebesar Rp3.520.905,77;
 2. Pembangunan Ruang Kelas baru SDN 2 Ibolian sebesar Rp12.077.473,39;
 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Passi sebesar Rp1.568.625,00;
 4. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Kosinggolan sebesar Rp7.803.716,79;
 5. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Komangaan sebesar Rp18.154.188,32;
 6. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Tonom sebesar Rp1.629.628,14;
 7. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Resert sebesar Rp2.604.188,23;
 8. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Pinogaluman sebesar Rp2.350.514,83;
 9. Pembangunan Ruang Kelas baru SDN Mondatong sebesar Rp3.035.724,15;
 10. Pembangunan Ruang Kelas baru SDN Amerta Sari sebesar Rp8.941.007,52;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

11. Pembangunan Ruang Kelas baru SMPN 5 Lolak sebesar Rp1.617.614,70;
 12. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 14 Dumoga sebesar Rp1.818.164,43;
 13. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 13 Dumoga sebesar Rp2.061.585,19;
 14. Pembangunan Ruang Kelas baru SMPN 4 Lolayan sebesar Rp696.222,00;
 15. Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 1 Tonom sebesar Rp9.603.252,63;
 16. Pembangunan Jamban SDN Amerta Sari sebesar Rp784.401,00;
 17. Pembangunan Jamban SDN Nonapan 1 sebesar Rp1.229.200,00;
 18. Pembangunan Jamban SDN 2 Pinogaluman sebesar Rp878.557,00;
 19. Pembangunan Jamban SDN 1 Solimandungan 1 sebesar Rp4.788.954,96;
 20. Pembangunan Jamban SDN 1 Solimandungan 2 sebesar Rp4.734.954,96;
 21. Pembangunan Jamban SDN Bangomolunow sebesar Rp6.501.084,07;
 22. Pembangunan Jamban SDN 1 Langagon sebesar Rp7.814.984,39;
 23. Pembangunan Jamban SMPN 3 Bolaang sebesar Rp5.777.206,19;
 24. Pembangunan Jamban SDN 1 Inobonto 2 sebesar Rp6.474.065,34;
 25. Pembangunan Jamban SDN 2 Tapadaka sebesar Rp1.498.039,50; dan
 26. Pembangunan Jamban SMPN 6 Lolak sebesar Rp5.756.217,14.
- ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp14.537.561,84 atas pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah BSL-2.
- Aset tetap yang merupakan barang dan jasa sebesar Rp11.052.603,00 merupakan kesalahan penganggaran belanja barang yang diserahkan pada Dinas Pendidikan atas jasa pengawasan pada sekolah swasta SD Bina Insan.
- Hal yang perlu diungkapkan :
- Per 31 Desember 2024, masih terdapat gedung bangunan yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni:
 - Dinas Pendidikan, terdapat 1.322 gedung sekolah yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Kecamatan Dumoga Timur, terdapat 1 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni Gedung Kantor Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur;
- Kecamatan Bolaang, terdapat 1 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung Kantor Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang;
- Kecamatan Sang Tombolang, terdapat 2 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung ex. Kantor BPP Pertanian dan ex. Kantor Balai KB yang terletak di Desa Maelang Kecamatan Sang Tombolang;
- Dinas Perdagangan dan ESDM, terdapat 2 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung rumah dinas yang terletak di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur dan gedung rumah dinas yang terletak di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat; dan
- Pengelola Barang, terdapat 2 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung ex. Kantor Gadasera yang terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat dan gedung ex. Kantor Gadasera yang terletak di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.138
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.006.177.104.729,78	1.012.680.382.914,52	(0,64)

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.006.177.104.729,78 mengalami penurunan sebesar Rp6.509.278.184,74 atau turun 0,64%, jika dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023 sebesar Rp1.012.680.382.914,52. Perubahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berasal dari mutasi tambah sebesar Rp39.258.210.944,00 dan mutasi kurang sebesar Rp45.767.489.128,74 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.139
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	1.012.680.382.914,52
II	MUTASI TAMBAH	
1	Belanja Modal Tahun 2024	29.905.538.055,00
2	Pengakuan Utang	259.860.303,66
3	Hibah	3.015.676.200,00
4	Reklas dari aset tetap lain	4.683.015.431,00
5	Dari barang dan jasa	1.394.120.954,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	39.258.210.943,66
III	MUTASI KURANG	
1	Hibah ke Desa	1.563.687.936,00
2	Reklas ke aset tetap lain	8.894.157.207,66
3	Reklas ke Aset lain-lain	34.609.014.228,74
4	Ke Barang Jasa	406.367.196,00
5	Utang yang sudah di catat tahun sebelumnya	294.262.560,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	45.767.489.128,40
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	1.006.171.104.729,78

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp29.905.538.055,00 pada :
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp8.439.809.625,00;
 - Dinas PU dan Tata Ruang sebesar Rp21.073.643.171,00;
 - Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp199.893.950,00; dan
 - Kecamatan Bolaang sebesar Rp192.191.309,00.
- Penambahan Aset Tetap JIJ yang berasal dari Pengakuan Utang sebesar Rp259.860.303,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu pengadaan jalan Wangga Baru – Uuwan Kec. Dumoga Barat.
- Hibah aset tetap JIJ sebesar Rp3.015.676.200,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp294.137.000,00 yang berasal dari CSR PT. Bank Sulutgo No. 06/BAST/CSR-BSG/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa lampu jalan untuk penerangan jalan umum dan pada Pengelola BMD sebesar Rp2.721.539.200,00 berupa instalasi air bersih yang dihibahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 527.4/BA/DC/2024 dan No. 024/B.01/BKD/887/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

- Reklasifikasi Aset Tetap JIJ dari aset tetap selain JIJ sebesar Rp4.683.015.431,00 yaitu :
 - Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp645.000.021,00 atas pengadaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Puskesmas Komangan; dan
 - Reklas dari Aset Tetap KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.038.015.410,00 atas pekerjaan jalan Wangga Baru – Uuwan dan perencanaan *long* segmen jalan Toraut Utara – Tumokang Baru yang telah selesai dilaksanakan tahun 2024.
- Mutasi masuk aset tetap JIJ yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.394.120.954,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas belanja pemeliharaan jalan dan irigasi yang menambah nilai aset tetap.

Mutasi keluar :

- Hibah keluar Aset tetap JIJ yang dihibahkan ke Desa sebesar Rp1.563.687.936,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas jalan Mesjid Desa Poyuyanan berdasarkan SK Hibah No. 049 Tahun 2023 dan Jalan AKD – Nonapan 1 Desa Nonapan 1 berdasarkan SK Hibah No. 088 Tahun 2023;
- Reklas dari Aset Tetap JIJ ke Aset Tetap KDP sebesar Rp8.894.157.207,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas :
 - ✓ Jasa perencanaan talud/bronjong pengaman jalan Bakan – Tanoyan sebesar Rp67.016.250,00;
 - ✓ Jasa perencanaan jembatan bakan sebesar Rp67.016.250,00;
 - ✓ Jasa perencanaan jembatan mengkang sebesar Rp79.836.750,00;
 - ✓ *Long* segmen peningkatan jalan Wangga Baru – Uuwan Kec. Dumoga Barat sebesar Rp4.615.060.924,00;
 - ✓ *Long* segmen pemeliharaan jalan Dumoga – Mopuya sebesar Rp18.852.906,00;
 - ✓ *Long* segmen peningkatan jalan Dumara – Ikuna sebesar Rp18.852.906,00;
 - ✓ *Long* segmen peningkatan jalan Mongkoinit perkebunan sebesar Rp18.852.906,00;
 - ✓ *Long* segmen peningkatan jalan Toraut Utara – Tumokang sebesar Rp18.852.906,00;
 - ✓ Jalan Wangga Baru – Uuwan sebesar Rp3.863.815.409,66; dan
 - ✓ Jasa Pengawasan Jalan Wangga Baru – Uuwan sebesar Rp126.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Reklas Aset Tetap JIJ ke Aset Lain-lain sebesar Rp34.609.014.228,74 atas :
 - Aset yang akan dihapuskan tapi menunggu SK Penghapusan sebesar Rp26.051.952.774,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas aset yang akan diserahkan di daerah lain dan juga ke instansi vertikal lainnya yaitu aset tetap yang akan diserahkan ke Balai Jalan Nasional sebesar Rp2.516.314.474,00, ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp21.399.700.000,00, ke Pemerintah Kota Kotamobagu sebesar Rp579.814.000,00, ke Mako Brimob sebesar Rp566.224.300,00 dan ke Armed sebesar Rp989.900.000,00; dan
 - Aset yang belum teridentifikasi fisik jalannya sebesar Rp8.452.953.740,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp97.729.558,09 atas :
 - ✓ Pekerjaan *Long* Segmen Peningkatan Jalan Toraut Utara – Tumokang Baru sebesar Rp60.843.744,13;
 - ✓ Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lalow – Lolak II sebesar Rp1.882.882,80;
 - ✓ Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan kompleks Kantor Bupati sebesar Rp2.854.053,96;
 - ✓ Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Otam – Otam Barat sebesar Rp7.863.222,88;
 - ✓ Pekerjaan Peningkatan Jalan Masjid Muntoi Timur sebesar Rp4.052.351,67;
 - ✓ Pekerjaan Peningkatan Jalan Dondomon – Mopuya Utara sebesar Rp15.901.344,39;
 - ✓ Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bolaang I – Tadoy sebesar Rp2.663.722,50;
 - ✓ Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Lolanan sebesar Rp618.737,42; dan
 - ✓ Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Bongkudu sebesar Rp1.049.498,34.
 - Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.378.156,65 atas pembangunan TPS limbah B3.
- Berkurang Aset Tetap JIJ ke barang jasa sebesar Rp406.367.196,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas belanja modal tahun 2024 yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap atau menambah nilai aset tetap yaitu jasa konsultasi survey kondisi jalan dan jembatan.
- Pembayaran utang tahun sebelumnya yang mengurangi nilai aset karena telah tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp294.262.560,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Ruang atas pembayaran utang pengadaan jembatan Ikhwan sebesar Rp164.292.345,00 dan jembatan Tapadaka sebesar Rp129.970.215,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.140
Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Aset Tetap Lainnya	6.455.204.169,00	3.666.859.669,00	76,04

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.455.204.169,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.788.344.500,00 atau naik 76,04%, jika dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya Tahun 2023 sebesar Rp3.666.859.669,00. Perubahan nilai aset tetap lainnya berasal dari mutasi tambah sebesar Rp3.178.695.500,00 dan mutasi kurang sebesar Rp390.351.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.141
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	3.666.859.669,00
II	MUTASI TAMBAH	
1	Belanja Modal Tahun 2024	2.738.332.000,00
2	Dari Barang dan Jasa 2024	440.363.500,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	3.178.695.500,00
III	MUTASI KURANG	
1	Reklas ke aset tetap lain	73.900.000,00
2	Reklas ke aset lain – lain	233.000,00
3	Diserahkan ke Swasta	316.218.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	390.351.000,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	6.455.204.169,00

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas aset tetap lainnya selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Mutasi Masuk :

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp2.738.332.000,00 pada :
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp2.664.432.000,00; dan
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp73.900.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Bertambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp440.363.500,00 pada Dinas Pendidikan atas belanja barang dan jasa BOS yang didalamnya terdapat pengadaan buku.

Mutasi keluar :

- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya atas belanja modal aset tetap lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.900.000,00 pada Sekretariat DPRD atas pengadaan *sound system*;
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain sebesar Rp233.000,00 pada Dinas Pendidikan atas barang yang tidak ditemukan di SMPN Satap Lolaigan; dan
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang diserahkan ke Sekolah Swasta sebesar Rp316.218.000,00 pada Dinas Pendidikan atas belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.142
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.872.671.146,53	12.328.445.117,73	53,08

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.872.671.146,53 mengalami kenaikan sebesar Rp6.544.226.028,80 atau naik 53,08% jika dibandingkan dengan nilai konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp12.328.445.117,73. Kenaikan nilai konstruksi dalam pengerjaan berasal dari mutasi tambah sebesar Rp10.907.149.786,49 dan mutasi kurang sebesar Rp4.362.923.757,35 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.143
Mutasi Masuk Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	12.328.445.117,73
II	MUTASI TAMBAH	
1	Reklas dari aset tetap lain	10.411.788.836,15
2	Pengakuan utang	495.360.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Jumlah
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	10.907.149.786,15
III	MUTASI KURANG	
1	Reklas ke Aset Tetap JIJ	4.038.015.410,00
2	Koreksi Nilai	1,00
3	Reklas ke Aset Lain-lain	324.908.346,35
	JUMLAH MUTASI KURANG	4.362.923.757,35
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	18.872.671.146,53

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas aset Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk:

- Mutasi masuk dari Aset Tetap lain sebesar Rp10.411.788.836,15 yaitu:
 - Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.175.689.099,00 atas rehabilitasi ruang kelas SDN 2 Toruakat sebesar Rp925.257.765,00 dan pembangunan ruang kelas baru SMPN 4 Lolak sebesar Rp250.431.334,00;
 - Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.684.130,00 pada Dinas Satpol PP atas jasa perencanaan pembangunan gedung kantor;
 - Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp267.258.400,00 pada Dinas Pertanian atas Jasa Perencanaan gedung dan pagar BPP Kec. Dumoga Tenggara sebesar Rp245.091.700,00 dan jasa perencanaan gedung UPTD Langagon sebesar Rp22.166.700,00; dan
 - Reklas dari Aset Tetap JIJ pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp8.894.157.207,66 atas :
 - ✓ Jasa Perencanaan talud/Bronjong Pengaman Jalan Bakan – Tanoyan sebesar Rp67.016.250,00;
 - ✓ Jasa Perencanaan Jembatan Bakan sebesar Rp67.016.250,00;
 - ✓ Jasa Perencanaan Jembatan Mengkang sebesar Rp79.836.750,00;
 - ✓ Long Segmen Peningkatan Jalan Wangga Baru – Uuwan Kec. Dumoga Barat sebesar 4.615.060.924,00;
 - ✓ Long Segmen Pemeliharaan Jalan Dumoga – Mopuya sebesar Rp18.852.906,00;
 - ✓ Long Segmen Peningkatan Jalan Dumara – Ikuna sebesar Rp18.852.906,00;
 - ✓ Long Segmen Peningkatan Jalan Mongkoinit perkebunan sebesar Rp18.852.906,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Long Segmen Peningkatan Jalan Toraut Utara – Tumokang sebesar Rp18.852.906,00;
 - ✓ Jalan Wangga Baru – Uuwan sebesar Rp3.863.815.409,66; dan
 - ✓ Jasa Pengawasan Jalan Wangga Baru – Uuwan sebesar Rp126.000.000,00.
- Pengakuan utang KDP atas paket pekerjaan jalan Wangga - Uuwaan yang telah putus kontrak pada tahun 2023 sebesar Rp495.360.950,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi Keluar:

- Reklas Aset Tetap KDP ke Aset Tetap JIJ sebesar Rp4.038.015.410,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pengadaan jalan Wangga Baru – Uuwan sebesar Rp3.863.815.410,00, Peningkatan jalan Toraut Utara – Tumokang Baru sebesar Rp48.200.000,00 dan jasa konsultasi pengawasan jalan Wangga Baru – Uuwan sebesar Rp126.000.000,00.
- Koreksi nilai sebesar Rp1,00 pada Dinas Pendidikan atas kurang catat nilai aset tetap pembangunan ruang kelas SDN 2 Toruakat sebesar Rp0,75 dan ruang kelas SMPN 4 Lolak sebesar Rp0,25.
- Reklas ke aset lain-lain atas aset tetap KDP Jasa perencanaan yang perencanaannya sudah lama dilaksanakan namun pembangunannya belum dilaksanakan sebesar Rp324.908.346,35 pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp12.323.300,00;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp38.960.416,35;
 - ✓ RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp74.290.500,00;
 - ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp50.675.130,00;
 - ✓ BPBD sebesar Rp49.604.000,00;
 - ✓ Dinaas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp49.280.000,00; dan
 - ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp49.775.000,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai SAP Nomor 8 dapat dilihat pada **Lampiran 17** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan

Tabel 5.144
Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	217.949.362.992,55	188.312.989.907,65	15,74
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	98.717.120.300,00	82.395.690.509,00	19,81
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan	153.383.226.239,00	143.395.739.821,00	6,96



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
	JUMLAH	470.049.709.531,55	414.104.420.237,65	13,51

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi penyusutan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp470.049.709.531,55. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 masing-masing rincian objek aset sebagai berikut:

Tabel 5.145
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	31 DESEMBER 2024
1	Peralatan dan Mesin	188.312.989.907,65	40.271.196.400,23	10.634.823.315,33	217.949.362.992,55
2	Gedung dan Bangunan	82.395.690.509,00	16.345.765.905,00	24.336.114,00	98.717.120.300,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.395.739.821,00	24.512.240.019,00	14.524.753.601,00	153.383.226.239,00
	JUMLAH	414.104.420.237,65	81.129.202.324,23	25.183.913.030,33	470.049.709.531,55

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas akumulasi penyusutan aset tetap selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Bertambah :

Bertambah akumulasi penyusutan sebesar Rp81.129.202.324,23 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp40.271.196.400,23 berasal dari beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024;
- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp16.345.765.905,00 berasal dari beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024; dan
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan bertambah sebesar Rp24.512.240.019,00 yang berasal dari beban penyusutan aset tetap jalan tahun 2024.

Berkurang :

Berkurang akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp25.183.913.030,33 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp10.634.823.315,33 disebabkan oleh adanya penghapusan aset



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

tetap tahun berjalan yang menyebabkan berkurangnya penyusutan sebesar Rp2.415.939.127,00, adanya perubahan status / kondisi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp7.515.250.933,33 dan adanya aset yang dihibahkan dan diserahkan ke pihak lain sebesar Rp703.633.255,00;

- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp24.336.114,00 yang disebabkan adanya perubahan status/kondisi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp18.166.667,00 dan adanya koreksi pencatatan antar aset tetap sebesar Rp6.169.447,00; dan
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berkurang sebesar Rp14.524.753.601,00 yang disebabkan adanya perubahan status / kondisi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp6.315.583.242,00 dan aset tetap yang dihapuskan sebesar Rp8.209.170.359,00.

Untuk rekapitulasi Aset Tetap per OPD dan Unit Kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2024 milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.146
Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Tagihan Jangka Panjang	746.252.521,00	617.152.521,00	20,92
2	Aset Tidak berwujud	483.543.000,00	408.036.500,00	18,50
3	Aset Lain – Lain	171.954.966.511,25	201.842.334.219,26	(14,81)
4	Dana <i>TranferTreasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.275.531.000,00	10.900.154.000,00	(69,95)
JUMLAH		176.460.293.032,25	213.767.677.240,26	(17,45)

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Rincian aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.147
Mutasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Akun	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
1	Tagihan Jangka Panjang	617.152.521,00	129.100.000,00	0,00	746.252.521,00
2	Aset Tidak berwujud	2.253.757.304,00	254.885.000,00	1.769.669.804,00	738.972.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Akun	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.845.720.804,00)	(179.378.500,00)	(1.769.669.804,00)	(255.429.500,00)
4	Aset Lain – Lain	223.067.188.616,38	46.441.577.051,57	75.038.362.719,25	194.470.402.948,70
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(21.224.854.397,12)	(13.444.344.822,00)	(12.153.762.781,67)	(22.515.436.437,45)
6	Dana <i>Tranfer</i> <i>Treasury Deposit</i> <i>Facility</i> (TDF)	10.900.154.000,00	3.275.531.000,00	10.900.154.000,00	3.275.531.000,00
	JUMLAH	213.767.677.240,26	36.477.369.729,57	73.784.753.937,58	176.460.293.032,25

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Masing – masing akun aset lainnya dirinci sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah atas kerugian daerah yang telah memiliki SKTJM yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp746.252.521,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp129.100.000,00 atau 20,92% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp617.152.521,00 hal ini disebabkan adanya reklasifikasi piutang pendapatan TGR yang SKTJMnya telah kadaluarsa sebesar Rp129.100.000,00 yaitu atas nama Mokhamad Sinyo Mokoginta sebesar Rp74.000.000,00, Gian Limbanadi sebesar Rp15.400.000,00 dan Jackly Makarawung sebesar Rp39.700.000,00. Tagihan jangka panjang dapat dilihat pada **Lampiran 18** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp483.543.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.506.500,00 atau 18,50% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp408.039.500,00. Aset Tidak Berwujud berasal dari nilai aset tidak berwujud sebesar Rp738.972.500,00 dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp255.429.500,00.

Kenaikan aset tidak berwujud disebabkan karena adanya Belanja Modal Aset Lainnya yang dapat dikategorikan sebagai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp170.385.000,00 dari belanja modal sebesar Rp197.025.000,00 pada Dinas Pendidikan dan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud aplikasi *SmartGov* pada Badan Keuangan Daerah yang menambah nilai aset tidak berwujud sebesar Rp84.500.000,00. Selain penambahan aset tidak berwujud di tahun 2024 ini juga terdapat pengurangan aset tidak berwujud yang disebabkan oleh adanya mutasi keluar aset tidak berwujud ke aset lain-lain karena nilai amortisasinya



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sudah sama dengan nilai perolehannya atau umur asetnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sebesar Rp1.769.669.804,00 yaitu dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.148
Aset Tidak berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Jumlah Awal	Dikapitalisasi	Direklasifikasi	Jumlah Akhir
1	Aplikasi PBB Online dan Pemetaan pada BKD	2013	532.256.004,00		532.256.004,00	0,00
2	Software Animasi 3D pada Dinas Pendidikan	2017	339.075.000,00		339.075.000,00	0,00
3	Garuda Learning Software pada Dinas Pendidikan	2017	100.045.000,00		100.045.000,00	0,00
4	Aplikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2018	79.750.000,00		79.750.000,00	0,00
5	Aplikasi Logos pada Badan Keuangan Daerah	2018	396.440.000,00		396.440.000,00	0,00
6	Aplikasi LPSE pada Bagian ULP Setda	2018	74.533.800,00		74.533.800,00	0,00
7	Aplikasi SIMPEG pada BKPP	2018	89.650.000,00		89.650.000,00	0,00
8	Aplikasi SIM PKB pada Dinas Perhubungan	2019	139.920.000,00		139.920.000,00	0,00
9	Aplikasi Window Server pada Dinas Kominfo	2019	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
10	Aplikasi Simpeg pada BKPP	2021	269.087.500,00	0,00	0,00	269.087.500,00
11	Aplikasi SmartGOV pada BKD	2023	215.000.000,00	84.500.000,00	0,00	299.500.000,00
12	Webside Penerimaan Siswa Baru pada Dinas Pendidikan	2024	0,00	170.385.000,00	0,00	170.385.000,00
	JUMLAH		2.253.757.304,00	254.885.000,00	1.769.669.804,00	738.972.500,00

Sumber data: SIPD (diolah)

5.3.1.5.2.1 Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud sama prinsipnya dengan penyusutan aset tetap. Akumulasi amortisasi tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp255.429.500,00 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.149
Amortisasi Aset Tidak berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Nilai Perolehan	Amortisasi	Nilai Netto
1	Aplikasi Simpeg pada BKPP	2021	269.087.500,00	161.452.500,00	107.635.000,00
2	Aplikasi SmartGOV pada BKD	2023	299.500.000,00	59.900.000,00	239.600.000,00
3	Webside Penerimaan Siswa Baru pada Dinas Pendidikan	2024	170.385.000,00	34.077.000,00	136.308.000,00
	JUMLAH		738.972.500,00	255.429.500,00	483.543.000,00

Sumber data: SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 berasal dari beban amortisasi awal sebesar Rp1.845.720.804,00 ditambah beban amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp179.378.500,00 dikurangi koreksi nilai amortisasi aset tidak berwujud yang dipindahkan ke aset lain-lain sebesar Rp1.769.669.804,00. Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 20** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5.3 Aset Lain – Lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp194.455.865.386,38 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.150
Aset Lain – Lain

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Aset Lain – Lain	194.470.402.948,70	223.067.188.616,38	(12,82)

Nilai Aset lain-lain untuk Tahun 2024 sebesar Rp194.470.402.948,70 mengalami penurunan sebesar Rp28.596.785.667,68 atau turun sebesar 12.82% jika dibandingkan dengan aset lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp223.067.188.2616,38. Perubahan Nilai aset lain-lain berasal dari mutasi tambah sebesar Rp46.441.577.051,57 dan mutasi kurang sebesar Rp75.038.362.719,25 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.151
Mutasi Masuk Keluar Aset Lain – Lain

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	223.067.188.616,38
II	MUTASI TAMBAH	
1	Mutasi Antar OPD aset lain-lain	248.725.000,00
2	Dari Intrakom Rusak Berat	34.644.589.886,00
3	Dari Intrakom Tidak Ditemukan	566.095.727,00
4	Dari Intrakom Kondisi Lainnya	9.194.715.634,57
5	Dari Intrakom yang di TGR	17.100.000,00
6	Dari Intrakom BHP	681.000,00
7	Dari Aset Tidak Berwujud	1.769.669.804,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	46.441.577.051,57
III	MUTASI KURANG	
1	Reklas ke aset tetap Dari Aset lain-Lain Baik	367.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
2	Mutasi antar OPD ke aset tetap	639.057.171,00
3	Mutasi antar OPD ke aset lain-lain	248.725.000,00
4	Penghapusan Musnah	67.759.448.798,25
5	Penghapusan aset Karena sudah dibayar TGR	43.090.000,00
6	Penghapusan aset Karena Sudah Ada SK Penghapusan	3.542.070.500,00
7	Bahan Habis Pakai	2.438.671.250,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	75.038.362.719,25
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	194.470.402.948,70

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Saldo aset lain – lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp194.470.402.948,70 merupakan aset rusak berat, aset yang telah hilang atau tidak ditemukan, barang habis pakai dan menunggu Surat Keputusan Penghapusan serta aset dengan kondisi lainnya, sehingga tidak dimasukkan lagi di dalam kelompok aset tetap karena sudah tidak memiliki manfaat. Mutasi masuk keluar aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Mutasi masuk aset lain-lain yang berasal dari mutasi antar OPD aset lain-lain dari aset tetap pada Pengelola BMD sebesar Rp248.725.000,00 yang berasal dari OPD:
 - Dinas Perpustakaan sebesar Rp205.500.000,00;
 - Kecamatan Dumoga sebesar Rp24.850.000,00; dan
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp18.375.000,00.
- Penambahan aset lain-lain yang berasal dari intrakom rusak berat sebesar Rp34.644.589.886,00 pada :
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp1.225.414.694,00;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp2.192.477.822,00
 - ✓ RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp1.644.435.500,00;
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp26.183.929.101,00
 - ✓ Dinas Perumahan sebesar Rp69.063.500,00;
 - ✓ Badan Kesbangpol sebesar Rp103.804.000,00;
 - ✓ BPBD sebesar Rp70.837.408,00;
 - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp63.683.100,00;
 - ✓ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp60.564.000,00;
 - ✓ Dinas PP dan PA sebesar Rp14.499.800,00;
 - ✓ Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp47.561.800,00;
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.406.241,00;
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp23.724.250,00;
 - ✓ Dinas PP dan KB sebesar Rp177.394.031,00;
 - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp108.755.600,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp119.361.500,00;
- ✓ Dinas Koperasi sebesar Rp35.535.275,00;
- ✓ Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp8.600.000,00;
- ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp108.885.025,00;
- ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp26.551.336,00;
- ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp70.950.500,00;
- ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp29.684.375,00;
- ✓ Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp90.537.000,00;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp305.624.567,00;
- ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp1.007.971.300,00;
- ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp8.300.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp11.003.750,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp13.000.000,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp14.685.496,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp26.911.520,00;
- ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp21.078.420,00;
- ✓ Kecamatan Poigar sebesar Rp20.557.900,00;
- ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp18.930.200,00;
- ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp17.560.100,00;
- ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp5.230.000,00;
- ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp116.193.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp28.845.000,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp12.407.511,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp7.313.900,00;
- ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp159.425.590,00;
- ✓ Bappeda sebesar Rp152.651.874,00;
- ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp59.405.500,00; dan
- ✓ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp91.838.400,00.
- Dari Intrakom tidak ditemukan sebesar Rp566.095.727,00 merupakan mutasi yang dilakukan atas aset tetap yang tidak ditemukan pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp32.982.000,00;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp515.401.894,00;
 - ✓ Dinas PMD sebesar Rp10.400.000,00;
 - ✓ Dinas Kominfo sebesar Rp6.061.000,00; dan
 - ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp1.250.833,00.
- Dari Intrakom kondisi lainnya sebesar Rp9.194.715.634,57, pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp310.531.571,64;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp59.876.134,84;
 - ✓ RSUD sebesar Rp74.290.500,00;
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp8.550.683.298,09;
 - ✓ Badan Kesbangpol sebesar Rp50.675.130,00;
 - ✓ BPBD sebesar Rp49.604.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Dinaas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp49.280.000,00; dan
- ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp49.775.000,00.
- Dari Intrakom yang di TGR kan sebesar Rp17.100.000,00, pada Dinas Kesehatan.
- Dari Intrakom BHP sebesar Rp681.000,00 merupakan penambahan atas aset lain-lain dari aset tetap yang merupakan barang habis pakai pada Dinas Kesehatan.

Mutasi Keluar :

- Reklas ke aset tetap dari aset lain-lain baik sebesar Rp367.300.000,00 merupakan aset tetap yang sebelumnya tidak ditemukan namun setelah dilakukan inventaris aset tetap maka kemudian aset tersebut kembali dicatat pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah atas rumah dinas yang berada di Kota Kotamobagu.
- Mutasi aset lain-lain antar OPD ke aset tetap sebesar Rp639.057.171,00 merupakan mutasi Aset Lain-Lain yang dipindahkan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengelola BMD ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa kendaraan dinas minibus.
- Mutasi ke aset lain-lain antar OPD sebesar Rp248.725.000,00 merupakan mutasi aset tetap kendaraan dinas ke Pengelola BMD dari :
 - ✓ Dinas Perpustakaan sebesar Rp205.500.000,00;
 - ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp24.850.000,00;
 - ✓ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp18.375.000,00..
- Penghapusan aset lain-lain karena dimusnahkan sebesar Rp67.759.448.798,25 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp41.221.077.383,39;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp2.729.386.424,86;
 - ✓ RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp10.483.830.841,00;
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp24.090.000,00
 - ✓ Dinas Satpol PP sebesar Rp1.205.050.000,00;
 - ✓ Badan Kesbangpol sebesar Rp5.384.000,00;
 - ✓ BPBD sebesar Rp67.452.008,00;
 - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp63.449.000,00;
 - ✓ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp8.459.000,00;
 - ✓ Dinas PP dan PA sebesar Rp3.239.500,00;
 - ✓ DKP sebesar Rp22.770.000,00;
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp42.146.052,00;
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp93.093.940,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Dinas Kominfo sebesar Rp16.774.000,00;
- ✓ Dinas Koperasi sebesar Rp5.782.000,00;
- ✓ Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp7.898.000,00;
- ✓ Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp68.887.875,00;
- ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp35.512.050,00;
- ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp26.015.133,00;
- ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp318.218.967,00;
- ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp6.000.000,00;
- ✓ Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp96.618.775,00;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp9.025.458.403,00;
- ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp256.515.001,00;
- ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp17.800.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp20.450.000,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp11.935.000,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp3.492.500,00;
- ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp19.233.500,00;
- ✓ Kecamatan Poigar sebesar Rp2.299.000,00;
- ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp11.439.886,00;
- ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp8.400.000,00;
- ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp9.000.000,00;
- ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp20.982.300,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp15.103.700,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp2.500.000,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp13.920.641,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp9.374.998,00;
- ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp86.248.900,00;
- ✓ Bappeda sebesar Rp39.330.000,00; dan
- ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.634.830.020,00.
- Penghapusan aset lain-lain karena telah dibayarkan TGR sebesar Rp43.090.000,00 pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp21.945.000,00;
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp7.659.000,00; dan
 - ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp13.486.000,00.
- Penghapusan aset lain-lain yang telah memiliki SK Penghapusan sebesar Rp3.542.070.500,00 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada:
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp1.295.000.000,00, berupa aset tetap gedung yang berada di daerah pemekaran sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 380 Tahun 2021 Tanggal 10 Desember 2021;
 - ✓ RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp1.006.450.000,00, berupa kendaraan dinas roda empat sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 387 Tahun 2024 Tanggal 1 September 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp125.000.000,00, berupa kendaraan dinas roda empat berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 378 Tahun 2024 tanggal 32 September 2024;
- ✓ Dinas Perpustakaan sebesar Rp99.150.000,00, berupa kendaraan dinas roda empat sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 454 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp125.000.000,00, berupa Tugu KB yang berada di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kotamobagu sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 441 Tahun 2024;
- ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp391.523.500,00, berupa kendaraan dinas roda empat dan dua sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 454 Tahun 2023;
- ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp18.500.000,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 387 Tahun 2024 Tanggal 3 September 2024; dan
- ✓ Pengelola BMD sebesar Rp481.447.000,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 387 Tahun 2024 Tanggal 3 September 2024.
- Penghapusan aset lain-lain karena merupakan barang habis pakai sebesar Rp2.438.671.250,00 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Perikanan sebesar Rp427.115.600,00 dan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.011.555.650,00.

5.3.1.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp69.634.228.921,23 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.152
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	22.515.436.437,45	21.224.854.397,12	6,08

Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya untuk per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp22.515.436.437,45 mengalami kenaikan sebesar Rp1.290.582.040,33 atau naik sebesar 6,08%. Perubahan Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari mutasi tambah sebesar Rp13.444.344.822 dan mutasi kurang sebesar Rp12.153.762.781,67.

Untuk mutasi masuk keluar akumulasi penyusutan aset lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.153
Mutasi Masuk Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	21.224.854.397,12
II	MUTASI TAMBAH	
1	Dari Intrakom Rusak Berat	6.371.788.537,00
2	Dari Intrakom Tidak Ditemukan	565.039.072,00
3	Dari Intrakom Kondisi Lainnya	6.490.071.038,00
4	Dari Intrakom yang di TGR kan	17.100.000,00
5	Dari Intrakom BHP	346.175,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	13.444.344.822,00
III	MUTASI KURANG	
1	Berkurang atas barang yang dimutasikan	128.637.716,00
2	Penghapusan aset	12.025.125.065,67
	JUMLAH MUTASI KURANG	12.153.762.781,67
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	22.515.436.437,45

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp22.515.436.437,45 merupakan akumulasi penyusutan terhadap aset rusak berat, aset yang telah hilang atau tidak ditemukan dan aset tetap yang telah dua kali pencatatan atau *double* catat sehingga tidak dimasukkan lagi di dalam kelompok aset tetap karena sudah tidak memiliki manfaat. Mutasi masuk keluar aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Masuk :

- Penambahan penyusutan aset lainnya yang berasal dari intrakom rusak berat sebesar Rp6.371.788.537 berada pada :
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp823.298.711,00;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp1.307.073.145,00;
 - ✓ RSUD sebesar Rp1.462.183.938,00;
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp131.976.327,00;
 - ✓ Dinas Perumahan sebesar Rp69.063.500,00;
 - ✓ Badan Kesbangpol sebesar Rp103.804.000,00;
 - ✓ BPBD sebesar Rp62.832.362,00;
 - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp57.653.530,00;
 - ✓ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp57.010.695,00;
 - ✓ Dinas PP dan Perlindungan Anak sebesar Rp14.499.800,00;
 - ✓ Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp47.561.800,00;
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.406.241,00;
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp23.724.250,00;
 - ✓ Dinas PP dan KB sebesar Rp163.032.467,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp92.799.144,00;
- ✓ Dinas Komunikasi dan Infokom sebesar Rp119.361.500,00;
- ✓ Dinas Koperasi sebesar Rp35.535.275,00;
- ✓ Dinas perpustakaan sebesar Rp8.600.000,00;
- ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp108.885.025,00;
- ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp26.551.334,00;
- ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp69.410.639,00;
- ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp29.061.123,00;
- ✓ Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp90.537.000,00;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp305.624.567,00;
- ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp381.420.813,00;
- ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp8.300.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp11.003.750,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp11.472.223,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp9.149.154,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp26.911.520,00;
- ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp21.078.420,00;
- ✓ Kecamatan Poigar sebesar Rp19.794.928,00;
- ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp18.930.200,00;
- ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp16.515.895,00;
- ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp5.230.000,00;
- ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp116.193.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp28.198.750,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp12.407.511,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp6.608.281,00;
- ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp126.401.096,00;
- ✓ Bappeda sebesar Rp123.904.958,00;
- ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp56.943.265,00; dan
- ✓ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp91.838.400,00.
- Dari intrakom tidak ditemukan sebesar Rp565.039.072,00 merupakan penyusutan atas mutasi yang dilakukan ke aset lain dari aset tetap yang tidak ditemukan pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp32.749.000,00;
 - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp515.401.894,00;
 - ✓ Dinas PMD sebesar Rp10.400.000,00;
 - ✓ Dinas Kominfo sebesar Rp5.237.345,00; dan
 - ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp1.250.833,00;
- Dari intrakom kondisi lainnya sebesar Rp6.490.071.038,00 pada :
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp174.487.796,00; dan
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.315.583.242,00.
- Dari Intrakom atas barang yang di TGR kan sebesar Rp17.100.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- Dari Intrakom BHP sebesar Rp346.175,00 pada Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Mutasi Keluar :

- Berkurang akumulasi penyusutan aset lain-lain atas barang yang dimutasikan ke Pengelola BMD sebesar Rp128.637.716,00 pada:
 - ✓ Dinas Perpustakaan sebesar Rp103.787.716,00; dan
 - ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp24.850.000,00;
- Penghapusan penyusutan aset lain-lain akibat penghapusan aset lain-lain sebesar Rp12.025.125.065,67 pada:
 - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp21.945.000,00;
 - ✓ RSUD sebesar Rp4.309.166.814,67;
 - ✓ Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp24.090.000,00;
 - ✓ Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.205.050.000,00;
 - ✓ BPBD sebesar Rp67.452.008,00;
 - ✓ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp8.459.000,00;
 - ✓ Dinas PP dan Perlindungan Anak sebesar Rp3.239.500,00;
 - ✓ Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp147.770.000,00;
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.500.000,00;
 - ✓ Dinas Kominfo sebesar Rp9.915.000,00;
 - ✓ Dinas Koperasi sebesar Rp5.782.000,00;
 - ✓ Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp29.833.766,00;
 - ✓ Dinas Perpustakaan sebesar Rp99.150.000,00;
 - ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp22.512.050,00;
 - ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp26.015.133,00;
 - ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp126.808.967,00;
 - ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp6.000.000,00;
 - ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp3.488.286.468,00;
 - ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp256.515.011,00
 - ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp17.800.000,00;
 - ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp20.450.000,00;
 - ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp11.935.000,00;
 - ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp3.286.250,00;
 - ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp19.233.500,00;
 - ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp7.964.404,00;
 - ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp8.400.000,00;
 - ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp9.000.000,00;
 - ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp20.982.300,00;
 - ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp15.103.700,00;
 - ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp4.191.667,00;
 - ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp9.374.998,00;
 - ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp311.766.519,00;
 - ✓ Bapeda sebesar Rp39.330.000,00; dan
 - ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.666.816.020,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.154
Rincian Aset Lain – Lain

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN ASET	JUMLAH
1	Aset Lainnya Peralatan dan Mesin	32.831.499.144,52
2	Aset Lainnya Gedung Dan Bangunan	36.788.744.051,83
3	Aset Lainnya Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.803.283.347,74
4	Aset Tetap Lainnya	10.450.206.600,61
5	Investasi pada PD. Gadasera	1.827.000.000,00
6	Aset Tidak Berwujud	1.769.669.804,00
7	Akumulasi Penyusutan yang mengikat aset tetap	(22.515.436.437,45)
	JUMLAH	171.954.966.511,25

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Rincian aset lain-lain per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 19** laporan keuangan ini.

5.3.1.5.4 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Sesuai kebijakan umum untuk penyaluran remunerasi atas penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum (DBH/DAU) melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) yang dibayarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam PMK Nomor 218 Tahun 2022. Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU dan disimpan untuk dibayarkan melalui fasilitas TDF. Nomor Rekening TDF-TKD di Bank Indonesia adalah 519000470980 dengan nama Rekening Lain BI TDF TKD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar Rp3.275.531.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.624.623.000,00 atau turun 69,95% dari Tahun 2023 sebesar Rp10.900.154.000,00. Rincian Dana TDF dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.155
Rincian Dana TDF

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN ASET	2024	2023	%
1	TDF DBH PPH pasal 21	0,00	684.732.000,00	(100,00)
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	5.699.000,00	(100,00)
3	TDF DBH PBB	0,00	1.653.251.000,00	(100,00)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	129.622.000,00	(100,00)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.169.733.000,00	7.756.023.000,00	(59,13)
6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	93.140.000,00	659.331.000,00	(85,87)
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH	12.658.000,00	11.496.000,00	10,11
8	DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	RINCIAN ASET	2024	2023	%
	JUMLAH	3.275.531.000,00	10.900.154.000,00	(69,95)

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang yang diakibatkan adanya potongan atau pungutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah maupun Bendahara Pengeluaran entitas akuntansi pengguna anggaran/OPD sebagai pemungut pajak, iuran wajib dan tabungan pensiun sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara.

Tabel 5.156
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	67.480.101,62	23.376.746,00	188,66

Sumber data: SIPD (diolah)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.090.666,62 berasal dari :

- Utang PFK dana BOSP sebesar Rp65.946.356,62 merupakan utang PFK yang dipotong oleh Bendahara BOSP namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang berada pada PPh Psl 21 sebesar Rp887.283,00, PPh Psl 23 sebesar Rp2.292.340,00 dan PPN sebesar Rp67.766.733,62.
- Utang PFK dari Pemerintah Daerah yang berasal dari kegiatan OPD sebesar Rp1.533.745,00 merupakan utang PFK yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang disebabkan oleh:
 - ✓ Utang PFK IWP 8% sebesar Rp705.892,00 yang disebabkan oleh karena adanya kesalahan pembayaran potongan IWP dari Bank NTT yang menggunakan *ID Billing* PFK tersebut di tahun 2023 sebesar Rp834.011,00 yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak lagi dapat menyetorkan menggunakan *ID Billing* yang sama dan kelebihan pembayaran IWP 8% sebesar minus Rp128.119,00.
 - ✓ Utang PFK IWP 1% sebesar Rp827.853,00 yang disebabkan karena adanya kesalahan pembayaran menggunakan *ID Billing* PFK tersebut oleh Bank BPD Jawa Timur sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat menyetorkan menggunakan *ID Billing* tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Atas kesalahan penyetoran PFK dari pemerintah daerah lainnya di atas maka ditahun 2025 Pemerintah Daerah akan membuat kembali *ID Billing* yang baru untuk penyetoran utang PFK tersebut.

Rincian utang PFK Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.157
Rincian Utang PFK
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	UTANG PFK			
		BUD	BENDAHARA BOS	BENDAHARA FKTP	TOTAL
1	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	887.283,00	0,00	887.283,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	2.292.340,00	0,00	2.292.340,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	62.766.733,62	0,00	62.766.733,62
6	IWP 1 %	827.853,00	0,00	0,00	827.853,00
7	IWP 8%	705.892,00	0,00	0,00	705.892,00
	JUMLAH	1.533.745,00	65.946.356,62	0,00	67.480.101,62

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.158
Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
Pendapatan Diterima Dimuka	77.346.729,71	0,00	100,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.346.729,71 berasal dari Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah yang di sewa oleh pihak lain yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.159
Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Penyewa	Tahun Awal	Jumlah Kontrak	Jumlah Per Hari	Jumlah Hari Belum Dimanfaatkan	Pendapatan diterima dimuka
1	Bank Sulutgo	2023	15.000.000,00	8.205,69	1.326 Hari	10.880.743,98



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penyewa	Tahun Awal	Jumlah Kontrak	Jumlah Per Hari	Jumlah Hari Belum Dimanfaatkan	Pendapatan diterima dimuka
2	Bank BRI	2023	15.000.000,00	8.205,69	1.266 Hari	10.388.402,63
3	PT. Tower Bersam Group	2023	50.000.000,00	27.352,30	1.267 Hari	34.655.361,05
4	Bank Sulutgo	2023	25.000.000,00	13.676,15	1.327 Hari	18.148.249,45
5	Ikrani Aleda (Kantin)	2024	5.000.000	13.698,63	239 Hari	3.273.972,60
	JUMLAH		110.000.000,00	71.138,46		77.346.729,71

Sumber data: Kontrak awal (diolah)

Rincian perhitungan nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 21** laporan keuangan ini.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Tabel 5.160
Utang Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
Utang Belanja	3.538.713.073,89	5.502.956.409,00	(35,69)

Pengakuan utang belanja berasal dari kurang bayar atas fisik pekerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.538.713.073,89 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.964.243.334,77 atau turun 35,69% dari Tahun 2023 sebesar Rp5.502.956.409,00.

Utang tersebut akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan kembali fisik pekerjaan dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga atas keterlambatan pekerjaan tersebut.

Rincian utang belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.161
Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Dinas Kesehatan	495.683.475,00	0,00	100,00
2	Dinas Pendidikan	484.919.614,65	2.126.300.200,00	(77,19)
3	RSUD Datoe Binangkang	1.628.498.500,00	3.082.393.649,00	(47,17)
4	Badan Keuangan Daerah	157.224.334,00	0,00	100,00
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	755.221.253,66	294.262.560,00	156,65
6	Dinas Pertanian	17.165.896,58	0,00	100,00
	JUMLAH	3.538.713.073,89	5.502.956.409,00	(35,69)

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Mutasi masuk keluar utang belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.162
Mutasi Masuk Keluar Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	31 Desember 2023	Koreksi	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2024
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	495.683.475,00	0,00	495.683.475,00
2	Dinas Pendidikan	2.126.300.200,00	0,00	484.919.614,65	2.126.300.200,00	484.919.614,65
3	RSUD Datoe Binangkang	3.082.393.649,00	(22.672,00)	0,00	1.453.872.477,00	1.628.498.500,00
4	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	157.224.334,00	0,00	157.224.334,00
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	294.262.560,00	0,00	755.221.253,66	294.262.560,00	755.221.253,66
6	Dinas Pertanian	0,00	0,00	17.165.896,58	0,00	17.165.896,58
	JUMLAH	5.502.956.409,00	(22.672,00)	1.910.214.573,89	3.874.435.237,00	3.538.713.073,89

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai utang belanja Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.964.243.335,11 atau turun sebesar 35,69%. Perubahan nilai utang belanja berasal dari mutasi tambah sebesar Rp1.910.214.573,89 dan mutasi kurang sebesar Rp3.874.435.237,00 serta koreksi sebesar Rp22.672,00. Utang Belanja Tahun 2024 dapat dikategorikan dengan:

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp272.553.934,00 atas:
 - Utang Iuran Jaminan Kesehatan jasa medis 4% Tahun 2023 yang belum terbayarkan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sebesar Rp157.224.334,00; dan
 - Utang belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Tahun 2024 sebesar Rp115.329.600,00;
2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.691.362.938,74 atas :
 - Utang jasa tenaga kesehatan Covid Tahun 2020 – 2022 sebesar Rp1.628.498.500,00;
 - Utang barang persediaan diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp45.698.542,16 atas pembangunan ruang kelas baru sekolah swasta SMP Nus Alam Cendekia Muntoi dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp17.165.896,58 atas perkerasan jalan type 2 jalan usaha tani desa Komangan;
3. Utang Belanja Modal Gedung sebesar Rp819.574.948,00 atas:
 - Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp495.683.475,00; dan
 - Pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp323.891.472,49 atas Jamban SMPN 2 Lolak sebesar Rp63.973.129,00, Pembangunan Jamban SMPN 1 Lolak sebesar Rp91.267.445,00, Rehab Gedung RKB SDN 2 Toruakat sebesar Rp62.520.217,00 dan Gedung RKB SMPN 4 Lolak sebesar Rp106.130.682,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp755.221.253,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas kekurangan bayar pekerjaan jalan Wangga Baru – Uuwan.

Untuk utang belanja Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada **Lampiran 22** Laporan Keuangan ini.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.893.580.178.312,30 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.954.887.228.511,62 atau mengalami penurunan sebesar Rp61.307.050.199,32 atau 3,14%.

5.4 Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus Defisit Operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan Laporan Keuangan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

Akun-akun Laporan Operasional yang disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.163
Laporan Operasional

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	%
	KEGIATAN OPERASIONAL			
7	PENDAPATAN	931.242.731.469,49	964.193.809.311,42	(3,42)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO			
7.1.01	Pajak Daerah-LO	42.208.444.873,00	48.797.560.361,00	(13,50)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	14.885.668.418,33	12.607.339.661,00	18,07
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.341.420.881,00	2.882.571.278,10	154,68
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	4.381.091.021,16	5.770.295.807,85	(24,08)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.816.625.193,49	70.057.767.107,95	(1,77)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO			
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	767.722.020.297,00	805.545.509.545,00	(4,70)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	%
7.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	12.889.356.000,00	14.914.122.000,00	(13,58)
7.2.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO	46.238.134.108,00	41.920.519.293,47	10,30
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	826.849.510.405,00	862.380.150.838,47	(4,12)
7.3				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	27.371.613.779,00	23.368.750.667,00	17,13
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan –LO	8.204.982.092,00	8.387.140.698,00	(2,17)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	35.576.595.871,00	31.755.891.365,00	12,03
8	BEBAN			
8.1	BEBAN OPERASI			
8.1.01	Beban Pegawai	465.637.665.924,00	411.700.345.933,00	13,10
8.1.02.01	Beban Persediaan	74.697.488.073,75	95.366.326.891,00	(21,67)
8.1.02.02	Beban Jasa	109.498.152.025,47	118.955.904.082,67	(7,95)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	6.720.977.641,00	4.551.011.016,00	47,68
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	65.581.040.739,00	57.713.574.578,00	13,63
8.1.04.	Beban Subsidi	0,00	211.500.000,00	(100,00)
8.1.05	Beban Hibah	80.195.067.747,00	41.588.850.633,00	92,83
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	297.306.250,00	895.525.450,00	(66,80)
8.1.07	Beban Penyusutan Amortisasi	81.276.996.824,23	73.011.274.947,67	11,32
8.1.11	Beban Penyisihan Piutang	648.782.824,34	454.621.829,86	42,71
	JUMLAH BEBAN OPERASI	884.553.478.048,79	804.448.935.361,20	9,96
8.2	BEBAN TRANSFER			
8.2.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.790.020.356,31	5.155.999.000,00	12,30
8.2.02	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	68.737.204.991,00	57.510.000.000,00	19,52
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	74.527.225.347,31	62.665.999.000,00	18,93
	JUMLAH BEBAN	959.080.703.396,10	867.114.934.361,20	10,61
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(27.837.971.926,61)	97.078.874.950,22	(128,68)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	45.000.000,00	0,00	100,00
8.3	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	45.000.000,00	0,00	100,00
8.3.01	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(27.792.971.926,61)	97.078.874.950,22	(128,63)
8.4	POS LUAR BIASA			
8.4.01	Beban Luar Biasa	1.501.050.900,00	9.293.016.063,00	(83,85)
	JUMLAH POS LUAR BIASA	1.501.050.900,00	9.293.016.063,00	(83,85)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1.501.050.900,00)	(9.293.016.063,00)	(83,85)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(29.294.022.826,61)	87.785.858.887,22	(133,37)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO menggambarkan seluruh hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama Tahun 2024 yang diakui sebagai penambah



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

ekuitas dalam periode berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah Pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp931.242.731.469,49 dan Tahun 2023 sebesar Rp964.193.809.311,42 atau mengalami penurunan 3,42%, yang terdiri dari:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah total sebesar Rp68.816.625.193,49 dan Tahun 2023 sebesar Rp70.057.767.107,95 atau mengalami penurunan (1,77%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian pendapatan tersebut TA. 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.164
Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	42.208.444.873,00	48.797.560.361,00	(13,50)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	14.885.668.418,33	12.607.339.661,00	18,07
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.341.420.881,00	2.882.571.278,00	154,68
4.	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	4.381.091.021,16	5.770.295.807,85	(24,08)
	JUMLAH	68.816.625.193,49	70.057.767.107,95	(1,77)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp42.208.444.873,00 dan 2023 sebesar Rp48.797.560.361,00 atau mengalami penurunan 13,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian pendapatan tersebut TA.2024 sebagai berikut :

Tabel 5.165
Pendapatan Pajak - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Pajak Hotel-LO	48.398.100,00	55.956.465,00	(13,51)
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	754.766.863,00	937.466.423,00	(19,49)
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	6.600.000,00	12.000.000,00	(45,00)
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	789.725.252,00	594.520.500,00	32,83
5	Pajak Reklame Kain-LO	1.497.232.450,00	1.160.391.851	29,03
6	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	24.908.150,00	234.144.130,00	(89,36)
7	Pajak Reklame Berjalan-LO	61.960.000,00	54.140.000,00	14,44
8	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	10.605.612.925,00	9.485.127.444,00	11,81



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	%
9	Pajak Sarang Burung Walet-LO	38.500.000,00	13.000.000,00	196,15
10	Pajak Batu Kapur-LO	21.492.021.541,00	22.161.509.800,00	(3,02)
11	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	2.017.178.735,00	5.069.745.659,00	(60,21)
12	PBBP2-LO	4.344.199.491,00	4.015.383.827,00	8,19
13	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	145.987.720,00	2.366.944.156,00	(93,83)
14	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	381.353.646,00	2.637.230.106,00	(85,54)
JUMLAH		42.208.444.873,00	48.797.560.361,00	(13,50)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Akun Pendapatan - LO yang disajikan pada tabel tersebut diatas merupakan hak pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun 2024. Rincian akun tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Hotel-LO sebesar 48.398.100,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 sedangkan Pendapatan Pajak Hotel LRA sebesar Rp57.426.072,00 atau terdapat selisih sebesar Rp9.027.972,00. Selisih tersebut merupakan setoran piutang pajak hotel tahun sebelumnya sehingga mengurangi nilai pendapatan LO;
2. Pendapatan Pajak Restoran-LO sebesar Rp754.766.863,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 sedangkan Pendapatan Pajak Restoran-LRA sebesar Rp761.666.863,00 atau terdapat selisih sebesar Rp6.900.000,00. Selisih tersebut merupakan setoran piutang tahun sebelumnya sehingga mengurangi nilai pendapatan LO;
3. Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO sebesar Rp6.600.000,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 sedangkan Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LRA sebesar Rp6.600.000,00;
4. Pendapatan Pajak Reklame Papan *Billboard/Videotron/Megatron* – LO sebesar Rp789.725.252,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan Pendapatan Pajak Reklame Papan *Billboard/Videotron/Megatron* – LRA sebesar Rp789.725.252,00;
5. Pendapatan Pajak Reklame Kain – LO sebesar Rp1.497.232.450,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan Pendapatan Pajak Reklame Kain – LRA sebesar Rp1.501.033.637,00 atau terdapat selisih sebesar Rp3.801.187,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penyeteroran piutang tahun sebelumnya yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp228.799.750,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp224.998.563,00 yang menambah nilai pendapatan LO;
6. Pendapatan Pajak Reklame Melekat/Stiker – LO sebesar Rp24.908.150,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan Pendapatan Pajak Reklame Melekat/Stiker – LRA sebesar Rp24.908.150,00 ;
7. Pendapatan Pajak Reklame Berjalan – LO sebesar Rp61.960.000,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Pendapatan Pajak Reklame Berjalan – LRA sebesar Rp61.960.000,00;
 8. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp10.605.612.925,00 sedangkan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LRA sebesar Rp10.602.145.105,00 atau terdapat selisih sebesar Rp3.467.820,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penyeteroran piutang Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp877.974.231,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp881.442.051,00 yang menambah nilai pendapatan LO;
 9. Pajak Sarang Burung Walet-LO Sebesar Rp38.500.000,00 sedangkan Pajak Sarang Burung Walet – LRA Sebesar Rp38.500.000,00;
 10. Pendapatan Pajak Batu Kapur-LO Sebesar Rp21.492.021.541,00 sedangkan Pendapatan Pajak Batu Kapur-LRA Sebesar Rp21.503.235.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp11.213.459,00 yang merupakan penyeteroran piutang Tahun 2023 yang mengurangi nilai pendapatan LO;
 11. Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil - LO sebesar Rp2.017.178.735,00 sedangkan Pendapatan Pajak Pasir Kerikil - LRA sebesar Rp1.932.949.745,00 atau terdapat selisih sebesar Rp84.228.990,00 yang merupakan piutang Tahun 2024 yang menambah nilai pendapatan LO;
 12. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO sebesar Rp4.344.199.491,00 sedangkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LRA sebesar Rp3.989.066.721,00 atau terdapat selisih sebesar Rp355.132.770,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penyeteroran piutang tahun sebelumnya yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp16.119.958,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp371.253.178,00 yang menambah nilai pendapatan LO;
 13. BPHTB Pemindahan Hak - LO Tahun 2024 sebesar Rp145.987.720,00 sedangkan BPHTB Pemindahan Hak - LRA Tahun 2024 sebesar Rp127.003.576,00 atau terdapat selisih sebesar Rp18.984.144,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penyeteroran piutang tahun sebelumnya yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp8.304.301,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp27.288.445,00 yang menambah nilai pendapatan LO; dan
 14. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak Baru-LO (PBHTB) Rp381.353.646,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 sedangkan Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak Baru-LRA (PBHTB) sebesar Rp381.353.646,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp14.885.668.418,33 dan Tahun 2023 sebesar Rp12.607.339.661,00 atau mengalami kenaikan sebesar 18,07% yang meliputi:

Tabel 5.166
Pendapatan Retribusi – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	2.278.812.200,00	1.184.099.800,00	92,45
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	10.439.711.213,00	10.780.200.975,00	(3,16)
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	90.326.000,00	60.840.000,00	48,46
4	Retribusi Pelataran-LO	72.621.500,00	223.460.136,00	(67,50)
5	Retribusi Los-LO	28.400.000,00	0,00	100,00
6	Retribusi Kios-LO	80.500.500,00	0,00	100,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	61.665.000,00	(100,00)
8	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	16.633.000,00	(100,00)
9	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan –LO	22.749.003,33	0,00	100,00
10	Retribusi Pemakaian Laboratorium –LO	78.359.600,00	18.448.950,00	324,74
11	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor –LO	26.650.000,00	0,00	100,00
12	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	30.796.000,00	(100,00)
13	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	21.650.000,00	0,00	100,00
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	193.832.501,00	150.242.500,00	29,01
15	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	40.010.000,00	21.505.000,00	86,05
16	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	59.448.300,00	(100,00)
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	680.095.915,00	0,00	100,00
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	831.949.986,00	0,00	100,00
	JUMLAH	14.885.668.418,33	12.607.339.661,00	18,07

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pengakuan Pendapatan LO khusus untuk pendapatan retribusi daerah dilakukan dengan pendekatan pengakuan Pendapatan LO pada saat terjadinya realisasi atas objek retribusi tersebut yang terdiri dari:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO di Puskesmas sebesar Rp2.278.812.200,00 diakui sebesar nilai yang



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- direalisasikan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sedangkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA di Puskesmas sebesar Rp2.278.812.200,00;
2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD – LO sebesar Rp10.439.711.213,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang sedangkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD - LRA sebesar Rp10.439.711.213,00;
 3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum – LO Rp90.326.000,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan sedangkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum – LRA sebesar Rp90.326.000,00;
 4. Pendapatan pelayanan pasar Pelataran - LO sebesar Rp72.621.500,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 pada Dinas Perdagangan dan ESDM sedangkan Pendapatan pelayanan pasar Pelataran – LRA sebesar Rp50.750.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp21.871.500,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penyetoran piutang tahun sebelumnya yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp11.208.000,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp33.079.500,00 yang penambahan nilai pendapatan LO;
 5. Pendapatan Retribusi Los – LO sebesar Rp28.400.000,00 diakui nilai yang direalisasikan Tahun 2024 pada Dinas Perdagangan dan ESDM sedangkan Pendapatan Retribusi Los – LRA sebesar Rp28.400.000,00;
 6. Pendapatan Retribusi Kios – LO sebesar Rp80.500.500,00 diakui nilai yang direalisasikan Tahun 2024 pada Dinas Perdagangan dan ESDM sedangkan Pendapatan Retribusi Kios – LRA sebesar Rp80.500.500,00;
 7. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Sedan - LO pada Tahun 2024 tidak ada realisasi dikarenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan pada Tahun 2024 karena sudah tidak di pungut lagi PAD (digratiskan) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2022;
 8. Pendapatan Retribusi pengujian Alat-Alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya tidak ada realisasi di Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Telah dicabut dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Perlengkapannya tidak lagi termasuk jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masa transisi pelaksanaan amanat Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan akhir Tahun 2023;
9. Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO Tahun 2024 sebesar Rp22.749.003,33 sedangkan Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp17.749.003,33. Selisih tersebut disebabkan adanya pendapatan dibayar dimuka sebesar Rp77.346.729,71 dan koreksi saldo awal sebesar Rp95.095.733,04;
 10. Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO sebesar Rp78.359.600,00 merupakan pendapatan atas pemakaian Laboratorium di Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium-LRA sebesar Rp78.359.600,00;
 11. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Kendaraan Bermotor – LO sebesar Rp26.650.000,00 diakui merupakan nilai yang direalisasi Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan sedangkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Kendaraan Bermotor – LRA sebesar Rp26.650.000,00;
 12. Pendapatan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal-LO Tahun 2024 sudah tidak lagi dipungut PAD (digratiskan) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tanggal 5 Januari 2022;
 13. Pendapatan Retribusi Pealayanan Tempat Khusus Parkir - LO sebesar Rp21.650.000,00 diakui sebesar nilai yang direalisasi Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan sedangkan Pendapatan Retribusi Pealayanan Tempat Khusus Parkir - LRA sebesar Rp21.650.000,00;
 14. Pendapatan pelayanan tempat rekreasi-LO sebesar Rp193.832.501,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedangkan Pendapatan pelayanan tempat rekreasi-LRA sebesar Rp193.832.501,00;
 15. Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO sebesar Rp40.010.000,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2024 pada Dinas Perikanan sedangkan Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LRA sebesar Rp40.010.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

16. Pendapatan pemberian izin mendirikan bangunan - LO Tahun 2024 tidak direalisasikan Sejak berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja serta berdasarkan PP 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak diberikan dan diganti dengan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga retribusi yang dipungut adalah Retribusi PBG;
17. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO sebesar Rp680.095.915,00 diakui sebesar nilai yang direalisasi Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sedangkan Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LRA sebesar Rp680.095.915,00; dan
18. Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO sebesar Rp831.949.986,00 diakui sebesar nilai yang direalisasi Tahun 2024 pada Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan sedangkan Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LRA sebesar Rp831.949.986,00.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO Tahun 2024 sebesar Rp7.341.420.881,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp2.882.571.278,10 berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa deviden atas penyertaan modal kepada PDAM Tahun 2024 sebesar Rp158.086.716,00 dan PT. Bank SulutGo sebesar Rp3.720.118.326,00 dan piutang dari deviden Bank SulutGo sebesar Rp3.463.215.839,00.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO Tahun 2024 sebesar Rp4.381.091.021,16 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp5.770.295.807,85 atau mengalami penurunan 24,08% yang terdiri dari:

Tabel 5.167
Lain-Lain PAD yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Hasil Penjualan Aset lainnya-Aset Lain-lain	0,00	55.886.400,00	(19,48)
2	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	103.350.001,00	(100,00)
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.743.692.913,00	2.567.532.799,25	(32,09)
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	123.087.861,00	134.359.125,04	(8,39)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	1.099.933.174,67	770.489.729,00	42,76
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	147.079.555,00	339.318.193,00	(56,65)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	%
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	629.656.889,49	1.197.897.285,81	(47,44)
8	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO	0,00	30.000.000,00	(100,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	0,00	26.040.000,00	(100,00)
10	Pendapatan Pajak Daerah PBBP2 – LO	371.160,00	22.339.210,75	(98,34)
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	0,00	7.500.000,00	(100,00)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	474.484.018,00	(100,00)
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	71.070.750,00	41.099.046,00	72,93
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan ASN – LO	507.812.584,00	0,00	100,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN – Gaji Pokok PPPK - LO	58.386.134,00	0,00	100,00
	JUMLAH	4.381.091.021,16	5.770.295.807,85	(24,08)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pengakuan Pendapatan LO atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO diakui ketika:

- Pendapatan LO atas hasil penjualan aset lainnya–Aset lain-lain LO Rp0,00 sedangkan Pendapatan LRA atas hasil penjualan aset lainnya–Aset lain-lain sebesar Rp45.000.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp45.000.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi pendapatan atas hasil penjualan aset lainnya–Aset lain-lain LO ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar;
- Pendapatan LO atas jasa giro kas daerah diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp1.743.692.913,00 sedangkan Pendapatan LRA atas jasa giro kas daerah diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp1.743.692.913,00;
- Pendapatan LO atas bunga deposito pada Tahun 2024 Rp123.087.861,00 sedangkan Pendapatan LRA atas bunga deposito pada Tahun 2024 sebesar Rp123.087.861,00;
- Pendapatan LO atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp1.099.933.174,67 sedangkan Pendapatan LRA atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebesar Rp1.103.933.174,67 atau terdapat selisih sebesar Rp4.000.000,00 yang merupakan pembayaran piutang TGR tahun sebelumnya yang mengurangi pendapatan LO;
- Pendapatan LO atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LO sebesar Rp147.079.555,00 sedangkan Pendapatan LRA atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LRA sebesar Rp147.079.555,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- f. Pendapatan LO denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum diakui sebesar Rp629.656.889,49 pada Dinas PU dan Penataan Ruang sedangkan Pendapatan LRA denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum sebesar Rp629.656.889,49;
- g. Pendapatan LO atas denda PBBP2 – LO pada Tahun 2024 sebesar Rp371.160,00 sedangkan Pendapatan LRA atas denda PBBP2 – LRA pada Tahun 2024 sebesar Rp371.160,00;
- h. Pendapatan LO atas pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024 diakui sebesar Rp71.070.750,00 sedangkan Pendapatan LRA atas pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024 sebesar Rp71.070.750,00;
- i. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN – Gaji Pokok PNS – LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp507.812.584,00 sedangkan Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN – Gaji Pokok PNS – LRA Tahun 2024 sebesar Rp507.812.584,00; dan
- j. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN – Gaji Pokok PPPK – LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp58.386.134,00 sedangkan Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN – Gaji Pokok PPPK – LRA Tahun 2024 d sebesar Rp58.386.134,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp826.849.510.405,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp862.380.150.838,47 atau mengalami penurunan 4,12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp767.722.020.297,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp805.545.509.545,00 atau mengalami penurunan sebesar 4,70%.

Tabel 5.168
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	55.317.150.000,00	49.641.697.000,00	11,43
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	572.634.871.063,00	534.329.126.000,00	7,17
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	35.123.482.574,00	113.708.772.524,00	(69,11)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	104.646.516.660,00	107.865.914.021,00	(2,98)
	JUMLAH	767.722.020.297,00	805.545.509.545,00	(4,70)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp55.317.150.00,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp49.641.697.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11,43% yang terdiri dari:

Tabel 5.169
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	7.117.203.000,00	10.035.382.000,00	(29,08)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	3.011.905.000,00	4.178.463.000,00	(27,92)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	196.076.000,00	299.529.000,00	(34,54)
4	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	803.193.000,00	2.182.209.000,00	(63,19)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	379.816.000,00	517.926.000,00	(26,67)
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	42.200.232.000,00	30.566.499.000,00	38,06
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	15.917.000,00	30.635.000,00	(48,04)
8	DBH SDA Perikanan-LO	1.592.808.000,00	1.831.054.000,00	(13,01)
	JUMLAH	55.317.150.000,00	49.641.697.000,00	11,43

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO sebesar Rp7.117.203.000,00 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LRA sebesar Rp8.770.454.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.653.251.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan dana TDF Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO;
2. Pendapatan Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasl 29 WP orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 – LO sebesar Rp3.011.905.000,00 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasl 29 WP orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 – LRA sebesar Rp3.696.637.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp684.732.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan dana TDF Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO;
3. Pendapatan Dana Bagi Hasil PPh pasal 25 dan pasal 29 WPOPDN – LO sebesar Rp196.076.000,00 sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil PPh pasal 25 dan pasal 29 WPOPDN – LRA sebesar Rp201.775.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp5.699.000,00. Selisih tersebut disebabkan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- oleh adanya penerimaan dana TDF Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO;
4. Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA Pengusaha Panas Bumi – LO sebesar Rp803.193.000,00 sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi – LRA sebesar Rp1.369.384.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp566.191.000,00 Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan dana TDF Tahun 2023 sebesar Rp659.331.000,00 yang mengurangi pendapatan LO dan juga terdapat penerimaan dana TDF Tahun 2024 sebesar Rp93.140.000,00 yang menambah pendapatan LO;
 5. Pendapatan Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara – Landrent – LO sebesar Rp379.816.000,00 sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara – Landrent – LRA sebesar Rp509.438.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp129.622.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan dana TDF Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO;
 6. Pendapatan Dana Bagi Hasil SDH Mineral dan Batu Bara – Royalty – LO sebesar Rp42.200.232.000,00 sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil SDH Mineral dan Batu Bara – Royalty – LRA sebesar Rp46.786.522.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp4.586.290.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan dana TDF Tahun 2023 sebesar Rp7.756.023.000,00 yang mengurangi pendapatan LO dan juga terdapat penerimaan dana TDF Tahun 2024 sebesar Rp3.169.733.000,00 yang menambah pendapatan LO;
 7. Pendapatan Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH – LO sebesar Rp15.917.000,00 sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH – LRA sebesar Rp14.755.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.162.000,00. Selisih tersebut disebabkan terdapat penerimaan dana TDF Tahun 2024 yang menambah pendapatan LO; dan
 8. Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA Perikanan LO sebesar Rp1.592.808.000,00 sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA Perikanan LRA sebesar Rp1.592.808.000,00.

2. Dana Alokasi Umum

Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp572.634.871.063,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp534.329.126.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,17%. Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dialokasikan berdasarkan cetak fiskal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.170
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	446.309.467.000,00	534.329.126.000,00	(16,47)
2	Dana Alokasi Umum (DAU) Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan-LO	400.000.000,00	0,00	100,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK -LO	15.226.821.063,00	0,00	100,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaan Bidang Pendidikan -LO	61.310.644.000,00	0,00	100,00
5	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaan Bidang Kesehatan -LO	36.359.796.000,00	0,00	100,00
6	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaan Bidang Pekerjaan Umum -LO	13.028.143.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH	572.634.871.063,00	534.329.126.000,00	7,17

Sumber data : SIPD RI (diolah)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO sebesar Rp446.309.467.000,00 sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA sebesar Rp446.309.467.000,00;
2. Pendapatan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO sebesar Rp400.000.000,00 sedangkan Pendapatan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LRA sebesar Rp400.000.000,00;
3. Pendapatan DAU Dukungan Tambahan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja – LO sebesar Rp15.266.821.063,00 sedangkan Pendapatan DAU Dukungan Tambahan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja – LRA sebesar Rp15.266.821.063,00;
4. Pendapatan DAU yang ditentukan Penggunaannya di Bidang Pendidikan – LO sebesar Rp61.310.644.000,00 sedangkan Pendapatan DAU yang ditentukan Penggunaannya di Bidang Pendidikan – LRA sebesar Rp61.310.644.000,00;
5. Pendapatan DAU yang ditentukan Penggunaannya di Bidang Kesehatan – LO sebesar Rp36.359.796.000,00 sedangkan Pendapatan DAU yang ditentukan Penggunaannya di Bidang Kesehatan – LRA sebesar Rp36.359.796.000,00; dan
6. Pendapatan DAU yang ditentukan Penggunaannya di Bidang Pekerjaan Umum – LO sebesar Rp13.028.143.000,00 sedangkan Pendapatan DAU yang ditentukan Penggunaannya di Bidang Pekerjaan Umum – LRA sebesar Rp13.028.143.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2024 sebesar Rp35.123.482.574,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp113.708.772.524,00 atau mengalami penurunan sebesar (69,11%). Pendapatan Transfer – Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.171
Transfer Dana Khusus Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	685.354.000,00	0,00	100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	4.202.211.000,00	7.800.600.000,00	(46,13)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	4.310.921.000,00	11.917.364.000,00	(63,83)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	10.388.240.300,00	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	6.514.271.960,00	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00	768.778.006,00	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	5.870.805.300,00	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	3.628.649.910,00	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	7.767.494.839,00	48.336.398.000,00	(83,93)
10	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	1.394.961.559,00	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	536.726.494,00	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-reguler-Penguatan sistem kesehatan-LO	18.157.501.735,00	16.551.976.995,00	9,70
JUMLAH		35.123.482.574,00	113.708.772.524,00	(69,11)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pendapatan Transfer – Dana Alokasi Khusus dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan DAK Fisik Bidang Pendidikan – Reguler – paud – LO sebesar Rp685.354.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Fisik Bidang Pendidikan – Reguler – paud – LRA sebesar Rp685.354.000,00;
- b. Pendapatan DAK Fisik Bidang – Reguler – SD – LO sebesar Rp4.202.211.000,00 Sedangkan Pendapatan DAK Fisik Bidang – Reguler – SD – LRA sebesar Rp4.202.211.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Pendapatan DAK Fisik Bidang Pendidikan – Reguler – SMP - LO sebesar Rp4.310.921.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Fisik Bidang Pendidikan – Reguler – SMP - LRA sebesar Rp4.310.921.000,00;
- d. Pendapatan DAK Fisik Bidang Jalan – Reguler – LO sebesar Rp7.767.494.839,00 sedangkan Pendapatan DAK Fisik Bidang Jalan – Reguler – LRA sebesar Rp7.767.494.839,00; dan
- e. Pendapatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – Penguatan Sistem Kesehatan – LO sebesar Rp18.157.501.735,00 sedangkan Pendapatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – Penguatan Sistem Kesehatan – LRA sebesar Rp18.157.501.735,00.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2024 sebesar Rp104.646.516.660,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp107.865.914.021,00 atau mengalami penurunan sebesar (2,98%) terdiri dari:

Tabel 5.172
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	28.759.883.986,00	30.736.888.814,00	(6,43)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.395.000.000,00	1.665.000.000,00	(16,22)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	50.050.720.000,00	48.114.150.920,00	4,02
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.054.535.000,00	1.044.750.000,00	96,65
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.006.204.000,00	992.638.000,00	1,37
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	2.880.761.600,00	(100,00)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	918.910.000,00	(100,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	17.410.639.629,00	(100,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.278.106.658,00	3.349.988.708,00	27,71
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	389.506.950,00	500.511.350,00	(22,18)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	203.000.000,00	0,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	251.675.000,00	(100,00)
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.649.732.250,00	0,00	100,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOPS-BOP Kesatuan Reguler-LO	793.660.000,00	0,00	100,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	%
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	4.121.672.058,00	0,00	100,00
16	DAK NonFisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	8.854.495.758,00	0,00	100,00
JUMLAH		104.646.516.660,00	107.865.914.021,00	(2,98)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Pendapatan Transfer – Dana Alokasi Khusus Non Fisik dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan DAK Non Fisik – BOS Reguler – LO sebesar Rp28.759.883.986,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – BOS Reguler – LRA sebesar Rp28.759.883.986,00;
2. Pendapatan DAK Non Fisik – Bos Kinerja – LO sebesar Rp1.395.000.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Bos Kinerja – LRA sebesar Rp1.395.000.000,00;
3. Pendapatan DAK Non Fisik – TPG PNS – LO sebesar Rp50.050.720.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – TPG PNS – LRA sebesar Rp50.050.720.000,00;
4. Pendapatan DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD – LO sebesar Rp2.054.535.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD – LRA sebesar Rp2.054.535.000,00;
5. Pendapatan DAK Non Fisik – TKG PNSD – LO sebesar Rp1.006.204.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – TKG PNSD – LRA sebesar Rp1.006.204.000,00;
6. Pendapatan DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB – LO sebesar Rp4.278.106.658,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB – LRA sebesar Rp4.278.106.658,00;
7. Pendapatan DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal – LO sebesar Rp389.506.950,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal – LRA sebesar Rp389.506.950,00;
8. Pendapatan DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LO sebesar Rp203.000.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LRA sebesar Rp203.000.000,00;
9. Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOSP – Dana PAUD Reguler – LO sebesar Rp2.649.732.250,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOSP – Dana PAUD Reguler – LRA sebesar Rp2.649.732.250,00;
10. Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOSP – BOP Kesetaraan Reguler – LO sebesar Rp793.660.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOSP – BOP Kesetaraan Reguler – LRA sebesar Rp793.660.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

11. Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOSP – BOB Kesetaraan Kinerja – LO sebesar Rp90.000.000,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOSP – BOB Kesetaraan Kinerja – LRA sebesar Rp90.000.000,00;
12. Pendapatan DAK Non Fisik - Dana BOK – BOK Dinas – BOK kabupaten Kota – LO sebesar Rp4.121.672.058,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik - Dana BOK – BOK Dinas – BOK kabupaten Kota – LRA sebesar Rp4.121.672.058,00; dan
13. Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOK – BOK Puskesmas – LO sebesar Rp8.854.495.758,00 sedangkan Pendapatan DAK Non Fisik – Dana BOK – BOK Puskesmas – LRA sebesar Rp8.854.495.758,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp12.889.356.000,00 dan 2023 sebesar Rp14.914.122.000,00 atau mengalami penurunan 13,58%.

Pendapatan LO atas Dana Insentif Tahun 2024 realisasi pencairannya melalui KPPN yang di transfer langsung ke rekening desa sehingga pemerintah daerah tidak lagi mencatat sebagai pendapatan LO. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, BUD menyajikan pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa dalam laporan realisasi anggaran.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar Rp46.238.134.108,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp41.920.519.293,47 atau mengalami kenaikan 10,30%.

Tabel 5.173
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	6.003.592.810,00	5.441.253.306,30	10,33
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	5.725.250.597,00	4.553.345.383,60	25,74
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	20.952.844.304,00	20.520.743.279,90	2,11
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – Lo	272.204.343,00	198.574.827,67	37,08
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	13.284.242.054,00	11.206.602.496,00	18,54
JUMLAH		46.238.134.108,00	41.920.519.293,47	10,30

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan transfer provinsi dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan LO atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diakui sebesar Rp6.003.592.810,00 sedangkan Pendapatan LRA atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.046.475.447,00 atau terdapat selisih sebesar Rp957.117.363,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya setoran piutang Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp3.218.216.701,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp4.175.334.064,00 yang menambah nilai pendapatan LO;
2. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diakui sebesar Rp5.725.250.597,00 sedangkan Pengakuan Pendapatan LRA atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diakui sebesar Rp4.415.679.511,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.309.571.086,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya setoran piutang Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp2.727.925.190,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp4.037.496.276,00 yang menambah nilai pendapatan LO;
3. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diakui sebesar Rp20.952.844.304,00 sedangkan Pendapatan LRA atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diakui sebesar Rp19.111.264.078,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.841.580.226,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penyeteroran piutang Tahun 2023 yang mengurangi Pendapatan sebesar Rp12.249.146.588,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp14.090.726.814,00 yang menambah nilai pendapatan LO;
4. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) diakui sebesar Rp272.204.343,00 sedangkan Pendapatan LRA atas Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) diakui sebesar Rp216.954.792,00 atau terdapat selisih sebesar Rp55.249.551,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penyeteroran piutang Tahun 2023 yang mengurangi pendapatan LO sebesar Rp139.238.623,00 dan pengakuan piutang Tahun 2024 sebesar Rp194.488.174,00 yang menambah nilai pendapatan LO; dan
5. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Pajak Rokok diakui sebesar Rp13.284.242.054,00 dari jumlah pengakuan pendapatan tersebut yang terealisasi di Tahun 2024 sebesar Rp13.284.242.054,00 sedangkan Pendapatan LRA atas Pendapatan Pajak Rokok diakui sebesar Rp13.284.242.054,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp35.576.595.871,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp31.755.891.365,00 atau mengalami kenaikan sebesar 12,03% yang terdiri dari:

Tabel 5.174
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	25.959.270.896,00	21.763.333.510,00	19,28
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	706.342.883,00	1.545.417.157,00	(54,29)
3	Pendapatan Hibah dari Badan Lembaga/Lembaga/Organisasi dalam Negeri - LO	706.000.000,00	0,00	100,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	60.000.000,00	(100,00)
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO	8.204.982.092,00	8.387.140.698,00	(2,17)
	JUMLAH	35.576.595.871,00	31.755.891.365,00	12,03

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Lainnya – LO sebesar Rp25.959.270.896,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sedangkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Lainnya – LRA sebesar Rp0,00 atau terdapat selisih sebesar Rp25.959.270.896,00 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada:
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp15.104.950.000,00 yaitu Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR RI berdasarkan Dokumen Hibah No. 527.4/BA/BC/2024 dan No. 024/B.01/BKD/887/VII/2024 Tanggal 24 Juli Tahun 2024 berupa pembangunan TPA Kabupaten Bolaang Mongondow di Desa Inuai;
 - Hibah Barang Milik Negara pada Pengelola BMD sebesar Rp2.721.539.200,00 yang dihibahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 527.4/BA/DC/2024 dan No. 024/B.01/BKD/887/VII/2024 Tanggal 24 Juli Tahun 2024 atas instalasi air bersih; dan
 - Hibah Barang Milik Negara pada Dinas Pendidikan dari Kementerian PUPR RI berdasarkan dokumen hibah No. 527.4/BA/BC/2024 dan No. 024/B.02/BKD/887/VII/2024 tanggal 24 Juli Tahun 2024 sebesar Rp8.132.781.696,00 atas Pembangunan Ruang Kelas Belajar pada SDN 2 Tonom sebesar Rp3.990.363.393,00 dan SDN 2 Bolaang sebesar Rp4.142.418.303,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp706.342.883,00 sedangkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp0,00 atau terdapat selisih sebesar Rp706.342.883,00. Selisih tersebut merupakan hibah obat buffer dari Pemerintah Provinsi;
3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO sebesar Rp706.000.000,00 sedangkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LRA sebesar Rp0,00 atau terdapat selisih sebesar Rp706.000.000,00. Selisih tersebut merupakan Hibah CSR dari Bank SulutGo berdasarkan BAST No. 020a/BA-LLK/IV/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 berupa lampu jalan untuk penerangan jalan umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp294.137.000,00, sepeda motor roda 3 (tiga) pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp44.450.000,00 dan hibah barang yang diserahkan ke masyarakat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp367.413.000,00; dan
4. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO sebesar Rp8.204.982.092,00 merupakan pendapatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2024 sedangkan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LRA sebesar Rp8.204.982.092,00.

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar Rp959.080.703.396,10 dan Tahun 2023 sebesar Rp867.114.934.361,20 atau mengalami kenaikan sebesar 10,61%.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar Rp884.553.478.048,79 dan Tahun 2023 sebesar Rp804.448.935.361,20 mengalami kenaikan sebesar 9,96% dari tahun sebelumnya, beban operasi dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.175
Rincian Beban Operasi

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2024	2023	%
1	Beban Pegawai	465.637.665.924,00	411.700.345.933,00	13,10
2	Beban Persediaan	74.697.488.073,75	95.366.326.891,00	(21,67)
3	Beban Jasa	109.498.152.025,47	118.955.904.082,67	(7,95)
4	Beban Pemeliharaan	6.720.977.641,00	4.551.011.016,00	47,68
5	Beban Perjalanan Dinas	65.581.040.739,00	57.713.574.578,00	13,63



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	%
6	Beban Subsidi	0,00	211.500.000,00	(100,00)
7	Beban Hibah	80.195.067.747,00	41.588.850.633,00	92,83
8	Beban Bantuan Sosial	297.306.250,00	895.525.450,00	(66,80)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	81.276.996.824,23	73.011.274.947,67	11,32
10	Beban Penyisihan Piutang	648.782.824,34	454.621.829,86	42,71
JUMLAH		884.553.478.048,79	804.448.935.361,20	9.96

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Berikut uraian masing-masing akun beban:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp465.637.665.924,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp411.700.345.933,00 atau mengalami kenaikan 13,10% dari tahun anggaran sebelumnya. Rincian realisasi beban pegawai-LO Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.176
Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	252.586.373.353,00	209.312.136.587,00	20,67
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	21.289.100.827,00	18.374.644.341,00	15,86
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.356.234.800,00	6.081.504.070,00	(11,93)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.505.556.000,00	13.674.918.650,00	6,07
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.807.957.000,00	3.873.930.000,00	24,11
6	Beban Tunjangan Beras ASN	12.183.976.894,00	11.267.921.969,00	8,13
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	545.916.912,00	289.843.542,00	88,35
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.531.783,00	2.889.498,00	22,23
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.775.210.594,00	13.043.136.098,00	13,28
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	501.420.041,00	540.326.663,00	(7,20)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.504.254.664,00	1.476.611.122,00	1,87
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	64.479.988.633,00	58.944.111.185,00	9,39
13	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.049.062.500,00	0,00	100,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	425.424.927,00	519.005.205,00	(18,03)
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	27.344.992,00	24.322.263,00	12,43
16	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	50.116.914.200,00	53.123.547.820,00	(5,66)
17	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.141.403.800,00	861.335.700,00	32,52
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.007.875.000,00	1.092.125.000,00	83,85
19	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	299.593.628,00	0,00	100,00
20	Beban Honorarium	1.645.550.000,00	2.473.153.600,00	(33,46)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
21	Beban Jasa Pengelolaan BMD	1.169.397.500,00	1.155.750.000,00	1,18
22	Beban Uang Representasi DPRD	667.170.000,00	668.640.000,00	(0,22)
23	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	57.760.500,00	53.913.300,00	7,14
24	Beban Tunjangan Beras DPRD	71.840.640,00	68.002.380,00	5,64
25	Beban Uang Paket DPRD	57.120.000,00	57.267.000,00	(0,26)
26	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.041.877.200,00	1.056.706.350,00	(1,40)
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	11.357.850,00	13.154.400,00	(13,66)
28	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.255.400.000,00	2.255.400.000,00	0,00
29	Beban Tunjangan Reses DPRD	0,00	359.100.000,00	(100,00)
30	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	387.536,00	581.304,00	(33,33)
31	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.576.374.698,00	2.610.514.068,00	(1,31)
32	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.328.217.480,00	4.249.042.770,00	1,86
33	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	234.885.000,00	0,00	100,00
34	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	21.452.048,00	(100,00)
35	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	77.616.000,00	90.552.000,00	(14,29)
36	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
37	Beban Pegawai BOS	3.595.570.972,00	3.824.807.000,00	(5,99)
JUMLAH		465.637.665.924,00	411.700.345.933,00	13,10

Sumber data : SIPD RI (diolah)

Beban pegawai Tahun 2024 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Beban Gaji Pokok ASN LO sebesar Rp252.586.373.353,00 sedangkan belanja Gaji Pokok ASN LRA sebesar Rp.252.586.373.353,00;
2. Beban Tunjangan Keluarga ASN LO sebesar Rp21.289.100.827,00 sedangkan Belanja Tunjangan Keluarga ASN LRA sebesar Rp21.289.100.827,00;
3. Beban Tunjangan Jabatan ASN LO sebesar Rp5.356.234.800,00 sedangkan Belanja Tunjangan Jabatan ASN LRA sebesar Rp5.356.234.800,00;
4. Beban Tunjangan Fungsional ASN LO sebesar Rp14.505.556.000,00 sedangkan Belanja Tunjangan Fungsional ASN LRA sebesar Rp14.505.556.000,00;
5. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN LO sebesar Rp4.807.957.000,00 sedangkan Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN LRA sebesar Rp4.807.957.000,00;
6. Beban Tunjangan Beras ASN LO sebesar Rp12.183.976.894,00 sedangkan Belanja Tunjangan Beras ASN LRA sebesar Rp12.183.976.894,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

7. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp545.916.912,00 sedangkan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN LRA sebesar Rp545.916.912,00;
8. Beban pembulatan Gaji ASN LO sebesar Rp3.531.783,00 sedangkan Belanja Pembulatan Gaji ASN LRA sebesar Rp.3.531.783,00;
9. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN LO sebesar Rp.14.775.210.594,00 sedangkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN LRA sebesar Rp14.617.986.260,00 atau terdapat Selisih sebesar Rp157.224.334,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan utang Iuran Jaminan Kesehatan jasa medis 4% Tahun 2023;
10. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN LO sebesar Rp501.420.041,00 sedangkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN LRA sebesar Rp501.420.041,00;
11. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN LO sebesar Rp1.504.254.664,00 sedangkan Belanja Iuran Kematian ASN LRA sebesar Rp1.504.254.664,00;
12. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN LO sebesar Rp64.479.988.633,00 sedangkan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN LRA sebesar Rp64.479.988.633,00;
13. Beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN LO sebesar Rp1.049.062.500,00 sedangkan belanja penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN LRA sebesar Rp1.049.062.500,00;
14. Beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah LO sebesar Rp425.424.927,00 sedangkan belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah LRA sebesar Rp425.424.927,00;
15. Beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah LO sebesar Rp27.344.992,00 sedangkan belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah LRA sebesar 27.344.992,00;
16. Beban tunjangan profesi guru (TPG) PNSD LO sebesar Rp50.116.914.200,00 sedangkan belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD LRA sebesar 52.195.834.400,00 atau terdapat selisih terdapat selisih sebesar Rp2.078.925.200,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran utang tahun sebelumnya;
17. Beban tunjangan khusus guru (TKG) PNSD LO sebesar Rp1.141.403.800,00 sedangkan belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD LRA sebesar Rp1.026.074.200,00 atau terdapat selisih sebesar Rp115.329.600,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan utang beban tujangan khusus guru (TKG) Tahun 2023;
18. Beban tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD LO sebesar Rp2.007.875.000,00 sedangkan belanja tambahan penghasilan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- (Tamsil) guru PNSD LRA sebesar Rp2.055.250.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp47.375.000,00. Selisih tersebut disebabkan adanya pembayaran utang tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD tahun sebelumnya;
19. Beban jasa pelayan kesehatan bagi ASN LO sebesar Rp299.593.628,00 sedangkan belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN LRA sebesar Rp299.593.628,00;
 20. Beban honorarium LO sebesar Rp1.645.550.000,00 sedangkan belanja honorarium LRA sebesar Rp1.645.550.000,00;
 21. Beban jasa pengelolaan BMD LO sebesar Rp1.169.397.500,00 sedangkan belanja jasa pengelolaan BMD LRA sebesar Rp1.169.397.500,00;
 22. Beban uang representasi DPRD LO sebesar Rp667.170.000,00 sedangkan belanja uang representasi DPRD LRA sebesar Rp667.170.000,00;
 23. Beban tunjangan keluarga DPRD LO sebesar Rp57.760.500,00 sedangkan belanja tunjangan keluarga DPRD LRA sebesar Rp57.760.500,00;
 24. Beban tunjangan beras DPRD LO sebesar Rp71.840.640,00 sedangkan belanja tunjangan beras DPRD LRA sebesar Rp71.840.640,00;
 25. Beban uang paket DPRD LO sebesar Rp57.120.000,00 sedangkan belanja uang paket DPRD LRA sebesar Rp57.120.000,00;
 26. Beban tunjangan jabatan DPRD LO sebesar Rp1.041.877.200,00 sedangkan belanja tunjangan jabatan DPRD LRA sebesar Rp1.041.877.200,00;
 27. Beban tunjangan alat kelengkapan DPRD LO sebesar Rp11.357.850,00 sedangkan belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD LRA sebesar Rp11.357.850,00;
 28. Beban tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD LO sebesar Rp2.255.400.000,00 sedangkan belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD LRA sebesar Rp2.255.400.000,00;
 29. Beban pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD LO sebesar Rp387.536,00 sedangkan belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD LRA sebesar Rp387.536,00;
 30. Beban tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggotan DPRD LO sebesar Rp2.576.374.698,00 sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD LRA sebesar Rp2.576.374.698,00;
 31. Beban tunjangan transportasi DPRD LO sebesar Rp4.328.217.480,00 sedangkan belanja tunjangan transportasi DPRD LRA sebesar Rp4.328.217.480,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

32. Beban uang jasa pengabdian DPRD LO sebesar Rp234.885.000,00 sedangkan belanja uang jasa pengabdian DPRD LRA sebesar Rp234.885.000,00;
33. Beban dana oprasional pimpinan DPRD LO sebesar Rp77.616.000,00 sedangkan belanja dana operasional pimpinan DPRD LRA sebesar Rp77.616.000,00;
34. Beban dana operasional KDH/WKDH LO sebesar Rp240.000.000,00 sedangkan belanja dana operasional KDH/WKDH LRA sebesar Rp240.000.000,00; dan
35. Beban pegawai BOS LO sebesar Rp3.595.570.972,00 sedangkan belanja pegawai BOS LRA sebesar Rp3.595.570.972,00.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp74.697.488.073,75 dan Tahun 2023 sebesar Rp95.366.326.891,00 atau mengalami penurunan (21,67) dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.177
Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2022	(%)
1	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.391.390,00	37.067.750,00	81,81
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	562.521.120,00	485.552.162,00	15,85
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	278.321.321,00	4.974.413.174,00	(94,40)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	459.507.255,00	945.002.500,00	(51,38)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.474.500,00	0,00	100,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	30.000.000,00	0,00	100,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.250.000,00	140.240.000,00	(59,89)
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.304.474.474,00	3.197.804.391,00	3,34
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.959.223.024,00	2.107.279.978,00	(7,03)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	546.121.796,00	549.229.892,00	(0,57)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	28.640.000,00	(100,00)
12	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.285.051.594,00	2.807.468.886,00	17,01
13	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.540.000,00	0,00	100,00
14	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.833.161.757,00	3.580.012.981,00	(20,86)
15	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	235.650.000,00	208.796.846,00	12,86
16	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	28.174.400,00	(100,00)
17	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	100.119.253,00	(100,00)
18	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	434.042.688,00	354.045.475,00	22,60



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2022	(%)
19	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	273.036.611,00	195.213.266,00	39,87
20	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	149.200.000,00	9.540.000,00	146,39
21	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	908.547.094,00	572.225.290,00	58,77
22	Beban Obat-Obatan-Obat	6.276.607.398,00	8.238.938.507,00	(23,82)
23	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.844.857.096,75	11.057.257.329,00	(56,18)
24	Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	38.056.651.589,00	42.269.241.175,00	(8,61)
25	Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	327.270.603,00	3.235.437.740,00	(89,88)
26	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.027.620.800,00	4.239.855.200,00	(28,59)
27	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.128.109.338,00	3.235.426.056,00	(3,32)
28	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.030.900.625,00	915.439.450,00	121,85
29	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	441.000.000,00	0,00	100,00
30	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	145.000.000,00	74.625.000,00	94,30
31	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36.612.500,00	16.300.000,00	124,62
32	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	189.047.500,00	725.376.150,00	(73,94)
32	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	309.565.000,00	254.918.000,00	21,44
33	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	26.070.000,00	38.650.000,00	(32,55)
34	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.050.000,00	18.755.000,00	(14,42)
35	Beban Pakaian KORPRI	3.100.000,00	253.617.540,00	(98,78)
36	Beban Pakaian Adat Daerah	8.500.000,00	29.350.000,00	(71,04)
37	Beban Pakaian Batik Tradisional	97.720.000,00	94.250.000,00	3,68
38	Beban Pakaian Olahraga	85.340.000,00	348.063.500,00	(75,48)
39	Beban Pakaian Paskibraka	232.951.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		74.697.488.073,75	95.366.326.891,00	(21,37)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Beban persediaan Tahun 2024 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Beban bahan bangunan dan konstruksi LO sebesar Rp67.391.390,00 sedangkan belanja bahan bangunan dan konstruksi LRA sebesar Rp67.391.390,00;
2. Beban bahan-bahan kimia LO sebesar Rp562.521.120,00 sedangkan belanja bahan-bahan kimia LRA sebesar Rp.562.521.120,00;
3. Beban bahan-bahan bakar dan pelumas LO sebesar Rp278.321.321,00 sedangkan belanja bahan-bahan bakar dan pelumas LRA sebesar Rp278.321.321,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Beban bahan-bahan baku LO sebesar Rp459.507.255,00 sedangkan belanja bahan-bahan baku LRA sebesar Rp459.507.255,00;
5. Beban bahan-bahan / bibit tanaman LO sebesar Rp30.474.500,00 sedangkan belanja bahan-bahan / bibit tanaman LRA sebesar Rp30.474.500,00;
6. Beban bahan – isi tabung gas – LO sebesar Rp30.000.000,00 sedangkan belanja bahan – isi tabung gas – LRA sebesar Rp30.000.000,00;
7. Beban bahan-bahan / bibit ternak / bibit ikan LO sebesar Rp56.250.000,00 sedangkan belanja bahan-bahan / bibit ternak / bibit ikan LRA sebesar Rp56.250.000,00;
8. Beban bahan-bahan lainnya LO sebesar Rp3.304.474.474,00 sedangkan belanja bahan-bahan lainnya LRA sebesar Rp3.302.979.274,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.495.200,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambahan beban atas penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp5.249.400,00 dan pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp3.754.200,00;
9. Beban suku cadang – suku cadang alat angkutan LO sebesar Rp1.959.223.024,00 sedangkan belanja suku cadang – suku cadang alat angkutan LRA sebesar Rp1.959.223.024,00;
10. Beban suku cadang – suku cadang alat kedokteran LO sebesar Rp546.121.796,00 sedangkan belanja suku cadang – suku cadang alat kedokteran LRA sebesar Rp546.121.796,00;
11. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor LO sebesar Rp3.285.051.594,00 sedangkan belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor LRA sebesar Rp3.267.506.067,00 atau terdapat selisih sebesar Rp17.545.527,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambahan beban penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp33.158.142,00 dan pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp15.612.615,00;
12. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor – kertas dan cover LO sebesar Rp1.540.000,00 sedangkan belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – kertas dan cover LRA sebesar Rp1.540.000,00;
13. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak – LO sebesar Rp2.833.161.757,00 sedangkan belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak – LRA sebesar Rp2.525.546.195,00 atau terdapat selisih sebesar Rp307.615.562,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambahan beban penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp509.772.450,00 dan pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp202.156.888,00;
14. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor – benda pos – LO sebesar Rp235.650.000,00 sedangkan belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – benda pos – LRA sebesar Rp240.740.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- atau terdapat selisih sebesar Rp5.090.000,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambahan beban penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp120.000,00 dan pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp5.210.000,00;
15. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor - alat Listrik – LO sebesar Rp434.042.688,00 sedangkan belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - alat Listrik – LRA sebesar Rp433.050.188,00 atau terdapat selisih sebesar Rp992.500,00. Selisih tersebut merupakan penggunaan saldo awal persediaan tahun sebelumnya;
16. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor – perlengkapan dinas – LO sebesar Rp273.036.611,00 sedangkan belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – perlengkapan dinas – LRA sebesar Rp273.036.611,00;
17. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor – perlengkapan pendukung olah raga – LO sebesar Rp149.200.000,00 sedangkan belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – perlengkapan pendukung olah raga – LRA sebesar Rp149.200.000,00;
18. Beban alat / bahan untuk kegiatan kantor / bahan untuk kegiatan kantor lainnya – LO sebesar Rp908.547.094,00 sedangkan Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor / bahan untuk kegiatan kantor lainnya – LRA sebesar Rp660.202.116,00 atau terdapat selisih sebesar Rp248.344.978,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penambahan beban penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp4.759.430,00 dan pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp1.391.500,00 serta terdapat penambahan dari belanja modal aset tetap peralatan dan mesin atas barang yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap (*extrakomtable*) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp244.977.048,00;
19. Beban obat-obatan – LO sebesar Rp6.276.607.398,00 sedangkan Belanja obat-obatan – LRA sebesar Rp5.839.616.256,00 atau terdapat selisih Rp436.991.142,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penambahan beban penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp4.681.677.717,00 dan pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp9.357.526.472,00 serta pengurangan nilai beban obat-obatan atas pembayaran utang obat tahun sebelumnya sebesar Rp1.453.872.477,00 selain itu juga terdapat koreksi saldo awal persediaan Dinas Kesehatan yang menambah nilai beban sebesar Rp5.860.369.491,00 dan juga hibah beban persediaan obat *buffer* tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Dinas Kesehatan sebesar Rp706.342.883,00;
20. Beban obat-obatan – obat-obat lainnya – LO sebesar Rp4.844.857.096,75 sedangkan Belanja obat-obatan – obat-obat lainnya – LRA sebesar Rp4.766.891.428,75 atau terdapat selisih Rp77.965.668,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- penambahan beban penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp90.410.928,00 dan pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp12.445.260,00;
21. Beban barang untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat – LO sebesar Rp38.056.651.589,00 sedangkan Belanja barang untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat – LRA sebesar Rp30.295.383.079,00 atau terdapat selisih sebesar Rp7.761.268.510,00. Selisih tersebut disebabkan oleh:
- Penambahan beban penggunaan saldo awal persediaan sebesar Rp16.337.758.176,00;
 - Penambahan nilai beban dari hibah barang bersediaan dari CSR PT Bank Sulutgo pada Sekretaris Daerah sebesar Rp367.413.000,00;
 - Penambahan nilai beban yang berasal dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perikanan sebesar Rp24.530.000,00;
 - Reklasifikasi dari beban hibah pada Dinas Perumahan dan Permukiman atas Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha sebesar Rp600.000.000,00;
 - Pengurangan beban atas sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp3.431.065.000,00;
 - Pengurangan nilai beban karena adanya reklasifikasi beban persediaan ke beban bantuan sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp286.778.500,00;
 - Pengurangan nilai beban karena adanya reklasifikasi beban persediaan ke beban hibah pada Dinas Pendidikan atas barang yang dihibahkan ke sekolah swasta sebesar Rp5.782.185.824,00 dan pengurangan nilai; dan
 - Pengurangan nilai beban atas pengakuan utang barang diserahkan – Jalan Usaha Tani Desa Komangan pada Dinas Pertanian sebesar Rp68.403.342,00.
22. Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain – LO sebesar Rp327.270.603,00 sedangkan Belanja barang untuk dijual / diserahkan kepada pihak ketiga / pihak lain – LRA sebesar Rp1.390.666.833,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.063.396.230,00. Selisih tersebut disebabkan adanya pengurangan beban barang yang direklasifikasikan ke beban hibah atas pembangunan pagar Polsek Passi dan pagar Kejari Kotamobagu pada Badan Kesbangpol sebesar Rp1.390.666.833,00 dan penambahan beban barang yang berasal dari aset tetap atas barang yang diserahkan ke sekolah swasta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp327.270.603,00;
23. Beban makan minum rapat – LO sebesar Rp3.027.620.800,00 sedangkan belanja makan minum rapat – LRA sebesar Rp3.029.079.600,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.458.800,00 yang merupakan sisa persediaan makan minum rapat Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengurangi beban;
24. Beban makan dan minum jamuan tamu – LO sebesar Rp3.128.109.338,00 sedangkan Belanja makan dan minum jamuan tamu – LRA sebesar Rp3.128.109.338,00;
 25. Beban makanan dan minuman aktivitas lapangan – LO sebesar Rp2.030.900.625,00 sedangkan Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan – LRA sebesar Rp2.030.900.625,00;
 26. Beban pakaian dinas KDH dan WKDH – LO sebesar Rp441.000.000,00 sedangkan Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH – LRA sebesar Rp441.000.000,00;
 27. Beban pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD – LO sebesar Rp145.000.000,00 sedangkan Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD – LRA sebesar Rp145.000.000,00;
 28. Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) – LO sebesar Rp36.612.500,00 sedangkan Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) – LRA sebesar Rp36.612.500,00;
 29. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) – LO sebesar Rp189.047.500,00 sedangkan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) – LRA sebesar Rp189.047.500,00;
 30. Beban Pakaian Dinas Lengkap (PDL) – LO sebesar Rp309.565.000,00 sedangkan Belanja Pakaian Dinas Lengkap (PDL) – LRA sebesar Rp309.565.000,00;
 31. Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) – LO sebesar Rp26.070.000,00 sedangkan Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) – LRA sebesar Rp26.070.000,00;
 32. Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) – LO sebesar Rp16.050.000,00 sedangkan Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) – LRA sebesar Rp16.050.000,00;
 33. Beban Pakaian KORPRI – LO sebesar Rp3.100.000,00 sedangkan Beban Pakaian KORPRI – LRA sebesar Rp3.100.000,00;
 34. Beban Pakaian Adat Daerah – LO sebesar Rp8.500.000,00 sedangkan Belanja Pakaian Adat Daerah – LRA sebesar Rp8.500.000,00;
 35. Beban Pakaian Batik Tradisional – LO sebesar Rp97.720.000,00 sedangkan Belanja Pakaian Batik Tradisional – LRA sebesar Rp97.720.000,00;
 36. Beban Pakaian Olah Raga – LO sebesar Rp85.340.000,00 sedangkan Belanja Pakaian Olah Raga – LRA sebesar Rp85.340.000,00; dan
 37. Beban Pakaian Paskibraka – LO sebesar Rp232.951.000,00 sedangkan Belanja Pakaian Paskibraka – LRA sebesar Rp232.951.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp109.498.152.025,47 dan Tahun 2023 sebesar Rp118.955.904.082,67 atau mengalami penurunan 7,95% dari tahun anggaran sebelumnya. Rincian realisasi beban jasa – LO Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.178
Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	7.636.076,00	(100,00)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	165.750.000,00	0,00	100,00
3	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.641.268.600,00	2.681.450.875,00	(38,79)
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.280.960.000,00	1.896.370.000,00	20,28
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	99.000.000,00	225.000.000,00	(56,00)
6	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	536.000.000,00	2.047.600.000,00	(73,82)
7	Beban Honorarium Rohaniwan	250.000,00	4.168.300.000,00	(99,99)
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.400.000,00	106.881.250,00	(94,95)
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	397.600.000,00	410.700.000,00	(3,19)
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	5.400.000.000,00	4.804.000.000,00	12,41
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	18.614.853.075,00	21.475.854.058,00	(13,32)
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	40.000.000,00	63.480.500,00	(36,99)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	83.850.000,00	2.250.000,00	3.626,67
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	748.800.000,00	748.500.000,00	0,04
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	471.926.500,00	465.548.050,00	1,37
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	108.000.000,00	0,00	100,00
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	846.000.000,00	846.000.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	16.000.000,00	(100,00)
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000,00	18.000.000,00	6,67
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.082.511.949,00	5.847.339.033,00	(13,08)
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	187.000.000,00	194.100.000,00	(3,66)
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.714.760.000,00	3.642.125.000,00	56,91
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.376.105.604,00	2.370.700.000,00	0,23
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.503.866.667,00	3.382.438.025,00	3,59
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.422.600.000,00	3.319.200.000,00	3,12
26	Beban Jasa Tenaga Supir	3.742.811.900,00	3.802.600.000,00	(1,57)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	519.500.000,00	518.000.000,00	0,29
28	Beban Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	0,00	5.500.000,00	(100,00)
29	Beban Jasa Audit/Surveilnace ISO	0,00	22.200.000,00	(100,00)
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	75.100.000,00	88.700.000,00	(15,33)
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	244.950.000,00	210.303.400,00	16,47
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.950.000,00	38.043.218,00	(84,36)
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	407.000.000,00	144.473.600,00	181,71
34	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	9.840.000,00	(100,00)
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	217.250.000,00	197.213.939,00	10,16
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	323.235.739,00	238.357.654,00	35,61
37	Beban Jasa Kalibrasi	28.412.000,00	153.090.000,00	(81,44)
38	Beban Jasa Penegelola Sampah	56.332.500,00	132.700.500,00	(57,55)
39	Beban Tagihan Telepon	961.400,00	1.113.800,00	(13,68)
40	Beban Tagihan Air	21.831.272,00	12.350.000,00	76,77
41	Beban Tagihan Listrik	6.469.445.840,00	6.637.435.309,00	(2,53)
42	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.438.408.000,00	3.784.464.000,00	17,28
43	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.708.341.790,00	1.929.093.454,00	40,39
44	Beban Penambahan Daya	27.643.432,00	0,00	100,00
45	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	217.011.900,00	223.952.445,00	(3,10)
46	Beban Medical Check Up	2.801.400,00	195.000.000,00	(98,56)
47	Bebanb Jasa Pelayan Kesehatan bagi Non ASN	80.949.380,00	0,00	100,00
48	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.885.204.600,00	2.877.634.200,00	0,26
49	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi TBI	3.672.579.115,00	4.267.921.285,00	(13,95)
50	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas3	636.955.200,00	781.124.400,00	(18,46)
51	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	145.518.960,00	707.337.110,00	(79,43)
52	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	181.898.700,00	533.529.188,00	(65,91)
53	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	589.484.147,00	0,00	100,00
54	Beban luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	439.776.882,00	0,00	100,00
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	61.800.000,00	78.620.000,00	(21,39)
56	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.550.000,00	34.050.000,00	(71,95)
57	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.000.000,00	5.550.000,00	(9,91)
58	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	218.839.450,00	268.548.500,00	(18,51)
59	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	12.912.500,00	(61,28)
60	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	404.593.224,00	0,00	100,00
61	Beban Sewa Peralatan Umum	54.748.600,00	153.000.000,00	(64,22)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
62	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	341.249.658,47	294.687.500,67	15,80
63	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	29.442.000,00	29.442.000,00	0,00
64	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.016.502.000,00	3.113.263.250,00	(3,11)
65	Beban Sewa Hotel	934.390.000,00	177.944.500,00	425,10
66	Beban Sewa Naskah	0,00	25.000.000,00	(100,00)
67	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud – Aset Tidak Berwujud Lainnya	26.640.000,00	0,00	100,00
68	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	40.870.000,00	(100,00)
69	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	46.762.600,00	(100,00)
70	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	97.800.000,00	(100,00)
71	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	20.313.000,00	(100,00)
72	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	234.164.000,00	(100,00)
73	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	93.340.028,00	(100,00)
74	Beban Jasa Konsultansi Spesiali-Jasa Pembuatan Peta	0,00	500.000.000,00	(100,00)
75	Beban Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	83.559.024,00	99.375.636,00	(15,92)
76	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	504.652.146,00	144.428.000,00	249,91
77	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	10.000.000,00	(100,00)
78	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	25.000.000,00	300,00
79	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	(100,00)
80	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.546.128.000,00	476.555.470,00	224,44
81	Beban Bimbingan Teknis	656.833.000,00	1.909.900.000,00	(65,61)
82	Beban Diklat Kepemimpinan	147.890.000,00	153.835.000,00	(3,86)
83	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	94.000.000,00	96.000.000,00	(2,08)
84	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	1.772.585.000,00	(100,00)
85	Beban Beban Siswa	0,00	50.000.000,00	(100,00)
86	Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat	748.850.000,00	338.906.700,00	120,97
87	Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	500.000.000,00	0,00	100,00
88	Beban Barang dan Jasa BOS	20.112.628.371,00	22.401.600.029,00	(10,21)
JUMLAH		109.498.152.025,47	118.955.904.082,67	(7,95)

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Jasa Tahun 2024 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

5. Beban jasa barang tak habis pakai – LO sebesar Rp165.750.000,00 sedangkan belanja jasa barang tak habis pakai – LRA sebesar Rp165.750.000,00;
6. Beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia – LO sebesar Rp1.641,268.600,00 sedangkan belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia – LRA sebesar Rp1.641,268.600,00;
7. Beban honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan – LO sebesar Rp2.280.960.000,00 sedangkan Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan – LRA sebesar Rp2.280.960.000,00;
8. Beban honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara – LO sebesar Rp99.000.000,00 sedangkan Belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara – LRA sebesar Rp99.000.000,00;
9. Beban honorarium pengukuhan dan pendampingan – LO sebesar Rp536.000.000,00 sedangkan Belanja honorarium penyukuhan dan pendampingan – LRA sebesar Rp536.000.000,00;
10. Beban honorarium rohaniawan – LO sebesar Rp250.000,00 sedangkan Belanja honorarium rohaniawan – LRA sebesar Rp250.000,00;
11. Beban honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan – LO Rp5.400.000,00 sedangkan Belanja honorarium rohaniawan – LRA sebesar Rp5.400.000,00;
12. Beban honorarium tim anggaran pemerintah daerah - LO Rp397.600.000,00 sedangkan Belanja honorarium tim anggaran pemerintah daerah - LRA Rp397.600.000,00;
13. Beban tenaga jasa pendidikan – LO sebesar Rp5.400.000.000,00 sedangkan belanja tenaga jasa pendidikan – LRA sebesar Rp5.400.000.000,00;
14. Beban jasa tenaga kesehatan – LO sebesar Rp18.614.853.075,00 sedangkan belanja jasa tenaga kesehatan – LRA sebesar Rp18.614.853.075,00;
15. Beban jasa tenaga laboratorium – LO sebesar Rp40.000.000,00 sedangkan belanja jasa tenaga laboratorium – LRA sebesar Rp40.000.000,00;
16. Beban jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum – LO sebesar Rp83.850.000,00 sedangkan belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum – LRA sebesar Rp83.850.000,00;
17. Beban jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat – LO sebesar Rp748.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- sedangkan belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat – LRA sebesar Rp748.800.000,00;
18. Beban jasa tenaga penanganan bencana – LO sebesar Rp471.926.500,00 sedangkan belanja jasa tenaga penanganan bencana – LRA sebesar Rp471.926.500,00;
 19. Beban jasa tenaga penanganan sosial – LO sebesar Rp108.000.000,00 sedangkan Belanja jasa tenaga penanganan sosial – LRA sebesar Rp108.000.000,00;
 20. Beban jasa tenaga sumber daya air – LO sebesar Rp846.000.000,00 sedangkan Belanja jasa tenaga sumber daya air – LRA sebesar Rp846.000.000,00;
 21. Beban jasa tenaga kesenian dan kebudayaan – LO sebesar Rp30.000.000,00 sedangkan belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan – LRA sebesar Rp30.000.000,00;
 22. Beban jasa tenaga administrasi – LO sebesar Rp5.082.511.949,00 sedangkan belanja jasa tenaga administrasi – LRA sebesar Rp5.082.511.949,00;
 23. Beban jasa tenaga operator komputer – LO sebesar Rp187.000.000,00 sedangkan belanja jasa tenaga operator komputer – LRA sebesar Rp187.000.000,00;
 24. Beban jasa tenaga pelayanan umum – sebesar - LO Rp5.714.760.000,00 sedangkan belanja jasa tenaga pelayanan umum – LRA sebesar Rp5.714.760.000,00;
 25. Beban jasa tenaga ahli - LO sebesar Rp2.376.105.604,00 sedangkan belanja jasa tenaga ahli - LRA sebesar Rp2.376.105.604,00;
 26. Beban jasa tenaga kebersihan – LO sebesar Rp3.503.866.667,00 sedangkan belanja jasa tenaga kebersihan – LRA sebesar Rp3.503.866.667,00;
 27. Beban jasa tenaga keamanan – LO sebesar Rp3.422.600.00,00 sedangkan Belanja jasa tenaga keamanan – LRA sebesar Rp3.422.600.00,00;
 28. Beban jasa tenaga supir – LO sebesar Rp3.742.811.900,00 sedangkan Belanja jasa tenaga supir – LRA sebesar Rp3.742.811.900,00;
 29. Beban jasa tenaga juru masak – LO sebesar Rp519.500.000,00 sedangkan belanja jasa tenaga juru masak – LRA sebesar Rp519.500.000,00;
 30. Beban jasa juri perlombaan/pertandingan – LO sebesar Rp75.100.000,00 sedangkan belanja jasa juri perlombaan/pertandingan – LRA sebesar Rp75.100.000,00;
 31. Beban jasa tenaga informasi dan teknologi – LO sebesar Rp244.950.000,00 sedangkan belanja jasa tenaga informasi dan teknologi – LRA sebesar Rp244.950.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

32. Beban jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik – LO sebesar Rp5.950.000,00 sedangkan belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik – LRA sebesar Rp5.950.000,00;
33. Beban jasa pelaksanaan transaksi keuangan – LO sebesar Rp407.000.000,00 sedangkan belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan – LRA sebesar Rp407.000.000,00;
34. Beban jasa penyelenggaraan acara – LO sebesar Rp217.250.000,00 sedangkan Belanja jasa penyelenggaraan acara – LRA sebesar Rp217.250.000,00;
35. Beban jasa kontribusi asosiasi – LO sebesar Rp323.235.739,00 sedangkan belanja jasa kontribusi asosiasi – LRA sebesar Rp323.235.739,00;
36. Beban jasa kalibrasi – LO sebesar Rp28.412.000,00 sedangkan belanja jasa kalibrasi – LRA sebesar Rp28.412.000,00;
37. Beban jasa pengelolah sampah – LO sebesar Rp56.332.500,00 sedangkan Belanja jasa pengelolah sampah – LRA sebesar Rp56.332.500,00;
38. Beban jasa tagihan telepon – LO sebesar Rp961.400,00 sedangkan belanja jasa tagihan telepon – LRA sebesar Rp961.400,00;
39. Beban tagihan air – LO sebesar Rp21.831.272,00 sedangkan belanja tagihan air – LRA sebesar Rp21.831.272,00;
40. Beban tagihan listrik – LO sebesar Rp6.469.445.840,00 sedangkan belanja tagihan listrik – LRA sebesar Rp6.469.445.840,00;
41. Beban langganan jurnal / surat kabar / majalah – LO sebesar Rp4.438.408.000,00 sedangkan belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah – LRA sebesar Rp4.438.408.000,00;
42. Beban kawat / faksimili / internet / TV berlangganan – LO sebesar Rp2.708.341.790,00 sedangkan belanja kawat / faksimili / internet / TV berlangganan – LRA sebesar Rp2.708.341.790,00;
43. Beban penambahan daya – LO sebesar Rp27.643.432,00 sedangkan belanja penambahan daya – LRA sebesar Rp27.643.432,00;
44. Beban pembayaran pajak, bea dan perizinan – LO sebesar Rp217.011.900,00 sedangkan belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan – LRA sebesar Rp217.011.900,00;
45. Beban *medical check up* – LO sebesar Rp2.801.400,00 sedangkan belanja *medical check up* – LRA sebesar Rp2.801.400,00;
46. Beban jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN – LO sebesar Rp80.949.380,00 sedangkan belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN – LRA sebesar Rp80.949.380,00;
47. Beban jaminan iuran kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa – LO sebesar Rp2.885.204.600,00 sedangkan belanja jaminan iuran kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa – LRA sebesar Rp2.885.204.600,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

48. Beban kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI – LO sebesar Rp3.672.579.115,00 sedangkan belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI – LRA sebesar Rp3.672.579.115,00;
49. Beban jaminan iuran kesehatan bagi peserta PBPU BP kelas 3 – LO sebesar Rp636.955.200,00 sedangkan belanja jamina iuran kesehatan bagi peserta PBPU BP kelas 3 – LRA sebesar Rp636.955.200,00;
50. Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN – LO sebesar Rp145.518.960,00 sedangkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN – LRA sebesar Rp145.518.960,00;
51. Beban iuran jaminan kematian bagi Non ASN – LO sebesar Rp181.898.700,00 sedangkan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN – LRA sebesar Rp181.898.700,00;
52. Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan – LO sebesar Rp589.484.147,00 sedangkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan – LRA sebesar Rp589.484.147,00;
53. Beban iuran jamina kematian bagi pekerja rentan – LO sebesar Rp439.776.882,00 sedangkan belanja iuran jaminan kematian bagi pekerja rentan – LRA sebesar Rp439.776.882,00;
54. Beban sewa kendaraan bermotor penumpang – LO sebesar Rp61.800.000,00 sedangkan belanja sewa kendaraan bermotor penumpang – LRA sebesar Rp61.800.000,00;
55. Beban sewa kendaraan bermotor angkutan barang – LO sebesar Rp9.550.000,00 sedangkan belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang – LRA sebesar Rp9.550.000,00;
56. Beban sewa kendaraan bermotor khusus – LO sebesar Rp5.000.000,00 sedangkan belanja sewa kendaraan bermotor khusus – LRA sebesar Rp5.000.000,00;
57. Beban sewa alat kantor lainnya – LO sebesar Rp218.839.450,00 sedangkan belanja sewa alat kantor lainnya – LRA sebesar Rp218.839.450,00;
58. Beban sewa peralatan studio audio – LO sebesar Rp5.000.000,00 sedangkan belanja sewa peralatan studio audio – LRA sebesar Rp5.000.000,00;
59. Beban sewa alat kesehatan umum lainnya – LO sebesar Rp404.593.224,00 sedangkan belanja sewa alat kesehatan umum lainnya – LRA sebesar Rp388.500.000,00 atau selisih sebesar Rp16.093.224,00. Selisih tersebut berasal dari koreksi belanja modal yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan berupa *thermometer digital* yang tersebar pada 18 puskesmas sehingga di catat sebagai beban sewa alat kesehatan umum lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

60. Beban sewa peralatan umum – LO sebesar Rp54.748.600,00 sedangkan belanja sewa peralatan umum – LRA sebesar Rp54.748.600,00;
61. Beban sewa gedung bangunan gedung kantor – LO sebesar Rp341.249.658,47 sedangkan belanja sewa gedung kantor bangunan gedung kantor – LRA sebesar Rp343.250.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp2.000.341,53. Selisih tersebut disebabkan adanya koreksi beban dibayar dimuka atas beban sewa gedung kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.251.024,59 dan Badan Penggulangan Bencana Daerah sebesar minus Rp3.251.366,12;
62. Beban sewa bangunan kesehatan – LO sebesar Rp29.442.000,00 sedangkan belanja sewa bangunan kesehatan – LRA sebesar Rp29.442.000,00;
63. Beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan – LO sebesar Rp3.016.502.000,00 sedangkan belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan – LRA sebesar Rp3.016.502.000,00;
64. Beban sewa hotel – LO sebesar Rp934.390.000,00 sedangkan belanja sewa hotel – LRA sebesar Rp934.390.000,00;
65. Beban sewa aset tidak berwujud – LO sebesar Rp26.640.000,00 sedangkan belanja sewa aset tidak berwujud – LRA sebesar Rp0,00 atau terdapat selisih sebesar Rp26.640.000,00. Selisih tersebut merupakan koreksi atas belanja modal aset lainnya yang tidak bisa di kategorikan sebagai aset tidak berwujud karena merupakan belanja sewa aplikasi PPDB *online* terhadap rekanan bersama teknologi unggul sesuai *invoice* nomor 009/INV/BTU/VIII/2024;
66. Beban jasa konsultasi lainnya – jasa konsultasi lingkungan – LO sebesar Rp.83.559.024,00 sedangkan belanja jasa konsultasi lainnya – jasa konsultasi lingkungan – LRA sebesar Rp.83.559.024,00;
67. Beban jasa konsultasi berorientasi layanan – jasa survey – LO sebesar Rp504.652.146,00 sedangkan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan – jasa survey – LRA sebesar Rp98.284.950,00 atau selisih sebesar Rp406.367.196,00. Selisih tersebut merupakan koreksi dari aset tetap JIJ yang didalamnya merupakan jasa survey jalan yang tidak menambah nilai aset tetap;
68. Beban beasiswa tugas belajar S2 – LO sebesar Rp100.000.000,00 sedangkan belanja beasiswa tugas belajar S2 – LRA sebesar Rp100.000.000,00;
69. Beban kursus singkat/pelatihan – LO sebesar Rp1.546.128.000,00 sedangkan belanja kursus singkat / pelatihan – LRA sebesar Rp1.546.128.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

70. Beban bimbingan teknis – LO sebesar Rp656.833.000,00 sedangkan belanja bimbingan teknis – LRA sebesar Rp656.833.000,00;
71. Beban diklat kepemimpinan – LO sebesar Rp147.890.000,00 sedangkan belanja diklat kepemimpinan – LRA sebesar Rp147.890.000,00;
72. Beban insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum – pelayanan pasar – LO sebesar Rp94.000.000,00 sedangkan belanja insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum – pelayanan pasar – LRA sebesar Rp94.000.000,00;
73. Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat – LO sebesar Rp748.850.000,00 sedangkan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat – LRA sebesar Rp748.850.000,00;
74. Beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat – LO sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat – LO sebesar Rp0,00 atau terdapat selisih sebesar Rp500.000.000,00. Selisih tersebut berasal dari reklasifikasi dari beban hibah pada kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
75. Beban barang dan jasa BOS – LO sebesar Rp20.112.628.371,00 sedangkan belanja barang dan jasa BOS – LRA sebesar Rp20.558.091.871,00 atau terdapat selisih sebesar Rp445.463.500,00. Selisih tersebut berasal dari koreksi atas beban barang dan jasa BOS yang didalamnya terdapat buku sehingga di koreksi menambah aset tetap lainnya.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp6.720.977.641,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp4.551.011.016,00 atau mengalami kenaikan 47,68% dari tahun anggaran sebelumnya. Rincian realisasi beban Pemeliharaan – LO Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.179
Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	10.864.208,00	8.400.000,00	29,34
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.069.828.204,00	1.832.205.516,00	231,29
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151.952.684,00	693.105.500,00	(78,08)
4	Beban Pemeliharaan jalan, Irigasi dan Jaringan	488.332.545,00	2.017.300.000,00	(6,68)
5	Beban Pemeliharaan Aset tidak berwujud	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
	JUMLAH	6.720.977.641,00	4.551.011.016,00	47,68

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Beban Pemeliharaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Beban Pemeliharaan Tanah

Beban pemeliharaan tanah LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp10.864.208,00 sedangkan belanja pemeliharaan tanah LRA sebesar Rp10.864.208,00 dan Tahun 2023 Rp8.400.000,00 mengalami kenaikan 29,34%;

2) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.069.828.204,00 sedangkan belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin LRA sebesar Rp6.069.828.204,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.832.205.516,00 atau mengalami kenaikan 231,29%. Rincian realisasi beban pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.115.115.269,00	744.170.160,00	452,98
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan -alat angkutan darat bermotor penumpang	754.943.155,00	0,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	44.000.000,00	44.355.600,00	(0,80)
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.590.000,00	0,00	100,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	486.230.900,00	465.934.890,00	4,36
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.200.000,00	0,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	10.357.640,00	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	627.871.880,00	533.487.226,00	17,69
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.172.000,00	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	9.705.000,00	33.900.000,00	(71,37)
JUMLAH		6.069.828.204,00	1.832.205.516,00	231,29

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

3) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp151.952.684,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp340.756.255,00 atau selisih sebesar Rp188.803.571,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya beban pemeliharaan gedung dan bangunan yang menambah nilai aset tetap pada Inspektorat Daerah sebesar Rp.188.803.571,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp693.105.500,00 mengalami penurunan sebesar 78,08%.

4) Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp488.332.545,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp1.882.453.499,00 atau selisih sebesar Rp1.394.120.954,00 yang disebabkan oleh adanya mutasi kurang atas beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan yang di koreksi menambah nilai aset tetap JIJ pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5) Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Beban pemeliharaan aset tidak berwujud LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud LRA sebesar Rp84.500.000,00. Nilai pemeliharaan ini merupakan pemeliharaan aset tidak berwujud aplikasi *SmartGov* pada Badan Keuangan Daerah yang menambah nilai aplikasi tersebut sehingga dikeluarkan pada beban pemeliharaan aset tidak berwujud LO dan dicatat pada aset tidak berwujud Neraca.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas LO Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp65.581.040.739,00 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas LRA Rp65.581.040.739,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.713.574.578,00 atau mengalami kenaikan sebesar 13,63%.

Rincian beban perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel 5.181
Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	52.091.818.791,00	44.962.796.033,00	12,57
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap		0,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.489.221.948,00	12.750.778.545,00	5,79
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		0,00	(100,00)
JUMLAH		65.581.040.739,00	57.713.574.578,00	13,63

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

5.4.2.1.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi kepada BUMN Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp211.500.000,00;

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2024 adalah beban yang timbul akibat pemberian hibah dalam bentuk barang maupun uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan. Beban hibah LO Tahun 2024 Rp80.195.067.747,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp41.588.850.633,00 atau mengalami kenaikan 92,83% dari tahun sebelumnya secara rinci terdiri dari:

Tabel 5.182
Beban Hibah

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	58.968.451.800,00	11.756.113.600,00	401,60
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	15.770.756.936,00	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, dan Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	16.903.586.147,00	9.367.611.597,00	80,45
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	999.625.000,00	1.019.265.000,00	(1,93)
5	Beban Hibah Dana BOSP	3.323.404.800,00	3.675.103.500,00	(9,57)
JUMLAH		80.195.067.747,00	41.588.850.633,00	92,83

Sumber Data : SIPD RI (diolah)

1. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Beban hibah kepada pemerintah pusat LO Tahun 2024 sebesar Rp58.968.451.800,00 terdapat Jurnal Koreksi Hibah keluar Aset tetap Tanah yang hibahkan ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tahun 2023 sebesar Rp1.890.000 sementara Tahun 2023 sebesar Rp11.756.113.600,00 atau mengalami kenaikan 401,60% dari tahun sebelumnya;

2. Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya LO Tahun 2024 Rp 0,00 2023 sebesar Rp15.770.756.936,00 merupakan hibah aset tetap gedung sekolah yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.573.423.456,00 dan kepada



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp4.197.333.480,00;

3. Beban Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.

Beban Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia LO Tahun 2024 Rp16.903.586.147,00 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp8.772.427.163,00 terdapat selisih sebesar Rp8.131.158.984,00, yang disebabkan oleh:

Bertambah :

- Bertambah beban hibah dari hibah aset tetap pada Sekretariat Daerah ke POM TNI sebesar Rp214.400.000,00 atas kendaraan dinas roda empat DB 1185 D berdasarkan SK Bupati No. 388 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024;
- Bertambah beban hibah dari aset lain-lain JIJ pada Badan Keuangan Daerah atas barang yang diserahkan ke PDAM Bolaang Mongondow sebesar Rp2.011.555.650,00;
- Bertambah beban hibah dari hibah aset tetap tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp62.235.000,00 atas tanah jalan Mesjid Desa Poyuyan sebesar Rp11.500.000,00, tanah Jalan AKD - Nonapan 1 Desa Nonapan 1 sebesar Rp50.735.000,00;
- Bertambah beban hibah dari hibah aset tetap gedung pada Dinas Pendidikan atas laboratorium dan prasarana pada sekolah swasta sebesar Rp5.570.291.501,00;
- Bertambah beban hibah dari hibah aset tetap gedung pada Badan Kesbangpol atas pagar Polsek Passi dan pagar Kejari Kotamobagu sebesar Rp1.390.666.833,00;

Berkurang :

- Berkurang beban hibah atas beban yang dikategorikan sebagai beban persediaan barang diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Sebesar Rp1.100.000.000,00; dan
- Berkurang beban hibah atas belanja aset tetap peralatan dan mesin TK Negeri pada BOP Paud Tahun 2024 Sebesar Rp17.990.000,00;

Rincian Beban Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia LO Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.183
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Beban hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	10.730.513.984,00	2.198.280.760,00	388,13
2	Beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	140.060.000,00	0,00	100,00
3	Beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	5.783.012.163,00	6.989.330.837,00	(17,26)
4	Beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	250.000.000,00	180.000.000,00	38,89
	JUMLAH	16.903.586.147,00	9.367.611.597,00	80,45

Sumber data: SIPD RI (diolah)

4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2024 sebesar Rp999.625.000,00 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.019.265.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,93% dari tahun sebelumnya; dan

5. Beban Hibah Dana BOSP

Beban Hibah dana BOSP LO Tahun 2024 sebesar Rp3.323.404.800,00 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp3.675.103.500,00 mengalami penurunan sebesar 9,57% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Rincian beban hibah dana BOSP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.184
Beban Hibah Dana BOSP

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Beban Hibah SD Swasta	1.709.536.800,00	1.775.073.500,00	(3,69)
2	Beban Hibah SMP Swasta	1.613.868.000,00	1.900.030.000,00	(15,06)
	JUMLAH	3.323.404.800,00	3.675.103.500,00	9,57

Sumber data: SIPD RI (diolah)

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp297.306.250,00 sementara untuk Tahun 2023 sebesar Rp895.525.450,00 atau mengalami penurunan 66,80% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.185
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	10.527.750,00	625.497.900,00	(98,32)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	286.778.500,00	190.722.550,00	50,36
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	79.305.000,00	(100,00)
JUMLAH		297.306.250,00	895.525.450,00	(66,80)

sumber data : SIPD RI (diolah)

1. **Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu**

Beban bantuan sosial uang kepada individu Tahun 2024 sebesar Rp10.527.750,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp625.497.900,00 atau mengalami penurunan sebesar 98,32%;

2. **Beban Bantuan Sosial Uang Kepada kelompok Masyarakat**

Beban Bantuan sosial uang kepada kelompok Masyarakat LO Tahun 2024 sebesar Rp286.778.500,00; sedangkan pada LRA sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan karena adanya reklasifikasi dari beban persediaan barang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sebesar Rp272.849.000,00 dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp13.929.500,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp190.722.550,00 atau mengalami kenaikan sebesar 50,36% dari tahun sebelumnya; dan

3. **Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non pemerintahan (Bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)**

Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non pemerintahan (Bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp79.035.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp81.276.996.824,23 dan Tahun 2023 sebesar Rp73.011.274.947,67 atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.448.339.664,56 atau 11,32%. Beban penyusutan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.186
Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.271.196.400,23	36.570.454.970,67	10,12
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.345.765.905,00	11.178.046.709,00	46,23
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.512.240.019,00	25.049.297.008,00	(2,11)
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	147.794.500,00	213.476.260,00	(30,77)
JUMLAH		81.276.996.824,23	73.011.274.947,67	11,32

Sumber Data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Penyusutan peralatan dan mesin

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp40.271.196.400,23 dan Tahun 2023 sebesar Rp36.570.454.970,67 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 10,12%;

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban penyusutan Gedung dan bangunan LO Tahun 2024 Sebesar Rp16.345.765.905,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp11.178.046.749,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 46,23%;

3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi LO Tahun 2024 Sebesar Rp24.512.240.019,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp25.049.297.008,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,11%; dan

4. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset tidak berwujud

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset tidak berwujud LO Tahun 2024 sebesar Rp147.764.500,00 dan tahun 2023 sebesar Rp213.476.260,00 mengalami penurunan sebesar 30,77%.

5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp648.782.824,34 dan Tahun 2023 sebesar Rp454.621.829,86 atau mengalami kenaikan sebesar Rp194.160.994,48 atau 42,71%. Beban penyusutan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.187
Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	218.228.145,64	344.465.209,36	(36,65)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	300.748.373,50	13.172.492,00	2,183,15



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.316.079,20	0,00	100,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	5.311.492,50	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	112.490.226,00	91.672.636,00	22,71
	JUMLAH	648.782.824,34	454.621.829,86	(42,71)

Sumber Data : Aplikasi SIPD RI (diolah)

Beban penyisihan piutang tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**
Beban Penyisihan piutang pajak daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp218.228.145,64 dan Tahun 2023 sebesar Rp344.465.209,36 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 36,65%;
2. **Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp300.748.373,50 dan Tahun 2023 sebesar Rp13.172.492,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2.183,15%;
3. **Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO Tahun 2024 sebesar Rp17.316.079,20 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 100,00%; dan
4. **Beban Penyisihan Piutang Transfer antar Daerah**
Beban Penyisihan Piutang Transfer antar Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp112.490.226,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp.91.672.636,00 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 22,71%.

5.4.2.2 **Beban Transfer**

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp74.527.225.347,31 dan Tahun 2023 sebesar Rp62.665.999.000,00 atau mengalami kenaikan 18,93%. Beban transfer dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.188
Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO	5.790.020.356,31	5.155.999.000,00	12,30
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	68.737.204.991,00	57.510.000.000,00	19,52
	JUMLAH	74.527.225.347,31	62.665.999.000,00	18,93

Sumber data : Aplikasi SIPD RI (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban transfer tersebut di atas untuk Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp5.790.020.356,31 merupakan bagi hasil pajak yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan Tahun 2023 sebesar Rp5.155.999.000 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 12,30%; dan
2. Beban transfer bantuan keuangan ke desa LO sebesar Rp68.737.204.991,00 merupakan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) ke Pemerintah Desa termasuk Dana Keistimewaan (DKK) yang bersumber dari APBN untuk disalurkan kepada Pemerintah Desa sebagai entitas. Bila dibandingkan dengan LRA sebesar Rp225.401.304.012,00 maka terdapat selisih sebesar Rp156.556.803.000,00 yang disebabkan karena Dana Desa tidak dicatat di LO. Sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp57.510.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 19,52%;

5.4.3 Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Defisit Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp45.000.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya surplus atas penjualan aset lain-lain yang nilai bukunya telah menjadi Rp0,00 atau nilai perolehan sama dengan nilai penyusutan.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp1.501.050.900,00 merupakan beban tak terduga sementara Tahun 2023 sebesar Rp9.293.016.063,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.791.965.163,00 atau mencapai 83,85%.

5.4.5 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Tahun 2024 sebesar minus Rp29.294.022.826,61 sementara Surplus/Defisit LO pada Tahun 2023 sebesar Rp87.785.858.887,22 atau penurunan sebesar minus Rp117.079.881.713,83 atau turun 133,37%. Surplus Defisit Tahun 2024 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional-LO dan Beban Operasional-LO dan Pos Luar Biasa-LO.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5 AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa Kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Kas Keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Penyajian Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 telah mengakomodir arus kas dari Bendahara JKN, BOK, BOP dan BOS didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 50 tahun 2019 dalam penyajian Laporan Arus Kas point 14 menyebutkan penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan dalam arus kas termasuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Termasuk dalam kriteria tersebut adalah Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya.

Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2024 dan 2023 terdiri dari :

Tabel 5.189
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Arus Kas	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Aktivitas Operasi	37.929.107.247,10	156.211.221.995,91
2	Aktivitas Investasi	(84.271.043.086,00)	(165.563.550.269,00)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	44.103.355,62	(94.017.405,00)
	Arus Kas Bersih	(46.297.832.483,28)	(9.446.345.678,09)

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Arus Kas Bersih TA. 2024 sebesar minus Rp46.297.832.483,28 terjadi penurunan sebesar Rp36.851.486.805,19 dibanding Arus Kas Bersih Tahun 2024 sebesar minus Rp9.446.345.678,09

Realisasi Kas bersih dapat dirinci sebagai berikut :

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.929.107.247,10 dan Tahun 2023 sebesar Rp156.211.221.995,91 atau terjadi penurunan 75,72% yang terdiri dari:

Tabel 5.190
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Arus Kas Masuk	1.059.959.317.566,16	1.090.213.356.842,91	(2,78)
2	Arus Kas Keluar	1.022.030.210.319,06	934.002.134.847,00	9,42
JUMLAH		37.929.107.247,10	156.211.221.995,91	(75,72)

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Saldo Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.929.107.247,10 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa harus mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.059.959.317.566,16 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.090.213.356.842,91 atau mengalami penurunan sebesar 2,78% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.191
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	41.777.573.317,00	48.618.898.979,00	(14,07)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	14.846.047.915,00	12.504.563.525,00	18,73
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA	3.878.205.042,00	2.882.571.278,10	34,54
4	Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	4.385.091.021,16	5.785.099.647,81	(24,20)
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	775.346.643.297,00	800.144.624.518,00	(3,10)
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	169.446.159.000,00	167.878.910.000,00	0,93
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	42.074.615.882,00	43.669.222.997,00	(3,65)
8	Bantuan Keuangan – LRA	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Hibah – LRA	0,00	342.325.200,00	(100,00)
10	Pendapatan Lainnya – LRA	8.204.982.092,00	8.387.140.698,00	(2,17)
JUMLAH		1.059.959.317.566,16	1.090.213.356.842,91	(2,78)

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.022.030.210.319,06 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp934.002.134.847,00 atau mengalami kenaikan sebesar 9,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.192
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)				
NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Belanja Pegawai	467.491.412.190,00	409.574.045.733,00	14,14
2	Belanja Barang dan Jasa	249.881.172.368,75	273.338.916.141,00	(8,58)
3	Belanja Subsidi	0,00	211.500.000,00	(100,00)
4	Belanja Hibah	72.062.018.763,00	25.058.344.460,00	187,58
5	Belanja Bantuan Sosial	10.527.750,00	895.525.450,00	(98,82)
6	Belanja Tak Terduga	1.501.050.900,00	9.293.016.063,00	(83,85)
7	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.790.020.356,31	5.155.999.000,00	12,30
8	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	225.294.007.991,00	210.474.788.000,00	7,04
JUMLAH		1.022.030.210.319,06	934.002.134.847,00	9,42

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2024 sebesar minus Rp84.271.043.086,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar minus Rp165.563.550.269,00 atau mengalami penurunan sebesar 49,10% yang terdiri dari:

Tabel 5.193
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)				
No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Arus Kas Masuk	45.000.000,00	55.886.400,00	(19,48)
2	Arus Kas Keluar	84.316.043.086,00	165.619.436.669,00	(49,09)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(84.271.043.086,00)	(165.563.550.269,00)	(49,10)

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Investasi Aset Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.886.400,00. Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Investasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Anggaran 2024 bersumber dari pendapatan hasil penjualan aset lain-lain peralatan mesin.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.316.043.086,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp165.619.436.669,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.194
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.409.856.633,00	41.255.703.219,00	(62,65)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.065.291.398,00	69.553.872.247,00	(48,15)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.905.538.055,00	51.822.906.987,00	(42,29)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.738.332.000,00	2.771.954.216,00	(1,21)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	197.025.000,00	215.000.000,00	(8,36)
7	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	84.316.043.086,00	165.619.436.669,00	(49,09)

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 mencerminkan bahwa selama Tahun 2024 tidak terdapat aktivitas pendanaan yang mempengaruhi kas. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.195
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan atau biasa juga disebut dengan Aktivitas Non Anggaran.

Saldo Arus Kas Bersih aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.103.355,62. Nilai tersebut mengalami kenaikan 146,91% apabila dibandingkan dengan Saldo Tahun Anggaran 2023 sebesar minus Rp1.401.398.682,00.

Tabel 5.196
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(%)
1	Arus Kas Masuk	64.146.871.045,67	58.317.848.645,00	10,00
2	Arus Kas Keluar	64.102.767.690,05	59.719.247.327,00	9,74
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitori	44.103.355,62	(1.401.398.682,00)	146,91

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas masuk dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.146.871.045,67 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.317.848.645,00 atau mengalami kenaikan 10,00%.

Arus Kas Masuk tersebut merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas transaksi belanja yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara BOSP dan Bendahara FKTP sebesar Rp64.146.871.045,67.

Jenis Potongan yang dipungut langsung dapat dirinci berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 5.197
Jenis Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	PENERIMAAN			
		BUD	BENDAHARA BOSP	BENDAHARA FKTP	TOTAL
1	Iuran Wajib Pegawai	10.310.262.013,00	0,00	39.722.007,10	10.349.984.020,10
2	Pajak Penghasilan Ps 21	14.515.940.009,00	10.106.283,00	238.885.989,45	14.764.932.281,45
3	Pajak Penghasilan Ps 22	766.427.176,00	0,00	32.677.943,78	799.105.119,78
4	Pajak Penghasilan Ps 23	384.962.539,00	18.849.031,00	1.006.700,00	404.818.270,00
5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.302.114.611,00	0,00	0,00	1.302.114.611,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	URAIAN	PENERIMAAN			
		BUD	BENDAHARA BOSP	BENDAHARA FKTP	TOTAL
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.112.859.606,00	868.294.914,62	149.271.854,72	14.130.426.375,34
7	Taspen	7.925.975.121,00	0,00	0,00	7.925.975.121,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	12.594.711.175,00	0,00	0,00	12.594.711.175,00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	468.701.519,00	0,00	0,00	468.701.519,00
10	Iuran Jaminan Kematian	1.406.102.553,00	0,00	0,00	1.406.102.553,00
	JUMLAH	62.788.056.322,00	897.250.228,62	461.564.495,05	64.146.871.045,67

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.102.767.690,05 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.411.866.050,00 atau mengalami kenaikan sebesar 9,74%. Nilai Arus Kas keluar Tahun 2024 merupakan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) selama tahun 2024 jumlah yang disetor oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara BOSP dan Bendahara FKTP

Rincian jenis setoran Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.198
Jenis Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	PENGELUARAN			
		BUD	BENDAHARA BOS	BENDAHARA FKTP	TOTAL
1	Iuran Wajib Pegawai	10.309.562.279,00	0,00	39.722.007,10	10.349.284.286,10
2	Pajak Penghasilan Ps 21	14.515.940.009,00	9.294.000,00	238.885.989,45	14.764.119.998,45
3	Pajak Penghasilan Ps 22	766.427.176,00	0,00	32.772.312,78	799.199.488,78
4	Pajak Penghasilan Ps 23	384.962.539,00	17.424.791,00	1.006.700,00	403.394.030,00
5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.302.114.611,00	0,00	0,00	1.302.114.611,00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.112.859.606,00	827.033.447,00	149.271.854,72	14.089.164.907,72
7	Taspen	7.925.975.121,00	0,00	0,00	7.925.975.121,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	12.594.711.175,00	0,00	0,00	12.594.711.175,00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	468.701.519,00	0,00	0,00	468.701.519,00
10	Iuran Jaminan Kematian	1.406.102.553,00	0,00	0,00	1.406.102.553,00
	JUMLAH	62.787.356.588,00	853.752.238,00	461.658.864,05	64.102.767.690,05

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.5 Kenaikan /(Penurunan) Kas

Kenaikan/Penurunan Kas pada Laporan Arus Kas merupakan selisih antara total Arus Kas Masuk dikurangi dengan Total Arus Kas Keluar dari seluruh aktivitas keuangan yang terdiri dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan serta Aktivitas Transitoris. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan Jumlah arus kas keluar lebih besar dibandingkan dengan jumlah arus kas masuk atau dengan kata lain kas bersih mengalami penurunan. Jumlah penurunan Kas Bersih sebesar minus Rp46.297.832.483,28 dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dari jumlah Kas Bersih per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp9.446.345.678,09 atau sebesar 390,11% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Total Arus Kas Masuk per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.124.151.188.611,83 berasal dari Arus Kas masuk pada Aktivitas Operasi sebesar Rp1.059.959.317.566,16 Aktivitas Investasi sebesar Rp45.000.000,00, Aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp64.146.871.045,67. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 2,13% dari Total Kas Masuk Tahun 2023 sebesar Rp1.148.587.091.887,91; dan
2. Total Arus Kas Keluar per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.170.449.021.095,11 berasal dari Arus Kas keluar pada Aktivitas Operasi sebesar Rp1.022.030.210.319,06, Aktivitas Investasi sebesar Rp84.316.043.086,00, Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp64.102.767.690,05 atau mengalami kenaikan sebesar 1,07% dari Total Kas Keluar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.158.033.437.566,00.

Perbandingan jumlah Arus Kas Masuk dan Jumlah Arus Kas Keluar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.199
Rekapitulasi Arus Kas Masuk Berdasarkan Aktivitas
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	37.929.107.247,10	156.211.221.995,91	(75,69)
Arus Kas Masuk	1.059.959.317.566,16	1.090.213.356.842,91	(2,78)
Arus Kas Keluar	1.022.030.210.319,06	934.002.134.847,00	9,42
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(84.271.043.086,00)	(165.563.550.269,00)	(49,10)
Arus Kas Masuk	45.000.000,00	55.886.400,00	(19,48)
Arus Kas Keluar	84.316.043.086,00	165.619.436.669,00	(49,09)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0,00	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	44.103.355,67	(94.017.405,00)	(146,91)
Arus Kas Masuk	64.146.871.045,67	58.317.848.645,00	10,00
Arus Kas Keluar	64.102.767.691,05	59.719.247.327,00	9,74
Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih	(46.297.832.483,28)	(9.446.345.678,09)	390,11
Arus Kas Masuk	1.124.151.188.611,83	1.148.587.091.887,91	(2,13)
Arus Kas Keluar	1.170.449.021.095,11	1.158.033.437.566,00	1,07

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.6 Koreksi Silpa

Koreksi Silpa periode 31 Desember 2024 sebesar minus Rp557.079,95 berasal dari koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS sebesar minus Rp1.824,05 dan koreksi Silpa atas Saldo awal dana JKN pada FKTP sebesar minus Rp558.904,00.

5.5.7 Saldo Akhir Kas – LAK

Saldo Akhir Kas periode 31 Desember 2024 sebesar Rp37.306.211.821,41 yang meliputi:

- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp33.640.976.672,49
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 4.410.000,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rp 95.518.613,25
- Saldo Akhir Kas Dana BOSP	Rp 343.133.769,67
- Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	Rp 3.194.215.366,00
- Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 27.957.400,00

Tabel 5.200

Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kenaikan / (Penurunan) Kas	(46.297.832.483,28)
Saldo Awal Kas	83.604.601.384,64
Koreksi Silpa	(557.079,95)
Saldo Akhir Kas	37.306.211.821,41

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2024 adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal menggambarkan ekuitas Neraca per 31 Desember 2023 yang menjadi ekuitas awal Tahun 2024. Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar Rp1.954.887.228.511,62.

5.6.2 Surplus/Defisit

Surplus/defisit LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar minus Rp29.294.022.826,61.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mempunyai pengaruh pada akun ekuitas akibat transaksi masa lalu sebesar minus Rp32.013.027.372,71, Dampak kumulatif tersebut merupakan koreksi ekuitas akibat kenaikan/penurunan nilai pembukuan tahun sebelumnya yang harus disesuaikan di tahun 2024 yang meliputi koreksi ekuitas nilai persediaan sebesar Rp5.860.369.491,00, koreksi ekuitas aset tetap sebesar Rp6.748.553.796,00, koreksi ekuitas piutang sebesar Rp94.139.872,53, koreksi ekuitas kewajiban sebesar minus Rp95.631.965,04, koreksi ekuitas aset lainnya sebesar minus Rp60.257.019.287,58, koreksi ekuitas kas sebesar Rp1.824,05, koreksi ekuitas investasi sebesar Rp2.158.904.884,00, koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp11.739.568.208,33 dan koreksi ekuitas akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp1.738.085.804,00. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp5.860.369.491,00 mengalami kenaikan 100,00% dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang dilakukan akibat adanya kurang catat persediaan obat pada Dinas Kesehatan Tahun 2023.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp6.748.553.796,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.889.725.436,00 atau naik 415,18%. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap merupakan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh adanya pencatatan aset tetap yang belum tercatat, penghapusan aset tetap dan mutasi aset tetap antar OPD. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap dilaksanakan karena :

- Koreksi saldo awal aset tetap sebesar Rp7.583.519.000,00;
- Pencatatan aset tetap yang belum dicatat sebesar Rp97.463.000,00;
- Hibah aset tetap tahun sebelumnya yang belum tercatat sebesar Rp2.197.836.500,00;
- Mutasi dari aset lain-lain sebesar Rp639.057.171,00;
- Aset tetap yang dihapuskan sebesar minus (Rp2.205.633.939,00); dan
- Aset tetap yang diserahkan ke desa sebesar minus (Rp1.563.687.936,00).

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas – Piutang

Koreksi Ekuitas – Piutang Tahun 2024 sebesar Rp94.139.872,53 mengalami penurunan sebesar Rp50.552.848,47 atau 17,92% dari Tahun 2023 sebesar Rp114.692.721,00. Koreksi Ekuitas – Piutang merupakan koreksi yang dilaksanakan karena adanya kesalahan pencatatan piutang tahun sebelumnya sebesar minus Rp45.232.634,47 dan kesalahan perhitungan penyisihan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp139.372.507,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas – Kewajiban

Koreksi Ekuitas – Kewajiban Tahun 2024 sebesar minus Rp95.631.965,04 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp12,09 atau mengalami penurunan sebesar minus Rp95.631.977,13 atau turun 791.000.637,97%. Koreksi Ekuitas – Kewajiban adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya kesalahan pencatatan nilai utang PFK tahun sebelumnya sebesar minus Rp558.904,00, koreksi utang belanja barang dan jasa sebesar Rp22.672 dan koreksi saldo awal pendapatan diterima dimuka sebesar minus Rp95.095.733,04.

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar minus Rp60.257.019.287,58 sedangkan Tahun 2023 sebesar minus Rp70.734.664.786,04 atau turun 14,81%. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Lainnya merupakan koreksi ekuitas yang dilaksanakan karena adanya penghapusan aset tetap lainnya.

5.6.3.6 Koreksi Ekuitas – Kas

Koreksi Ekuitas – Kas Tahun 2024 sebesar minus Rp1.824,05 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.307.381.277,00 atau turun sebesar Rp1.307.383.101,05 atau turun 100,00%. Koreksi ini dilaksanakan oleh karena adanya kesalahan pencatatan nilai awal Kas Dana BOSP.

5.6.3.7 Koreksi Ekuitas – Investasi

Koreksi Ekuitas – Investasi Tahun 2024 sebesar Rp2.158.904.884,00 dan Tahun 2023 sebesar minus Rp161.652.646,00 atau naik 1.435,52%. Koreksi Ekuitas – Investasi merupakan koreksi ekuitas yang dilaksanakan oleh adanya kenaikan nilai investasi pada PDAM yang dihitung berdasarkan metode ekuitas.

5.6.3.8 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp11.739.568.208,33 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.546.853.828,35 atau naik sebesar Rp8.192.714.379,98 atau naik 230,99%. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ini dilaksanakan karena adanya penghapusan aset tetap, mutasi aset tetap dan pencatatan aset tetap yang belum tercatat.

5.6.3.9 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp1.738.085.804,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar 100,00%. Koreksi ini dilaksanakan karena adanya reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Lain-Lain atas Aset Tidak Berwujud yang sudah melebihi 5 (lima) tahun atau nilai perolehannya sama dengan nilai amortisasinya.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp1.893.580.178.312,30 merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp1.954.887.228.511,62 Surplus/Defisit-LO sebesar minus Rp29.361.622.826,61 dan dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar sebesar minus Rp32.013.027.372,71.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Bolaang Mongondow dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Tahun 1959).

Letak Geografis Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada posisi $0^{\circ}5^{\circ}11,7''$ LU $0^{\circ}52^{\circ}14,9$ LU dan $124^{\circ}0,1' 26,4$ BT $124^{\circ}01' 30,2''$ BT, dan memiliki luas wilayah 4.083,94 Km² sebelum pemekaran. Setelah dimekarkan menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu.

Setelah Pemekaran Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow berpindah dari Kota Kotamobagu ke Kecamatan Lolak, Letak Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow setelah pemekaran terletak pada $0,40^{\circ}$ LU dan $1,34^{\circ}$ BT dengan dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Laut Sulawesi dan sebelah Utara dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Laut Sulawesi.

Jumlah Penduduk sampai dengan Tahun 2024 adalah berjumlah 252,6 ribu jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan, 200 Desa dan 2 Kelurahan. Sumber Penghasilan masyarakat yang dominan berasal dari Sektor Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan Laut dan Peternakan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 Asisten, 3 Orang staf ahli Bupati, 10 Bagian, 24 Dinas, 5 Badan, 1 Inspektorat, 2 Sekretariat, 15 Kecamatan, 200 Sangadi/Kepala Desa serta 2 Kepala Kelurahan dan 2 Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PD Gadasera.

Berkaitan dengan Perusahaan Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berstatus aktif hingga saat ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum, sementara untuk Perusahaan Daerah Gadasera yang bergerak dibidang perkebunan, sejak tahun 2012 tidak lagi beroperasi secara aktif dibuktikan dengan tidak adanya penyampaian dokumen laporan operasional kepada Pemerintah Daerah dan hingga saat ini masih dalam proses pengajuan untuk pembubaran dengan inventarisasi eks-PD.Gadasera berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2030.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, yaitu:

Tabel 6.1
Urusan Pemerintahan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
1	2	3
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Tata Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Sosial	Dinas Sosial
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
1.	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PP Dan perlindungan Anak
3.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
4.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
8.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
9.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan informatika (Persandian, Statistik)
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Dan UKM
11.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
12.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan (Kearsipan)
III	URUSAN PILIHAN	
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2.	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pertanian	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perkebunan
4.	Perindustrian	Dinas Perdagangan, Dan ESDM
IV.	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
1.	Administrasi Pemerintahan	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. BPBD 4. Kecamatan Bilalang 5. Kecamatan Bolaang Timur 6. Kecamatan Dumoga Utara 7. Kecamatan Dumoga Barat



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
1	2	3
		8. Kecamatan Dumoga Timur
		9. Kecamatan Lolak
		10. Kecamatan Poigar
		11. Kecamatan Sang Tombolang
		12. Kecamatan Lodayan
		13. Kecamatan Passi Timur
		14. Kecamatan Passi Barat
		15. Kecamatan Bolaang
		16. Kecamatan Dumoga Tenggara
		17. Kecamatan Dumoga Tengah
		18. Kecamatan Dumoga
2.	Pengawasan	Inspektorat Daerah
3.	Perencanaan	BAPPEDA
4.	Kuangan	1. Badan Keuangan Daerah
		2. Badan Keuangan Daerah (PPKD)
5.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

C. Perundang-Undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024.

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, terdapat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar pijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

D. Manajemen Pemerintahan

Susunan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah :

- Bupati : Yusra Alhabsyi, SE
- Wakil Bupati : Dony Lumenta
- Sekretaris Daerah : Abdullah Mokoginta, SE., M.Si
- Asisten I : Deker Rompas, SE., MM
- Asisten II : Renti Mokoginta, S.Pd, MAP (Plt)
- Asisten III : Dr. (HC). Ramlah, SE.M.Si

Para Pimpinan SKPD :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1	Dinas Pendidikan	Hj. Farida Mooduto, S.Pd.,MM
2	Dinas Kesehatan	Drs. Ketut Kolak. M.Kes
3	Rumah Sakit Umum Daerah	dr. Michael M. H. S. Karokaro
4	Dinas PU Dan Penataan Ruang	Soehendra Hamin, ST.,ME
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan	Yarlis Awaludin Hatam, ST.,ME
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Drs. Cristoffel Titov Kamasaan, MM
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Zulfadli Binol, SE.,MM
8	Dinas Sosial	Ernie CH. Mokoginta, SH
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ir. Sugih Arto Banteng,MT.
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Renti Mokoginta, S.Pd.,MAP
11	Dinas PP Dan Perlindungan Anak	Sumarni B. Bonde, SE.
12	Dinas Ketahanan Pangan	I Wayan Mudiya, S.Pd. M.MPd
13	Dinas Lingkungan Hidup	Yani Pudul, S. Kom (Plt)
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Irlansyah Mokodompit,SP
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan	Deker Rompas, SE, MM (Plt)
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Yulin Ester Papuling,SKM.,M.Kes.
17	Dinas Perhubungan	Achmad Yani Damopolii, SH
18	Dinas Komunikasi Dan Informasi	Ma'rif Mokodompit, S.Kom.
19	Dinas Koperasi Dan UKM	Ofir Ratu, S.Pd.
20	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Fyfiannie Ismayanty,SE.,M.Si.
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hj. Linda Mashoeri,SE
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Remon Yidala Ratoe, SP., MM
23	Dinas Perpustakaan (Kearsipan)	Syafruddin A. Mashanafi, S.Sos
24	Dinas Perikanan	Ir. Syahril Mokoagow, MM.
25	Dinas Pertanian	Tonny Susanto Toligaga, S.Pt.,MP
26	Dinas Perkebunan	Ir. Abdul Latif, M.Si
27	Dinas Perdagangan, Dan ESDM	Seriyanto, ST
28	Badan Keuangan Daerah	Drs. Ashari Sugeha
29	Sekretariat DPRD	Parman Ginano, S.Pi
30	Kecamatan Bilalang	Sitti S. Mokoginta, SP
31	Kecamatan Bolaang Timur	Supriadi Dilapanga, SE
32	Kecamatan Dumoga Utara	Junfi Komaling, SH
33	Kecamatan Dumoga Barat	Sukardi Bonde, S.Pd
34	Kecamatan Dumoga Timur	Maria Magdalena Untu, S.Pd
35	Kecamatan Lolak	Rapiah Dilapanga, SE (Plt)
36	Kecamatan Poigar	Alfina Sumenda, SIP.,MM
37	Kecamatan Sang Tombolang	Mansur Paputungan, S.Sos
38	Kecamatan Lolayan	Faisal Marthen Manoppo, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

39	Kecamatan Passi Timur	Irwan Sugeha, S.Sos
40	Kecamatan Passi Barat	Liem Ginoga, SP.,MM
41	Kecamatan Bolaang	Harry Damopolii, S.STP.
42	Kecamatan Dumoga Tenggara	Herwinda Rampan, S.IP
43	Kecamatan Dumoga Tengah	Heri Mokodompit, S.Pd
44	Kecamatan Dumoga	Sandri Willem Karundeng, S.Pd
45	Inspektorat Daerah	Rio A. Lombone, S.STP.,MH.
46	BAPPEDA	DR. Mutu Bulan Mokoginta, SE.,MSi
47	BKPP	Drs. Umarudin Raisji Ambah

E. Kewajiban dan Kontijensi

Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh entitas, dan wajib diungkapkan jika material. Pengungkapan kewajiban kontinjensi bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada pemangku kepentingan tentang potensi kewajiban yang mungkin timbul di masa depan.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2024:

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk Putusan Serta Merta, Nomor 184/Pdt.G/204/Pn/Kotamobagu tanggal 2024, perihal sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat yang didalamnya ada perusahaan juga sebagai tergugat di Desa Gogaluman Kec. Poigar dimana Pemkab Bolaang Mongondow sebagai turut tergugat I. Status gugatan berproses di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan tindaklanjutnya sudah selesai tahap mediasi para pihak tanggal 5 februari 2025, namun mediasi gagal sehingga proses berlanjut pada proses persidangan dan menunggu panggilan sidang;
2. Sebagai tergugat, Bui Damogalad, alamat Dusun Desa Motabang Kecamatan Lolak melalui Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu Nomor Putusan 134/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 24 Januari 2018. Objek sengketa adalah lahan kurang lebih 5.800 meter persegi saat ini digunakan sebagai lapangan Desa Motabang dan Gedung Sekolah Dasar SDN 1 Motabang dahulu disebut Sekolah Dasar Center Motabang, Amar Keputusan Menyatakan permohonan banding dari para pembanding semula tergugat II dan III menguatkan Putusan pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Januari 2018 pemerintah daerah lalah, Amar Keputusan Nomor 887 K.Pdt/2019 tanggal 2019 menyatakan permohonan menyatakan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi c.q Bupati Kabupaten Bolaang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan segera dipelajari lebih dalam, untuk menemukan bukti baru agar dapat mengajukan peninjauan kembali, selain itu juga Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menempuh



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

upaya damai dengan penggugat karena ada bangunan sekolah. (belum menemukan bukti baru agar dapat mengajukan peninjauan kembali, selain itu juga Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menempuh upaya damai dengan penggugat karena ada bangunan sekolah;

3. Permohonan Penyelesaian Pembayaran Kerugian PT. Rukun Jaya Mandiri tertanggal 25 November 2024, yang diwakili oleh Kantor hukum Pengacara Nusantara George Elkel dan Partners. Permohonan penyelesaian pembayaran kerugian pada 57 (lima puluh tujuh) Desa di kabupaten Bolaang Mongondow atas terpasangnya lampu PJU Solar Cell tahun 2018 dan 2019, tindaklanjut permasalahan sudah pernah dikoordinasikan dengan Dinas Pengelolaan Masyarakat Desa, Inspektorat dan Para Camat.

Sebelumnya PT. Rukun Jaya Mandiri menggugat 5 (lima) desa yaitu Desa Kanaan, Desa Apado, Desa Mopuya Selatan I, Desa Mobuya, dan Desa Tadoy I, namun gugatannya ditolak berdasarkan putusan keberatan nomor, 80/Pdt.G.S/2021/PN.Ktg, 81/Pdt.G.S/2021/PN.Ktg, 81/Pdt.G.S/2021/PN.Ktg, 83/Pdt.G.S/2021/PN.Ktg, 84/Pdt.G.S/2021/PN.Ktg; dan

4. Pada tahun 2024 RSUD Datoe Binangkang menganggarkan belanja obat dan BMHP sebesar Rp4.458.082.255,00 dan merealisasikan sebesar Rp4.446.389.799,00 atau 99,74% dari anggaran. Selain itu, pada Tahun 2024 RSUD Datoe Binangkang melakukan pengadaan obat dan BMHP di luar APBD TA 2024 dan belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.518.146.889,07.

Selain obat-obatan dan BMHP, pada tahun 2024 RSUD Datoe Binangkang juga melakukan pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Lainnya sebesar Rp898.127.445,00 di luar mekanisme APBD TA 2024. Diketahui atas kondisi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mencatat sebagai utang di Neraca per 31 Desember 2024 dengan total nilai sebesar Rp7.416.274.334,07 dan berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajiban kontinjensi ini terkait dengan kemungkinan kewajiban hukum atau finansial yang dapat timbul sebagai akibat dari transaksi tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total realisasi pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.060.004.317.566,16 atau 98,38% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.077.419.643.654,00;
2. Total realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp875.262.225.057,75 atau 94,14% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp929.724.924.591,00;
3. Total realisasi transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp231.084.028.347,31 atau 99,92% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp231.275.943.701,00;
4. Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.580.667.558,69 atau 100,00% dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp83.581.224.638,00;
5. Total realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 karena tidak adanya target penganggaran pada Tahun Anggaran 2024;
6. Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp931.242.731.469,49 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp964.193.809.311,42, mengalami penurunan sebesar Rp32.951.077.841,93 atau 3,42%;
7. Total beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp959.080.703.396,10 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp867.114.934.361,20 atau naik sebesar 10,61%;
8. Nilai aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.897.263.718.217,52 turun sebesar Rp63.149.843.449,10 atau 3,22% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.960.413.561.666,62.
9. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.683.539.905,22 menurun sebesar Rp1.842.793.249,78 atau 33,35% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.526.333.155,00; dan
10. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.893.580.178.312,30 menurun sebesar Rp61.307.050.199,32 atau 3,14% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.954.887.228.511,62.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2024 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta serta dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Pajak	2.247.099.368,00	49.332.416.853,00	45.483.562.092,00	6.095.954.129,00
2	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM	Piutang Retribusi	335.519.432,00	102.372.000,00	80.500.500,00	357.390.932,00
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Dana Bagi Hasil	18.334.527.102,47	46.238.134.108,00	42.074.615.882,47	22.498.045.328,00
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Lain - Lain	133.100.000,00	-	133.100.000,00	-
JUMLAH			21.050.245.902,47	95.672.922.961,00	87.771.778.474,47	28.951.390.389,00

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
JUMLAH			-	-

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun penyertaan Modal	Nama/Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Bentuk Penyertaan Modal(Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yg telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan Modal daerah tahun ini	Jumlah Modal yang diterima kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2023	Bank Sulut		Investasi jangka panjang	23.441.100.000,00	23.441.100.000,00	-	23.441.100.000,00	-	-	-	23.441.100.000,00
2	2023	PDAM	Perda No. 15 Tahun 2016	Investasi jangka panjang	59.119.620.627,00	59.119.620.627,00	2.011.555.650,00	61.131.176.277,00	-	2.011.555.650,00	-	61.131.176.277,00
J U M L A H					82.560.720.627,00	82.560.720.627,00	2.011.555.650,00	84.572.276.277,00	-	2.011.555.650,00	-	84.572.276.277,00

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan	202.754.953.185,48	47.179.836.807,98	4.567.703.930,13	245.367.086.063,33
A	Tanah	12.553.267.144,00	-	2.000.000,00	12.551.267.144,00
B	Peralatan dan mesin	61.045.097.556,11	6.828.613.114,00	1.778.371.338,00	66.095.339.332,11
C	Gedung Dan Bangunan	126.316.505.560,37	36.070.739.095,49	2.458.558.291,13	159.928.686.364,73
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	1.800.445.944,00	3.104.795.500,00	316.451.000,00	4.588.790.444,00
F	KDP	1.039.636.981,00	1.175.689.098,49	12.323.301,00	2.203.002.778,49
2	Dinas Kesehatan	236.044.265.600,35	20.995.367.422,00	3.544.022.095,84	253.495.610.926,51
A	Tanah	4.016.259.785,00	4.563.000,00	84.492.000,00	3.936.330.785,00
B	Peralatan dan mesin	101.256.226.670,00	4.168.604.543,00	2.674.653.940,00	102.750.177.273,00
C	Gedung Dan Bangunan	120.483.749.289,00	7.737.390.233,00	739.537.582,84	127.481.601.939,16
D	JIJ	10.249.069.440,00	9.084.809.646,00	6.378.156,65	19.327.500.929,35
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	38.960.416,35	-	38.960.416,35	(0,00)
3	RSU Datoe Binangkang	142.823.283.563,45	2.829.503.563,00	1.718.726.000,00	143.934.061.126,45
A	Tanah	2.160.000.000,00	-	-	2.160.000.000,00
B	Peralatan dan mesin	90.325.806.735,45	2.250.264.000,00	1.644.435.500,00	90.931.635.235,45
C	Gedung Dan Bangunan	45.710.301.875,00	579.239.563,00	-	46.289.541.438,00
D	JIJ	4.552.884.453,00	-	-	4.552.884.453,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	74.290.500,00	-	74.290.500,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	971.178.901.162,27	36.353.126.996,32	49.993.337.708,75	957.538.690.449,84
A	Tanah	24.303.577.838,75	-	62.235.000,00	24.241.342.838,75
B	Peralatan dan mesin	2.811.700.694,00	197.969.000,00	131.976.327,00	2.877.693.367,00

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
C	Gedung Dan Bangunan	13.416.740.565,00	-	-	13.416.740.565,00
D	JIJ	926.164.766.654,52	26.765.639.838,66	45.761.110.971,75	907.169.295.521,43
E	Aset Tetap Lainnya	444.100.000,00	-	-	444.100.000,00
F	KDP	4.038.015.410,00	9.389.518.157,66	4.038.015.410,00	9.389.518.157,66
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.988.161.100,00	316.137.000,00	69.063.500,00	10.235.234.600,00
A	Tanah	280.830.500,00	-	-	280.830.500,00
B	Peralatan dan mesin	971.469.600,00	22.000.000,00	69.063.500,00	924.406.100,00
C	Gedung Dan Bangunan	4.931.110.000,00	-	-	4.931.110.000,00
D	JIJ	3.804.751.000,00	294.137.000,00	-	4.098.888.000,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	725.683.206,00	-	194.029.130,00	531.654.076,00
A	Tanah	73.295.280,00	-	-	73.295.280,00
B	Peralatan dan mesin	601.712.796,00	-	143.354.000,00	458.358.796,00
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	50.675.130,00	-	50.675.130,00	-
7	Dinas Satpol PP	6.736.220.500,00	181.818.260,00	74.684.130,00	6.843.354.630,00
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin	6.736.220.500,00	32.450.000,00	-	6.768.670.500,00
C	Gedung Dan Bangunan	-	74.684.130,00	74.684.130,00	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	74.684.130,00	-	74.684.130,00
8	Dinas Sosial	5.338.918.342,00	76.060.000,00	63.683.100,00	5.351.295.242,00
A	Tanah	1.861.400.000,00	-	-	1.861.400.000,00
B	Peralatan dan mesin	1.432.707.800,00	76.060.000,00	63.683.100,00	1.445.084.700,00
C	Gedung Dan Bangunan	2.044.810.542,00	-	-	2.044.810.542,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
9	BPBD	49.913.053.176,00	-	120.441.408,00	49.792.611.768,00
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin	2.563.480.672,00	-	70.837.408,00	2.492.643.264,00
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	47.299.968.504,00	-	-	47.299.968.504,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
F	KDP	49.604.000,00	-	49.604.000,00	-
10	Dinas Tenaga Kerja	816.770.431,00	21.050.000,00	109.844.000,00	727.976.431,00
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin	767.490.431,00	21.050.000,00	60.564.000,00	727.976.431,00
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	49.280.000,00	-	49.280.000,00	-
11	Dinas PP dan Perlindungan Anak	961.769.900,00	-	31.329.800,00	930.440.100,00
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin	961.769.900,00	-	31.329.800,00	930.440.100,00
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.422.480.634,00	15.185.000,00	188.061.800,00	2.249.603.834,00
A	Tanah	1.074.200.000,00	-	-	1.074.200.000,00
B	Peralatan dan mesin	605.015.089,00	15.185.000,00	188.061.800,00	432.138.289,00
C	Gedung Dan Bangunan	743.265.545,00	-	-	743.265.545,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	11.063.942.113,00	17.347.236.500,00	656.906.241,00	27.754.272.372,00
A	Tanah	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
B	Peralatan dan mesin	3.467.310.796,00	2.242.286.500,00	656.906.241,00	5.052.691.055,00
C	Gedung Dan Bangunan	3.323.251.005,00	15.104.950.000,00	-	18.428.201.005,00
D	JIJ	4.267.980.312,00	-	-	4.267.980.312,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.880.525.557,00	769.657.171,00	23.724.250,00	4.626.458.478,00
A	Tanah	164.000.000,00	-	-	164.000.000,00
B	Peralatan dan mesin	1.982.850.267,00	769.657.171,00	23.724.250,00	2.728.783.188,00
C	Gedung Dan Bangunan	1.733.675.290,00	-	-	1.733.675.290,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
15	Dinas PMD	577.805.552,00	197.480.000,00	10.400.000,00	764.885.552,00
A	Tanah	-	-	-	-

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
B	Peralatan dan mesin	577.805.552,00	197.480.000,00	10.400.000,00	764.885.552,00
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
16	Dinas PP dan KB	11.360.308.445,00	-	177.394.031,00	11.182.914.414,00
A	Tanah	302.890.875,00	-	-	302.890.875,00
B	Peralatan dan mesin	3.239.734.380,00	-	177.394.031,00	3.062.340.349,00
C	Gedung Dan Bangunan	7.817.683.190,00	-	-	7.817.683.190,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
17	Dinas Perhubungan	16.210.917.573,00	-	536.961.700,00	15.673.955.873,00
A	Tanah	948.785.000,00	-	15.000.000,00	933.785.000,00
B	Peralatan dan mesin	9.636.479.640,00	-	521.961.700,00	9.114.517.940,00
C	Gedung Dan Bangunan	5.132.778.933,00	-	-	5.132.778.933,00
D	JIJ	492.874.000,00	-	-	492.874.000,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
18	Dinas Kom Info	8.514.248.652,00	206.810.000,00	125.422.500,00	8.595.636.152,00
A	Tanah	222.958.000,00	-	-	222.958.000,00
B	Peralatan dan mesin	4.040.441.452,00	206.810.000,00	125.422.500,00	4.121.828.952,00
C	Gedung Dan Bangunan	3.577.892.275,00	-	-	3.577.892.275,00
D	JIJ	672.956.925,00	-	-	672.956.925,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
19	Dinas Koperasi dan UKM	470.809.831,00	-	87.760.275,00	383.049.556,00
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin	470.809.831,00	-	87.760.275,00	383.049.556,00
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.309.933.454,00	-	-	7.309.933.454,00
A	Tanah	205.000.000,00	-	-	205.000.000,00
B	Peralatan dan mesin	2.475.683.159,00	-	-	2.475.683.159,00
C	Gedung Dan Bangunan	4.495.877.217,00	-	-	4.495.877.217,00
D	JIJ	133.373.078,00	-	-	133.373.078,00

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.487.630.075,00	-	-	3.487.630.075,00
A	Tanah	325.540.000,00	-	-	325.540.000,00
B	Peralatan dan mesin	1.025.222.075,00	-	-	1.025.222.075,00
C	Gedung Dan Bangunan	2.136.868.000,00	-	-	2.136.868.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.835.662.815,00	9.000.000,00	26.551.336,00	9.818.111.479,00
A	Tanah	2.687.812.000,00	-	-	2.687.812.000,00
B	Peralatan dan mesin	757.699.690,00	9.000.000,00	26.551.336,00	740.148.354,00
C	Gedung Dan Bangunan	5.501.119.025,00	-	-	5.501.119.025,00
D	JIJ	889.032.100,00	-	-	889.032.100,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
23	Dinas Perpustakaan	12.026.001.859,00	-	8.600.000,00	12.017.401.859,00
A	Tanah	639.085.500,00	-	-	639.085.500,00
B	Peralatan dan mesin	1.206.796.634,00	-	8.600.000,00	1.198.196.634,00
C	Gedung Dan Bangunan	10.096.033.000,00	-	-	10.096.033.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	84.086.725,00	-	-	84.086.725,00
F	KDP	-	-	-	-
24	Dinas Perikanan	13.883.456.414,00	-	133.415.025,00	13.750.041.389,00
A	Tanah	1.175.361.000,00	-	-	1.175.361.000,00
B	Peralatan dan mesin	1.449.362.855,00	-	133.415.025,00	1.315.947.830,00
C	Gedung Dan Bangunan	3.751.567.577,00	-	-	3.751.567.577,00
D	JIJ	7.507.164.982,00	-	-	7.507.164.982,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	14.528.096.107,00	821.505.100,00	410.637.650,00	14.938.963.557,00
A	Tanah	3.564.585.287,00	-	-	3.564.585.287,00
B	Peralatan dan mesin	3.327.403.372,00	198.153.750,00	70.950.500,00	3.454.606.622,00
C	Gedung Dan Bangunan	6.827.363.448,00	356.092.950,00	339.687.150,00	6.843.769.248,00
D	JIJ	808.744.000,00	-	-	808.744.000,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	267.258.400,00	-	267.258.400,00
26	Dinas Perkebunan	1.516.728.346,00	-	29.684.375,00	1.487.043.971,00

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
A	Tanah	8.112.500,00	-	-	8.112.500,00
B	Peralatan dan mesin	973.249.305,00	-	29.684.375,00	943.564.930,00
C	Gedung Dan Bangunan	535.366.541,00	-	-	535.366.541,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
27	Dinas Perdagangan dan ESDM	54.253.246.400,38	-	92.427.000,00	54.160.819.400,38
A	Tanah	1.806.903.253,00	-	1.890.000,00	1.805.013.253,00
B	Peralatan dan mesin	7.130.501.639,00	-	90.537.000,00	7.039.964.639,00
C	Gedung Dan Bangunan	36.687.576.175,00	-	-	36.687.576.175,00
D	JIJ	1.690.057.653,00	-	-	1.690.057.653,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	6.938.207.680,38	-	-	6.938.207.680,38
28	DPRD	-	-	-	-
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin	-	-	-	-
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
29	KDH / WKDH	-	-	-	-
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin	-	-	-	-
C	Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
30	Sekretariat Daerah	78.473.517.532,00	8.461.004.000,00	829.040.067,00	86.105.481.465,00
A	Tanah	3.304.306.520,00	5.104.373.000,00	-	8.408.679.520,00
B	Peralatan dan mesin	15.666.872.448,00	510.185.000,00	829.040.067,00	15.348.017.381,00
C	Gedung Dan Bangunan	58.237.566.061,00	2.846.446.000,00	-	61.084.012.061,00
D	JIJ	1.264.772.503,00	-	-	1.264.772.503,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
31	Sekretriati DPRD	42.136.121.686,00	953.999.160,00	1.081.871.300,00	42.008.249.546,00
A	Tanah	1.008.600.000,00	-	-	1.008.600.000,00
B	Peralatan dan mesin	7.178.330.634,00	680.597.090,00	1.007.971.300,00	6.850.956.424,00
C	Gedung Dan Bangunan	33.949.191.052,00	199.502.070,00	-	34.148.693.122,00

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	73.900.000,00	73.900.000,00	-
F	KDP	-	-	-	-
32	Kecamatab Bilalang	1.035.598.397,00	-	8.300.000,00	1.027.298.397,00
A	Tanah	5.982.900,00	-	-	5.982.900,00
B	Peralatan dan mesin	461.351.497,00	-	8.300.000,00	453.051.497,00
C	Gedung Dan Bangunan	568.264.000,00	-	-	568.264.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
33	Kecamatan Bolaang Timur	1.157.388.237,00	-	12.254.583,00	1.145.133.654,00
A	Tanah	35.235.000,00	-	-	35.235.000,00
B	Peralatan dan mesin	488.361.237,00	-	12.254.583,00	476.106.654,00
C	Gedung Dan Bangunan	633.792.000,00	-	-	633.792.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
34	Kecamatan Dumoga Utara	871.783.468,00	-	13.000.000,00	858.783.468,00
A	Tanah	57.600.000,00	-	-	57.600.000,00
B	Peralatan dan mesin	537.777.768,00	-	13.000.000,00	524.777.768,00
C	Gedung Dan Bangunan	276.405.700,00	-	-	276.405.700,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
35	Kecamatan Dumoga Barat	899.826.686,00	-	14.685.496,00	885.141.190,00
A	Tanah	89.354.962,00	-	-	89.354.962,00
B	Peralatan dan mesin	448.626.724,00	-	14.685.496,00	433.941.228,00
C	Gedung Dan Bangunan	361.845.000,00	-	-	361.845.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
36	Kecamatan Dumoga Timur	3.715.208.538,00	199.893.950,00	26.911.520,00	3.888.190.968,00
A	Tanah	289.764.000,00	-	-	289.764.000,00
B	Peralatan dan mesin	590.672.566,00	-	26.911.520,00	563.761.046,00
C	Gedung Dan Bangunan	1.369.890.000,00	-	-	1.369.890.000,00
D	JIJ	1.464.881.972,00	199.893.950,00	-	1.664.775.922,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
37	Kecamatan Lolak	1.905.675.350,00	51.500.000,00	70.853.420,00	1.886.321.930,00
A	Tanah	347.831.000,00	-	-	347.831.000,00
B	Peralatan dan mesin	587.109.990,00	51.500.000,00	21.078.420,00	617.531.570,00
C	Gedung Dan Bangunan	920.959.360,00	-	-	920.959.360,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	49.775.000,00	-	49.775.000,00	-
38	Kecamatan Poigar	2.018.083.350,00	-	20.557.900,00	1.997.525.450,00
A	Tanah	136.149.000,00	-	-	136.149.000,00
B	Peralatan dan mesin	492.949.350,00	-	20.557.900,00	472.391.450,00
C	Gedung Dan Bangunan	1.388.985.000,00	-	-	1.388.985.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
39	Kecamatan Sangtombolang	1.296.038.968,00	-	18.930.200,00	1.277.108.768,00
A	Tanah	74.772.000,00	-	-	74.772.000,00
B	Peralatan dan mesin	547.422.968,00	-	18.930.200,00	528.492.768,00
C	Gedung Dan Bangunan	673.844.000,00	-	-	673.844.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
40	Kecamatan Lolayan	1.149.409.099,00	-	17.560.100,00	1.131.848.999,00
A	Tanah	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
B	Peralatan dan mesin	475.542.099,00	-	17.560.100,00	457.981.999,00
C	Gedung Dan Bangunan	663.867.000,00	-	-	663.867.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
41	Kecamatan Passi Timur	512.812.083,00	-	5.230.000,00	507.582.083,00
A	Tanah	32.057.100,00	-	-	32.057.100,00
B	Peralatan dan mesin	447.474.983,00	-	5.230.000,00	442.244.983,00
C	Gedung Dan Bangunan	33.280.000,00	-	-	33.280.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
42	Kecamatan Passi Barat	1.245.332.700,00	133.900.000,00	116.193.000,00	1.263.039.700,00
A	Tanah	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
B	Peralatan dan mesin	562.048.500,00	133.900.000,00	116.193.000,00	579.755.500,00

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
C	Gedung Dan Bangunan	673.284.200,00	-	-	673.284.200,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
43	Kecamatan Bolaang	3.349.158.050,00	192.191.309,00	28.845.000,00	3.512.504.359,00
A	Tanah	397.094.840,00	-	-	397.094.840,00
B	Peralatan dan mesin	595.857.660,00	-	28.845.000,00	567.012.660,00
C	Gedung Dan Bangunan	1.309.647.400,00	-	-	1.309.647.400,00
D	JIJ	1.046.558.150,00	192.191.309,00	-	1.238.749.459,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
44	Kecamatan Dumoga Tenggara	1.629.620.687,00	-	12.407.511,00	1.617.213.176,00
A	Tanah	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
B	Peralatan dan mesin	467.409.334,00	-	12.407.511,00	455.001.823,00
C	Gedung Dan Bangunan	1.154.711.353,00	-	-	1.154.711.353,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
45	Kecamatan Dumoga Tengah	1.962.314.058,00	-	7.313.900,00	1.955.000.158,00
A	Tanah	72.981.000,00	-	-	72.981.000,00
B	Peralatan dan mesin	498.029.058,00	-	7.313.900,00	490.715.158,00
C	Gedung Dan Bangunan	1.391.304.000,00	-	-	1.391.304.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
46	Kecamatan Dumoga	1.579.967.899,00	23.400.000,00	-	1.603.367.899,00
A	Tanah	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
B	Peralatan dan mesin	460.237.899,00	23.400.000,00	-	483.637.899,00
C	Gedung Dan Bangunan	999.730.000,00	-	-	999.730.000,00
D	JIJ	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
47	Inspektorat	6.752.959.859,00	1.095.203.571,00	159.425.590,00	7.688.737.840,00
A	Tanah	373.920.000,00	-	-	373.920.000,00
B	Peralatan dan mesin	2.911.686.683,00	906.400.000,00	159.425.590,00	3.658.661.093,00
C	Gedung Dan Bangunan	3.278.014.938,00	188.803.571,00	-	3.466.818.509,00
D	JIJ	189.338.238,00	-	-	189.338.238,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

NO	Nama SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
F	KDP	-	-	-	-
48	BAPEDA	12.335.248.643,00	76.750.000,00	152.651.874,00	12.259.346.769,00
A	Tanah	254.200.000,00	-	-	254.200.000,00
B	Peralatan dan mesin	3.221.651.643,00	76.750.000,00	152.651.874,00	3.145.749.769,00
C	Gedung Dan Bangunan	7.466.343.000,00	-	-	7.466.343.000,00
D	JIJ	54.827.000,00	-	-	54.827.000,00
E	Aset Tetap Lainnya	1.338.227.000,00	-	-	1.338.227.000,00
F	KDP	-	-	-	-
49	Badan Keuangan Daerah	9.104.334.550,00	64.300.000,00	59.405.500,00	9.109.229.050,00
A	Tanah	401.800.000,00	-	-	401.800.000,00
B	Peralatan dan mesin	4.808.881.150,00	64.300.000,00	59.405.500,00	4.813.775.650,00
C	Gedung Dan Bangunan	3.817.073.400,00	-	-	3.817.073.400,00
D	JIJ	76.580.000,00	-	-	76.580.000,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
50	BKPP	5.506.248.341,00	19.000.000,00	91.838.400,00	5.433.409.941,00
A	Tanah	934.800.000,00	-	-	934.800.000,00
B	Peralatan dan mesin	2.304.348.525,00	19.000.000,00	91.838.400,00	2.231.510.125,00
C	Gedung Dan Bangunan	2.217.297.866,00	-	-	2.217.297.866,00
D	JIJ	49.801.950,00	-	-	49.801.950,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
51	PENGELOLA BMD	10.222.032.466,00	3.979.832.100,00	1.689.965.438,00	12.511.899.128,00
A	Tanah	5.340.728.277,00	101.492.000,00	-	5.442.220.277,00
B	Peralatan dan mesin	3.783.348.939,00	1.156.800.900,00	1.689.965.438,00	3.250.184.401,00
C	Gedung Dan Bangunan	1.097.955.250,00	-	-	1.097.955.250,00
D	JIJ	-	2.721.539.200,00	-	2.721.539.200,00
E	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
F	KDP	-	-	-	-
	JUMLAH MUTASI KELUAR	1.987.482.454.640,93	142.570.747.910,30	67.432.051.784,72	2.062.621.150.766,51

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	Nilai Aset tetap Per 31 Desember 2023	MUTASI		Nilai Aset tetap Per 31 Desember 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Aset tetap Tanah	71.683.940.561,75	5.210.428.000,00	165.617.000,00	76.728.751.561,75
2	Aset tetap Peralatan dan Mesin	359.376.040.745,56	20.858.416.068,00	13.133.203.745,00	367.101.253.068,56
3	Aset tetap Gedung dan Bangunan	527.746.785.632,37	63.157.847.612,49	3.612.467.153,97	587.292.166.090,89
4	Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.012.680.382.914,52	39.258.210.943,66	45.767.489.128,40	1.006.171.104.729,78
5	Aset tetap lainnya	3.666.859.669,00	3.178.695.500,00	390.351.000,00	6.455.204.169,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	12.328.445.117,73	10.907.149.786,15	4.362.923.757,35	18.872.671.146,53
J U M L A H		1.987.482.454.640,93	142.570.747.910,30	67.432.051.784,72	2.062.621.150.766,51

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/P ENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	1.039.636.981,00		1.175.689.098,49				12.323.300,00			1,00	2.203.002.778,49
2	Dinas Kesehatan	38.960.416,35						38.960.416,35				-
3	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	74.290.500,00						74.290.500,00				-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.038.015.410,00			9.389.518.157,66				4.038.015.410,00			9.389.518.157,66
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.675.130,00						50.675.130,00				-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-		74.684.130,00								74.684.130,00
8	Dinas Sosial	-										-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.604.000,00						49.604.000,00				-
10	Badan Narkotika	-										-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.280.000,00						49.280.000,00				-
12	Dinas PP dan Perlindungan Anak	-										-
13	Dinas Ketahanan Pangan	-										-
14	Dinas Lingkungan Hidup	-										-
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-										-

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/P ENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-										-
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-										-
18	Dinas Perhubungan	-										-
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	-										-
20	Dinas Koperasi dan UKM	-										-
21	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-										-
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	-										-
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-										-
24	Dinas Perpustakaaaan (Kearsipan)	-										-
25	Dinas Perikanan	-										-
26	Dinas Pertanian	-		267.258.400,00								267.258.400,00
27	Dinas Perkebunan	-										-
28	Dinas Perdagangan dan ESDM (Perindustrian)	6.938.207.680,38										6.938.207.680,38
29	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-										-
30	KDH dan WKDH	-										-
31	Sekretariat Daerah	-										-
32	Sekretariat DPRD	-										-
33	Kecamatan Bilalang	-										-
34	Kecamatan Bolaang Timur	-										-
35	Kecamatan Dumoga Utara	-										-
36	Kecamatan Dumoga Barat	-										-

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/P ENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Kecamatan Dumoga Timur	-										-
38	Kecamatan Lolak	49.775.000,00						49.775.000,00				-
39	Kecamatan Poigar	-										-
40	Kecamatan Sang Tombolang	-										-
41	Kecamatan Lolayan	-										-
42	Kecamatan Passi Timur	-										-
43	Kecamatan Passi Barat	-										-
44	Kecamatan Bolaang	-										-
45	Dumoga Tenggara	-										-
46	Dumoga Tengah	-										-
47	Dumoga	-										-
48	Kecamaatan lainnya (Pemekaran)	-										-
49	Inspektorat Daerah	-										-
50	Bappeda	-										-
51	Badan Keuangan Daerah	-										-
52	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	-										-
J U M L A H		12.328.445.117,38	-	1.517.631.628,49	9.389.518.157,66	-	-	324.908.346,35	4.038.015.410,00	-	1,00	18.872.671.146,53

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2024
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAKA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			Anggaran	Realisasi	Tambah/Kurang			
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Badan Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.135.505.413,00	7.892.371.253,00	-243.134.160,00	97,01	157.224.334,00	
2	Dinas PUPR	Pelebaran Jalan Menuju Standar Tahun 2024	13.129.044.400,00	12.282.894.519,00	- 846.149.881,00	93,56	259.860.304,00	
3	Dinas PUPR	Pelebaran Jalan Menuju Standar Tahun 2023	49.036.594.000,00	42.291.496.410	- 6.745.097.590,00	86,24	495.360.949,66	
4	Dinas Kesehatan	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.156.833.745,00	4.658.683.817	- 498.149.928,00	90,34	495.683.475,00	
5	Dinas Pendidikan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.118.567.300,00	1.026.074.200	- 92.493.100,00	91,73	115.329.600,00	
6	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.281.772.700,00	7.275.805.554	- 1.005.967.146,00	87,85	63.973.129,00	
7	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.281.772.700,00	7.275.805.554	- 1.005.967.146,00	87,85	91.267.445,00	
8	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.281.772.700,00	7.275.805.554	- 1.005.967.146,00	87,85	62.520.216,95	
9	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.523.662.000,00	2.898.252.508	- 625.409.492,00	82,25	106.130.681,54	
10	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	914.322.000,00	243.111.686	- 671.210.314,00	26,59	45.698.542,16	
11	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.247.853.528,00	2.579.420.252	- 668.433.276,00	79,42	17.165.896,58	
13	RSUD Datoe Binangkang	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	173.091.500	173.091.500	-	100,00	173.091.500,00	
14	RSUD Datoe Binangkang	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.413.932.500	1.413.932.500	-	100,00	1.413.932.500,00	
15	RSUD Datoe Binangkang	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.474.500	41.474.500	-	100,00	41.474.500,00	
		JUMLAH					3.538.713.073,89	

Lolak, 29 Agustus 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN	73.559.068.955,03	1.113.820.758,64	- 41.221.077.383,39	33.451.812.330,28
2	DINAS KESEHATAN	7.136.942.711,00	945.615.636,84	- 4.024.386.424,86	4.058.171.922,98
3	RSUD	10.212.858.025,88	256.542.062,00	- 7.181.114.026,33	3.288.286.061,55
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	73.483.030.560,00	28.287.052.830,09	-	101.770.083.390,09
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.239.590,00	-	-	16.239.590,00
7	BADAN KESBANGPOL	5.384.000,00	50.675.130,00	- 5.384.000,00	50.675.130,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	- 93.805.952,00	57.609.046,00	-	(36.196.906,00)
9	DINAS SOSIAL	88.149.000,00	6.029.570,00	- 63.449.000,00	30.729.570,00
10	BADAN NARKOTIKA DAERAH	47.747.889,00	-	-	47.747.889,00
11	DIJNAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	574.456,00	52.833.305,00	-	53.407.761,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	685.208,00	-	-	685.208,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	20.224.989,00	-	-	20.224.989,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	769.671.052,00	-	- 48.305.052,00	721.366.000,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	145.262.538,00	-	- 93.093.940,00	52.168.598,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	282.775.850,00	-	-	282.775.850,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	156.223.072,00	14.361.564,00	-	170.584.636,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	3.853.145.480,00	155.876.456,00	-	4.009.021.936,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.859.000,00	18.823.655,00	(6.859.000,00)	18.823.655,00
20	DINAS KOPERASI	74.050.719,00	-	-	74.050.719,00
22	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	12.923.778,00	79.750.000,00	- 7.898.000,00	84.775.778,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	39.054.109,00	-	- 39.054.109,00	-
23	DINAS PERPUSTAKAAN	101.712.284,00	-	- 101.712.284,00	-
24	DINAS PERIKANAN	539.827.933,00	-	- 440.115.600,00	99.712.333,00
25	DINAS PARIWISATA	565.905.220,00	2,00	-	565.905.222,00
26	DINAS PERTANIAN	245.404.142,80	1.539.861,00	- 191.410.000,00	55.534.003,80
27	DINAS PERKEBUNAN	361.620.996,00	623.252,00	-	362.244.248,00
28	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM	256.435.692,00	-	- 96.618.775,00	159.816.917,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	7.825.929.351,00	74.533.800,00	(6.029.471.935,00)	1.870.991.216,00
30	SEKRETARIAT DPRD	68.869.001,00	626.550.487,00	-	695.419.488,00
31	KEC. BILALANG	14.011.119,00	-	-	14.011.119,00
32	KEC. BOLAANG TIMUR	1.159.364,00	-	-	1.159.364,00
33	KEC. DUMOGA UTARA	9.417.455,00	1.527.777,00	-	10.945.232,00
34	KEC. DUMOGA BARAT	206.250,00	5.536.342,00	- 206.250,00	5.536.342,00
35	KEC. DUMOGA TIMUR	17.285.674,00	-	-	17.285.674,00
36	KEC. LOLAK	7.503.562,55	49.775.000,00	-	57.278.562,55
37	KEC. POIGAR	196.294.053,00	762.972,00	- 2.299.000,00	194.758.025,00
38	KEC. SANGTOMBOLANG	3.475.482,00	-	- 3.475.482,00	-
39	KEC. LOLAYAN	2.646.460,00	1.044.205,00	-	3.690.665,00
40	KEC. PASSI TIMUR	41.131.951,00	-	-	41.131.951,00
41	KEC. PASSI BARAT	2.414.718,00	-	-	2.414.718,00
42	KEC. BOLAANG	66.290.718,00	646.250,00	-	66.936.968,00
43	KEC. DUMOGA TENGGARA	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00	-
44	KEC. DUMOGA TENGAH	9.728.974,00	705.619,00	- 9.728.974,00	705.619,00
45	KEC. DUMOGA	3.013.827,00	-	-	3.013.827,00
46	KECAMATAN PEMEKARAN LAINNYA	5.214.042.537,00	-	-	5.214.042.537,00
47	INSPEKTORAT DAERAH	166.005.881,00	33.024.494,00	- 166.005.881,00	33.024.494,00
48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.486.903.004,00	28.746.916,00	-	10.515.649.920,00
49	BADAN KEUANGAN DAERAH	15.875.138.785,00	4.360.389.239,00	(12.911.709.650,00)	7.323.818.374,00
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	219.577.500,00	35.832.500,00	(18.375.000,00)	237.035.000,00
51	PENGELOLA BMD	1.614.576.276,00	248.725.000,00	(1.120.504.171,00)	742.797.105,00
JUMLAH		213.736.093.240,26	36.508.953.729,57	(73.784.753.937,58)	176.460.293.032,25

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSAKSI DARI KAS DAERAH	TRANSAKSI KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4				5	6
1	-	-	-				-	-
JUMLAH		-	-				-	-

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	23.376.746,00	64.146.871.045,67	64.102.767.690,05	67.480.101,62
2	Pendapatan Diterima Dimuka	-	77.346.729,71	0,00	77.346.729,71
3	Utang Belanja	5.502.956.409,00	1.910.214.573,89	3.874.457.909,00	3.538.713.073,89
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		6.440.255.631,09	66.134.432.349,27	67.977.225.599,05	3.683.539.905,22

Lolak, 29 Agustus 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		0,00	0,00	0,00	0,00

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
1	Bidang Industri Ekonomi																	
	1. PDAM	LK PDAM	AUDITED	26.172.764.165,50	35.195.902.014,50	-	61.368.666.180,00	925.818.328,00	-	925.818.328,00	95.269.676.377,00	283.409.586,00	-	-	(35.110.238.111,00)	60.442.847.852,00	64,17	3.878.403.419.890,84

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) sebelum pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Industri Ekonomi								
	1. PDAM	LK PDAM	AUDITED	20.868.737.912,00	(6.607.973.740,00)	14.260.764.172,00	705.145.719,00	(494.195.569,00)	210.950.150,00

Lolak, 29 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI